



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR // TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut dengan PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Tujuan dari RKPD Tahun 2020 adalah:

- a. sebagai salah satu instrumen penjabaran RPJMD;
- b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- c. sebagai pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS Rencana APBD Tahun 2020; dan
- d. menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 yang disusun dengan berpedoman kepada:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional Tahun 2020; dan
 - b. RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

- (4) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Tema RKPD Tahun 2020 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”.

Pasal 6

RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016–2021 yang memuat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2020, yaitu:

- a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
- b. Pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas;
- c. Penyediaan infrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- d. Peningkatan daya saing sektor unggulan; dan
- e. Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020.
- (2) Dalam menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur dan menginputnya pada aplikasi e-planning sesuai hak akses yang diberikan.
- (3) Kepala Bapedalitbang memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum disahkan oleh Bupati.

Pasal 8

Perangkat Daerah agar menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 yang akan diajukan.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 9

Sistematika RKPD Tahun 2020 disusun dalam 7 (tujuh) Bab yang terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 10

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2020.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- (4) Kepala Bapedalitbang agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD Tahun 2020 secara berkala setiap triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Kepala Perangkat Daerah agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (6) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Juni 2019



Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 11

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana kerja ini terdiri dari 37 urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan melalui 30 Perangkat Daerah dan 15 Kantor Kecamatan. Buku ini merupakan ringkasan dan usulan pembangunan hasil pembangunan daerah dari level kampung, nagari, kecamatan hingga tingkat kabupaten oleh seluruh pemangku kepentingan, dan juga visi-misi kepala daerah.

RKPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembangunan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian perencanaan ini. Semoga RKPD ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamais, dan sejahtera. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, Juni 2019

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan

YOZKI WANDRI, S.Pi, MSi
NIP. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| I. PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-7 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-9 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-10 |
| 1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 | I-11 |
| II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1 Kondisi Umum Daerah | II-1 |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD | II-60 |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah | II-106 |
| III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-8 |
| IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 | IV-2 |
| 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020 | IV-14 |
| 4.3 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 | IV-16 |
| V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ... | VI-1 |
| 6.1 Indikator Kinerja Utama | VI-1 |
| 6.2 Indikator Kinerja Kunci | VI-2 |
| 6.3 Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan 2020 | VI-21 |
| VII. PENUTUP | VII-1 |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.... | II-3 |
| Tabel 2.2 | Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 | II-7 |
| Tabel 2.3 | Urutan Hasil Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 | II-8 |
| Tabel 2.4 | Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2017 | II-9 |
| Tabel 2.5 | Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2017 | II-11 |
| Tabel 2.6 | Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2016 – 2017 | II-13 |
| Matrik 2.1 | Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen | II-14 |
| Tabel 2.7 | Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija | II-15 |
| Tabel 2.8 | Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan | II-16 |
| Tabel 2.9 | Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Rakyat | II-17 |
| Tabel 2.10 | Populasi dan Produksi Daging Ternak | II-18 |
| Tabel 2.11 | Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 | II-18 |
| Tabel 2.12 | Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap | II-19 |
| Tabel 2.13 | Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan | II-20 |
| Tabel 2.14 | Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK Kabupaten Pesisir Selatan | II-21 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara | II-21 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM | II-22 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan Sektor Industri Kreatif Tahun 2015-2017 | II-23 |
| Tabel 2.18 | Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan | II-23 |
| Tabel 2.19 | Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan | II-23 |
| Tabel 2.20 | Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 | II-27 |
| Tabel 2.21 | Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Tahun 2013 – 2017 | II-28 |
| Tabel 2.22 | Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2012-2017 | II-28 |
| Tabel 2.23 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 | II-29 |
| Tabel 2.24 | Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun | |

| | | |
|------------|--|-------|
| | 2012-2017 | II-30 |
| Tabel 2.25 | Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017 | II-31 |
| Tabel 2.26 | Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017 | II-32 |
| Tabel 2.27 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja | II-35 |
| Tabel 2.28 | Perkembangan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-36 |
| Tabel 2.29 | Perkembangan Pendidikan Usia Dini Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-38 |
| Tabel 2.30 | Perkembangan Indikator Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-39 |
| Tabel 2.31 | Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-40 |
| Tabel 2.32 | Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-40 |
| Tabel 2.33 | Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-41 |
| Tabel 2.34 | Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-42 |
| Tabel 2.35 | Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-42 |
| Tabel 2.36 | Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-43 |
| Tabel 2.37 | Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-43 |
| Tabel 2.38 | Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-44 |
| Tabel 2.39 | Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 .. | II-44 |
| Tabel 2.40 | Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-45 |
| Tabel 2.41 | Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-46 |
| Tabel 2.42 | Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-46 |
| Tabel 2.43 | Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-47 |
| Tabel 2.44 | Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-47 |

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.45 | Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-48 |
| Tabel 2.46 | Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-48 |
| Tabel 2.47 | Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-49 |
| Tabel 2.48 | Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-49 |
| Tabel 2.49 | Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-49 |
| Tabel 2.50 | Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-50 |
| Tabel 2.51 | Perkembangan Indikator Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-50 |
| Tabel 2.52 | Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-51 |
| Tabel 2.53 | Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-51 |
| Tabel 2.54 | Perkembangan Indikator Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-52 |
| Tabel 2.54 | Perkembangan Indikator Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-52 |
| Tabel 2.55 | Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017 | II-52 |
| Tabel 2.56 | Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-52 |
| Tabel 2.57 | Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-53 |
| Tabel 2.58 | Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018 | II-54 |
| Tabel 2.59 | Struktur PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 | II-56 |
| Tabel 2.60 | Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2016 | II-59 |
| Tabel 2.61 | Perkembangan Investasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2018 | II-60 |
| Tabel 2.62 | Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan | II-61 |
| Tabel 2.63 | Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2019 | II-75 |
| Tabel 2.64 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1 Tahun 2018 | II-79 |

| | |
|--|--------|
| Tabel 2.65 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dan 2018 | II-81 |
| Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2 Tahun 2018 | II-86 |
| Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1 Tahun 2018 | II-88 |
| Tabel 2.68 Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan Tahun 2017-2018 | II-88 |
| Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2 Tahun 2018 | II-90 |
| Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Tahun 2018 ... | II-93 |
| Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 Tahun 2018 | II-94 |
| Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2 Tahun 2018 | II-97 |
| Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3 Tahun 2018 | II-98 |
| Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1 Tahun 2018 | II-99 |
| Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2 | II-100 |
| Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 | III-7 |
| Tabel 3.2 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 | III-8 |
| Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020 | III-11 |
| Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2018 | III-11 |
| Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020 | III-13 |
| Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2018 | III-13 |
| Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020 | III-14 |
| Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2018 | III-14 |
| Tabel 4.1 Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 | IV-5 |
| Tabel 4.2 Sinergitas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan | IV-17 |
| Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 | V-3 |
| Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2021 | VI-1 |
| Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 | VI-4 |
| Tabel 6.3 Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan | VI-22 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-------|
| Gambar 2.1 | Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan | II-3 |
| Gambar 2.2 | Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan | II-4 |
| Gambar 2.3 | Peta Kelerengan Kabupaten Pesisir Selatan | II-5 |
| Gambar 2.4 | Grafik Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2017 | II-26 |
| Gambar 2.5 | Sebaran Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 | II-27 |
| Gambar 2.6 | Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Tahun 2012-2017 | II-33 |
| Gambar 2.7 | Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Selatan | II-33 |
| Gambar 2.8 | Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017 | II-34 |
| Gambar 2.9 | Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017 | II-34 |
| Gambar 2.10 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat | II-55 |
| Gambar 2.11 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan | II-57 |
| Gambar 2.12 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Makanan | II-58 |
| Gambar 2.13 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Non Makanan | II-58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD ini memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan secara bertahap dengan prinsip bottom-up planning, dimana aspirasi dari masyarakat disalurkan dari bawah hingga atas yang diawali dari Musrenbang tingkat Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah / Antar Perangkat Daerah dan Musrenbang

tingkat Kabupaten. Setiap tahapan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipatif (*participative*)

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip Kestinambungan (*sustainable*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dilaksanakan.

3. Prinsip Keseluruhan(*holistic*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi PD, yang implementasinya tercermin dari:
 - a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
 - b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
 - d) Rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan;
 - e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
 - f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
 - g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
 - h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
 - i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;

2. Pendekatan Partisipatif; Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:
 - a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
 - b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
 - c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
 - d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
 - f) Pelibatan media;
 - g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
 - h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program;
3. Pendekatan Politis; Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2020 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan

oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa:

- a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala Perangkat Daerah membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2020;
 - b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2020;
 - c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD;
4. Pendekatan Top Down; Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:
- a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Sumatera Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
 - b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c) Konsisten dengan RTRW Daerah;
 - d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
 - e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya;

5. Pendekatan Bottom Up; Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya:
- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
 - c) Mempertimbangkan hasil Forum OPD.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan perencanaan strategis atau mengoperasionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk tercapainya rencana strategis jangka menengah.

RKPD sebagaimana dimaksud diatas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam penyusunannya harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Nasional dan Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi, sehingga terjadi sinergitas perencanaan antara Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan penjabatan tahun Keempat perencanaan dan pelaksanaan RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema Perencanaan Tahun 2020 adalah:

”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera.”

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

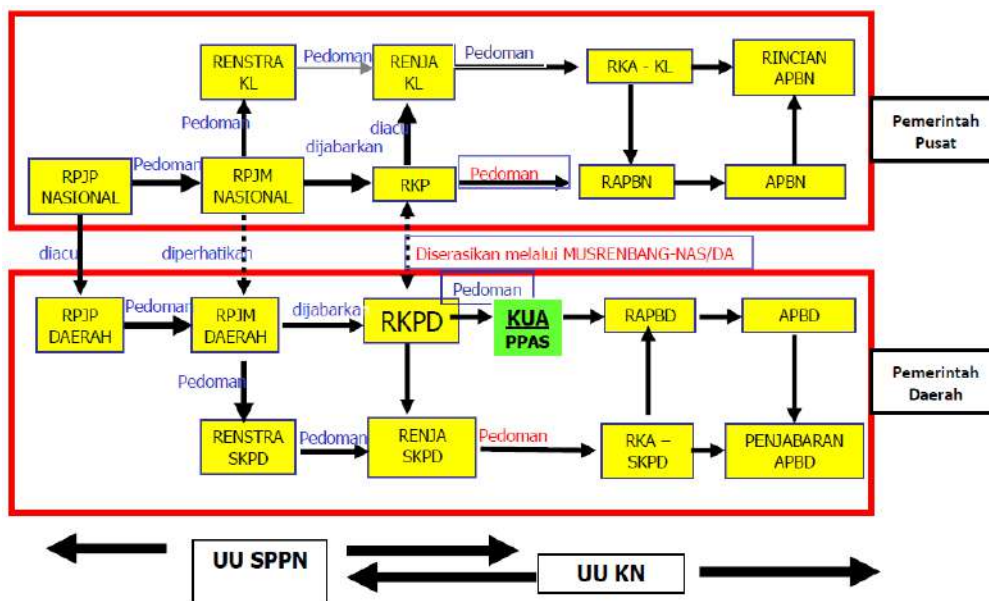
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perencanaan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sedangkan keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, RKPD Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut, RKPD akan diuraikan lebih spesifik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang pada akhirnya menjadi acuan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Mengacu pada bagan di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah;
4. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2020 tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam Revisi RPJMD 2016-2021 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD; dan
4. **Secara faktual**, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun dalam 7 (tujuh) BAB yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan; yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; meliputi Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi,

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;** menggambarkan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2018-2019), dan perkiraan untuk tahun 2020.
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 sesuai yang tercantum di dalam RPJMD.
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan menyusunnya dalam bentuk matrik berdasarkan bidang urusan pemerintahan.
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** berisi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : **Penutup**; Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Identifikasi dan pemahaman terhadap kondisi dan potensi daerah merupakan modal dasar yang utama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berkualitas dalam penyusunan perencanaan. Kondisi ini diperoleh melalui data tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek geografi merupakan aspek sumber daya alam yang ada berdasarkan tata letak suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan wilayah lainnya. Sedangkan aspek demografi menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia berdasarkan struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Aspek kesejahteraan masyarakat mengkaji tentang tingkat perekonomian dan kajian sosial masyarakat dalam suatu wilayah. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran tentang jenis-jenis layanan umum yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diperoleh masyarakat, serta aspek daya saing daerah menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan unggulan daerah yang selanjutnya menjadi nilai jual daerah dan dapat diperbandingkan secara relatif terhadap wilayah lain. Untuk itulah pada bab ini akan dibahas semua aspek-aspek tersebut, sehingga dapat menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

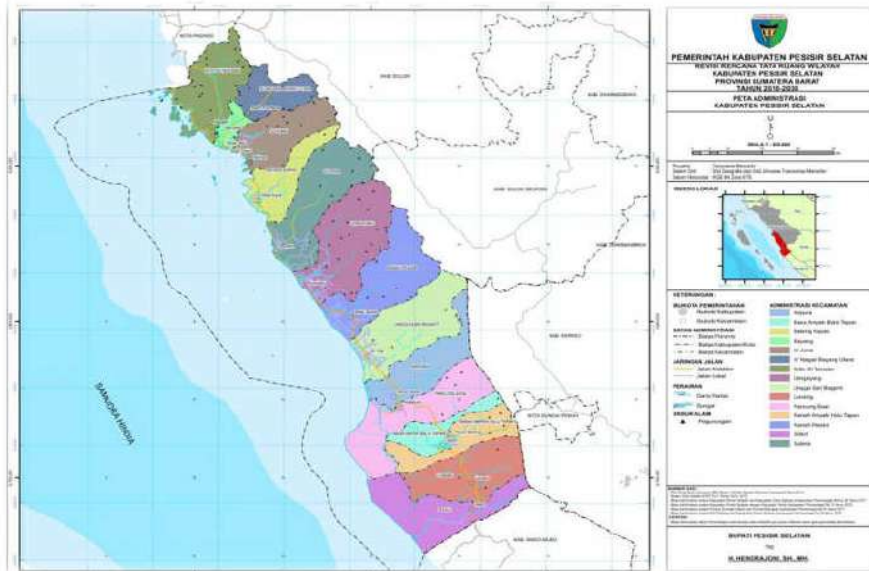
2.1.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat secara geografis terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, sebelah Timur berbatasan dengan deretan pegunungan Bukit Barisan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Painan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 Km dari Kota Padang – Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan gerbang Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Secara astronomis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28, 6' \text{ LS}$ dan $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18' \text{ BT}$.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Barat, yaitu $\pm 6.049.34 \text{ km}^2$, atau 14,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pesisir Selatan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

Gambar 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Ranperda Revisi RTRW Kab. Pessel 2010-2030

Sampai dengan tahun 2012, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 kecamatan. Pada Bulan Juli 2012, wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan berubah menjadi 15 kecamatan. Penambahan wilayah kecamatan ini akibat dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura. Selanjutnya Kecamatan Basa IV Balai Tapan menjadi Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan. Demikian juga Kecamatan Lunang Silaut, dimekarkan menjadi Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Demikian juga halnya dengan wilayah nagari, bertambah menjadi 182 nagari dari semula 76 nagari. Secara rinci jumlah dan luas nagari serta kampung per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

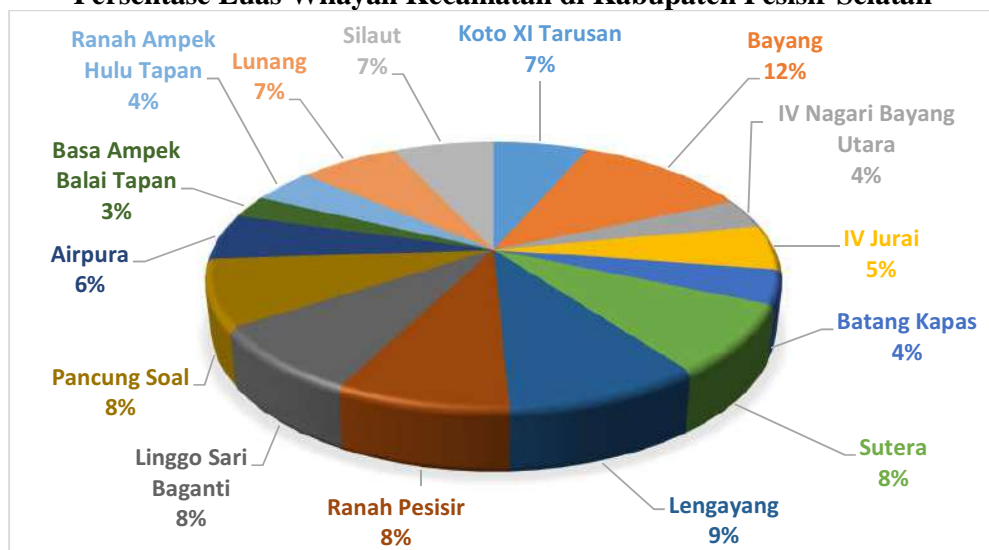
| No | Kecamatan | Luas (Km ²) | Jumlah Nagari | Jumlah Kampung |
|-----------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| A. | Wilayah Darat | 6.049,33 | 182 | 480 |
| 1. | Koto XI Tarusan | 437,37 | 23 | 51 |
| 2. | Bayang | 809,2 | 17 | 45 |
| 3. | IV Nagari Bayang Utara | 242,33 | 6 | 17 |

| | | | | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | IV Jurai | 368,19 | 20 | 52 |
| 5. | Batang Kapas | 277,54 | 9 | 29 |
| 6. | Sutera | 569,81 | 12 | 32 |
| 7. | Lengayang | 632,96 | 9 | 45 |
| 8. | Ranah Pesisir | 562,44 | 10 | 27 |
| 9. | Linggo Sari Baganti | 557,66 | 16 | 43 |
| 10. | Pancung Soal | 547,41 | 10 | 24 |
| 11. | Airpura | 380,10 | 10 | 20 |
| 12. | Basa Ampek Balai Tapan | 187,46 | 10 | 20 |
| 13. | Ranah Ampek Hulu Tapan | 281,96 | 10 | 20 |
| 14. | Lunang | 456,73 | 28 | 27 |
| 15. | Silaut | 466,45 | 10 | 28 |
| B. | Wilayah Laut | 84,312 | 84,312 | 84,312 |

Sumber: Ranperda Revisi RTRW Kab. Pessel 2010-2030, 2019

Dari Tabel 2.1 diatas, maka kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lengayang. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Kecamatan Batang Kapas. Selengkapnya persentase luas wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

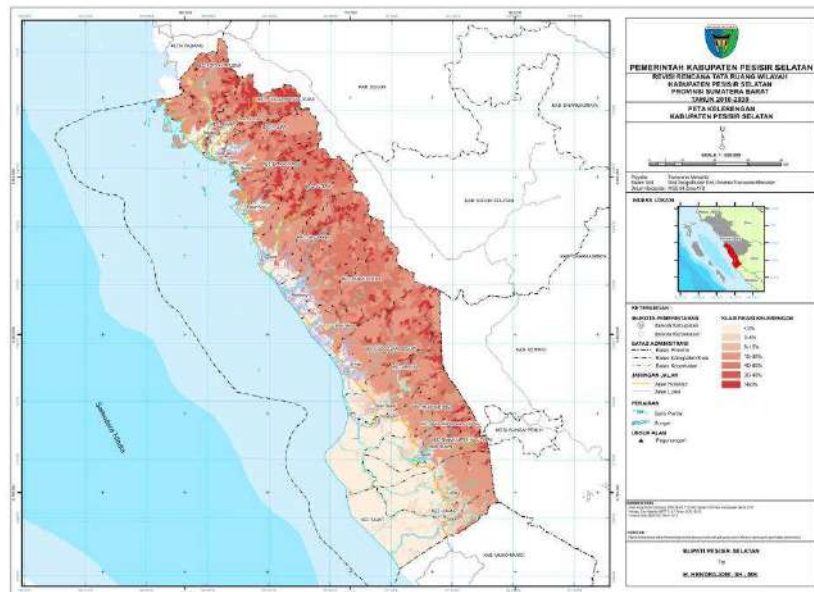


Sumber: Ranperda Revisi RTRW Kab. Pessel 2010-2030

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ketererangan yang beragam, mulai dari < 3% (datar) sampai >60% (sangat curam). Secara umum, kecamatan yang berada di wilayah utara sampai wilayah tengah memiliki ketererangan yang tinggi. Wilayah kecamatan yang memiliki ketererangan

yang rendah (datar), umumnya berada di bagian selatan.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Dari Gambar 2.3 diatas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kemiringan < 3% yang merupakan kemiringan datar, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 181.654 Ha (31,59%).
- 2) Kemiringan 4% – 8% yang merupakan kemiringan agak landai, terdapat dikecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Pacung Soal, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Sutera, Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan luas 5.102 Ha (0,89%).
- 3) Kemiringan 9% – 15% yang merupakan kemiringan Landai terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 24.562 Ha (4,27%).
- 4) Kemiringan 16 – 30% yang merupakan kemiringan agak curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 59.436 Ha (10,34%).

- 5) Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 304.235 Ha (52,91%).

Dengan kontur wilayah yang memiliki kelerengan tinggi di arah pegunungan Bukit Barisan, dan lahan rawa disepanjang pantai, maka luas wilayah yang bisa dibudidayakan relatif sedikit.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

A. Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.
3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sector unggulan dan bukan unggulan

Dalam penyusunan RKPD ini, analisa terhadap sektor-sektor unggulan daerah dilakukan dengan pendekatan *economic base*. Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan).

Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah menggunakan pendekatan *economic base* terdapat beberapa metode pengukuran yang umum digunakan, antara lain: *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift- Share*, Analisis Growth, dan Tipologi Klassen

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam melakukan analisis terhadap kondisi umum daerah dan perumusan strategi pembangunan yang tepat dan terarah, maka penting untuk diketahui potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah. Analisis kondisi umum daerah harus memunculkan analisis potensi utama ekonomi daerah secara sektoral bahkan sampai ke tingkat komoditi.

Potensi utama daerah dapat dilihat dari sudut pandang Keuntungan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari sektor/lapangan usaha secara relatif terhadap daerah regional dengan menggunakan Koefisien Lokasi (*Location Quotient*) atau dapat disingkat dengan LQ. Berikut disajikan tabel hasil perhitungan LQ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.

Tabel 2.2
Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

| NO | LAPANGAN USAHA | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | LQ |
|----|---|--|----------------------|------|
| | | Kab. Pesisir Selatan | Prop. Sumatera Barat | |
| A | Pertanian , Kehutanan dan Perikanan | 3.286.249,91 | 35.387.634,92 | 1,67 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 322.921,69 | 6.338.267,17 | 0,92 |
| C | Industri Pengolahan | 740.234,30 | 16.540.004,84 | 0,80 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.950,74 | 168.196,58 | 0,32 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.205,73 | 156.736,19 | 0,71 |
| F | Konstruksi | 878.642,87 | 14.075.895,58 | 1,12 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.088.007,23 | 24.279.260,45 | 0,81 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| H | Transportasi dan Pergudangan | 347.284,58 | 18.749.696,08 | 0,33 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 93.233,07 | 1.693.494,32 | 0,99 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 627.992,59 | 10.802.637,25 | 1,04 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 188.723,74 | 4.619.805,20 | 0,73 |
| L | Real Estate | 123.254,97 | 3.025.615,61 | 0,73 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 4.679,40 | 685.063,40 | 0,12 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | 511.309,66 | 8.659.075,43 | 1,06 |
| P | Jasa Pendidikan | 252.425,19 | 5.954.627,35 | 0,76 |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 112.926,32 | 2.154.588,55 | 0,94 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 91.811,27 | 2.673.386,50 | 0,62 |
| TOTAL | | 8.678.853,26 | 155.963.985,42 | 155.963.985,42 |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Tabel 2.3
Urutan Hasil Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

| NO | LAPANGAN USAHA | LQ |
|------------|--|------|
| A | Pertanian , Kehutanan dan Perikanan | 1,67 |
| F | Konstruksi | 1,12 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | 1,06 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,04 |
| NO | LAPANGAN USAHA | LQ |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 0,99 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,94 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,92 |
| C | Industri Pengolahan | 0,81 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,80 |
| P | Jasa Pendidikan | 0,76 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,73 |
| L | Real Estate | 0,73 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,71 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 0,62 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0,33 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,32 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,12 |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Lokasi (LQ) di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4

(empat) sektor/lapangan usaha yang memiliki keunggulan komparatif di Provinsi Sumatera Barat. Keempat sektor/lapangan tersebut merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Keempat sektor tersebut adalah :

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ = 1,67
- b. Konstruksi dengan nilai LQ = 1,12
- c. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ = 1,06
- d. Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ = 1,03

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Faktor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi daerah lain karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat antar daerah/wilayah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Berikut disajikan tabel hasil perhitungan nilai shift share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2016.

Tabel 2.4
Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2017 (dalam juta)

| No | LAPANGAN USAHA | Pertumbuhan Nasional | Proportionally Shift | Differential Shift | Δ Nilai Tambah |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| A | Pertanian , Kehutanan dan Perikanan | 168.904,85 | - 59.282,34 | - 8.890,87 | 100.731,63 |
| B | Pertambangan dan Penggalan | 16.628,28 | -13.092,71 | 5.779,44 | 9.315,01 |
| C | Industri Pengolahan | 38.543,41 | - 22.098,18 | - 3.133,40 | 13.311,83 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 148,42 | - 34,68 | 37,82 | 151,56 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 315,68 | - 80,13 | 16,53 | 252,08 |
| F | Konstruksi | 42.552,93 | 15.470,10 | 18.078,46 | 76.101,49 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 53.355,09 | 13.800,98 | 14.582,74 | 81.738,81 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| H | Transportasi dan Pergudangan | 16.944,37 | 6.003,77 | 4.768,37 | 27.716,51 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.462,60 | 1.654,69 | 2.951,77 | 9.069,07 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 29.969,17 | 22.627,61 | 10.182,09 | 62.778,87 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.810,04 | - 5.908,16 | - 193,99 | 3.707,89 |
| L | Real Estate | 6.211,44 | - 949,58 | 846,37 | 6.108,23 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 235,79 | - 46,12 | 42,76 | 232,43 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | 25.785,45 | - 3.947,67 | 3.162,36 | 25.000,14 |
| P | Jasa Pendidikan | 12.512,14 | 7.059,79 | - 3.123,66 | 16.448,27 |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 5.549,37 | 5.570,94 | - 2.854,30 | 8.266,01 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 4.473,93 | 1.602,37 | 1.357,42 | 7.433,71 |
| TOTAL | | 436.402,96 | - 31.649,31 | 43.609,89 | 448.363,54 |
| Persentase | | 97,33 | -7,06 | 9,73 | 100,00 |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2017, nilai PDRB sektoral Kabupaten Pesisir Selatan mengalami pertumbuhan (*positive growth*). Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 436.402,96 juta rupiah atau sebesar 5,45 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen Pertumbuhan Nasional, *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, dan *Differential shift (Competitive Shift)*.

Menurut perhitungan komponen Pertumbuhan Nasional, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 436.402,96 juta rupiah atau 97,33 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan hanyalah sebesar 448.363,54 juta rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu *Proportionally Shift (Mixed Shift)* dan *Differential shift (Competitive Shift)*.

Komponen *Proportionally Shift (Mixed Shift)* menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya *Proportionally Shift (Mixed Shift)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Proportionally Shift (Mixed Shift)* memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar -31.649,31 juta rupiah atau -7,06 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Pesisir

Selatan cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat. Sektor-sektor yang mendapat pengaruh *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, yaitu Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Sektor Jasa Lainnya.

Perhitungan komponen *Differential shift (Competitive Shift)* menghasilkan nilai keunggulan *Differential shift (Competitive Shift)* sebesar 43.609,89 juta rupiah atau 9,73 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan cukup kompetitif. Hal ini disebabkan karena agregat nilainya positif pada banyak sektor, adapun sektor yang nilainya negatif yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Analisis Growth

Analisis *Growth* digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Berikut disajikan table Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2016.

Tabel 2.5
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 – 2017

| NO | LAPANGAN USAHA | 2015 | 2016 | 2017 | Growth (%) | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | 2015-2016 | 2016-2017 |
| A | Pertanian , Kehutanan dan Perikanan | 3.116.574,26 | 3.185.518,28 | 3.286.249,91 | 2,21 | 3,16 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 296.634,08 | 313.606,68 | 322.921,69 | 5,72 | 2,97 |
| C | Industri Pengolahan | 681.307,33 | 726.922,47 | 740.234,30 | 6,70 | 1,83 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.541,86 | 2.799,18 | 2.950,74 | 10,12 | 5,41 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.603,92 | 5.953,65 | 6.205,73 | 6,24 | 4,23 |
| F | Konstruksi | 744.812,28 | 802.541,38 | 878.642,87 | 7,75 | 9,48 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 941.562,63 | 1.006.268,42 | 1.088.007,23 | 6,87 | 8,12 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 294.012,90 | 319.568,07 | 347.284,58 | 8,69 | 8,67 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 75.857,71 | 84.164,00 | 93.233,07 | 10,95 | 10,78 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 515.866,60 | 565.213,72 | 627.992,59 | 9,57 | 11,11 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 173.522,26 | 185.015,85 | 188.723,74 | 6,62 | 2,00 |
| L | Real Estate | 110.703,39 | 117.146,74 | 123.254,97 | 5,82 | 5,21 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 4.230,45 | 4.446,97 | 4.679,40 | 5,12 | 5,23 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | 462.302,57 | 486.309,52 | 511.309,66 | 5,19 | 5,14 |
| P | Jasa Pendidikan | 216.159,02 | 235.976,92 | 252.425,19 | 9,17 | 6,97 |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 99.175,46 | 104.660,31 | 112.926,32 | 5,53 | 7,90 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 75.347,33 | 84.377,56 | 91.811,27 | 11,98 | 8,81 |
| PDRB | | 7.816.214,05 | 8.230.489,72 | 8.678.853,26 | 5,30 | 5,45 |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan perhitungan analisis growth di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sektor lapangan usaha pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan atau *positive growth*.

4. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya daerah acuannya. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.

Tabel 2.6
Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor
Berdasarkan Tipologi Klassen
Tahun 2016 – 2017

| No | LAPANGAN USAHA | Kabupaten Pesisir Selatan (%) | | Propinsi Sumatera Barat (%) | | Kuadran |
|------------|--|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | |
| A | Pertanian , Kehutanan dan Perikanan | 3,16 | 37,87 | 3,44 | 22,69 | 2 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,97 | 3,72 | 1,13 | 4,06 | 3 |
| C | Industri Pengolahan | 1,83 | 8,53 | 2,26 | 10,61 | 4 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,41 | 0,03 | 4,06 | 0,11 | 3 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,23 | 0,07 | 3,96 | 0,10 | 3 |
| F | Konstruksi | 9,48 | 10,12 | 7,23 | 9,03 | 1 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,12 | 12,54 | 6,67 | 15,57 | 3 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 8,67 | 4,00 | 7,18 | 12,02 | 3 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,78 | 1,07 | 7,27 | 1,09 | 3 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 11,11 | 7,24 | 9,31 | 6,93 | 1 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,00 | 2,17 | 2,11 | 2,96 | 4 |
| L | Real Estate | 5,21 | 1,42 | 4,49 | 1,94 | 3 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 5,23 | 0,05 | 4,27 | 0,44 | 3 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | 5,14 | 5,89 | 4,49 | 5,55 | 1 |
| P | Jasa Pendidikan | 6,97 | 2,91 | 8,29 | 3,82 | 4 |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 7,90 | 1,30 | 10,63 | 1,38 | 4 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 8,81 | 1,06 | 7,20 | 1,71 | 3 |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan tipologi Klassen di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Sektor Maju dan tumbuh pesat* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 adalah sektor: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib.

- b. *Sektor maju tapi tertekan* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 adalah sektor : tidak ada
- c. *Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 adalah sektor : Pertambangan & Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya.
- d. *Sektor relatif tertinggal* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 adalah sektor: Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial.

Pengelompokan sektor berdasarkan tipologi Klassen di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat digambarkan dalam matrik berikut :

Matrik 2.1

Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen

| Kontribusi Sektoral | Pertumbuhan Sektoral | |
|---------------------|---|--|
| | $g_i \geq G_i$ | $g_i < G_i$ |
| $s_i \geq S_i$ | <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Informasi dan Komunikasi - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib | <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| $s_i < S_i$ | <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan & Penggalian - Pengadaan Listrik dan Gas - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Transportasi dan Pergudangan - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Real Estate - Jasa Perusahaan - Jasa Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa Keuangan dan Asuransi |

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

B. Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi pengembangan wilayah untuk Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa sektor yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB daerah maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan potensi daerah dalam pengembangan perekonomian daerah, dapat dilihat dari beberapa sub sector pendukung sebagai berikut:

a. Padi dan Palawija

Komoditi Padi dan Palawija yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Statistik daerah menunjukkan jenis komoditi padi dan jagung mengalami penurunan luas panen pada tahun 2016 diiringi dengan penurunan produktifitasnya. Hal ini disebabkan terdapatnya alih fungsi lahan pertanian dan terdapatnya jaringan irigasi yang mengalami rusak berat dan ringan di beberapa lokasi, serta pengairan sawah yang masih mengandalkan hujan. Analisis pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas dari komoditi padi dan palawija di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija

| No | Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) | | | | Produksi (Ton) | | | | Produktifitas Rata-rata |
|----|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Padi | 62.327.00 | 53.095.90 | 67.567.20 | 72.277.10 | 317.383.00 | 270.230.80 | 376.971.20 | 352.393.22 | 6.14 |
| 2 | Jagung | 12.916.00 | 19.845.70 | 20.828.60 | 18.109.10 | 108.894.00 | 158.159.50 | 169.101.60 | 135.484.43 | 9.50 |
| 3 | Ubi | 433.00 | 253.00 | 285.00 | 264.00 | 15.263.00 | 9.892.64 | 11.204.06 | 13.169.90 | 44.13 |
| 4 | Ubi Jalar | 24.00 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 1.657.00 | 410.01 | 81.00 | 48.00 | 33.70 |
| 5 | Kacang Kedelai | - | - | - | 10.00 | - | - | - | 17.90 | 0.60 |
| 6 | Kacang Tanah | 275.00 | 182.60 | 150.40 | 207.40 | 495.00 | 335.98 | 267.79 | 300.10 | 2.17 |
| 7 | Kacang Hijau | 44.00 | 30.40 | 30.10 | 17.70 | 51.22 | 35.38 | 34.01 | 20.00 | 1.38 |

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa dari beberapa komoditi yang di analisis terlihat bahwa jagung mengalami peningkatan produktivitas, komoditi padi, ubi, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan produktivitas, sedangkan kacang keledai untuk Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada produktivitas.

b. Sayuran dan Buah-Buahan

Komoditi sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup beragam, beberapa komoditi unggulan dapat terlihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Sayuran dan Buah-buahan

| No | Komoditi | Luas Panen | | | | Produksi (Ton) | | | | Produktifitas Rata-rata |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Sayuran | | | | | | | | | | |
| 1 | Cabe | 338.00 | 350.00 | 271.00 | 252.00 | 2.583.80 | 4.473.00 | 3.768.00 | 1.764.00 | 11.39 |
| 2 | Terong | 175.00 | 156.00 | 136.00 | 130.00 | 1.707.00 | 2.596.00 | 2.149.50 | 1.174.50 | 14.69 |
| 3 | Mentimun | 186.00 | 153.00 | 148.00 | 164.80 | 3.009.50 | 2.265.00 | 2.442.00 | 2.373.90 | 18.45 |
| 4 | Bawang Merah | 31.00 | 155.00 | 78.00 | 11.25 | 242.70 | 968.00 | 584.00 | 78.80 | 8.83 |
| 5 | Bayam | 123.00 | 117.00 | 102.00 | 131.80 | 636.00 | 592.00 | 510.00 | 658.80 | 6.05 |
| 6 | Kangkung | 144.00 | 139.00 | 131.00 | 88.00 | 735.00 | 695.00 | 655.00 | 440.00 | 6.06 |
| Buah-buahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Semangka | 559.00 | 543.00 | 326.00 | 167.50 | 10.857.00 | 10.900.00 | 6.520.00 | 3.350.00 | 24.44 |
| 2 | Rambutan | 30.736.00 | 16.387.00 | 11.794.00 | 15.248.00 | 27.804.00 | 30.706.00 | 29.034.00 | 3.478.60 | 1.41 |
| 3 | Mangga | 15.633.00 | 18.724.00 | 22.907.00 | 28.213.00 | 27.509.00 | 37.858.00 | 24.515.00 | 5.469.90 | 1.33 |
| 4 | Durian | 33.896.00 | 40.377.00 | 35.970.00 | 37.576.00 | 48.763.00 | 55.387.00 | 72.695.00 | 9.768.50 | 1.53 |
| 5 | Pisang | 170.789.00 | 155.925.00 | 154.280.00 | 128.849.00 | 172.818.00 | 146.279.00 | 155.847.00 | 13.490.20 | 0.73 |
| 6 | Jeruk | 13.634.00 | 21.762.00 | 36.871.00 | 42.176.00 | 51.865.00 | 2.177.00 | 11.451.20 | 15.509.20 | 1.28 |
| 7 | Duku | 7.074.00 | 1.049.00 | 2.898.00 | 1.128.00 | 6.141.00 | 1.612.00 | 3.648.00 | 240.60 | 1.10 |
| 8 | Belimbing | 451.00 | 415.00 | 528.00 | 491.00 | 323.00 | 210.00 | 895.00 | 80.60 | 0.81 |
| 9 | Salak | 13.078.00 | 3.375.00 | 4.832.00 | 3.660.00 | 2.508.00 | 487.00 | 1.622.00 | 95.80 | 0.19 |
| 10 | Manggis | 14.299.00 | 6.880.00 | 5.734.00 | 8.253.00 | 14.961.00 | 6.192.00 | 6.497.00 | 2.144.20 | 1.03 |
| 11 | Pepaya | 6.162.00 | 5.409.00 | 5.850.00 | 8.133.00 | 7.319.00 | 6.495.00 | 5.796.00 | 1.183.60 | 0.86 |
| 12 | Alpukat | 947.00 | 1.388.00 | 1.272.00 | 1.071.00 | 551.00 | 555.00 | 1.768.00 | 150.10 | 0.66 |

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

Dari komoditi sayuran terdapat penurunan produktivitas diseluruh komoditi. Sedangkan untuk komoditi buah-buahan, terdapat beberapa komoditi yang menjadi andalan seperti durian, pisang, jeruk dan manggis.

c. Perkebunan

Beberapa komoditi perkebunan yang dihasilkan merupakan komoditi unggulan daerah seperti karet, kelapa, kelapa sawit, gambir, dan kakao. Di samping itu, juga masih terdapat beberapa komoditi lainnya seperti kulit manis, cengkeh, kopi, pala dan pinang. Sebagian besar komoditi perkebunan ini belum dikembangkan dengan baik karena sifatnya masih bersifat perkebunan rakyat dengan kemampuan pengembangan pengelolaan yang masih terbatas.

Jika dilihat dari luas tanamnya, komoditi kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu dari 30.176 Ha pada tahun 2014 menjadi

38.286 Ha di tahun 2017. Hal ini dapat diartikan adanya potensi yang besar dan minat yang tinggi dari masyarakat untuk mengembangkan komoditi ini.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Rakyat

| No | Jenis Komoditi | Produktifitas (Ton/Ha) | | | | | Produksi Rata-Rata |
|----|----------------|------------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Karet | 0.83 | 1.40 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| 2 | Kelapa | 0.80 | 1.20 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.98 |
| 3 | Kelapa Sawit | 2.11 | 6.00 | 3.75 | 5.10 | 5.99 | 3.79 |
| 4 | Gambir | 0.35 | 0.80 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| 5 | Kakao | 0.71 | 0.80 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.65 |
| 6 | Kulit Manis | 1.71 | - | 0.96 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
| 7 | Cengkeh | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.42 |
| 8 | Kopi | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
| 9 | Pala | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| 10 | Pinang | 0.48 | 0.40 | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.44 |

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

d. **Peternakan**

Sumbangan subsektor peternakan terhadap pertumbuhan perekonomian Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa jenis ternak yang umum dikembangkan masyarakat antara lain sapi, kambing, kerbau, dan unggas.

Sapi lokal pesisir dan ayam ras pedaging memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan daging di Pesisir Selatan dan Kabupaten tetangga seperti Bengkulu dan Jambi. Untuk tahun 2018 ini, jumlah populasi sapi sudah tercatat 82.604 ekor dengan produksi daging sapi sebesar 1.367.563 kg, sedang populasi ayam ras pedaging sebanyak 1.692.500 ekor dengan produksi daging ayam sebesar 1.890.223 kg, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Populasi dan Produksi Daging Ternak

| No | Jenis | Populasi Ternak (Ekor) | | | | Produksi Daging (kg/s) | | | | | |
|----|-------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Sapi | 79.705 | 80.146 | 80.976 | 81.786 | 82.604 | 1.171.021 | 1.173.571 | 1.340.616 | 1.354.022 | 1.367.563 |
| 2 | Kuda | 36 | 21 | 19 | 15 | | - | - | - | - | |
| 3 | Kambing | 44.362 | 41.669 | 40.451 | 40.856 | 37097 | 39.878 | 40.073 | 44.513 | 44.958 | 45.407 |
| 4 | Kerbau | 8.204 | 8.271 | 8.430 | 8.506 | 8.591 | 47.289 | 46.204 | 40.158 | 40.520 | 40.925 |
| 5 | Ayam Buras | 779.112 | 779.819 | 780.056 | 787.857 | 799.674 | 835.598 | 836.356 | 955.743 | 965.301 | 979.780 |
| 6 | Ayam Ras Pedaging | 261.600 | 552.500 | 1.671.600 | 1.734.200 | 1.692.500 | 209.345 | 442.138 | 1.818.172 | 1.886.261 | 1.890.223 |
| 7 | Ayam Ras Petelur | 94.540 | 85.300 | 90.400 | 97.500 | 98.475 | 38.998 | 35.186 | 70.578 | 71.162 | 71.873 |
| 8 | Itik/Itik Manila | 147.499 | 147.921 | 154.050 | 157.266 | 165.994 | 60.843 | 61.017 | 90.586 | 92.477 | 93.864 |

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan, 2018

e. Kehutanan

Pesisir Selatan merupakan daerah yang di satu sisinya ditutupi oleh hutan dan sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Lebih kurang 70% dari luas wilayahnya merupakan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW). Hutan TNKS merupakan bagian terbesar, yaitu sebesar 51, 41%, sedangkan sisanya adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam wisata dengan luas yang hamper sama seperti terlihat pada tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11
Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

| No | Jenis Hutan | Luas Area (km ²) | % |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| A. | Kawasan Hutan | | |
| 1. | KSA/KPA) | 2.596,7 | 42.92 |
| 2. | Hutan Lindung (HL) | 226,74 | 3.75 |
| B. | Kawasan Budidaya | | |
| 1. | Hutan Produksi Tetap | 39,93 | 0.66 |
| 2. | Hutan Produksi Konversi (HPK) | 312,99 | 5.17 |
| 3. | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 433,02 | 7.16 |
| C. | Area Penggunaan Lain | | |
| | Jumlah/ Total | 6.049,43 | 100.00 |

Sumber: Ranperda Revisi RTRW Kab. Pessel, 2019

f. Perikanan Darat dan Laut

Secara geografis, di sebelah barat Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan panjang pantai ± 234 Km. Terdapat beberapa pembangunan sentra penangkapan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan, Kecamatan Sutera yang telah memiliki Pelabuhan Perikanan Sutera, Kecamatan Lengayang yang telah dilengkapi dengan Pelabuhan Perikanan Kambang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Tabel 2.12
Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (Ton)

| No | Jenis | Produksi Perikanan (ton) | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Perikanan Tangkap | 37.208.06 | 36.385.44 | 34.439.09 | 37.069.00 | 38.319.00 |
| 2 | Perikanan Budidaya | 11.852.00 | 10.327.41 | 12.210.00 | 12.714.00 | 13.176.00 |
| | Jumlah | 49.060.06 | 46.712.85 | 46.649.09 | 49.783.00 | 51.495.00 |

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2018

Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yaitu 11.852 ton pada tahun 2014 menjadi 13.176 ton pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kembali bergairahnya minat masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan yang tentu saja tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk penyediaan sarana prasarana penunjang seperti pembuatan kolam dan keramba jaring apung serta pelatihan dan pemberian benih ikan unggul bagi pelaku perikanan.

Demikian juga halnya dengan produksi perikanan tangkap yang mengalami kenaikan produksi dari 37.069 ton pada tahun 2017, menjadi 38.319 ton pada tahun 2018.

Di samping memproduksi ikan segar, masyarakat juga memproduksi ikan kering, antara lain ikan teri dan ikan asin. Khusus untuk ikan teri, terutama ikan teri super merupakan salah satu produk olahan ikan andalan karena selain rasanya yang gurih, teri yang dihasilkan juga tergolong berkualitas baik.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini guna mendukung amanat Nawacita RPJMN 2015-2019, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025, bahwa secara perwilayahan, destinasi pariwisata dibagi menjadi 4 (empat) destinasi utama pariwisata kabupaten (DUPK), seperti terlihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.13
Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

| WILAYAH DESTINASI | Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK) | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) | Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) |
|--|--|--|--|
| DUPK Carocok dan Sekitarnya | Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai | Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera | |
| DUPK Mandeh dan Sekitarnya | Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan | Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara | |
| DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya | Pasir Putih, Kecamatan Lengayang | Kecamatan Ranah Pesisir | Kecamatan Linggosari Baganti |
| DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya | Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang | Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan | Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan |

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Beragam potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, seperti wisata alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia (*event*) perlu dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan perekonomian daerah. Sebaran daya tarik wisata dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14

Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Wilayah Destinasi | Daya Tarik Wisata | | | |
|----|--|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Wisata Alam | Wisata Budaya | Wisata Hasil Buatan Manusia | Wisata Lingkungan |
| 1 | DUPK Carocok dan Sekitarnya | 21 | 1 | 2 | - |
| 2 | DUPK Mandeh dan Sekitarnya | 15 | 4 | 2 | - |
| 3 | DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya | 6 | 2 | - | - |
| 4 | DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya | 2 | 3 | - | 1 |

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Dengan gencarnya promosi dan penyebaran informasi tentang pengembangan kepariwisataan di Pesisir Selatan, maka timbul minat kunjungan wisatawan ke daerah ini. Terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2.15

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

| No | Jenis | Kunjungan Wisatawan (orang) | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Wisatawan Nusantara | 587.056 | 1.544.684 | 2.000.000 | 1.980.000 | 2.400.000 | 2.479.841 |
| 2 | Wisatawan Mancanegara | 578 | 1.551 | 1.600 | 1.500 | 1.700 | 1.623 |
| | Jumlah | 587.634 | 1.546.235 | 2.001.600 | 1.981.500 | 2.401.700 | 2.481.464 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2018

3. Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi di 15 Kecamatan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan sangat dibutuhkan. Hal ini menyangkut kegiatan ekonomi disetiap kecamatan tidak sebanding dengan sarana pasar yang dimiliki. Oleh karena itu pada tahun yang akan datang pemerintah daerah berkewajiban untuk merencanakan dan menganggarkan program peningkatan pembangunan pasar di wilayah Pesisir Selatan guna memenuhi kebutuhan sarana pasar tersebut. Capaian pembangunan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Perkembangan sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Pasar | Unit | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| 2 | Jumlah Koperasi | Koperasi | 295 | 297 | 333 | 275 | 300 |
| 3 | Jumlah UMKM | Unit | 4.440 | 4.440 | 4.444 | 5.778 | 6.968 |

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator yang mendukung kegiatan perdagangan antara lain:

- a. Indikator pertama, pasar merupakan sarana penunjang terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat terjadi transaksi jual beli terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak adanya pembangunan pasar yang dilakukan, tetapi yang dilaksanakan adalah revitalisasi pasar yang telah ada untuk menampung kenaikan jumlah pedagang.
- b. Indikator perdagangan kedua, koperasi pada tahun 2015 yang berjumlah 299 unit berkurang menjadi 300 unit pada tahun 2018.
- c. Indikator perdagangan yang ketiga yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 berjumlah 4.440 buah bertambah menjadi 6.968 buah pada tahun 2018.

4. Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Industri kreatif masih potensial untuk digarap, dengan menjadikan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas dan didukung oleh kemajuan teknologi. Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki keragaman seni dan budaya menjadikannya sebagai sumber potensi perekonomian. Hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah :

Tabel 2.17
Perkembangan Sektor Industri Kreatif
Tahun 2015-2017

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | |
|----|-------------------------------------|--------|-------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Cakupan bina kelompok perajin | Persen | - | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Cakupan bina kelompok seni & budaya | Persen | | | |

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tahun 2018

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Adapun tingkat resiko bencana dan potensi bencana yang dimaksud adalah:

Tabel 2.18
Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Jenis Bahaya | Bahaya | | Kerentanan | | Kapasitas | | Resiko | |
|-----|------------------------------|--------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | Indeks | Tingkat | Indeks | Tingkat | Indeks | Tingkat | Tingkat | tingkat |
| 1. | Banjir | 0,782 | Tinggi | 0,686 | Tinggi | 0,249 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 2. | Gelombang ekstrim dan abrasi | 0,756 | Tinggi | 0,549 | Sedang | 0,255 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 3. | Gempa bumi | 0,531 | Sedang | 0,748 | Tinggi | 0,262 | Rendah | Rendah | Sedang |
| 4. | Kekeringan | 0,659 | Sedang | 0,903 | Tinggi | 0,225 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 5. | Cuaca ekstrim | 0,817 | Tinggi | 0,746 | Tinggi | 0,229 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 6. | Tanah longsor | 0,561 | Sedang | 0,617 | Sedang | 0,237 | Rendah | Rendah | Sedang |
| 7. | Kebakaran hutan | 0,615 | Sedang | 0,77 | Tinggi | 0,225 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 8. | Tsunami | 0,893 | Tinggi | 0,683 | Tinggi | 0,284 | Rendah | Rendah | Tinggi |
| 9. | Epidemi wabah penyakit | 0,333 | Rendah | 0,726 | Tinggi | 0,21 | Rendah | Rendah | Sedang |
| 10. | Gagal teknologi | 0,333 | Rendah | 0,761 | Tinggi | 0,21 | Rendah | Rendah | Sedang |

Sumber data: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

Tabel 2.19
Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Lokasi Bencana | Gempa | Tsunami | Banjir | Longsor | Puting Beliuang | Gunung Api | Kebakaran |
|----|-----------------|-------|---------|--------|---------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | Koto XI Tarusan | √ | √ | √ | √ | | | √ |
| 2 | Bayang | √ | √ | √ | | | | √ |
| 3 | Bayang Utara | √ | | | √ | | | √ |
| 4 | IV Jurai | √ | √ | | √ | | | √ |
| 5 | Batang Kapas | √ | √ | √ | | | | √ |
| 6 | Sutera | √ | √ | √ | | | | √ |
| 7 | Lenggayang | √ | √ | √ | | | | √ |
| 8 | Ranah Pesisir | √ | √ | √ | | | | √ |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| 9 | Linggosaribaganti | √ | √ | √ | √ | | | √ |
| 10 | Pancung Soal | √ | √ | √ | √ | | | √ |
| 11 | Airpura | √ | √ | √ | | | | √ |
| 12 | BAB Tapan | √ | | √ | | | √ | √ |
| 13 | RAHUL Tapan | √ | | √ | | | √ | √ |
| 14 | Lunang | √ | | √ | | | | √ |
| 15 | Silaut | √ | √ | √ | | | | √ |

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

1. Gempa Bumi dan Tsunami

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif, yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali. Selain terletak di antara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera yaitu patahan semangka. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gempa bumi yang menimbulkan efek masif kerusakan terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Berdasarkan riset terakhir para ahli terhadap kondisi zona subduksi Mentawai diketahui bahwa tumbukan lempeng euroasia dan indo-australia telah terkunci (tidak bergerak lagi), sehingga potensi gempa berskala besar yang berimbas pada daerah di sekitarnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selain kerusakan akibat gempa, hal lain yang menjadi ancaman adalah terjadinya tsunami yang diprediksi akan menyapu kawasan pantai hingga radius 5 (lima) kilometer dari bibir pantai.

2. Banjir

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial

akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

3. Tanah Longsor

Kabupaten Pesisir Selatan berada pada daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam $\pm 50\%$ dari luas wilayah, dengan struktur tanah yang sangat rawan terhadap longsor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah longsor antara lain:

- a. Tingginya curah hujan
- b. Penebangan pohon yang sembarangan
- c. Peladangan yang sembarangan dan berpindah – pindah
- d. Pembabatan hutan yang tidak semestinya
- e. Tidak ditanaminya kembali hutan yang telah gundul (reboisasi)

4. Abrasi Pantai dan Sungai

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada disepanjang pantai Sumatera ± 234 Km dan kemiringan pinggir pantai sangat curam dengan gelombang pasang yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap abrasi pantai. Akibat dari terjadinya abrasi pantai tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap pemukiman masyarakat disepanjang pantai, dengan perbedaan ketinggian antara permukaan laut dengan pemukiman masyarakat sangat kecil yaitu ± 3 m. Abrasi pantai adalah bencana alam yang terjadi diwilayah sekitar pantai yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya perubahan musim
- b. Tingginya gelombang pasang
- c. Berkurangnya kawasan hijau disepanjang garis pantai (hutan bakau)
- d. Permukiman penduduk yang semakin dekat dengan pinggir pantai

5. Kebakaran

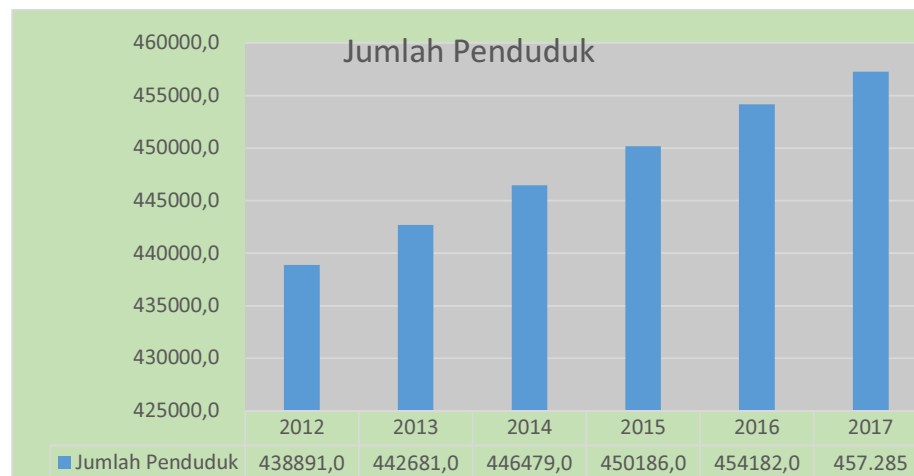
Kebakaran sering terjadi di pemukiman penduduk dan lahan perkebunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Tingginya tingkat kebakaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Padatnya rumah penduduk dengan akses jalan yang tidak memadai dalam melakukan pemadamam api pada beberapa titik-titik lokasi di kecamatan.
- b. Rata-rata rumah dan pertokoan tidak melakukan pemeriksaan ulang atau penggantian instalasi listrik baru untuk rumah atau pertokoan yang pemakaiannya lebih dari 15 Tahun,.
- c. Pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran dan adanya beberapa wilayah yang mempunyai lahan - lahan gambut.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012 sebanyak 438.891 jiwa dan pada tahun 2017, jumlah penduduk menjadi 457.285 jiwa. Berikut disajikan grafik perkembangan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017.

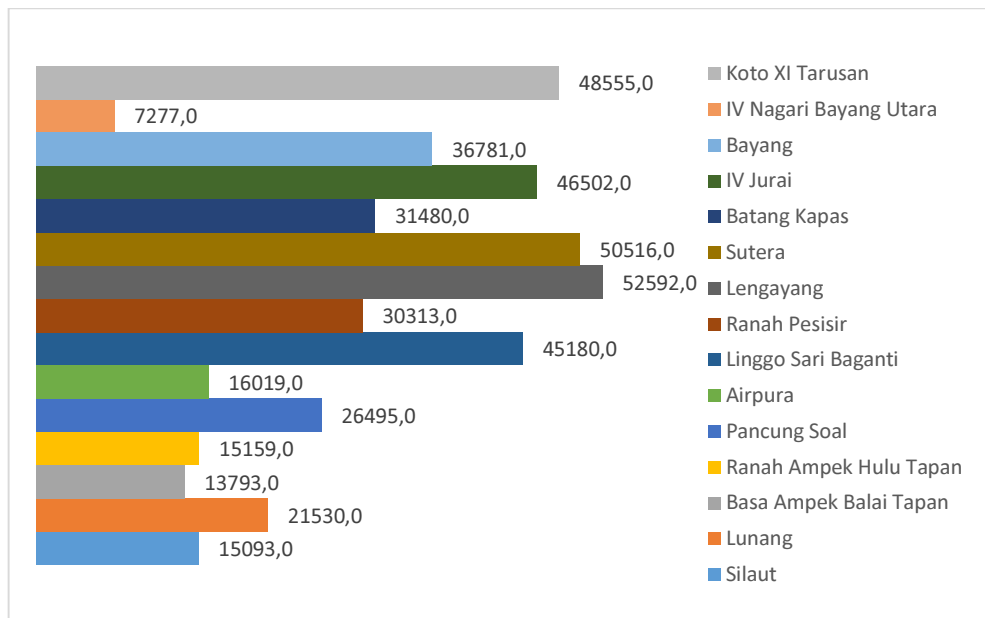
Gambar 2.4
Grafik Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2017



Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Dari gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir, sebaran penduduk Kabupaten Pesisir per Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.5
Sebaran Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017



Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Tabel 2.20
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Silaut | 7.866 | 7.207 | 15.073 |
| 2 | Lunang | 10.975 | 10.555 | 21.530 |
| 3 | Basa Ampek Balai Tapan | 6.849 | 6.944 | 13.793 |
| 4 | Ranah Ampek Hulu Tapan | 7.583 | 7.576 | 15.159 |
| 5 | Pancung Soal | 13.436 | 13.059 | 26.495 |
| 6 | Airpura | 8.073 | 7.946 | 16.019 |
| 7 | Linggo Sari Baganti | 22.581 | 22.599 | 45.180 |
| 8 | Ranah Pesisir | 14.745 | 15.568 | 30.313 |
| 9 | Lengayang | 25.722 | 26.870 | 52.592 |
| 10 | Sutera | 25.204 | 25.312 | 50.516 |
| 11 | Batang Kapas | 15.471 | 16.009 | 31.480 |
| 12 | IV Jurai | 23.022 | 23.480 | 46.502 |
| 13 | Bayang | 17.683 | 19.098 | 36.781 |
| 14 | IV Nagari Bayang Utara | 3.475 | 3.802 | 7.277 |
| 15 | Koto XI Tarusan | 24.078 | 24.477 | 48.555 |
| | Jumlah | 226.763 | 230.502 | 457.265 |

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Berdasarkan jumlah penduduk dari data BPS sampai dengan tahun 2017, dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten sebesar 0,8% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk secara tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Tahun 2013 – 2017

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 442.681 | 446.479 | 450.186 | 454.182 | 457.265 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,88 | |

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2012 - 2013 mengalami peningkatan rata-rata 1,56 %. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan meningkat sebesar 1,37 % dari 5,82 menjadi 5,90 pada tahun 2013. Tetapi dalam kurun waktu tahun 2014 dan 2016 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 dimana penurunannya mencapai 7,50% dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan hanya 5,30. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan tetapi justru terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dan bahkan secara nasional. Faktor penyebab perlambatan tersebut antara lain; menurunnya belanja pemerintah secara umum, rendahnya laju investasi dan menurunnya konsumsi rumah tangga. Tingginya inflasi bahan makanan tentu menyedot dan menghabisi porsi pendapatan masyarakat untuk dapat menyisihkan porsi belanja barang-barang non-makanan. Berikut tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 - 2017.

Tabel 2.22
Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2012-2017

| No | Tahun | Pertumbuhan (%) |
|----|------------|-----------------|
| 1 | Tahun 2012 | 5,82 |
| 2 | Tahun 2013 | 5,90 |
| 3 | Tahun 2014 | 5,80 |
| 4 | Tahun 2015 | 5,73 |
| 5 | Tahun 2016 | 5,30 |
| 6 | Tahun 2017 | 5,42 |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha, pengeluaran yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan menurut lapangan usaha, tampak bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami perlambatan, yaitu dari sebesar 6,31% tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 5,30%, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Persen)

| Lapangan Usaha | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------|------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 4,84 | 3,71 | 5,55 | 5,55 | 2,21 | 3,16 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 3,55 | 5,50 | 3,88 | 4,64 | 5,72 | 2,97 |
| 3. Industri Pengolahan | 7,33 | 4,83 | 6,32 | 4,42 | 6,70 | 1,83 |
| 4. Pengadaan Listrik & Gas | 0,03 | (2,85) | 11,57 | 4,29 | 10,12 | 5,41 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 7,16 | 4,25 | 4,23 | 4,18 | 6,24 | 4,23 |
| 6. Konstruksi | 7,01 | 12,73 | 6,03 | 6,13 | 7,75 | 9,48 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,48 | 7,48 | 8,76 | 5,93 | 6,98 | 8,02 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 7,92 | 9,07 | 8,65 | 7,98 | 8,69 | 8,67 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,79 | 2,34 | 3,63 | 7,11 | 10,95 | 10,78 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 11,09 | 9,98 | 5,96 | 8,58 | 9,76 | 10,91 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,75 | 6,73 | 2,78 | 3,81 | 6,62 | 2,00 |
| 12. Real Estate | 5,63 | 5,93 | 5,95 | 5,79 | 5,82 | 5,21 |
| 13. Jasa Perusahaan | 5,47 | 5,52 | 5,38 | 5,40 | 5,12 | 5,23 |

| Lapangan Usaha | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,58 | 2,96 | 1,23 | 3,33 | 5,19 | 5,14 |
| 15. Jasa Pendidikan | 0,39 | 8,31 | 6,36 | 8,16 | 9,17 | 6,97 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,86 | 7,18 | 7,73 | 7,27 | 5,53 | 7,90 |
| 17. Jasa Lainnya | 4,52 | 5,18 | 5,18 | 5,22 | 11,98 | 8,81 |
| PDRB PESISIR SELATAN | 5,82 | 5,90 | 5,80 | 5,73 | 5,30 | 5,42 |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan termasuk 10 terendah di Sumatera Barat walaupun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Seperti halnya dengan tahun sebelumnya, struktur perekonomian Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha tahun 2016 masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 40,55%, Perdagangan Besar & Eceran: Reparasi Mobil-Sepeda Motor 11,57%, serta Konstruksi sebesar 9,51%, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012-2017 (Persen)

| KABUPATEN/KOTA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|
| 1. Kepulauan Mentawai | 5,37 | 5,77 | 15,57 | 5,20 | 5,02 | 5,13 |
| 2. Pesisir Selatan | 5,82 | 5,90 | 5,80 | 5,73 | 5,33 | 5,42 |
| 3. Solok | 6,43 | 5,63 | 5,79 | 5,44 | 5,31 | 5,33 |
| 4. Sijunjung | 6,15 | 6,14 | 6,02 | 5,69 | 5,26 | 5,27 |
| 5. Tanah Datar | 5,61 | 5,85 | 5,79 | 5,33 | 5,03 | 5,12 |
| 6. Padang Pariaman | 5,94 | 6,20 | 6,05 | 6,14 | 5,52 | 5,59 |
| 7. Agam | 6,18 | 6,15 | 5,92 | 5,52 | 5,41 | 5,43 |
| 8. Lima Puluh Kota | 6,15 | 6,23 | 5,98 | 5,61 | 5,32 | 5,34 |
| 9. Pasaman | 6,01 | 5,82 | 5,87 | 5,34 | 5,07 | 5,09 |
| 10. Solok Selatan | 6,04 | 6,13 | 5,90 | 5,35 | 5,12 | 5,15 |
| 11. Dharmasraya | 6,19 | 6,51 | 6,34 | 5,75 | 5,42 | 5,45 |
| 12. Pasaman Barat | 6,33 | 6,40 | 6,04 | 5,70 | 5,33 | 5,35 |
| 13. Kota Padang | 6,16 | 6,66 | 6,46 | 6,41 | 6,22 | 6,23 |
| 14. Kota Solok | 6,76 | 6,44 | 6,01 | 5,97 | 5,76 | 5,78 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15. Kota Sawahlunto | 5,53 | 6,11 | 6,08 | 6,03 | 5,73 | 5,75 |
| 16. Kota Padang Panjang | 5,97 | 6,29 | 6,08 | 5,91 | 5,80 | 5,81 |
| 17. Kota Bukittinggi | 6,55 | 6,28 | 6,20 | 6,14 | 6,05 | 6,08 |
| 18. Kota Payakumbuh | 6,62 | 6,56 | 6,47 | 6,19 | 6,09 | 6,12 |
| 19. Kota Pariaman | 6,13 | 6,06 | 5,99 | 5,79 | 5,59 | 5,62 |
| PROVINSI | 6,31 | 6,08 | 5,88 | 5,52 | 5,26 | 5,29 |

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2018

Tabel 2.25

**Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017**

| Kategori | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 41,43 | 41,27 | 41,67 | 42,19 | 41,17 | 40,45 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 3,91 | 4,04 | 4,02 | 4,02 | 3,80 | 3,60 |
| 3. Industri Pengolahan | 8,69 | 8,29 | 8,17 | 7,99 | 8,07 | 7,69 |
| 4. Pengadaan Listrik & Gas | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 6. Konstruksi | 8,81 | 9,34 | 9,38 | 9,60 | 9,90 | 10,22 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,10 | 10,88 | 10,93 | 11,20 | 11,67 | 12,16 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 3,49 | 3,57 | 3,68 | 3,68 | 3,63 | 3,64 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,17 | 1,22 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 6,01 | 5,90 | 5,78 | 5,40 | 5,44 | 5,74 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,32 | 2,31 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,18 |
| 12. Real Estate | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,36 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,86 | 6,80 | 6,35 | 5,86 | 5,94 | 5,99 |
| 15. Jasa Pendidikan | 2,63 | 2,79 | 2,84 | 2,93 | 3,05 | 3,19 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,24 | 1,27 | 1,28 | 1,22 | 1,21 | 1,23 |
| 17. Jasa Lainnya | 0,59 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,11 | 1,16 |
| PDRB PESISIR SELATAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

2.1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis tahun 2015, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam hal ini IPM bisa menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode baru pada tahun 2017 adalah 68,74. Jika dilihat dari masing-masing komponen tampak Angka Harapan Hidup saat lahir adalah sebesar 70,23 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,06 tahun, Rata-rata Lama sekolah 8,13 tahun dan Pengeluaran per Kapita Rp. 8.819.000,- seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012-2017

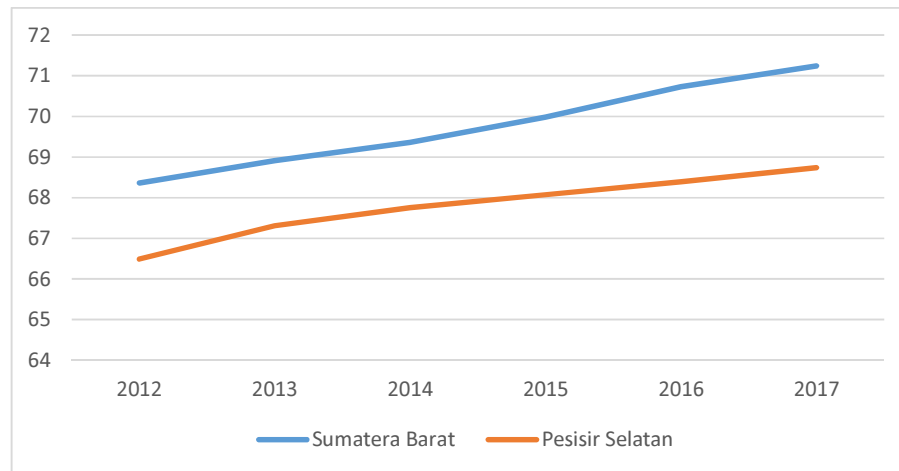
| NO | KOMPONEN IPM | SATUAN | TAHUN | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Angka Harapan Hidup Saat Lahir | Tahun | 69,36 | 69,43 | 69,46 | 69,96 | 70,11 | 70,23 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,49 | 12,83 | 13,02 | 13,04 | 13,05 | 13,06 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,79 | 8,05 | 8,10 | 8,11 | 8,12 | 8,13 |
| 4. | Pengeluaran per Kapita | (Rp.000) | 8.131 | 8.232 | 8.367 | 8.411 | 8.605 | 8.819 |
| INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN | | | 66,49 | 67,31 | 67,75 | 68,07 | 68,39 | 68,74 |
| PERTUMBUHAN IPM | | | 1,05 | 1,23 | 0,65 | 0,47 | 0,47 | 0,51 |

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Pesisir Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2017. IPM Pesisir Selatan meningkat dari 66,49 pada tahun 2012 menjadi 68,74 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Pesisir Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,73 persen per tahun. Pada periode 2015-2017, IPM Sumatera Barat tumbuh 0,90 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2012-2015.

Kondisi IPM Pesisir Selatan dilihat di tingkat provinsi Sumatera Barat termasuk 10 terendah dan jauh dibawah IPM Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.6
Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi
Tahun 2012-2017

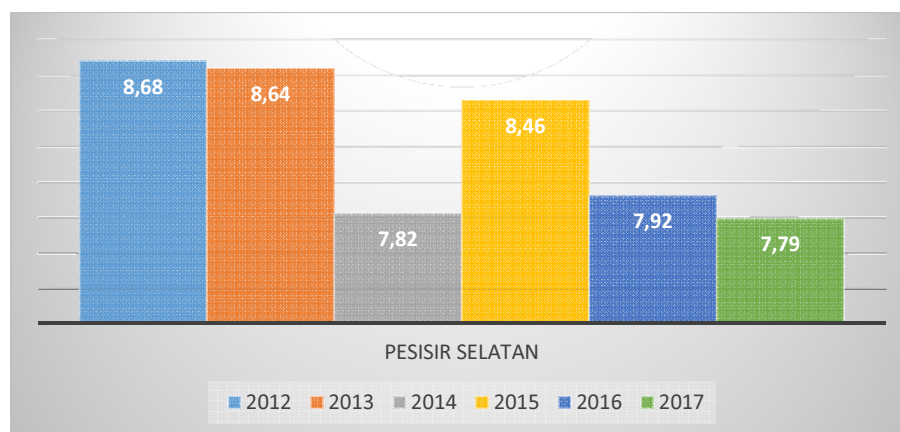


Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuatif, seperti terlihat pada Grafik berikut:

Gambar 2.7
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Selatan



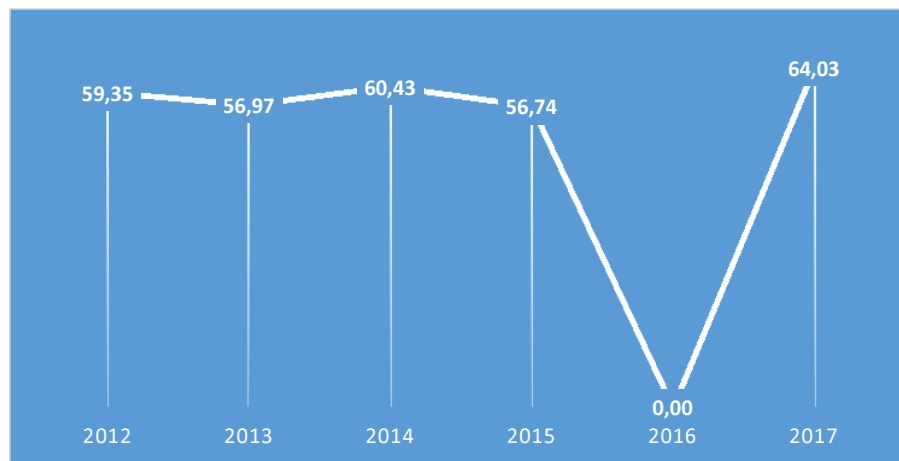
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

2.1.2.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan adalah 56,74% pada tahun 2015, sedangkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 mencapai 5,95%

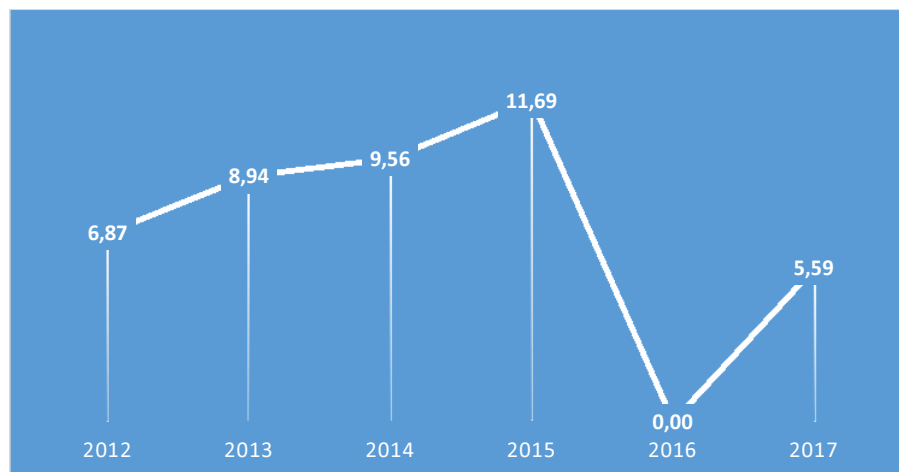
Selanjutnya Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.8
Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Gambar 2.9
Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017



Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2018

Selanjutnya struktur lapangan pekerjaan tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Dapat dilihat penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas, pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani 48,50% dan sektor jasa 18,44%, untuk melihat penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

| No | Lapangan Usaha | Jumlah Penduduk | Persentase |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 75.603 | 48,50 |
| 2 | Industri Pengolahan | 8.342 | 5,35 |
| 3 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 24.079 | 15,45 |
| 4 | Jasa-jasa | 28.750 | 18,44 |
| 5 | Lainnya | 19.120 | 12,26 |
| Total | | 155.894 | 100,00 |

Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan undang-undang layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2015 – 2017 secara umum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti.

A. Urusan Wajib Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2015-2017 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia

sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar, Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda, Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar, kondisi perkembangan pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2017 dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Perkembangan Pendidikan Dasar
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Angka Melek Huruf | 98,15 | 98,89 | 98,92 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar | | | |
| | - APK SD/MI/Paket A | 124,21 | 124,24 | 117.90 |
| | - APK SMP/MTs/Paket B | 102,99 | 103,11 | 103.01 |
| | - APK SMA/SMK/MA/Paket C | 95,52 | - | 92.70 |
| 3 | Angka Pendidikan yang ditamatkan | | | |
| | - APT SD/MI/Paket A | 9,944 | 9,9944 | 9,96 |
| | - APT SMP/MTs/Paket B | 9,304 | 9,304 | 15.392 |
| | - APT SMA/SMK/MA/Paket C | - | 7,026 | 6.89 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni | | | |
| | - APM SD/MI/Paket A | 99,12 | 99,22 | 99.42 |
| | - APM SMP/MTs/Paket B | 89,90 | 90,29 | 90.08 |
| | - APM SMA/SMK/MA/Paket C | 77,82 | 77,84 | 78.12 |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah | | | |
| | - APS 7 – 12 Tahun | 99,1 | 99,37 | 99,43 |
| | - APS 13 – 15 Tahun | 87,27 | 87,89 | 90,23 |
| 6 | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah | | | |

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid | 26,276 | 26,676 | 454.17 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| 7 | Pendidikan Menengah | | | |
| | - APS 16 – 18 Tahun | 73,38 | 78,14 | 73.28 |
| | - Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah | 22,75 | 22 | 23.7 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid | 18,45 | 18,39 | 455.86 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata | 0,72 | 0,90 | 0.99 |
| | - Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | 98,08 | 98,85 | 98.52 |
| 8 | Fasilitas Pendidikan | | | |
| | - Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 94,52 | 95,32 | 95,10 |
| | - Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 87,50 | 90,07 | 95.01 |
| 9 | Angka Putus Sekolah | | | |
| | - Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,07 | 0,02 | 0.022 |
| | - Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,11 | 0,05 | 0.026 |
| | - Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,16 | 0,04 | 0.12 |
| 10 | Angka Kelulusan | | | |
| | - Angka Kelulusan SD/MI | 99,99 | 99,65 | 99.78 |
| | - Angka kelulusan SMP/MTs | 99,05 | 99,41 | 99.58 |
| | - Angka kelulusan SMA/SMK/MA | 100 | 98,65 | 100 |
| | - Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs | 96,45 | 97,23 | 97.9 |
| | - Angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA | 91,82 | 92,68 | 93.05 |
| | - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | - | - | 94.07 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan

pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 – 2017 memperlihatkan trend yang meningkat, pada tahun 2015 sebesar 45,20% menjadi 45,83% pada tahun 2017, kondisi perkembangan PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2017 dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Perkembangan Pendidikan Usia Dini
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | 45,20 | 45,36 | 45,83 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Wajib Kesehatan

Perkembangan urusan kesehatan dilihat dari tahun 2015-2017 dengan indikator antara lain rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan beberapa indikator cakupan.

Kondisi perkembangan indikator untuk kesehatan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Angka kematian bayi | 4,6 | 5 | 5 |
| 2 | Persentase Balita Gizi Buruk | 8,90 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Rasio posyandu per satuan balita | 1:80 | 1:75 | 1:75 |
| 4 | Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 1:10.000 | 1:25.000 | 1:25.000 |
| 5 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 2:100.000 | 1:450.186 | 1:450.186 |
| 6 | Rasio dokter per satuan penduduk | 1:2.500 | 1:10.718 | 1:10.718 |
| 7 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 1:1.300 | 1:684 | 1:684 |
| 8 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) | 74,39 | 77,2 | 80,58 |
| 9 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) | 93,19 | 92,5 | 83,92 |
| 10 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % | 86,01 | 97 | 91,20 |
| 11 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Cakupan penemuan dan penamnganan penderita penyakit TBC BTA (%) | 82,70 | 94 | 109,62 |
| 13 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 99,6 | 100 |
| 14 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 65 | 6,14 | 67,38 |
| 15 | Cakupan kunjungan bayi | 87,12 | 97,6 | 94,87 |
| 16 | Cakupan puskesmas | 2,50 | 2,34 | |
| 17 | Cakupan pembantu puskesmas | 50 | 88,56 | |
| 18 | Persentase Balita Gizi Buruk (yang mendapat perawatan) | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan RSUD M.Zein Painan

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari beberapa indikator dengan beberapa perubahan satuan indikator pada proporsi jalan dalam kondisi baik, penambahan indikator rasio jaringan irigasi, rasio rumah tidak layak huni, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan pengurangan indikator rasio rumah layak huni dan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Kondisi perkembangan indikator untuk pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 848,27 (km) | 37,64 (%) | 27.87 (%) |
| 2 | Rasio Jaringan Irigasi | - | 49,13 | 0,002 |
| 3 | Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk | 0,07 | 62,95 | 62,95 |
| 4 | Rasio Rumah Tidak layak Huni | - | 93,98 | 93,98 |
| 5 | Rasio rumah layak huni * | 0,23 | - | - |
| 6 | Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | - | 49,13 | 49,13 |
| 7 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik * | 47,14 | - | - |
| 8 | Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air * | 0,38 | - | - |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa peningkatan capaian kinerja pada indikator Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan permukiman kumuh, terdapat perubahan indikator Rumah Layak Huni menjadi Rumah Tidak layak Huni. Kondisi perkembangan indikator untuk Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Rumah tangga pengguna air bersih | 85 | 85,37 | 87,86 |
| 2 | Rumah tangga bersanitasi | 62,7 | 63,76 | 62,95 |
| 3 | Lingkungan permukiman kumuh | 12,88 | 12,88 | 14,65 |
| 4 | Rumah Tidak layak Huni | - | - | 93,98 |
| 5 | Rumah Layak Huni * | 75,56 | - | - |

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dari urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam periode 2015-2017 dengan beberapa perubahan indikator dari tahun 2015 sampai tahun 2017, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan perubahan struktur organisasi yang telah dilakukan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | - | 4.99 | 4.99 |
| 2 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP | - | 2 kali sehari | 2 kali sehari |
| 3 | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | - | 97% | 98% |
| 4 | Pelanggar Perda Nomor 01 Tahun 2016 * | 22 | - | - |
| 5 | Pelanggar Perda Nomor 04 Tahun 2016 * | - | - | - |
| 6 | Penertiban IMB * | 3 | - | - |
| 7 | Penertiban anak sekolah yang keluar pada jam sekolah * | 70 | - | - |
| 8 | Penertiban ternak lepas * | 25 | - | - |
| 9 | Petugas perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten | - | 0,022% | 0,022% |
| 10 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten | - | 5 | 5 |
| 11 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | - | 79 | 79 |

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

F. Urusan Wajib Sosial

Perkembangan indikator di urusan Sosial dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator sarana dan prasarana panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Pesisir Selatan, pemberian bantuan terhadap PMKS

dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/penanganan PMKS. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan sosial dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi | 9 | 9 | 7 |
| 2 | PMKS yang memperoleh bantuan | 12.271 | 38.225 | 27.104 |
| 3 | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/penanganan PMKS | - | - | 27.104 |
| 4 | Anak terlantar yang memperoleh bantuan * | 350 | 235 | - |
| 5 | Pemberian jaminan sosial kepada penderita cacat fisik dan mental * | 74 | 74 | - |

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Perkembangan indikator di urusan tenaga kerja dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, penyelesaian kasus sengketa pengusaha dengan pekerja serta keselamatan dan perlindungan bagi pekerja. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan tenaga kerja dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Angka Partisipasi angkatan kerja | 56,74 | 74,55 | 61,41 |
| 2 | Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 56,74 | 60,12 | 59,12 |
| 4 | Pencari kerja yang ditempatkan | 123 | 155 | 350 |
| 5 | Keselamatan dan Perlindungan | 30 | 40 | 86 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator

peningkatan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, sedangkan beberapa indikator lainnya belum bisa di hitung oleh dinas teknis terkait. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|--------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 8,77 | 13,29 | 76,66 |
| 2 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 71,68 | - | - |
| 3 | Rasio KDRT | 0,0092 | - | - |
| 4 | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | 0,26 | - | - |
| 5 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 91,23 | 71,60 | 35,22 |
| 6 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

C. Urusan Wajib Pangan

Perkembangan indikator di urusan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein yang dikonsumsi. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pangan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|---------|--------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Regulasi Ketahanan Pangan | - | 2 | - |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama | 112,93 | 101,28 | |
| 3 | Ketersediaan Energi | 3.698 | 3.698 | 3.974 |
| 4 | Ketersediaan Protein | 84,27 | 84,27 | 86.00 |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan | 72,90 | 72,90 | |
| 6 | Tingkat Kecukupan konsumsi pangan | | | |
| | - Konsumsi energy | 2.319,5 | 2.377 | 2.326 |
| | - Konsumsi protein | 59,1 | 63 | 61.78 |
| 7 | Stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen | | | |
| | - Harga gabah | 4.309 | 4.309 | |
| | - Harga beras | 9.109 | 9.109 | |
| 8 | Stabilitas harga pangan pokok di tingkat | 5,38 | 5,38 | |

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|-------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | konsumen | | | |
| 9 | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat | 81,83 | 81,83 | |

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator di urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakkan hukum lingkungan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan lingkungan hidup dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Penegakan hukum lingkungan | 8 | 8 | 5 |
| 3 | Pembahasan dokumen lingkungan | 63 | - | - |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2019

E. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator di urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator rasio penduduk ber KTP, kepemilikan akte kelahiran dan penerpan KTP Nasinal berbasis NIK. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0.85 | 0.86 | 0.9 |
| 2 | Rasio bayi ber akte kelahiran | 0.527 | 0.878 | 0.940 |
| 3 | Kepemilikan KTP | 85 | 86 | 90.2 |

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4 | Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk | 368.44 | 381.28 | 438.01 |
| 5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | | |
| | - NIK pemutakhiran data penduduk | 514.408 | 527.648 | 508.693 |
| | - Penerbitan | 278.250 | 279.933 | 314.761 |
| | - Penerapan e-KTP | seumur hidup | seumur hidup | seumur hidup |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2019.

F. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator pemberdayaan masyarakat baik terhadap kelompok LPM dan PKK di tingkat Nagari/Desa. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|-------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 0.51 | 0.66 | 0.83 |
| 3 | PKK Aktif | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat | 65.93 | 68.68 | 5.01 |
| 5 | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | 67,0 | 75.3 | 93.4 |

Sumber : Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan 2019

G. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator di urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator rasio akseptor KB, Cakupan KB Aktif serta indikator penunjang lainnya. Kondisi perkembangan

indikator untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 3,4 | 1,18 | 1,38 |
| 2 | Ratio akseptor KB | 70,79 | 17,26 | 75,92 |
| 3 | Cakupan peserta KB aktif | 68,28 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | - | - | - |

Sumber: Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan

H. Urusan Wajib Perhubungan

Perkembangan indikator di urusan perhubungan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator pelayanan terhadap masyarakat baik pada transportasi darat dan laut, maupun aspek keselamatan transportasinya. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perhubungan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 3.875.977 | 994.743 | 785.603 |
| 2 | Jumlah uji KIR angkutan Umum | 8.895 | 7.370 | 58.54 |
| 3 | Jumlah pelabuhan Laut/udara/terminal bis | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Angkutan darat | 42 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Kepemilikan KIR angkutan umum | 32 | 15,71 | 53,80 |
| 6 | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 30 menit | 30 menit | 30 menit |
| 7 | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) | 61.000 | 53.000 | 53.000 |
| 8 | Pemasangan rambu-rambu | - | 0 | 0 |
| 9 | Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan | - | 2,69 | 2,51 |
| 10 | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 2.486.453 | 994.743 | 39.001 |
| 11 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun | 4.112.567 | 90.512 | 122.894 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2019.

I. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Perkembangan indikator di urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah jaringan komunikasi maupun

media komunikasi dan informasi Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan komunikasi dan informasi dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Jumlah Jaringan Komunikasi | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Jumlah surat kabar nasional/local | 5 | 86 | 86 |
| 3 | Jumlah penyiaran radio/TV local | 3 | 13 | 3 |
| 4 | Website milik Pemerintah Daerah | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Pameran/Expo | 1 | 1 | 4 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

J. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perkembangan indikator di urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah koperasi dan UMKM yang aktif dan dibina. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Koperasi | 329 | 349 | 300 |
| 2 | Persentase koperasi aktif | 55 | 58 | 59 |
| 3 | Jumlah Koperasi Aktif | 37 | 43 | 50 |
| 4 | Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%) | 99.23 | 98.2 | 97.5 |
| 5 | Jumlah UMKM yang dibina | 329 | 349 | 300 |
| 6 | Usaha mikro dan kecil | 55 | 58 | 59 |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2019.

K. Urusan Wajib Penanaman Modal

Perkembangan indikator di urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah investor dan jumlah investasi yang

masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan penanaman modal dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|---------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 26 | 15 | 97 |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 626,2 M | 132 M | 442 M |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 34 | 35 | 30.72 |
| 4 | Kerjasama Investasi | 1 MoU | 2 MoU | - |

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 2019

L. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga indikator kerjanya hanya bisa dilihat pada tahun 2017 karena pada tahun sebelumnya tidak pernah menghitung capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga. Indikator untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Pesentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 25 | 30 | 25.5 |
| 2 | Persentase wirausaha muda (%) | 25 | 30 | 37.4 |
| 3 | Jumlah atlet berprestasi (org) | 25 | 30 | 26 |
| 4 | Jumlah Prestasi Olah Raga | 6 | 8 | 12 |
| 5 | Jumlah organisasi Olah Raga | 45 | 50 | 50 |
| 6 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 32 | 35 | 40 |
| 7 | Gelanggang/Balai Remaja (Selain milik swasta) | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Jumlah Gedung Olah Raga | 13 | 15 | 15 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2019.

M. Urusan Wajib Statistik

Untuk urusan Statistik indikator kerjanya hanya bisa dilihat pada tahun 2017 karena pada tahun sebelumnya tidak pernah menghitung capaian kinerja

urusan Statistik. Indikator untuk urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Data Statistik Pembangunan Daerah | - | ada | ada |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

N. Urusan Wajib Kebudayaan

Perkembangan indikator di urusan kebudayaan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kebudayaan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|------------------------|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Grup Kesenian | 67 | 67 | 84 |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1* |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

O. Urusan Wajib Perpustakaan

Perkembangan indikator di urusan perpustakaan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah kunjungan dan jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perpustakaan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|-------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Jumlah Perpustakaan | 6 | 6 | 1 |
| 2 | jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun | 4.274 | 5.250 | 22.423 |
| 3 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 1.000 | 2.300 | 17.158 |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

P. Urusan Wajib Kearsipan

Perkembangan indikator di urusan kearsipan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator persentase pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kearsipan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|-------------------------------------|-------|------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Pengelolaan Arsip secara baku | 6 | 2,22 | 13.33 |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 42 | 2 | 6 |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan 2019

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Indikator di urusan kelautan dan perikanan untuk Kabupaten Pesisir Selatan hanya menyangkut bidang perikanan karena bidang kelautan sudah berpindah kewenangan ke Propinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya dilihat dari produksi perikanan, konsumsi ikan dan pembinaan terhadap kelompok nelayan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan Kelautan dan Perikanan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Produksi perikanan | 46.650 | 49.783 | 53.945 |
| 2 | Konsumsi Ikan (kg/org/kapita) | 34,50 | 37,35 | 43.79 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 170 | 166 | 223 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | 23.660 | 25.250 | 26.4 |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Pariwisata

Perkembangan indikator di urusan kepariwisataan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kepariwisataan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kunjungan wisata (orang) | | | |
| | - kunjungan wisatawan mancanegara (orang) | 1.500 | 1.700 | 1.623 |
| | - Kunjungan wisatawan nusantara (orang) | 1.980.000 | 2.400.000 | 2.479.841 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2019.

C. Urusan Pertanian

Perkembangan indikator di urusan pertanian dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator produktifitas padi dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan didalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pertanian dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Produktifitas padi per hektar (kw/ha) | 51,63 | 55,9 | 48.75 |
| 2 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | 42,06 | 40,55 | - |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Kehutanan

Untuk urusan kehutanan bukan lagi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya hanya bisa dilihat sampai dengan tahun 2016. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kehutanan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Kehutanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|--------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 805,00 | 200 | - |
| 2 | Kerusakan Kawasan Hutan | 0,03 | - | - |
| 3 | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | - | - | - |

Sumber : LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral bukan lagi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya hanya bisa dilihat sampai dengan tahun 2016. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan energi dan sumber daya mineral dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | - | - | - |

Sumber: LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

F. Urusan Perdagangan

Perkembangan indikator di urusan perdagangan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan disertai dengan indikator-indikator penunjang lainnya. Terdapat perubahan-perubahan indikator disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perdagangan dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Perdagangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | - | 12,23 | 12,53 |
| 2 | Jumlah kecamatan yang diawasi barang beredarnya | - | 7 | 7 |

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 3 | Pasar semi modern | - | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah Pasar * | | | |
| | - Nagari | 40 | - | - |
| | - Serikat | 3 | - | - |
| | - Kabupaten | 11 | - | - |
| 5 | Pembangunan Pasar nagari * | 6 | - | - |
| 6 | Pembangunan Pasar Painan yang memadai * | 1 | - | - |
| 7 | Penataan Pasar dan Penempatan Pedagang * | 1 | - | - |
| 8 | Sistem Informasi Harga (Sentra) 60 * | 3 | - | - |
| 9 | UTTP * | 5 | - | - |
| 10 | Pengawasan barang beredar * | - | - | - |

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

G. Urusan Perindustrian

Perkembangan indikator di urusan perindustrian dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan disertai dengan indikator-indikator penunjang lainnya. Terdapat perubahan-perubahan indikator disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perindustrian dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|--|---------|----------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | - | 8,14 | 8,53 |
| 2 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | - | - | - |
| 3 | Pertumbuhan Industri | - | 1,901 | 10,12 |
| 4 | Cakupan bina kelompok perajin | - | 162 | 33,33 |
| 5 | Persentase tenaga kerja sektor industri | - | 7,62 | 4,64 |
| 6 | Jumlah sentra IKM | 13 | 20 | 20 |
| 7 | Jumlah Industri * | 1.360 | 1.901 | - |
| 8 | Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil * | 5.514 | 7.531 | - |
| 9 | Nilai Produksi Industri Kecil * | 8,039 M | 20,519 M | - |
| 10 | Pengembangan IKM yang bermuatan Lokal * | 260 | 260 | - |

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

H. Urusan Transmigrasi

Untuk urusan Transmigrasi indikator kinerjanya belum bisa dihitung sampai dengan tahun 2017. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perindustrian dapat terlihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | |
|----|----------------------|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Transmigran swakarsa | - | - | - |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu:

1. Dengan memproduksi barang dan jasa (*goods and services*) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (*high demand*), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (*delivery*) nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (*preference*) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).
2. Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (*blue ocean strategy*).

Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

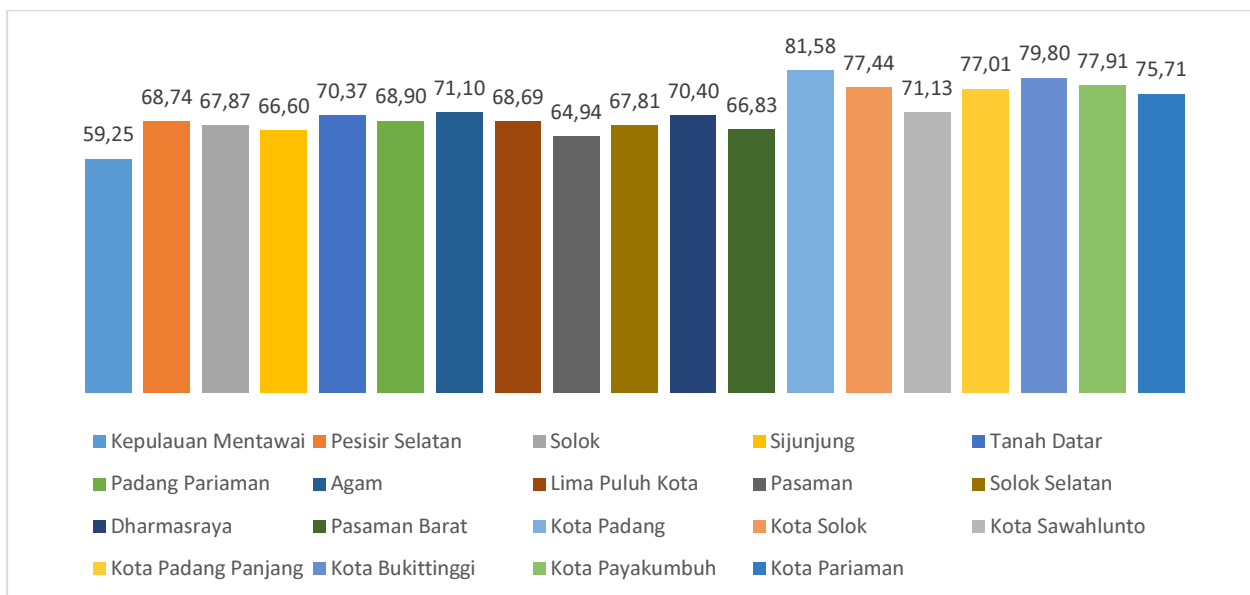
1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam hal ini IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode baru pada tahun 2017 adalah 68,74. Jika dilihat dari masing-masing komponen tampak Angka Harapan Hidup saat lahir adalah sebesar 70,23 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,06 tahun, Rata-rata Lama sekolah 8,13 tahun dan Pengeluaran per Kapita Rp. 8.819.000,- , dengan pertumbuhan IPM 0,51%.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat maka pertumbuhan IPM Kabupaten Sumatera Barat tahun 2016-2017 berada pada nomor 11, sedangkan untuk capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan berada di nomor 12 secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

2. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Indikator PDRB digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan daerah (baik pemerintah maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi (input) yang ada di daerah menjadi output (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB suatu daerah juga menggambarkan daya saing suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2013-2016 cenderung naik. Tahun 2012 PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 7.359.217,62 juta rupiah naik menjadi Rp. 10.685.349,85 juta rupiah pada tahun 2016.

Tabel 2.59
Struktur PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017
(Juta Rupiah)

| No | Tahun | PDRB per Kapita ADHB |
|----|------------|----------------------|
| 1 | Tahun 2013 | 8.208.517,25 |
| 2 | Tahun 2014 | 9.113.793,03 |
| 3 | Tahun 2015 | 9.864.677,23 |
| 4 | Tahun 2016 | 10.685.349,85 |
| 5 | Tahun 2017 | 12.521.624,44 |

Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

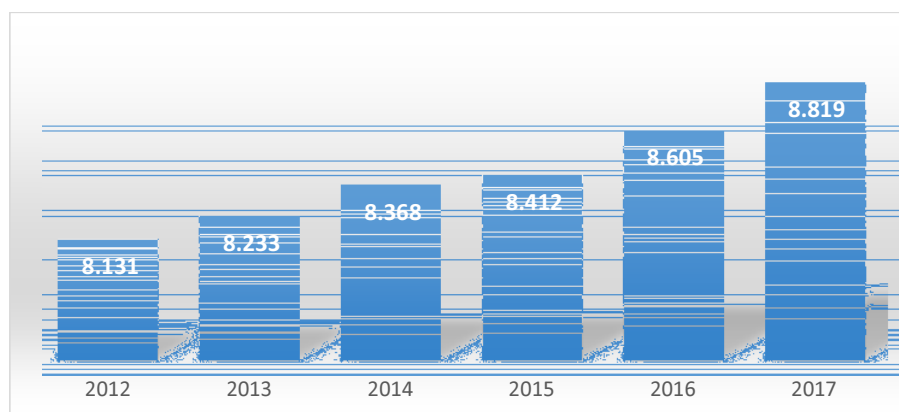
3. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga, data ini digunakan untuk mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah

persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.11
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah Rp. 812.268,74 yang terdiri dari sektor makanan Rp. 504.642,76 (62,13%) dan sektor non makanan Rp. 307.625,98 (37,87%). Rincian pengeluaran rata-rata dapat dilihat pada grafik dibawah:

Gambar 2.12
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Makanan



Sumber: Berita Re Sumber: Sumber : Berita Resmi Statistik, 2018

Gambar 2.13
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Non Makanan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

4. Fasilitas wilayah/infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk menunjang fungsi

pembentukan wilayah dan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan konsep fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat umum dalam ranah sosial dan ekonomi. Apabila dilihat dari segi mikro, infrastruktur berperan dalam penyediaan aset fisik yang direncanakan dan dirancang dalam suatu proses dan sistem yang relevan, sehingga dapat memenuhi pelayanan publik. Sedangkan fasilitas adalah tempat untuk menampung kepentingan masyarakat berupa fisik dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat publik. Fasilitas harus dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya dan sumber daya yang minimal.

Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan didalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.60
Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014-2016

| No | Lapangan Usaha | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | |
|----|--|--|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.437,18 | 2.541,86 | 2.799,18 |
| 2 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.379,00 | 5.603,92 | 5.953,65 |
| 3 | Konstruksi | 701.764,15 | 744.812,28 | 802.541,38 |
| 4 | Transportasi dan Pergudangan | 272.286,63 | 294.012,90 | 319.568,07 |
| 5 | Real Estate | 104.642,28 | 110.703,39 | 117.146,74 |

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

5. Iklim berinvestasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002).

Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

1. Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

3. Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan investasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.61
Perkembangan Investasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015-2018

| Kategori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nilai Investasi | 80.477.190.000 | 109.665.536.145 | 168.936.538.824 | 442.686.583.761 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi capaian target RPJMD Tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2019.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilhan, 6 penunjang urusan, 2 urusan pendukung, urusan kewilayahan di 15 kecamatan serta urusan kesatuan bangsa dan politik. Seluruh urusan tersebut tersebar secara proporsional pada 30 Perangkat Daerah dan 15 Kecamatan. Evaluasi hasil RKPD per Urusan Pemerintahan terhadap seluruh program dan kegiatan dan pembangunan sampai dengan tahun berjalan (kondisi triwulan I 2019) tertuang pada tabel 2.62.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**1. Urusan Pendidikan**

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan tahun 2019 dilakukan melalui 7 program dan 90 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp. 126.897.439.450,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi capaian kinerja output pelaksanaan Urusan Pendidikan dari keseluruhan program adalah Rp. 3.366.009.186,- dengan capaian kinerja outcome sebesar 48,75 % (sangat rendah) dan capaian keuangan 31,88% (sangat rendah).

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD M. Zein Painan. Pada Dinas Kesehatan, fungsi ini diselenggarakan melalui 19 program dan 78 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 91.089.563.534,95. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.539.364.435 ,- dengan capaian kinerja outcome RPJMD 69,25 % (sedang) dan capaian keuangan 16,27% (sangat rendah).

Pada RSUD M Zein Painan, urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dan 5 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 84.967.766.951,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.409.797.000,- dengan capaian kinerja RPJMD 86,33 % (tinggi) dan capaian keuangan 20,29 % (sangat rendah).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi ini diselenggarakan melalui 21 program dan 77 kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 218.654.613.874,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.618.605.105,- dengan capaian kinerja RPJMD 63,30 % (rendah) dan capaian keuangan 25,37 % (sangat rendah).

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, urusan ini diselenggarakan melalui 8 program dan 42 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 34.054.821.413,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 660.482.988,- dengan capaian kinerja RPJMD 60,58 % (rendah) dan capaian keuangan 26,54 % (sangat rendah).

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui 9 program dan 45 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 43.606.784.969,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 804.331.133,- dengan capaian kinerja RPJMD 57,48 % (rendah) dan capaian keuangan 18,04 % (sangat rendah).

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Dinas Satpol PP, urusan ini diselenggarakan melalui 6 program dan 26 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.113.891.148,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 643.060.225,- dengan capaian kinerja RPJMD 76,18 % (tinggi) dan capaian keuangan 35,42 % (sangat rendah).

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, urusan ini diselenggarakan melalui 8 program dan 24 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.086.908.229,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 395.150.376,- dengan capaian kinerja RPJMD 60,66 % (rendah) dan capaian keuangan 42,74 % (sangat rendah).

6. Urusan Sosial

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 8 program dan 29 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.303.939.679,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 178.549.474,- dengan

capaian kinerja RPJMD 70,64% (sedang) dan capaian keuangan 55,44 % (rendah).

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 5 program dan 21 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.940.399.800,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 45.115.600,- dengan capaian kinerja RPJMD 78,98 % (tinggi) dan capaian keuangan 49,35 % (sangat rendah).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 3 program dan 9 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 616.405.108,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.483.300,- dengan capaian kinerja RPJMD 55,03% (rendah) dan capaian keuangan 32,89% (sangat rendah).

9. Urusan Pangan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pangan melalui 4 program dan 35 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.350.139.503,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 231.913.451,- dengan capaian kinerja RPJMD 87,96 % (tinggi) dan capaian keuangan 45,26 % (sangat rendah).

10. Urusan Pertanahan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui 3 program dan 10 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 11.246.958.790,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 65.599.300,- dengan capaian kinerja RPJMD 48,09 (sangat rendah) dan capaian keuangan 19,25 % (sangat rendah).

11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 8 program dan 36 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.168.792.964,- Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 300.917.232,- dengan capaian kinerja RPJMD 86,53% (tinggi) dan capaian keuangan 78,97 % (tinggi).

12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 4 program dan 32 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 5.227.214.250,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 1.004.896.720,- dengan capaian kinerja RPJMD 34,52% (sangat rendah) dan capaian keuangan 33,56 % (sangat rendah).

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 8 program dan 37 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.953.861.275,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 224.784.731,- dengan capaian kinerja RPJMD 38,79% (sangat rendah) dan capaian keuangan 42,29 (sangat rendah).

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 5 program dan 14 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 7.272.406.545,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 25.137.200,- dengan capaian kinerja RPJMD 79,95 % (tinggi) dan capaian keuangan 32,21,- (sangat rendah).

15. Urusan Perhubungan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan melalui 10 program dan 41 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 13.096.773.389,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.668.276.942,- dengan capaian kinerja RPJMD 58,98% (rendah) dan capaian keuangan 42,99% (sangat rendah).

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 6 program dan 31 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 9.999.847.875,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 313.054.880,- dengan capaian kinerja RPJMD 71,32% (sedang) dan capaian keuangan 33,44% (sangat rendah).

17. Urusan, Koperasi dan UKM

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui 5 program dan 23 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.654.414.700,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 158.113.572,- dengan capaian kinerja RPJMD 55,27% (rendah) dan capaian keuangan 69,66% (sedang).

18. Urusan Penanaman Modal

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu melalui 6 program dan 29 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.539.240.500,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 233.325.721,- dengan capaian kinerja RPJMD 55,61% (rendah) dan capaian keuangan 42,38% (sangat rendah).

19. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melalui 6 program dan 23 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.054.686.131,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi

keuangan sebesar Rp. 266.053.383,- dengan capaian kinerja RPJMD 68,77% (sedang) dan capaian keuangan 42,72% (sangat rendah).

20. Urusan Statistik

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program dan 3 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 287.729.500,- Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 9.422.700,- dengan capaian kinerja RPJMD 100% (sangat tinggi) dan capaian keuangan 58,41% (sangat rendah).

21. Urusan Kebudayaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 2 program dan 12 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.086.507.915,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 697.788.326,- dengan capaian kinerja RPJMD 76,08 % (tinggi) dan capaian keuangan 63,58 % (rendah).

22. Urusan Perpustakaan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 1 program dan 7 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 657.781.100,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 79.795.350,- dengan capaian kinerja RPJMD 18,73% (sangat rendah) dan capaian keuangan 48,46% (sangat rendah).

23. Urusan Kearsipan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 7 program dan 27 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.308.449.500,- Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 113.781.845,- dengan capaian kinerja RPJMD 57,65% (rendah) dan capaian keuangan 35,34% (sangat rendah).

C. URUSAN PILIHAN**24. Urusan Perikanan**

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perikanan melalui 6 program dan 40 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 8.625.906.900,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 307.910.249,- dengan capaian kinerja RPJMD 42,51% (sangat rendah) dan capaian keuangan 45,41% (sangat rendah).

25. Urusan Pariwisata

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melalui 4 program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 5.861.041.199,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 255.685.500,- dengan capaian kinerja RPJMD 62,05% (rendah) dan capaian keuangan 40,33% (sangat rendah).

26. Urusan Pertanian

Urusan ini dilaksanakan oleh 2 Dinas, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, urusan ini diselenggarakan melalui 9 program dan 53 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.224.921.823,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 696.445.526,- dengan capaian kinerja RPJMD 53,59% (rendah) dan capaian keuangan 40,33% (sangat rendah).

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, urusan ini diselenggarakan melalui 8 program dan 34 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 6.687.039.701,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 642.414.509,- dengan capaian kinerja RPJMD 52,96% (rendah) dan capaian keuangan 40,29% (sangat rendah).

27. Urusan Perdagangan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui 2 program dan 11 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.224.800,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 130.988.237,- dengan capaian kinerja RPJMD 72,55% (sedang) dan capaian keuangan 30,55% (sangat rendah).

28. Urusan Perindustrian

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui 4 program dan 10 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 15.759.614.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 31.165.200,- dengan capaian kinerja RPJMD 30,42% (sangat rendah) dan capaian keuangan 21,75% (sangat rendah).

29. Urusan Transmigrasi

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 1 program dan 4 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 4.641.831.800,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 4.400.000,- dengan capaian kinerja RPJMD 71,00% (sedang) dan capaian keuangan 12,27% (sangat rendah).

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN**30. Fungsi Pengawasan**

Fungsi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah melalui 5 Program dan 25 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.345.873.716,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 627.028.464,- dengan capaian kinerja RPJMD 68,42% (sedang) dan capaian keuangan 23,15% (sangat rendah).

31. Fungsi Perencanaan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 9 Program dan 40 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.923.702.850,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 379.712.538,- dengan capaian kinerja RPJMD 76.07% (tinggi) dan capaian keuangan 30,68% (sangat rendah).

32. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Fungsi ini diselenggarakan oleh dua Badan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, fungsi ini diselenggarakan melalui 8 Program dan 48 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 15.410.031.664,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.660.354.891,- dengan capaian kinerja RPJMD 71,39% (sedang) dan capaian keuangan 38,82% (sangat rendah).

Pada Badan Pendapatan Daerah, fungsi ini diselenggarakan melalui 4 Program dan 34 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.422.914.188,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 608.287.309,- dengan capaian kinerja RPJMD 41,58% (sangat rendah) dan capaian keuangan 40,15% (sangat rendah).

33. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 Program dan 4 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 494.469.200,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 21.780.500,- dengan capaian kinerja RPJMD 31,67% (sangat rendah) dan capaian keuangan 8,96% (sangat rendah).

34. Fungsi Kepegawaian dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia melalui 6 Program dan 40 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.378.149.713,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 328.972.784,- dengan capaian kinerja RPJMD 61,48% (rendah) dan capaian keuangan 37,68% (sangat rendah).

E. URUSAN PENDUKUNG**35. Sekretariat Daerah**

Urusan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui 32 program dan 107 kegiatan, dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 20.126.739.263,-. Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.388.247.097,- dengan capaian kinerja RPJMD 78,36% (tinggi) dan capaian keuangan 46,78% (sangat rendah).

36. Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Urusan Pendukung pada Sekretariat DPRD dikakukan melalui 4 program dan 36 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp18.925.592.198,. Sampai dengan Triwulan I, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 4.057.069.000,- dengan capaian kinerja RPJMD 61,75 % (rendah) dan capaian keuangan 69,41% (sedang).

F. URUSAN KEWILAYAHAN**37. Kecamatan Koto XI Tarusan**

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Koto XI Tarusan melalui 12 Program dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 539.052.780,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 84.300.250,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 68,11% (sedang) dan capaian keuangan sebesar 37,84% (sangat rendah).

38. Kecamatan Bayang

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Bayang melalui 9 Program dan 28 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 522.730.991,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 86.086.175,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 48.49% (sangat rendah) dan capaian keuangan sebesar 35,34% (sangat rendah).

39. Kecamatan Bayang Utara

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Bayang Utara melalui 7 Program dan 20 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 497.193.000,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 105.636.831,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 64.56% (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 25,35 % (sangat rendah).

40. Kecamatan IV Jurai

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan I Jurai melalui 12 Program dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 568.593.604,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 70.029.940,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 59.50% (rendah) dan capaian keuangan sebesar 54,17% (rendah).

41. Kecamatan Batang Kapas

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Kapas melalui 9 Program dan 27 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 528.689.500,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 87.441.179,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 64.16 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 63,10% (rendah).

42. Kecamatan Sutera

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Sutera melalui 11 Program dan 25 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 530.257.540,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 193.827.340,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 59,92% (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 34,80 % (sangat rendah).

43. Kecamatan Lengayang

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lengayang melalui 8 Program dan 29 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 559.439.500,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 137.876.758,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 61,54% (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 38,21% (sangat rendah).

44. Kecamatan Ranah Pesisir

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir melalui 10 Program dan 23 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 546.036.007,- Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 90.986.727,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 68,51% (sedang) dan capaian keuangan sebesar. 40,68% (sangat rendah).

45. Kecamatan Linggo Sari Baganti

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti melalui 12 Program dan 27 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 523.567.000,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 0,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 67,49 % (sedang) dan capaian keuangan sebesar. 36,57% (sangat rendah).

46. Kecamatan Pancung Soal

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal melalui 10 Program dan 31 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 501.745.801,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 83.048.525,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 55,47% (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 29,79% (sangat rendah).

47. Kecamatan Airpura

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Air Pura melalui 13 Program dan 32 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 512.420.000,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 173.850.954,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 55,45% (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 45,70% (sangat rendah).

48. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 12 Program dan 30 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 500.119.600,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 84.262.048,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 66,25% (sedang) dan capaian keuangan sebesar 22,60 % (sangat rendah).

49. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan melalui 7 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 514.749.464,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 104.440.040,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 59,18 % (rendah) dan capaian keuangan sebesar. 39,66% (sangat rendah).

50. Kecamatan Lunang

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lunang melalui 9 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 529.372.900,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 87.923.825,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 59,42% (rendah) dan capaian keuangan sebesar 46,36% (rendah).

51. Kecamatan Silaut

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lunang melalui 15 Program dan 33 kegiatan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 626.050.700,-. Sampai dengan Triwulan I 2019, realisasi keuangan seluruh program dan kegiatan adalah Rp. 142.189.650,- dengan capaian kinerja RJPMD sebesar 32,95% (sangat rendah) dan capaian keuangan sebesar 52,13% (rendah).

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2019 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Triwulan I Tahun 2019

| No | Urusan | Anggaran APBD 2019 | Realisasi Anggaran s/d Triwulan I | Capaian Kinerja | | Realisasi Anggaran | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | Persentase | Kategori | Persentase | Kategori |
| Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | 126.897.439.450,- | 3.366.009.186,- | 48,75 | SR | 31,88 | SR |
| 2.a | Kesehatan (Dinas Kesehatan) | 91.049.563.534,95 | 2.539.364.435,- | 69,25 | S | 16,27 | SR |
| 2.b | Kesehatan (RSUD M. Zein Painan) | 84.967.766.951,- | 10.409.797.000,- | 86,33 | T | 20,29 | SR |
| 3.a | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUTR) | 218.654.613.874,- | 3.618.605.105,- | 63,30 | R | 25,37 | SR |
| 3.b | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PSDA) | 34.054.821.413,- | 660.482.988,- | 60,58 | R | 26,54 | SR |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 32.359.826.269,- | 804.331.133,- | 57,48 | R | 18,04 | SR |
| 5.a | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) | 4.113.891.148,- | 643.060.225,- | 76,18 | T | 35,42 | SR |
| 5.b | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD) | 2.086.908.229,- | 395.150370,- | 60,06 | R | 42,74 | SR |
| 6 | Sosial | 2.303.939.679,- | 178.549.474,- | 70,64 | S | 55,44 | R |
| Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 7 | Ketenagakerjaan | 1.940.399.800,- | 45.115.600,- | 78,98 | T | 49,35 | SR |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 616.405.108,- | 26.483.300,- | 55,03 | R | 32,89 | SR |

| No | Urusan | Anggaran APBD 2019 | Realisasi Anggaran s/d Triwulan I | Capaian Kinerja | | Realisasi Anggaran | |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | Persentase | Kategori | Persentase | Kategori |
| 9 | Pangan | 2.350.139.503,- | 231.913.451,- | 87,96 | T | 45,26 | SR |
| 10 | Pertanahan | 11.246.958.790,- | 65.599.300,- | 48,09 | SR | 19,25 | SR |
| 11 | Lingkungan Hidup | 3.168.792.964,- | 300.917.232,- | 86,53 | T | 78,97 | T |
| 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.227.214.250,- | 1.004.896.720,- | 34,52 | SR | 33,56 | SR |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.953.861.275,- | 224.784.731,- | 38,79 | SR | 42,29 | SR |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.272.406.545,- | 25.137.200,- | 79,95 | T | 32,21 | SR |
| 15 | Perhubungan | 13.096.773.389,- | 1.668.276.942,- | 58,98 | R | 42,99 | SR |
| 17 | Komunikasi dan Informatika | 9.999.847.875,- | 313.054.880,- | 71,32 | S | 33,44 | SR |
| 18 | Koperasi dan UKM | 1.654.414.700,- | 158.113.572,- | 55,27 | R | 69,66 | S |
| 19 | Penanaman Modal | 1.539.240.500,- | 233.325.721,- | 55,61 | R | 42,38 | SR |
| 20 | Pemuda dan Olahraga | 3.054.686.131,- | 266.053.383,- | 68,77 | S | 42,72 | SR |
| 21 | Statistik | 287.729.500,- | 9.422.700,- | 100 | ST | 58,41 | R |
| 22 | Kebudayaan | 2.086.507.915,- | 697.788.326,- | 76,08 | T | 63,58 | R |
| 23 | Perpustakaan | 657.781.100,- | 79.795.350,- | 18,73 | SR | 48,46 | SR |
| 24 | Kearsipan | 1.308.449.500,- | 113.781.845,- | 57,65 | R | 35,34 | SR |
| Pilihan | | | | | | | |
| 25 | Perikanan | 8.625.906.900,- | 307.910.249,- | 42,51 | SR | 45,41 | SR |
| 26 | Pariwisata | 5.861.041.199,- | 255.685.500,- | 62,05 | R | 32,30 | SR |
| 27.a | Pertanian (Dinas Tanhorbun) | 14.224.921.823,- | 696.445.526,- | 53,59 | R | 40,33 | SR |
| 27.b | Pertanian (Dinas Peternakan dan Keswan) | 6.687.039.701,- | 642.414.509,- | 52,96 | R | 40,29 | SR |
| 28 | Perdagangan | 16.809.224.800,- | 130.988.237,- | 72,55 | S | 30,55 | SR |
| 29 | Perindustrian | 15.759.614.000,- | 31.165.200,- | 30,42 | SR | 21,75 | SR |
| 30 | Transmigrasi | 4.641.831.800,- | 4.400.000,- | 71,00 | S | 12,27 | SR |
| Fungsi Penunjang | | | | | | | |
| 31 | Pengawasan | 3.345.873.716,- | 627.028.464,- | 68,42 | S | 23,15 | SR |
| 32 | Perencanaan | 2.923.702.850,- | 379.712.538,- | 76,07 | T | 30,68 | SR |
| 33.a | Pengelolaan Keuangan (BPKD) | 15.410.031.664,- | 2.660.354.891,- | 71,39 | S | 38,82 | SR |
| 33.b | Pengelolaan Keuangan (BAPEN) | 3.422.914.188,- | 608.287.309,- | 41,58 | SR | 40,15 | SR |
| 34 | Kepegawaian | 4.378.149.713,- | 328.972.784,- | 61,48 | R | 37,68 | SR |
| 35 | Penelitian dan Pengembangan | 494.469.200,- | 21.780.500,- | 31,67 | SR | 8,96 | SR |
| Urusan Pendukung | | | | | | | |
| 36.a | Sekretariat Daerah | 20.126.739.263,- | 3.388.247.097,- | 78,36 | T | 46,78 | SR |
| 36.b | Sekretariat DPRD | 18.925.594.198,- | 4.057.069.000,- | 61,75 | R | 69,41 | S |
| Urusan Kewilayahan | | | | | | | |
| 37.a | Kecamatan Koto XI Tarusan | 539.052.780,- | 84.300.250,- | 68,11 | S | 37,84 | SR |
| 37.b | Kecamatan Bayang | 522.730.991,- | 86.086.175,- | 48,49 | SR | 35,34 | SR |

| No | Urusan | Anggaran APBD 2019 | Realisasi Anggaran s/d Triwulan I | Capaian Kinerja | | Realisasi Anggaran | |
|------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | Persentase | Kategori | Persentase | Kategori |
| 37.c | Kecamatan Bayang Utara | 497.193.000,- | 105,636,831,- | 64,56 | R | 25,35 | SR |
| 37.d | Kecamatan IV Jurai | 568.593.604,- | 70.029.940,- | 59,50 | R | 54,17 | SR |
| 37.e | Kecamatan Batang Kapas | 528.689.500,- | 87.441.179,- | 64,16 | R | 63,10 | R |
| 37.f | Kecamatan Sutera | 530.257.540,- | 193.827.340,- | 59,92 | R | 34,80 | SR |
| 37.g | Kecamatan Lengayang | 559.439.500,- | 137,876,758,- | 61,54 | R | 38,21 | SR |
| 37.h | Kecamatan Ranah Pesisir | 546.036.007,- | 90,986,727,- | 68,51 | S | 40,68 | SR |
| 37.i | Kecamatan Linggo Sari Baganti | 523.567.000,- | 0,- | 67,49 | S | 36,57 | SR |
| 37.j | Kecamatan Pancung Soal | 501.745.801,- | 83,048,525,- | 55,47 | R | 29,79 | SR |
| 37.k | Kecamatan Airpura | 512.420.000,- | 173,850,954,- | 55,45 | R | 45,70 | SR |
| 37.l | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | 500.119.600,- | 84,262,048,- | 66,25 | S | 22,60 | SR |
| 37.m | Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan | 514.784.464,- | 106.440.040,- | 59,18 | R | 39,66 | SR |
| 37.n | Kecamatan Lunang | 529.372.900,- | 87,923,825,- | 59,42 | R | 46,36 | SR |
| 37.a | Kecamatan Silaut | 626.050.700,- | 142,189,650,- | 32,95 | SR | 52,13 | R |

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2019 per urusan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah sangat beragam, dan masih memiliki predikat kinerjanya Sangat Rendah (SR) dan Rendah (R). Selain masih rendahnya capaian kinerja, hasil evaluasi beberapa menemukan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Belum berimbang antara capaian kinerja dengan capaian keuangan, dimana sebagian besar capaian kinerja sudah baik namun capaian keuangan masih sangat rendah.
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan masih yang dievaluasi oleh Perangkat daerah masih banyak yang belum sinkron dengan RPJMD dan RKPD sehingga beberapa kali harus diperbaiki dan disesuaikan. Hal ini menyebabkan pelaporan Evaluasi RKPD menjadi terlambat.
- c. Masih kurangnya kemampuan petugas pelaporan di Perangkat Daerah dalam menelaah dan mengisi formulir evaluasi RKPD dan pelaporan, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form/matrik evaluasi RKPD yang menyebabkan kesulitan/kesalahan dalam pengolahan data Evaluasi

yang dilakukan di tingkat Perangkat Daerah maupun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- d. Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan Perangkat Daerah terutama Kantor Kecamatan, untuk menyusun dan menyampaikan Laporan hasil Evaluasi Renja masih rendah sehingga proses pelaporan ke Provinsi juga menjadi terkendala.
- e. Terdapat 3 (tiga) Program di 3 (tiga) urusan yang belum selaras dengan RPJMD yaitu:
 - 1) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal pada Urusan Penanaman Modal (pelaksana program adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu).
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi pada Urusan Perindustrian dan (pelaksanaan program adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian).
 - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (pelaksana program adalah Sekretariat Daerah).

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing Perangkat Daerah agar kembali menyempurnakan Renstra masing-masing dengan mempedomani indikator dan target kinerja setiap program yang disesuaikan dengan Perubahan RPJMD serta merasionalkan indikasi kebutuhan anggaran.
- b. Seluruh kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja SKPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui.

- c. Terhadap 3 (tiga) program yang tidak selaras dengan RPJMD, termasuk kegiatan dibawahnya, direkomendasikan untuk dihentikan pelaksanaannya dan dieliminasi pada Perubahan APBD 2019.
- d. Penyusunan RKPD dan Renja-PD tahun 2020 harus dikawal secara ketat sehingga usulan program/ kegiatan yang tidak selaras dengan RPJMD dapat dieliminasi lebih dini.
- e. Percepatan pemanfaatan aplikasi untuk proses evaluasi RKPD ini harus tetap diupayakan di tahun 2019.

2.2.2. Realiasi Capaian RPJMD Sampai dengan Tahun 2018

Hasil analisis pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2016- 2021 terhadap 5 misi dan 10 sasaran strategis daerah disajikan sebagai berikut:

MISI I:

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Misi I RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Penilaian Laporan Keuangan Daerah (opini BPK) | Opini | WTP | WTP | 100 |
| 2. | Kualifikasi penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Skala | BB | B | 89,41 |
| 3. | Skor nilai LPPD | Skor | 3180 | 3065 | 96,38 |
| 4. | Level Maturitas SPIP | Level | 3 | 3 | 100 |
| <i>Rata-Rata Capaian</i> | | | | | 96,45 |

Dari dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1.1.1 sebesar 96,45. Pencapaian sasaran strategis ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diukur dari penyusunan laporan keuangan pemerintah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dari hasil audit lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional (Badan Pemeriksa Keuangan). Predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir pada tahun 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 39.A / LHP / XVIII.PDG / 05 / 2018 Tanggal 24 Mei 2018.

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian target penilaian LKD tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Penyempurnaan proses penyusunan dan konsolidasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya meliputi :
 - Seluruh instansi dan unit lingkup pemerintah daerah termasuk analisa realisasi BOS ke dalam komponen operasional yang tidak melalui mekanisme APBD
 - Penyempurnaan Penjelasan akun-akun Laporan Keuangan secara lebih terinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- b. Melakukan Revisi Kebijakan Akuntansi
- c. Dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan merevisi Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2018.
- d. Intensifikasi Pengendalian Interen dari Inspektorat (SPIP)

2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 dan 2018 adalah 60,52 dan 62,59 dengan kategori B. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.65
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017 dan 2018

| No. | Komposisi Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 |
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 18,91 | 20,92 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 16,23 | 15,73 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,92 | 9,49 |
| d. | Evaluasi Kinerja | 10 | 5,84 | 6,29 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 9,62 | 10,17 |
| Hasil Nilai Evaluasi | | 100 | 60,52 | 62,59 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B | B |

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, maka pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal :

- a. Pada bulan Agustus tahun 2018, diselenggarakan coaching clinic dengan peserta seluruh perangkat daerah dan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini bertujuan untuk memberi masukan dalam rangka penyempurnaan Sistem AKIP perangkat daerah dalam menyusun dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti, Penyusunan Renstra OPD, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Evaluasi Kinerja dan Laporan Kinerja instansi pemerintah;
- b. Bulan Agustus sampai dengan September 2018, dilakukan pendampingan oleh tim percepatan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Bapedalitbang, Inspektorat dan Sekretraiat Daerah yang di wakili oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pembahasan penyusunan cascading kepada OPD sampel penilaian AKIP Pemerintah Daerah, yaitu sebanyak 20 OPD.
- c. Dilakukan koordinasi dan konsultasi hasil penyusunan cascading OPD sampel dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.

- d. Evaluasi terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pada bulan Oktober 2018, dengan menghadirkan 20 OPD sampel sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Skor Nilai LPPD

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ditetapkan target LPPD yang harus dicapai dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2018 yaitu 3,130 dengan skor penilaian sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap LPPD Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu 3,065 dengan skor penilaian sangat tinggi. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 96,38 persen.

Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, Nilai LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 berada pada urutan ke- 153. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong SKPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kedepannya, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Komitmen Kepala Daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren untuk menjadikan EKPPD sebagai ukuran dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Menyediakan sumber daya manusia (aparatur) dan dukungan anggaran yang memadai pada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyajikan seluruh dokumen laporan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD. Dengan demikian setiap perangkat daerah akan menyusun berbagai dokumen laporan seperti LKD, LKJIP, LKPJ dan LPPD dengan satu basis data.

- c. Memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang capaian IKK urusan pemerintahan sangat tinggi dan melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dengan capaian IKK rendah.
- d. Menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pencapaian IKK sesuai dengan urusan pemerintahan dan menentukan perangkat daerah lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian IKK tersebut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kelengkapan data pokok dan data penunjang sebagai lampiran yang diperlukan dalam proses evaluasi.

4. Level Maturitas SPIP

Pada tahun 2018, level Maturitas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan meraih peringkat level 3. Tercapainya target tersebut disebabkan karena kelengkapan dokumen atau bukti pendukung telah terpenuhi yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pementuan pengendalian intern. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP-RI Nomor S-2934/D3/02/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- A. Penilaian Atas Unsur Lingkungan Pengendalian
 - a. Penegakan integritas dan penegakan etika
Penegakan integritas memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor nilai 0,113.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
Penegakan Komitmen memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor nilai 0,113.
 - c. Kepimpinan yang kondusif.
Penilaian terhadap kepemimpinan yang kondusif telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor nilai 0,113. Unit Kerja yang telah memiliki Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2017 tentang pedomn penyusunan SAKIP yang telah disusun SOP mengenai SAKIP yang berlaku semua OPD.

- d. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Struktur organisasi pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan skor 0,150 yang mengacu PP 18/2016, sehingga lahir Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tanggal 1 November 2016.
- e. Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab
Delegasi wewenang dan tanggung jawab telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor 0,113. Pendegelasan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015.
- f. Kebijakan Pembinaan SDM
Kebijakan Pembinaan SDM telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor 0,113. Pada tahun 2017 BKPSDM melakukan pembaharuan dengan terbitnya keputusan kepala BKD nomor 800/020/BKPSDM-2017 tentang SOP dibidang kepegawaian dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD.
- g. Perwujudan Peran APIP
Perwujudan Peran APIP yang telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor 0,113. Peran Inspektorat pada tahun 2017 dipertegas dengan telah disusun Keputusan Bupati nomor 700/99/KPTS/BPT-PS/2017 tentang PKPT Inspektorat Tahun 2017 dan diperbaruinya Renstra Inspektorat 2016-2021, serta telah adanya internal audit charter pada Inspektorat.
- h. Hubungan Kerja yang Baik.
Hubungan kerja yang baik telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor 0,113. Kebijakan tentang mekanisme saling uji/rekonsiliasi data pada pemerintah kabupaten pesisir selatan tersisip dalam surat Keputusan Bupati Nomor 900/301/Kpts/BPT-PS/2016.

B. Penilaian Atas Unsur Penilaian Resiko

Penilaian Resiko tingkat maturitas unsur penilaian resiko dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut :

a. Identifikasi Resiko

Sub unsur identifikasi resiko telah dapat memenuhi kriteria “terdefinisi” dengan skor 0,300.

b. Analisis Resiko

Sub unsur analisis resiko dapat memenuhi kreteria “berkembang dengan skor 0,200.

C. Penilaian Atas Unsur Kegiatan Pengendalian

Secara umum penerapan kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Reviu Kinerja
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi
- d. Pengendalian Fisik atas Asset
- e. Penetapan dan Reviu Indikator
- f. Pemisahan Fungsi
- g. Otorisasi dan Kejadian Penting
- h. Otorisasi dan Kejadian Penting
- i. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- j. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- k. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
- l. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Sasaran 1.1.2 : Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1.1.2 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skala | B | B | 87,53 |
| 2 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 70,20 | 70,20* | 100 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8.43 | 8.47 | 100,47 |
| 4 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,01 | 13.51 | 96,43 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 96,11 |

Keterangan: *:angka perkiraan

Dari tabel di atas terlihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1.1.2 sebesar 96,11%, dengan tingkat pencapaian sasaran termasuk **Sangat Berhasil** serta kategori **Sangat Baik**.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil survey terhadap 16 (enam belas) unsur pelayanan diperoleh skor indeks kepuasan sebesar 77,29 yang bila dikonversikan akan memiliki mutu pelayanan B. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 adalah 88,3 (B). Dengan capaian tersebut maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 87,53%.

2. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung *Human Development Index* (HDI). Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Indikator kinerja angka Harapan Hidup merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2018 Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 70,20 tahun sementaraa Angka realisasi UHH tahun 2018 belum dipulis oleh

BPS. Namun bila kita bercermin pada capaian tahun 2017 dimana UHH Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 70,00 tahun, maka target RPJMD tersebut pada tahun 2018 optimis bisa dicapai.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang ditempuh. Indikator Rata-rata Lama Sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Target indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah 8.43 tahun dan terealisasi 8.47 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100,47%.

4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2018, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 14.01 dan terealisasi sebesar 13.51 tahun dengan capaian kinerja sebesar 96.43%.

MISI II:

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang Terkait dengan Sektor Unggulan Daerah

Misi II RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, terdiri dari :

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2.1.1 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|---------------|
| 1. | Persentase jalan Kabupaten dengan kondisi baik | % | 27.9 | 27.87 | 99.89 |
| 2. | Persentase jembatan kabupaten kondisi baik | % | 42.76 | 39.78 | 93.03 |
| 3. | Persentase Irigasi kondisi baik | % | 51.64 | 51.60 | 99,99 |
| 4. | Persentase Pasar Rakyat yang menuju Kriteria SNI | % | 18,18 | 18,18 | 100 |
| 5. | Persentase Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi | % | 50 | 65 | 130 |
| Rata-rata Capaian | | | | | 110,00 |

Dari Tabel 2.67 dapat dilihat, rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 sebesar 110,00 %. Pencapaian sasaran strategis 2.1.1 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan kabupaten. Berikut tabel realisasi persentase jalan kabupaten berdasarkan jenis dan kondisi jalan tahun 2018.

Tabel 2.68
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan Tahun 2017-2018

| No | Jenis dan Kondisi Jalan | Realisasi | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | 2017 | | 2018 | |
| | | (Km) | (%) | (Km) | (%) |
| 1 | Baik | 630,01 | 27 | 650,18 | 27,87 |
| 2 | Sedang | 246,48 | 10,57 | 250,61 | 10,74 |
| 3 | Rusak | 558,11 | 23,92 | 548,23 | 23,49 |
| 4 | Rusak Berat | 898,58 | 38,51 | 884,16 | 37,90 |
| Jumlah | | 2333,18 | 100 | 233,18 | 100 |

2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Berdasarkan hasil pemuktahiran data kondisi jembatan dan jembatan diketahui bahwa dari 42.76% jembatan kondisi baik yang ditargetkan, baru dapat terealisasi sebesar 39.78% atau dengan capaian kinerja 93.03%. hal ini disebabkan karena banyaknya jembatan dengan bentang yang cukup panjang, yang mesti ditingkatkan dan dipelihara sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

3. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Terjadi peningkatan kondisi irigasi dan luas jaringan irigasi. Pada tahun 2018, persentase jaringan irigasi kondisi baik menjadi 51.60% dari target sebesar 51,64% atau tingkat pencapaian mendekati 100%. Begitu juga halnya dengan luas areal terdampak jaringan irigasi, pada tahun 2018, Dalam jangka waktu tahun 2018 telah dibangun 22 unit bendungan dan saluran irigasi sepanjang 10.954 meter yang melayani daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 249 DI dengan luas 20.097 Ha pada tahun 2018.

4. Persentase Pasar Rakyat yang Menuju Kriteria SNI

Perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terlihat dari fokus pengalokasian anggaran untuk pembangunan pasar mulai dari tahun 2017 dan 2018. Dari tahun 2017 telah dibangun/direvitalisasi sebanyak 26 unit pasar baik pasar kabupaten maupun pasar nagari.

Selain revitalisasi fisik, Pemerintah Daerah juga telah dibenahi struktur dan tata kelola pasar. Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Daerah telah berhasil menjadikan 2 (dua) unit pasar menjadi Pasar yang menuju Kriteria SNI 8152.2015, yaitu Pasar Inpres Painan dan Pasar Kambang. Ke depan, secara bertahap akan dilakukan pembenahan sesuai kriteria yang ditetapkan terhadap pasar-pasar lainnya.

Dari hasil kerja keras tersebut, target indikator kinerja Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI tahun 2018 sebesar 18.18% dapat dicapai dengan tingkat capaian sebesar 100%. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tersebut,

klasifikasi penilaian indikator kinerja adalah **Sangat Berhasil** dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

5. Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Telekomunikasi

Dalam meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya. Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu melakukan pembenahan terhadap infrastruktur telekomunikasi, pengadaan alat penunjang telekomunikasi dan komunikasi seperti membangun jaringan *smartcity* sampai ke seluruh kecamatan, penambahan kapasitas *bandwide*, serta pembangunan jaringan data antar perangkat daerah.

Dari upaya tersebut yang juga didukung oleh peningkatan layanan komunikasi oleh profider swasta, maka pada tahun 2018 berhasil dicapai cakupan layanan telekomunikasi sebesar 65% dari 50% yang ditargetkan. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tersebut, klasifikasi penilaian indikator kinerja adalah **Sangat Berhasil** dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.2 terdiri dari 3 (tempat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------|---------------|
| 1. | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana | % | 72 | 77,5 | 108 |
| 2. | Persentase akses sanitasi layak | % | 73.13 | 73.13 | 100.05 |
| 3. | Persentase penduduk berakses air minum/bersih | % | 91.02 | 91.22 | 100.22 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 102,64 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2 sebesar 102,64 %. Pencapaian dari sasaran strategis 2.1.2 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani Sesuai Standar Kapasitas Bencana

Pada tahun 2018, realisasi kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana sebesar 77,5% dari 72% yang ditargetkan. Dengan tingkat capaian sebesar 107,64%, maka klasifikasi penilaian indikator kinerja ini adalah *Sangat Berhasil* dengan kategori *Sangat Baik*.

Secara umum kejadian bencana tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Angin Puting Beliung/Angin Badai.

Kejadian Bencana Tahun 2018 sebanyak 24 kali kejadian dengan kerugian Rp. 192.000.000,- dan kerusakan sedang rumah 6 unit.

b. Longsor

Kejadian bencana tahun 2018 sebanyak 11 kali kejadian dengan kerugian Rp. 900.000.000,-.

c. Hanyut/ Tenggelam /Meninggal Dunia

Kejadian bencana Tahun 2018 sebanyak 17 kali kejadian dengan hilangnya nyawa orang sebanyak 17 orang. Baik kejadian dilaut maupun sungai

d. Banjir.

Kejadian bencana Tahun 2018 yang terjadi sebanyak 16 Kali Kejadian dengan kerugian material maupun non material, baik mengungsi sebanyak 1.605 orang penduduk yang terdampak bencana, kerusakan rumah 866 unit TRD, jembatan 18 unit, jalan 2 unit total kerugian keseluruhan Rp. 4.193.000.000,-.

e. Abrasi Pantai.

Kejadian bencana pada Tahun 2018 sebanyak 2 kali kejadian dengan kerugian Rp. 100.000.000,-.

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab.

Rumah tangga yang memiliki jamban sehat pada tahun 2018 sebanyak 77,121 rumah tangga dari total 105.394 rumah tangga. Dengan demikian, capaian persentase akses sanitasi di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding dengan capaian tahun 2017 sebesar 9,16%. Pada tahun 2018 pencapaian target indikator akses sanitasi layak Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100,05 % dari target 73,13% dan terealisasi sebesar 73,17 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja Persentase Akses Sanitasi Layak adalah **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih

Jumlah akses penyediaan air minum yang telah dilayani oleh PDAM pada tahun 2018 mencapai 22.873 rumah tangga (juta) atau sebesar 21,67% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan akses penyediaan air minum yang Non PDAM berjumlah 15.831 rumah tangga atau cakupan layanan sebesar 15%. Sementara itu jumlah akses air minum non perpipaan (SGL, PMA dan PAH) berjumlah 57.592 rumah tangga atau 54,56% dari total jumlah rumah tangga.

Dengan kerja keras yang dilakukan, realisasi indikator persentase penduduk berakses air minum/bersih mengalami peningkatan yaitu dari 85,37 % pada tahun 2016 dan 87,86 % tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Bersih ditargetkan sebesar 91,02 dengan realisasi sebesar 91,22 atau 100,22%. Capaian indikator persentase penduduk berakses air minum/bersih pada tahun 2018 ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

MISI III:

Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Misi III RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Pengalaman nilai-nilai agama dan peran lembaga adat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ | % | 80 | 77 | 96.25 |
| <i>Rata-Rata Capaian</i> | | | | | 96,25 |

1. Persentase Potensi Zakat yang di Kelola oleh BAZ

Indikator kinerja persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ, ditargetkan 80% dan terealisasi sebesar 77% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,25%. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini termasuk **sangat berhasil** dengan kategori penilaian **sangat baik**.

Potensi zakat tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 10.779.282.835,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.302.365.868,- (Delapan milyar tiga ratus dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan perlu terus ditingkatkan dimasa mendatang. Beberapa Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ berasal dari PNS, karyawan swasta dan perorangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja presentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ Tahun 2018 yaitu :

1. Melakukan sosialisasi yang inten sehingga tumbuh kesadaran muzaki untuk berzakat.
2. Penataan administrasi yang transparan dan akuntabel
3. Penyaluran tepat sasaran sehingga manfaatnya betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat
4. Membuka akses bagi masyarakat yang ingin tahun seputar pengelolaan zakat

MISI IV:

Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan

Misi IV RPJMD tahun 2016-2021 memuat 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan serta Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | Peningkatan Produksi Utama | | | | |
| a | Padi | Ton | 296.078 | 352.393 | 119,02 |
| b | Jagung | Ton | 117.398 | 135.484 | 115,41 |
| c | Daging | Kg | 2.973.916 | 4.489.635 | 150,97 |
| d | Telur | Kg | 1.618.384 | 2.140.771 | 132,28 |
| e | Ikan | Ton | 53.946 | 51.495 | 95,46 |
| 2. | Skor pola pangan harapan | % | 80 | 80.5 | 100,63 |
| <i>Rata-Rata Capaian</i> | | | | | 111,63 |

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran

strategis 4.1.1 sebesar 111,63% Pencapaian dari sasaran strategis 4.1.1 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Meningkatkan Produksi Utama

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2018 terhadap target produksi komoditi utama adalah sebagai berikut.

a. Padi

Target produksi padi pada tahun 2018 adalah sebesar 296.078 ton dengan realisasi mencapai 352.393,23 ton atau dengan capaian 119,02%. Dibandingkan produksi tahun 2017, produksi padi tahun 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar 24.278 ton atau 6,52%.

b. Jagung

Produksi jagung tahun 2018 tercapai sebesar 135.484 ton dari target sebesar 117.398 ton atau tingkat capaian 115,41%. Dibandingkan produksi tahun 2017, produksi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 33.617,16 ton atau 19,87%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 60.207 ton atau 14,33%.

c. Daging

Peningkatan produksi daging dari tahun 2017 sebesar 4,454,671 kg mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,489,635 kg. Ada peningkatan sebesar 34,964 kg. Dari data pemotongan ternak sapi tercatat tahun 2018 sebanyak 6,026 ekor sedangkan tahun 2017 hanya sebanyak 5.908 ekor. Sementara itu ternak kerbau tahun 2017 sebanyak 184 ekor dan tahun 2018 meningkan menjadi sebanyak 186 ekor. Begitu jugadengan kambing yang naik dari 1.597 ekor tahun 2017 menjadi 1,757 tahun 2018.

d. Telur

Produksi telur unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur dan Itik) meningkat dari 2,118,357 kg di tahun 2017 menjadi 2,140,771 kg di tahun 2018. Terdapat peningkatan produksi telur sebesar 22.142 kg. Produksi telur tahun 2018 disumbang oleh telur ayam buras sebanyak 509.282 kg, telur ayam ras petelur sebanyak 757.739 kg dan telur itik sebanyak 873.750 kg.

e. Ikan

Secara umum produksi perikanan pada tahun 2018 meningkat dari 49.783 ton menjadi 51.495,96 ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,44 %. Nilai produksi perikanan tersebut berasal dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2018 ditargetkan sebesar 36.940 ton dan terealisasi sebesar 38.319 Ton atau meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 37.069 ton (0,35 %). Target produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 13.431 ton dengan realisasi produksi 13.176,88 ton atau 98,11 %.

2. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2018 cenderung semakin baik dan kondusif.

Skor Pola Pangan Harapan tahun 2018 adalah 80,5% dari 80% yang ditargetkan. Menurut ketentuan, apabila skor aktual kelompok bahan pangan per-hari memang sudah diatas Angka Kecukupan Energi, namun keberagaman dan keseimbangan konsumsi masyarakat perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat tentang penting keragaman dalam pemenuhan zat gizi yang dibutuhkan tubuh karena tidak ada satu jenis pangan yang mampu memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh yang sangat beragam.

Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------|--------------|
| 1. | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan) | % | 9.03 | 8.53* | 94.46 |
| 2. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan) | % | 12.59 | 12.53* | 99,52 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 96.99 |

Keterangan: *) = angka sangat-sangat sementara hasil prediksi internal

Dari tabel terlihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 adalah sebesar 96.99%. Rata-rata capaian sasaran strategis 4.1.2 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan nilai yang cukup baik. Pada tahun 2017 nilai kontribusi sektor industri mencapai 8,83%. Untuk tahun 2018, diprediksi kontribusi sektor industri terhadap PDRB sedikit mengalami penurunan yaitu sekitar 8,53%. Angka ini merupakan angka perhitungan sementara karena data resmi dari BPS belum dipublikasikan.

2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2018 yang diprediksi mencapai angka 12.53%. Angka ini yang lebih tinggi dibanding tahun 2017 yaitu 12.23%. Peningkatan ini merupakan imbas dari kebijakan Bupati Pesisir Selatan yang fokus pada penataan dan revitalisasi pasar rakyat. Dengan dilakukannya revitalisasi terhadap pasar pasar rakyat maka transaksi perdagangan diharapkan semakin meningkat sehingga dapat memicu peningkatan perputaran roda perekonomian di daerah.

Sasaran 4.1.3 : Terwujudnya Pesisir Selatan Menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian

sasaran strategis 4.1.3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|---|--------|-----------|-----------|--------------|
| 1. | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Wisnu) | Orang | 2.600.000 | 2.479.841 | 95.38 |
| 2. | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara (Wisman) | Orang | 1.800 | 1.623 | 90.17 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | 92.77 |

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 4.1.3 adalah sebesar 92.77%. Rata-rata capaian sasaran strategis 4.1.3 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnu)

Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang yang besar. Objek objek wisata yang ada dapat mengundang daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya. Selaian dikenal dengan wisata bahari yang menarik, Pesisir Selatan juga memiliki destinasi wisata alam lain yang tidak kalah dan unik seperti jembatan akar, negeri di atas awan, beberapa air terjun eksotik dan lokasi arung jeram.

Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 mencapai angka 2.479.841 orang atau sebesar 95,38% dari target yang ditetapkan yaitu 2.600.000 orang wisatawan. Jumlah ini sedikit lebih besar dari kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun 2018 yaitu sebanyak 2.350.000 wisatawan.

2. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada tahun 2018 adalah 1.623 orang atau 90,17% dari target yaitu 1.800 wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara dari tahun ke tahun memang belum begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya target pasar dari kawasan wisata di Pesisir Selatan. Selain itu, juga masih diperlukan upaya

promosi yang lebih kreatif guna lebih “menduniakan” destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Selatan.

MISI V:

Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang

Misi V RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 5.1.1 : Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1 Tahun 2018

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 2. | Persentase kasus PERDA yang diselesaikan | % | 85 | 99 | 116,47 |
| <i>Rata-rata Capaian</i> | | | | | 116,47 |

1. Persentase Kasus Perda yang di Selesaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja pada sasaran ini, sebagaimana table di atas, memperlihatkan capaian indikator kinerja Persentase kasus Perda yang diselesaikan pada Tahun 2018 tercapai sebesar 116%. Keberhasilan angka persentase capaian tersebut, tidak terlepas dari peran aktif anggota linmas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat

Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | Jumlah Dasa Wisma Maju | Unit | 545 | 545 | 100 |
| <i>Rata-rata Capaian</i> | | | | | 100 |

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2 adalah sebesar 100%. Rata-rata capaian sasaran strategis ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Jumlah Dasa Wisma Maju

Kelompok Dasa Wisma merupakan unit terkecil dari kelompok PKK yang terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT). Dari 10 anggota itu, ada seorang penanggung jawab untuk memantau kondisi rumah tangga yang lain. Prinsip dasawisma adalah pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga. Pada tahun 2018, terdapat 4.515 Dasa Wisma di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari seluruh Dasa Wisma tersebut, 545 unit sudah berkategori maju, 2.586 kategori berkembang dan 1.385 berkategori tumbuh.

2.2.3. Prestasi Daerah

Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018, antara lain :

1. Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham.
2. Piagam penghargaan Satya Lancana Bakti Sosial dari Kemensos.
3. Sertifikat ISO 9001 : 2015 dari BSI
4. Sekolah Adiwiyata Nasional 2018 SD 08 Painan dari KLH dan Kemendiknas.
5. WTP dari BPK RI
6. Anugerah Parahita Ekapraya dari Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Sekolah Sehat III tingkat nasional, MTs.N 1 Pesisir Selatan.
8. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KI (Sumbar)

9. Prediket Kepatuhan Hijau dari Ombusman RI.
10. Sertifikat penghargaan PROKLIM Kampung Alai Nagari Amping Parak
11. Kalpataru tgkt prov. An. Kelompok Cinta Bahari Nusantara (CBN) Salido.
12. Kalpataru tgkt prov. An. Laskar pemuda peduli Lingkungan (LPPL) Amp. Parak
13. Nagari Sungai Gayo Lumpo Juara II Lomba Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
14. KAN Kambang Juara II Penilaian Lomba KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
15. Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Juara 1 Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
16. Kec. Sutera sebagai Juara Lomba Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumbar.
17. Juara 2 Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) Tingkat Prov. Sumatera Barat.
18. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu SDN 01 Asam Kumbang.
19. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu SDN 21 Koto Kandis.
20. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu SMPN 1 Painan.
21. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu SMPN 4 Sutera.
22. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu MTSN 2 Pesisir Selatan.
23. Pembina PROKLIM tingkat nasional utk Bpk. Bupati.
24. *National Procurmen Award* kategori komitmen penerapan standar LPSE 2014.
25. Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Terbaik III yaitu Kecamatan Sutera
26. Ayah - Bunda GenRe (ABG) Award Kategori " INSPIRATOR " Tk. Provinsi Sumatera Barat.
27. Terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik kategori OPD.
28. Terbaik III Tingkat Prov. Sumbar Nagari Lunang 3.
29. Juara 1 Lomba Asah Trampil Peternak Tk. Sumbar.

30. Juara 3 Siwab Award Prov. Sumbar.
31. Juara 2, Lomba Kerbau Jantan Tk. Prov. Sumbar.
32. Juara 2 Lomba Sapi Bali Tk. Prov. Sumbar.
33. Juara 2 Lomba Sapi PO Jantan, Tk. Prov. Sumbar.
34. Juara Harapan 1 Lomba Sapi PO Betina, Tk. Prov. Sumbar.
35. Juara Harapan 1 Lomba Sapi Simenthal Anak, Tk. Prov. Sumbar.
36. Juara Harapan 2 Lomba Kerbau Betina, Tk. Prov. Sumbar.
37. Juara Harapan 2 Lomba Sapi Simenthal betina, Tk. Prov. Sumbar.
38. Juara Harapan 3 Lomba Sapi Bali Jantan, Tk. Prov. Sumbar.
39. Juara Harapan 3 Lomba Kambing Cempe Prov. Sumbar pada ajang Ternak expo 2018.
40. Juara 1 Organisasi Sosial Berprestasi dari Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat.
41. Juara harapan I Perempuan Inspiratif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Sumbar.
42. Juara Harapan I, Lomba Posyandu Terintegrasi Tk. Prov. Sumbar a.n. Kec. Lengayang.
43. Juara Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja II Tk. Prov. Sumbar a.n. Kec. IV Jurai.
44. Juara Harapan I Lomba Gerakan PKK Bid. Pokja III Tk. Prov. Sumbar a.n. Kec. Lengayang.
45. Juara 3 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Prov. Sumbar. (Dinas Perhubungan) (Lokasi, tanggal dan tahun penerimaan)
46. Juara II Penyuluh THL berprestasi Tk. Sumbar (a.n. Itrizal)
47. Juara III Balai Penyuluh kec. Berprestasi Tk. Sumbar (BPP SUTERA)
48. Juara 1 Pemuda Pelopor Bid. Pangan Tk. Prov. Sumbar.
49. Juara Harapan 2 Pemuda Pelopor Bidang Pangan Tk. Nasional
50. ASN inspiratif Nasional a.n. Syafrudin, S.H., M.Si, Kabid E-Gov Diskominfo.
51. Juara 1 karya cipta Alat Teknologi Tepat Guna Tk. Prov. Sumatera Barat a.n. Dabiruddin

52. Juara II lomba Pendataan Keluarga dalam Rangka Jambore Terpadu PKK IPe KB dan TTG Tingkat Sumatera Barat a.n, Defi Suryawati. Amd. Kep.
53. Juara II Duta GenRe Putra Sum. Barat Jalur Pendidikan An. Ahmad Ridha.
54. Juara II Duta GenRe Kepemimpinan Putri Sum. Barat An. Rintami Panglipuringtyas.
55. Uni Duta Wisata Pesisir Selatan Tahun 2018 mendapat Predikat Uni Duta Wisata Sumatera Barat Tahun 2018.
56. Uda Duta Wisata Pessel Tahun 2018 mendapat predikat Uda Favorit Duta Wisata Sumatera Barat Tahun 2018.
57. Peringkat 3 bagi Perseorangan yang berjasa dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas Tk. Prov. Sumbar.
58. Juara II Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Propinsi Sumatera Barat (Menu Kudapan) Lokasi, Tanggal dan tahun, Foto dan sertifikat
59. Juara III lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Propinsi Sumatera Barat (Menu Keluarga) Lokasi, Tanggal dan tahun, Foto dan sertifikat

Dokumentasi Foto:



Piagam Penghargaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018



Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD 2017 dengan Opini WTP



Piagam Nilai AKIP Tahun 2018 dengan Predikat BB



Sertifikat ISO 9001 : 2015 dari BSI untuk Standar Mutu Pelayanan Perizinan



Penghargaan Pelayanan Kependudukan Terbaik Nasional dari Kementerian Dalam Negeri



Piala Adipura Tahun 2018



Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan



Penghargaan National Procurement Award

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dari indikator kinerja RPJMD tahun 2016-2021, baik Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis daerah maupun Indikator Kinerja Daerah perurusan penyelenggaraan pemerintah menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan berikut.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Daerah Terkait Prioritas Pembangunan Daerah

Terhadap pelaksanaan 10 prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 masih terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

- a. Masih belum optimalnya implementasi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh semakin kuatnya arus globalisasi dan pergeseran tata nilai dalam kehidupan.

- b. Masih belum maksimalnya upaya penanaman nilai budaya dan kearifan lokal pada generasi muda sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- c. Pola pikir masyarakat bahwa kearifan lokal sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- d. Budaya hedonisme semakin meningkat di masyarakat, sehingga pengamalan agama semakin menurun.
- e. Pola hidup masyarakat yang serba instan dan pengaruh teknologi, sehingga pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat mulai dilupakan.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

- a. Masih rendahnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi standar pelayanan minimal.
- c. Masih rendahnya daya saing siswa yang disebabkan karena sistem pendidikan yang belum dikelola secara optimalnya.
- d. Masih terbatasnya tenaga pendidik baik dari segi jumlah maupun kompetensi.
- e. Masih rendahnya peran masyarakat/keluarga dalam memotivasi dan mengontrol minat anak-anaknya.
- f. Masih rendahnya siswa didik memahami bakat dan potensi yang dimiliki.
- g. Belum maksimal memetakan potensi guru dan pendistribusian guru ke sekolah-sekolah.
- h. Masih kurangnya minat siswa dalam menambah pengetahuan diluar jam sekolah seperti mengikuti bimbingan belajar dan kegiatan lainnya.
- i. Belum ada SOP/ penilaian kemampuan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa didik.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

- a. Masih terdapatnya balita gizi buruk
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah perdesaan
- c. Masih kurangnya tenaga medis terutama dokter dan dokter ahli

- d. Masih kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pola hidup sehat dari masyarakat
- e. Tingkat pendidikan dan pendapatan yang masih kurang di masyarakat, sehingga memelihara kesehatan bukan menjadi prioritas utama
- f. Masih kurang peduli masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah
- g. Masih ada budaya buang air besar di lingkungan/sungai sebagian masyarakat

4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

- a. Masih rendahnya produktivitas hasil komoditi lokal yang disebabkan oleh kurangnya kreativitas dan lemahnya jiwa entrepreneurship masyarakat.
- b. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan terutama disebabkan oleh lemahnya penguasaan terhadap teknologi produksi dan manajemen pemasaran.
- c. Belum optimal/ adanya asosiasi/lembaga yang membina kelompok/UMKM untuk peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal
- d. Belum fokus dan optimal dalam pengembangan komoditi lokal untuk peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal
- e. Belum siapnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi dalam pengolahan produk
- f. Pelaku usaha menghasilkan produk belum berdasarkan kebutuhan/keinginan pasar
- g. Belum optimalnya lembaga/asosiasi yang ada untuk memasarkan produk hasil komoditi lokal
- h. Gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai produk olahan bukan komoditi lokal

5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

- a. Ketergantungan sektor pariwisata terhadap campur tangan pemerintah masih sangat tinggi yang disebabkan karena masih rendahnya minat swasta untuk berinvestasi di sektor pariwisata.
- b. Pariwisata belum menjadi industri sehingga *gain from tourism* yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat belum terwujud secara optimal.
- c. Kearifan Lokal yang belum sepenuhnya siap untuk menerima pengaruh dari sebuah kawasan wisata
- d. Belum adanya/optimalnya fungsi kelembagaan yang mendukung untuk pengembangan daya tarik dan pemasaran industri pariwisata
- e. Belum optimalnya/fokusnya pengembangan pariwisata yang mempunyai nilai jual yang berbeda dengan wilayah lain
- f. Pengembangan pariwisata masih fokus terhadap konsep wisata masal atau booming sesaat

6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan strategis lainnya masih belum terpadu yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
- b. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan sulit dipenuhi APBD dalam jangka pendek
- c. Belum optimalnya komitmen Stakeholder terkait dalam mengimplementasikan pembangunan untuk pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
- d. Belum optimal peran lembaga dalam mendorong pengembangan kawasan seperti Bumrag Bersama
- e. Budaya masyarakat yang tidak fokus dan cenderung berorientasi pada keuntungan sesaat

7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

- a. Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu layanan dasar bagi masyarakat belum dapat dipenuhi secara optimal yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendukung partisipasi swasta baik dalam pola investasi maupun pola kerja sama
- b. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat yang berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan
- c. Belum fokus terhadap skala prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran dan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

- a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
- b. Masih sulitnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar.
- c. Penggunaan basis data terpadu yang belum optimal dalam penanggulangan kemiskinan
- d. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja disektor hilir (industri) di daerah dibandingkan dengan angkatan / pencari kerja
- e. Sebagian besar petani pendapatannya masih di bawah rata-rata hidup sejahtera
- f. Belum optimal menghasilkan siswa/mahasiswa yang memiliki keterampilan sesuai bakat yang dimiliki, sehingga tenaga kerja yang ada hanya mengandalkan tenaga buruh/ bukan kreativitas
- g. Tidak seimbang pendapatan dengan pengeluaran kepala keluarga, karena masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan yang latar belakang pendidikan rendah dan memiliki banyak tanggungan/ anak
- h. Budaya/ kemampuan kreatifitas dan jiwa wirausaha yang dimiliki angkatan kerja masih kurang

9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

- a. Masih perlunya penguatan terhadap pengimplementasian reformasi birokrasi terutama dalam penyiapan aparatur yang profesional, kompeten dan berdedikasi terhadap pelayanan prima.
- b. Belum optimalnya penerapan e-government sebagai arus utama dalam sistem manajemen pemerintahan.
- c. Belum optimalnya penempatan sumber daya manusia sesuai kemampuan dan minat
- d. Belum optimalnya penyebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan sebuah stakeholder
- e. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan sebuah unit kerja/stakeholder
- f. Belum optimalnya penerapan hukuman dan penghargaan terhadap sumber daya manusia yang melanggar dan memiliki prestasi

10. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

- a. Mulai melemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban serta pencegahan penyakit masyarakat.
- b. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya terutama pada generasi muda dan pelajar.
- c. Belum optimalnya peran keluarga dalam meningkatkan disiplin pergaulan anak-anaknya terhadap lingkungan
- d. Belum optimalnya penerapan ilmu agama terhadap generasi muda/ anak-anak di rumah
- e. Masih ada budaya dalam keluarga, salah satu bentuk rasa sayang terhadap anak-anak dengan memberikan kebebasan terhadap anak dalam bergaul dengan lingkungan dan penerapan ilmu agama adalah hak anak-anaknya
- f. Masih ada budaya di masyarakat untuk menutupi kenakalan yang dilakukan oleh keluarganya

- g. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, kriminalitas
- h. Belum optimalnya kinerja penegak hukum
- i. Masih ada rasa tidak percaya terhadap penegak hukum di masyarakat, sehingga terjadi kriminalitas di masyarakat sering tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum
- j. Belum optimalnya fungsi organisasi masyarakat dalam mengatasi kriminal, misalnya poskamling dan organisasi lainnya
- k. Belum ada/optimalnya fungsi kelembagaan/ organisasi untuk mengatasi permasalahan narkoba di masyarakat desa seperti BNN dan organisasi/kelembagaan lainnya yang mempunyai fungsi mengurangi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba/obat terlarang di masyarakat desa
- l. Belum optimalnya keberadaan/fungsi wadah untuk menyalurkan aktifitas/bakat generasi muda di luar jam pendidikannya

B. Permasalahan Daerah Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Daerah

Masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu disikapi dalam pencapaian target kinerja dari sasaran strategis daerah antara lain:

1. Permasalahan pada Sasaran 3 Misi Keempat: Terwujudnya Pesisir Selatan Menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat.
 - a. Target kunjungan wisatawan nusantara sebesar 2.600.000 orang baru tercapai sebesar 2.479.481 orang tahun 2018, sedangkan wisatawan mancanegara sebesar 1.800.000 baru tercapai 1.623.000 orang tahun 2018.

Untuk itu stakeholder terkait diharapkan dapat memfokuskan program yang dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Selain itu juga perlu koordinasi dan sinergi yang intensif dengan provinsi dan pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata serta peningkatan pemasaran industri wisata.
 - b. Capaian PAD Sektor Wisata

Belum tercapainya target PAD dari sektor wisata yang ditargetkan sebesar Rp. 2.500.000.000 baru dicapai sebesar Rp. 1.316.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus fokus dan optimal dalam meningkatkan capaian PAD sektor Wisata melalui penerapan sistem online terpadu dalam penerimaan pajak atau sumber pendapatan lainnya di sektor pariwisata

2. Permasalahan pada Sasaran 3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan

a. Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target sasaran 3, diketahui bahwa permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah konektivitas khususnya terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kondisi jalan dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018, dari total 2.333,18 km panjang jalan kabupaten, 72,13 persen diantaranya atau sepanjang 1.682,92 km diantaranya dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah yang dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, topografi wilayah yang banyak dialiri sungai, menjadikan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan infrastruktur jembatan dalam melakukan mobilitas. Berdasarkan data tahun 2018, jembatan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan hanya 39.42 persen, itupun sebagian besar diantaranya berupa jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua saja.

b. Persentase irigasi kondisi baik

Jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan melayani areal terdampak seluas 11.303,99 Ha. Namun amat disayangkan karena kondisi daerah yang rawan terhadap banjir dan menyebabkan jaringan irigasi di Pesisir Selatan banyak mengalami kerusakan, dimana saat ini hanya 51,64 persen saja yang dalam kondisi baik. Masalah irigasi sangat mempengaruhi tingkat produksi komoditas pertanian. karena itu perlu terbosan dan perbaikan tata kelola irigasi di masa depan.

c. Persentase Pasar Rakyat yang Menuju Kriteria SNI

Pasar sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memfokuskan perhatian pada pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat yang terlihat dari fokus pengalokasian anggaran untuk pembangunan pasar pada tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa Pasar Rakyat telah dibenahi dan telah dilengkapi fasilitas Ruang Dagang dan Struktur Pengelola sampai tahun 2019 sebanyak 26 pasar. Dan sudah 10 pasar rakyat yang telah menuju kriteria SNI, sedangkan Pasar Rakyat yang lainnya secara bertahap akan dilakukan pembenahan sesuai kriteria SNI. Hal ini tak terlepas dari besarnya investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 48 pasar yang ada di Pesisir Selatan.

2. Permasalahan pada Sasaran 2 Misi Ke-Dua: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial

Permasalahan utama terkait pencapaian kinerja Sasaran 4 adalah masih rendahnya cakupan masyarakat yang telah memiliki akses pada sanitasi layak dan air bersih yaitu hanya sebesar 73,17 persen dan 91,22 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena secara nasional telah ditetapkan target universal akses pada tahun 2019 dengan slogan 100:0:100 yaitu 100% masyarakat telah mengakses sanitasi layak, 0% kawasan kumuh dan 100% masyarakat menikmati air bersih. Untuk mencapai target tersebut Stakeholder terkait harus lebih fokus dan meningkatkan integrasi kegiatan-kegiatan yang akan mencapai target tersebut.

3. Permasalahan Sasaran 2 Misi Ke-Empat: Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah

Terdapat dua target kinerja untuk sasaran 2 misi ke-empat ini yaitu kontribusi sektor industri dan sektor perdagangan terhadap PDRB. Kedua indikator kinerja ini masih memperlihatkan kinerja yang belum memuaskan karena hanya berada pada angka 8.53% dan 12.53%. Bila disandingkan dengan target Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin menjadi daerah maju maka

pengembangan sektor industri dan perdagangan ini mau atau tidak mau harus menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Untuk itu dalam rencana pembangunan tahun 2020 pemerintah daerah akan memfokuskan upaya pada peningkatan nilai tambah perekonomian dengan memacu sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif baru dalam perekonomian daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan alih teknologi, meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha pada pelaku ekonomi, meningkatkan iklim investasi, mencarikan pangsa pasar untuk produk hasil olahan/industri rumah tangga dan usaha makro, kecil dan menengah yang sudah ada.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum berjalan dengan baik. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan baik dalam LKPj dan LPPD Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa kendala dan tantangan pembangunan yang perlu menjadi fokus penanganan di tahun 2020. Beberapa permasalahan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata-rata lama sekolah masih 8,47 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun masih 99,43%. Dengan demikian masih 0,67% usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM tenaga pendidik sehingga berimbas pada rendahnya daya saing siswa.

2. **Urusan Kesehatan**

Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang terbatas masih menjadi kendala yang utama dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (1:666.667), sementara 1 rumah sakit idealnya melayani sebanyak 100.000 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 500.000 ribu jiwa, membutuhkan 5 rumah sakit, sementara ketersediaan rumah sakit baru 3 unit, sehingga kedepannya perlu direncanakan/dibangun 2 rumah sakit lagi. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan (SDK) menjadi faktor penghambat lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah alat kesehatan yang terbatas, masih kurangnya tenaga penunjang medis serta jumlah tenaga medis dan jumlah dokter spesialis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi yang saat ini banyak mengalami kerusakan sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Perlu intervensi dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan yang membutuhkan investasi yang sangat besar.

4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Saat ini masih terdapat rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni dan belum memiliki penerangan/listrik. Selain itu masih diperlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat yang saat ini masih belum optimal.

5. **Sosial**

Masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya pemanfaatan data terpadu dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan masalah sosial serta kinerja Dinas Sosial sebagai pelaksana

teknis menyelenggarakan urusan sosial belum mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan secara signifikan.

B. Penyelenggaraan UrusanWajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan TenagaKerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah mencerminkan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan masih rendahnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi ini maka berarti terbatas pula jumlah kesempatan kerja yang ada. Masih banyak jumlah pengangguran terdidik karena masih minimnya lapangan kerja dan spesifikasi yang tidak sesuai dengnan lapangan kerja yang ada. Faktor lain jumlah wirausahawan baru yang masih rendah

2. Urusan PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Adanya kecendrungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masalah ini terindikasi dari swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang semakin rendah. Hal ini diduga salah satunya disebabkan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana seharusnya.

3. Urusan Perhubungan

Saat ini ketersediaan model transportasi publik yang layak dan nyaman di Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih maraknya transportasi tanpa izin seperti travel liar, ojek dan becak motor. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan kualitas sarana dan prasarna perhubungan serta belum tersedianya terminal angkutan barang.

4. Urusan Penanaman Modal

Daya tarik investor untuk melakukan investasi masih rendah, hal ini terkait dengan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendukung di kawasan potensi berinvestasi. Disamping itu belum adanya legalitas dokumen perencanaan tata ruang detail (RDTR) yang merupakan sebagai kepastian hukum lokasi untuk berinvestasi oleh investor. Faktor lainnya yaitu; daerah Kabupaten Pesisir Selatan

merupakan daerah yang rawan bencana, sehingga rasa nyaman untuk berusaha kurang. Daya tarik investor rendah terhadap kabupaten pesisir selatan karena daya beli masyarakat lemah disebabkan pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah dan kurang akuratnya informasi potensi investasi dan belum optimalnya promosi.

5. Urusan Perpustakaan dan Arsip

Budaya baca dan literasi masyarakat yang masih belum baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya jumlah pengunjung dan jumlah keanggotaan perpustakaan, maka perlu gerakan terpadu untuk menggalakkan budaya literasi dan budaya baca masyarakat semenjak usia dini. Disamping itu masih terbatasnya akses masyarakat memperoleh informasi melalui buku, maka perlu meningkatkan akses untuk mempermudah mendapatkan buku bacaan yang diinginkan masyarakat.

Dalam pengelolaan arsip sumber daya yang dimiliki masih rendah, maka perlu meningkatkan kualitas pengelola arsip. Selain itu penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah belum optimal, sehingga perlu meningkatkan teknologi pengelolaan arsip dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan arsip/dokumen daerah

C. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat miskin dan tidak masuk dalam kelompok. Sementara paket bantuan yang diberikan biasanya diserahkan kepada kelompok. Maka tentu saja nelayan miskin tersebut jarang mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Kesulitan benih pada pembudidaya serta harga pakan yang relatif mahal. Selain itu, nilai tambah dari komoditi perikanan juga masih rendah karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk barang mentah.

2. Urusan Pariwisata

Secara umum pada urusan pariwisata menghadapi tantangan berupa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, belum adanya

sinergitas antara sektor-sektor produktif dengan sektor pariwisata, disamping masih belum berkembangnya ekonomi kreatif. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam rencana pengembangan sektor wisata serta masih minimnya sumber daya manusia lokal pariwisata. Untuk mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah baik secara finansial maupun SDM

3. Urusan Pertanian

Terbatasnya penguasaan teknologi budidaya dan pasca panen oleh petani menyebabkan nilai produksi dan produktifitas komoditi hasil pertanian masih relatif rendah. Untuk mempercepat desiminasi teknologi ke petani masih terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian. Faktor lain, terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan) dan terjadinya perusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian serta masih adanya alih fungsi lahan.

4. Urusan Perdagangan

Keberadaan sebagian pasar rakyat yang kondisinya masih perlu dibenahi dalam rangka untuk kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Karena itu, program revitalisasi pasar rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tahun 2020. Daya saing bisnis perdagangan yang masih rendah, belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk, belum adanya pasar tertib ukur serta belum optimal penataan pusat perdaganagan. Belum adanya kerjasama dengan wilayah tetangga untuk memasarkan komoditi unggulan yang dimiliki daerah.

TABEL 2.62

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR SELATAN

| No | Kode Rekening | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output) | Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 | | Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKP Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2019) yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2018) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (%) | | SKPD Penanggung Jawab | | |
|----|---------------|----|----|----|----|----|--|--|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---|-------------|---|-------|---|---------------|---|-----------------|---------------------------------|---|-----|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | | |
| | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | URUSAN PENDIDIKAN | | | | | | 651.203.006.140 | | 268.509.887.881 | | 126.897.439.450 | | 3.366.009.186 | | | 265.838.232.066 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (bln) | 72 | 26.110.141.560 | 36 | 8.206.717.248 | 12 | 3.784.928.760 | 3 | 330.770.727 | 25,00 | 8,74 | 39 | 8.537.487.975 | 54,17 | 32,70 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor selama 12 bulan | 72 | 657.600.000 | 36 | 387.393.696 | 12 | 342.000.000 | 3 | 66.316.677 | 25,00 | 19,39 | 39 | 453.710.373 | 54,17 | 68,99 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 5 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jasa jaminan barang milik daerah selama 12 bulan | 72 | 295.824.000 | 36 | 547.026.000 | 12 | 49.304.000 | 2 | 3.590.000 | 16,67 | 7,28 | 38 | 550.616.000 | 52,78 | 186,13 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 7 | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan | 72 | 1.694.700.000 | 36 | 107.322.000 | 12 | 282.450.000 | 2 | 45.000.000 | 16,67 | 15,93 | 38 | 152.322.000 | 52,78 | 8,99 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor selama 1 tahun | 72 | 1.188.724.560 | 36 | 199.684.750 | 12 | 198.120.760 | 0 | - | - | - | 36 | 199.684.750 | 50,00 | 16,80 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jasa perbaikan peralatan selama 12 bulan | 72 | 274.500.000 | 36 | 325.335.700 | 12 | 45.750.000 | 3 | 9.239.500 | 25,00 | 20,20 | 39 | 334.575.200 | 54,17 | 121,89 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Ketersediaan alat tulis (bln) | 72 | 330.000.000 | 36 | 115.983.000 | 12 | 55.000.000 | 3 | 22.069.500 | 25,00 | 40,13 | 39 | 138.052.500 | 54,17 | 41,83 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Ketersediaan barang cetakan (bln) | 72 | 494.150.000 | 36 | 344.650.000 | 12 | 57.188.000 | 3 | 20.478.200 | 25,00 | 35,81 | 39 | 365.128.200 | 54,17 | 73,89 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Ketersediaan komponen instalasi listrik (bln) | 72 | 276.606.000 | 36 | 43.745.000 | 12 | 46.101.000 | 0 | 6.103.000 | - | 13,24 | 36 | 49.848.000 | 50,00 | 18,02 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (bln) | 72 | 5.978.100.000 | 36 | 300.585.000 | 12 | 996.350.000 | 0 | - | - | - | 36 | 300.585.000 | 50,00 | 5,03 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Ketersediaan bahan bacaan / koran dan majalah (bln) | 72 | 87.000.000 | 36 | 648.041.590 | 12 | 14.500.000 | 3 | 930.000 | 25,00 | 6,41 | 39 | 648.971.590 | 54,17 | 745,94 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Ketersediaan kebutuhan makan minum rapat dan tamu (bln) | 72 | 771.300.000 | 36 | 239.471.000 | 12 | 128.550.000 | 3 | 17.393.850 | 25,00 | 13,53 | 39 | 256.864.850 | 54,17 | 33,30 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | tersedianya operasional perjalanan dinas luar daerah (bln) | 72 | 319.500.000 | 36 | 184.464.000 | 12 | 53.250.000 | 3 | 6.075.000 | 25,00 | 11,41 | 39 | 190.539.000 | 54,17 | 59,64 | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | tersedianya operasional perjalanan dinas dalam daerah (bln) | 72 | 627.750.000 | 36 | 659.238.012 | 12 | 104.625.000 | 3 | 6.075.000 | 25,00 | 5,81 | 39 | 665.313.012 | 54,17 | 105,98 | | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|----|----|----|----|----|-----|--|---|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan | 90 | 8.071.387.000 | 45 | 3.940.637.000 | 15 | 48.640.000 | 0 | 1.000.000 | - | 2,06 | 45 | 3.941.637.000 | 50,00 | 48,83 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | Penyediaan Biaya Operasional Unit kerja bawahan | Tersedianya biaya operasional unit kerja bawahan (bln) | 72 | 187.500.000 | 36 | 103.140.500 | 12 | 510.400.000 | 0 | - | - | - | 36 | 103.140.500 | 50,00 | 55,01 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 24 | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Tersedianya Tenaga guru honorer utk kegiatan PBM (bln) | 72 | 4.855.500.000 | 36 | 60.000.000 | 12 | 809.250.000 | 2 | 126.500.000 | 16,67 | 15,63 | 38 | 186.500.000 | 52,78 | 3,84 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 23 | Jasa Publikasi | Jumlah Publikasi yang dilakukan | 3 | 80.272.500 | 0 | - | 1 | 43.450.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan Layanan sarana dan prasarana bagi aparatur (bln) | 72 | 1.740.960.000 | 36 | 612.084.660 | 12 | 290.160.000 | 0 | 43.994.281 | - | 15,16 | 36 | 656.078.941 | 50,00 | 37,68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor | Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja (bln) | 72 | 150.000.000 | 36 | 134.988.200 | 12 | 25.000.000 | 0 | 12.690.000 | - | 50,76 | 36 | 147.678.200 | 50,00 | 98,45 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas kantor | Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional (bln) | 72 | 1.050.960.000 | 36 | 351.131.460 | 12 | 175.160.000 | 1 | 26.954.281 | 8,33 | 15,39 | 37 | 378.085.741 | 51,39 | 35,98 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 50 | Peningkatan gedung kantor | terpeliharanya peralatan kantor (bln) | 72 | 540.000.000 | 36 | 125.965.000 | 12 | 90.000.000 | 3 | 4.350.000 | 25,00 | 4,83 | 39 | 130.315.000 | 54,17 | 24,13 | |
| 3 | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase Kenaikan APK SD | 0,78 | 576.191.755.800 | 0,13 | 240.275.469.741 | 0,13 | 103.736.028.850 | 0,03 | 680.357.914 | 25,00 | 0,66 | 0,16 | 240.955.827.655 | 20,83 | 41,82 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | | | Persentase Kenaikan APM SD | 0,78 | | 0,13 | | 0,13 | 0,03 | | 25,00 | | 0,2 | | 20,83 | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kenaikan APK SMP | 4,16 | | 0,7 | | 0,7 | 0,18 | | 25,00 | | 0,9 | | 21,03 | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kenaikan APM SMP | 0,82 | | 0,1 | | 0,1 | 0,03 | | 25,00 | | 0,1 | | 15,24 | | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 09 | Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Terpenuhinya kebutuhan prasarana parkir di sekolah | 5 | 1.000.000.000 | 1 | 74.289.000 | 2 | 260.000.000 | 0 | 1.415.250 | - | 0,54 | 1 | 75.704.250 | 20,00 | 7,57 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 101 | Pembangunan Gedung Sekolah SMP | Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana disekolah | 5 | 500.000.000 | 0 | - | 2 | 300.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 109 | Pembangunan taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP | Terpenuhinya kebutuhan prasarana parkir disekolah smp | 6 | 600.000.000 | 0 | - | 1 | 100.000.000 | 0 | 4.500.000 | - | 4,50 | 0 | 4.500.000 | 0,00 | 0,75 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 11 | Pembangunan Ruang Ibadah | Tersedianya tempat ibadah disekolah | 32 | 1.942.500.000 | 10 | - | 6 | 530.000.000 | 0 | 2.685.700 | - | 0,51 | 10 | 2.685.700 | 31,25 | 0,14 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 114 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP | Tersedianya sarana air bersih dan sanitary di sekolah SMP | 6 | 210.000.000 | 1 | - | 1 | 35.000.000 | 0 | 1.500.000 | - | 4,29 | 1 | 1.500.000 | 16,67 | 0,71 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 14 | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary | Tersedianya sarana air bersih dan sanitary di sekolah | 6 | 160.000.000 | 4 | - | 1 | 100.000.000 | 0 | 1.125.600 | - | 1,13 | 4 | 1.125.600 | 66,67 | 0,70 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 141 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP | Rehabilitasi bangunan sekolah SMP | 10 | 500.000.000 | 3 | - | 1 | 200.000.000 | 0 | 62.874.600 | - | 31,44 | 3 | 62.874.600 | 30,00 | 12,57 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 160 | Pembangunan pagar sekolah SMP | Tersedianya pagar disekolah SMP | 30 | 3.840.000.000 | 17 | - | 5 | 640.000.000 | 0 | 30.000.000 | - | 4,69 | 17 | 30.000.000 | 56,67 | 0,78 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 161 | Pembangunan Pagar SD | Pagar Sekolah SD | 12 | 3.240.000.000 | 8 | 2.031.381.350 | 2 | 540.000.000 | 0 | 4.536.300 | - | 0,84 | 8 | 2.035.917.650 | 66,67 | 62,84 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|----|----|----|----|----|-----|--|---|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|-------------|-----------------|-------|------------|----------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 162 | Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019) | Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan RKB, Jamban, Koleksi Perpustakaan (ruang) | 300 | 42.000.000.000 | 160 | 12.769.240.800 | 50 | 11.157.622.000 | 0 | 13.197.250 | - | 0,12 | 160 | 12.782.438.050 | 53,33 | 30,43 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 163 | Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019) | Tersedianya rumah dinas guru (unit rumah) | 16 | 2.000.000.000 | 5 | 538.545.000 | 4 | 418.376.000 | 0 | 102.300 | - | 0,02 | 5 | 538.647.300 | 31,25 | 26,93 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 164 | Pembangunan / Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menengah pertama (DAK Reguler 2019) | Meningkatnya sarana dan prasarana pbelajar SMP (ruang) | 96 | 60.998.622.000 | 40 | 12.769.240.800 | 16 | 10.166.437.000 | 0 | 7.257.600 | - | 0,07 | 40 | 12.776.498.400 | 41,67 | 20,95 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 165 | Pembangunan / Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekola menengah pertama (DAK Afirmasi 2019) | Tersedianya rumah dinas guru (unit rumah) | 8 | 25.000.000.000 | 1 | 158.000.000 | 4 | 666.900.000 | 0 | - | - | - | 1 | 158.000.000 | 12,50 | 0,63 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 166 | Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar | Lomba Matematika dan Sains tingkat SD (kegiatan) | 12 | 700.000.000 | 6 | 240.000.000 | 2 | 49.650.000 | 1 | 14.082.250 | 50,00 | 28,36 | 7 | 254.082.250 | 58 | 36,30 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 168 | Lomba Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah lomba yang diikuti (kegiatan) | 48 | 800.000.000 | 24 | 1.060.151.000 | 12 | 443.559.750 | 2 | 15.895.700 | 16,67 | 3,58 | 26 | 1.076.046.700 | 54 | 134,51 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 169 | Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SD | Tersedianya sekoah piloting pendidikan inusif (unit) | 1 | 75.000.000 | 0 | - | 1 | 73.558.000 | 0 | 19.965.800 | - | 27,14 | 0 | 19.965.800 | 0 | 26,62 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 171 | Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Terselenggaranya Pendidikan tingkat SMP (bln) | 72 | 750.000.000 | 36 | 1.646.440.500 | 12 | 508.027.500 | 3 | 210.566.500 | 25,00 | 41,45 | 39 | 1.857.007.000 | 54 | 247,60 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 177 | Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP | Pemanfaatan dana BOS SD sesuai aturan (bln) | 72 | 160.000.000 | 36 | 66.976.750 | 12 | 64.074.250 | 3 | 12.253.650 | 25,00 | 19,12 | 39 | 79.230.400 | 54 | 49,52 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 178 | Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD | Pemanfaatan dana BOS SMP sesuai aturan (bln) | 72 | 329.600.000 | 36 | 1.000.000.000 | 12 | 104.169.500 | 3 | 23.107.200 | 25,00 | 22,18 | 39 | 1.023.107.200 | 54 | 310,41 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 18 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Tesedianya KIT pembelajaran SD (paaket) | 50 | 575.000.000 | 3 | 117.406.200 | 36 | 1.425.950.000 | 0 | - | - | - | 3 | 117.406.200 | 6 | 20,42 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 181 | Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar | Terselenggaranya pendidikan kareakter (bln) | 72 | 137.000.000 | 36 | 306.247.250 | 12 | 127.717.600 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 306.247.250 | 54 | 223,54 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 184 | Lanjutan Pembangunan Ruang belajar SMP | Tersedianya Ruang belajar sisiwa SMP | 6 | 750.000.000 | | | 1 | 180.000.000 | 0 | 57.032.400 | - | 31,68 | 0 | 57.032.400 | 0 | 7,60 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 185 | Pengadaan media pendidikan SMP | Tersedianya media pendidikan SMP (paket) | 3 | 450.000.000 | | | 1 | 150.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 186 | Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG) | jumlah komputer yang tersedia (Unit) | 628 | 3.768.874.500 | 378 | 2.269.474.500 | 250 | 1.499.400.000 | 0 | - | - | - | 378,24575 | 2.269.474.500 | 60 | 60,22 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 19 | Pengadaan Mobiler Sekolah | Jumlah mobiler yang tersedia (paket) | 200 | 9.528.067.500 | 43 | 2.469.389.664 | 64 | 3.176.022.500 | 0 | - | - | - | 43 | 2.469.389.664 | 22 | 25,92 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 190 | Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil | Tersedianya operasional kapal di kawasan Mandeh (bln) | 72 | 1.324.342.800 | 36 | 621.181.877 | 12 | 220.723.800 | 3 | 46.049.564 | 25,00 | 20,86 | 39 | 667.231.441 | 54 | 50,38 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 191 | Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar | Terlaksananya Sosialisasi (kali) | 12 | 937.010.000 | 6 | 572.845.850 | 2 | 152.215.700 | 1 | 95.135.600 | 50,00 | 62,50 | 7 | 667.981.450 | 58 | 71,29 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 44 | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang kelas sekolah | Ruang kelas yang direhab (unit) | 48 | 6.150.000.000 | 0 | - | 16 | 1.025.000.000 | 0 | 41.889.750 | - | 4,09 | 0 | 41.889.750 | 0,00 | 0,68 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 59 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum | Pelatihan yang dilaksanakan (kali) | 6 | 2.036.401.500 | 3 | 678.800.500 | 1 | 235.275.000 | 0 | - | - | - | 3 | 678.800.500 | 50,00 | 33,33 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|----|----|----|----|----|----|--|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|-----------------|-------|------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 70 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Lomba O2SN dan FLS2N yang diikuti (kali) | 12 | 500.000.000 | 6 | 872.364.000 | 2 | 314.794.000 | 1 | 3.146.000 | 50,00 | 1,00 | 7 | 875.510.000 | 58,33 | 175,10 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 75 | Penyediaan Basiswa Transisi | Tersedianya perlengkapan sekolah siswa SD (org) | 5.200 | 4.000.000.000 | 0 | - | 2.600 | 2.000.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 80 | Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar | Terselenggaranya Pendidikan tingkat SD (bin) | 72 | 4.448.377.500 | 36 | 1.623.014.700 | 12 | 741.396.250 | 3 | 12.038.900 | 25,00 | 1,62 | 39 | 1.635.053.600 | 54,17 | 36,76 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 81 | Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah dasar (SD) | Tersedianya operasional sekolah SD (bin) | 72 | 275.405.760.000 | 36 | 137.702.880.000 | 12 | 45.900.960.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 137.702.880.000 | 54,17 | 50,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 16 | 82 | Bantuan operasional sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) | Tersedianya operasional sekolah SMP (bin) | 72 | 121.375.200.000 | 36 | 60.687.600.000 | 12 | 20.229.200.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 60.687.600.000 | 54,17 | 50,00 | |
| 4 | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | | Program pendidikan anak usia dini | Persentase Naikn APK PAUD | 78,7 | 1.918.639.000 | 71 | 551.772.526 | 3 | 1.721.896.000 | 0 | 64.046.851 | - | 3,72 | 71 | 566.450.526 | 90,22 | 29,52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 18 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | jumlah APE yang tersedia (paket) | 50 | 1.095.824.000 | 0 | - | 50 | 1.000.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 44 | Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini | database PAUD (dokumen) | 6 | 112.740.000 | 0 | - | 2 | 37.580.000 | 1 | 14.678.000 | 50,00 | 39,06 | 1 | 14.678.000 | 16,67 | 13,02 | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 45 | Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak | Lomba tingkat PAUD dan TK yang diikuti (kegiatan) | 12 | 329.600.000 | 6 | 508.922.526 | 2 | 200.453.000 | 0 | - | - | - | 6 | 508.922.526 | 50,00 | 154,41 | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 48 | Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan | Lembaga PAUD yang dibina (unit) | 24 | 380.475.000 | 12 | 42.850.000 | 4 | 106.614.000 | 0 | - | - | - | 12 | 42.850.000 | 50,00 | 11,26 | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 68 | Pelatihan operator paud dan dikmas | Jumlah operator PAUD yang dilatih (org) | 225 | 236.250.000 | 0 | - | 75 | 78.750.000 | 35 | 49.368.851 | 46,67 | 62,69 | 35 | 49.368.851 | 15,56 | 20,90 | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 15 | 70 | Sosialisasi DAK BOP Paud | Jumlah PAUD yang mengikuti sosialisasi (unit) | 225 | 250.000.000 | | | 75 | 298.499.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | | Program Pendidikan Non Formal | Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun (%) | 100 | 19.652.017.000 | 99,65 | 10.165.639.126 | 0,35 | 3.037.632.500 | 0 | 92.278.451 | - | 3,04 | 99,65 | 10.257.747.077 | 85,00 | 52,20 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 01 | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal | Jumlah tutor yang dilatih (org) | 210 | 300.000.000 | 70 | 85.690.000 | 30 | 51.005.000 | 0 | - | - | - | 70 | 85.690.000 | 33,33 | 28,56 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 22 | Pelatihan LKP dan PKBM | Jumlah Pengelola LKP dan PKBM yang dilatih (org) | 336 | 900.000.000 | 96 | 268.864.100 | 40 | 465.513.000 | 0 | 27.192.500 | - | 5,84 | 96 | 296.056.600 | 28,57 | 32,90 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 15 | Penyelenggaraan Paket C | Terlaksananya Pendidikan Non Formal (tahun) | 6 | 16.009.360.000 | 3 | 8.466.893.500 | 1 | 50.370.000 | 0 | - | - | - | 3 | 8.466.893.500 | 50,00 | 52,89 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 27 | Penyelenggaraan Pendidikan keluarga | Jumlah guru dan orang tua yang dilatih (org) | 500 | 274.400.000 | 280 | 693.710.526 | 100 | 68.600.000 | 0 | - | - | - | 280 | 693.710.526 | 56,00 | 252,81 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 16 | Pelaksanaan UNPK B | Ujian paket B yang diselenggarakan (kali) | 12 | 300.000.000 | 6 | 106.555.000 | 2 | 132.772.000 | 0 | - | - | - | 6 | 106.555.000 | 50,00 | 35,52 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 17 | Pelaksanaan UNPK C | Ujian paket C yang diselenggarakan (kali) | 12 | 350.000.000 | 6 | 127.640.000 | 2 | 56.750.000 | 0 | - | - | - | 6 | 127.640.000 | 50,00 | 36,47 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 23 | Hari Aksara Internasional (HAI) | even yang diikuti / dilaksanakan (keg) | 6 | 180.000.000 | 3 | 23.500.000 | 1 | 37.535.500 | 0 | - | - | - | 3 | 23.500.000 | 50,00 | 13,06 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 18 | Pelatihan Tutor Paket C dan B | Jumlah tutor yang dilatih (org) | 648 | 1.338.257.000 | 324 | 392.786.000 | 100 | 221.661.000 | 80 | 64.915.451 | 80,00 | 29,29 | 404 | 457.701.451 | 62,35 | 34,20 | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 18 | 28 | Peningkatan sarana / Prasarana SKB (DAK Reguler) | jumlah SKB yang dibenahi (unit) | 1 | 2.000.000.000 | | | 1 | 1.953.426.000 | 0 | 170.500 | - | 0,01 | 0 | 170.500 | 0,00 | 0,01 | |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah guru SD dan SMP Profesional | 2.935 | 19.513.471.500 | 1.468 | 5.916.646.250 | 489 | 13.405.645.700 | 122 | 2.095.269.550 | 25,00 | 15,63 | 140 | 2.023.790.150 | 4,77 | 10,37 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|----|----|----|----|----|----|---|--------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------|----------------------|--------------|---------------------|--|----|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Jumlah Kepala Sekolah Profesional | 465 | | 465 | | - | 0 | - | | 465 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengawas Sekolah Profesional | 14 | | 14 | | - | 0 | - | | 14 | | 100 | | | | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 01 | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | 72 | 991.842.000 | 36 | 344.172.000 | 12 | 72.791.600 | 3 | 6.986.000 | 25,00 | 9,60 | 39 | 351.158.000 | 54 | 35,40 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 03 | Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi | 900 | 1.000.000.000 | 0 | - | 300 | 353.763.200 | 0 | 1.200.000 | - | 0,34 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0,12 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 06 | Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPPG) | 12 | 1.438.678.000 | 6 | 974.153.550 | 2 | 313.314.600 | 0 | - | - | - | 6 | 974.153.550 | 50 | 67,71 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | 08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 12 | 390.000.000 | 6 | 668.235.500 | 2 | 247.496.500 | 0 | 29.043.100 | - | 11,73 | 6 | 697.278.600 | 50,00 | 178,79 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 09 | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | 6 | 1.710.449.000 | 3 | 173.815.000 | 1 | 65.000.000 | 0 | - | - | - | 3 | 173.815.000 | 50,00 | 10,16 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | 10 | Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik | 48 | 876.975.000 | 24 | 1.054.555.300 | 8 | 205.566.000 | 0 | 7.549.600 | - | 3,67 | 24 | 1.062.104.900 | 50,00 | 121,11 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | 16 | Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP | 12 | 809.919.000 | 6 | 58.120.000 | 2 | 71.602.500 | 0 | - | - | - | 6 | 58.120.000 | 50,00 | 7,18 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 25 | Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik | 20 | 2.244.670.000 | 6 | 645.797.000 | 12 | 156.966.000 | 3 | 18.492.000 | 25,00 | 11,78 | 9 | 664.289.000 | 45,00 | 29,59 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 31 | Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru | 360 | 758.590.000 | 180 | 406.632.900 | 60 | 85.749.800 | 0 | - | - | - | 180 | 406.632.900 | 50,00 | 53,60 | | |
| | 01 | 1 | 01 | 03 | 20 | 21 | Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah | 90 | 1.178.225.000 | 0 | - | 32 | 242.086.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 19 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD | 750 | 815.893.500 | 250 | 363.448.500 | 200 | 271.964.500 | 0 | 2.627.750 | - | 0,97 | 250 | 366.076.250 | 30,00 | 44,87 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | 32 | Rerukment dan Pelatihan Calon kepala sekolah SD dan SMP | 240 | 336.880.000 | 0 | 0 | 60 | 455.300.000 | 0 | 81.085.200 | - | 17,81 | 0 | 81.085.200 | 0,00 | 24,07 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | 28 | Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD | 2400 | 2.400.000.000 | 1200 | 1.227.716.500 | 400 | 427.618.700 | 0 | - | - | - | 1200 | 1.227.716.500 | 50,00 | 51,15 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 35 | Peningkatan Kemampuan guru mengajar | 6382 | 4.561.350.000 | - | - | 2000 | 1.520.450.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 01 | 20 | 37 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS | 72 | 11.556.000.000 | 36 | 19.937.147.500 | 12 | 8.915.976.300 | 3 | 1.948.285.900 | 25,00 | 21,85 | 39 | 21.885.433.400 | 54,17 | 189,39 | | |
| 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 84,20 | 6.076.021.280 | 65 | 2.781.558.330 | 5 | 921.147.640 | 0 | 59.291.412 | - | 6,44 | 65 | 2.840.849.742 | 85,00 | 46,76 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 07 | Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | 6 | 356.034.000 | 3 | 173.386.000 | 1 | 59.339.000 | 0 | 7.676.000 | - | 12,94 | 3 | 181.062.000 | 45,00 | 50,86 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 11 | Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik) | 72 | 763.548.000 | 36 | 319.753.000 | 12 | 106.573.800 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 319.753.000 | 54,17 | 41,88 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | | |
|-----------------|----|-----|----|-----|----|------------------|--|---|-----|-----------------|----|-------------------|----|----------------|------|-----------------|-------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 10 | Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Tersedianya dana sharing untuk operasional Akademi Komunitas (thn) | 6 | 2.990.063.280 | 3 | 1.595.007.530 | 1 | 498.343.880 | 0,25 | 38.331.412 | 25,00 | 7,69 | 3,25 | 1.633.338.942 | 5,00 | 54,63 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 15 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Nasional) | berlangsungnya UN secara baik (kali) | 6 | 1.127.880.000 | 3 | 540.610.000 | 1 | 71.933.000 | 0 | 13.284.000 | - | 18,47 | 3 | 553.894.000 | 10 | 49,11 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 16 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan | Terpantaunya Pelaksanaan proses awal Pembelajaran (bln) | 36 | 291.000.000 | 0 | 0 | 12 | 48.083.960 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10,00 | 0,00 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 14 | Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | Jumlah sekolah yang telah ditetapkan SPM | 422 | 247.496.000 | 82 | 71.526.000 | 42 | 61.874.000 | 0 | - | - | - | 82 | 71.526.000 | 19,43 | 28,90 | | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 22 | 12 | Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan | Jumlah sekolah yang telah ditetapkan 8 SNP | 422 | 300.000.000 | 82 | 81.275.800 | 42 | 75.000.000 | 0 | - | - | - | 82 | 81.275.800 | 19,43 | 27,09 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 48,75 | 31,38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | SR | SR | | |
| II | | | | | | URUSAN KESEHATAN | | 875.015.978.794 | | 121.975.323.488 | | 176.017.330.486 | | 12.946.911.335 | | | | | 122.702.981.817 | | | | | |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | 72 | 472.693.642.418 | | 109.756.070.482 | 12 | 91.049.563.534,95 | | 2.537.114.335 | | | | | 112.293.184.817 | | | | | |
| 1 | 5 | 01 | 01 | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 26.459.369.098 | 36 | 3.330.685.508 | 12 | 2.607.792.125 | 3,00 | 254.660.382 | 25,00 | 9,77 | 39,00 | 3.585.345.890 | 54,17 | 13,55 | Dinas Kesehatan | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi (bln) | 72 | 2.851.744.390 | 36 | 651.660.000 | 12 | 355.140.000 | 3,00 | 58.766.680 | 25,00 | 16,55 | 39,00 | 710.426.680 | 54,17 | 24,91 | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | Terpeliharanyakendaraan (bln) | 72 | 6.281.600.470 | 36 | 403.715.384 | 12 | 400.000.000 | 3,00 | 20.053.002 | 25,00 | 5,01 | 39,00 | 423.768.386 | 54,17 | 6,75 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honor pengelola keuangan (bln) | 72 | 2.228.926.080 | 36 | 192.251.004 | 12 | 406.499.044 | 3,00 | 32.134.000 | 25,00 | 7,91 | 39,00 | 224.385.004 | 54,17 | 10,07 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Honor tenaga kebersihan (bln) | 72 | 2.622.831.120 | 36 | 458.259.724 | 12 | 549.259.724 | 3,00 | 80.000.000 | 25,00 | 14,57 | 39,00 | 538.259.724 | 54,17 | 20,52 | | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Ketersediaan peralatan kerja (bln) | 72 | 178.057.888 | 36 | 28.850.000 | 12 | 13.200.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 28.850.000 | 54,17 | 16,20 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan ATK (bln) | 72 | 1.427.473.435 | 36 | 100.693.620 | 12 | 31.538.532 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 100.693.620 | 54,17 | 7,05 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan (bln) | 72 | 813.429.920 | 36 | 78.419.335 | 12 | 27.450.685 | 3,00 | 2.600.000 | 25,00 | 9,47 | 39,00 | 81.019.335 | 54,17 | 9,96 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik (bln) | 72 | 1.379.884.582 | 36 | 63.423.785 | 12 | 19.993.024 | 3,00 | 1.095.000 | 25,00 | 5,48 | 39,00 | 64.518.785 | 54,17 | 4,68 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (bln) | 72 | 898.808.037 | 36 | 457.584.000 | 12 | 300.000.000 | 3,00 | 2.850.000 | 25,00 | 0,95 | 39,00 | 460.434.000 | 54,17 | 51,23 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan (bln) | 72 | 177.289.293 | 36 | 25.120.000 | 12 | 13.900.000 | 3,00 | 3.610.000 | 25,00 | 25,97 | 39,00 | 28.730.000 | 54,17 | 16,21 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu (bln) | 72 | 2.640.636.909 | 36 | 171.251.494 | 12 | 102.107.494 | 3,00 | 7.465.700 | 25,00 | 7,31 | 39,00 | 178.717.194 | 54,17 | 6,77 | | |
| | 5 | 01 | 01 | | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhin operasional perjalanan dinas luar daerah (bln) | 72 | 1.441.116.000 | 36 | 207.959.197 | 12 | 45.000.000 | 3,00 | 3.175.000 | 25,00 | 7,06 | 39,00 | 211.134.197 | 54,17 | 14,65 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|---|--|---|------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|------|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|-----------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Penyediaan Jasa pengamanan kantor | Honor petugas keamanan (bln) | 72 | 115.289.280 | 36 | 69.000.000 | 12 | 221.000.000 | 3,00 | 11.000.000 | 25,00 | 4,98 | 39,00 | 80.000.000 | 54,17 | 69,39 | |
| | 5 | 01 | 02 | 01 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terpenuhi operasional perjalanan dinas dalam daerah (bln) | 72 | 1.769.690.448 | 36 | 83.315.000 | 12 | 60.000.000 | 3,00 | 11.475.000 | 25,00 | 19,13 | 39,00 | 94.790.000 | 54,17 | 5,36 | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Pembinaan dan Pengelolaan Aset | operasional pengelolaan aset | 72 | 1.246.661.414 | 36 | 196.431.609 | 0 | - | 3,00 | 13.950.000 | | | 39,00 | 210.381.609 | 54,17 | 16,88 | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang dihasilkan (dok) | 48 | 1.626.091.245 | 24 | 142.751.356 | 8 | 62.703.622 | 2,00 | 6.486.000 | 25,00 | 10,34 | 26,00 | 149.237.356 | 54,17 | 9,18 | |
| 2 | 1 | 01 | 02 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (bln) | 72 | 610.000.000 | 36 | 88.782.000 | 12 | 800.000.000 | 3,00 | 252.940.000 | 25,00 | 31,62 | 39,00 | 341.722.000 | 54,17 | 56,02 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Mobil Puskesmas keliling (unit) | 1 | 300.000.000 | | | 1 | 300.000.000 | 1,00 | 252.940.000 | 100,00 | 84,31 | 1,00 | 252.940.000 | 100,00 | 84,31 | |
| | 1 | 01 | 02 | 02 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya gedung kantor (bln) | 72 | 610.000.000 | 36 | 88.782.000 | 12 | 500.000.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 88.782.000 | 54,17 | 14,55 | |
| 3 | 5 | 01 | 05 | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur kesehatan profesional (%) | 100 | 1.025.000.000 | 34,00 | 26.880.000 | 17,00 | 64.733.800 | 2,00 | 6.465.000 | 11,76 | 9,99 | 36,00 | 33.345.000 | 36,00 | 3,25 | Dinas Kesehatan |
| | 5 | 01 | 05 | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan formal (org) | 10 | 50.000.000 | 5 | 26.880.000 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 26.880.000 | 50,00 | 53,76 | |
| | 1 | 01 | 02 | 05 | | Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan | Jumlah SDM Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan (org) | 100 | 605.000.000 | - | - | 17 | 64.733.800 | 2,00 | 6.465.000 | 11,76 | 9,99 | 2,00 | 6.465.000 | 2,00 | 1,07 | |
| 4 | 1 | 01 | 02 | 15 | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Terpenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar | 95 | 35.672.637.500 | 83 | 4.207.055.720 | 85 | 4.284.783.030 | 1,50 | 7.565.000 | 1,77 | 0,18 | 84,50 | 4.214.620.720 | 88,95 | 11,81 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 15 | | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping) | Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan | 95 | 32.991.000.000 | 32 | 3.866.872.870 | 16 | 4.073.363.000 | 2,00 | - | 12,50 | - | 34,00 | 3.866.872.870 | 35,79 | 11,72 | |
| | 1 | 01 | 02 | 15 | | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Persentase obat dan Perbekalan kesehatan di Puskesmas | 90 | 2.186.637.500 | 30 | 260.755.750 | 15 | 194.620.029.95 | 4,00 | 7.565.000 | 26,67 | 3,89 | 34,00 | 268.320.750 | 37,78 | 12,27 | |
| | 1 | 01 | 02 | 15 | | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (penunjang DAK) | Lancarnya pelaksanaan DAK farmasi (kegiatan) | 6 | 495.000.000 | 3 | 41.149.850 | 1 | 16.800.000 | 0,01 | - | 0,50 | - | 3,01 | 41.149.850 | 50,08 | 8,31 | |
| | 1 | 01 | 02 | 15 | | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya | Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina (unit) | 800 | 153.109.000 | 267 | 38.277.250 | - | - | 0,01 | - | - | - | 267,01 | 38.277.250 | 33,38 | 25,00 | |
| 5 | 1 | 01 | 02 | 16 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Visite Rate | 2,50 | 28.845.135.000 | 2,40 | 6.500.154.822 | 0,05 | 17.799.311.280 | - | 322.404.205 | - | 1,81 | 2,40 | 6.822.559.027 | 96,00 | 23,65 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani (%) | 95 | 1.537.500.000 | 48 | 125.121.972 | 16 | 119.564.082 | 3,00 | 3.435.000 | 18,75 | 2,87 | 51,00 | 128.556.972 | 53,68 | 8,36 | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Persentase fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan(%) | 95 | 4.817.385.000 | 48 | 743.873.200 | 16 | 2.267.459.397 | 2,50 | 200.060.555 | 15,63 | 8,82 | 50,50 | 943.933.755 | 53,16 | 19,59 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|--|--|---|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)) | Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat. | 95% | 21.750.000.000 | 32% | 5.562.727.550 | 16% | 14.970.171.000 | 0,01 | 113.787.000 | 3,13 | 0,76 | 0,32 | 5.676.514.550 | 33,86 | 26,10 | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan di sarana Pelayanan Kesehatan (bln) | 72 | 470.000.000 | 36 | 51.355.550,00 | 48 | 45.843.758 | 3,00 | 4.997.250 | 6,25 | 10,90 | 39,00 | 56.352.800 | 54,17 | 11,99 | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Pelayanan Kesehatan pada Pengobatan Tradisional (BATRA) | Jumlah penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan | 100 | 270.250.000 | 33 | 17.076.550,00 | 16 | 26.673.043 | 0,02 | 124.400 | 0,13 | 0,47 | 33,02 | 17.200.950 | 33,02 | 6,36 | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu | Terselenggaranya penanggulangan kegawatdaruratan | 36 | 1.108.800.000 | - | - | 12 | 369.600.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | 8,33 | - | |
| 6 | 1 | 01 | 02 | 19 | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Nagari Siaga Aktif (%) | 65 | 9.800.000.000 | 50 | 568.646.293 | 5 | 593.189.421 | 1,00 | 28.151.050 | 20,00 | 4,75 | 51,00 | 596.797.343 | 78,46 | 6,09 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 19 | | Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat (DBH Pajak Rokok TA 2015) | Jumlah media promosi yang disediakan (paket) | 6 | 2.295.000.000 | 3 | 156.892.800 | 1 | 149.042.720 | 0,02 | 10.661.500 | 1,50 | 7,15 | 3,02 | 167.554.300 | 50,25 | 7,30 | |
| | 1 | 01 | 02 | 19 | | Usaha kesehatan institusi dan peran serta masyarakat | Persentase Posyandu Mandiri yang dibina (%) | 100 | 2.020.000.000 | 50 | 177.333.050 | 17 | 109.808.534 | 2,00 | 2.108.500 | 11,76 | 1,92 | 52,00 | 179.441.550 | 52,00 | 8,88 | |
| | 1 | 01 | 02 | 19 | | Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga | Persentase Nagari Siaga Aktif yang dibina (%) | 100 | 710.000.000 | 50 | 138.379.050 | 17 | 73.850.500 | 2,00 | 6.452.750 | 11,76 | 8,74 | 52,00 | 144.831.800 | 52,00 | 20,40 | |
| | 1 | 01 | 02 | 19 | | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten | Databse kesehatan yang dimiliki / dikelola (dokumen) | 6 | 4.775.000.000 | 3 | 96.041.393 | 1 | 110.397.744 | 0,01 | 6.253.800 | 0,50 | 5,66 | 3,01 | 102.295.193 | 50,08 | 2,14 | |
| | 1 | 01 | 02 | 19 | | Implementasi Gerakan Masyarakat | Jumlah kecamatan yang tersentuh GERMAS (unit) | 45 | 450.269.769 | - | - | 15 | 150.089.923 | - | 2.674.500 | - | 1,78 | - | 2.674.500 | - | 0,59 | |
| 7 | 1 | 01 | 02 | 20 | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Menurunnya Persentase balita gizi buruk (%) | 6,60 | 2.207.259.000 | 7,50 | 292.015.450 | 0,90 | 973.857.871 | - | 16.158.100 | - | 1,66 | 7,50 | 308.173.550 | 88,00 | 13,96 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 20 | | perbeian tambahan makanan dan vitamin | Persentase bagi balita kurang gizi dan ibu hamil Kurang Energi Koronis (KEK) yang dibantu (%) | 100 | 1.356.100.000 | 50 | 115.425.000 | 17 | 800.000.000 | - | 642.000 | - | 0,08 | 50,00 | 116.067.000 | 50,00 | 8,56 | |
| | 1 | 01 | 02 | 20 | | Pemantauan status gizi masyarakat | Terlaksananya pemantauan gizi (bln) | 72 | 424.452.000 | 36 | 71.383.750 | 12 | 96.332.871 | 3,00 | 6.561.600 | 25,00 | 6,81 | 39,00 | 77.945.350 | 54,17 | 18,36 | |
| | 1 | 01 | 02 | 20 | | Pembinaan dan monitoring program gizi masyarakat | Terlaksananya movev terhadap program gizi masyarakat (bln) | 72 | 426.707.000 | 36 | 105.206.700 | 12 | 77.525.000 | 3,00 | 8.954.500 | 25,00 | 11,55 | 39,00 | 114.161.200 | 54,17 | 26,75 | |
| 8 | 1 | 01 | 02 | 21 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Nagari ODF (%) | 97,85 | 7.067.548.100 | 43,00 | 761.992.008 | 26,89 | 819.467.600 | 4,00 | 48.368.830 | 14,88 | 5,90 | 47,00 | 810.360.838 | 48,03 | 11,47 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Pengawasan yang dilaksanakan (bln) | 72 | 2.098.352.500 | 36 | 422.605.586 | 12 | 381.497.086 | 3,00 | 8.441.500 | 25,00 | 2,21 | 39,00 | 431.047.086 | 54,17 | 20,54 | |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Pendamping PAMSIMAS | Program Pamsimas yang didampingi (kegiatan) | 6 | 504.948.000 | 3 | 36.850.060 | 1 | 39.332.426 | 0,04 | 3.205.750 | 4,20 | 8,15 | 3,04 | 40.055.810 | 50,70 | 7,93 | |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) | Program PPSP yang didampingi (kegiatan) | 6 | 448.869.500 | 3 | 22.881.700 | 1 | 24.407.306 | 0,03 | 1.736.950 | 3,40 | 7,12 | 3,03 | 24.618.650 | 50,57 | 5,48 | |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Pengelolaan dan pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat | Persentase Depot yang diperiksa / diawasi (%) | 85 | 450.931.986 | 42 | 113.720.236 | 14 | 75.155.331 | 0,03 | - | 0,22 | - | 42,03 | 113.720.236 | 49,45 | 25,22 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | | |
|----|---|----|----|----|--|---|--|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-------|------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------------|-----|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat dan Kabupaten Sehat | Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina (unit/thn) | 6 | 812.478.900 | 3 | 165.934.426 | 1 | 250.100.000 | 0,03 | 29.146.880 | 3,20 | 11,65 | | | 195.081.306 | 50,53 | 24,01 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 21 | | Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | Persentase Kelompok UKK yang dibina (%) | 90 | 1.032.245.000 | 45 | - | 15 | 48.975.451 | 0,04 | 5.837.750 | 0,28 | 11,92 | 45,04 | | 5.837.750 | 50,05 | 0,57 | | |
| 9 | 1 | 01 | 02 | 22 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Succes Rate TB | 95 | 10.450.960.000 | 92 | 577.449.879 | 1 | 619.044.055 | 1,58 | 54.988.282 | 157,84 | 8,88 | 93,58 | | 632.438.161 | 98,50 | 6,05 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | | Succes Rate DB | 100 | | 95 | | 5 | - | - | - | - | - | - | 95,00 | | - | 95,00 | | |
| | | | | | | | Succes Rate Malaria | 100 | | 95 | | 5 | - | - | - | - | - | - | 95,00 | | - | 95,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Penyemprotan / fogging sarang nyamuk | Terlaksananya fogging focus (kegiatan) | 6 | 1.875.000.000 | 3 | 159.828.000 | 1 | 153.475.457 | 0,01 | 19.112.632 | 1,20 | 12,45 | 3,01 | | 178.940.632 | 50,20 | 9,54 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Persentase masyarakat yang dilayani (%) | 98 | 1.850.000.000 | 50 | 127.722.364 | 16 | 113.855.147 | 0,03 | 3.538.950 | 0,16 | 3,11 | 50,03 | | 131.261.314 | 51,05 | 7,10 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik | Pelayanan yang dilakukan (bin) | 72 | 2.295.000.000 | 36 | 24.368.400 | 12 | 42.104.204 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | | 24.368.400 | 54,17 | 1,06 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Peningkatan Imunisasi | Cakupan penerima imunisasi (%) | 98 | 2.560.960.000 | 50 | 128.061.415 | 16 | 111.477.510 | 0,01 | 4.692.500 | 0,08 | 4,21 | 50,01 | | 132.753.915 | 51,03 | 5,18 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah | surveillans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat (%) | 100 | 570.000.000 | 50 | 62.793.500 | 17 | 79.872.062 | 2,00 | 11.696.750 | 11,76 | 14,64 | 52,00 | | 74.490.250 | 52,00 | 13,07 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Pemantauan & Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB | Pemantauan yang dilakukan (bin) | 72 | 725.000.000 | 36 | 74.676.200 | 12 | 64.377.007 | 3,00 | 10.471.700 | 25,00 | 16,27 | 39,00 | | 85.147.900 | 54,17 | 11,74 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 22 | | Sistem Kewaspadaan dini KLB / Wabah / Bencana | Operasional Kewaspadaan dini (bin) | 72 | 575.000.000 | 36 | - | 12 | 53.882.668 | 3,00 | 5.475.750 | 25,00 | 10,16 | 39,00 | | 5.475.750 | 54,17 | 0,95 | | |
| 10 | 1 | 01 | 02 | 23 | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | persentase puskesmas berakreditasi (%) | 100 | 14.783.911.700 | 85 | 1.499.238.280 | 15 | 1.869.047.670 | 0,04 | 61.819.350 | 0,26 | 3,31 | 85,04 | | 1.561.057.630 | 85,04 | 10,56 | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 02 | 23 | | | Akreditasi, registrasi dan sertifikasi kesehatan | Jumlah puskesmas yang diakreditasi (unit) | 6 | 901.524.876 | 3 | 450.762.438 | 1 | 155.418.827 | - | 16.919.450 | - | 10,89 | 3,00 | | 467.681.888 | 50,00 | 51,88 | |
| | 1 | 01 | 02 | 23 | | Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan (bin) | 72 | 485.000.000 | 36 | 55.314.008 | 12 | 42.816.558 | 3,00 | 1.725.000 | 25,00 | 4,03 | 39,00 | | 57.039.008 | 54,17 | 11,76 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 23 | | Upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan | Jumlah petugas yang dilatih (org) | 95 | 757.321.500 | 48 | 65.831.950 | 16 | 96.548.640 | 0,05 | 3.409.900 | 0,32 | 3,53 | 48,05 | | 69.241.850 | 50,58 | 9,14 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 23 | | Pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional | Terlaksananya pengelolaan administrasi tenaga fungsional (bin) | 72 | 595.000.000 | 36 | 41.456.000 | 12 | 59.205.645 | 3,00 | 1.025.000 | 25,00 | 1,73 | 39,00 | | 42.481.000 | 54,17 | 7,14 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 23 | | Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK non Fisik) Tahun 2016 | Jumlah puskesmas yang diakreditasi (unit) | 14 | 4.027.035.200 | 4 | 885.873.884 | 6 | 1.515.058.000 | 0,04 | 38.740.000 | 0,62 | 2,56 | 4,04 | | 924.613.884 | 28,84 | 22,96 | | |
| 11 | 1 | 01 | 02 | 25 | | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | Persentase Puskesmas dan Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar (%) | 100 | 107.046.500.000 | 50 | 10.009.119.676 | 20 | 12.753.525.890 | 0,76 | 16.443.252 | 3,81 | 0,13 | 50,76 | | 10.025.562.928 | 50,76 | 9,37 | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | | Pengadaan puskesmas keliling | Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling (unit) | 6 | 2.400.000.000 | 2 | 806.600.750 | 1 | 390.000.000 | 0,01 | - | 1,30 | - | 2,01 | | 806.600.750 | 33,55 | 33,61 | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK dan Pendamping) | Jumlah Puskesmas yang direhab (unit) | 10 | 12.346.500.000 | 2 | 1.230.110.000 | 3 | 4.332.000.000 | 0,01 | - | 0,40 | - | 2,01 | | 1.230.110.000 | 20,12 | 9,96 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|----|----|----|--|--|---|------------|------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas | Terpeliharanya sarpras puskesmas (bln) | 72 | 34.000.000.000 | 36 | 4.517.922.476 | 12 | 2.072.950.306 | 3,00 | 5.528.002 | 25,00 | 0,27 | 39,00 | 4.523.450.478 | 54,17 | 13,30 | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (Penunjang DAK) | Jumlah Puskesmas yang direhab | 4 | 4.150.000.000 | 1 | 461.938.750 | 1 | 306.839.526 | 0,02 | 8.927.250 | 2,30 | 2,91 | 1,02 | 470.866.000 | 25,58 | 11,35 | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (luncuran) | Jumlah kegiatan luncuran yang diselesaikan (paket) | 1 | 3.933.736.500 | | | 1 | 3.933.736.500 | 0,02 | 1.988.000 | 1,50 | 0,05 | 0,02 | 1.988.000 | 1,50 | 0,05 | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) | jumlah alat kesehatan yang diadakan (paket) | 6 | 7.400.000.000 | 3 | 679.375.000 | 1 | 843.000.000 | 0,02 | - | 1,50 | - | 3,02 | 679.375.000 | 50,25 | 9,18 | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan | Terpeliharanya alat kesehatan (bln) | 36 | 224.998.674 | - | - | 12 | 74.999.558 | 3,00 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | 8,33 | - | |
| | 1 | 01 | 02 | 25 | | Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK) | Jumlah instalasi air limbah yang dibangun (unit) | 6 | 8.800.000.000 | 1 | 1.061.304.000 | 1 | 800.000.000 | - | - | - | - | 1,00 | 1.061.304.000 | 16,67 | 12,06 | |
| 12 | 1 | 01 | 02 | 28 | | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Persentase penduduk yang memiliki JKN (%) | 100 | 180.684.091.900 | 85 | 76.420.377.950 | 5 | 27.337.639.353 | 3,00 | 790.752.434 | 60,00 | 2,89 | 88,00 | 77.211.130.384 | 88,00 | 42,73 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 28 | | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | Pembayaran iuran JAMKESDA (bln) | 72 | 38.975.000.000 | 36 | 16.500.000.000 | 12 | 6.744.613.929 | 3,00 | 15.208.750 | 25,00 | 0,23 | 39,00 | 16.515.208.750 | 54,17 | 42,37 | |
| | 1 | 01 | 02 | 28 | | Pelayanan gratis di puskesmas dan jaringannya | Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas (bln) | 72 | 4.029.091.900 | 36 | 2.014.545.950 | 12 | 1.291.081.424 | 3,00 | 69.138.790 | 25,00 | 5,36 | 39,00 | 2.083.684.740 | 54,17 | 51,72 | |
| | 1 | 01 | 02 | 28 | | Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas | Terselenggaranya pelayanan Kapitasi JKN pada FKTP (bln) | 72 | 123.500.000.000 | 36 | 52.787.832.000 | 12 | 17.595.944.000 | 3,00 | 706.404.894 | 25,00 | 4,01 | 39,00 | 53.494.236.894 | 54,17 | 43,32 | |
| | 1 | 01 | 02 | 28 | | Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas | Terselenggaranya pelayanan Non Kapitasi JKN pada FKTP (bln) | 72 | 10.236.000.000 | 36 | 5.118.000.000 | 12 | 1.706.000.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 5.118.000.000 | 54,17 | 50,00 | |
| 13 | 1 | 01 | 02 | 30 | | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan (%) | 85 | 535.000.000,00 | 70 | 267.500.000 | 5 | 165.691.050 | 3,00 | 1.391.000 | 60,00 | 0,84 | 73,00 | 268.891.000 | 85,88 | 50,26 | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 01 | 02 | 30 | | Pelayanan pemeliharaan kesehatan | Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi lansia (bln) | 72 | 535.000.000 | 36 | 267.500.000 | 12 | 165.691.050 | 3,00 | 1.391.000 | 25,00 | 0,84 | 39,00 | 268.891.000 | 54,17 | 50,26 | |
| 14 | 1 | 01 | 02 | 32 | | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Penurunan Angka Kematian Ibu (per 1000 kelahiran hidup) | 90 | 21.607.915.700 | 96 | 452.445.365 | 2 | 2.024.918.428 | - | 31.065.250 | - | 1,53 | 96,00 | 483.510.615 | 93,75 | 2,24 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Penurunan Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) | 30 | | 33 | | 1 | - | - | - | - | 96,00 | - | 93,75 | | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | | Penurunan Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) | 20 | | 23 | | 1 | - | - | - | - | 96,00 | - | 93,75 | | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 04 | 32 | | Usaha Kesehatan Ibu dan Anak | Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (bln) | 72 | 3.587.915.700 | 36 | 339.707.787 | 12 | 112.350.012 | 3,00 | 9.665.250 | 25,00 | 8,60 | 39,00 | 349.373.037 | 54,17 | 9,74 | |
| | 1 | 01 | 04 | 32 | | Pelayanan kesehatan anak prasekolah dan usia sekolah (Prasekdam Usek) | Terselenggaranya pelayanan kesehatan prasekdam usek (bln) | 72 | 520.000.000 | 36 | 66.437.800 | 12 | 42.568.416 | 3,00 | 1.600.000 | 25,00 | 3,76 | 39,00 | 68.037.800 | 54,17 | 13,08 | |
| | 1 | 01 | 04 | 32 | | Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan DAK NonFisik | Terselenggaranya layanan persalinan bagi masyarakat miskin (bln) | 72 | 17.500.000.000 | 36 | 46.299.778 | 12 | 1.870.000.000 | 3,00 | 19.800.000 | 25,00 | 1,06 | 39,00 | 66.099.778 | 54,17 | 0,38 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------|----|-----|----|----|--|---|---|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|------|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|-----------------|--|
| | K | Rp. | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 15 | 1 | 01 | 02 | 33 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Persentase Nagari dengan Posbindu PTM | 700 | 3.748.186.500 | 40 | 323.701.947 | 10 | 289.530.843 | 1,00 | 14.783.750 | 10,00 | 5,11 | 41,00 | 338.485.697 | 5,86 | 9,03 | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 02 | 33 | | Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) DBH Pajak Rokok TA. 2015 | Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (paket) | 6 | 262.140.750 | 3 | 87.380.250 | 1 | 94.513.602 | 0,02 | 3.927.750 | 2,10 | 4,16 | 3,02 | 91.308.000 | 50,35 | 34,83 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 33 | | Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra | Terpantainya penanggulangan kesehatan Matra (bin) | 72 | 202.753.500 | 36 | 67.584.500 | 12 | 47.601.419 | 3,00 | 5.454.250 | 25,00 | 11,46 | 39,00 | 73.038.750 | 54,17 | 36,02 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 33 | | Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit akibat Rokok (DBH Pajak Rokok) | Terselenggaranya deteksi dini penyakit akibat rokok (bin) | 72 | 506.211.591 | 36 | 168.737.197 | 12 | 74.777.911 | 3,00 | 1.167.500 | 25,00 | 1,56 | 39,00 | 169.904.697 | 54,17 | 33,56 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 33 | | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Terselenggaranya pelayanan ODGJ berat (bin) | 36 | 217.913.733 | - | - | 12 | 72.637.911 | 3,00 | 4.234.250 | 25,00 | 5,83 | 3,00 | 4.234.250 | 8,33 | 1,94 | | |
| 16 | 1 | 01 | 02 | 26 | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Cakupan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Tapan (%) | 100 | 36.014.464.323 | 50 | - | 20 | 12.004.821.441 | - | - | - | - | 50,00 | - | 50,00 | - | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 02 | 26 | | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) | Jumlah alkes yang dibeli (paket) | 6 | 13.514.464.323 | - | - | 1 | 4.504.821.441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 02 | 26 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) | Jumlah sarana yang dibangun (paket) | 6 | 22.500.000.000 | - | - | 1 | 7.500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 02 | 1 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD Tapan (bin) | 60 | 22.150.127.920 | 24 | 4.430.025.584 | 12 | 5.933.867.827 | 3 | 629.158.450 | 25,00 | 10,60 | 27,00 | 5.059.184.034 | 45,00 | 22,84 | Dinas Kesehatan | |
| | 1 | 01 | 02 | 16 | | Biaya operasional RSUD Pratama Tapan | tersedianya operasional pelayanan RSUD Tapan (bin) | 60 | 22.150.127.920 | 24 | 4.430.025.584 | 12 | 5.933.867.827 | 3 | 629.158.450 | 25,00 | 10,60 | 27,00 | 5.059.184.034 | 45,00 | 22,84 | | |
| 18 | | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK | WTP | 325.025.553 | WTP | - | WTP | 108.341.851 | - | - | - | - | WTP | - | 100,00 | - | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah | Terselenggaranya manajemen aset (bin) | 36 | 325.025.553 | - | - | 12 | 108.341.851 | 3,00 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | 8,33 | - | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,25 | 16,27 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |

| RSUD ZEIN PAINAN | | | | | | | | 402.322.336.376 | | 12.219.253.006 | | 84.967.766.951 | | 10.409.797.000 | | | 10.409.797.000 | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|----|---|---|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------------|--|
| 1 | 1 | 01 | 02 | 2 | 34 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) | 100 | 364.250.898.000 | 83,00 | 52.969.006 | 17 | 65.306.138.600 | 5 | 10.336.375.000 | 29,41 | 15,83 | 88 | 10.389.344.006 | 88,00 | 2,85 | RSUD Dr. M. Zein Painan | |
| | 1 | 01 | 02 | 02 | 34 | 01 | Kegiatan penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD | 72 | 364.250.898.000 | 36,00 | 52.969.006 | 12 | 65.306.138.600 | 3 | 10.336.375.000 | 25,00 | 15,83 | 39,00 | 10.389.344.006 | 54,17 | 2,85 | | |
| 2 | 1 | 01 | 02 | 02 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) | 100 | 1.000.000.000 | 83 | 183.521.000 | 17 | 300.000.000 | 5 | 73.422.000 | 29,41 | 24,47 | 88,00 | 256.943.000 | 88,00 | 25,69 | RSUD Dr. M. Zein Painan | |
| | 1 | 01 | 02 | 02 | 16 | 11 | Kegiatan Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | Jumlah pasien Miskin / Bermasalah yang terlayani (org) | 180 | 1.000.000.000 | 74 | 183.521.000 | 30 | 300.000.000 | 22 | 73.422.000 | 73,33 | 24,47 | 96,00 | 256.943.000 | 53,33 | 25,69 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|-----|---|---|-----|------------------------|----|------------------------|-----|------------------------|---|----------------------|-----------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 01 | 26 | | Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/rumah sakit Mata | Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD (%) | 100 | 37.071.438.376 | 83 | 11.982.763.000 | 17 | 19.361.628.351 | 0 | - | - | - | 83 | 11.982.763.000 | 83,00 | 32,32 | RSUD Dr. M. Zein Painan |
| | | | | | | | Pengadaann alat kesehatan (Penunjang DAK) | Terlaksananya kegiatan DAK (kegiatan) | 3 | 141.038.376 | - | - | 1 | 47.012.792 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Kegiatan pengadaan alat kesehatan | Jumlah alkes yang dibeli (paket) | 6 | 25.000.000.000 | 3 | 11.865.126.000 | 1 | 16.734.215.559 | 0 | - | - | - | 3 | 11.865.126.000 | 50,00 | 47,46 | |
| | | | | | | | Kegiatan pengadaan alat CSSD | Jumlah alkes yang dibeli (paket) | 6 | 6.000.000.000 | 0 | - | 100 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Kegiatan pengadaan Radiologi | Jumlah alkes yang dibeli (paket) | 6 | 3.350.000.000 | 3 | 117.637.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | 117.637.000 | 50,00 | 3,51 | |
| | | | | | | | Pengadaan IPAL (DAK) | Jumlah sarana IPAL yang dibangun (unit) | 1 | 2.580.400.000 | - | - | 1 | 2.580.400.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,33 | 20,29 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | |
| III | | | | | | | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | 809.922.731.132 | | 153.398.443.024 | | 218.654.613.874 | | 3.618.605.105 | | | | 157.017.048.129 | | | |
| 1 | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 10.099.207.770 | 36 | 1.463.461.963 | 12 | 1.484.153.846 | 3 | 302.424.506 | 25,00 | 20,38 | 39 | 1.765.886.469 | 54,17 | 17,49 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi (bln) | 72 | 1.770.778.880 | 36 | 227.762.377 | 12 | 234.750.000 | 3 | 63.349.666 | 25,00 | 26,99 | 39 | 291.112.043 | 54,17 | 16,44 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Terlaksananya inventarisasi aset (bln) | 60 | 193.912.736 | 24 | 5.411.081 | | - | 0 | - | | | 24 | 5.411.081 | 40,00 | 2,79 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | kebutuhan jasa administrasi keuangan (bln) | 72 | 2.157.334.080 | 36 | 427.000.000 | 12 | 476.710.000 | 3 | 73.941.748 | 25,00 | 15,51 | 39 | 500.941.748 | 54,17 | 23,22 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | kebutuhan jasa kebersihan kantor (bln) | 72 | 1.287.308.066 | 36 | 204.220.000 | 12 | 204.750.000 | 3 | 45.419.555 | 25,00 | 22,18 | 39 | 249.639.555 | 54,17 | 19,39 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor (bln) | 72 | 295.442.909 | 36 | 23.653.116 | 12 | 30.073.445 | 3 | 12.290.250 | 25,00 | 40,87 | 39 | 35.943.366 | 54,17 | 12,17 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan untuk kantor (bln) | 72 | 360.168.349 | 36 | 38.646.565 | 12 | 19.804.475 | 3 | 6.173.700 | 25,00 | 31,17 | 39 | 44.820.265 | 54,17 | 12,44 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Komponen penerangan bangunan kantor (bln) | 72 | 42.103.350 | 36 | 4.994.000 | 12 | 4.994.000 | 3 | 4.994.000 | 25,00 | 100,00 | 39 | 9.988.000 | 54,17 | 23,72 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (bln) | 72 | 449.963.200 | 36 | 63.275.400 | 12 | 102.260.000 | 0 | - | - | - | 36 | 63.275.400 | 50,00 | 14,06 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Penyediaan makanan dan minuman | makan minum rapat dan tamu (bln) | 72 | 611.162.032 | 36 | 72.002.500 | 12 | 99.300.000 | 3 | 33.480.000 | 25,00 | 33,72 | 39 | 105.482.500 | 54,17 | 17,26 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi luar daerah (bln) | 72 | 1.852.103.536 | 36 | 322.553.344 | 12 | 112.175.000 | 3 | 21.680.721 | 25,00 | 19,33 | 39 | 344.234.065 | 54,17 | 18,59 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah (bln) | 72 | 928.930.632 | 36 | 73.943.580 | 12 | 142.755.000 | 3 | 29.545.466 | 25,00 | 20,70 | 39 | 103.489.046 | 54,17 | 11,14 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|---|-----|----|--|---|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan (bln) | 36 | 150.000.000 | 0 | - | 12 | 56.581.926 | 3 | 11.549.400 | 25,00 | 20,41 | 3 | 11.549.400 | 8,33 | 7,70 | |
| 2 | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (bln) | 72 | 6.647.923.181 | 36 | 942.355.296 | 12 | 312.343.000 | 3 | 42.160.808 | 25,00 | 13,50 | 39 | 984.516.104 | 54,17 | 14,81 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Perencanaan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah dokumen perencanaan | 37 | 3.000.000.000 | 5 | 528.679.045 | | - | 0 | - | | | 5 | 528.679.045 | 13,51 | 17,62 | |
| | | 01 | 1 | 01 | 03 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Pemeliharaan/ operasional kendaraan dinas (bln) | 72 | 862.108.782 | 36 | 149.232.603 | 12 | 177.300.000 | 3 | 21.998.445 | 25,00 | 12,41 | 39 | 171.231.048 | 54,17 | 19,86 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan peralatan gedung kantor | 72 | 307.954.958 | 36 | 11.905.500 | 12 | 34.748.000 | 3 | 4.806.000 | 25,00 | 13,83 | 39 | 16.711.500 | 54,17 | 5,43 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor | Pemeliharaan gedung kantor | 72 | 276.281.562 | 36 | 48.078.170 | 12 | 100.295.000 | 3 | 15.356.363 | 25,00 | 15,31 | 39 | 63.434.533 | 54,17 | 22,96 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas | Pemeliharaan rumah dinas kantor | 1 | 207.459.979 | 1 | 204.459.978 | | - | 0 | - | | | 1 | 204.459.978 | 100,00 | 98,55 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari taratak sei lundang Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari bukit kaciak lumpo kec. Iv jurai Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Rehab gedung pertemuan inderapura kec. Pancung soal Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Rehab gedung kantor | 1 | 200.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari api - api kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari lakitan timur kec. lengang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 45.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari kapelgam kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 45.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari jinanng kp. pansur kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | - | | - | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|---|-----|----|--|---|------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari bungo pasang salido kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor badan usaha milik nagari (BUM Nagari) Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan kantor wali nagari gurun panjang utara kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan pagar kantor wali nagari sawah laweh kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Kantor KAN Nagari Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari batu hampa Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari kapuh utara Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 150.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pembangunan Kantor wali nagari sungai pinang Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Pembangunan gedung kantor | 1 | 100.000.000 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Sharing pendanaan pengembangan objek wisata carocok painan (pendistrihan panggung) (Bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2017) | | 1 | 104.117.900 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | | |
| 3 | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase peningkatan Disiplin aparatur | 100 | 230.800.000,00 | 90 | 74.115.800,00 | 5 | 35.600.000,00 | 5 | 35.422.000 | 100,00 | 99,50 | 95 | 109.537.800 | 95,00 | 47,46 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan (paket) | 6 | 230.800.000,00 | 3 | 74.115.800 | 1 | 35.600.000 | 1 | 35.422.000 | 100,00 | 99,50 | 4 | 109.537.800 | 66,67 | 47,46 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|---|--|------|-------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| 4 | 1 | 01 | 02 | 01 | 01 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU- PARU / RUMAH SAKIT MATA | Persentase penyelesaian relokasi RSUD | 100 | 64.139.403.355,00 | - | - | 100 | 63.037.385.000,00 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Manajemen Konstruksi RSUD Baru (Lanjutan 2016) | Manajemen Konstruksi RSUD | 1 | 226.293.805 | - | - | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | Lanjutan keg.2016 |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru (lanjutan2015) | Master Plan RSUD (paket) | 1 | 383.121.500 | - | - | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | Lanjutan keg.2015 |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Pembangunan Relokasi RSUD dr. M.Zein Painan /PIP (lanjutan 2015) | Pembangunan Relokasi RSUD (paket) | 1 | 63.037.385.000 | - | - | 1 | 63.037.385.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | Lanjutan keg.2015 |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Pembuatan Amdal RSUD Baru | Pembuatan Amdal RSUD Baru | 3 | 378.411.000 | - | - | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Baru (Sisa Tahun 2017) | Dokumen Lingkungan Hidup | 1 | 49.847.000 | - | - | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 02 | 01 | | Operasional Pembangunan RSUD M. Zein Painan | Operasional Pembangunan RSUD M. Zein Painan | | 64.345.050 | - | - | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | #DIV/0! | |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG | Persentase drainase kondisi baik | 60 | 33.448.175.000 | 48 | 1.629.699.252 | 4 | 1.209.252.353 | 1 | 100.033.900 | 25,00 | 8,27 | 49 | 1.729.733.152 | 81,67 | 5,17 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan rutin drainase kota | Terlaksananya pemeliharaan drainase (bln) | 72 | 3.731.208.000 | 36 | 393.668.971 | 12 | 372.665.105 | 3 | 45.890.900 | 25,00 | 12,31 | 39 | 439.559.871 | 54,17 | 11,78 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Pembangunan drainase dan gorong-gorong yang dibangun dan ditingkatkan (aket) | 15 | 21.886.967.000 | 0 | - | | | 0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar | Pembangunan Drainase dan trotoar yang dibangun dan ditingkatkan (paket) | 26 | 6.900.000.000 | 4 | 1.163.267.181 | 3 | 786.594.356 | 0 | 52.772.400 | - | 6,71 | 4 | 1.216.039.581 | 15,38 | 17,62 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar | Dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase dan trotoar | 6 | 480.000.000 | 2 | 72.763.100 | | | 0 | - | - | - | 2 | 72.763.100 | 33,33 | 15,16 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penyusunan Data Base Drainase | Data Base Drainase | 3 | 450.000.000 | - | - | 1 | 49.992.892 | 0 | 1.370.600 | - | 2,74 | 0 | 1.370.600 | - | 0,30 | |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | Jalan terpelihara (km) | 1730 | 42.046.049.360,00 | 757 | 8.800.138.333,00 | 200 | 4.373.935.717,00 | 30 | 351.423.800 | 15,00 | 8,03 | 787 | 9.151.562.133 | 45,49 | 21,77 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten | Pemeliharaan Jalan (bln) | 72 | 22.500.000.000 | 36 | 4.111.038.490 | 12 | 1.993.322.972 | 3 | 232.957.250 | 25,00 | 11,69 | 39 | 4.343.995.740 | 54,17 | 19,31 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan Jembatan Kabupaten | Pemeliharaan Jembatan (bln) | 72 | 3.436.995.771 | 36 | 1.145.665.257 | 12 | 719.947.829 | 3 | 115.140.000 | 25,00 | 15,99 | 39 | 1.260.805.257 | 54,17 | 36,68 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehabilitasi / Peningkatan Jembatan | Jembatan yang direhab (unit) | 10 | 15.450.000.000 | 5 | 3.543.434.586 | 3 | 1.660.664.916 | 0 | 3.326.550 | - | 0,20 | 5 | 3.546.761.136 | 50,00 | 22,96 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehab Jembatan gantung pelangai gadang kenag. Pelangai gadang kec. Ranah Pesisir Kab Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Rehab Jembatan | 1 | 190.000.000 | | | | | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|---|---|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehab Jembatan gantung sumbaru kenag.pelagai koto nan ampek kec. Ranah Pesisir Kab.Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Rehab Jembatan | 1 | 190.000.000 | | | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehab Jembatan gantung kampung mantayan air haji nagari sungai sirah air haji kec. Linggo sari baganti Kab.Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Rehab Jembatan | 1 | 200.000.000 | | | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | | | | | | Rehab Peningkatan Jembatan (Sisa Tahun 2017) | Rehab Jembatan | | 79.053.589 | 0 | | | | 0 | - | | | 0 | - | #DIV/0! | - | |
| 7 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Program Pengembangan Wilayah Strategi S dan Cepat Tumbuh | Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah strategis (%) | 50 | 34.197.431.350 | 40 | 7.903.106.055 | 3 | 8.619.138.565 | 1 | 292.365.192 | 33,33 | 3,39 | 41 | 8.195.471.247 | 82,00 | 23,97 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Jumlah Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur | 25 | 14.000.000.000 | 8 | 3.544.957.181 | 10 | 4.707.071.666 | 1 | 282.439.100 | 10,00 | 6,00 | 9 | 3.827.396.281 | 36,00 | 27,34 | |
| | 1 | 01 | 03 | 01 | | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur | Dokumen Perencanaan | 10 | 350.000.000 | | | | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Infrastruktur kawasan Destinasi wisata | Jumlah Pembangunan / Infrastruktur kawasan destinasi wisata | 20 | 18.200.000.000 | 5 | 3.612.997.124 | 3 | 3.912.066.899 | 0 | 9.926.092 | - | 0,25 | 5 | 3.622.923.216 | 25,00 | 19,91 | |
| | | | | | | Sharing Pembangunan sarana prasarana wisata carock painan (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus propinsi tahun 2018) | sarana dan prasarana wisata | 1 | 1.264.920.000 | 1 | 362.640.400 | | | 0 | - | | | 1 | 362.640.400 | 100,00 | 28,67 | |
| | | | | | | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata (Sisa Tahun 2017) | Pembangunan Infrastruktur kawasan destinasi wisata | | 87.080.700 | | 87.080.700 | | | 0 | - | | | 0 | 87.080.700 | #DIV/0! | 100,00 | |
| | | | | | | Penyusunan Dokumen AMDAL Mesjid Terapung (Sisa Tahun 2017) | Dokumen AMDAL | | 246.804.250 | | 246.804.250 | | | 0 | - | | | 0 | 246.804.250 | #DIV/0! | 100,00 | |
| | | | | | | Pembangunan Gerbang Kawasan Wisata Mandeh (Sisa Tahun 2017) | Pembangunan sarana dan prasarana wisata | | 48.626.400 | | 48.626.400 | | | 0 | - | | | 0 | 48.626.400 | #DIV/0! | 100,00 | |
| 8 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAA N | cakupan air bersih (%) | 97,1 | 20.560.304.300 | 91,02 | 3.523.134.182 | 1,45 | 6.286.194.964 | 0 | 11.066.450 | - | 0,18 | 91,0 | 3.534.200.632 | 93,74 | 17,19 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Cakuan sanitasi layak (%) | 69,95 | | 64,63 | | 1,14 | 0 | - | - | - | - | 64,6 | - | 92,39 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas (DDUB) | Jumlah pamsimas yang terbangun (paket) | 60 | 3.050.000.000 | 7 | 450.000.000 | | | 0 | - | | | 7 | 450.000.000 | 11,67 | 14,75 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penunjang Kegiatan Pamsimas | Tersedianya dukungan kegiatan Pamsimas (bin) | 72 | 1.500.000.000 | 36 | 146.937.349 | 12 | 111.560.964 | 3 | 3.194.500 | 25,00 | 2,86 | 39 | 150.131.849 | 54,17 | 10,01 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan Akses Sanitasi Sambungan Rumah (SR) | Jumlah SR yang ditingkatkan (unit SR) | 8 | 380.000.000 | 0 | - | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pengembangan Program Hibah Air Minum | Jumlah lokasi pengembangan air minum (paket) | 80 | 9.500.000.000 | 10 | 1.926.992.533 | 24 | 4.966.700.000 | 0 | 7.871.950 | - | 0,16 | 10 | 1.934.864.483 | 12,50 | 20,37 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|----|----|---|----|---|--|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Pamsimas Reguler | Jumlah pamsimas yang terbangun (aket) | 14 | 4.960.000.000 | 4 | 928.900.000 | 5 | 1.207.934.000 | 0 | - | - | - | 4 | 928.900.000 | 28,57 | 18,73 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penyusunan Data Base Air Minum / Sanitasi | Dokumen Database Air Minum / Sanitasi | 1 | 600.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehabilitasi SPAM | Rehabilitasi SPAM (bln) | 12 | 500.000.000 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Kantor KAN Tapan (Sisa Tahun 2017) | Pembangunan Kantor | 1 | 70.304.300 | 1 | 70.304.300 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 70.304.300 | 100,00 | 100,00 | |
| 9 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | Persentase program/ kegiatan sesuai perencanaan (%) | 100 | 883.855.170,00 | 80,0 | 441.927.585,00 | 10 | 169.088.192,00 | 2 | 26.318.498 | 20,00 | 15,56 | 82 | 468.246.083 | 82,00 | 52,98 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Laporan Monev (dokumen) | 24 | 231.400.916 | 12 | 115.700.458 | 4 | 86.167.533 | 1 | 16.283.098 | 25,00 | 18,90 | 13 | 131.983.556 | 54,17 | 57,04 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Sinkronisasi Program DAK dan APBN | Koordinasi kegiatan DAK dan APBN (bln) | 72 | 410.595.796 | 36 | 205.297.898 | 12 | 42.610.916 | 3 | 6.538.200 | 25,00 | 15,34 | 39 | 211.836.098 | 54,17 | 51,59 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA | Dokumen RPI2JM- CIPTA KARYA (dok) | 6 | 181.949.886 | 3 | 90.974.943 | 1 | 30.324.981 | 0 | 2.178.700 | - | 7,18 | 3 | 93.153.643 | 50,00 | 51,20 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penyusunan Dokumen HSBGN | Dokumen HSBGN (dokumen) | 6 | 59.908.572 | 3 | 29.954.286 | 1 | 9.984.762 | 0 | 1.318.500 | - | 13,21 | 3 | 31.272.786 | 50,00 | 52,20 | |
| 10 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN | persentase taman kota kondisi baik (%) | 80 | 9.395.307.070,00 | 60 | 7.433.211.857,00 | 10 | 1.311.070.619,00 | 2 | 235.269.615 | 20,00 | 17,94 | 62 | 7.668.481.472 | 77,50 | 81,62 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan | Pemeliharaan taman (bln) | 72 | 5.895.307.070 | 36 | 3.933.211.857 | 12 | 1.311.070.619 | 3 | 235.269.615 | 25,00 | 17,94 | 39 | 4.168.481.472 | 54,17 | 70,71 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Penerangan Jalan Umum | Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum (bln) | 12 | 3.500.000.000 | 12 | 3.500.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | 12 | 3.500.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN | Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun (%) | 100 | 104.420.779.032,00 | 46 | 35.141.848.067,00 | 20 | 14.583.638.034,00 | 2 | 221.937.600 | 10,00 | 1,52 | 48 | 35.363.785.667 | 48,00 | 33,87 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah pembangunan gedung pemerintah (Unit) | 15 | 95.270.779.032 | 4 | 30.735.039.428 | 7 | 13.852.140.759 | 0 | 19.152.200 | - | 0,14 | 4 | 30.754.191.628 | 26,67 | 32,28 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Gedung kantor yang di rehab berat (unit) | 15 | 9.150.000.000 | 5 | 4.406.808.639 | 4 | 731.497.275 | 1 | 202.785.400 | 25,00 | 27,72 | 6 | 4.609.594.039 | 40,00 | 50,38 | |
| 12 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | Persentase jalan kondisi mantap (baik + sedang) | 40,43 | 346.461.744.571 | 36 | 64.215.648.308 | 2,72 | 81.904.886.895 | 0 | 1.055.059.728 | - | 1,29 | 36 | 65.270.708.036 | 89,04 | 18,84 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Jalan Kabupaten | Jumlah ruas jalan yang dibangun (ruas) | 10 | 4.450.000.000 | 3 | 775.157.357 | 3 | 1.497.000.000 | 1 | 172.925.383 | 33,33 | 11,55 | 4 | 948.082.740 | 40,00 | 21,31 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK) | Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan (ruas) | 60 | 163.769.092.650 | 9 | 25.959.240.000 | 13 | 53.281.450.000 | 0 | 16.105.000 | - | 0,03 | 9 | 25.975.345.000 | 15,00 | 15,86 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan Jalan Kabupaten | Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan (ruas) | 120 | 23.200.000.000 | 45 | 17.832.463.395 | 28 | 11.243.642.500 | 1 | 676.568.255 | 3,57 | 6,02 | 46 | 18.509.031.650 | 38,33 | 79,78 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Jembatan Kabupaten | Jumlah jembatan yang di bangun (unit) | 25 | 26.202.623.705 | 7 | 6.647.264.738 | 7 | 6.345.136.717 | 0 | 74.633.900 | - | 1,18 | 7 | 6.721.898.638 | 28,00 | 25,65 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perencanaan Pembangunan Jembatan | Jumlah dokumen perencanaan jembatan (dok) | 20 | 2.202.026.267 | 5 | 464.900.342 | 7 | 326.911.868 | 0 | 6.517.942 | - | 1,99 | 5 | 471.418.284 | 25,00 | 21,41 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perencanaan Pembangunan dan peningkatan Jalan | Jumlah dokumen perencanaan jalan | 60 | 6.400.000.000 | 1 | 616.270.572 | 4 | 644.186.501 | 2 | 59.447.300 | 50,00 | 9,23 | 3 | 675.717.872 | 5,00 | 10,56 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Koto XI Tarusan | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 3.000.000.000 | 11 | 1.343.165.096 | 7 | 1.155.125.000 | 0 | 2.059.050 | - | 0,18 | 11 | 1.345.224.146 | 55,00 | 44,84 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|---|----|---|--|----|----------------|----|---------------|----|---------------|---|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Bayang | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 27.845.000.000 | 15 | 2.311.813.561 | 5 | 834.500.000 | 0 | 1.714.150 | - | 0,21 | 15 | 2.313.527.711 | 75,00 | 8,31 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Bayang Utara | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 3.050.000.000 | 1 | 192.375.171 | 7 | 1.296.750.000 | 0 | 3.062.850 | - | 0,24 | 1 | 195.438.021 | 5,00 | 6,41 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan IV Jurai | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 30 | 13.750.000.000 | 13 | 1.707.709.030 | 7 | 927.250.000 | 0 | 2.111.100 | - | 0,23 | 13 | 1.709.820.130 | 43,33 | 12,44 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Batang Kapas | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 7.800.000.000 | 8 | 1.119.036.171 | 3 | 397.000.000 | 0 | 492.950 | - | 0,12 | 8 | 1.119.529.121 | 40,00 | 14,35 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Sutera | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 8.000.000.000 | 1 | 251.078.525 | 5 | 659.625.000 | 0 | 1.346.600 | - | 0,20 | 1 | 252.425.125 | 5,00 | 3,16 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lengayang | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 13.920.000.000 | 8 | 930.868.179 | 11 | 1.113.000.000 | 0 | 5.138.300 | - | 0,46 | 8 | 936.006.479 | 40,00 | 6,72 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Pesisir | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 8.510.000.000 | 4 | 287.216.726 | 10 | 1.021.750.000 | 0 | 2.180.300 | - | 0,21 | 4 | 289.397.026 | 20,00 | 3,40 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Linggo Sari Baganti | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 20 | 7.960.000.000 | 7 | 829.976.816 | 3 | 487.500.000 | 0 | 1.147.750 | - | 0,24 | 7 | 831.124.566 | 35,00 | 10,44 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Air Pura | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 10 | 2.300.000.000 | 1 | 145.810.496 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 145.810.496 | 10,00 | 6,34 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Pancung Soal | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 15 | 5.550.000.000 | 3 | 488.213.399 | 2 | 243.250.000 | 0 | - | - | - | 3 | 488.213.399 | 20,00 | 8,80 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 15 | 2.150.000.000 | 0 | 3.720.624 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 3.720.624 | - | 0,17 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 10 | 3.500.000.000 | 2 | 375.494.946 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 375.494.946 | 20,00 | 10,73 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lunang | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 10 | 3.250.000.000 | 1 | 100.113.040 | 2 | 195.000.000 | 0 | - | - | - | 1 | 100.113.040 | 10,00 | 3,08 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Silaut | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 15 | 3.250.000.000 | 1 | 506.861.418 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 506.861.418 | 6,67 | 15,60 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penunjang DAK Peningkatan Jalan Kabupaten | Terlaksananya Kegiatan DAK Jalan (bin) | 72 | 800.000.000 | 36 | 175.943.729 | 12 | 85.809.309 | 3 | 17.941.600 | 25,00 | 20,91 | 39 | 193.885.329 | 54,17 | 24,24 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penguatan Data Base dan Survey Kondisi (DAK) | Database jalan (dokumen) | 1 | 143.001.949 | 1 | 143.001.949 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 143.001.949 | 100,00 | 100,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penguatan Data Base dan Survey Kondisi | Database jalan (dokumen) | 4 | 540.000.000 | 1 | 99.853.928 | 1 | 150.000.000 | 0 | 11.667.298 | - | 7,78 | 1 | 111.521.226 | 25,00 | 20,65 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Jalan (TMMD) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 800.000.000 | 1 | 794.355.900 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 794.355.900 | 100,00 | 99,29 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemasangan parit miring (drainase) jalan api - api di kenagarian api - api (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 200.000.000 | 0 | 7.823.300 | | | 0 | - | - | - | 0 | 7.823.300 | - | 3,91 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jalan ambacang kamba kenag. Asam kamba kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 100.000.000 | 0 | 2.950.000 | | | 0 | - | - | - | 0 | 2.950.000 | - | 2,95 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|--|---------------------------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|---|-----|---|-----------------|---|------------|-----------|---------------------|------|----|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan jalan sawah laweh - gurun panjang kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 100.000.000 | 0 | 2.500.000 | | | 0 | - | | | 0 | 2.500.000 | - | 2,50 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan jalan Persipan SMA 3 kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 100.000.000 | 0 | 4.088.000 | | | 0 | - | | | 0 | 4.088.000 | - | 4,09 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembuatan jalan lingkung di kenagarian Talaok kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 100.000.000 | 0 | 2.500.000 | | | 0 | - | | | 0 | 2.500.000 | - | 2,50 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembuatan jalan lingkung taluak kualo kec. Pancung soal Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 150.000.000 | 0 | 3.350.000 | | | 0 | - | | | 0 | 3.350.000 | - | 2,23 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembuatan jalan ruas kapencong nagari kapelgam - nagari koto marapak kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | jalan yang di bangun (paket) | 1 | 165.000.000 | 0 | 4.554.700 | | | 0 | - | | | 0 | 4.554.700 | - | 2,76 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembuatan jalan ruas lubuk gambir nagari kapelgam - nagari koto berapak kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 190.000.000 | 0 | 5.568.100 | | | 0 | - | | | 0 | 5.568.100 | - | 2,93 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jalan ruas kenag. Barung - barung balantai kenag. Sungai lundang kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 115.000.000 | 0 | 4.295.000 | | | 0 | - | | | 0 | 4.295.000 | - | 3,73 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan jalan kapujan kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 115.000.000 | 0 | 3.805.000 | | | 0 | - | | | 0 | 3.805.000 | - | 3,31 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jalan siguntur kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 115.000.000 | 0 | 4.295.000 | | | 0 | - | | | 0 | 4.295.000 | - | 3,73 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jalan lambung bukit gunung malelo kec. sutera Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 215.000.000 | 0 | 7.873.700 | | | 0 | - | | | 0 | 7.873.700 | - | 3,66 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|---|----|--|----------------------------------|---|-------------|---|-----------|---|-----|---|-----|-----------------|-----|------------|-----------|---------------------|------|----|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Kelanjutan pengamanan jalan taratak tapatih limo hantu (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 210.000.000 | 0 | - | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Peningkatan jalan lingkungan sungai sirah kec. Sutura (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 200.000.000 | 0 | 7.140.800 | | | 0 | - | | | 0 | 7.140.800 | - | 3,57 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jembatan usaha tani di sungai normalisasi sungai sirah kec. Batang kapas (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah jembatan yang di bangun | 1 | 215.000.000 | 0 | - | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jembatan usaha tani sungai sirah kenag. Pasa suranthi kec. sutera (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah jembatan yang di bangun | 1 | 215.000.000 | 0 | - | | | 0 | - | | | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jalan lingkaran nagari puluk - puluk kec. Bayang Utara (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 200.000.000 | 0 | 6.396.000 | | | 0 | - | | | 0 | 6.396.000 | - | 3,20 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Aspal lapen jalan simpang coklat menuju pale kenag. Koto VII pelangai ranah pesisir Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 180.000.000 | 0 | 7.511.400 | | | 0 | - | | | 0 | 7.511.400 | - | 4,17 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan jembatan rawang KM 11 padang laban pasir peelangai kec. Ranah pesisir Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jembatan yang di bangun (paket) | 1 | 200.000.000 | 0 | 5.000.000 | | | 0 | - | | | 0 | 5.000.000 | - | 2,50 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembukaan / pengerasan jalan kurao sungai liku menuju koto lamo lakitan tengah kec. Ranah pesisir Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 150.000.000 | 0 | 4.920.700 | | | 0 | - | | | 0 | 4.920.700 | - | 3,28 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rabat beton jalan lingkungan taratak panas kenag. Pelangai gadang kec. Ranah pesisir Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 175.000.000 | 0 | 5.036.700 | | | 0 | - | | | 0 | 5.036.700 | - | 2,88 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Aspal lapen jalan ambaan kenag. Nyiur melambai kec. Ranah pesisir Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 185.000.000 | 0 | 5.530.700 | | | 0 | - | | | 0 | 5.530.700 | - | 2,99 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|----|----|---|----|--|--|-------|----------------|-------|---------------|------|---------------|---|------------|-----------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Kelanjutan pembangunan jembatan talao nag. Taluk ampalu inderapura kec. Pancung soal Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jembatan yang di bangun (paket) | 1 | 200.000.000 | 0 | 6.450.000 | | | 0 | - | 0 | 6.450.000 | - | 3,23 | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pengerasan jalan sungai putih menuju koto kanggo lumpo nag. Gurun panjang selatan Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 200.000.000 | 0 | 7.141.400 | | | 0 | - | 0 | 7.141.400 | - | 3,57 | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rabat beton jalan pulau siandah karang tengah kenag. Lakitan selatan kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan (alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi tahun 2018) | Jumlah ruas jalan yang dibangun | 1 | 125.000.000 | 0 | 5.012.700 | | | 0 | - | 0 | 5.012.700 | - | 4,01 | | | |
| 13 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG | Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang (%) | 80 | 1.374.033.738 | 70 | 843.899.600 | 5 | 415.678.201 | 0 | 13.070.000 | - | 3,14 | 70 | 856.969.600 | 87,50 | 62,37 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (Koordinasi TKPRD) | Operasional TKPRD (bln) | 48 | 520.000.000 | 24 | 75.573.100 | 12 | 387.427.712 | 3 | 12.520.000 | 25,00 | 3,23 | 27 | 88.093.100 | 56,25 | 16,94 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang | Operasional pengendalian dan pengawasan ruang (bln) | 36 | 84.751.467 | 0 | - | 12 | 28.250.489 | 3 | 550.000 | 25,00 | 1,95 | 3 | 550.000 | 8,33 | 0,65 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rencana Detail Tata Ruang Kota Kambang Kec. Lengayang | Dokumen RDTR Kota Kambang (dok) | 1 | 769.282.271 | 1 | 768.326.500 | - | - | 0 | - | | 100,00% | | 768.326.500 | 100,00 | 99,88 | |
| 14 | 1 | 01 | 04 | 1 | 01 | PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI | PERSENTASE PENGATURAN JASA KONSTRUKSI | 100 | 149.931.500 | | 26.715.145 | 10 | 18.885.875 | 0 | 4.366.728 | - | 23,12 | 0 | 31.081.873 | - | 20,73 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 04 | 1 | 01 | Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi | Terlaksananya proses rekomendasi IUJK (bln) | 72 | 149.931.500 | 36 | 26.715.145 | 12 | 18.885.875 | 3 | 4.366.728 | 25,00 | 23,12 | 39 | 31.081.873 | 54,17 | 20,73 | |
| 15 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN | Persentase sarana peribadatan penda kondisi baik (%) | 80 | 27.350.000.000 | - | 310.847.484 | 70 | 4.400.439.480 | 0 | 8.724.600 | - | 0,20 | 0 | 319.572.084 | - | 1,17 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah | Dokumen perencanaan (dokumen) | 1 | 350.000.000 | 1 | 310.847.484 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 310.847.484 | 100,00 | 88,81 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah | Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang dibangun (unit) | 1 | 27.000.000.000 | - | - | 0,25 | 4.400.439.480 | 0 | 8.724.600 | - | 0,20 | 0 | 8.724.600 | - | 0,03 | |
| 16 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | Persentase kelengkapan sarana prasaranana kebinamargaan (%) | 71,40 | 1.813.466.960 | 51,40 | 1.101.831.043 | 5 | 189.329.213 | 0 | 22.147.200 | - | 11,70 | 51,4 | 1.123.978.243 | 71,99 | 61,98 | Dinas PU dan Penataan Ruang |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|----|----|----|---|----|---|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Tersedianya biaya perawatan peralatan (bln) | 60 | 80.000.000 | 24 | 10.000.000 | 12 | 14.080.000 | 3 | - | 25,00 | - | 27 | 10.000.000 | 45,00 | 12,50 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium (paket) | 15 | 320.000.000 | 6 | 122.595.000 | 5 | 46.761.000 | 0 | - | - | - | 6 | 122.595.000 | 40,00 | 38,31 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Operasional laboratorium | Operasional laboratorium (bln) | 72 | 513.466.960 | 36 | 85.426.543 | 12 | 128.488.213 | 3 | 22.147.200 | 25,00 | 17,24 | 39 | 107.573.743 | 54,17 | 20,95 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pengadaan Alat - alat berat | Jumlah Pengadaan Alat - alat berat (unit) | 1 | 900.000.000 | 1 | 883.809.500 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 883.809.500 | 100,00 | 98,20 | |
| 17 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH | cakupan air bersih (%) | 97,1 | 78.391.003.600 | 91,02 | 14.735.410.784 | 1,45 | 25.047.138.724 | 0 | 29.255.600 | - | 0,12 | 91,020 | 14.764.666.384 | 93,74 | 18,83 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | Cakupan sanitasi layak (%) | 69,95 | | 64,63 | | 1,14 | | | - | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Jumlah bangunan pengelolaan air minum (unit) | 9 | 3.563.953.000 | 0 | 72.263.600 | 1 | 538.547.800 | 0 | - | - | - | 0,0 | 72.263.600 | - | 2,03 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan | Terpeliharanya Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan (bln) | 72 | 1.300.000.000 | 36 | 40.833.749 | 12 | 99.994.000 | 3 | 743.900 | 25,00 | 0,74 | 39 | 41.577.649 | 54,17 | 3,20 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penunjang Kegiatan AMPL (Air minum dan penyehatan lingkungan) | Terlaksananya kegiatan AMPL (kegiatan) | 3 | 652.903.600 | 3 | 154.892.749 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3 | 154.892.749 | 100,00 | 23,72 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) | Jumlah bangunan pengelolaan air minum (unit) | 22 | 27.805.957.900 | 6 | 5.346.703.950 | 5 | 4.587.756.000 | 0 | 2.634.000 | - | 0,06 | 6 | 5.349.337.950 | 27,27 | 19,24 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) | Jumlah bangunan pengelolaan air minum | 8 | 9.781.533.000 | 1 | 1.478.236.336 | 2 | 3.260.511.000 | 0 | 20.725.000 | - | 0,64 | 1 | 1.498.961.336 | 12,50 | 15,32 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) | Jumlah bangunan pengelolaan air minum | 15 | 8.325.000.000 | 0 | - | 6 | 2.775.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penunjang Air Minum (DAK) | Terlaksananya Kegiatan DAK Air Minum (bln) | 36 | 820.000.000 | 0 | 0 | 12 | 46.748.964 | 3 | 1.867.000 | 25,00 | 3,99 | 3 | 1.867.000 | 8,33 | 0,23 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) | jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket) | 10 | 5.354.628.000 | 4 | 1.784.876.000 | 4 | 2.205.808.000 | 0 | - | - | - | 4 | 1.784.876.000 | 40,00 | 33,33 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) | jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket) | 7 | 5.932.870.000 | 7 | 5.380.310.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 7 | 5.380.310.000 | 100,00 | 90,69 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi) | jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket) | 28 | 4.200.000.000 | 0 | - | 14 | 2.100.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penunjang Sanitasi DAK | Terlaksananya Kegiatan DAK sanitasi (bln) | 36 | 820.000.000 | 0 | - | 12 | 95.261.787 | 3 | 2.274.500 | 25,00 | 2,39 | 3 | 2.274.500 | 8,33 | 0,28 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perencanaan Pembangunan Sanitasi | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (dok) | 5 | 282.649.882 | 5 | 270.830.400 | | - | 0 | - | - | - | 5 | 270.830.400 | 100,00 | 95,82 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Perbaikan Jalur Pipa Salido Ketek Kec. IV Jurai | Jumlah jalur pipa yang diperbaiki (unit) | 1 | 213.997.045 | 1 | 206.464.000 | | - | 0 | - | - | - | 1 | 206.464.000 | 100,00 | 96,48 | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG) | jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket) | 200 | 9.337.511.173 | | - | 200 | 9.337.511.173 | 0 | 1.011.200 | - | 0,01 | 0 | 1.011.200 | - | 0,01 | |
| 18 | 18 | 02 | 05 | 1 | 01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air | B (tercemar ringan) | 1.557.212.470 | B (tercemar ringan) | 232.986.390 | B (tercemar ringan) | 236.358.715 | 0 | 37.275.965 | 15,77 | B (tercemar ringan) | 270.262.355 | 100,00 | 17,36 | Dinas PU dan Penataan Ruang | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|---|--|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 1 | 02 | 05 | 1 | 01 | Operasional IPLT | Tersedianya operasional IPLT (bln) | 60 | 1.557.212.470 | 24 | 232.986.390 | 12 | 236.358.715 | 3 | 37.275.965 | 25,00 | 15,77 | 27 | 270.262.355 | 45,00 | 17,36 | | |
| 19 | 2 | 00 | 02 | 1 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA | Terlaksananya promosi wisata (Kegiatan) | 6 | 545.000.000 | 3 | 65.910.000 | 1 | 37.435.000 | 0 | - | - | - | 3 | 65.910.000 | 50,00 | 12,09 | Dinas PU dan Penataan Ruang | |
| | 2 | 00 | 02 | 1 | 01 | Pelaksanaan Promosi Wisata | Jumlah kepestaan dalam festival Langkisasu (kegiatan) | 6 | 280.000.000 | 3 | 15.985.000 | 1 | 17.435.000 | 0 | - | - | - | 3 | 15.985.000 | 50,00 | 5,71 | | |
| | 2 | 00 | 02 | 1 | 01 | Pemeliharaan pentas dan Tenda pariwisata | terpeliharanya pentas dan Tenda pariwisata (bln) | 60 | 265.000.000 | 24 | 49.925.000,00 | 12 | 20.000.000 | 0 | - | - | - | 24 | 49.925.000 | 40,00 | 18,84 | | |
| 20 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/ DATABASE JALAN DAN JEMBATAN | Persentase kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan (%) | 100 | 154.326.948 | 70 | - | 20 | 51.442.316 | 0 | 7.277.944 | - | 14,15 | 70 | 7.277.944 | 70,00 | 4,72 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan | Database Jembatan | 3 | 154.326.948 | 0 | - | 1 | 51.442.316 | 0 | 7.277.944 | - | 14,15 | 0 | 7.277.944 | - | 4,72 | | |
| 21 | 1 | 02 | 05 | 1 | 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan (%) | 60 | 26.211.102.705,00 | 50 | 4.512.195.880,00 | 5 | 4.931.219.165,00 | 1 | 830.282.915 | 20,00 | 16,84 | 51 | 5.342.478.795 | 85,00 | 20,38 | Dinas PU dan Penataan Ruang | |
| | 1 | 02 | 05 | 1 | 01 | Operasioanal Tempat pembuangan Akhir | Tersedianya Operasioanal TPA (bln) | 72 | 3.186.079.274 | 36 | 619.303.300 | 12 | 543.952.250 | 3 | 74.025.500 | 25,00 | 13,61 | 39 | 693.328.800 | 54,17 | 21,76 | | |
| | 1 | 02 | 05 | 1 | 01 | Operasional Kebersihan dan persampahan | Tersedianya Operasional tenaga Kebersihan dan persampahan (bln) | 72 | 15.998.146.631 | 36 | 2.601.651.280 | 12 | 3.019.579.465 | 3 | 611.034.715 | 25,00 | 20,24 | 39 | 3.212.685.995 | 54,17 | 20,08 | | |
| | 1 | 02 | 05 | 1 | 01 | Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan | Terpelihanya kendra kebersihan (bln) | 72 | 7.026.876.800 | 36 | 1.291.241.300 | 12 | 1.367.687.450 | 3 | 145.222.700 | 25,00 | 10,62 | 39 | 1.436.464.000 | 54,17 | 20,44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 63,30 | 25,37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | R | SR | |
| DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR | | | | | | | | 212.844.914.828 | | 42.070.150.209 | | 34.054.821.413 | | 660.482.988 | | | | | 42.730.633.197 | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya pelayanan adminstrasi perkantoran (bulan) | 72 | 4.972.542.400 | 36 | 1.449.221.243 | 12 | 563.194.601 | 0,00 | 141.861.301 | - | 25,19 | 36,00 | 1.591.082.544 | 50,00 | 32,00 | Dinas PSDA | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln) | 72 | 440.621.015 | 36 | 118.263.173 | 12 | 73.200.000 | 3,00 | 11.816.301 | 25,00 | 16,14 | 39,00 | 130.079.474 | 54,17 | 29,52 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan (bln) | 72 | 1.056.882.685 | 36 | 365.992.000 | 12 | 120.450.000 | 2,00 | 20.100.000 | 16,67 | 16,69 | 38,00 | 386.092.000 | 52,78 | 36,53 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bln) | 72 | 546.309.285 | 36 | 176.359.000 | 12 | 88.989.000 | 3,00 | 20.951.000 | 25,00 | 23,54 | 39,00 | 197.310.000 | 54,17 | 36,12 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bln) | 72 | 78.750.000 | 36 | 29.645.000 | 12 | 14.000.000 | 3,00 | 4.800.000 | 25,00 | 34,29 | 39,00 | 34.445.000 | 54,17 | 43,74 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bln) | 72 | 477.294.055 | 36 | 78.476.000 | 12 | 67.858.101 | 3,00 | 36.802.000 | 25,00 | 54,23 | 39,00 | 115.278.000 | 54,17 | 24,15 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 325.426.275 | 36 | 106.348.400 | 12 | 28.160.000 | 3,00 | 5.016.000 | 25,00 | 17,81 | 39,00 | 111.364.400 | 54,17 | 34,22 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bln) | 72 | 40.263.645 | 36 | 13.161.000 | 12 | 6.400.000 | 21,66 | 1.386.000 | 180,47 | 21,66 | 57,66 | 14.547.000 | 80,08 | 36,13 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|---|------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 80.454.940 | 36 | 24.250.000 | 12 | 14.500.000 | 3,00 | 4.860.000 | 25,00 | 33,52 | 39,00 | 29.110.000 | 54,17 | 36,18 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman (bln) | 72 | 329.402.195 | 36 | 40.975.000 | 12 | 50.122.500 | 3,00 | 4.180.000 | 25,00 | 8,34 | 39,00 | 45.155.000 | 54,17 | 13,71 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah (bln) | 72 | 957.211.170 | 36 | 288.957.420 | 12 | 26.600.000 | 3,00 | 12.800.000 | 25,00 | 48,12 | 39,00 | 301.757.420 | 54,17 | 31,52 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (bln) | 72 | 619.178.885 | 36 | 186.046.000 | 12 | 72.915.000 | 3,00 | 19.150.000 | 25,00 | 26,26 | 39,00 | 205.196.000 | 54,17 | 33,14 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | Pembinaan dan Pengelolaan Aset | Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Aset (bln) | 36 | 20.748.250 | 36 | 20.748.250 | - | 0 | 0,00 | - | - | - | 36,00 | 20.748.250 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 4.633.025.500 | 36 | 864.244.040 | | 1.549.519.812 | 3,00 | 249.313.725 | | 16,09 | 39,00 | 1.113.557.765 | 54,17 | 24,04 | Dinas PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor (paket) | 4 | 828.800.000 | 0 | - | 1 | 207.200.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 6 | 120.000.000 | 0 | - | 6 | 120.000.000 | 6,00 | 113.022.000 | 100,00 | 94,19 | 6,00 | 113.022.000 | 100,00 | 94,19 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (unit) | 19 | 477.425.500 | 12 | 339.025.500 | 7 | 138.400.000 | 0,00 | - | - | - | 12,00 | 339.025.500 | 63,16 | 71,01 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 10 | Pengadaan Meublier | Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit) | 12 | 21.800.000 | 12 | 21.800.000 | 3 | 3.600.000 | 0,00 | - | - | - | 12,00 | 21.800.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bln) | 72 | 1.140.000.000 | 36 | 263.642.400 | 12 | 345.861.312 | 3,00 | 30.380.000 | 25,00 | 8,78 | 39,00 | 294.022.400 | 54,17 | 25,79 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 1.600.000.000 | 36 | 219.341.140 | 12 | 494.458.500 | 3,00 | 98.336.725 | 25,00 | 19,89 | 39,00 | 317.677.865 | 54,17 | 19,85 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat | Tersedianya biaya pemeliharaan alat berat (bln) | 72 | 45.000.000 | 36 | 20.435.000 | 12 | 40.000.000 | 3,00 | 7.575.000 | 25,00 | 18,94 | 39,00 | 28.010.000 | 54,17 | 62,24 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | T Gedung Kantor yang direhab (pkt) | 2 | 400.000.000 | 0 | - | 1 | 200.000.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 3 | 1 | 01 | 03 | 02 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang profesional (%) | 100 | 50.000.000 | 80 | 47.365.000 | | | 0,00 | | | | 80,00 | 47.365.000 | 80,00 | 94,73 | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan (org) | 14 | 50.000.000 | 14 | 47.365.000 | - | - | 0,00 | - | - | - | 14,00 | 47.365.000 | 100,00 | 94,73 | |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Persentase drainase kondisi baik (%) | 55 | 11.900.000.000 | 45 | 2.764.079.450 | 5 | 2.770.000.000 | 4,00 | 26.230.050 | 80,00 | 0,95 | 49,00 | 2.790.309.500 | 89,09 | 23,45 | Dinas PSDA |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|----|--|--|-----|----------------|----|---------------|----|---------------|------|-----------------|------|------------|---------------|---------------------|-------|------|------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 01 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar | Tersedianya Perencanaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (Dok) | 4 | 200.000.000 | 1 | 49.588.000 | - | - | 0,00 | - | - | 1,00 | 49.588.000 | 25,00 | 24,79 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 08 | Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (paket) | 6 | 200.000.000 | 1 | 49.588.000 | 1 | 150.000.000 | 0,00 | - | - | 1,00 | 49.588.000 | 16,67 | 24,79 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 10 | Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar | Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (paket) | 140 | 11.000.000.000 | 56 | 2.586.003.950 | 16 | 2.550.000.000 | 0,00 | 25.730.050 | 1,01 | 56,00 | 2.611.734.000 | 40,00 | 23,74 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 11 | Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong | Terlaksananya Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Dokumen) | 4 | 500.000.000 | 1 | 78.899.500 | 1 | 70.000.000 | 0,00 | 500.000 | 0,71 | 1,00 | 79.399.500 | 25,00 | 15,88 | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 33 | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman | Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 35 | Kelanjutan Drainase Batang Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 36 | Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 37 | Lanjutan Pemasangan Parit Miring (Drainase) Depan Paud Kasih Bunda, Nagari Bungo Pasang Salido (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 16 | 38 | Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (Luncuran 2017) | Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | 17 | | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase kerusakan sungai yang tertangani (%) | 36 | 3.375.000.000 | 0 | 0 | 30 | 1.125.000.000 | - | 18.798.300 | - | 1,67 | 0,00 | 18.798.300 | 0 | 1 | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 17 | 03 | Pembangunan turap/ talud/ bronjong | Terlaksananya Pembangunan turap /talud/ bronjong (paket) | 20 | 3.375.000.000 | 0 | - | 8 | 1.125.000.000 | 0,00 | 18.798.300 | - | 1,67 | 0,00 | 18.798.300 | - | 0,56 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|--|-------|-----------------|-------|----------------|------|----------------|------|-----------------|-------|------------|-------|---------------------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 05 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Persentase Irigasi kondisi baik (%) | 59,72 | 160.998.356.978 | 51,64 | 24.305.515.826 | 2,63 | 24.549.878.000 | 0,00 | 85.275.312 | - | 0,35 | 51,64 | 24.390.791.138 | 86,47 | 15,15 | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 05 | Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai | Jumlah dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai (paket) | 22 | 1.538.955.750 | 9 | 512.985.250 | 5 | 308.740.000 | 0,00 | - | - | - | 9,00 | 512.985.250 | 40,91 | 33,33 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 09 | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Jumlah paket Normalisasi Saluran Sungai (paket) | 76 | 43.171.250.000 | 23 | 2.988.020.750 | 16 | 2.640.000.000 | 0,00 | 22.052.750 | - | 0,84 | 23,00 | 3.010.073.500 | 30,26 | 6,97 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara (Paket) | 204 | 37.424.500.000 | 68 | 5.731.671.500 | 16 | 2.942.400.000 | 0,00 | - | - | - | 68,00 | 5.731.671.500 | 33,33 | 15,32 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 56 | Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang dibuat (Dok) | 9 | 212.997.000 | 6 | 106.498.500 | - | - | 0,00 | - | - | - | 6,00 | 106.498.500 | 66,67 | 50,00 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 15 | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun | Jumlah optimalisasi fungsi jaringan irigasi (Paket) | 5 | 2.115.402.300 | 1 | 705.134.100 | 1 | 450.000.000 | 0,00 | - | - | - | 1,00 | 705.134.100 | 20,00 | 33,33 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 18 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK) | Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK irigasi (bln) | 36 | 150.750.000 | 0 | - | 12 | 50.250.000 | 3,00 | 1.200.000 | 25,00 | 2,39 | 3,00 | 1.200.000 | 8,33 | 0,80 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 19 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) | Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan dan direhab (Paket) | 144 | 40.715.501.928 | 48 | 13.571.833.976 | 9 | 6.980.083.000 | 0,00 | 11.131.750 | - | 0,16 | 48,00 | 13.582.965.726 | 33,33 | 33,36 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 24 | Operasional Komisi Irigasi | Terlaksananya Operasional Komisi Irigasi (bln) | 36 | 30.375.000 | 0 | - | 12 | 28.480.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | 8,33 | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 25 | Operasional Irigasi | Terlaksananya Operasional Irigasi (bulan) | 72 | 3.919.200.000 | 36 | 646.480.000 | 12 | 624.000.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 646.480.000 | 54,17 | 16,50 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 27 | Pengelolaan Aset Irigasi / Pembaruan Database Irigasi | dokumen database irigasi (Dokumen) | 5 | 250.000.000 | 1 | 42.891.750 | 1 | 94.450.000 | 0,00 | - | - | - | 1,00 | 42.891.750 | 20,00 | 17,16 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 29 | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN) | Jumlah Daerah Irigasi yang ditangani (unit DI) | 168 | 31.294.425.000 | 0 | - | 56 | 10.431.475.000 | 0,00 | 50.890.812 | - | 0,49 | 0,00 | 50.890.812 | - | 0,16 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 24 | 80 | Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenag. Sungai Tunu Kec. Rarah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Jumlah embung yang ditangani (unit) | 1 | 175.000.000 | 0 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 7 | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 07 | Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air | Volume air yang tertampung (m3) | 75 | 1.934.074.000 | 30 | 68.328.500 | 10 | 541.179.000 | 0,00 | 11.472.750 | - | 2,12 | 30,00 | 79.801.250 | 40,00 | 4,13 | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 07 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan triwulan Monitoring Pembangunan Irigasi, Sungai, Rawa dan Embung (dokumen) | 24 | 260.213.000 | 8 | 31.688.000 | 4 | 35.252.000 | 1,00 | 2.874.750 | 25,00 | 8,15 | 9,00 | 34.562.750 | 37,50 | 13,28 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 08 | Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya | Jumlah dokumen Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya (Paket) | 4 | 470.000.000 | 0 | - | 1 | 81.250.000 | 0,00 | 1.021.250 | - | 1,26 | 0,00 | 1.021.250 | - | 0,22 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 09 | Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air | laporan Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air (Laporan) | 4 | 331.611.000 | 1 | 36.640.500 | 1 | 110.537.000 | 0,00 | 4.249.750 | - | 3,84 | 1,00 | 40.890.250 | 25,00 | 12,33 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|----|---|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 10 | Laporan Pelaksanaan AMDAL | Laporan Pelaksanaan AMDAL (Laporan) | 3 | 197.250.000 | 0 | - | 1 | 65.750.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 26 | 09 | Dokumen lingkungan | Dokumen UKL-UPL (Dokumen) | 10 | 675.000.000 | 1 | - | 3 | 248.390.000 | 0,00 | 3.327.000 | - | 1,34 | 1,00 | 3.327.000 | 10,00 | 0,49 | |
| 8 | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | | Program Pengendalian Banjir | Persentase bantaran sungai dan pantai yang aman (%) | 15,29 | 28.356.915.950 | 10,01 | 12.571.396.150 | 2 | 2.920.000.000 | 0,00 | 146.329.850 | - | 5,01 | 10,01 | 12.717.726.000 | 65,47 | 44,85 | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | Jumlah Bantaran Tanggul Sungai yang dipelihara (paket) | 40 | 15.850.000.000 | 16 | 8.036.676.450 | 12 | 2.500.000.000 | 0,00 | 40.276.300 | - | 1,61 | 16,00 | 8.076.952.750 | 40,00 | 50,96 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 07 | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali | Jumlah sungai yang dikeruk / dibersihkan (lokasi) | 10 | 1.050.000.000 | 0 | - | 1 | 350.000.000 | 0,00 | 106.053.550 | - | 30,30 | 0,00 | 106.053.550 | - | 10,10 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 18 | Pembuatan Database Sungai dan Pantai | Database Sungai dan Pantai (dokumen) | 5 | 256.915.950 | 1 | 85.638.650 | 1 | 70.000.000 | 0,00 | - | - | - | 1,00 | 85.638.650 | 20,00 | 33,33 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 04 | Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir | Jumlah paket Pengeringan dan Pengurangan Banjir Pada Daerah Rawa (paket) | 46 | 11.200.000.000 | 16 | 4.449.081.050 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 16,00 | 4.449.081.050 | 34,78 | 39,72 | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 19 | Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuk Cubadak Kenag, Pelangai Kaciak Kec. Ranah Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Jumlah parit miring yang dibangun (unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 20 | Pengamanan Tebing Sungai Batang Bayang Kenag, Kubang Kec. Bayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) | Jumlah pengaman tebing sungai yang dibangun (paket) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01 | 03 | 02 | 28 | 21 | Penahanan Tebing Jembatan Gantung Muaro Bayang Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Tahun 2017) | Jumlah penahan jembatan yang dibangun (paket) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 01 | 03 | 03 | 15 | | Program Pengembangan data /informasi | Informasi pembangunan yang disampaikan ke masyarakat (%) | 100 | 36.050.000 | 80 | 0 | 10 | 36.050.000 | 0,00 | - | - | - | 80,00 | 0 | 80 | - | DINAS PSDA |
| | 1 | 01 | 03 | 03 | 15 | 11 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | tersedianya operasional aplikasi SEPAKAT PSDA (tahun) | 3 | 108.150.000 | 0 | - | 1 | 36.050.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 60,58 | 26,54 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | R | SR | | | | |
| URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | 149.421.969.086 | | 23.114.740.676 | | 32.359.826.269 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | 60 | 4.586.309.260 | 24 | 1.581.356.289 | 12 | 874.840.165 | 3,00 | 175.319.403 | 25,00 | 20,04 | 27,00 | 1.756.675.692 | 45,00 | 38,30 | Dinas PERKIMTAN |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|----|---|--|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----------------|-------|------------|-----|---------------------|-------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Air, dan Koran (Publikasi) (bulan) | 60 | 416.900.000 | 24 | 101.038.763 | 12 | 79.900.090 | 3 | 10.325.453 | 25,00 | 12,92 | 27 | 111.364.216 | 45,00 | 26,71 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan) | 60 | 1.221.600.000 | 24 | 497.650.000 | 12 | 291.100.000 | 3 | 44.600.000 | 25,00 | 15,32 | 27 | 542.250.000 | 45,00 | 44,39 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) | 60 | 403.688.800 | 24 | 151.680.800 | 12 | 62.944.908 | 3 | 14.209.550 | 25,00 | 22,57 | 27 | 165.890.350 | 45,00 | 41,09 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (bulan) | 36 | 33.000.000 | 0 | - | 12 | 5.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 60 | 153.703.600 | 24 | 61.839.400 | 12 | 43.751.971 | 3 | 15.370.300 | 25,00 | 35,13 | 27 | 77.209.700 | 45,00 | 50,23 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan dokumen (bulan) | 60 | 202.157.700 | 24 | 44.669.400 | 12 | 38.079.860 | 3 | 11.963.500 | 25,00 | 31,42 | 27 | 56.632.900 | 45,00 | 28,01 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya kompone n instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 60 | 128.959.160 | 24 | 64.479.580 | 12 | 12.840.970 | 3 | 4.032.650 | 25,00 | 31,40 | 27 | 68.512.230 | 45,00 | 53,13 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian (bulan) | 60 | 195.000.000 | 24 | 82.140.000 | 12 | 13.610.000 | 3 | 2.555.000 | 25,00 | 18,77 | 27 | 84.695.000 | 45,00 | 43,43 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan) | 60 | 787.600.000 | 24 | 410.763.546 | 12 | 67.255.000 | 3 | 11.184.950 | 25,00 | 16,63 | 27 | 421.948.496 | 45,00 | 53,57 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (bulan) | 60 | 463.700.000 | 24 | 167.094.800 | 12 | 68.425.000 | 3 | 15.095.000 | 25,00 | 22,06 | 27 | 182.189.800 | 45,00 | 39,29 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 21 | Penyediaan Jasa Pengaman Kantor | Terlaksananya pembayaran jasa pengaman kantor (bulan) | 36 | 400.000.000 | 0 | - | 12 | 132.300.000 | 3 | 20.980.000 | 25,00 | 15,86 | 3 | 20.980.000 | 8,33 | 5,25 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 01 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya penunjang operasional dan pelaporan (bulan) | 36 | 180.000.000 | 0 | - | 12 | 59.132.366 | 3 | 25.003.000 | 25,00 | 42,28 | 3 | 25.003.000 | 8,33 | 13,89 | |
| 2 | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur (bln) | 60 | 1.758.625.000 | 24 | 395.411.666 | 12 | 445.536.800 | 3 | 12.839.880 | 25,00 | 2,88 | 27 | 408.251.546 | 45,00 | 23,20 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 9 | 240.000.000 | 0 | - | 3 | 80.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan Gedung Kantor yang dibeli (unit) | 30 | 150.000.000 | | | 10 | 57.800.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Meubiler | Tersedianya Meubiler (unit) | 150 | 374.080.000 | 123 | 203.900.000 | 26 | 66.441.800 | 0 | - | - | - | 123 | 203.900.000 | 82,00 | 54,51 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharanya rumah dinas (pkt) | 3 | 450.000.000 | 0 | - | 1 | 150.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|----|---|--|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional (bulan) | 60 | 419.770.000 | 24 | 172.614.276 | 12 | 68.920.000 | 3 | 11.593.800 | 25,00 | 16,82 | 27 | 184.208.076 | 45,00 | 43,88 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan) | 60 | 125.775.000 | 24 | 18.897.390 | 12 | 22.375.000 | 3 | 1.246.080 | 25,00 | 5,57 | 27 | 20.143.470 | 45,00 | 16,02 | |
| | 3 | 1 | 01 | 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase pencapaian target Renstra (%) | 100 | 431.992.150 | 85 | 183.466.150 | 7 | 92.265.930 | 0 | 3.323.800 | - | 3,60 | 85 | 186.789.950 | 85,00 | 43,24 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 06 | 06 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Laporan triwulan hasil pengendalian dan monev (dokumen) | 20 | 314.642.150 | 8 | 146.014.750 | 4 | 62.928.430 | 1 | 2.448.800 | 25,00 | 3,89 | 9 | 148.463.550 | 45,00 | 47,18 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 06 | 09 | Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya | Dokumen sinkronisasi yang disusun (dok) | 4 | 117.350.000 | 1 | 37.451.400 | 1 | 29.337.500 | 0 | 875.000 | - | 2,98 | 1 | 38.326.400 | 25,00 | 32,66 | |
| | 4 | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan Non Status (jalan lingkungan) Terbangun (km) | 20 | 3.450.000.000 | 0 | - | 3 | 1.150.000.000 | 0 | 5.178.000 | - | 0,45 | 0 | 5.178.000 | 0,00 | 0,15 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 31 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan | Panjang jalan yang dibangun (km) | 14 | 2.850.000.000 | 0 | - | 2,5 | 950.000.000 | 0 | 3.460.250 | - | 0,36 | 0 | 3.460.250 | 0,00 | 0,12 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 32 | Pembangunan Jalan Minapolitan | Panjang jalan yang dibangun (km) | 6 | 600.000.000 | 0 | - | 0,5 | 200.000.000 | 0 | 1.717.750 | - | 0,86 | 0 | 1.717.750 | 0,00 | 0,29 | |
| | 5 | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km) | 97,17 | 82.134.600.000 | 20 | 9.184.369.800 | 18,34 | 5.940.094.677 | 0 | 16.430.100 | - | 0,28 | 20 | 9.200.799.900 | 20,58 | 11,20 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | 13 | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman | | 200 | 82.134.600.000 | 69 | 9.184.369.800 | 41 | 5.940.094.677 | 0 | 16.430.100 | - | 0,28 | 69 | 9.200.799.900 | 34,50 | 11,20 | |
| | 6 | 1 | 01 | 04 | 01 | 36 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase kebutuhan Bangunan Pemerintah yang terbangun (%) | 60 | 8.800.000.000 | 16,67 | - | 6,66 | 2.750.000.000 | 0 | 16.807.100 | - | 0,61 | 16,67 | 16.807.100 | 27,78 | 0,19 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 36 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) | 1 | 100.000.000 | - | - | 1 | 100.000.000 | 0 | 315.700 | - | 0,32 | 0 | 315.700 | 0,00 | 0,32 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 36 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dibangun (unit) | 10 | 5.400.000.000 | 0 | - | 3 | 1.800.000.000 | 0 | 15.401.500 | - | 0,86 | 0 | 15.401.500 | 0,00 | 0,29 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 36 | 05 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang direhab (unit) | 9 | 1.800.000.000 | 0 | - | 3 | 600.000.000 | 0 | 1.089.900 | - | 0,18 | 0 | 1.089.900 | 0,00 | 0,06 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 36 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor Pemerintah yang direhab (unit) | 8 | 1.500.000.000 | 0 | - | 1 | 250.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | Program Pengembangan Perumahan | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 95,3 | 35.831.042.676 | 92 | 8.562.997.571 | 2,45 | 11.643.698.716 | 0 | 478.360.000 | - | 4,11 | 92 | 9.041.357.571 | 96,54 | 25,23 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 10 | Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan | Tersedianya operasional pendataan dan perencanaan perumahan (bln) | 48 | 302.098.400 | 12 | 51.718.900 | 12 | 54.904.773 | 3 | 2.745.250 | 25,00 | 5,00 | 15 | 54.464.150 | 31,25 | 18,03 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|----|---|--|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 11 | Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS | Tersedianya operasional penunjang program perumahan BSPS (bln) | 60 | 848.816.400 | 24 | 265.053.120 | 12 | 106.058.105 | 3 | 927.750 | 25,00 | 0,87 | 27 | 265.980.870 | 45,00 | 31,34 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 17 | Rehab Rumah Tiidak Layak Huni | Jumlah RTLH yang direhab (unit) | 1500 | 19.846.674.500 | 351 | 6.591.287.151 | 300 | 6.572.000.000 | 0 | - | - | - | 351 | 6.591.287.151 | 23,40 | 33,21 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 19 | Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni | Database RTLH (dokumen) | 5 | 1.621.658.550 | 3 | 152.256.850 | 1 | 70.625.375 | 0 | 13.423.750 | - | 19,01 | 3 | 165.680.600 | 60,00 | 10,22 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 20 | Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Tersedianya biaya operasional pendampingan rehab RTLH (bln) | 36 | 747.794.826 | 0 | - | 12 | 249.264.942 | 3 | 3.568.000 | 25,00 | 1,43 | 3 | 3.568.000 | 8,33 | 0,48 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 25 | Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak | Jumlah lokasi yang ditangani (paket) | 15 | 4.000.000.000 | 8 | 1.502.681.550 | 1 | 400.000.000 | 0 | 8.612.150 | - | 2,15 | 8 | 1.511.293.700 | 53,33 | 37,78 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 26 | Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan | Tersedianya biaya operasional bantuan Rusus Nelayan (bln) | 36 | 90.000.000 | 0 | - | 12 | 29.455.056 | 3 | 15.549.250 | 25,00 | 52,79 | 3 | 15.549.250 | 8,33 | 17,28 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 27 | Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni | Laporan triwulan hasil pengendalian dan monev (dokumen) | 12 | 150.000.000 | 0 | - | 4 | 49.390.465 | 1 | 4.065.050 | 25,00 | 8,23 | 1 | 4.065.050 | 8,33 | 2,71 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | 30 | Facilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Jumlah sambungan rumah yang difasilitasi (unit SR) | 200 | 8.224.000.000 | 0 | - | 1087 | 4.112.000.000 | 0 | 429.468.800 | - | 10,44 | 0 | 429.468.800 | 0,00 | 5,22 | |
| 8 | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | 16 | Program Lingkungan sehat Perumahan | Rasio permukiman layak huni | 97,25 | 15.878.400.000 | 96 | 3.207.139.200 | 1,09 | 3.963.168.105 | 0 | 69.676.700 | - | 1,76 | 96 | 3.276.815.900 | 98,71 | 20,64 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | 08 | Pembangunan Infrastruktur Sanitasi | jumlah Tangki Septik yang dibangun (unit) | 2000 | 11.460.000.000 | 573 | 2.865.000.000 | 500 | 2.500.000.000 | 0 | - | - | - | 573 | 2.865.000.000 | 28,65 | 25,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | 21 | Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi | Tersedianya penunjang kegiatan bantuan pembangunan sanitasi (bln) | 48 | 818.400.000 | 12 | 342.139.200 | 12 | 263.168.105 | 3 | 39.673.800 | 25,00 | 15,08 | 15 | 381.813.000 | 31,25 | 46,65 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 16 | 22 | Peningkatan PSU (Prasarana dan sarana Utilitas Umum) Perumahan | Jumlah PSU Permukiman yang dibangun (paket) | 8 | 3.600.000.000 | 0 | - | 2 | 1.200.000.000 | 0 | 30.002.900 | - | 2,50 | 0 | 30.002.900 | 0,00 | 0,83 | |
| 9 | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 23 | Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman tertata (%) | 97,22 | 13.467.227.935 | 96 | - | 0,95 | 5.500.221.876 | 0 | 26.396.150 | - | 0,48 | 96 | 26.396.150 | 98,75 | 0,20 | Dinas PERKIMTAN |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 02 | Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman | Terselenggaranya koordinasi pengembangan permukiman (bln) | 36 | 148.470.000 | 0 | - | 12 | 49.490.000 | 3 | 7.483.000 | 25,00 | 15,12 | 3 | 7.483.000 | 8,33 | 5,04 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 04 | Penataan Kawasan Kumuh | Jumlah Kawasan kumuh Tertata | 6 | 8.044.395.657 | 0 | - | 2 | 2.681.465.219 | 0 | 685.800 | - | 0,03 | 0 | 685.800 | 0,00 | 0,01 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 05 | Penyusunan DED Kawasan Kumuh | Jumlah dokumen DED yang disusun (dokumen) | 15 | 2.944.875.386 | 0 | - | 5 | 1.472.437.693 | 0 | 895.600 | - | 0,06 | 0 | 895.600 | 0,00 | 0,03 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 06 | Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Tersedianya biaya operasional penunjang pembangunan kawasan permukiman (bln) | 36 | 321.217.749 | 0 | - | 12 | 107.072.583 | 3 | 12.565.400 | 25,00 | 11,74 | 3 | 12.565.400 | 8,33 | 3,91 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 08 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (dokumen) | 12 | 1.032.452.283 | 0 | - | 4 | 344.150.761 | 0 | 4.766.350 | - | 1,38 | 0 | 4.766.350 | 0,00 | 0,46 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|-------------------------------------|--|-----|----|-----|----|----|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------------|--------|-------|------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 09 | Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman | Laporan triwulan pengendalian dan monv kawasan permukiman (dokumen) | 12 | 195.316.860 | 0 | - | 4 | 65.105.620 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 01 | 23 | 10 | Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan | Jumlah Dokumen RKP yang disusun (dokumen) | 1 | 780.500.000 | 0 | - | 0 | 780.500.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,48 | 18,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| V | URUSAN KETENRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | 13.130.298.210 | | 3.915.146.974 | | 2.086.908.229 | | 395.150.376 | | | | 6.493.008.104 | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 1 | 01 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. | 72 | 5.943.002.400 | 36 | 3.027.009.505 | 3 | 1.034.573.925 | - | 181.439.234 | - | 17,54 | 36 | 3.208.448.739 | 50,00 | 53,99 | BPBD |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. | Persentase pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | 72 | 639.828.000 | 36 | 290.677.664 | 12 | 41.400.000 | 3 | 9.541.727 | 25,00 | 23,05 | 39 | 300.219.391 | 54,17 | 46,92 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 07 | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. | Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan. | 72 | 3.027.403.000 | 36 | 1.625.250.000 | 12 | 863.600.000 | 3 | 128.000.000 | 25,00 | 14,82 | 39 | 1.753.250.000 | 54,17 | 57,91 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 08 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Persentase Pelayanan Jasa Kebersihan kantor. | 72 | 66.750.600 | 36 | 25.563.050 | 12 | 3.072.200 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 25.563.050 | 54,17 | 38,30 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 09 | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Persentase pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja. | 72 | 186.895.800 | 36 | 90.484.300 | 12 | 8.200.000 | 3 | 3.790.000 | 25,00 | 46,22 | 39 | 94.274.300 | 54,17 | 50,44 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 10 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase layanan penyediaan alat tulis kantor. | 72 | 240.000.000 | 36 | 113.487.594 | 12 | 24.128.985 | 3 | 8.573.307 | 25,00 | 35,53 | 39 | 122.060.901 | 54,17 | 50,86 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 11 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Persentase pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | 72 | 210.000.000 | 36 | 92.289.600 | 12 | 17.060.505 | 3 | 5.014.200 | 25,00 | 29,39 | 39 | 97.303.800 | 54,17 | 46,34 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 12 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Persentase pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | 72 | 60.000.000 | 33 | 19.999.450 | | 2.256.200 | 3 | - | | - | 36 | 19.999.450 | 50,00 | 33,33 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 15 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Persentase pelayanan penyediaan bahan bacaan | 72 | 27.000.000 | 36 | 13.240.000 | 12 | 3.000.000 | 3 | 735.000 | 25,00 | 24,50 | 39 | 13.975.000 | 54,17 | 51,76 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 17 | | Penyediaan makanan dan minuman | Persentase pelayanan makanan dan minuman kantor. | 72 | 70.625.000 | 36 | 28.620.000 | 12 | 5.110.000 | 3 | 5.110.000 | 25,00 | 100,00 | 39 | 33.730.000 | 54,17 | 47,76 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 18 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Persentase pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. | 72 | 1.045.000.000 | 36 | 551.082.847 | 12 | 25.171.035 | 3 | 11.275.000 | 25,00 | 44,79 | 39 | 562.357.847 | 54,17 | 53,81 | |
| | 1 | 01 | 1 | 01 | 20 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. | 72 | 369.500.000 | 36 | 176.315.000 | 12 | 41.575.000 | 3 | 9.400.000 | 25,00 | 22,61 | 39 | 185.715.000 | 54,17 | 50,26 | |
| 2 | 1 | 01 | 1 | 02 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur. | 72 | 1.377.553.140 | 36 | 603.303.161 | 12 | 167.899.031 | - | 40.381.052 | - | 24,05 | 36 | 643.684.213 | 50,00 | 46,73 | BPBD |
| | 1 | 01 | 1 | 02 | 24 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua dalam pemeliharaan berkala. | 72 | 952.711.140 | 36 | 500.201.161 | 12 | 54.140.000 | 3 | 10.000.000 | 25,00 | 18,47 | 39 | 510.201.161 | 54,17 | 53,55 | BPBD |
| | 1 | 01 | 1 | 02 | 25 | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Persentase terpeliharanya Gedung kantor. | 72 | 424.842.000 | 36 | 103.102.000 | 12 | 113.759.031 | 3,00 | 30.381.052 | 25,00 | 26,71 | 39,00 | 133.483.052 | 54 | 31,42 | |
| 3 | 2 | 00 | 02 | 15 | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase Meningkatnya pengetahuan kebencanaan masyarakat melalui promosi | 100 | 95.000.000 | 50 | 49.274.754 | 17 | 14.096.800 | 0 | - | - | - | 50 | 49.274.754 | 50,00 | 51,87 | BPBD |
| | 2 | 00 | 02 | 15 | 10 | | Pelaksanaan Festival Langkisau | jumlah event yang diikuti | 5 | 95.000.000 | 2 | 49.274.754 | 1 | 14.096.800 | - | - | - | - | 2 | 49.274.754 | 40,00 | 51,87 | |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 23 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina margaan (%) | Berfungsinya sarana-prasarana kebencanaan (%) | 100 | 571.800.000 | 29 | 138.658.300 | 17 | 44.144.850 | - | 7.000.000 | - | 15,86 | 29,00 | 145.658.300 | 29,00 | 25,47 | BPBD |
| | 1 | 01 | 03 | 23 | 20 | | Operasional dan Pemeliharaan alat-alat berat. | Tertelaksananya operasional dan pemeliharaan alat-alat berat (h/n) | 60 | 571.800.000 | 64,22665198 | 138.658.300 | 12 | 44.144.850 | 16 | 7.000.000 | 132,50 | 15,86 | 80,13 | 145.658.300 | 133,54 | 25,47 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|----|----|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--|
| | K | Rp. | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 5 | 1 | 01 | 05 | 23 | | Program Kesiapsiagaan | Persentase masyarakat yang siap siaga menghadapi bencana | 100 | 717.375.320 | 80 | 277.702.670 | 20 | 75.058.000 | - | 4.000.000 | - | 5,33 | 80,5 | 281.702.670 | 80,50 | 39,27 | BPBD | |
| | 1 | 01 | 05 | 23 | 13 | Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana | Jumlah event jambore yang diikuti (kegiatan) | 5 | 717.375.320 | 2 | 277.702.670 | 1 | 75.058.000 | 5,30 | 4.000.000 | 530,00 | 5,33 | 7,3 | 281.702.670 | 146,00 | 39,27 | | |
| 4 | 1 | 01 | 05 | 26 | | Program Penanganan Tanggap Darurat | Persentase Penanganan Bencana Tanggap Darurat. | 100 | 2.164.210.800 | 50 | 1.156.449.768 | 17 | 595.001.229 | - | 96.519.340 | - | 16,22 | 50 | 1.252.969.108 | 50,00 | 57,89 | BPBD | |
| | 1 | 01 | 05 | 26 | 02 | Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) | Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (bln) | 60 | 1.205.008.500 | 24 | 938.788.384 | 12 | 310.303.850 | 15 | 48.399.340 | 125,00 | 15,60 | 39 | 987.187.724 | 65,00 | 81,92 | | |
| | 1 | 01 | 05 | 26 | 03 | Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik | Terlaksananya operasional logistik dan perlengkapan gudang logistik (bln) | 60 | 959.202.300 | 44 | 217.661.384 | 12 | 36.537.379 | 20 | 7.200.000 | 166,67 | 19,71 | 64,38 | 224.861.384 | 107,30 | 23,44 | | |
| | | | | | | Operasional Posko Picket Satgas SAR | | | | | | 248.160.000 | | 40.920.000 | | 16,49 | | | | | | | |
| 5 | 1 | 01 | 05 | 27 | | Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana | Persentase kejadian bencana yang terdata | 80 | 1.229.144.600 | 70 | 315.707.860 | 10 | 75.074.320 | 0,00 | 10.305.000 | - | 13,73 | 70 | 326.012.860 | 87,50 | 26,52 | BPBD | |
| | 1 | 01 | 05 | 27 | 01 | Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian | Jumlah data dan laporan triwulan yang dihasilkan (dokumen) | 20 | 564.113.600 | 32 | 162.178.809 | 4 | 44.127.000 | 18 | 7.805.000 | 450,00 | 17,69 | 50 | 169.983.809 | 247,97 | 30,13 | | |
| | 1 | 01 | 05 | 27 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan | Jumlah laporan hasin monitoring dan evaluasi triwulanan (dok) | 20 | 665.031.000 | 31 | 153.529.051 | 4 | 30.947.320 | 8,08 | 2.500.000 | 201,95 | 8,08 | 39 | 156.029.051 | 197,30 | 23,46 | | |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 28 | | Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Persentase perangkat daerah yang memahami tupoksi dalam pengurangan bencana (%) | 90 | 1.457.053.950 | 65 | 529.751.710 | 15 | 81.060.074 | 10 | 55.505.750 | 67,53 | 68,47 | 75 | 585.257.460 | 83,48 | 40,17 | BPBD | |
| | 1 | 01 | 05 | 28 | 07 | Operasional dan Perawatan Pusedalitn | berfungsinya Early Warning System (EWS) (bln) | 60 | 1.457.053.950 | 24 | 529.751.710 | 12 | 81.060.074 | 10 | 55.505.750 | 84,42 | 68,47 | 34 | 585.257.460 | 56,88 | 40,17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 60,06 | 42,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | R | SR | |
| DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | 35.567.131.837 | | 10.117.152.650 | | 4.113.891.148 | | 643.060.255 | | | | 10.760.212.905 | | | | | |
| 1 | | | | | | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran (bln) | 60 | 8.758.102.520 | 24 | 3.172.840.018 | 12 | 1.302.747.648 | 3 | 249.915.805 | 25,00 | 19,18 | 27 | 3.422.755.823 | 45,00 | 39,08 | Dinas Satpol PP | |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rek. Listrik, Telp, air untuk (bln) | 60 | 445.460.000 | 24 | 165.070.343 | 12 | 69.500.000 | 3 | 6.104.072 | 25,00 | 8,78 | 27 | 171.174.415 | 45,00 | 38,43 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Penatausahaan keuangan (bln) | 60 | 269.000.000 | 24 | 136.250.000 | 12 | 88.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 27 | 136.250.000 | 45,00 | 50,65 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | tersedianya kebersihan kantor (bln) | 60 | 292.040.600 | 24 | 105.306.400 | 12 | 80.757.500 | 3 | 14.632.500 | 25,00 | 18,12 | 27 | 119.938.900 | 45,00 | 41,07 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | tersedianya jasa service peralatan (bln) | 60 | 63.950.000 | 24 | 21.680.000 | 12 | 12.600.000 | 3 | 2.250.000 | 25,00 | 17,86 | 27 | 23.930.000 | 45,00 | 37,42 | | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor (bln) | 60 | 168.466.123 | 24 | 74.970.625 | 12 | 89.329.548 | 3 | 33.975.733 | 25,00 | 38,03 | 27 | 108.946.358 | 45,00 | 64,67 | | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 60 | 239.109.217 | 24 | 90.420.740 | 12 | 59.618.600 | 3 | 4.650.000 | 25,00 | 7,80 | 27 | 95.070.740 | 45,00 | 39,76 | | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | tersedianya alat listrik dan elektronik (bln) | 60 | 96.999.000 | 24 | 31.435.200 | 12 | 12.922.000 | 3 | 4.273.500 | 25,00 | 33,07 | 27 | 35.708.700 | 45,00 | 36,81 | | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya laptop, AC dan printer (paket) | 10 | 0 | 0 | 5 | 51.900.000 | 1 | 20,00 | - | 1 | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedia surat kabar untuk (bln) | 60 | 77.200.500 | 24 | 33.395.000 | 12 | 9.680.000 | 3 | 660.000 | 25,00 | 6,82 | 27 | 34.055.000 | 45,00 | 44,11 | | |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | makanan dan minuman harian, rapat, tamu (bln) | 60 | 196.050.000 | 24 | 71.109.800 | 12 | 53.950.000 | 3 | 3.375.000 | 25,00 | 6,26 | 27 | 74.484.800 | 45,00 | 37,99 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Operasional PAM Balimau Paga | Terlaksananya pengamanan Balimau Paga (keg) | 5 | 306.362.250 | 1 | 71.396.009 | 1 | - | - | - | - | 1 | 71.396.009 | 20,00 | 23,30 | | |
| | | | | | | Operasional Pengamanan Festival Langkisau | Terlaksananya pengamanan festival langkisau (keg) | 5 | 1.503.226.000 | 1 | 91.558.120 | 1 | - | - | - | - | 1 | 91.558.120 | 20,00 | 6,09 | | |
| | | | | | | Operasional Pengamanan Tour The Singkarak | Terlaksananya pengamanan TDS (keg) | 2 | 871.515.195 | 1 | 251.474.395 | 1 | - | - | - | - | 1 | 251.474.395 | 50,00 | 28,85 | | |
| | | | | | | Operasional PAM Lebaran | Terlaksananya pengamanan lebaran (keg) | 5 | 1.208.217.560 | 1 | 163.336.540 | 1 | - | - | - | - | 1 | 163.336.540 | 20,00 | 13,52 | | |
| 7 | | | | | | Program Penanganan Tanggap Darurat | Persentase kejadian bencana diatasi (%) | 80 | 14.199.887.056 | 70 | 3.603.325.478 | 10 | 1.394.241.000 | 2 | 300.930.000 | 20,00 | 21,58 | 72 | 3.904.255.478 | 90,00 | 27,49 | Dinas Satpol PP |
| | | | | | | Operasional Pemadam Kebakaran | Terbayarnya honorarium dan operasional satgas damkar (bln) | 60 | 14.199.887.056 | 24 | 3.603.325.478 | 12 | 1.394.241.000 | 3 | 300.930.000 | 25,00 | 21,58 | 27 | 3.904.255.478 | 45,00 | 27,49 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,18 | 35,42 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | | |
| URUSAN SOSIAL | | | | | | | | 6.378.142.970 | | 2.966.945.558 | | 2.303.939.679 | | 178.549.474 | | | 3.145.495.032 | | | | | |
| 1 | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | 72 | 1.017.035.864 | 36 | 504.664.001 | 12 | 466.169.589 | 3 | 54.860.210 | 25,00 | 11,77 | 39 | 559.524.211 | 54,17 | 55,02 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan terhadap telepon, air dan listrik (bln) | 72 | 51.240.000 | 36 | 21.766.069 | 12 | 29.400.000 | 3 | 6.989.210 | 25,00 | 23,77 | 39 | 28.755.279 | 54,17 | 56,12 | |
| | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi dan laporan keuangan (bln) | 72 | 114.090.800 | 36 | 57.045.400 | 12 | 99.214.970 | 3 | 7.000.000 | 25,00 | 7,06 | 39 | 64.045.400 | 54,17 | 56,14 | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya biaya kebersihan kantor, penjaga kantor, petugas kebersihan, pramu kantor dan sopir (bln) | 72 | 287.004.420 | 36 | 143.502.210 | 12 | 84.974.028 | 3 | 14.802.000 | 25,00 | 17,42 | 39 | 158.304.210 | 54,17 | 55,16 | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya operasional administrasi kantor (bln) | 72 | 35.764.000 | 36 | 17.882.000 | 12 | 39.946.065 | 3 | 6.405.000 | 25,00 | 16,03 | 39 | 24.287.000 | 54,17 | 67,91 | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan percetakan kantor (bln) | 72 | 42.369.852 | 36 | 21.184.926 | 12 | 30.999.895 | 3 | 268.000 | 25,00 | 0,86 | 39 | 21.452.926 | 54,17 | 50,63 | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor (bln) | 72 | 8.318.000 | 36 | 4.159.000 | 12 | 4.499.631 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 4.159.000 | 54,17 | 50,00 | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya kebutuhan terhadap informasi (bln) | 72 | 13.640.000 | 36 | 6.820.000 | 12 | 7.680.000 | 3 | 480.000 | 25,00 | 6,25 | 39,00 | 7.300.000 | 54,17 | 53,52 | |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, tamu (bln) | 72 | 25.929.000 | 36 | 12.964.500 | 12 | 36.480.000 | 3 | 3.041.000 | 25,00 | 8,34 | 39,00 | 16.005.500 | 54,17 | 61,73 | |
| | | | | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat dalam provinsi dan luar provinsi (bln) | 72 | 308.579.792 | 36 | 154.289.896 | 12 | 75.600.000 | 3 | 4.400.000 | 25,00 | 5,82 | 39,00 | 158.689.896 | 54,17 | 51,43 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|--|---|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya rapat-rapat dalam daerah (bln) | 72 | 130.100.000 | 36 | 65.050.000 | 12 | 57.375.000 | 3 | 11.475.000 | 25,00 | 20,00 | 39,00 | 76.525.000 | 54,17 | 58,82 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor (bln) | 72 | 724.971.852 | 36 | 344.485.926 | 12 | 358.140.000 | 3 | 55.202.014 | 25,00 | 15,41 | 39,00 | 399.687.940 | 54,17 | 55,13 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (bln) | 72 | 117.130.092 | 36 | 58.565.046 | 12 | 9.350.000 | 3 | 9.024.090 | 25,00 | 96,51 | 39,00 | 67.589.136 | 54,17 | 57,70 | |
| | | | | | | Pengadaan Meubiler | Terpenuhinya kebutuhan meubiler kantor (bln) | 72 | 20.750.000 | 36 | 10.375.000 | 12 | 7.450.000 | 3 | 7.000.000 | 25,00 | 93,96 | 39,00 | 17.375.000 | 54,17 | 83,73 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | 72 | 270.870.000 | 36 | 135.435.000 | 12 | 40.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39,00 | 135.435.000 | 54,17 | 50,00 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Terseadinya kendaraan dinas (bln) | 72 | 238.986.160 | 36 | 119.493.080 | 12 | 251.340.000 | 3 | 36.977.924 | 25,00 | 14,71 | 39,00 | 156.471.004 | 54,17 | 65,47 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (bln) | 72 | 11.800.000 | 36 | 5.900.000 | 12 | 14.000.000 | 3 | 2.200.000 | 25,00 | 15,71 | 39,00 | 8.100.000 | 54,17 | 68,64 | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Sepeda motor (unit) | 2 | 36.000.000 | 0 | 0 | 2 | 36.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Pelaksanaan Festival Langkisau | Keikutsertaan pada festival Langkisau (kegiatan) | 6 | 29.435.600 | 3 | 14.717.800 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3,00 | 14.717.800 | 50,00 | 50,00 | |
| 3 | | | | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) | 80 | 708.056.540 | 70 | 347.834.220 | 5 | 271.106.400 | 0,00 | 20.312.150 | - | 7,49 | 70,00 | 368.146.370 | 87,50 | 51,99 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Operasional penanganan bencana (bln) | 72 | 459.588.040 | 36 | 229.794.020 | 12 | 133.200.000 | 3,00 | 6.558.700 | 25,00 | 4,92 | 39,00 | 236.352.720 | 54,17 | 51,43 | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (RASKIN) | Laporan triwulan Hasil monnev beras Raskin (dok) | 16 | 128.468.500 | 4 | 64.234.250 | 4 | 52.459.600 | 1,00 | 7.107.000 | 25,00 | 13,55 | 5,00 | 71.341.250 | 31,25 | 55,53 | |
| | | | | | | Pendampingan Bantuan KUBE Fakir Miskin | Jumlah KUBE Fakir Miskin yang dibina | 12 | 120.000.000 | 2 | 53.805.950 | 2 | 85.446.800 | 1 | 6.646.450 | 50,00 | 7,78 | 3,00 | 60.452.400 | 25,00 | 50,38 | |
| 4 | | | | | | Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | PMKS yang memperoleh bantuan (jiwa) | 25.850 | 2.724.007.514 | 18.950 | 1.129.971.943 | 1.700 | 885.042.690 | 300,00 | 33.554.200 | 17,65 | 3,79 | 19.250,00 | 1.163.526.143 | 74,47 | 42,71 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) | biaya operasional penyaluran PKH (bln) | 72 | 120.446.986 | 36 | 60.223.493 | 12 | 72.783.190 | 3 | 23.389.250 | 25,00 | 32,14 | 39,00 | 83.612.743 | 54,17 | 69,42 | |
| | | | | | | Pelayanan orang terlanjar diperjalanan | Biaya operasional penanganan orang terlanjar / ODGJ (bln) | 30 | 300.730.000 | 9 | 44.922.300 | 12 | 150.365.000 | 3 | 4.031.700 | 25,00 | 2,68 | 12,00 | 48.954.000 | 40,00 | 16,28 | |
| | | | | | | Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD | Laporan Validasi data PBI APBD (dok) | 6 | 100.000.000 | 3 | 4.989.750 | 1 | 23.812.000 | 0 | 4.670.750 | - | 19,62 | 3,00 | 9.660.500 | 50,00 | 9,66 | |
| | | | | | | Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan | biaya operasional SLRT Kab. Pesisir Selatan (bln) | 60 | 1.725.210.000 | 24 | 575.070.000 | 12 | 575.070.000 | 3 | 1.462.500 | 25,00 | 0,25 | 27,00 | 576.532.500 | 45,00 | 33,42 | |
| | | | | | | Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu | laporan / dokumen Verifali BDT (dok) | 6 | 477.620.528 | 3 | 444.766.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3,00 | 444.766.400 | 50,00 | 93,12 | |
| | | | | | | Pembentukan kampung Siaga Bencana | Jumlah kampung siaga bencana terbentuk (unit) | 50 | 189.037.500 | 0 | 0 | 15 | 63.012.500 | 0 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|--|---|--|--|--|--|---|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|------|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 5 | | | | | | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Cakupan penyandang cacat berat yang memperoleh jaminan sosial (%) | 90 | 272.580.000 | 68 | 77.291.400 | 86 | 90.860.000 | 0,00 | - | - | - | 68,00 | 77.291.400 | 75,56 | 28,36 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat | Jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan (org) | 250 | 272.580.000 | 68 | 53.884.600 | 86 | 90.860.000 | 0,00 | 1.254.500 | - | 1,38 | 68,00 | 55.139.100 | 27,20 | 20,23 | |
| 6 | | | | | | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Jumlah anak panti yang mendapat pelayanan sosial (jiwa) | 180 | 283.491.200 | 180 | 283.491.200 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 180,00 | 283.491.200 | 100,00 | 100,00 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Sembako Anak Dalam Panti | Jumlah anak panti yang dibantu sembako (org) | 180 | 800.000.000 | 180 | 283.491.200 | | | 0,00 | - | - | - | 180,00 | 283.491.200 | 100,00 | 35,44 | |
| 7 | | | | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah LKKS dan TKS yang meningkatkan kinerjanya (unit) | 148 | 350.000.000 | 133 | 147.038.368 | 5 | 123.111.800 | 0,00 | 10.777.400 | - | 8,75 | 133,00 | 157.815.768 | 89,86 | 45,09 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Penugatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan | Jumlah LKKS dan TKS yang dibina (unit) | 148 | 350.000.000 | 94 | 147.038.368 | 16 | 123.111.800 | 0,00 | 10.777.400 | - | 8,75 | 94,00 | 157.815.768 | 63,51 | 45,09 | |
| 8 | | | | | | Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan | Jumlah generasi muda yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (orang) | 600 | 270.000.000 | 300 | 110.212.000 | 100 | 109.509.200 | 0,00 | 3.843.500 | - | 3,51 | 300,00 | 114.055.500 | 50,00 | 42,24 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan (org) | 600 | 120.000.000 | 300 | 31.673.100 | 50 | 30.159.800 | 0,00 | 678.000 | - | 2,25 | 300,00 | 32.351.100 | 50,00 | 26,96 | |
| | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan keperintisan | Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan TMP Sago dan MPN Ilyas Yacub (bln) | 72 | 150.000.000 | 36 | 78.538.900 | 12 | 79.349.400 | 3,00 | 3.165.500 | 25,00 | 3,99 | 39,00 | 81.704.400 | 54,17 | 54,47 | |
| 9 | | | | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Terlaksananya promosi wisata (Kegiatan) | 6 | 28.000.000 | 3 | 21.956.500 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 3,00 | 21.956.500 | 50,00 | 78,42 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | Pelaksanaan Festival Langkisau | Jumlah kepestaan dalam festival Langkisau (Keg) | 6 | 28.000.000 | 3 | 21.956.500 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 3,00 | 21.956.500 | 50,00 | 78,42 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,64 | 55,44 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | R | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 4.149.928.641 | 36 | 1.923.715.205 | 12 | 643.847.800 | 3 | 37.970.600 | 25,00 | 5,90 | 39 | 1.961.685.805 | 54,17 | 47,27 | Dinas Nakertran |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya biaya jasa telepon dan listrik (bln) | 72 | 281.676.000 | 36 | 146.113.050 | 12 | 39.600.000 | 3 | 4.975.600 | 25,00 | 12,56 | 39 | 151.088.650 | 54,17 | 53,64 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan. (bln) | 72 | 480.168.540 | 36 | 200.421.100 | 12 | 149.650.000 | 3 | 16.500.000 | 25,00 | 11,03 | 39 | 216.921.100 | 54,17 | 45,18 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor (bln) | 72 | 1.024.028.824 | 36 | 435.042.750 | 12 | 120.175.700 | 3 | 16.000.000 | 25,00 | 13,31 | 39 | 451.042.750 | 54,17 | 44,05 | |
| | | | | | | Penyediaan alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (bln). | 72 | 222.114.913 | 36 | 104.745.700 | 12 | 35.443.705 | 3 | 495.000 | 25,00 | 1,40 | 39 | 105.240.700 | 54,17 | 47,38 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|-----|---------------|----|---------------|----|-------------|---|-----------|-----------------|------|------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan. | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan (bln). | 72 | 168.834.688 | 36 | 85.655.300 | 12 | 27.192.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 85.655.300 | 50,00 | 50,73 | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bln). | 72 | 101.626.351 | 36 | 37.580.000 | 12 | 17.311.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 37.580.000 | 50,00 | 36,98 | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar (bln). | 72 | 74.939.200 | 36 | 24.495.000 | 12 | 12.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 24.495.000 | 50,00 | 32,69 | |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor (bln). | 72 | 184.488.800 | 36 | 68.667.500 | 12 | 42.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 68.667.500 | 50,00 | 37,22 | |
| | | | | | | Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Adanya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam propinsi maupun luar propinsi (bln). | 72 | 748.497.500 | 36 | 384.634.380 | 12 | 58.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 384.634.380 | 50,00 | 51,39 | |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Renstra Dinas Nakertrans (dok) | 1 | 50.873.070 | 24 | 50.873.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24 | 50.873.070 | 2400,00 | 100,00 | |
| | | | | | | Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Adanya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi se kecamatan dalam kabupaten (bln). | 72 | 532.365.000 | 36 | 260.975.000 | 12 | 99.975.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 260.975.000 | 50,00 | 49,02 | |
| | | | | | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan | Laporan triwulan pelaksanaan Monev (dok) | 72 | 280.315.755 | 27 | 59.882.445 | 12 | 41.400.195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 59.882.445 | 37,50 | 42,95 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan sarpras penunjang kerja (Bln) | 72 | 3.247.183.616 | 36 | 2.052.635.300 | 12 | 680.540.000 | 3 | 1.145.000 | 25,00 | 0,17 | 39 | 2.053.780.300 | 54,17 | 63,25 | Dinas Nakertran |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. | Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional yang layak dan siap pakai (bln). | 72 | 732.991.008 | 36 | 509.641.800 | 12 | 128.000.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 39 | 509.641.800 | 54,17 | 69,53 | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kantor (bln). | 72 | 732.991.008 | 36 | 393.139.800 | 12 | 44.700.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 39 | 393.139.800 | 54,17 | 53,64 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor. | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung dan halaman kantor (bln). | 72 | 136.499.400 | 27 | 50.760.000 | 12 | 25.740.000 | 3 | 1.145.000 | 25,00 | 4,45 | 27 | 51.905.000 | 37,50 | 38,03 | |
| | | | | | | Pengadaan Mobiler | Tersedianya mobiler kantor (bln). | 27 | 127.105.000 | 27 | 127.105.000 | - | - | 0 | 0 | | | 27 | 127.105.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (bln). | 72 | 796.867.700 | 36 | 298.629.300 | 12 | 482.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36 | 298.629.300 | 50,00 | 37,48 | |
| | | | | | | Rehab sedang/ berat gedung kantor | Terlaksananya rehab sedang/ berat sarana dan prasarana BLK | 12 | 720.729.500 | 24 | 673.359.400 | 12 | - | 3 | 0 | 25,00 | | 27 | 673.359.400 | 225,00 | 93,43 | |
| 3 | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang berkompeten (%) | 100 | 260.500.000 | 80 | 95.000.000 | - | - | 0 | 0 | | | 80 | 95.000.000 | 80,00 | 36,47 | Dinas Nakertran |
| | | | | | | Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan. | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan (org) | 30 | 260.500.000 | 24 | 95.000.000 | - | - | 0 | 0 | | | 24 | 95.000.000 | 80,00 | 36,47 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|------|-------------------|-----------------|------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| 4 | | | | | | Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (%) | 9 | 8.778.171.317,00 | 7,5 | 1.413.846.905,00 | 0,5 | 419.212.000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1.413.846.905 | 83,33 | 16,11 | Dinas Nakertran |
| | | | | | | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. | Jumlah peserta pelatihan (org) | 60 | 8.570.504.825 | 32 | 1.391.375.906 | 10 | 363.261.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32 | 1.391.375.906 | 53,33 | 16,23 | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan peralatan Workshop BLK Painan | jumlah peralatan workshop yang dipelihara (unit) | 54 | 22.470.999 | 54 | 22.470.999 | - | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 22.470.999 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK | Jumlah SDM tenaga instruktur pelatih, pembinaan LPKS dan akreditasi kejuruan (org) | 16 | 102.445.493,00 | - | - | 8 | 30.950.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK | Terpeliharanya BLK (bln) | 36 | 82.750.000 | 0 | 0 | 12 | 25.000.000 | 3 | 0 | 25,00 | 0,00 | 3 | 0 | 8,33 | 0,00 | | |
| 5 | | | | | | Program peningkatan kesempatan kerja | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) | 63 | 336.322.000,00 | 61,41 | 320.963.350,00 | 62,12 | 152.900.000 | 3 | 5.000.000 | 4,83 | 3,27 | 64 | 325.963.350 | 102,24 | 96,92 | Dinas Nakertran | |
| | | | | | | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja. | Publikasi yang dilaksanakan (bln) | 72 | 269.286.900 | 36 | 253.928.250 | 12 | 152.900.000 | 3 | 5.000.000 | 25,00 | 3,27 | 39 | 258.928.250 | 54,167 | 96,153 | | |
| | | | | | | Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) | Buku PTKD (dok) | 1 | 67.035.100 | 1 | 67.035.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.035.100 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 6 | | | | | | Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Angka sengketa pekerja dan pengusaha per tahun | 2 | 462.899.685,00 | 2 | 165.915.500,00 | 0 | 43.900.000 | - | 1.000.000 | 2,28 | 2 | 166.915.500 | 100,0 | 36,1 | Dinas Nakertran | | |
| | | | | | | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. | pengawasan yang dilaksanakan (bln) | 72 | 416.899.685 | 36 | 119.915.500 | 12 | 43.900.000 | 3 | 1.000.000 | 25,00 | 2,28 | 39 | 120.915.500 | 54,2 | 29,0 | | |
| | | | | | | Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial | Pembinaan yang dilaksanakan (bln) | 72 | 46.000.000 | 24 | 46.000.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 46.000.000 | 33,3 | 100,0 | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,98 | 49,35 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | | |
| II | | | | | | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 2.705.362.523 | | 500.304.774 | | 616.405.108 | | 26.483.300 | | | | 526.788.074 | | | | |
| 1 | | | | | | Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringannya dan Penyusunan Regulasi Daerah | Perentase kelembagaan daerah yang responsif gender (%) | 80 | 389.853.741 | 60 | 163.064.617 | 5 | 164.210.200 | 1,00 | 8.576.050 | 20,00 | 5,22 | 6100,00% | 171.640.667 | 76,25 | 44,03 | Dinas Sosial, PP dan PA | |
| | | | | | | Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah | Jumlah kecamatan yang tersentuh perlindungan | 15 | 86.422.800 | 2 | 61.920.970,000 | 13 | 28.807.600 | 0 | 847.700 | - | 2,94 | 0 | 62.768.670 | 0,00 | 72,63 | | |
| | | | | | | Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak | Jumlah lembaga PUG yang dibina (unit) | 100 | 233.770.101 | 29 | 77.923.367,000 | 8 | 102.059.500 | 7,00 | 6.728.350 | 87,50 | 6,59 | 36 | 84.651.717 | 36,00 | 36,21 | | |
| | | | | | | Penyusunan Anggaran Responsif Gender | Jumlah OPD yang menerapkan anggaran responsif gender | 45 | 69.660.840 | 20 | 23.220.280,000 | 10 | 33.343.100 | 0,00 | 1.000.000 | - | 3,00 | 20,00 | 24.220.280 | 44,44 | 34,77 | | |
| 2 | | | | | | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (%) | 100 | 1.486.481.200 | 16,67 | 91.428.500,000 | 16,66 | 310.111.709 | 7 | 6.462.150 | 42,02 | 2,08 | 23,67 | 97.890.650 | 23,67 | 6,59 | Dinas Sosial, PP dan PA | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) | Tersedianya biaya operasional P2TP2A (bln) | 72 | 275.000.000 | 36 | 60.803.500,0 | 12 | 107.310.000 | 3,00 | 4.689.450 | 25,00 | 4,37 | 39,00 | 65.492.950 | 54,17 | 23,82 | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|-----|---|----|----|----|----|----|--|---|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Buku profil Gender (dok) | 4 | 192.500.000 | 1 | 30.625.000 | 1 | 32.971.509 | 0,00 | 1.772.700 | - | 5,38 | 1,00 | 32.397.700 | 25,00 | 16,83 | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten | Tersedianya dana pembinaan GOW (bln) | 72 | 323.445.600 | 36 | 161.722.800 | 12 | 53.907.600 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | | 54,17 | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten | Tersedianya dana pembinaan BKMT (bln) | 72 | 365.385.600 | 36 | 182.692.800 | 12 | 60.897.600 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten | Tersedianya dana pembinaan Dharmawanita Persatuan (bln) | 72 | 330.150.000 | 36 | 165.075.000 | 12 | 55.025.000 | - | - | - | - | | | | | |
| 3 | | | | | | | Program Perlindungan anak | Persentase penurunan kasus kekerasan anak (%) | 15 | 250.000.000 | 10 | 149.307.060.000 | 2 | 109.915.000 | 0,00 | 11.445.100 | - | 10,41 | 8,00 | 160.752.160 | 53,33 | 64,30 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | | Pembinaan Nagari Layak Anak | Jumlah Nagari yang mendapat program perlindungan anak | 15 | 250.000.000 | 3 | 71.779.492.000 | 3 | 109.915.000 | 0,00 | 5.156.250 | - | 4,69 | 3,00 | 76.935.742 | 20,00 | 30,77 | |
| 4 | | | | | | | Program Pengembangan Data Informasi | Persentase pelaksanaan pembangunan yang dipublikasikan (%) | 100 | 579.027.582 | 75 | 96.504.597 | 15 | 32.168.199 | - | - | - | - | 75,00 | 96.504.597 | 75,00 | 16,67 | Dinas Sosial, PP dan PA |
| | | | | | | | Penyerbuasan Informasi Pembangunan | Jumlah publikasi di media massa | 12 | 579.027.582 | 2 | 96.504.597 | 1 | 32.168.199 | 0,00 | - | - | - | 2,00 | 96.504.597 | 16,67 | 16,67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | 57,06 | 32,89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | R | SR | |
| III | | | | | | | URUSAN PANGAN | | 9.774.151.040 | | 3.718.420.784 | | 2.350.139.503 | | 231.913.451 | | | | 3.950.334.235 | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 720.000.000 | 36 | 451.143.502 | 12 | 488.961.876 | 3 | 87.246.527 | 25,00 | 17,84 | 39 | 538.390.029 | 25,00 | 74,78 | Dinas Pangan |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telpon dan faks(bulan) | 72 | 90.000.000 | 36 | 58.509.350 | 12 | 49.920.000 | 3 | 10.750.327 | 25,00 | 21,54 | 39 | 69.259.677 | 54,17 | 76,96 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan (bulan) | 72 | 80.000.000 | 36 | 51.500.000 | 12 | 174.050.000 | 3 | 24.600.000 | 25,00 | 14,13 | 39 | 76.100.000 | 54,17 | 95,13 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 50.000.000 | 36 | 36.563.000 | 12 | 42.134.118 | 3 | 17.798.500 | 25,00 | 42,24 | 39 | 54.361.500 | 54,17 | 108,72 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 72 | 60.000.000 | 36 | 30.392.000 | 12 | 31.552.500 | 3 | 6.044.800 | 25,00 | 19,16 | 39 | 36.436.800 | 54,17 | 60,73 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (bulan) | 72 | 10.000.000 | 36 | 3.112.500 | 12 | 5.999.278 | 3 | 1.788.000 | 25,00 | 29,80 | 39 | 4.900.500 | 54,17 | 49,01 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor (bulan) | 72 | 80.000.000 | 36 | 43.175.500 | 12 | 17.995.980 | 3 | 4.609.500 | 25,00 | 25,61 | 39 | 47.785.000 | 54,17 | 59,73 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan) | 72 | 10.000.000 | 36 | 8.435.000 | 12 | 4.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 8.435.000 | 54,17 | 84,35 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|----|----|----|--|--|-------|---------------|-------|-------------|----|-------------|---|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|--------------|
| | K | Rp. | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman (bulan) | 72 | 25.000.000 | 36 | 19.387.500 | 12 | 15.510.000 | 3 | 3.205.400 | 25,00 | 20,67 | 39 | 22.592.900 | 54,17 | 90,37 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan) | 72 | 180.000.000 | 36 | 124.083.652 | 12 | 69.350.000 | 3 | 5.175.000 | 25,00 | 7,46 | 39 | 129.258.652 | 54,17 | 71,81 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (bulan) | 72 | 135.000.000 | 36 | 75.985.000 | 12 | 64.950.000 | 3 | 11.275.000 | 25,00 | 17,36 | 39 | 87.260.000 | 54,17 | 64,64 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 01 | 21 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya jasa pengamanan kantor | 72 | 78.000.000 | 0 | - | 12 | 13.000.000 | | 2.000.000 | - | 15,38 | | 2.000.000 | 0,00 | 2,56 | |
| 2 | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarpras pendukung bagi aparatur (bln) | 72 | 2.130.100.000 | 36 | 319.770.750 | 12 | 206.314.612 | 3 | 44.738.751 | 25,00 | 21,68 | 39 | 364.509.501 | 54,17 | 17,11 | Dinas Pangan |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan kantor yang dibeli (unit) | 35 | 1.800.000.000 | 26 | 136.827.000 | 2 | 10.100.000 | 1 | 5.870.475 | 50,00 | 58,12 | 27 | 142.697.475 | 77,14 | 7,93 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Meubiler | Jumlah mobiler yang dibeli (paket) | 6 | 10.100.000 | 0 | - | 6 | 24.705.000 | | 8.750.000 | - | 35,42 | | | | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kantor (bulan) | 72 | 150.000.000 | 48 | 63.955.000 | 12 | 25.000.000 | 3 | 470.000 | 25,00 | 1,88 | 51 | 64.425.000 | 70,83 | 42,95 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional (bulan) | 72 | 150.000.000 | 36 | 100.788.750 | 12 | 135.509.612 | 3 | 21.348.276 | 25,00 | 15,75 | 39 | 122.137.026 | 54,17 | 81,42 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan) | 72 | 20.000.000 | 36 | 18.200.000 | 12 | 11.000.000 | 3 | 8.300.000 | 25,00 | 75,45 | 39 | 26.500.000 | 54,17 | 132,50 | |
| 3 | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) | Ketersediaan Energi (kcal/kapita/hari) | 3754 | 3.561.952.000 | 3955 | 856.026.159 | 0 | 963.973.115 | 0 | 26.789.650 | | 2,78 | 3954 | 882.815.809 | 105,33 | 24,78 | |
| | | | | | | | | Protein (gram/kapita/hari) | 83,73 | | 63 | | 14 | | 0 | - | - | 77,15 | | - | 92,14 | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 01 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan (kk) | 60 | 300.000.000 | 24 | 56.158.920 | 10 | 39.927.000 | 0 | - | - | - | 24 | 56.158.920 | 40,00 | 18,72 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 14 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Jumlah kelompok desa mandiri pangan yang aktif (unit) | 48 | 160.000.000 | 28 | 80.271.360 | 14 | 14.050.000 | 0 | 2.025.000 | - | 14,41 | 28 | 82.296.360 | 58,33 | 51,44 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 32 | Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping) | Jumlah lumbung pangan yang dibangun beserta sarana prasana yang tersedia (unit) | 3 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | | 1.021.250 | - | 0,20 | | | | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 43 | Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat | Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif (kelompok) | 92 | 130.000.000 | 46 | 54.679.850 | 23 | 49.891.900 | 0 | 7.607.400 | - | 15,25 | 46 | 62.287.250 | 50,00 | 47,91 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 45 | Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN | Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan, dan HBKN di 15 Kecamatan (bulan) | 72 | 80.000.000 | 36 | 45.334.790 | 12 | 53.945.815 | 3 | 3.475.000 | 25,00 | 6,44 | 39 | 48.809.790 | 54,17 | 61,01 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 46 | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten | Stok cadangan pangan pemerintah daerah (ton) | 100 | 250.000.000 | 45,75 | 84.791.480 | 5 | 76.164.000 | 0 | 675.000 | - | 0,89 | 45,75 | 85.466.480 | 45,75 | 34,19 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----|---|-----|----|-----|----|----|---|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|-------|--------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 52 | Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) | Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (dok) | 3 | 56.952.000 | 0 | 0 | 1 | 18.984.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 53 | Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) | Jumlah LDPM yang aktif (kelompok) | 18 | 75.000.000 | 12 | 36.549.200 | 6 | 32.301.200 | 0 | 1.375.000 | - | 4,26 | 12 | 37.924.200 | 66,67 | 50,57 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 57 | Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan | Terbentuknya kawasan mandiri pangan (nagari) | 12 | 300.000.000 | 4 | 36.549.200 | 2 | 46.700.400 | 0 | 1.025.000 | - | 2,19 | 4 | 37.574.200 | 33,33 | 12,52 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 61 | Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan | Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan (dok) | 5 | 75.000.000 | 1 | 23.672.700 | 1 | 23.913.000 | 0 | 4.147.000 | - | 17,34 | 1 | 27.819.700 | 20,00 | 37,09 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 64 | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI | Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk (kelompok) | 20 | 200.000.000 | 5 | 54.215.139 | 5 | 24.934.000 | 1 | 4.189.000 | 20,00 | 16,80 | 5 | 58.404.139 | 25,00 | 29,20 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 68 | Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) | Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan (dokumen) | 6 | 250.000.000 | 2 | 198.811.800 | 4 | 29.049.000 | 0 | - | - | - | 2 | 198.811.800 | 33,33 | 79,52 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 69 | Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | Tersedianya laporan kewaspadaan pangan (bulan) | 72 | 185.000.000 | 36 | 184.991.720 | 12 | 24.934.000 | 3 | 1.250.000 | 25,00 | 5,01 | 39 | 186.241.720 | 54,17 | 100,67 | Dinas Pangan |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 16 | 70 | Penunjang DAK Ketahanan Pangan | Tersedianya anggaran penunjang DAK | 36 | 90.000.000 | | | 12 | 29.178.800 | | | - | - | | | | | |
| 4. | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | | Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) | 2150 | 3.362.099.040 | 2150 | 2.091.480.373 | 0 | 690.889.900 | 0 | 73.138.523 | | 10,59 | 2291 | 2.164.618.896 | 106,56 | 64,38 | Dinas Pangan |
| | | | | | | | Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) | 57 | | 57 | | 0 | - | - | | | | 82,4 | - | 144,56 | | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 05 | Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Jumlah pameran/ promosi pangan yang diikuti (kali) | 18 | 1.000.000.000 | 6 | 613.517.864 | 3 | 208.929.000 | 0 | 955.000 | - | 0,46 | 6 | 614.472.864 | 33,33 | 61,45 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 06 | Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Jumlah KRPL yang dibina dan dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL (kelompok) | 60 | 250.000.000 | 25 | 99.584.900 | 9 | 62.839.000 | 0 | 20.890.000 | - | 33,24 | 25 | 120.474.900 | 41,67 | 48,19 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 07 | Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen | Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan (kali) | 34 | 262.099.040 | 17 | 131.049.520 | 3 | 59.698.000 | 0 | 6.409.250 | - | 10,74 | 17 | 137.458.770 | 50,00 | 52,45 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 08 | Penyusunan Pola Pangan Harapan | Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan (dokumen) | 6 | 100.000.000 | 2 | 54.935.342 | 1 | 14.695.900 | 0 | - | - | - | 2 | 54.935.342 | 33,33 | 54,94 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 17 | Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan | Tersedianya biaya rapat-rapat dewan ketahanan pangan (bln) | 72 | 150.000.000 | 36 | 292.088.321 | 12 | 67.945.000 | 3 | 925.000 | 25,00 | 1,36 | 39 | 293.013.321 | 54,17 | 195,34 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 22 | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang dibina (kelompok) | 12 | 350.000.000 | 4 | 91.110.840 | 2 | 74.610.000 | 0 | 9.609.000 | - | 12,88 | 4 | 100.719.840 | 33,33 | 28,78 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 23 | Model Percontohan Keamanan Pangan (nagari) | Jumlah nagari percontohan (unit) | 140 | 100.000.000 | 120 | 58.747.020 | 20 | 34.705.000 | 0 | 1.727.750 | - | 4,98 | 120 | 60.474.770 | 85,71 | 60,47 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 24 | Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) | Jumlah lomba cipta menu B2SA (kali) | 18 | 700.000.000 | 6 | 442.532.428 | 3 | 81.711.000 | 0 | - | - | - | 6 | 442.532.428 | 33,33 | 63,22 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|----|-----|----|----|----|----|--|--|-----|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|---------------------|-------|-----------------|
| | K | Rp. | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 25 | Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | Terlaksananya pengawasan bahan pangan (bln) | 72 | 300.000.000 | 36 | 218.002.818 | 12 | 70.285.000 | 3 | 21.872.650 | 25,00 | 31,12 | 39 | 239.875.468 | 54,17 | 79,96 | |
| | 1 | 02 | 03 | 01 | 17 | 28 | Penyusunan Ranperda Ketahanan Pangan | Ranperda Ketahanan Pangan (dokumen) | 1 | 150.000.000 | 0 | 89.911.320 | 1 | 15.472.000 | 0 | 10.749.873 | - | 69,48 | 2 | 100.661.193 | 200,00 | 67,11 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87,96 | 45,26 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | |
| IV | | | | | | | URUSAN PERTANAHAN | | | | 6.276.972.040 | | 11.246.958.790 | | 65.599.300 | | | | 375.661.760 | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah | Persentase luas tanah bersertifikasi (%) | 62 | 1.269.267.150 | 49 | 6.081.610.240 | 4 | 10.892.648.412 | 0 | 51.982.900 | - | 0,48 | 49 | 212.163.560 | 79,03 | 16,72 | Dinas Perkimtan |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 04 | Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah | Jumlah tanah yang disertifikatkan (persil) | 200 | 760.147.500 | 5 | 25.121.260 | 50 | 253.382.500 | 3 | 17.335.750 | 6,00 | 6,84 | 8 | 42.457.010 | 4,00 | 5,59 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 05 | Perencanaan Pengadaan tanah | Dokumen rencana pengadaan tanah (dok) | 4 | 509.119.650 | 1 | 169.706.550 | 1 | 115.211.137 | 0 | - | - | - | 1 | 169.706.550 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 06 | Persiapan Pengadaan Tanah | Tersedianya operasional untuk persiapan pengadaan tanah (bln) | 48 | 399.597.450 | 12 | 133.199.150 | 12 | 100.027.628 | 0 | - | - | - | 12 | 133.199.150 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 07 | Pelaksanaan Pengadaan Tanah | Tanah yang dibebaskan (persil) | 25 | 30.000.000.000 | 11 | 5.505.122.200 | 10 | 10.000.000.000 | 0 | 10.193.500 | - | 0,10 | 11 | 5.515.315.700 | 44,00 | 18,38 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 08 | Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah | Hasil pengadaan tanah yang diserahkan ke bagian asset (persil) | 25 | 315.000.000 | 4 | 10.288.580 | 17 | 105.000.000 | 0 | - | - | - | 4 | 10.288.580 | 16,00 | 3,27 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 10 | Fasilitasi Pengadaan Tanah | Kebutuhan pengadaan tanah yang difasilitasi (paket) | 24 | 1.094.600.000 | 5 | 45.896.150 | 5 | 88.462.500 | 0 | 7.498.900 | - | 8,48 | 5 | 53.395.050 | 20,83 | 4,88 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 11 | Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (org) | 200 | 183.508.566 | 0 | - | 100 | 61.169.522 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 16 | 14 | Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah | | 35 | 877.500.000 | 16 | 192.276.350 | 28 | 169.395.125 | 0 | 16.954.750 | - | 10,01 | 16 | 209.231.100 | 45,71 | 23,84 | |
| 2 | 1 | 02 | 04 | 01 | 17 | | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Penyelesaian kasus tanah negara (kasus) | 10 | 449.645.400 | 8 | 149.881.800 | 2 | 94.120.000 | 0 | 13.616.400 | - | 14,47 | 8 | 163.498.200 | 80,00 | 36,36 | Dinas Perkimtan |
| | 1 | 02 | 04 | 01 | 17 | 01 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan (konflik) | 50 | 449.645.400 | 18 | 149.881.800 | 11 | 94.120.000 | 0 | 13.616.400 | - | 14,47 | 18 | 163.498.200 | 36,00 | 36,36 | |
| 3 | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Persentase Aset Tanah pmda terkelola dengan baik (%) | 100 | 500.000.000 | 0 | - | 50 | 220.190.378 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Perkimtan |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 22 | Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal | Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal | 4 | 500.000.000 | 0 | - | 1 | 220.190.378 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 01 | 04 | 01 | 15 | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Terlaksananya promosi wisata (Kegiatan) | 6 | 190.000.000 | 2 | 45.480.000 | 1 | 40.000.000 | 0 | - | - | - | 2 | 45.480.000 | 33,33 | 23,94 | Dinas Perkimtan |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 22 | Pelaksanaan Promosi dan Publikasi | Jumlah kepesertaan dalam festival Langkisau (Keg) | 6 | 190.000.000 | 2 | 45.480.000 | 1 | 40.000.000 | 0 | - | - | - | 2 | 45.480.000 | 33,33 | 23,94 | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,09 | 19,25 | | |
| PERINGKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| V | | | | | | | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 12.818.295.318 | | 7.289.646.420 | | 3.168.792.964 | | | | 6.901.375.657 | | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|--|---|--|-----|---------------|-------|-------------|----|-------------|---|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|------------------------|
| | 1 | 02 | 01 | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 1 | 02 | 01 | | | Program pelayanan administrasi perkantoran | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bln) | 72 | 2.000.000.000 | 36 | 493.417.763 | 12 | 448.826.417 | 3 | 70.236.936 | 25,00 | 15,65 | 39 | 563.654.699 | 54,17 | 28,18 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 | 02 | 01 | 02 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik, air, telfon (Bulan) | 72 | 390.000.000 | 36 | 146.525.400 | 12 | 33.000.000 | 3 | 8.135.236 | 25,00 | 24,65 | 39 | 154.660.636 | 54 | 39,66 | |
| | 1 | 02 | 01 | 07 | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya honor pengelola keuangan (Bulan) | 72 | 390.000.000 | 36 | 192.293.000 | 12 | 79.650.000 | 3 | 10.100.000 | 25,00 | 12,68 | 39 | 202.393.000 | 54 | 51,90 | |
| | 1 | 02 | 01 | 08 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terbayarnya honor tenaga kebersihan (Bulan) | 72 | 300.000.000 | 36 | 87.911.000 | 12 | 67.945.200 | 3 | 10.621.000 | 25,00 | 15,63 | 39 | 98.532.000 | 54 | 32,84 | |
| | 1 | 02 | 01 | 09 | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya peralatan kerja kondisi baik (Bulan) | 72 | 10.000.000 | 36 | 60.081.680 | 12 | 5.050.000 | 3 | 1.335.000 | 25,00 | 26,44 | 39 | 61.416.680 | 54 | 614,17 | |
| | 1 | 02 | 01 | 10 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) | 72 | 100.000.000 | 36 | 73.438.414 | 12 | 62.334.817 | 3 | 7.337.000 | 25,00 | 11,77 | 39 | 80.775.414 | 54 | 80,78 | |
| | 1 | 02 | 01 | 11 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan (Bulan) | 72 | 100.000.000 | 36 | 75.031.200 | 12 | 21.722.000 | 3 | 1.500.000 | 25,00 | 6,91 | 39 | 76.531.200 | 54 | 76,53 | |
| | 1 | 02 | 01 | 11 | | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Jumlah Dokumen Revisi Renstra Yang Dihakiskan | 1 | 17.882.050 | 1 | 17.882.050 | - | - | 0 | - | | | 1 | 17.882.050 | 100 | 100,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 12 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik (Bulan) | 72 | 100.000.000 | 36 | 18.128.300 | 12 | 8.129.400 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 16,61 | 39 | 19.478.300 | 54 | 19,48 | |
| | 1 | 02 | 01 | 15 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan (Bulan) | 72 | 100.000.000 | 36 | 52.587.700 | 12 | 17.430.000 | 3 | 1.970.000 | 25,00 | 11,30 | 39 | 54.557.700 | 54 | 54,56 | |
| | 1 | 02 | 01 | 17 | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan) | 72 | 100.000.000 | 36 | 280.315.031 | 12 | 18.565.000 | 0 | 5.455.000 | - | 29,38 | 36 | 285.770.031 | 50 | 285,77 | |
| | 1 | 02 | 01 | 18 | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat keluar daerah (Bulan) | 72 | 591.934.284 | 36 | 197.311.428 | 12 | 56.000.000 | 3 | 9.089.700 | 25,00 | 16,23 | 39 | 206.401.128 | 54 | 34,87 | |
| | 1 | 02 | 01 | 20 | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat dalam daerah (Bulan) | 72 | 408.518.850 | 36 | 136.172.950 | 12 | 49.000.000 | 3 | 11.050.000 | 25,00 | 22,55 | 39 | 147.222.950 | 54 | 36,04 | |
| | 1 | 02 | 01 | 22 | | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Jumlah Laporan Yang Disampaikan (dok) | 48 | 116.362.500 | 24 | 38.787.500 | 4 | 30.000.000 | 4 | 2.294.000 | 100,00 | 7,65 | 28 | 41.081.500 | 58 | 35,30 | |
| 2 | 1 | 02 | 02 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan layanan Sarana dan prasarana Aparatur (bln) | 72 | 1.382.728.850 | 36 | 682.838.188 | 12 | 248.142.200 | 3 | 20.740.500 | 25,00 | 8,36 | 39,00 | 703.578.688 | 54,17 | 50,88 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 | 02 | 02 | 05 | | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional | Tersedianya layanan kendaraan dinas operasionl (bln) | 72 | 1.182.728.850 | 36 | 481.000.927 | 12 | 81.997.200 | 3 | 6.768.000 | 25,00 | 8,25 | 39 | 487.768.927 | 54,17 | 41,24 | |
| | 1 | 02 | 02 | 09 | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah peralatan yang dibeli (paket) | 4 | 100.000.000 | 1 | 166.283.113 | 1 | 65.733.000 | 0 | 13.972.500 | - | 21,26 | 1 | 180.255.613 | 25,00 | 180,26 | |
| | 1 | 02 | 02 | 42 | | Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | Jumlah gedung yang direhab (unit) | 3 | 100.000.000 | 1 | 35.554.148 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 35.554.148 | 33,33 | 35,55 | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dibeli (unit) | 2 | 50.412.000 | - | - | 1 | 50.412.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Pengadaan Meubiler | jumlah mobiler yang dibeli (paket) | 2 | 100.000.000 | - | - | 1 | 50.000.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 1 | 02 | 06 | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) | 100 | 80.000.000 | 84,00 | 71.851.150 | 5 | 40.000.000 | 1 | 9.000.000 | 20,00 | 22,50 | 85,00 | 80.851.150 | 85,00 | 101,06 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 | 02 | 06 | 01 | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang dilatih (org) | 15 | 80.000.000 | 4 | 18.326.700 | 6 | 40.000.000 | 3 | 9.000.000 | 50,00 | 22,50 | 7 | 27.326.700 | 46,67 | 34,16 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|--|---|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 4 | 1 | 02 | 06 | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya kualitas pelaporan Perangkat daerah (%) | 100 | 80.000.000 | 84,00 | 71.851.150 | 2 | 31.470.000 | 0 | - | - | - | 84,00 | 71.851.150 | 84,00 | 89,81 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 | 02 | 06 | 01 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jenis Laporan Yang Disampaikan (doumen) | 20 | 18.326.700 | 20 | 18.326.700 | | | 0 | - | | | 20 | 18.326.700 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | laporan triwulan hasil pengendalian dan evaluasi (dok) | 12 | 94.410.000 | 0 | - | 4 | 31.470.000 | 1 | - | 25,00 | - | 1 | - | 8,33 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 02 | 05 | 15 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Meningkatkan Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah di bawah baku mutu | 100 | 450.000.000 | 80,00 | 235.684.051 | 20 | 105.172.500 | 5 | 7.160.250 | 25,00 | 6,81 | 85,00 | 242.844.301 | 85,00 | 53,97 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 | 02 | 05 | 23 | | Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah | laporan triwulan yang disusun (dok) | 24 | 150.000.000 | 12 | 150.829.201 | 4 | 59.320.000 | 1 | 4.000.000 | 25,00 | 6,74 | 13 | 154.829.201 | 54,17 | 103,22 | |
| | 1 | 02 | 05 | 23 | | Sosisiasasi dan Pembinaan Pengelolaan Persampahan | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (org) | 300 | 137.557.500 | 0 | - | 100 | 45.852.500 | 0 | 3.160.250 | - | 6,89 | 0 | 3.160.250 | 0,00 | 2,30 | |
| 6 | 1 | 02 | 05 | 16 | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | B (tercemar ringan) | 4.374.855.280 | B (tercemar ringan) | 3.252.591.328 | B (tercemar ringan) | 858.744.100 | B (tercemar ringan) | 122.698.596 | | 14,29 | B (tercemar ringan) | 3.375.289.924 | 100 | 74,35 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Indeks Kualitas Udara: | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | | | Diambang Kualitas Udara baik | | 100 | | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 01 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura | Tersedianya biaya operasional untuk persiapan penilaian Adipura (keg) | 6 | 500.000.000 | 3 | 701.970.134 | 1 | 62.655.000 | 0 | 8.089.112 | - | 12,91 | 3 | 710.059.246 | 50,00 | 142,01 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 04 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | Jumlah laporan hasil pengawasan | 6 | 250.000.000 | 3 | 237.589.696 | 1 | 96.192.400 | 0 | 2.062.484 | - | 2,14 | 3 | 239.652.180 | 50,00 | 95,86 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 22 | Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup | Dokumen SPM (dok) | 1 | 150.000.000 | 1 | 110.960.700 | - | - | 0 | - | | | 1 | 110.960.700 | 100,00 | 73,97 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 24 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | biaya operasional pengolahan limbah B3 (keg) | 1 | 13.314.000 | - | - | 1 | 13.314.000 | 0 | 3.097.050 | - | 23,26 | - | 3.097.050 | 0,00 | 23,26 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 23 | Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Pesisir Selatan | event Yang Diaksanakan (Kali) | 6 | 200.000.000 | 3 | 135.116.000 | 1 | 82.020.000 | 0 | 12.200.000 | - | 14,87 | 3 | 147.316.000 | 50,00 | 73,66 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 28 | Penunjang Operasional Laboratorium | Tersedianya Operasional Laboratorium Yang Tersedia (Bulan) | 60 | 729.566.112 | 24 | 364.783.056 | 12 | 383.930.500 | 3 | 64.888.000 | 25,00 | 16,90 | 27 | 429.671.056 | 45,00 | 58,89 | |
| | 1 | 02 | 05 | 16 | 31 | Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) | Jumlah gerakan terpadu yang dikoordinasikan | 6 | 200.000.000 | 47.696287 | 223.010.946 | 1 | 53.871.200 | 0 | 13.109.100 | - | 24,33 | 47.69628699 | 236.120.046 | 794,94 | 118,06 | |
| | | | | | | Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM dan KALPATARU | Jumlah Calon Yang Masuk Seleksi Nasional | 36 | 418.966.000 | 12 | 82.277.040 | 6 | 41.775.000 | 4 | 8.338.150 | 66,67 | 19,96 | 16 | 90.615.190 | 44,44 | 21,63 | |
| | | | | | | Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA) | Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina (unit) | 125 | 1.155.889.280 | 50 | 225.428.306 | 25 | 124.986.000 | 0 | 10.914.700 | - | 8,73 | 50 | 236.343.006 | 40,00 | 20,45 | |
| 7 | 1 | 02 | 05 | 19 | | Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan | Indeks Kualitas Air | B (tercemar ringan) | 4.113.711.188 | B (tercemar ringan) | 1.936.431.001 | B (tercemar ringan) | 471.886.747 | B (tercemar ringan) | 57.322.400 | | 12,15 | B (tercemar ringan) | 1.993.753.401 | 100,00 | 47,07 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | Indeks Kualitas Udara: | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | Diambang Kualitas Udara baik | | | | Diambang Kualitas Udara baik | | 100,00 | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 07 | | Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) | Jumlah Buku Laporan SLHD (dok) | 6 | 300.000.000 | 3 | 380.031.181 | 1 | 98.110.000 | - | 1.372.700 | - | 1,40 | 3 | 381.403.881 | 50,00 | 127,13 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 14 | | Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dibahas (dok) | 150 | 655.110.708 | 85 | 327.555.354 | 30 | 113.700.000 | 5 | 21.253.700 | 16,67 | 18,69 | 90 | 348.809.054 | 60,00 | 53,24 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 17 | | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah Pengaduan Masyarakat/tindakan lanjut (kasus) | 40 | 587.648.808 | 13 | 293.824.404 | 8 | 55.403.547 | 3 | 12.048.250 | 37,50 | 21,75 | 16 | 305.872.654 | 40,00 | 52,05 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 37 | | Penyusunan RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan | Jumlah Dokumen RPPLH (dok) | 1 | 140.000.000 | 0 | - | 1 | 139.824.800 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 37 | | Penyusunan Dokumen KLHS | Dokum KLHS (dok) | 4 | 1.368.711.188 | 1 | 257.813.659 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 257.813.659 | 25,00 | 18,84 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 49 | | Inventarisasi Kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan | Laporan hasil inventarisasi (dok) | 5 | 75.000.000 | 1 | 63.780.204 | 1 | 30.960.000 | - | 992.750 | - | 3,21 | 1 | 64.772.954 | 20,00 | 86,36 | |
| | 1 | 02 | 05 | 19 | 50 | | Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan Hidup | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (org) | 60 | 67.776.800 | - | - | 50 | 33.888.400 | - | 21.655.000 | - | 63,90 | 0 | 21.655.000 | 0,00 | 31,95 | |
| 8 | 1 | 02 | 05 | 20 | | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Pencapaian kualitas air | di bawah baku mutu | 2.962.395.000 | di bawah baku mutu | 68.455.026 | di bawah baku mutu | 964.551.000 | di bawah baku mutu | 13.758.550 | 1,43 | di bawah baku mutu | 82.213.576 | 100,00 | 54,81 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 1 | 02 | 05 | 20 | 10 | | Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten | Jumlah laporan hasil pemantauan | 5 | 417.000.000 | 1 | 68.455.026 | 1 | 116.086.000 | - | 13.758.550 | - | 11,85 | 1 | 82.213.576 | 20,00 | 19,72 | |
| | 1 | 02 | 05 | 20 | 11 | | Pembangunan Tempat Pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK) | Jumlah sarana yang dibangun (paket) | 3 | 2.545.395.000 | - | - | 1 | 848.465.000 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 1 | 02 | 05 | 21 | | | Program Pengendalian Kebakaran | Indeks Kualitas Udara: | Diambang Kualitas Udara baik | 208.633.080 | Diambang Kualitas Udara baik | 395.518.142 | Diambang Kualitas Udara baik | - | Diambang Kualitas Udara baik | - | Diambang Kualitas Udara baik | 395.518.142 | 100,00 | 189,58 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | 1 | 02 | 05 | 21 | 01 | | Penyadartahuan dan Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan (Sisa DBH DR Tahun 2009-2016) | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (org) | 80 | 208.633.080 | 80,00 | 186.885.062 | - | 0,00 | - | - | - | 80,00 | 186.885.062 | 100,00 | 89,58 | | |
| 10 | 1 | 02 | 05 | 21 | | | Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab.Pesisir Selatan | Meningkatnya luasan tutupan lahan terbuka (persen) | 50 | 81.008.621 | 50 | 81.008.621 | 10 | - | - | - | 50 | 81.008.621 | 100,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | 1 | 02 | 05 | 20 | 1 | | Penyusunan Profil keanekaragaman hayati | Jumlah dokumen kehayati | 1 | 81.008.621 | 1 | 81.008.621 | 0 | - | - | - | - | 1 | 81.008.621 | 100,00 | 100,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,23 | 78,97 | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | |
| VI | | | | | | | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 27.707.500.000 | | 10.805.999.000 | | 5.227.214.250 | | 1.004.896.720 | | | 11.810.895.720 | | | | |
| 1 | 3 | 00 | 02 | 01 | 26 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 4.990.000.000 | 36 | 1.202.763.000 | 12 | 465.308.150 | 3 | 141.803.870 | 25,00 | 30,48 | 39 | 1.344.566.870 | 54,17 | 26,95 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan jaringan komunikasi, listrik dan PDAM | 72 | 350.000.000 | 36 | 127.549.000 | 12 | 79.800.000 | 3 | 14.430.700 | 25,00 | 18,08 | 39 | 141.979.700 | 54,17 | 40,57 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya honorium pengelola kegiatan | 72 | 750.000.000 | 36 | 181.741.000 | 12 | 148.350.000 | 3 | 34.950.000 | 25,00 | 23,56 | 39 | 216.691.000 | 54,17 | 28,89 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Honor tenaga kebersihan dan ketersediaan alat pembersih (bln) | 72 | 225.000.000 | 36 | 41.368.000 | 12 | 18.426.200 | 3 | 5.297.700 | 25,00 | 28,75 | 39 | 46.665.700 | 54,17 | 20,74 | |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | layanan perbaikan peralatan kerja (bln) | 72 | 125.000.000 | 36 | 24.266.000 | 12 | 10.375.000 | 3 | 1.710.000 | 25,00 | 16,48 | 39 | 25.976.000 | 54,17 | 20,78 | |
| | | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (bln) | 72 | 220.000.000 | 36 | 63.732.000 | 12 | 58.565.600 | 3 | 32.906.000 | 25,00 | 56,19 | 39 | 96.638.000 | 54,17 | 43,93 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|--|--|---|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------|-------|------------|----------------|---------------------|-------|----------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 120.000.000 | 36 | 36.038.000 | 12 | 24.256.200 | 3 | 6.280.000 | 25,00 | 25,89 | 39 | 42.318.000 | 54,17 | 35,27 | |
| | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya komponen instalasi listrik (bln) | 72 | 100.000.000 | 36 | 24.049.000 | 12 | 6.910.150 | 3 | 1.502.000 | 25,00 | 21,74 | 39 | 25.551.000 | 54,17 | 25,55 | |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang baru | 80 | 750.000.000 | 36 | 225.603.000 | - | - | - | - | - | - | 36 | 225.603.000 | 45,00 | 30,08 | |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Terbayarnya tagihan koran/ majalah (bln) | 72 | 75.000.000 | 36 | 16.340.000 | 12 | 8.900.000 | 3 | 5.170.000 | 25,00 | 58,09 | 39 | 21.510.000 | 54,17 | 28,68 | |
| | | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat | 60 | 125.000.000 | 36 | 26.137.000 | 12 | 19.800.000 | 3 | 4.185.000 | 25,00 | 21,14 | 39 | 30.322.000 | 65,00 | 24,26 | |
| | | | | | | | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Biaya perjalanan dinas luar daerah (bln) | 72 | 1.250.000.000 | 36 | 296.589.000 | 12 | 28.950.000 | 3 | 7.942.500 | 25,00 | 27,44 | 39 | 304.531.500 | 54,17 | 24,36 | |
| | | | | | | | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Biaya perjalanan dinas dalam daerah (bln) | 72 | 900.000.000 | 36 | 139.351.000 | 12 | 60.975.000 | 3 | 27.429.970 | 25,00 | 44,99 | 39 | 166.780.970 | 54,17 | 18,53 | |
| 2 | 3 | 00 | 02 | 01 | 26 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan kebutuhan sarpras bagi aparatur (bln) | 72 | 1.323.000.000 | 36 | 303.596.000 | 12 | 634.269.000 | 3 | 60.855.000 | 25,00 | 9,59 | 39 | 364.451.000 | 54,17 | 27,55 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | terpelihanya gedung kantor (bln) | 72 | 500.000.000 | 36 | 123.072.000 | 12 | 10.247.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 123.072.000 | 54,17 | 24,61 | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpelihanya kendaran dinas (bln) | 72 | 823.000.000 | 36 | 180.524.000 | 12 | 60.572.000 | 3 | 7.255.000 | 25,00 | 11,98 | 39 | 187.779.000 | 54,17 | 22,82 | |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralan yang dibeli (paket) | 5 | 100.000.000 | 1 | 24.049.000 | 2 | 563.450.000 | 1 | 53.600.000 | 50,00 | 9,51 | 2 | 77.649.000 | | | |
| 3 | 3 | 00 | 02 | 01 | 26 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase target pembangunan yang tercapai (%) | 100 | 280.000.000 | 90 | 70.011.000 | 5 | - | 1 | 20.575.850 | 20,00 | | 11 | 90.586.850 | 11,00 | 32,35 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | | | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diterbitkan | 40 | 280.000.000 | 8 | 70.011.000 | 8 | - | 3 | 20.575.850 | 37,50 | | 11 | 90.586.850 | 27,50 | 32,35 | |
| 4 | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | | Penataan Administrasi Kependudukan | Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk | 0,95 | 21.114.500.000 | 0,88 | 9.229.629.000 | 0,30 | 4.127.637.100 | 0 | 781.662.000 | 33,33 | 18,94 | 1 | 10.011.291.000 | 18,75 | 47,41 | Dinas Dukcapil |
| | | | | | | | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu | Jumlah sarana pengolah data dalam kondisi baik | 16 | 1.500.000.000 | 3 | 591.868.000 | 3 | 79.100.000 | - | 23.061.550 | - | 29,15 | 3 | 614.929.550 | 18,75 | 41,00 | |
| | | | | | | | | Jumlah struktur jaringan data yang baik | 58 | - | 32 | - | 18 | - | 8 | - | 44,44 | | 40 | - | | | |
| | | | | | | | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan | Jumlah Data Anomali Yang Diperbaiki | 514.624 | 500.000.000 | 56.639 | 182.545.000 | 103.200 | 44.300.000 | 20.000 | 10.306.250 | 19,38 | 23,26 | 76.639 | 192.851.250 | 14,89 | 38,57 | |
| | | | | | | | | Jumlah Data Ganda Yang Dihapus | 61.363 | - | 14.839 | - | 4.000 | - | 800 | - | 20,00 | | 15.639 | - | 25,49 | | |
| | | | | | | | | Jumlah data yang dikonsolidasikan | 733.000 | - | 621.054 | - | 150.000 | - | 23.000 | - | 15,33 | | 644.054 | - | 87,87 | | |
| | | | | | | | | Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan | 500 | - | 200 | - | 100 | - | - | - | - | | 200 | - | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat | Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Kependudukan | 19 | 650.000.000 | 8 | 169.972.000 | 3 | 68.490.000 | 1 | 10.333.170 | 33,33 | 15,09 | 9 | 180.305.170 | 47,37 | 27,74 | |
| | | | | | | | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran | Jumlah penerbitan Akta Kelahiran | 159.000 | 600.000.000 | 164.592 | 335.111.000 | 23.000 | 62.185.400 | 3.000 | 23.052.500 | 13,04 | 37,07 | 167.592 | 358.163.500 | 105,40 | 59,69 | |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil | Jumlah peserta Bimtek Pencatatan Sipil | 180 | 175.000.000 | - | - | 60 | 57.603.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|-------|----------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 16 | Peningkatan Kapasitas Aparat Pendaftaran Penduduk | Jumlah peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk | 240 | 175.000.000 | 60 | 27.867.000 | 60 | 31.695.000 | - | - | - | - | 60 | 27.867.000 | 25,00 | 15,92 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 17 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah pelaksanaan SOP yang dievaluasi | 37 | 422.500.000 | 4 | 90.421.000 | 9 | 19.550.000 | 2 | 596.250 | 22,22 | 3,05 | 6 | 91.017.250 | 16,22 | 21,54 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 18 | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak | 57.685 | 230.000.000 | 11.036 | 113.653.000 | 10.000 | 46.650.000 | 1.558 | 15.810.000 | 15,58 | 33,89 | 12.594 | 129.463.000 | 21,83 | 56,29 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 19 | Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga | Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga | 260.000 | 505.000.000 | 201.452 | 239.352.000 | 52.000 | 66.850.900 | 5.000 | 20.116.500 | 9,62 | 30,09 | 206.452 | 259.468.500 | 79,40 | 51,38 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 20 | Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP | Jumlah Penerbitan KTP_el | 170.000 | 1.500.000.000 | 81.157 | 1.106.199.000 | 34.000 | 86.400.000 | 18.753 | 30.750.650 | 55,16 | 35,59 | 99.910 | 1.136.949.650 | 58,77 | 75,80 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 21 | Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) | Jumlah Nagari dan Sekolah yang dikunjungi | 205 | 1.750.000.000 | 105 | 525.801.000 | 40 | 73.600.000 | 15 | 46.900.150 | 37,50 | 63,72 | 120 | 572.701.150 | 58,54 | 32,73 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 22 | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian | Jumlah Penerbitan Akta Kematian | 4.580 | 300.000.000 | 2.464 | 46.112.000 | 1.000 | 35.287.000 | 231 | 8.563.400 | 23,10 | 24,27 | 2.695 | 54.675.400 | 58,84 | 18,23 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 23 | Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai | Jumlah laporan perkawinan dan perceraian yang diterbitkan | 48 | 300.000.000 | 12 | 37.232.000 | 12 | 51.091.500 | 3 | 10.437.500 | 25,00 | 20,43 | 15 | 47.669.500 | 31,25 | 15,89 | |
| | 3 | 00 | 02 | 01 | 21 | 17 | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse | Jenis Layanan pada Pos Layanan Khusus | 16 | 350.000.000 | 3 | 103.780.000 | 4 | 57.275.000 | - | 9.500.000 | - | 16,59 | 3 | 113.280.000 | 18,75 | 32,37 | |
| | | | | | | | | Jumlah data warehouse kependudukan yang diakses lembaga pengguna | 102.000 | - | 90.236 | - | 25.000 | - | 8,00 | - | 92.236 | - | 90,43 | | | | |
| | | | | | | | | Jenis Layanan Online Kependudukan | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7,14 | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital | Jumlah Arsip Digital Register Akta Kelahiran | 300.000 | 357.000.000 | 56.095 | 45.974.000 | 40.000 | 34.312.300 | 5.732 | 12.916.750 | 14,33 | 37,64 | 61.827 | 58.890.750 | 20,61 | 16,50 | |
| | | | | | | | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) | Jumlah blanko dokumen kependudukan yang diadakan | 1.183.000 | 6.500.000.000 | 473.200 | 2.592.535.000 | 236.600 | 1.488.701.000 | - | 209.080.000 | - | 14,04 | 473.200 | 2.801.615.000 | 40,00 | 43,10 | |
| | | | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi | 5.400 | - | 1.800 | - | 900 | - | - | - | 1.800 | - | 33,33 | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Bimtek/Pelatihan yang diikuti | 10 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 70,00 | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan di UKL | 130.220 | 5.300.000.000 | 52.747 | 3.021.207.000 | 36.000 | 1.824.546.000 | 7.500 | 350.237.330 | 20,83 | 19,20 | 60.247 | 3.371.444.330 | 46,27 | 63,61 | |
| | | | | | | | | Jumlah perekaman KTP_el di UKL | 165.768 | - | 20.507 | - | 47.076 | - | 11.875 | - | 25,23 | 32.382 | - | 19,53 | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,52 | 33,56 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| VII | | | | | | | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | 10.462.559.868 | | 4.074.983.611 | | 2.953.861.275 | | 224.784.731 | | | | 4.243.834.527 | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | memenuhkan layanan administrasi perkantoran (bin) | 72 | 2.189.183.116 | 12 | 846.908.171 | 12 | 858.573.131 | 0 | 92.311.592 | - | 10,75 | 12 | 883.285.948 | 16,67 | 40,35 | DPMDPPKB |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | telpon, air, listrik (12 Bulan) | 72 | 213.000.000 | 36 | 67.574.184 | 12 | 48.480.000 | 0 | 9.547.092 | - | 19,69 | 36 | 77.121.276 | 50,00 | 36,21 | |
| | | 02 | 07 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Honorarium Non PNS | 180 | 1.167.098.316 | 108 | 389.032.772 | 36 | 286.297.972 | | 47.164.500 | - | 16,47 | 108 | 436.197.272 | 60,00 | 37,37 | |
| | | | | | | | | Roda 4 sebanyak 6 Unit | 180 | | 108 | | 12 | 0 | | - | | 108 | | 60,00 | | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|-------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Pajak 2 sebanyak 70 Unit | 420 | | 210 | | 54 | | 0 | | - | | 210 | | 50,00 | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Honor penunjang kelancaran administrasi perkantoran(12 Bulan) | 72 | 421.050.000 | 36 | 140.350.000 | 12 | 112.800.000 | 0 | 17.600.000 | - | 15,60 | 36 | 157.950.000 | 50,00 | 37,51 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan Kantor | biaya kebersihan Kantor | 72 | 373.934.800 | 36 | 186.967.400 | 12 | 83.528.842 | 0 | 18.000.000 | - | 21,55 | 36 | 204.967.400 | 50,00 | 54,81 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Perbaikan Genset | 6 | 14.100.000 | 3 | 7.050.000 | 0 | 2.950.000 | 0 | - | - | - | 3 | 7.050.000 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | Perbaikan Laptop | 90 | | 45 | | 2 | | 0 | | - | - | 45 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Perbaikan AC, Sound System dan Mesin Tik | 54 | | 9 | | 5 | | 0 | | - | - | 9 | | 16,67 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | ATK Klantor | 72 | 210.000.000 | 36 | 103.094.117 | 12 | 103.094.117 | 0 | 30.007.507 | - | 29,11 | 36 | 133.101.624 | 50,00 | 63,38 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang cetak dan penggandaan | Cetak dan penggandaan | 72 | 170.542.600 | 36 | 85.271.300 | 12 | 85.271.300 | 0 | - | - | - | 36 | 85.271.300 | 50,00 | 50,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan kompopnen intalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor | alat alat elektronik kantor | 72 | 38.304.170 | 36 | 19.152.085 | 12 | 9.553.150 | 0 | 2.500.000 | - | 26,17 | 36 | 21.652.085 | 50,00 | 56,53 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | alat perlengkapan kantor | 48 | 38.304.170 | 24 | 19.152.085 | 1 | 1.107.750 | 0 | - | - | - | 24 | 19.152.085 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | lemari arsip | 30 | | 15 | | 0 | | 0 | | - | - | 15 | | 50,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Koran 3 terbitan | 72 | 7.740.000 | 36 | 3.870.000 | 12 | 4.140.000 | 0 | 1.110.000 | - | 26,81 | 36 | 4.980.000 | 50,00 | 64,34 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makan dan minum | makan minum tamu | 72 | 51.800.000 | 36 | 25.900.000 | 12 | 38.000.000 | 0 | - | - | - | 36 | 25.900.000 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | makan minum rapat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 18 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Rapat Koordinasi dalam propinsi | 72 | 232.350.000 | 36 | 116.175.000 | 12 | 34.850.000 | 0 | 10.325.000 | - | 29,63 | 36 | 126.500.000 | 50,00 | 54,44 | |
| | | | | | | | | Rapat Kooerdinasi Luar Propinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 01 | 20 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah | Rapat koordinasi dalam daerah | 72 | 144.704.000 | 36 | 72.352.000 | 12 | 48.500.000 | 0 | 10.325.000 | - | 21,29 | 36 | 82.677.000 | 50,00 | 57,14 | |
| 2 | 1 | 02 | 07 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sara dan Prasarana Aparatur | Pemenuhan layanan sarpras bagi aparatur (bln) | 72 | 69.050.000 | 12 | 34.525.000 | 12 | 50.000.000 | 0 | - | - | - | 12 | 34.525.000 | 16,67 | 50,00 | DPMDPPKB |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung dan kantor | ganti pintu mushola | 1 | 69.050.000 | 1 | 34.525.000 | - | 50.000.000 | 0 | - | - | - | 1 | 34.525.000 | 100,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | Ganti Pagar | 2 | | 2 | | - | | 0 | | - | - | 2 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | DED Gedung Kantor | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | - | - | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Cor Halaman Kantor | 1 | | 1 | | - | | 0 | | - | - | 1 | | 100,00 | | |
| 3 | 1 | 02 | 07 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | 12 | 385.418.484 | 6 | 192.709.242 | 3 | 135.800.000 | 1 | 14629489 | 33,33 | 10,77 | 7 | 207.338.731 | 58,33 | 53,80 | DPMDPPKB |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 15 | 04 | Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten | 1 kali pencanangan BBGRM TK. Kab. Pessel | 6 | 148.209.876 | 3 | 74.104.938 | 1 | 52.500.000 | 1 | 5.236.989 | 100,00 | 9,98 | 4 | 79.341.927 | 66,67 | 53,53 | |
| | | | | | | | | Mobnev Pelaksanaan BBGRM Kecamatan | 90 | | 45 | | 15 | | 0 | | - | - | 45 | | 50,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 15 | 12 | Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten | Nagari Berprestasi | 6 | 237.208.608 | 3 | 118.604.304 | 2 | 83.300.000 | 0 | 9.392.500 | - | 11,28 | 3 | 127.996.804 | 50,00 | 53,96 | |
| 4 | 1 | 02 | 07 | 01 | 16 | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/ Nagari | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif (%) | 52,5 | 524.335.000 | 15 | 176.851.510 | 15 | 112.635.400 | 0 | 14.337.500 | - | 12,73 | 15 | 191.189.010 | 28,57 | 36,46 | DPMDPPKB |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 16 | 02 | Pembinaan dan Pelatihan Bumrag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari | Rakor Bumrag | 360 | 466.072.000 | 180 | 176.851.510 | 12 | 93.214.400 | 1 | 12.662.500 | 8,33 | 13,58 | 181 | 189.514.010 | 50,28 | 40,66 | |
| | | | | | | | | Pembinaan Bumrag | 182 | | 40 | | 10 | | 40 | | 400,00 | | 80 | | 43,96 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 16 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG | Posyantek | 20 | 58.263.000 | 0 | - | 14 | 19.421.000 | 1 | 1.675.000 | 7,14 | 8,62 | 1 | 1.675.000 | 5,00 | 2,87 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|--|---|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|------------|------------|-----------------|--------|-------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 5 | 1 | 02 | 07 | 01 | 17 | 02 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari (%) | 12 | 453.129.660 | 5 | 226.564.830 | 5 | - | 0 | - | - | 5 | 226.564.830 | 41,67 | 50,00 | DPMPPKB | |
| | | | | | | | Pendampingan Pelaksanaan TMND | TMND/TMMD | 12 | 453.129.660 | 1 | 226.564.830 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 226.564.830 | 8,33 | 50,00 | | |
| 6 | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 03 | Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari | Persentase nagari yang dibina (%) | 50 | 2.740.985.436 | 12 | 1.123.414.646 | 12 | 578.413.665 | 0 | 26.599.550 | - | 4,60 | 12 | 1.150.014.196 | 24,00 | 41,96 | DPMPPKB |
| | | | | | | | Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari | Pemilihan 105 Nagari | 182 | 1.427.612.400 | 144 | 713.806.200 | 0 | 50.114.000 | - | 3.185.000 | - | 6,36 | 144 | 716.991.200 | 79,12 | 50,22 | |
| | | | | | | | Pemilihan Bamus dan PAW Bamus | | 182 | | 144 | | 36 | | 11 | | 30,56 | 155 | | 85,16 | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 04 | Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari | monev Keuangan Nagari | 182 | 362.792.100 | 90 | 181.396.050 | 137 | 70.225.000 | 40 | 20.969.550 | 29,20 | 29,86 | 130 | 202.365.600 | 71,43 | 55,78 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 13 | Penyusunan Ranperda dan peraturan Bupati Pesisir Selatan | 2 Rancangan Perda | 2 | 168.012.800 | 0 | 48.049.878 | 2 | 84.006.400 | - | - | - | 0 | 48.049.878 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 4 Perbub | | 24 | | 12 | | 12 | | - | - | - | 12 | | 50,00 | 28,60 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 14 | Penyelesaian Konflik Pemerintahan Nagari | Jumlah konflik yang ditangani | 150 | 98.544.300 | 50 | 32.848.100 | 30 | 54.965.000 | 4 | 2.445.000 | 13,33 | 4,45 | 54 | 35.293.100 | 36,00 | 35,81 | |
| | | | | | | 23 | 08 | Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari | Pelatihan Siskeudes (X orang) | 3 | 285.090.000 | 0 | - | 70 | 95.030.000 | 70 | 69.250.000 | 100,00 | 72,87 | 70 | 69.250.000 | 2333,33 | 24,29 |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 20 | Pemutakhiran Data Profil dan Data IDM Nagari | 182 data IDM | 364 | 242.805.000 | 182 | 69.250.000 | 90 | 121.402.500 | 60 | 33.879.700 | 66,67 | 27,91 | | 69.250.000 | 0,00 | 28,52 | |
| | | | | | | | | 182 data IDM | 728 | | 182 | | 182 | | - | - | - | 182 | | 25,00 | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 23 | 21 | Fasilitasi Pembinaan RPJM dan RKP Nagari | 182 Nagari | 910 | 156.128.836 | 546 | 78.064.418 | 78 | 44.830.765 | - | - | - | 546 | 78.064.418 | 60,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan BatasNagari | Jumlah Kecamatan yang difasilitasi | 15 | 173.520.000 | | | 57.840.000 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | persentase LPM yang aktif membina kelompok | 70,43 | 3.612.958.172 | 70 | 1.353.737.212 | 1 | 1.055.939.079 | 0 | 68.531.600 | - | 6,49 | 70 | 1.422.268.812 | 99,39 | 39,37 | DPMPPKB |
| | | | | | | | Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD) | Rakor P3MD (Kali) | 36 | 220.730.162 | 12 | 110.365.081 | 6 | 70.949.000 | 1 | 12.340.450 | 16,67 | 17,39 | 13 | 122.705.531 | 36,11 | 55,59 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat Nagari (LPMN) | Rapat 1 kali | 3 | 40.599.678 | 0 | - | 1 | 13.533.226 | 0 | 1.947.700 | - | 14,39 | | 1.947.700 | 0,00 | 55,59 | |
| | | | | | | | | Pelatihan 3 Kali | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0,00 | 4,80 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Fasilitasi dan Monev KKN | Pembinaan Mahasiswa KKN (jumlah Perguruan Tinggi) | 12 | 67.365.000 | 0 | - | 4 | 22.455.000 | 1 | 1.325.000 | 25,00 | 5,90 | 1 | 1.325.000 | 8,33 | 1,97 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 10 | Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten | Orientasi PKK | 36 | 2.368.129.732 | 18 | 1.184.064.866 | 1 | 521.845.053 | 0 | 48.878.450 | - | 9,37 | 18 | 1.232.943.316 | 50,00 | 52,06 | |
| | | | | | | | | Jambore PKK | 36 | | 18 | | 2 | | 0 | | - | | 18 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | HKG PKK | 36 | | 18 | | 1 | | 0 | | - | | 18 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Lomba Dasa wisma | 36 | | 18 | | 1 | | 1 | | 100,00 | 19 | | 52,78 | | | |
| | | | | | | | | Pembinaan PKK Kec | 90 | | 45 | | 15 | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | Lomba Posyandu | 36 | | 18 | | 1 | | 0 | | - | | 18 | | 50,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 11 | Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi | Rakor BP-SPAM | 20 | 185.460.000 | 2 | 59.307.265 | 1 | 61.820.000 | 0 | 4.040.000 | - | 6,54 | 2 | 63.347.265 | 10,00 | 34,16 | |
| | | | | | | | | Monev 105 BP-SPAMS | 142 | | 78 | | 78 | | 40 | | 51,28 | 118 | | 83,10 | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu Integrasi | Pelatihan Posyandu Integrasi | 3 | 197.735.600 | 0 | - | 1 | 98.867.800 | 0 | 1.097.700 | - | 1,11 | 0 | 1.097.700 | 0,00 | 0,56 | |
| | | | | | | | | Lomba Posyandu integrasi | 3 | | 0 | | 78 | | 1 | | 1,28 | 1 | | 33,33 | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Memasyarakatkan Olah Raga diDesa/ Nagari | Lomba Tingkat Kec | 3 | 287.060.000 | 0 | - | 1 | 143.530.000 | 0 | 775.000 | - | 0,54 | 0 | 775.000 | 0,00 | 0,27 | |
| | | | | | | | | Lomba Tongkat Kab | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | - | | 0 | | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 24 | 08 | Pembinaan Lembaga Adat dan sosial Budaya | Pembinaan KAN | 74 | 245.878.000 | 0 | - | 37 | 122.939.000 | 0 | 2.665.000 | - | 2,17 | 0 | 2.665.000 | 0,00 | 1,08 | |
| | | | | | | | | Sosialisasi Nagari Adat | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | - | | 0 | | 0,00 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|---|---|--|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|-------|----------|--|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 8 | 1 | 02 | 07 | 01 | 22 | Program Pengembangan Kawasan Perdesaan | persentase kawasan pedesaan yang dikembangkan (%) | 40 | 487.500.000 | 10 | 120.273.000 | 5 | 162.500.000 | 0 | 8.375.000 | - | 5,15 | 10 | 128.648.000 | 25,00 | 26,39 | DPMDPPKB | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 22 | 02 | Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari | Pelatihan UPK | 3 | 210.825.000 | 0 | - | 1 | 70.275.000 | 1 | 10.680.000 | 100,00 | 15,20 | 1 | 10.680.000 | 33,33 | 5,07 | |
| | | | | | | | | Rakor | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | | - | | 0 | | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 22 | 03 | Pembinaan Potensi Kawasan Perdesaan /Nagari | Money 3 Kawasan | 5 | 276.675.000 | 3 | 120.273.000 | 3 | 92.225.000 | 1 | 8.375.000 | 33,33 | 9,08 | 4 | 128.648.000 | 80,00 | 46,50 | |
| | | | | | | | | Pembentukan 4 kawasan baru | 5 | | 1 | | 4 | | 0 | | - | | 1 | | 20,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,79 | 42,29 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | |
| VIII | | | | | | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 39.328.025.449 | | 6.749.609.564 | | 7.272.406.545 | | 25.137.200 | | | | 6.401.792.414 | | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 08 | 01 | 27 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana | Persentase klinik yang terpenuhi sarprasnya | 80 | 35.155.903.599 | 74 | 5.946.936.291 | 2 | 6.401.221.445 | 0 | - | - | - | 74 | 5.946.936.291 | 92,50 | 16,92 | DPMDPPKB | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik KB) | Jumlah sarpras yang diadakan (paket) | 12 | 4.383.000.000 | 6 | 1.461.000.000 | 2 | 1.233.000.000 | 0 | - | - | - | 6 | 1.461.000.000 | 50,00 | 33,33 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik KB) | Kegiatan DAK yang ditunjang (keg) | 6 | 210.309.000 | 3 | 45.546.291 | 1 | 35.051.500 | 0 | - | - | - | 3 | 45.546.291 | 50,00 | 21,66 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 03 | Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik KB) | beroperasinya balai penyuluh (bin) | 72 | 22.201.950.000 | 36 | 4.440.390.000 | 12 | 1.284.085.932 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 4.440.390.000 | 54,17 | 20,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 05 | Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK NON Fisik) | Biaya operasional pendistribusian (bin) | 72 | 106.416.573 | 36 | - | 12 | 35.472.191 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | - | 54,17 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 06 | Operasional Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik) | Pembinaan Kampung KB (bin) | 36 | 4.513.992.906 | 0 | - | 12 | 1.504.664.302 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 07 | Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) | Bilboard | 10 | 89.392.560 | 0 | - | 5 | 229.797.520 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Roul Up Bliner | 150 | | 0 | | 70 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 08 | Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) | Operasional PKB, Klinik KB dan BP4 (bin) | 36 | 689.392.560 | 0 | - | 12 | 1.092.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 27 | 10 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Keluarga Berencana | BKB KIT | 112 | 2.961.450.000 | 0 | - | 112 | 987.150.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | BKL KIT | 50 | | 0 | | 50 | | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 2 | 1 | 02 | 07 | 01 | 29 | Program Penguatan Kelembagaan | persentase kelembagaan KB yang telah ada (%) | 10 | 1.198.186.200 | 5 | 234.593.550 | 5 | 414.504.150 | 0 | - | - | - | 5 | 234.593.550 | 50,00 | 19,58 | DPMDPPKB | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 29 | 02 | Membangun jaringan Kemitraan dengan institusi peduli kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga | Pemilihan KB Lestari | 6 | 469.187.100 | 3 | 234.593.550 | 1 | 171.504.450 | 0 | - | - | - | 3 | 234.593.550 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | Pemilihsn Keluarga Harmonis | 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | 3 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Jambore Saka Kencana | 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | 3 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | | Perbaikan alat alat kerja kantor | 6 | | 3 | | 5 | | 0 | | | | 3 | | 50,00 | | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 29 | 02 | Pembinaan Kampung KB | Pembinaan Kampung KB | 105 | 205.792.500 | 0 | - | 35 | 68.597.500 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 29 | 07 | Pemilihan Duta Gendre | Pemilihan Duta Gender Kabupaten | 3 | 523.206.600 | 0 | - | 1 | 174.402.200 | 1 | 105.615.950 | 100,00 | 60,56 | 1 | 105.615.950 | 33,33 | 20,19 | |
| | | | | | | | | Pemilihan Duta Gender TK Propinsi | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 3 | 1 | 02 | 07 | 01 | 31 | Program Pelayanan Keluarga Berencana | Persentase KB Wanita | 80 | 1.881.075.000 | 65 | 212.994.023 | 10 | 238.656.800 | 0 | 7.268.550 | - | 3,05 | 65 | 220.262.573 | 81,25 | 11,71 | DPMDPPKB | |
| | 1 | 02 | 07 | 01 | 31 | 04 | Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bahangkara/PKK dan Jambore | IUD | 600 | 1.881.075.000 | 300 | 212.994.023 | 150 | 238.656.800 | 47 | 7.268.550 | 31,33 | 3,05 | 347 | 220.262.573 | 57,83 | 11,71 | |
| | | | | | | | | MOW | 300 | | 250 | | 50 | | 11 | | 22,00 | | 261 | | 87,00 | | |
| | | | | | | | | MOP | 600 | | 300 | | 100 | | 0 | | - | | 300 | | 50,00 | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|--|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Pencan Bhakti IBI KB | 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | - | | 3 | | 50,00 | | | |
| | | | | | | | Pencan Bhakti TNI KB Kes | 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | - | | 3 | | 50,00 | | | |
| | | | | | | | Pencan Bhakti PKK KB Kes | 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | - | | 3 | | 50,00 | | | |
| 4 | 1 | 02 | 07 | 01 | 15 | | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Persentase KB Wanita | 80 | 165.284.250 | 65 | - | 10 | 55.094.750 | 0 | 17.868.650 | - | 32,43 | 65 | 17.868.650 | 81,25 | 0,00 | DPMDPPKB |
| | | | | | | | Penyuluhan Kesehatan reproduksi remaja | Penyuluhan PIK R yang dilakukan (bln) | 36 | 165.284.250 | 0 | - | 12 | 55.094.750 | 3 | 25,00 | - | 3 | | 8,33 | 0,00 | | |
| 5 | | | | | | | Program Keluarga Berencana | Rasio Apseptor KB (%) | 71,60 | 677.576.400 | 71,40 | 338.788.200 | 0,10 | 112.929.400 | 0 | - | - | 71,4 | | 99,72 | 0,00 | DPMDPPKB | |
| | | | | | | | Pembinaan Keluarga Berencana | Pembinaan yang dilakukan (Bln) | 72 | 677.576.400 | 36 | 338.788.200 | 12 | 112.929.400 | 3 | 25,00 | - | 39 | | 54,17 | 0,00 | | |
| 6 | | | | | | | Program Kerjasama Informasi dan Media Masa | Persentase kegiatan pembangunan yang dipublikasikan (%) | 80 | 250.000.000 | 60 | 16.297.500 | 10 | 50.000.000 | 0 | - | - | 60 | | 75,00 | 0,00 | DPMDPPKB | |
| | | | | | | | Publikasi dan Promosi Daerah | Publikasi Daerah dan pestifal langkisau | 6 | 250.000.000 | 3 | 16.297.500 | 1 | 50.000.000 | 0 | - | - | 3 | | 50,00 | 0,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,95 | 32,21 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | | |
| IX | | | | | | | URUSAN PERHUBUNGAN | | 90.581.633.596 | | 30.628.654.756 | | 13.096.773.389 | | 1.668.276.942 | | | | 32.296.931.698 | | | | |
| 1 | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 69.4285714 | 7.806.354.500 | 35 | 1.906.560.189 | 12 | 970.957.660 | 3,00 | 128.519.706 | 25,93 | 13,24 | 38 | 2.035.079.895 | 54,32 | 26,07 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 72 | 458.693.000 | 36 | 312.607.381 | 12 | 149.400.000 | 3,00 | 17.779.237 | 25,00 | 11,90 | 39 | 330.386.618 | 54,17 | 72,03 | |
| | | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 72 | 1.307.900.000 | 36 | 490.510.000 | 12 | 90.455.500 | 3,00 | 21.205.500 | 25,00 | 23,44 | 39 | 511.715.500 | 54,17 | 39,12 | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | tersedianya jasa administrasi keuangan | 72 | 390.400.000 | 36 | 241.859.000 | 12 | 156.500.000 | 3,00 | 27.300.000 | 25,00 | 17,44 | 39 | 269.159.000 | 54,17 | 68,94 | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | tersedianya jasa kebersihan kantor | 72 | 276.581.000 | 36 | 82.726.500 | 12 | 45.057.000 | 3,00 | 6.462.500 | 25,00 | 14,34 | 39 | 89.189.000 | 54,17 | 32,25 | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | 72 | 1.307.900.000 | 36 | 40.970.500 | 12 | 28.000.000 | 3,00 | 1.800.000 | 25,00 | 6,43 | 39 | 42.770.500 | 54,17 | 3,27 | |
| | | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor | 72 | 249.965.100 | 36 | 111.273.501 | 12 | 83.288.635 | 3,00 | 6.750.599 | 25,00 | 8,11 | 39 | 118.024.100 | 54,17 | 47,22 | |
| | | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 72 | 515.573.400 | 36 | 172.936.120 | 12 | 44.362.365 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39 | 172.936.120 | 54,17 | 33,54 | |
| | | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 72 | 63.682.000 | 36 | 31.581.028 | 12 | 19.401.560 | 3,00 | 472.270 | 25,00 | 2,43 | 39 | 32.053.298 | 54,17 | 50,33 | |
| | | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 72 | 122.400.000 | 36 | 48.320.000 | 12 | 14.500.000 | 3,00 | 2.270.000 | 25,00 | 15,66 | 39 | 50.590.000 | 54,17 | 41,33 | |
| | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makanan dan minuman | 72 | 202.150.000 | 36 | 84.166.700 | 12 | 50.475.000 | 3,00 | 4.229.600 | 25,00 | 8,38 | 39 | 88.396.300 | 54,17 | 43,73 | |
| | | | | | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah | 72 | 1.419.650.000 | 36 | 453.037.200 | 12 | 39.450.000 | 3,00 | 11.000.000 | 25,00 | 27,88 | 39 | 464.037.200 | 54,17 | 32,69 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|-----|----------------|-------|---------------|----|---------------|------|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | 72 | 1.062.200.000 | 36 | 353.010.000 | 12 | 100.500.000 | 3,00 | 16.905.000 | 25,00 | 16,82 | 39 | 369.915.000 | 54,17 | 34,83 | |
| | | | | | | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Jumlah laporan (dok) | 36 | 351.260.000 | 18 | 169.851.590 | 6 | 110.567.600 | 3,00 | 6.345.000 | 50,00 | 5,74 | 21 | 176.196.590 | 58,33 | 50,16 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS (bln) | 72 | 78.000.000 | 36 | 39.000.000 | 12 | 26.000.000 | 3,00 | 4.000.000 | 25,00 | 15,38 | 39 | 43.000.000 | 54,17 | 55,13 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersediainya Jasa Pengamanan Kantor | 36 | 39.000.000 | 0 | - | 12 | 13.000.000 | 3,00 | 2.000.000 | 25,00 | 15,38 | 3 | 2.000.000 | 8,33 | 5,13 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarpras pendukung bagi aparatur (bln) | 72 | 3.059.059.000 | 36,00 | 1.585.847.483 | 12 | 785.356.129 | 3,00 | 54.743.826 | 25,00 | 6,97 | 39,00 | 1.640.591.309 | 54,17 | 53,63 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pengadaan meubler (Paket) | Jumlah Meubler (Paket) | 4 | 800.000.000 | 1 | 583.162.170 | 1 | 59.675.130 | - | - | - | - | 1 | 583.162.170 | 25,00 | 72,90 | |
| | | | | | | pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | terpeliharanya gedung kantor | 72 | 508.500.000 | 36 | 298.597.527 | 12 | 60.200.000 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39 | 298.597.527 | 54,17 | 58,72 | |
| | | | | | | pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional | 72 | 1.646.309.000 | 36 | 704.087.786 | 12 | 355.105.000 | 3 | 52.972.576 | 25,00 | 14,92 | 39 | 757.060.362 | 54,17 | 45,99 | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit) | 2 | 104.250.000 | 0 | - | 2 | 104.250.000 | 0 | 1.771.250 | - | 1,70 | 0 | 1.771.250 | 0,00 | 1,70 | |
| | | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (unit) | 1 | 206.125.999 | 0 | - | 1 | 206.125.999 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 3 | | | | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah pelaksanaan hari besar perhubungan | 1 | 47.385.000 | - | - | 1 | 47.385.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan hari besar perhubungan | 1 | 47.385.000 | 0 | - | 1 | 47.385.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 4 | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100 | 127.833.800 | 100 | 127.833.800 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 127.833.800 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (PDH) | Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur (paket) | 1 | 127.833.800 | 1 | 127.833.800 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 127.833.800 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana (%0 | 100 | 250.287.997 | 100 | 250.287.997 | 0 | - | - | - | - | - | 100,00 | 250.287.997 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Laporan triwulan hasil monev (dok) | 12 | 250.287.997 | 12 | 250.287.997 | 0 | - | 0 | - | - | - | 12,00 | 250.287.997 | 100,00 | 100,00 | |
| 6 | | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | JPersentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%) | 75 | 12.133.168.954 | 36 | 6.066.584.477 | 14 | 1.016.535.000 | - | 3.400.000 | - | 0,33 | 36,00 | 6.069.984.477 | 48,00 | 50,03 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK) | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/beli (paket) | 6 | 12.133.168.954 | 3 | 6.066.584.477 | 1 | 977.500.000 | 0 | - | - | - | 3,00 | 6.066.584.477 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK) | terlaksananya kegiatan DAK (Keg) | 6 | 250.000.000 | 3 | 83.033.500 | 1 | 39.035.000 | 0 | 3.400.000 | - | 8,71 | 3,00 | 86.433.500 | 50,00 | 34,57 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|--|--|--|--|--|---|-------|----------------|-------|----------------|----|---------------|------|---------------|-----------------|-------|------------|----------------|---------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 7 | | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik (%) | 55,45 | 1.306.056.400 | 31,45 | 538.499.620 | 8 | 126.293.000 | 0,00 | - | - | - | 31,45 | 538.499.620 | 56,72 | 41,23 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas | Jumlah alat keselamatan lalu lintas yang terpelihara | 18 | 687.171.480 | 5 | 229.057.160 | 2 | 49.966.000 | 0 | - | - | - | 5,00 | 229.057.160 | 27,78 | 33,33 | |
| | | | | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) | Jumlah pos retribusi (TPR) yang dipelihara (unit) | 7 | 618.884.920 | 4 | 309.442.460 | 2 | 76.327.000 | 0 | - | - | - | 4,00 | 309.442.460 | 57,14 | 50,00 | |
| 8 | | | | | | Program peningkatan pelayanan angkutan | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (%) | 65 | 8.790.303.860 | 50,00 | 3.443.233.783 | 5 | 758.145.100 | - | 148.792.712 | - | 19,63 | 50,00 | 3.592.026.495 | 76,92 | 40,86 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Penunjang Kegiatan WTN | Fasilitas yang dilakukan (keg) | 5 | 1.000.000.000 | 2 | 886.356.600 | 1 | 34.770.000 | - | 2.620.000 | - | 7,54 | 2,00 | 888.976.600 | 40,00 | 88,90 | |
| | | | | | | Pengawasan dan Pengendalian LLAJ | biaya operasional Pengawasan dan Pengendalian LLAJ (bln) | 72 | 1.579.879.500 | 36 | 495.026.470 | 12 | 118.145.000 | 3 | 26.151.900 | 25,00 | 22,14 | 39,00 | 521.178.370 | 54,17 | 32,99 | |
| | | | | | | Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut | Biaya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut (bln) | 72 | 1.220.761.500 | 36 | 379.587.903 | 12 | 96.416.400 | 3 | 17.292.400 | 25,00 | 17,94 | 39,00 | 396.880.303 | 54,17 | 32,51 | |
| | | | | | | Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut | Jumlah masyarakat yang dibina | 500 | 712.792.120 | 200 | 271.946.090 | 50 | 57.385.000 | 0 | 11.839.662 | - | 20,63 | 200,00 | 283.785.752 | 40,00 | 39,81 | |
| | | | | | | Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas | Fasilitas yang dilakukan (keg) | 5 | 345.000.000 | 2 | 56.868.650 | 1 | 38.511.000 | 1 | 25.763.750 | 100,00 | 66,90 | 3,00 | 82.632.400 | 60,00 | 23,95 | |
| | | | | | | Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa) | Fasilitas yang dilakukan (keg) | 5 | 225.000.000 | 2 | 44.959.100 | 1 | 29.273.700 | 0 | 1.082.000 | - | 3,70 | 2,00 | 46.041.100 | 40,00 | 20,46 | |
| | | | | | | Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan | Biaya operasional bus sekolah (bln) | 72 | 2.068.836.040 | 36 | 748.030.470 | 12 | 277.585.000 | 3 | 36.522.500 | 25,00 | 13,16 | 39,00 | 784.552.970 | 54,17 | 37,92 | |
| | | | | | | Pelayanan Terminal dan Perparkiran | Operasional pelayanan terminal dan perparkiran (bln) | 72 | 1.638.034.700 | 36 | 560.458.500 | 12 | 106.059.000 | 3 | 27.520.500 | 25,00 | 25,95 | 39,00 | 587.979.000 | 54,17 | 35,90 | |
| 9 | | | | | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%) | 75 | 7.300.000.000 | 36 | 30.000.000 | 14 | 1.075.599.000 | - | 5.514.000 | - | 0,51 | 36,00 | 35.514.000 | 48,00 | 0,49 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pembangunan Pagar, Taman Kantor dan Papan Nama (Merk Dinas) | sarana yang dibangun (paket) | 1 | 300.000.000 | 1 | 30.000.000 | | | 0 | - | | | 1,00 | 30.000.000 | 100,00 | 10,00 | |
| | | | | | | Pengembangan Pembangunan Pelabuhan | Pelabuhan/ Dermaga / Tambatan Perahu yang dibangun (unit) | 3 | 7.000.000.000 | - | - | 1 | 1.075.599.000 | 0 | 5.514.000 | - | 0,51 | 0,00 | 5.514.000 | 0,00 | 0,08 | |
| 10 | | | | | | Program Pengendalian Pengamanan Lalu lintas | Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas (%) | 75 | 41.640.000.000 | 50 | 11.580.561.171 | 10 | 7.577.854.000 | 2,00 | 1.215.733.698 | 20,00 | 16,04 | 52,00 | 12.796.294.869 | 69,33 | 30,73 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pembangunan Penerangan jalan Umum | Jumlah pembangunan penerangan jalan umum (paket) | 60 | 28.440.000.000 | 31 | 6.617.193.074 | 10 | 2.888.369.000 | 0 | 1.100.000 | - | 0,04 | 31,00 | 6.618.293.074 | 51,67 | 23,27 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum | Biaya pemeliharaan PJU (bln) | 48 | 13.200.000.000 | 12 | 4.963.368.097 | 12 | 4.319.125.000 | 3 | 1.209.583.698 | 25,00 | 28,01 | 15,00 | 6.172.951.795 | 31,25 | 46,76 | |
| | | | | | | Pengadaan Rambu-Rambu RPPJ (paket) | Jumlah Rambu RPPJ (paket) | 3 | 250.000.000 | - | - | 1 | 73.710.600 | 0 | 1.350.000 | - | 1,83 | 0,00 | 1.350.000 | 0,00 | 0,54 | |
| | | | | | | Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas | Jumlah Alat Keselamatan (paket) | 6 | 889.948.200 | - | - | 2 | 296.649.400 | 0 | 3.700.000 | - | 1,25 | 0,00 | 3.700.000 | 0,00 | 0,42 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|---|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| 11 | | | | | | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Jumlah Kendaraan yang layak jalan (unit) | 533.295 | 5.870.431.045 | 115.895 | 4.290.014.997 | 7200 | 249.496.000 | 0 | 37.023.000 | - | 14,84 | 115895,00 | 4.327.037.997 | 21,73 | 73,71 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan yang dilayani (unit) | 470.000 | 2.572.033.840 | 22.100 | 991.617.792 | 8000 | 249.496.000 | 3 | 37.023.000 | 0,04 | 14,84 | 22103,00 | 1.028.640.792 | 4,70 | 39,99 | | |
| | | | | | | Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB | Jumlah Pengadaan alat uji mekanis PKB | 1 | 3.298.397.205 | 1 | 3.298.397.205 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,00 | 3.298.397.205 | 100,00 | 100,00 | | |
| 12 | | | | | | Program Pengembangan data/ Informasi | Persentase kegiatan pembangunan yang dipublikasikan (%) | 90 | 150.000.000 | 75 | - | 10 | 34.980.000 | - | - | - | - | 75 | - | - | 83 | - | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Penyebarluasan informasi pembangunan | Jumlah publikasi (kali) | 3 | 150.000.000 | - | - | 1 | 34.980.000 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | |
| 13 | | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | 72 | 2.100.753.040 | 36 | 809.231.239 | 12 | 454.172.500 | 3 | 74.550.000 | 25,00 | 16,41 | 39,00 | 883.781.239 | 54,17 | 42,07 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | Operasional pelayanan penerimaan retribusi (bln) | 72 | 2.100.753.040 | 36 | 809.231.239 | 12 | 454.172.500 | 3 | 74.550.000 | 25,00 | 16,41 | 39,00 | 883.781.239 | 54,17 | 42,07 | | |
| Rata-RataCapaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,98 | 42,99 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | |
| X | | | | | | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 24.703.400.696 | | 5.804.893.094 | | 9.999.847.875 | | 313.054.880 | | | | 6.040.569.974 | | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 10 | 01 | 20 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | memenuhi pelayanan Administrasi perkantoran (bln) | 60 | 1.674.524.000 | 24 | 159.401.000 | 12 | 540.997.260 | 3 | 60.821.638 | 25,00 | 11,24 | 27 | 220.222.638 | 45,00 | 13,15 | Dinas Kominfo | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya listrik, air dan telfon (bln) | 60 | 678.620.000 | 24 | 39.952.000 | 12 | 57.900.000 | 3 | 16.127.822 | 25,00 | 27,85 | 27 | 56.079.822 | 45,00 | 8,26 | | |
| | 1 | 02 | 1 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terselenggaranya jasa administrasi keuangan (bln) | 60 | 342.975.000 | 24 | 46.350.000 | 12 | 106.400.000 | 3 | 13.420.000 | 25,00 | 12,61 | 27 | 59.770.000 | 45,00 | 17,43 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terselenggaranya jasa kebersihan kantor (bln) | 60 | 206.404.000 | 24 | 30.035.000 | 12 | 44.241.945 | 3 | 9.058.856 | 25,00 | 20,48 | 27 | 39.093.856 | 45,00 | 18,94 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja (bln) | 60 | 198.889.000 | 24 | 5.892.000 | 12 | - | 0 | - | - | - | 24 | 5.892.000 | 40,00 | 2,96 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bln) | 60 | 247.636.000 | 24 | 37.172.000 | 12 | 65.524.815 | 3 | 22.214.960 | 25,00 | 33,90 | 27 | 59.386.960 | 45,00 | 23,98 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bln) | 60 | 520.431.000 | 24 | 37.814.000 | 12 | 43.437.500 | 3 | 1.725.000 | 25,00 | 3,97 | 27 | 39.539.000 | 45,00 | 7,60 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya peralatan penerangan (bln) | 60 | 98.457.000 | 24 | 7.498.000 | 12 | 14.115.000 | 3 | 4.615.000 | 25,00 | 32,70 | 27 | 12.113.000 | 45,00 | 12,30 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bln) | 60 | 132.650.000 | 24 | 13.785.000 | 12 | 20.750.000 | 3 | 260.000 | 25,00 | 1,25 | 27 | 14.045.000 | 45,00 | 10,59 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman (bln) | 60 | 189.950.000 | 24 | 21.630.000 | 12 | 35.750.000 | 3 | 9.372.500 | 25,00 | 26,22 | 27 | 31.002.500 | 45,00 | 16,32 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat ke luar daerah (bln) | 60 | 866.650.000 | 24 | 144.977.000 | 12 | 42.775.000 | 3 | 10.525.000 | 25,00 | 24,61 | 27 | 155.502.000 | 45,00 | 17,94 | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat dalam daerah (bln) | 60 | 200.000.000 | 24 | 62.450.000 | 12 | 64.200.000 | 3 | 10.800.000 | 25,00 | 16,82 | 27 | 73.250.000 | 45,00 | 36,63 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 01 | 22 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | jenis dokumen perencanaan dan laporan (dok) | 30 | 150.000.000 | 18 | 39.082.000 | 6 | 45.903.000 | 2 | 7.704.000 | 33,33 | 16,78 | 20 | 46.786.000 | 66,67 | 31,19 | |
| 2 | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | ketersediaan sarpras kantor bagi aparatur | 60 | 1.192.220.000 | 24 | 597.468.000 | 12 | 362.728.000 | 12 | 79.987.850 | 100,00 | 22,05 | 36 | 677.455.850 | 60,00 | 56,82 | Dinas Kominfo |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpelihanya perlengkapan kantor (bln) | 60 | 290.000.000 | 24 | 62.050.000 | 12 | 20.500.000 | 3 | 2.640.000 | 25,00 | 12,88 | 27 | 64.690.000 | 45,00 | 22,31 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | terpelihanya kendaraan dinas (bln) | 60 | 80.000.000 | 24 | 44.069.000 | 12 | 147.010.000 | 300% | 30.567.850 | 25,00 | 20,79 | 2700% | 74.636.850 | 45,00 | 93,30 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | 82 | Pengadaan kendaraan roda dua | Sepeda motor (unit) | 2 | 42.220.000 | 2 | 42.220.000 | 0 | - | 0 | - | | | 2 | 42.220.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 02 | 84 | Pengadaan Peralatan kantor | Peralatan yang dibeli (paket) | 5 | 780.000.000 | 2 | 449.129.000 | 1 | 195.218.000 | 0,5 | 46.780.000 | 50,00 | 23,96 | 250% | 495.909.000 | 50,00 | 63,58 | |
| 3 | 1 | 02 | 10 | 01 | 18 | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Jumlah kerjasama dengan media massa | 160 | 1.386.322.800 | 77 | 351.528.000 | 27 | 333.732.600 | 27 | 19.678.250 | 100,00 | 5,90 | 104 | 371.206.250 | 65,00 | 26,78 | Dinas Kominfo |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 18 | 05 | Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website | Jumlah berita dan artikel yang diterbitkan (buah) | 10.140 | 575.362.800 | 2.028 | 81.208.000 | 3.000 | 191.787.600 | 500 | 16.203.250 | 16,67 | 8,45 | 2528 | 97.411.250 | 24,93 | 16,93 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 18 | 07 | Publikasi dan Promosi Daerah | Jumlah publikasi yang dilaksanakan (paket) | 36 | 810.960.000 | 8 | 270.320.000 | 8 | 141.945.000 | 1 | 3.475.000 | 12,50 | 2,45 | 9 | 273.795.000 | 25,00 | 33,76 | |
| 4 | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | | Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi | Persentase informasi publik yang mudah diakses (%) | 95 | 1.444.835.000 | 85 | 1.054.389.620 | 3 | 2.573.556.817 | 9 | 79.624.392 | 300,00 | 3,09 | 94 | 1.134.014.012 | 98,95 | 78,49 | Dinas Kominfo |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 14 | Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina (unit) | 60 | 112.357.000 | 15 | 57.221.000 | 15 | 96.432.000 | 0 | 1.224.750 | - | 1,27 | 15 | 58.445.750 | 25,00 | 52,02 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | | Operasional Penerangan Keliling Pameran dan Posko Informasi | Biaya operasional penerangan keliling (bln) | 60 | 63.519.000 | 24 | 67.052.000 | 12 | 56.583.000 | 3 | 6.024.850 | 25,00 | 10,65 | 27 | 73.076.850 | 45,00 | 115,05 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 19 | Operasional LPPL Radio Langkisau FM | beroperasinya Radio Langkisau (bln) | 60 | 273.706.000 | 24 | 371.022.000 | 12 | 369.715.000 | 3 | 42.029.042 | 25,00 | 11,37 | 27 | 413.051.042 | 45,00 | 150,91 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 19 | Operasional Pelayanan Informasi Publik | biaya operasional pelayanan informasi publik (bln) | 60 | 195.253.000 | 24 | 94.620 | 12 | 226.882.500 | 3 | 30.345.750 | 25,00 | 13,38 | 27 | 30.440.370 | 45,00 | 15,59 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 11 | Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi Kab.Pesisir Selatan | Masterplan TIK (dokumen) | 1 | 800.000.000 | 0 | 559.000.000 | 1 | 213.473.654 | - | - | - | - | 0 | 559.000.000 | 0,00 | 69,88 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 15 | 07 | Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika | Jumlah regulasi bid.kominfo yang diterbitkan (regulasi) | 6 | 202.090.000 | 2 | 56.278.000 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 56.278.000 | 33,33 | 27,85 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 18 | Pembangunan infrastruktur TIK Kab.Pessel | infrastruktur TIK yang dibangun (paket) | 2 | 3.134.071.326 | - | - | 1 | 1.567.035.663 | 0 | 11.457.450 | 11,00 | 0,73 | 11% | 11.457.450 | 5,50 | 0,37 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 15 | 08 | Pembuatan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah regulasi yang disusun (aturan) | 5 | 146.712.000 | - | - | 1 | 43.435.000 | 0 | 3.184.200 | 11,00 | 7,33 | 0,11 | 3.184.200 | 2,20 | 2,17 | |
| 5 | 1 | 02 | 10 | 01 | 17 | | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | Persentase OPD yang memiliki SDM TIK (%) | 100 | 234.685.000 | 50 | - | 20 | 117.342.500 | 9 | - | 45,00 | - | 59 | - | 59,00 | 0,00 | Dinas Kominfo |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 17 | 01 | Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi | Jumlah aparatur yang dilatih (orang) | 360 | 234.685.000 | 180 | - | 90 | 117.342.500 | - | - | - | - | 180 | - | 50,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---------------------------|----|-----|----|-----|----|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|---------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 6 | | | | | | Program Penyelenggaraan e-Government | Persentase cakupan nagari yang terintegrasi smartcity (%) | 100 | 18.770.813.896 | 100 | 3.642.106.474 | 100 | 6.071.490.698 | 100 | 72.942.750 | 100,00 | 1,20 | 100 | 3.637.671.224 | 100,00 | 19,38 | Dinas Kominfo |
| | | | | | | | Persentase cakupan PD yang terintegrasi smartcity (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | Persentase cakupan puskesmas yang terintegrasi smartcity (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 20 | 02 | Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik | 50 | 340.894.000 | 5 | - | 15 | 550.612.000 | - | 54.311.700 | - | 9,86 | 5 | 54.311.700 | 10,00 | 15,93 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 20 | 03 | Pengembangan Smart City | 48 | 14.296.605.896 | 12 | 3.574.151.474 | 12 | 3.574.151.474 | 3 | 9.208.050 | 25,00 | 0,26 | 15 | 3.583.359.524 | 31,25 | 25,06 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 20 | 03 | Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data TIK | 48 | 133.314.000 | 12 | 67.955.000 | 12 | 67.955.000 | 3 | 9.423.000 | 25,00 | 13,87 | 15 | 77.378.000 | 31,25 | 58,04 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 20 | 04 | Pembangunan Jaringan Pemda Mandiri FO | 2 | 4.000.000.000 | - | - | 1 | 1.878.772.224 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,32 | 32,44 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |
| XI | | | | | | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | 5.649.211.700 | | 4.324.208.862 | | 1.654.414.700 | | 158.113.572 | | | | | 4.464.703.034 | | | |
| 1 | 06 | 1 | 02 | 11 | 1 | 02 | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | 72 | 3.796.674.000 | 36 | 2.130.570.561 | 12 | 645.231.000 | 3 | 99.403.022 | 25,00 | 15,41 | 39 | 2.229.973.583 | 54,17 | 58,73 | DKUPP |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 1 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 72 | 402.100.000 | 36 | 165.615.462 | 12 | 76.800.000 | 3 | 16.065.872 | 25,00 | 20,92 | 39 | 181.681.334 | 54,17 | 45,18 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 72 | 630.000.000 | 36 | 298.742.000 | 12 | 107.400.000 | 3 | 18.600.000 | 25,00 | 17,32 | 39 | 317.342.000 | 54,17 | 50,37 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 72 | 693.685.000 | 36 | 346.842.500 | 12 | 162.243.000 | 3 | 21.098.000 | 25,00 | 13,00 | 39 | 367.940.500 | 54,17 | 53,04 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 72 | 207.102.300 | 33 | 106.999.165 | 12 | 78.064.000 | 3 | 9.089.500 | 25,00 | 11,64 | 36 | 116.088.665 | 50,00 | 56,05 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 72 | 198.786.700 | 36 | 99.094.800 | 12 | 24.046.000 | 3 | 3.735.000 | 25,00 | 15,53 | 39 | 102.829.800 | 54,17 | 51,73 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 11 | Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | 72 | 75.000.000 | 36 | 60.395.000 | 12 | 6.847.000 | 3 | 1.218.000 | 25,00 | 17,79 | 39 | 61.613.000 | 54,17 | 82,15 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 72 | 60.000.000 | 36 | 24.380.000 | 12 | 11.760.000 | 3 | 1.080.000 | 25,00 | 9,18 | 39 | 25.460.000 | 54,17 | 42,43 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 72 | 230.000.000 | 36 | 124.076.700 | 12 | 31.900.000 | 3 | 4.184.950 | 25,00 | 13,12 | 39 | 128.261.650 | 54,17 | 55,77 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 72 | 750.000.000 | 36 | 398.899.115 | 12 | 43.375.000 | 3 | 5.625.000 | 25,00 | 12,97 | 39 | 404.524.115 | 54,17 | 53,94 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 72 | 400.000.000 | 33 | 275.120.000 | 12 | 73.125.000 | 3 | 15.990.000 | 25,00 | 21,87 | 36 | 291.110.000 | 50,00 | 72,78 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|----|-----|----|-----|----|----|--|---|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----|-----------------|-------|------------|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 2 | 22 | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Tersedianya operasional untuk perencanaan dan pelaporan (bln) | 60 | 150.000.000 | 33 | 32.048.925 | 12 | 29.671.000 | 3 | 2.716.700 | 25,00 | 9,16 | 36 | 34.765.625 | 60,00 | 23,18 | |
| 2 | 1 | 1 | 02 | 11 | 02 | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (persentase) | 100 | 293.814.700 | 45 | 456.379.101 | 16 | 369.997.500 | 6 | 13.252.750 | 37,50 | 3,58 | 51 | 469.631.851 | 51,00 | 159,84 | DKUPP |
| | 1 | 1 | 02 | 11 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit) | 128 | 130.594.200 | 64 | 189.832.650 | 33 | 87.500.000 | 9 | - | 27,27 | - | 73 | 189.832.650 | 57,03 | 145,36 | |
| | 1 | 1 | 02 | 11 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bln) | 72 | 38.000.000 | 36 | 83.497.038 | 12 | 153.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 83.497.038 | 54,17 | 219,73 | |
| | 1 | 1 | 02 | 11 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional | Terpelihanya Kendaraan dinas (bln) | 72 | 110.165.500 | 36 | 173.984.413 | 12 | 118.387.500 | 3 | 12.452.750 | 25,00 | 10,52 | 39 | 186.437.163 | 54,17 | 169,23 | |
| | 1 | 1 | 02 | 11 | 02 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | Terpelihanya Perlengkapan gedung kantor (bln) | 72 | 15.055.000 | 36 | 9.065.000 | 12 | 10.610.000 | 3 | 800.000 | 25,00 | 7,54 | 39 | 9.865.000 | 54,17 | 65,53 | |
| 3 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan SDM aparatur | 50 | 283.139.000 | 18 | 100.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | 18 | 100.000.000 | 36,00 | 35,32 | DKUPP |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | jumlah ASN yang berkualitas (orang) | 24 | 283.139.000 | 9 | 100.000.000 | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 100.000.000 | 37,50 | 35,32 | |
| 4 | 02 | 1 | 02 | 11 | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Meningkatnya angka kunjungan wisata (org) | 15.640.917 | 1.275.584.000 | 8.936.767 | 1.637.259.200 | 2.801.850 | - | 0 | 27.838.400 | - | - | 8936767 | 1.665.097.600 | 57,14 | 130,54 | DKUPP |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | | 10 | Pelaksanaan Festival Langkisau | Festival yang digelar (keg) | 6 | 1.275.584.000 | 3 | 367.179.800 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 367.179.800 | 50,00 | 28,79 | |
| 5 | 02 | 1 | 02 | 11 | 15 | | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Jumlah UMKM yang mengkases permodalan ke lembaga keuangan (unit) | 1800 | 649.835.000 | 204 | 98.265.000 | 176 | 38.893.200 | 49 | 1.092.000 | 27,84 | 2,81 | 253 | 99.357.000 | 14,06 | 15,29 | DKUPP |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 15 | 01 | Penggunaan SKIP (sistem Informasi kredit program) KUR | Jumlah calon debitur potensi untuk dibiayai KUR kedalam SKIP (unit usaha) | 1800 | 649.835.000 | 204 | 98.265.000 | 176 | - | 49 | - | 27,84 | - | 253 | 98.265.000 | 14,06 | 15,12 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 15 | 08 | Fasilitasi pengembangan Usaha kecil menengah | Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah, | 5 | 116.679.600 | 0 | - | 1 | 38.893.200 | - | 1.092.000 | - | 2,81 | 0 | 1.092.000 | 0,00 | 0,94 | |
| 6 | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | | Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah | Persentase UMKM (%) | 96 | 5.414.840.000 | 97,50 | 577.613.700 | (0,50) | 214.730.100 | 0 | 12.827.200 | - | 5,97 | 97,5 | 590.440.900 | 101,56 | 10,90 | DKUPP |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 03 | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah | jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra (unit) | 880 | 361.240.400 | 0% | - | 30 | 90.310.100 | - | 6.763.450 | - | 7,49 | 0 | 6.763.450 | 0,00 | 1,87 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 06 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan (org) | 360 | 332.462.000 | 60 | 83.115.500 | 60 | 81.450.000 | 0 | - | - | - | 60 | 83.115.500 | 16,67 | 25,00 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 14 | Pendataan validasi data UMKM | dokumen database UMKM (dok) | 5% | 755.000.000 | 2 | 91.404.500 | 1 | 42.970.000 | 0 | 6.063.750 | - | 14,11 | 2 | 97.468.250 | 4000,00 | 12,91 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 16 | Penyelenggaraan bazar dan promosi produk UMKM | jumlah bazar yang diikuti (paket) | 6 | 940.218.000 | 2 | 156.703.000 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 156.703.000 | 33,33 | 16,67 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 17 | Bintek peningkatan Kapasitas SDM UMKM | Jumlah UMKM yang mengikuti bintek (org) | 400 | 273.332.000 | 90 | 68.333.000 | - | - | 0 | - | - | - | 90 | 68.333.000 | 22,50 | 25 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 21 | Bantuan Sarana dan Prasarana bagi UMKM | Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan binaan (unit usaha) | 400 | 593.092.000 | 288 | 296.546.000 | - | - | 0 | - | - | - | 288 | 296.546.000 | 72,00 | 50 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------|----|-----|----|-----|-----|----|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|--------|----------|
| | K | Rp. | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 16 | 24 | Pengembangan Produk Unggulan Daerah | Jumlah UMKM yang terbina | 400 | 136.254.000 | 210 | 136.254.000 | 0 | - | 0 | - | 210 | 136.254.000 | 52,50 | 100 | | | |
| 7 | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT (%) | 51 | 1.002.254.000 | 45 | 740.229.100 | 2 | 385.562.900 | 0 | 31.538.600 | - | 8,18 | 45 | 771.767.700 | 88,24 | 77,00 | DKUPP |
| | | | | | | | | Pesentase Koperasi dengan modal di atas 5 M (%) | 25 | | 10 | | 5 | | 0 | | 10 | | | 40,00 | | | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | 04 | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman kopersaian | Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi (unit) | 300 | 303.432.000 | 120 | 21.642.000 | 50 | 19.335.000 | 0 | 1.021.250 | - | 5,28 | 120 | 22.663.250 | 40,00 | 7 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | 05 | Pembinaan dan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dan peningkatan hari koperasi | Jumlah koperasi yang menerima penghargaan koperasi berprestasi (unit) | 18 | 211.160.000 | 6 | 339.280.500 | 3 | 251.618.500 | 0 | 28.228.350 | - | 11,22 | 6 | 367.508.850 | 33,33 | 174 | |
| | | | | | | | | Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi (unit) | 350 | | 178 | | 60 | | 10 | | 16,67 | 188 | | 53,71 | | | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | 11 | Pelatihan Akutansi Koperasi | jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan (org) | 150 | 18.280.000 | 90 | 175.402.200 | - | - | 0 | - | 90 | 175.402.200 | 60,00 | 960 | | | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | 25 | Revitalisasi koperasi/KUD | jumlah koperasi yang direvitalisasi (unit) | 300 | 182.802.000 | 75 | 85.583.000 | 40 | 55.622.200 | 0 | 2.289.000 | - | 4,12 | 75 | 87.872.000 | 25,00 | 48 | |
| | 02 | 1 | 02 | 11 | 18 | 27 | Bintek kelembagaan dan usaha koperasi | jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bintek (org) | 300 | 286.580.000 | 120 | 93.166.000 | 40 | 58.987.200 | 0 | - | - | - | 120 | 93.166.000 | 40,00 | 33 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,27 | 69,66 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | S | | | |
| XII | | | | | | | URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN | | 5.196.146.197 | | 3.636.949.721 | | 1.539.240.500 | 15.1584967 | 233.325.721 | | | 2.576.432.962 | | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 12 | .01 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya administrasi pelayanan perkantoran (bln) | 72 | 1.125.270.969 | 36 | 1.293.842.480 | 12 | 574.652.300 | 3,00 | 118.205.773 | 25,00 | 20,57 | 39 | 118.205.773 | 54,17 | 10,50 | DPMP2TSP |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik air, telepon (bln) | 72 | 102.021.120 | 36 | 76.675.098 | 12 | 49.800.000 | 3,00 | 5.879.373 | 25,00 | 11,81 | 39,00 | 82.554.471 | 54,17 | 80,92 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .07 | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honor pengelola kegiatan (bln) | 72 | 120.056.200 | 36 | 143.230.000 | 12 | 81.000.000 | 3,00 | 16.000.000 | 25,00 | 19,75 | 39 | 159.230.000 | 54,17 | 132,63 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .08 | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | operasional kebersihan kantor (bln) | 72 | 32.454.950 | 36 | 121.913.000 | 12 | 151.518.500 | 3,00 | 25.740.900 | 25,00 | 16,99 | 39 | 147.653.900 | 54,17 | 454,95 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .09 | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | terpeliharanya peralatan kerja (bln) | 72 | 22.254.320 | 36 | 20.980.000 | 12 | 13.800.000 | 3,00 | 6.000.000 | 25,00 | 43,48 | 39 | 26.980.000 | 54,17 | 121,23 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .10 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor (bln) | 72 | 67.330.829 | 36 | 68.742.500 | 12 | 32.760.000 | 3,00 | 7.548.000 | 25,00 | 23,04 | 39 | 76.290.500 | 54,17 | 113,31 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .11 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 66.396.935 | 36 | 72.106.000 | 12 | 24.880.000 | 3,00 | 3.609.000 | 25,00 | 14,51 | 39 | 75.715.000 | 54,17 | 114,03 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .12 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya peralatan listrik (bln) | 72 | 30.735.562 | 36 | 34.745.700 | 12 | 14.831.000 | 3,00 | 9.426.000 | 25,00 | 63,56 | 39 | 44.171.700 | 54,17 | 143,72 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | tersedianya peralatan kerja (paket) | 5 | 86.000.000 | 3 | 130.886.636 | 1 | 36.750.000 | - | - | - | - | 3 | 130.886.636 | 60,00 | 152,19 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | 15 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersedianya koran, buku (bln) | 72 | 111.271.600 | 36 | 36.315.000 | 12 | 18.900.000 | 3,00 | 3.570.000 | 25,00 | 18,89 | 39 | 39.885.000 | 54,17 | 35,84 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .17 | | Penyediaan Makanan dan Minuman | makan rapat, tamu (bln) | 72 | 57.575.733 | 36 | 45.770.000 | 12 | 25.000.000 | 3,00 | 9.197.500 | 25,00 | 36,79 | 39 | 54.967.500 | 54,17 | 95,47 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|-----|--|---|--------|---------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|----------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | operasional rapat ke propinsi dan luar propinsi (bln) | 72 | 291.902.400 | 36 | 371.169.996 | 12 | 39.100.000 | 3,00 | 7.675.000 | 25,00 | 19,63 | 39 | 378.844.996 | 54,17 | 129,78 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | survei, peninjauan lapangan (bln) | 72 | 137.271.320 | 36 | 133.066.050 | 12 | 54.825.000 | 3,00 | 23.560.000 | 25,00 | 42,97 | 39 | 156.626.050 | 54,17 | 114,10 | |
| | 1 | 02 | 12 | .01 | .22 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | cetak RKA, RENSTRA, LKPJ, RKPD, dan laporan lainnya | 36 | 125.951.200 | 18 | 38.242.500 | 6 | 31.487.800 | 2,00 | 4.610.550 | 33,33 | 14,64 | 20 | 42.853.050 | 55,56 | 34,02 | |
| 2 | 1 | 02 | 02 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sarpras penunjang (bln) | 72 | 1.183.288.762 | 36 | 695.867.381 | 12 | 191.976.000 | 10,68 | 20.493.748 | 88,96 | 10,68 | 46,68 | 716.361.129 | 64,83 | 60,54 | DPMP2TSP |
| | 1 | 02 | 12 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | pemeliharaan rutin (bln) | 72 | 236.042.000 | 36 | 118.021.000 | 12 | 87.250.000 | 3,00 | 5.500.000 | 25,00 | 6,30 | 39 | 123.521.000 | 54,17 | 52,33 | |
| | 1 | 02 | 12 | 02 | | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Pengadaan kendaraan dinas (unit) | 12 | 230.000.000 | 10 | 185.210.000 | 2 | 27.250.000 | - | - | - | - | 10 | 185.210.000 | 83,33 | 80,53 | |
| | 1 | 02 | 12 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab gedung kantor (paket) | 4 | 458.900.000 | 1 | 263.463.000 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 263.463.000 | 25,00 | 57,41 | |
| | 1 | 02 | 12 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas (bln) | 72 | 258.346.762 | 36 | 129.173.381 | 12 | 77.476.000 | 3,00 | 14.993.748 | 25,00 | 19,35 | 39 | 144.167.129 | 54,17 | 55,80 | |
| 3 | 1 | 02 | 12 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi | Jumlah investor yang menanamkan modal | 15 | 1.126.388.150 | 12 | 580.411.610 | 1 | 209.054.400 | - | 17.277.700 | - | 8,26 | 12 | 597.689.310 | 80,00 | 53,06 | DPMP2TSP |
| | 1 | 02 | 12 | 15 | 1 | Promosi Investasi di Dalam Negeri | Jumlah promosi yang dilaksanakan (kegiatan) | 15 | 806.063.750 | 5 | 633.477.114 | 2 | 155.667.000 | - | 10.267.200 | - | 6,60 | 5 | 643.744.314 | 33,33 | 79,86 | |
| | 1 | 02 | 12 | 15 | 1 | Pelayanan kerjasama Investasi | jumlah MOU antara investor dengan Pemerintahan daerah | 5 | 320.324.400 | 1 | 143.140.304 | 1 | 53.387.400 | - | 7.010.500 | - | 13,13 | 1 | 150.150.804 | 20,00 | 46,87 | |
| 4 | 1 | 02 | 12 | 16 | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Nilai realiasi investasi PMA/ PMDN (milyar Rp) | 500,50 | 948.578.614 | 272,5 | 565.744.962 | 74 | 202.834.300 | 10 | 37.277.250 | 13,51 | 18,38 | 282,5 | 603.022.212 | 56,44 | 63,57 | DPMP2TSP |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 1 | Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT | dokumen data investasi non fasilitas rumah tangga (dok) | 5 | 100.475.200 | 2 | 50.237.600 | 1 | 27.962.500 | - | 3.214.000 | - | 11,49 | 2 | 53.451.600 | 40,00 | 53,20 | |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 1 | Pelayanan Penanaman Modal | operasional pelayanan perizinan penanaman modal pada investor (bln) | 72 | 242.073.400 | 24 | 121.036.700 | 12 | 53.183.600 | 3 | 8.685.500 | 25,00 | 16,33 | 27 | 129.722.200 | 37,50 | 53,59 | |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 2 | Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi | operasional sistem pelayanan perizinan secara online (bln) | 72 | 283.037.400 | 24 | 141.518.700 | 12 | 68.861.200 | 3 | 7.350.000 | 25,00 | 10,67 | 27 | 148.868.700 | 37,50 | 52,60 | |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 2 | Lokakarya penyusunan LKPM | jumlah peserta lokakarya (org) | 160 | 90.000.000 | 80 | 29.925.591 | 0 | - | - | - | - | - | 80 | 29.925.591 | 50,00 | 33,25 | |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 2 | Koordinasi bidang penanaman modal | Biaya operasional koordinasi (bln) | 72 | 105.749.014 | 24 | 138.624.971 | 12 | 24.753.000 | 3 | 3.690.050 | 25,00 | 14,91 | 27 | 142.315.021 | 37,50 | 134,58 | |
| | 1 | 02 | 12 | 16 | 2 | Pengawasan dan pengendalian penanaman modal | Tersedianya operasional untuk pengawasan dan pengendalian (bln) | 72 | 127.243.600 | 24 | 84.401.400 | 12 | 28.074.000 | 3 | 14.337.700 | 25,00 | 51,07 | 27 | 98.739.100 | 37,50 | 77,60 | |
| 5 | 1 | 02 | 12 | 18 | | Program Peningkatan pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 19.500 | 812.619.702 | 10.000 | 501.083.288 | 3.000 | 300.723.500 | 500 | 40.071.250 | 16,67 | 13,32 | 10500 | 541.154.538 | 53,85 | 66,59 | DPMP2TSP |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Operasional penyelenggaraan perizinan | Biaya operasional pelayanan (bln) | 72 | 303.600.000 | 36 | 205.819.908 | 12 | 105.033.000 | 3 | 19.479.050 | 25,00 | 18,55 | 39 | 225.298.958 | 54,17 | 74,21 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|--|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan | Laporan triwulan hasil money penanaman modal (dok) | 24 | 141.093.801 | 8 | 74.722.300 | 4 | 61.003.000 | 1 | 17.205.300 | 25,00 | 28,20 | 9 | 91.927.600 | 37,50 | 65,15 | |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Survey indek kepuasan masyarakat | Jumlah jajak pendapat yang dilakukan | 6 | 52.093.801 | 2 | 78.532.600 | 1 | 27.588.500 | 1 | 3.386.900 | 100,00 | 12,28 | 3 | 81.919.500 | 50,00 | 157,25 | |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Penyusunan Regulasi Penanaman Modal | Naskah akademis ranperda | 1 | 71.535.100 | 1 | 70.737.766 | - | - | - | - | - | - | 1 | | 100,00 | | |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan | Jumlah sosialisasi yang dilakukan (keg) | 9 | 205.797.000 | 3 | 68.599.000 | 3 | 68.599.000 | - | - | - | - | 3 | 68.599.000 | 33,33 | 33,33 | |
| | 1 | 02 | 12 | 18 | | Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan | Operasional tim penyelesaian pengaduan (bln) | 72 | 38.500.000 | 36 | 38.500.000 | 12 | 38.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 38.500.000 | 54,17 | 100,00 | |
| 6 | 1 | 02 | 12 | 18 | | Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | | | | | DPMP2TSP |
| | | | | | | Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi | Jumlah publikasi (kali) | 10 | 60.000.000 | 0 | - | 10 | 60.000.000 | - | 8.991.700 | - | 14,99 | 0 | 8.991.700 | - | 14,99 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,55 | 42,38 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| XIII | | | | | | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | 13.201.323.411 | | 5.372.590.025 | | 3.054.686.131 | | 266.053.383 | | 5.638.643.408 | | | | | | |
| 1 | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 3.298.421.316 | 36 | 1.543.121.720 | 12 | 547.584.531 | 34,00 | 142.287.095 | 283,33 | 25,98 | 70,00 | 1.685.408.815 | 97,22 | 51,10 | DISPARPORA |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik | Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik (bln) | 72 | 309.900.000 | 36 | 111.119.844 | 12 | 42.540.000 | 3,00 | 7.421.995 | 25,00 | 17,45 | 39,00 | 118.541.839 | 54,17 | 38,25 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | /honorarium tenaga administrasi keuangan (bln) | 72 | 451.800.000 | 36 | 215.450.000 | 12 | 123.600.000 | 3,00 | 27.000.000 | 25,00 | 21,84 | 39,00 | 242.450.000 | 54,17 | 53,66 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | honr petugas kebersihan kantor (bln) | 72 | 259.514.000 | 36 | 153.042.500 | 12 | 59.999.680 | 3,00 | 15.631.000 | 25,00 | 26,05 | 39,00 | 168.673.500 | 54,17 | 65,00 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpelihanya peralatan kerja (bln) | 72 | 128.883.000 | 36 | 65.729.220 | 12 | 14.188.000 | 3,00 | 1.400.000 | 25,00 | 9,87 | 39,00 | 67.129.220 | 54,17 | 52,09 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya alat tulis kantor untuk operasional (bln) | 72 | 189.374.496 | 36 | 96.667.300 | 12 | 46.307.671 | 3,00 | 8.221.900 | 25,00 | 17,75 | 39,00 | 104.889.200 | 54,17 | 55,39 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada (bln) | 72 | 175.469.200 | 36 | 98.367.100 | 12 | 22.821.000 | 3,00 | 2.990.400 | 25,00 | 13,10 | 39,00 | 101.357.500 | 54,17 | 57,76 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen instalasi listrik bangunan kantor (bln) | 72 | 60.452.620 | 36 | 27.865.000 | 12 | 10.785.180 | 3,00 | - | 25,00 | - | 39,00 | 27.865.000 | 54,17 | 46,09 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor (paket) | 6 | 100.000.000 | - | - | 2 | 64.818.000 | 1,00 | 39.128.000 | 50,00 | 60,37 | 1,00 | 39.128.000 | 16,67 | 39,13 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan (%) | 72 | 79.065.000 | 36 | 43.690.000 | 12 | 14.400.000 | 3,00 | 3.490.000 | 25,00 | 24,24 | 39,00 | 47.180.000 | 54,17 | 59,67 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Makanan dan Minuman | terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman (bln) | 72 | 316.641.000 | 36 | 27.865.000 | 12 | 40.000.000 | 3,00 | 4.089.800 | 25,00 | 10,22 | 39,00 | 31.954.800 | 54,17 | 10,09 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Biaya perjalanan dinas luar daerah (bln) | 72 | 798.022.000 | 36 | 450.730.756 | 12 | 47.725.000 | 3,00 | 15.925.000 | 25,00 | 33,37 | 39,00 | 466.655.756 | 54,17 | 58,48 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Biaya perjalanan dinas dalam daerah (bln) | 72 | 429.300.000 | 36 | 252.595.000 | 12 | 60.400.000 | 3,00 | 16.989.000 | 25,00 | 28,13 | 39,00 | 269.584.000 | 54,17 | 62,80 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|---|---|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| 2 | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarpras pendukung bagi aparatur (bln) | 72 | 1.703.685.150 | 36 | 858.650.535 | 12 | 281.494.000 | 6,00 | 60.112.788 | 50,00 | 21,35 | 42,00 | 918.763.323 | 58,33 | 53,93 | DISPARPORA | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor (bln) | 72 | 404.720.000 | 36 | 246.182.000 | 12 | 75.000.000 | 3,00 | 11.949.000 | 25,00 | 15,93 | 39,00 | 258.131.000 | 54,17 | 63,78 | | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan dinas (bln) | 72 | 1.298.965.150 | 36 | 612.468.535 | 12 | 206.494.000 | 3,00 | 48.163.788 | 25,00 | 23,32 | 39,00 | 660.632.323 | 54,17 | 50,86 | | |
| 3 | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Peringkat pemuda pelopor | 3 besar | 2.982.801.000 | 5 besar | 1.763.500.521 | 5 besar | 1.077.217.000 | 5 besar | 44.604.500 | 50,00 | 4,14 | 5 besar | 1.808.105.021 | 100,00 | 60,62 | DISPARPORA | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | 2 | Pembentukan Paskibraka | Terlaksananya Pembentukan Paskibraka (kali) | 5 | 2.512.101.000 | 2 | 1.649.147.733 | 1 | 837.367.000 | - | 4,53 | 2,00 | 1.687.092.983 | 40,00 | 67,16 | | | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3 | Penilaian Pemuda Pelopor dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan | operasional dan fasilitasi penilaian (keg) | 3 | 100.000.000 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | - | 13,32 | - | 6.659.250 | - | 6,66 | | | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | 15 | Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI) | Proses seleksi (kali) | 5 | 245.700.000 | 3 | 47.734.188 | 1 | 122.850.000 | - | - | - | 3,00 | 47.734.188 | 60,00 | 19,43 | | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | 20 | Peringatan Sumpah Pemuda | Terlaksananya peringatan sumpah pemuda (kali) | 5 | 125.000.000 | 1,00 | 66.618.600 | 1 | 67.000.000 | - | - | - | 1,00 | 66.618.600 | 20,00 | 53,29 | | |
| 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 20 | Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat | 7 | 981.022.500 | 4 | 223.341.000 | 1 | 370.000.000 | 0 | 19.049.000 | - | 5,15 | 4 | 242.390.000 | 57,14 | 24,71 | DISPARPORA | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 20 | 37 | Olah Raga Massal (Car Free Day) | Jumlah olahraga massal yang dilaksanakan (keg) | 100 | 500.000.000 | 20,00 | 127.136.500 | 20 | 120.000.000 | 4 | 19.049.000 | 20,00 | 15,87 | 24,00 | 146.185.500 | 24,00 | 29,24 | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 20 | 38 | Aktivasi dan Bantuan Untuk club-club Olahraga | Jumlah aktivasi dan bantuan untuk club-club olahraga yang dilakukan (paket) | 50 | 481.022.500 | 10,00 | 96.204.500 | 20 | 250.000.000 | 0 | - | - | 10,00 | 96.204.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| 5 | 13 | 1 | 2 | 13 | 22 | Program pembinaan olah raga berprestasi | Jumlah prestasi olah raga | 77 | 4.235.393.445 | 24 | 983.976.249 | 3 | 778.390.600 | - | - | - | - | 24 | 983.976.249 | 31,17 | 23,23 | DISPARPORA | |
| | | | | | | | Jumlah atlet berprestasi (org) | 50 | | 35 | | 5 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 20 | 19 | Penyelenggaraan Open Tournamen Volley pantai Tingkat Nasional | Terlaksananya open tournamen Volley pantai tingkat Nasional (kali) | 6 | 2.085.681.345 | 3 | 672.501.689 | 1 | 398.290.600 | - | - | - | 3,00 | 672.501.689 | 50,00 | 32,24 | | |
| | 13 | 1 | 2 | 13 | 20 | 20 | Penyelenggaraan Paralayang Internasional | Terlaksananya paralayang internasional (kali) | 5 | 2.149.712.100 | 2 | 311.474.560 | 1 | 380.100.000 | - | - | - | 2,00 | 311.474.560 | 40,00 | 14,49 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,77 | 42,72 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | | |
| XIV | | | | | | URUSAN STATISTIK | | | 212.642.000 | | 114.778.000 | | 287.729.500 | | 9.422.700 | | | | 124.200.700 | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi | ketersediaan data statistik sektoral | Ada | 212.642.000 | Ada | 114.778.000 | Ada | 287.729.500 | - | 9.422.700 | | 3 | Ada | 124.200.700 | 100,00 | 58,41 | Dinas Kominfo | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 21 | Pengumpulan data statistik sektoral | Data Sektoral Perangkat Daerah (dok) | 1 | 86.215.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 21 | Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka | Data Pesisir Selatan Dalam Angka (buku) | 1.250 | 72.969.000 | 250 | 57.389.000 | 250 | 214.912.500 | 0 | 2.475.000 | - | 1 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | 02 | 10 | 01 | 19 | 21 | Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan informasi daerah | Operasional tim pengamanan digital (bln) | 48 | 53.458.000 | 12 | 57.389.000 | 12 | 72.817.000 | 3 | 6.947.700 | 25 | 10 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 58,41 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | R | | | |
| XV | | | | | | URUSAN KEBUDAYAAN | | | 8.139.588.000 | | 5.846.812.933 | | 2.086.507.915 | | 697.788.326 | | | | 6.544.601.259 | | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|---|---|---------|------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|-------|-------------------|--------|------------|----------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah Grup kesenian/sanggar budaya yang berkembang (unit) | 71 | 7.960.866.000 | 65 | 5.771.709.489 | 4 | 2.021.145.600 | 0,00 | 690.727.250 | - | 34,18 | 65,00 | 6.462.436.739 | 91,55 | 81,18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 15 | Pengiriman Tim Kesenian | Jumlah tim yang dikirim (tim) | 12 | 1.254.144.000 | 6 | 1.302.018.720 | 2 | 364.700.000 | 1,00 | 229.196.000 | 50,00 | 62,85 | 7 | 1.531.214.720 | 58,33 | 122,09 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 17 | Sumarak Pesisir Selatan | event Yang Diaksanakan (Kali) | 6 | 1.226.048.000 | 3 | 1.079.135.100 | 1 | 367.462.000 | 0,00 | - | - | - | 3 | 1.079.135.100 | 50,00 | 88,02 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 21 | Perawatan Cakar Budaya. Museum dan Peninggalan sejarah | Jumlah cagar yang dipelihara (unit) | 100 | 2.457.348.000 | 40 | 2.774.121.284 | 20 | 94.000.000 | 3,04 | 7.498.200 | 15,20 | 7,98 | 43,04 | 2.781.619.484 | 43,04 | 113,20 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 24 | Pagelaran Seni dan Budaya | event Yang Diaksanakan (Kali) | 6 | 400.000.000 | 3 | 312.122.800 | 1 | 152.416.600 | 0,00 | 2.800.000 | - | 1,84 | 3,00 | 314.922.800 | 50,00 | 78,73 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 28 | Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya | Dampingan yang diberikan (keg) | 6 | 2.161.326.000 | 3 | 304.311.585 | 1 | 285.500.000 | 1,00 | 204.467.800 | 100,00 | 71,62 | 4 | 508.779.385 | 66,67 | 23,54 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 33 | Pelatihan adat bagi pemangku adat | terlatihnya adat bagi pemangku adat | 133 | 462.000.000 | 0 | - | 100 | 40.400.000 | 2,31 | 931.400 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 931.400 | 1,74 | 0,20 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 35 | Paket Seni Tradisional dan Moderen | Terlaksananya 6 (enam) paket seni | 100 | 1.500.000.000 | 24 | 926.492.100 | 100 | 58.500.000 | 75,91 | 44.406.000 | 75,91 | 75,91 | 99,91 | 970.898.100 | 99,91 | 64,73 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 36 | Pengadaan Peralatan pendidikan pada bidang kebudayaan | Peralatan yang dibeli (paket) | 4 | 500.000.000 | 0 | - | 2 | 325.000.000 | 1,00 | 198.421.000 | 50,00 | 61,05 | 1 | 198.421.000 | 25,00 | 39,68 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 37 | Pembuatan Film Dokumenter, dokudrama, layar lebar | film yang dihasilkan (buah) | 2 | 500.000.000 | 0 | - | 1 | 290.000.000 | 0,00 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 41 | Pendokumentasian secara digital atraksi adaat dan budaya tradisional kabupaten pesisir selatan | film yang dihasilkan (buah) | 1 | 60.000.000 | 0 | - | 1 | 43.167.000 | 0,00 | 3.006.850 | - | 6,97 | 0 | 3.006.850 | 0,00 | 5,01 | |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan (unit) | 33 | 178.722.000 | 20 | 75.103.444 | 5 | 65.362.315 | 0,00 | 7.061.076 | - | 10,80 | 20 | 82.164.520 | 60,61 | 45,97 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 15 | Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK | Ranperda tentang kurikulum muatan lokal BAMK berbasis ABS-SBK (dok) | 1 | 128.722.000 | 0 | 75.103.444 | 1 | 28.142.315 | 0,00 | 7.061.076 | - | 25,09 | 0 | 82.164.520 | 0,00 | 63,83 | |
| | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 31 | Lawatan sejarah kabupaten pesisir selatan | kegiatan yang dilaksanakan (keg) | 1 | 50.000.000 | 0 | - | 1 | 37.220.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,08 | 63,58 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | R | | | |
| XVI | | | | | | | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | 4.157.013.394,0 | | 1.934.794.598,0 | | 657.781.100 | | 79.795.350 | | | 2.014.589.948 | | | | |
| 2 | 18 | 19 | | | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Nagari, TBM dll | 160.160 | 4.157.013.394 | 30.000 | 1.934.794.598 | 30.000 | 657.781.100 | - | 79.795.350 | - | 12,13 | 30.000 | 2.014.589.948 | 18,73 | 48,46 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 19 | 01 | | | | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran | Lomba yang dilaksanakan (kali) | 2 | 377.725.000 | 2 | 207.725.000 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 207.725.000 | 100,00 | 54,99 | |
| | 18 | 19 | 02 | | | | Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah | jumlah peserta yang dilatih (org) | 100 | 197.152.000 | 50 | 122.152.000 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 122.152.000 | 50,00 | 61,96 | |
| | 18 | 19 | 03 | | | | Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca | jumlah sosialisasi yang dilakukan (keg) | 4 | 305.759.454 | 2 | 225.759.464 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 225.759.464 | 50,00 | 73,84 | |
| | 18 | 01 | 16 | 03 | | | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan se Pesisir Selatan | Jumlah pustaka sekolah yang dibina (unit) | 200 | 50.000.000 | 0 | - | 100 | 12.155.000 | 7 | 660.500 | 7,00 | 5,43 | 7,00 | 660.500 | 3,50 | 1,32 | |
| | 18 | 19 | 05 | | | | Pernyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah | koliksi buku, majalah dan koran (paket) | 6 | 924.898.054 | 3 | 319.898.054 | 1 | 72.862.000 | - | 4.125.000 | - | 5,66 | 3,00 | 324.023.054 | 50,00 | 35,03 | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|----|-----|----|-----|--|--|-----|----------------------|-------|----------------------|----|----------------------|---|--------------------|-----------------|-------|------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 18 | 19 | 06 | | Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca | operasional pelayanan pustaka daerah dan kantin baca (bln) | 72 | 311.000.000 | 36 | 56.638.958 | 12 | 90.185.200 | 3 | 8.564.700 | 25,00 | 9,50 | 39,00 | 65.203.658 | 54,17 | 20,97 | |
| | 18 | 19 | 07 | | Pelayanan Perpustakaan Keliling | operasional perpustakaan keliling (bln) | 72 | 833.244.056 | 36 | 622.440.206 | 12 | 228.498.000 | 3 | 43.888.450 | 25,00 | 19,21 | 39,00 | 666.328.656 | 54,17 | 79,97 | |
| | 18 | 19 | 13 | | Pelaksanaan Rumah Pintar Perintis | Terlaksananya pelayanan rumah pintar perintis Painan (bln) | 72 | 607.575.430 | 36 | 288.450.430 | 12 | 157.014.900 | 3 | 21.831.700 | 25,00 | 13,90 | 39,00 | 310.282.130 | 54,17 | 51,07 | |
| | 18 | 19 | 10 | | Pengembangan Minat dan Budaya Baca | Lomba yang dilaksanakan (kali) | 6 | 299.286.500 | 3 | 19.286.500 | 3 | 56.095.000 | - | - | - | - | 3,00 | 19.286.500 | 50,00 | 6,44 | |
| | 18 | 19 | 12 | | Penguatan Kelembagaan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kab.Pessel | Berfungsinya IPI Pesisir Selatan (tahun) | 5 | 90.373.000 | 1 | 20.373.000 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 20.373.000 | 20,00 | 22,54 | |
| | 02 | 18 | 16 | 13 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan | Tersedianya Regulasi tentang Perpustakaan | 1 | 59.999.900 | 1 | 15.884.740 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 15.884.740 | 100,00 | 26,47 | |
| | 18 | 19 | 23 | | Bintek Pengelola Perpustakaan | Jumlah pengelola pustaka yang dilatih (org) | 200 | 100.000.000 | 50 | 36.186.246 | 20 | 40.971.000 | 9 | 725.000 | 45,00 | 1,77 | 59,00 | 36.911.246 | 29,50 | 36,91 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,73 | 48,46 | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | |
| XV | | | | | URUSAN KEARSIPAN | | | 6.452.185.029 | | 2.966.158.253 | | 1.308.449.500 | | 113.781.845 | | | | 3.079.940.098 | | | |
| 1 | 18 | 01 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 4.361.769.359 | 36,00 | 2.107.127.109 | 12 | 841.905.400 | 3 | 91.780.695 | 25,00 | 10,90 | 39,00 | 2.198.907.804 | 54,17 | 50,41 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 01 | 02 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telepon, air dan listrik | 72 | 270.119.972 | 36 | 109.319.972 | 12 | 55.200.000 | 3 | 15.827.695 | 25,00 | 28,67 | 39,00 | 125.147.667 | 54,17 | 46,33 | |
| | 18 | 01 | 03 | | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor | 72 | 799.867.570 | 36 | 430.467.570 | 12 | 235.750.000 | 3 | 957.000 | 25,00 | 0,41 | 39,00 | 431.424.570 | 54,17 | 53,94 | |
| | 18 | 01 | 06 | | penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpeliharannya Kendaraan Dinas perasional | 72 | 612.779.217 | 36 | 293.629.217 | 12 | 178.364.000 | 3 | 25.828.900 | 25,00 | 14,48 | 39,00 | 319.458.117 | 54,17 | 52,13 | |
| | 18 | 01 | 07 | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pengelola administrasi keuangan dan aset | 72 | 412.000.000 | 36 | 229.000.000 | 12 | 76.200.000 | 3 | 10.900.000 | 25,00 | 14,30 | 39,00 | 239.900.000 | 54,17 | 58,23 | |
| | 18 | 01 | 08 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor | 72 | 191.499.000 | 36 | 108.999.000 | 12 | 61.619.000 | 3 | 9.399.000 | 25,00 | 15,25 | 39,00 | 118.398.000 | 54,17 | 61,83 | |
| | 18 | 01 | 09 | | Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan kerja | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja | 72 | 300.150.000 | 36 | 44.936.750 | 12 | 8.500.000 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 15,88 | 39,00 | 46.286.750 | 54,17 | 15,42 | |
| | 18 | 01 | 10 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK | 72 | 137.746.669 | 36 | 72.746.669 | 12 | 39.322.000 | 3 | 4.007.600 | 25,00 | 10,19 | 39,00 | 76.754.269 | 54,17 | 55,72 | |
| | 18 | 01 | 11 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan & penggandaan | 72 | 137.268.275 | 36 | 68.863.275 | 12 | 12.448.400 | 3 | 1.200.000 | 25,00 | 9,64 | 39,00 | 70.083.275 | 54,17 | 51,06 | |
| | 18 | 01 | 12 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik dan bola lampu | 72 | 134.993.500 | 36 | 86.824.500 | 12 | 8.532.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39,00 | 86.824.500 | 54,17 | 64,32 | |
| | 18 | 01 | 15 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan & per-UU | 72 | 83.140.000 | 36 | 72.340.000 | 12 | 5.100.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39,00 | 72.340.000 | 54,17 | 87,01 | |
| | 18 | 01 | 17 | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan & minuman | 72 | 135.557.500 | 36 | 49.507.500 | 12 | 16.720.000 | 3 | 3.575.500 | 25,00 | 21,38 | 39,00 | 53.083.000 | 54,17 | 39,16 | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|----|----|----|----|---|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | 18 | 01 | 18 | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | biaya perjalanan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | 72 | 669.957.656 | 36 | 324.957.656 | 12 | 63.900.000 | 3 | 7.210.000 | 25,00 | 11,28 | 39,00 | 332.167.656 | 54,17 | 49,58 | |
| | 18 | 01 | 20 | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | biaya perjalanan rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah | 72 | 476.690.000 | 36 | 215.515.000 | 12 | 80.250.000 | 3 | 11.525.000 | 25,00 | 14,36 | 39,00 | 227.040.000 | 54,17 | 47,63 | |
| 2 | 18 | 02 | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarpras pendukung bagi aparatur (bin) | 72 | 980.852.000 | 36 | 448.252.000 | 12 | 206.100.000 | 3 | 4.440.000 | 25,00 | 2,15 | 39,00 | 452.692.000 | 54,17 | 46,15 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 02 | 22 | | | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Terpeliharanya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 72 | 407.300.000 | 36 | 328.800.000 | 12 | 21.000.000 | 3 | 4.440.000 | 25,00 | 21,14 | 39,00 | 333.240.000 | 54,17 | 81,82 | |
| | 18 | 01 | 02 | 61 | | Pembangunan Pagar | Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor dan Taman Edukasi (paket) | 3 | 500.000.000 | 1 | 45.900.000 | 1 | 185.100.000 | - | - | - | - | 1,00 | 45.900.000 | 33,33 | 9,18 | |
| | 18 | 01 | 02 | 90 | | Pembangunan Tempat Parkir | Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan (paket) | 1 | 73.552.000 | 1 | 73.552.000 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 73.552.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | 18 | 05 | | | | Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur profesional (%) | 100 | 140.418.479 | 50 | 56.918.479 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 56.918.479 | 50,00 | 40,53 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 05 | 01 | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang dilatih (org) | 100 | 122.190.829 | 50 | 38.690.829 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 38.690.829 | 50,00 | 31,66 | |
| | 18 | 01 | 05 | | | Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Petugas Arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Jumlah petugas arsip yang dilatih (org) | 50 | 18.227.650 | 50 | 18.227.650 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 18.227.650 | 100,00 | 100,00 | |
| 4 | 18 | 16 | | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | Jumlah dokumen/arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan | 32 urusan | 505.447.843 | 32 urusan | 151.392.500 | 32 urusan | 135.209.100 | 32 urusan | 12.566.400 | 100,00 | 9,29 | 32 urusan | 163.958.900 | 100,00 | 32,44 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 16 | 02 | | | Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah | operasional penataan arsip daerah (bin) | 72 | 281.392.500 | 36 | 151.392.500 | - | - | - | - | - | - | 36,00 | 151.392.500 | 50,00 | 53,80 | |
| | 18 | 16 | 14 | | | Bintek Kearsipan bagi Petugas Unit Arsip (Setiap OPD, BUMD, dan Nagari) | Jumlah petugas arsip yang dilatih (org) | 50 | 224.055.343 | 50 | 224.055.343 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 224.055.343 | 100,00 | 100,00 | |
| | 18 | 01 | 16 | 07 | | Pembinaan dan Monev Unit Arsip | terwujudnya unit arsip yang berkualitas | 100 | 75.000.000 | - | - | 100 | 46.925.000 | 20 | 5.364.000 | 20,00 | 11,43 | 20,00 | 5.364.000 | 20,00 | 7,15 | |
| | 18 | 01 | 16 | 13 | | Penataa dan pengelolaan arsip inaktif (Depo arsip daerah) | pengelolaan depo arsip (bin) | 36 | 40.000.000 | - | - | 12 | 41.703.100 | 3 | 5.470.400 | 25,00 | 13,12 | 3,00 | 5.470.400 | 8,33 | 13,68 | |
| | 18 | 01 | 16 | 15 | | Penilaian unit arsip | terlaksananya penilaian unit arsip | 3 | 85.000.000 | - | - | 1 | 46.581.000 | - | 1.732.000 | - | 3,72 | 0,00 | 1.732.000 | 0,00 | 2,04 | |
| 5 | 18 | 18 | | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Informasi | 50 | 283.697.348 | 25,25 | 138.392.500 | 100 | 42.409.000 | 7 | 1.902.000 | 7,00 | 4,48 | 32,25 | 140.294.500 | 64,50 | 49,45 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 18 | 03 | | | Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Ditingkatkan Instansi Pemerintah dan Swasta | jumlah peserta sosialisasi (org) | 50 | 138.392.500 | 50 | 138.392.500 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 138.392.500 | 100,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|------------------------------------|----|-----|----|-----|---|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---|---|
| | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 18 | 18 | 09 | | Pembangunan Galeri Pesisir Selatan | Galeri dan isinya (unit) | 1 | 145.304.848 | 1 | 145.304.848 | - | - | - | - | 1,00 | 145.304.848 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | 02 | 18 | 18 | 05 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan | regulasi daerah tentang kearsipan | 1 | 59.999.900 | 1 | 39.689.590 | - | - | - | - | 1,00 | 39.689.590 | 100,00 | 66,15 | | | | |
| | 02 | 18 | 18 | 05 | Akuisi dan Alih Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah) | tersedianya arsip strategis pemerintah (pusat dan daerah) | 100 | 60.000.000 | - | - | 100 | 42.409.000 | 7 | 1.902.000 | 7,00 | 4,48 | 7,00 | 1.902.000 | 7,00 | 3,17 | | |
| 6 | 18 | 01 | 17 | | Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | persentase sarpras arsip kondisi baik (%) | 90,00 | 120.000.000 | 80 | 64.075.665 | 10 | 30.436.000 | 3 | - | 30,00 | - | 83,00 | 64.075.665 | 92,22 | 53,40 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan | |
| | 18 | 01 | 17 | 04 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Depo Arsip Daerah (bin) | 72 | 120.000.000 | 36 | 64.075.665 | 12 | 30.436.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39,00 | 64.075.665 | 54,17 | 53,40 | | |
| 7 | 1 | 02 | 18 | 1 | 02 | Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan | persentase OPD, Nagari yang mengelola arsip secara baku (%) | 28,89 | 30.000.000 | 13,33 | - | 10,34 | 28.790.000 | - | 3.092.750 | - | 10,74 | 13,33 | 3.092.750 | 46,14 | 10,31 | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 01 | 15 | 15 | Pembuatan regulasi daerah tentang kearsipan | Jumlah regulasi daerah tentang kearsipan yang diberikan | 1 | 30.000.000 | - | - | 1 | 28.790.000 | - | 3.092.750 | - | 10,74 | 0,00 | 3.092.750 | 0,00 | 10,31 | | |
| 8 | 3 | 00 | 02 | 1 | 02 | Program Pengembangan data / Informasi | Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) | 3 | 30.000.000 | - | - | 80 | 23.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |
| | 18 | 01 | 15 | 11 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | Jumlah publikasi yang dilaksanakan (paket) | 3 | 30.000.000 | - | - | 1 | 23.600.000 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,65 | 35,34 | | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 12.039.332.453,00 | | 5.105.179.161 | | 8.625.906.900 | | 307.910.249 | | | 11.903.930.441 | | | | | |
| 1 | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bin) | 72 | 3.164.718.528 | 36 | 1.902.100.895 | 12 | 520.291.600 | 3 | 127.509.432 | 25,00 | 24,51 | 39,00 | 2.029.610.327 | 54,17 | 64,13 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi , sumber daya listrik dan air (bulan) | 72 | 287.694.015 | 36 | 130.194.015 | 12 | 49.980.000 | 3 | 15.260.791 | 25,00 | 30,53 | 39,00 | 145.454.806 | 54,17 | 50,56 | | |
| | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tertibnya Administerasi Keuangan (bulan) | 72 | 677.317.000 | 36 | 302.467.000 | 12 | 128.600.000 | 3 | 17.500.000 | 25,00 | 13,61 | 39,00 | 319.967.000 | 54,17 | 47,24 | | |
| | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya kebersihan Kantor (bulan) | 72 | 429.470.000 | 36 | 208.449.000 | 12 | 75.000.000 | 3 | 13.113.545 | 25,00 | 17,48 | 39,00 | 221.562.545 | 54,17 | 51,59 | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan) | 72 | 127.430.000 | 36 | 59.401.150 | 12 | 22.050.000 | 3 | 8.840.500 | 25,00 | 40,09 | 39,00 | 68.241.650 | 54,17 | 53,55 | | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK (bulan) | 72 | 224.562.833 | 36 | 101.974.333 | 12 | 61.314.600 | 3 | 19.968.596 | 25,00 | 32,57 | 39,00 | 121.942.929 | 54,17 | 54,30 | | |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 72 | 179.993.000 | 36 | 77.223.000 | 12 | 22.122.000 | 3 | 8.610.000 | 25,00 | 38,92 | 39,00 | 85.833.000 | 54,17 | 47,69 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----|---|--|--|--|--|--|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | | | | | | Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan | Biaya operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan (bulan) | 36 | 202.005.000 | 0 | - | 12 | 67.335.000 | 3 | 5.953.250 | 25,00 | 8,84 | 3,00 | 5.953.250 | 8,33 | 2,95 | | |
| 5 | | | | | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 291.080 | 20.229.567.550 | 109.827 | 3.167.990.120 | 41.940 | 5.508.366.200 | - | 7.704.800 | - | 0,14 | 109.827 | 6.422.908.800 | 37,73 | 31,75 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK) | Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Nelayan (paket) | 10 | 10.149.080.000 | 7 | 3.084.913.900 | 1 | 1.065.950.400 | - | - | - | - | 7,00 | 3.084.913.900 | 70,00 | 30,40 | | |
| | | | | | | Penunjang kegiatan DAK bidang Pemberdayaan Nelayan kecil | Terlaksananya kegiatan DAK bidang pemberdayaan nelayan kecil (bln) | 36 | 77.247.000 | - | - | 12 | 25.749.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3,00 | - | 8,33 | - | | |
| | | | | | | Operasional Balai Sekaya maritim | Beroperasionalnya Balai Sekaya Maritim (Bulan) | 48 | 80.000.000 | 12 | 23.406.850 | 12 | 221.320.000 | 3 | 400.000 | 25,00 | 0,18 | 15,00 | 23.806.850 | 31,25 | 29,76 | | |
| | | | | | | Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap | Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (paket) | 6 | 5.124.872.250 | 3 | 3.306.883.250 | 2 | 4.195.346.800 | - | 7.304.800 | - | 0,17 | 3,00 | 3.314.188.050 | 50,00 | 64,67 | | |
| 6 | | | | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Pembudidaya Yang Tersertifikasi CBIB (orang) | 192 | 256.427.940 | 50 | 85.475.980 | 62 | 111.532.000 | - | 3.369.000 | - | 3,02 | 50,00 | 88.844.980 | 26,04 | 34,65 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | | Penanganan Hama dan Penyakit Ikan | Tertanganinya Hama dan Penyakit Ikan (kasus) | 45 | 256.427.940 | 25 | 85.475.980 | 10 | 62.550.000 | - | 3.369.000 | - | 5,39 | 25,00 | 88.844.980 | 55,56 | 34,65 | | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | Jumlah Pembudidaya yang dilatih CPIB dan CBIB/orang | 180 | 146.946.000 | 0 | - | 70 | 48.982.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | | | | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah UPR Yang Tersertifikasi CPIB(UPR) | 33 | 921.557.650 | 8 | 167.756.100 | 6 | 71.085.000 | - | 5.782.220 | - | 8,13 | 8,00 | 173.538.330 | 24,24 | 18,83 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | | Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) | Terbinanya Unit Perbenihan Rakyat (UPR) | 90 | 223.936.450 | 23 | 74.410.250 | 15 | 23.010.000 | - | 942.000 | - | 4,09 | 23,00 | 75.352.250 | 25,56 | 33,65 | | |
| | | | | | | Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Terbinanya Kelompok Pembudidaya Ikan/pokdakan (kelompok) | 400 | 697.621.200 | 24 | 93.345.860 | 80 | 48.075.000 | - | 4.840.220 | - | 10,07 | 24,00 | 98.186.080 | 6,00 | 14,07 | | |
| 8 | | | | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Kelompok Pmbudidayaan Ikan (Pokdakan) Kelompok | 460 | 358.548.000 | 94 | 137.352.213 | 80 | 48.831.000 | 3 | 5.675.000 | 3,75 | 11,62 | 97,00 | 143.027.213 | 21,09 | 39,891 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya | Tertunjangnya kegiatan pusat dan Propinsi bidang perikanan budidaya (Bulan) | 72 | 358.548.000 | 36 | 137.352.213 | 12 | 48.831.000 | 3 | 5.675.000 | 25,00 | 11,62 | 39,00 | 143.027.213 | 54,17 | 39,891 | | |
| 9 | | | | | | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 90.511 | 326.790.000 | 28.543 | 326.790.000 | - | - | - | - | - | - | 28.543 | 326.790.000 | 31,54 | 100,00 | Dinas Perikanan | |
| | | | | | | Peningkatan Produksi Ikan | Tersedianya benih dan pakan berkualitas (Ton) | 28.543 | 326.790.000 | 28.543 | 326.790.000 | - | - | - | - | - | - | 28.543,00 | 326.790.000 | 100,00 | 100,00 | | |
| 10 | | | | | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok | 95 | 1.606.937.250 | 80 | 538.761.255 | 5 | 276.802.500 | 3 | 15.899.193 | 60,00 | 5,74 | 83,00 | 554.660.448 | 87,37 | 34,517 | Dinas Perikanan | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|-----|----|
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Pendampingan Asuransi Nelayan | Tersalurkannya Asuransi nelayan (unit) | 300 | 240.000.000 | 156 | 97.753.100 | 0 | - | - | - | - | 156,00 | 97.753.100 | 52,00 | 40,730 | | | | |
| | | | | | | | Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro Gakin) | Terlaksananya Kegiatan Pro Gerakan Anti Kemiskinan (KUB) | 20 | 373.038.750 | 10 | 90.669.575 | 3 | 55.410.000 | - | - | - | 10,00 | 90.669.575 | 50,00 | 24,306 | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan | Tersalurkannya KUR Perikanan ke Nelayan (KUB) | 425 | 305.236.000 | 100 | 55.926.000 | 85 | 39.405.000 | - | 1.400.000 | - | 3,55 | 100,00 | 57.326.000 | 23,53 | 18,781 | | | |
| | | | | | | | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil | Terdampingnya kegiatan Provinsi dan Pusat (Bulan) | 72 | 308.662.500 | 36 | 188.616.840 | 12 | 73.062.500 | 3 | 7.549.600 | 25,00 | 10,33 | 39,00 | 196.166.440 | 54,17 | 63,554 | | | |
| | | | | | | | Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap | Terbentuknya kelembagaab KUB yag lebih yang berbadan hukum (KUB) | 96 | 380.000.000 | 1 | 105.795.740 | 85 | 108.925.000 | - | 6.949.593 | - | 6,38 | 1,00 | 112.745.333 | 1,04 | 29,670 | | | |
| 11 | | | | | | | Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Terbinanya Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) | 308 | 1.859.720.400 | 74 | 533.943.161 | 48 | 273.245.000 | 3 | 28.700.450 | 6,25 | 10,50 | 77 | 562.643.611 | 25,00 | 30,25 | Dinas Perikanan | | |
| | | | | | | | Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARAKIN) | Masyarakat yang terlibat (orang) | 750 | 682.796.500 | 200,00 | 152.785.745 | 150 | 109.150.000 | - | - | - | 200,00 | 152.785.745 | 26,67 | 22,38 | | | | |
| | | | | | | | Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | Promosi yang dilakukan (kali) | 20 | 674.811.400 | 6 | 189.695.066 | 5 | 90.040.000 | - | 3.249.500 | - | 3,61 | 6,00 | 192.944.566 | 30,00 | 28,59 | | | |
| | | | | | | | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang P2HP | Tertunjangan kegiatan Propinsi (bulan) | 72 | 328.137.500 | 36 | 96.185.250 | 12 | 39.260.000 | 3 | 21.305.700 | 25,00 | 54,27 | 39,00 | 117.490.950 | 54,17 | 35,81 | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Poklahsar Bidang P2HP | Terbinanya Poklahsar Bidang P2HP (kelompok) | 150 | 173.975.000 | 57 | 95.277.100 | 30 | 34.795.000 | - | 4.145.250 | - | 11,91 | 57,00 | 99.422.350 | 38,00 | 57,15 | | | |
| 12 | | | | | | | Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Jumlah UPI yang menerapkan cara Pengolahan Ikan Yang Baik (Kelompok) | 57 | 951.172.400 | 12 | 234.598.250 | 9 | 147.020.000 | - | 5.567.750 | - | 3,79 | 12,00 | 240.166.000 | 21,05 | 25,25 | Dinas Perikanan | | |
| | | | | | | | Pengawasan mutu Hasil Perikanan | Terlaksananya Pengawasan terhadap Muu Hasil Perikanan (kali) | 22 | 640.771.200 | 11 | 188.160.450 | 5 | 105.470.000 | - | 2.200.000 | - | 2,09 | 11,00 | 190.360.450 | 50,00 | 29,71 | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan/buah | 6 | 124.650.000 | 0 | - | 2 | 41.550.000 | - | 3.367.750 | - | 8,11 | - | 3.367.750 | - | 2,70 | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Cara Pengolahan yang baik(GMP/SSOP) | pelatihan yang dilakukan (kali) | 4 | 185.751.200 | 1 | 46.437.800 | 0 | - | - | - | - | 1,00 | 46.437.800 | 25,00 | 25,000 | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,51 | 45,41 | | | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | | |
| II | | | | | | | URUSAN PARIWISATA | | 24.537.109.553 | | 9.041.366.625 | | 5.861.041.199 | | 255.685.500 | | | 9.297.052.125 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 01 | 02 | 13 | 16 | | PROG. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan) | 10 | 11.223.668.573 | 6 | 5.530.107.994 | 2 | 3.234.869.000 | 0 | 151.490.700 | - | 4,68 | 6 | 5.681.598.694 | 60,00 | 50,62 | DISPARPORA | | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 8 | Pemeliharaan rutin/berkala kawasan Objek wisata | biaya pemeliharaan objek wisata (bin) | 72 | 1.229.153.425 | 36 | 723.032.880 | 12 | 421.600.000 | 3,00 | 33.430.200 | 25,00 | 7,93 | 39,00 | 756.463.080 | 54,17 | 61,54 | | | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 39 | Pengawasan dan Monitoring Obyek Wisata Se Kabupaten Pesisir Selatan | Laporan triwulan hasil monev objek wisata (dok) | 24 | 318.716.500 | 12 | 99.924.050 | 4 | 19.860.000 | 1,00 | 5.892.500 | 25,00 | 29,67 | 13,00 | 105.816.550 | 54,17 | 33,20 | | | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 10 | Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan | Biaya operasional pengelolaan pantai carocok (bin) | 72 | 1.847.355.680 | 36 | 749.953.800 | 12 | 488.880.000 | 3,00 | 60.540.000 | 25,00 | 12,38 | 39,00 | 810.493.800 | 54,17 | 43,87 | | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|--|---|-----|----|-----|----|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 18 | Pembangunan Sarana dan prasarana obyek wisata (DAK) | Sarana dan Prasarana Objek wisata (paket) | 12 | 6.945.165.768 | 6 | 3.472.582.884 | 2 | 1.900.813.000 | - | - | - | - | 6,00 | 3.472.582.884 | 50,00 | 50,00 | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 12 | Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Mandeh | Biaya operasional pengelolaan kawan Mandeh (bln) | 72 | 425.912.000 | 36 | 355.130.380 | 12 | 305.076.000 | 3,00 | 51.628.000 | 25,00 | 16,92 | 39,00 | 406.758.380 | 54,17 | 95,50 | |
| | 2 | 1 | 02 | 13 | 16 | 38 | Pembuatan Perencanaan (DED dan RAB Obyek Wisata) | DED yang disusun (dok) | 20 | 457.365.200 | 10 | 129.484.000 | 4 | 98.640.000 | - | - | - | - | 10,00 | 129.484.000 | 50,00 | 28,31 | |
| | 2 | 2 | 01 | 02 | 15 | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Angka kunjungan wisata (org) | 15.640.917 | 7.400.212.000 | 8.936.767 | 2.065.642.123 | 2.801.850 | 909.564.900 | 0 | 5.698.650 | - | 0,63 | 8936767 | 2.071.340.773 | 57,14 | 27,99 | DISPARPORA |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 10 | Pelaksanaan Festival Langkisau | Terlaksananya Festival Langkisau (keg) | 5 | 451.376.000 | 0 | - | 1 | 112.844.000 | 0 | 244.000 | - | 0,22 | - | 244.000 | 0,00 | 0,05 | |
| | 2 | 01 | 02 | 13 | 15 | 11 | Pelaksanaan Tour De Singkarak | Terlaksananya Tour de singkarak (kali) | 6 | 3.369.697.000 | 3,00 | 1.097.179.665 | 1 | 476.769.500 | 0 | 1.147.700 | - | 0,24 | 3,00 | 1.098.327.365 | 50,00 | 32,59 | |
| | 2 | 01 | 02 | 13 | 15 | 14 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata | Jpromosi yang diikuti (kali) | 18 | 3.080.681.500 | 9,00 | 968.462.458 | 3 | 142.628.900 | 0 | 3.120.000 | - | 2,19 | 9,00 | 971.582.458 | 50,00 | 31,54 | |
| | 2 | 01 | 02 | 13 | 15 | 33 | Lomba Drumband Tingkat SLTA se- Sumbang | Terlaksananya Lomba Drumband (kali) | 1 | 60.957.500 | 0 | 0 | 1 | 60.957.500 | 0 | 1.186.950 | - | 1,95 | - | 1.186.950 | 0,00 | 1,95 | |
| | 2 | 01 | 02 | 13 | 15 | 34 | Parade Tingkuluak | Terlaksananya Parade Tingkuluak (kali) | 5 | 337.500.000 | 1 | 67.500.000 | 1 | 67.500.000 | 0 | - | - | - | 1,00 | 67.500.000 | 20,00 | 20,00 | |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 36 | Penyusunan Profil dan Promosi Pariwisata Pessel | Buku profil pariwisata pessel (dok) | 3 | 100.000.000 | 0 | - | 1 | 48.865.000 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 2 | 01 | 02 | 13 | 17 | Program Pengembangan Kemitraan | Jumlah kelompok sadar wisata yang berkembang (kelompok) | 37 | 2.833.102.000 | 30 | 167.768.000 | 2 | 855.820.000 | 0 | 352.000 | - | 0,04 | 30,00 | 168.120.000 | 81,08 | 5,93 | DISPARPORA |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | 8 | Pelaksanaan Famtrip | Paket famtrip yang dilaksanakan (keg) | 5 | 594.592.000 | 2,00 | 167.768.000 | 1 | 109.650.000 | - | - | - | - | 2,00 | 167.768.000 | 40,00 | 28,22 | |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | Pembinaan Kawasan Masyarakat Wisata (DAK Non Fisik) | Pembinaan yang dilakukan (bulan) | 3 | 2.238.510.000 | 0,00 | - | 3 | 746.170.000 | 3,00 | 352.000 | 100,00 | 0,05 | 3,00 | 352.000 | 100,00 | 0,02 | |
| | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang (kelompok) | 12 | 3.080.126.980 | 6 | 1.277.848.508 | 2 | 860.787.299 | 0 | 98.144.150 | - | 11,40 | 6 | 1.375.992.658 | 50,00 | 44,67 | DISPARPORA |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 29 | Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 2019 | Seleksi Uda-Uni (keg) | 6 | 939.685.480 | 3 | 390.714.800 | 1 | 435.616.100 | 1,00 | 39.786.500 | 100,00 | 9,13 | 4,00 | 430.501.300 | 66,67 | 45,81 | |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 3 | Pelatihan Ekraf | Jumlah peserta (org) | 200 | 150.000.000 | - | - | 50 | 128.549.499 | 5,00 | 19.927.500 | 10,00 | 15,50 | 5,00 | 19.927.500 | 2,50 | 13,29 | |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 23 | Aktifasi Ekonomi Kreatif | Jumlah kelompok yang difasilitasi (kel) | 100 | 823.777.000 | 60 | 407.747.200 | 10 | 83.700.000 | 4,00 | 33.584.750 | 40,00 | 40,13 | 64,00 | 441.331.950 | 64,00 | 53,57 | |
| | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 24 | Partisipasi Ekonomi Kreatif | event yang diikuti (keg) | 6 | 1.166.664.500 | 3 | 479.386.508 | 1 | 212.921.700 | - | 4.845.400 | - | 2,28 | 3,00 | 484.231.908 | 50,00 | 41,51 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,05 | 32,30 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| III | | | | | | | URUSAN PERTANIAN | | | 60.718.756.270 | | 27.046.384.785 | | 14.224.921.823 | | 696.445.526 | | | 27.742.830.311 | | 45,69 | | |
| DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | | | | | | | | 60.718.756.270 | | 27.046.384.785 | | 14.224.921.823 | | 696.445.526 | | | | 27.742.830.311 | | 45,69 | | |
| 1 | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tersedianya pelayanan administrasi yang prima (bln) | 72 | 6.474.148.000 | 36,00 | 2.204.004.344 | 12,00 | 945.642.358 | 3 | 105.809.051 | 25,00 | 11,19 | 39 | 2.309.813.395 | 54,17 | 35,68 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 72 | 961.416.000 | 36 | 247.875.972 | 12 | 180.000.000 | 3 | 15.029.878 | 25,00 | 8,35 | 39 | 262.905.850 | 54,17 | 27,35 | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya layanan jasa administrasi keuangan perkantoran (bulan) | 72 | 1.182.633.000 | 36 | 558.584.000 | 12 | 163.800.000 | 3 | 27.900.000 | 25,00 | 17,03 | 39 | 586.484.000 | 54,17 | 49,59 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya layanan jasa kebersihan kantor/ cleaning service (bulan) | 72 | 622.241.000 | 36 | 125.261.500 | 12 | 128.750.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 125.261.500 | 54,17 | 20,13 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpeliharanya peralatan kerja dinas (bulan) | 72 | 215.116.000 | 36 | 55.578.000 | 12 | 35.203.500 | 3 | 8.655.000 | 25,00 | 24,59 | 39 | 64.233.000 | 54,17 | 29,86 | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya ATK dinas dan UPTD/ BPK (bulan) | 72 | 724.094.000 | 36 | 293.578.928 | 12 | 148.565.135 | 3 | 21.799.690 | 25,00 | 14,67 | 39 | 315.378.618 | 54,17 | 43,55 | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya cetakan dan penggandaan dinas (bulan) | 72 | 291.174.000 | 36 | 90.409.250 | 12 | 42.216.714 | 3 | 5.019.483 | 25,00 | 11,89 | 39 | 95.428.733 | 54,17 | 32,77 | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen listrik kantor (bulan) | 72 | 58.613.000 | 36 | 17.970.900 | 12 | 8.907.009 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 17.970.900 | 54,17 | 30,66 | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan (bulan) | 72 | 83.448.000 | 36 | 41.041.000 | 12 | 13.000.000 | 3 | 1.500.000 | 25,00 | 11,54 | 39 | 42.541.000 | 54,17 | 50,98 | |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan minum rapat dinas dan tamu dinas (bulan) | 72 | 289.824.000 | 36 | 82.990.500 | 12 | 49.500.000 | 3 | 4.435.000 | 25,00 | 8,96 | 39 | 87.425.500 | 54,17 | 30,17 | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga di luar daerah (bulan) | 72 | 1.266.580.000 | 36 | 469.539.294 | 12 | 77.900.000 | 3 | 8.600.000 | 25,00 | 11,04 | 39 | 478.139.294 | 54,17 | 37,75 | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga di dalam daerah (bulan) | 72 | 779.009.000 | 36 | 221.175.000 | 12 | 97.800.000 | 3 | 12.870.000 | 25,00 | 13,16 | 39 | 234.045.000 | 54,17 | 30,04 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur | tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif (bin) | 72 | 3.524.420.000 | 36 | 1.598.897.796 | 12 | 1.077.098.000 | 3 | 41.675.598 | 25,00 | 3,87 | 39 | 1.640.573.394 | 54,17 | 46,55 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan roda dua dinas (unit) | 36 | 1.364.642.000 | 3 | 682.321.000 | 15 | 532.900.000 | - | - | - | - | 3 | 682.321.000 | 8,33 | 50,00 | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif (paket) | 15 | 273.858.000 | 1 | 136.929.000 | 10 | 70.050.000 | - | - | - | - | 1 | 136.929.000 | 6,67 | 50,00 | |
| | | | | | | Pengadaan Meubiler | Tersedianya mebeleur yang representatif (unit) | 6 | 302.338.000 | 4 | 70.250.000 | 2 | 134.050.000 | - | - | - | - | 4 | 70.250.000 | 66,67 | 23,24 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bin) | 72 | 617.450.000 | 36 | 385.726.000 | 12 | 95.500.000 | 3 | 8.790.000 | 25,00 | 9,20 | 39 | 394.516.000 | 54,17 | 63,89 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua (bin) | 72 | 966.132.000 | 36 | 323.671.796 | 12 | 244.598.000 | 3 | 32.885.598 | 25,00 | 13,44 | 39 | 356.557.394 | 54,17 | 36,91 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase aparatur profesional (%) | 100 | 327.050.000 | - | - | 50 | 117.075.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | DISTANHORBUN |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | jumlah aparatur yang dilatih (org) | 65 | 327.050.000 | - | - | 11 | 117.075.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan | Jumlah kelompok tani pemanfaat alsintan (kelompok) | 27 | 5.005.678.728 | 22 | 1.668.559.576 | 2 | 1.052.316.400 | - | 12.528.800 | - | 1,19 | 22 | 1.681.088.376 | 81,48 | 33,58 | DISTANHORBUN |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi tepat guna (kelompok) | 123 | | 120 | | 2 | | - | - | - | - | 120 | | 97,56 | | |
| | | | | | | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | Jumlah alat dan mesin pertanian (unit) | 148 | 2.368.176.800 | 33 | 1.184.088.400 | 88 | 611.574.400 | - | 4.595.000 | - | 0,75 | 33 | 1.188.683.400 | 22,30 | 50,19 | |
| | | | | | | Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Jumlah petani yang dilatih menjadi operator alsintan (orang) | 125 | 175.004.000 | 25 | 20.641.000 | 50 | 43.751.000 | - | - | - | - | 25 | 20.641.000 | 20,00 | 11,79 | |
| | | | | | | Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI | Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan budidaya padi SRI (orang) | 240 | 726.283.952 | 60 | 363.141.976 | 60 | 236.757.500 | 30 | 5.039.600 | 50,00 | 2,13 | 90 | 368.181.576 | 37,50 | 50,69 | |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna | Jumlah alat dan mesin pertanian brigade tanaman yang dipelihara (unit) | 250 | 201.376.400,00 | 50 | 100.688.200 | 50 | 65.601.000 | - | 2.000.000 | - | 3,05 | 50 | 102.688.200 | 20,00 | 50,99 | |
| | | | | | | Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik | Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang budidaya padi organik (orang) | 60 | 283.897.500,00 | 0 | - | 20 | 94.632.500 | - | 894.200 | - | 0,94 | - | 894.200 | - | 0,31 | |
| 4 | | | | | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Jumlah Produksi Padi (Ton) | 1.796.305 | 16.280.433.942 | 999.585 | 5.795.705.224 | 300.519 | 2.869.299.800 | 90.283 | 333.788.811 | 30,04 | 11,63 | 1.089.868 | 6.129.494.035 | 60,67 | 37,65 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | | Jumlah Produksi jagung (Ton) | 775.968 | | 462.745 | | 123.268 | 19.108 | - | 15,50 | | 481.853 | - | 62,10 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Cabe (Ton) | 18.455 | | 10.005 | | 3.141 | 865 | - | 27,54 | | 10.870 | - | 58,90 | | | |
| | | | | | | | Jumlah produksi bawang merah (Ton) | 1.509 | | 1.631 | | 253 | 81 | - | 32,02 | | 1.712 | - | 113,45 | | | |
| | | | | | | | Jumlah produksi Buah-buahan (Ton) | 179.202 | | 105.275 | | 30.012 | 6.542 | - | 21,80 | | 111.817 | - | 62,40 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton) | 1.063.225 | | 569.496 | | 183.414 | 30.540 | - | 16,65 | | 600.036 | - | 56,44 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Karet (Ton) | 66.118 | | 32.031 | | 11.073 | 2.105 | - | 19,01 | | 34.136 | - | 51,63 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi gambir (Ton) | 41.090 | | 15.529 | | 6.866 | 2.008 | - | 29,25 | | 17.537 | - | 42,68 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Pala (Ton) | 1.783 | | 812 | | 315 | 65 | - | 20,63 | | 877 | - | 49,18 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi kakao (Ton) | 8.547 | | 3.358 | | 1.425 | 88 | - | 6,18 | | 3.446 | - | 40,32 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Kopi (Ton) | 7.315 | | 3.245 | | 1.260 | 114 | - | 9,05 | | 3.359 | - | 45,92 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produksi Cengkeh (Ton) | 1.970 | | 1.102 | | 330 | 96 | - | 29,09 | | 1.198 | - | 60,83 | | | |
| | | | | | | Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan | Tersedianya bibit unggul tanaman Perkebunan (batang) | 80.000 | 1.694.316.942 | 7.407 | 847.158.471 | 62.500 | 251.570.000 | - | 8.237.400 | - | 3,27 | 7.407 | 855.395.871 | 9,26 | 50,49 | |
| | | | | | | Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian | Jumlah buku statistik pertanian (buku) | 6 | 1.016.642.000 | 3 | 423.801.400 | 1 | 122.862.500 | - | 18.952.500 | - | 15,43 | 3 | 442.753.900 | 50,00 | 43,55 | |
| | | | | | | Pengendalian Hama Penyakit/OPT | Jumlah pengamatan dan pengendalian OPT | 75 | 651.000.000 | 15 | 402.504.200 | 14 | 136.985.000 | - | 14.592.700 | - | 10,65 | 15 | 417.096.900 | 20,00 | 64,07 | |
| | | | | | | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian | Jumlah pertemuan kelompok penangkar (kali) | 10 | 1.231.119.000 | 4 | 488.191.287 | 2 | 138.227.000 | - | 1.375.000 | - | 0,99 | 4 | 489.566.287 | 40,00 | 39,77 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|----|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Pengembangan Tanaman Hortikultura | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penangkar tanaman hortikultura (orang) | 175 | 2.341.856.000 | 125 | 960.386.000 | 25 | 137.625.100 | - | 4.747.550 | - | 3,45 | 125 | 965.133.550 | 71,43 | 41,21 | |
| | | | | | | Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida | Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang diuji (sampel) | 16 | 113.765.000 | 8 | 77.816.800 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 77.816.800 | 50,00 | 68,40 | |
| | | | | | | Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida | Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang diuji (sampel) | 24 | 207.537.000 | - | - | 8 | 48.667.500 | - | 5.104.950 | - | 10,49 | - | 5.104.950 | - | 2,46 | |
| | | | | | | Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Jumlah Kecamatan yang dipeta-kan LP2B (kecamatan) | 15 | 2.295.690.000 | 9 | 1.160.884.600 | 5 | 609.454.400 | - | 215.771.250 | - | 35,40 | 9 | 1.376.655.850 | 60,00 | 59,97 | |
| | | | | | | Sekolah Lapang Budidaya Kakao | Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang (orang) | 60 | 276.655.000 | 11 | 194.413.000 | - | - | - | - | - | - | 11 | 194.413.000 | 18,33 | 70,27 | |
| | | | | | | Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Karet | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman karet (orang) | 140 | 1.969.770.000 | 65 | 532.621.700 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | 532.621.700 | 46,43 | 27,04 | |
| | | | | | | Pengendalian Hama Perkebunan | Jumlah gerakan pengendalian hama perkebunan (gerakan) | 90 | 750.377.000 | 24 | 387.352.661 | 15 | 332.275.000 | - | 9.790.950 | - | 2,95 | 24 | 397.143.611 | 26,67 | 52,93 | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan | Jumlah kelompok penangkar yang dibina (kelompok) | 40 | 342.046.000 | - | 76.891.500 | 2 | 171.357.500 | - | 20.423.561 | - | 11,92 | - | 97.315.061 | - | 28,45 | |
| | | | | | | Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan | Terfasilitasinya kegiatan pusat dan provinsi yang ada di daerah (bulan) | 60 | 415.837.000 | 12 | 243.683.605 | 12 | 104.517.300 | - | 15.132.450 | - | 14,48 | 12 | 258.816.055 | 20,00 | 62,24 | |
| | | | | | | Optimasi Lahann Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat | Jumlah bibit sawit yang disalurkan | 2.000 | 333.884.000 | - | - | 500 | 83.471.000 | - | 4.263.500 | - | 5,11 | - | 4.263.500 | - | 1,28 | |
| | | | | | | Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/ OPT Tanaman Perkebunan | Jumlah petani yang mengikuti SL OPT (orang) | 160 | 360.450.000 | - | - | 40 | 44.375.000 | 20 | 10.430.000 | 50,00 | 23,50 | 20 | 10.430.000 | 12,50 | 2,89 | |
| | | | | | | Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan | Jumlah bibit sawit yang siap ditanam (batang) | 80.000 | 1.683.200.000 | - | - | 20.000 | 420.800.000 | - | 4.024.250 | - | 0,96 | - | 4.024.250 | - | 0,24 | |
| | | | | | | Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian | Jumlah dokumen action plan kawasan pertanian | 2 | 596.289.000 | - | - | 1 | 267.112.500 | - | 942.750 | - | 0,35 | - | 942.750 | - | 0,16 | |
| 5 | | | | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | Rasio Penyuluh Terhadap Kelompok Tani | 0,103 | 6.072.687.000 | 0,097 | 961.718.301 | 0,103 | 566.161.500 | - | 47.735.250 | - | 8,43 | 0 | 1.009.453.551 | 94,17 | 16,62 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | | Jumlah Penyuluh Berprestasi (orang) | 15 | | 4 | | 6 | | - | - | - | - | 4 | | 26,67 | | |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Jumlah PPL yang difasilitasi operasional (orang) | 780 | 5.358.687.000 | 156 | 846.816.101 | 143 | 510.544.000 | 30 | 47.735.250 | 20,98 | 9,35 | 186 | 894.551.351 | 23,85 | 16,69 | |
| | | | | | | Penyusunan Program Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Jumlah program penyuluhan yang dihasilkan (dokumen) | 64 | 714.000.000 | 16 | 114.902.200 | 16 | 55.617.500 | - | - | - | - | 16 | 114.902.200 | 25,00 | 16,09 | |
| 6 | | | | | | Program Peningkatan Kelembagaan Petani | Jumlah Gapoktan Berprestasi (gapoktan) | 6 | 1.404.994.000 | 2 | 565.604.952 | 1 | 1.613.825.200 | - | 82.756.330 | - | 5,13 | 2 | 648.361.282 | 33,33 | 46,15 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Tani Berprestasi (kelompok) | 7 | | 3 | | 1 | | - | - | - | - | 3 | | 42,86 | | |
| | | | | | | | Jumlah Petani Berprestasi (orang) | 5 | | 1 | | 1 | | - | - | - | - | 1 | | 20,00 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----|------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA) | Jumlah LKMA yang dibina (LKMA) | 580 | 210.390.000 | 145 | 179.375.200 | 145 | 104.698.400 | - | 8.675.000 | - | 8,29 | 145 | 188.050.200 | 25,00 | 89,38 | |
| | | | | | | Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum | Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok) | 465 | 813.146.000 | 50 | 326.678.400 | 115 | 139.260.000 | - | 12.237.000 | - | 8,79 | 50 | 338.915.400 | 10,75 | 41,68 | |
| | | | | | | Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi | Luas lahan usaha tani yang difasilitasi (ha) | 10.600 | 381.458.000 | 168 | 59.551.352 | 2.000 | 46.330.400 | - | 16.499.330 | - | 35,61 | 168 | 76.050.682 | 1,58 | 19,94 | |
| | | | | | | LOAN IPDMIP | Jumlah petani yang mengikuti SL Budidaya Padi (orang) | 720 | 3.331.621.200 | - | 296.323.000 | 180 | 1.110.540.400 | 30 | 41.770.000 | 16,67 | 3,76 | 30 | 338.093.000 | 4,17 | 10,15 | |
| | | | | | | Penunjang LOAN IPDMIP | Kegiatan LOAN IPDMIP yang difasilitasi | 4 | 600.914.000 | - | 114.770.800 | 1 | 70.862.600 | - | 3.000.000 | - | 4,23 | - | 117.770.800 | - | 19,60 | |
| | | | | | | Forum Komunikasi Petani/ Kontak Tani | Jumlah pertemuan kontak tani yang dilaksanakan (kali) | 2 | 215.150.000 | - | - | 1 | 142.133.400 | - | 575.000 | - | 0,40 | - | 575.000 | - | 0,27 | |
| 7 | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan | persentase peningkatan pembangunan prasarana pertanian (%) | 6,90 | 19.243.980.000 | 5,00 | 13.414.993.499 | 1,50 | 5.560.544.123 | - | 39.066.086 | - | 0,70 | 5 | 13.454.059.585 | 72,46 | 69,91 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian (penunjang satker 08) | Terfasilitasinya kegiatan pusat (satker 08) (kegiatan) | 4 | 464.100.000 | 1 | 155.430.600 | 1 | 105.523.991 | - | 21.858.786 | - | 20,71 | 1 | 177.289.386 | 25,00 | 38,20 | |
| | | | | | | Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian | Panjang Jalan Produksi/ Jalan Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi (paket) | 21 | 4.226.880.000 | 13 | 5.423.666.750 | 11 | 3.569.675.000 | - | 10.632.550 | - | 0,30 | 13 | 5.434.299.300 | 61,90 | 128,57 | |
| | | | | | | DAK Bidang Pertanian dan Pendamping | Jumlah embung/ dam parit saluran yang dibangun/ direhabilitasi (unit) | 51 | 13.230.000.000 | 24 | 7.754.400.500 | 13 | 1.803.095.132 | - | 2.774.750 | - | 0,15 | 24 | 7.757.175.250 | 47,06 | 58,63 | |
| | | | | | | Penunjang DAK Bidang Pertanian | Lancarnya pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian (kegiatan) | 4 | 1.323.000.000 | 2 | 81.495.649 | 1 | 82.250.000 | - | 3.800.000 | - | 4,62 | 2 | 85.295.649 | 50,00 | 6,45 | |
| 8 | | | | | | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Jumlah Diversifikasi Hasil Olahan Tanaman Pangan (jenis) | 8 | 2.385.364.600 | 2 | 836.901.093 | 3 | 422.959.442 | - | 33.085.600 | - | 7,82 | 2 | 869.986.693 | 25,00 | 36,47 | DISTANHORBUN |
| | | | | | | | Jumlah Diversifikasi Hasil Olahan Tanaman Hortikultura (jenis) | 12 | | 4 | | 5 | | | | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Diversifikasi Hasil Olahan Tanaman Perkebunan (jenis) | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut Hasil Komoditi Tanaman Pangan | Jumlah RMU yang direvitalisasi (unit) | 2 | 1.276.126.000 | 1 | 315.368.400 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 315.368.400 | 50,00 | 24,71 | |
| | | | | | | Pengembangan Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengolahan pasca panen komoditi perkebunan (orang) | 180 | 323.920.000 | 75 | 264.972.800 | 11 | 75.270.000 | - | 3.893.200 | - | 5,17 | 75 | 268.866.000 | 41,67 | 83,00 | |
| | | | | | | Peningkatan Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura | Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman hortikultura yang disalurkan (unit) | 16 | 153.810.000 | 8 | 127.644.600 | - | - | - | - | - | - | 8 | 127.644.600 | 50,00 | 82,99 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|---|---|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | | | | | | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah | Jumlah kegiatan promosi yang diikuti (kegiatan) | 12 | 208.902.000 | 3 | 54.196.043 | 3 | 66.320.000 | - | - | - | - | 3 | 54.196.043 | 25,00 | 25,94 | | |
| | | | | | | Penumbuhan Agrowisata | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan budidaya sehat tanaman jeruk pada lokasi agrowisata (orang) | 100 | 55.637.300 | 50 | 27.818.650 | - | - | - | - | - | - | 50 | 27.818.650 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan | Rapat - rapat koordinasi dan asosiasi bidang perkebunan yang dilaksanakan (keg) | 18 | 140.701.800 | 9 | 46.900.600 | 3 | 52.199.442 | 1 | 7.574.250 | 33,33 | 14,51 | 10 | 54.474.850 | 55,56 | 38,72 | | |
| | | | | | | Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura | Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman hortikultura yang disalurkan (paket) | 12 | 226.267.500 | - | - | 4 | 75.422.500 | - | 8.977.500 | - | 11,90 | - | 8.977.500 | - | 3,97 | | |
| | | | | | | Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan | Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil (org) | 30 | 461.242.500 | - | - | 10 | 153.747.500 | - | 12.640.650 | - | 8,22 | - | 12.640.650 | - | 2,74 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,59 | 40,33 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | |
| DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | | | | | 30.174.025.585 | | 11.719.099.287 | | 6.687.039.701 | | 642.414.509 | | | | 12.669.512.967 | | | | | |
| 1 | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 3.067.772.264 | 36 | 1.106.661.707 | 12 | 1.054.289.695 | 3,00 | 120.910.899 | 25,00 | 11,47 | 39,00 | 1.927.619.287 | 54,17 | 62,83 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telpon kantor (bln) | 72 | 257.400.000 | 36 | 152.913.764 | 12 | 74.184.000 | 3,00 | 17.237.541 | 25,00 | 23,24 | 39 | 170.151.305 | 54,17 | 66,10 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 07 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan (bln) | 72 | 572.400.000 | 36 | 365.407.800 | 12 | 152.200.000 | 3,00 | 32.550.000 | 25,00 | 21,39 | 39 | 397.957.800 | 54,17 | 69,52 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor (bln) | 72 | 41.172.000 | 36 | 45.400.516 | 12 | 32.851.767 | 3,00 | 8.596.128 | 25,00 | 26,17 | 39 | 53.996.644 | 54,17 | 131,15 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (bln) | 72 | 93.900.000 | 36 | 50.564.535 | 12 | 22.700.000 | 3,00 | 1.575.000 | 25,00 | 6,94 | 39 | 52.139.535 | 54,17 | 55,53 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK (bln) | 72 | 209.496.264 | 36 | 112.505.855 | 12 | 80.988.488 | 3,00 | 5.646.000 | 25,00 | 6,97 | 39 | 118.151.855 | 54,17 | 56,40 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya administrasi perkantoran (bln) | 72 | 136.962.000 | 36 | 73.669.013 | 12 | 26.041.200 | 3,00 | 7.144.000 | 25,00 | 27,43 | 39 | 80.813.013 | 54,17 | 59,00 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen listrik /penerangan gedung kantor (bln) | 72 | 55.482.000 | 36 | 71.213.439 | 12 | 8.905.040 | 3,00 | 4.403.780 | 25,00 | 49,45 | 39 | 75.617.219 | 54,17 | 136,29 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bln) | 72 | 36.000.000 | 36 | 18.087.100 | 12 | 5.500.000 | 3,00 | 980.000 | 25,00 | 17,82 | 39 | 19.067.100 | 54,17 | 52,96 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|-----|---|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat dan tamu dinas (bln) | 72 | 164.340.000 | 36 | 88.780.929 | 12 | 29.122.500 | 3,00 | 822.250 | 25,00 | 2,82 | 39 | 89.603.179 | 54,17 | 54,52 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bln) | 72 | 859.440.000 | 36 | 389.124.218 | 12 | 88.200.000 | 3,00 | 14.975.000 | 25,00 | 16,98 | 39 | 404.099.218 | 54,17 | 47,02 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln) | 72 | 534.900.000 | 36 | 257.040.925 | 12 | 130.000.000 | 3,00 | 21.250.000 | 25,00 | 16,35 | 39 | 278.290.925 | 54,17 | 52,03 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 01 | 30 | Penunjang operasional perencanaan dan Pelaporan | Terlaksananya penunjang operasional perencanaan (bln) | 48 | 106.280.000 | 36 | 182.000.295 | 12 | 403.596.700 | 3,00 | 5.731.200 | 25,00 | 1,42 | 39 | 187.731.495 | 81,25 | 176,64 | |
| 2 | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | ketersediaan sarana penunjang (bln) | 72 | 2.325.952.700 | 36 | 1.407.196.429 | 12 | 664.139.320 | 3,00 | 176.999.850 | 25,00 | 26,65 | 39,00 | 1.584.196.279 | 54,17 | 68,11 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | tersedianya peralatan gedung kantor (unit) | 60 | 559.420.000 | 42 | 225.690.038 | 11 | 144.765.870 | 10,00 | 107.078.000 | 90,91 | 73,97 | 52 | 332.768.038 | 86,67 | 59,48 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | 10 | Pengadaan Meubiler | Tersedianya meubiler kantor | 60 | 334.550.000 | 54 | 343.061.552 | 3 | 103.913.450 | 0,75 | - | 25,00 | - | 54,75 | 343.061.552 | 91,25 | 102,54 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | 72 | 502.384.000 | 54 | 509.544.389 | 12 | 174.000.000 | 3,00 | 43.059.500 | 25,00 | 24,75 | 57 | 552.603.889 | 79,17 | 110,00 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bln) | 72 | 929.598.700 | 54 | 328.900.450 | 12 | 241.460.000 | 3,00 | 26.862.350 | 25,00 | 11,12 | 57 | 355.762.800 | 79,17 | 38,27 | |
| 3 | 2 | 00 | 03 | 02 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP Dinas | A | 156.000.000 | B | 75.077.187 | BB | 39.781.000 | 0 | 3.568.250 | 8,97 | B | 78.645.437 | 85,00 | 50,41 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 06 | 10 | Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik | Tersusunnya laporan tahunan (dok) | 24 | 156.000.000 | 12 | 75.077.187 | 4 | 39.781.000 | 3,00 | 3.568.250 | 75,00 | 8,97 | 15 | 78.645.437 | 62,50 | 50,41 | |
| 4 | 2 | 00 | 03 | 02 | 21 | | Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan ditangani | 76.017 | 2.630.768.996 | 25.000 | 975.607.780 | 16.455 | 512.045.596 | 3.554 | 51.205.650 | 21,60 | 10,00 | 28.554 | 975.607.780 | 37,56 | 37,08 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 21 | 02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | Jumlah hewan yang ditangani | 70.970 | 506.876.176,00 | 34.275 | 253.438.088 | 11.425 | 207.009.798 | 3.554 | 31.469.200 | 31,11 | 15,20 | 37.829 | 975.607.780 | 53,30 | 192 | |
| | | | | | | | - penanganan gangguan reproduksi | | 350 | | 100 | | 200 | 50 | - | 25,00 | | 150 | 975.607.780 | 42,86 | | | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 21 | 04 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah | terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak (bln) | 72 | 740.626.820 | 36 | 92.787.410 | 12 | 139.232.500 | 3,00 | 18.200.950 | 25,00 | 13,07 | 39 | 110.988.360 | 54,17 | 14,99 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 21 | 07 | Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies | jumlah ternak yang dikendalikan dari penyakit endemik | 30.300 | 1.362.291.000 | 5017 | 136.568.435 | 5000 | 144.918.298 | 0,00 | - | - | - | 5017,00 | 136.568.435 | 16,56 | 10,02 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 21 | 09 | Pengawasan peredaran obat hewan | Jumlah lokasi peredaran obat hewan yang diawasi | 15 | 20.975.000 | 0 | - | 10 | 20.885.000 | 3,00 | 1.535.500 | 30,00 | 7,35 | 3,00 | 1.535.500 | 20,00 | 7,32 | |
| 4 | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Peningkatan produksi ternak (%) | | 14.834.261.585 | | 4.944.814.615 | | 2.792.339.801 | - | 220.379.050 | 7,89 | - | 4.824.351.805 | 106,09 | 32,52 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | | | | Populasi ternak (ekor) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Sapi Polong | | 84.472 | | 81.786 | | 82.281 | | 0 | - | - | 81.786 | - | 96,82 | | | |
| | | | | | | | - Kerbau | | 8.666 | | 8.506 | | 8.466 | | 0 | - | - | 8.506 | - | 98,16 | | | |
| | | | | | | | - Kambing | | 41.920 | | 40.856 | | 41.794 | | 0 | - | - | 40.856 | - | 97,46 | | | |
| | | | | | | | - Ayam Buras | | 813.635 | | 787.857 | | 796.547 | | 0 | - | - | 787.857 | - | 96,83 | | | |
| | | | | | | | - Ayam Ras Petelur | | 114.310 | | 97.500 | | 98.745 | | 0 | - | - | 97.500 | - | 85,29 | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | - Ayam Ras Pedaging | 2.107.620 | | 1.734.200 | | 1.079.102 | | 0 | - | - | 1.734.200 | - | 82,28 | | | |
| | | | | | | | - Itik | 157.021 | | 157.266 | | 152.403 | | 0 | - | - | 157.266 | - | 100,16 | | | |
| | | | | | | | Produksi ternak (kg) | | | | | | | 0 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | - Daging Sapi | 1.397.267 | | 1.354.022 | | 1.367.562 | | 0 | - | - | 1.354.022 | - | 96,91 | | | |
| | | | | | | | - Daging Kerbau | 55.114 | | 40.520 | | 40.925 | | 0 | - | - | 40.520 | - | 73,52 | | | |
| | | | | | | | - Daging Kambing | 50.704 | | 44.958 | | 41.709 | | 0 | - | - | 44.958 | - | 88,67 | | | |
| | | | | | | | - Daging Ayam Buras | 872.623 | | 965.301 | | 974.954 | | 0 | - | - | 965.301 | - | 110,62 | | | |
| | | | | | | | - Daging Ayam Ras Petelur | 47.153 | | 71.162 | | 71.174 | | 0 | - | - | 71.162 | - | 150,92 | | | |
| | | | | | | | - Daging Ayam Ras Pedaging | 1.686.623 | | 1.886.261 | | 1.894.581 | | 0 | - | - | 1.886.261 | - | 111,84 | | | |
| | | | | | | | - Daging Itik | 64.771 | | 92.447 | | 94.228 | | 0 | - | - | 92.447 | - | 142,73 | | | |
| | | | | | | | - Telur Ayam Ras | 727.013 | | 751.725 | | 628.021 | | 0 | - | - | 751.725 | - | 103,40 | | | |
| | | | | | | | - Telur Ayam Buras | 341.727 | | 503.243 | | 334.550 | | 0 | - | - | 503.243 | - | 147,26 | | | |
| | | | | | | | - Telur Itik | 716.016 | | 863.392 | | 694.958 | | 0 | - | - | 863.392 | - | 120,58 | | | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 02 | 02 | Pembibitan dan Perawatan Ternak | 72 | 1.985.984.000 | 36 | 829.060.364 | 12 | 213.096.500 | 3,00 | 13.632.000 | 25,00 | 6,40 | 54 | 829.060.364 | 75,00 | 41,75 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 03 | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 4.936 | 4.499.332.004 | - | - | 1.234 | 1.124.833.001 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 06 | Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Obat Ternak | 68.000 | 1.424.584.627 | 33.000 | 738.562.718 | 11.000 | 221.245.000 | 11.000 | 131.664.700 | 100,00 | 59,51 | 44.000 | 1.028.254.536 | 64,71 | 72,18 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 10 | Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB | 35.000 | 2.208.956.866 | 27.157 | 1.028.254.536 | 4400 | 361.281.200 | 898 | 24.222.200 | 20,41 | 6,70 | 28.055 | 567.239.757 | 80,16 | 25,68 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 17 | Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan pembangunan | 2.400 | 2.400.000.000 | 1.036 | 1.499.888.583 | 5841 | 600.180.000 | 0,00 | 21.635.800 | - | 3,60 | 1036 | 1.521.524.383 | 43,17 | 63,40 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 18 | Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan | 1.000 | 1.319.818.845 | 850 | 567.239.757 | 120 | 159.420.000 | 0,00 | 16.889.050 | - | 10,59 | 850 | 584.128.807 | 85,00 | 44,26 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 22 | Pencapaian Swasembada daging sapi dan kerbau | 72 | 562.226.021 | 54 | 281.808.657 | 12 | 77.783.600 | 3,00 | 5.551.800 | 25,00 | 7,14 | 57 | 287.360.457 | 79,17 | 51,11 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 22 | 23 | Fasilitasi pengembangan modal usaha peternakan | 100 | 433.359.222 | 30 | - | 40 | 34.500.500 | 5,00 | 6.783.500 | 12,50 | 19,66 | 35 | 6.783.500 | 35,00 | 1,57 | |
| | 5 | 2 | 00 | 03 | 02 | 23 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 20 | 2.191.820.928 | 8 | 952.605.254 | 4 | 267.354.289 | 1 | 52.141.500 | 25,00 | 19,50 | 9 | 1.004.746.754 | 45,00 | 45,84 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 23 | 07 | Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | 20 | 2.191.820.928 | 8 | 952.605.254 | 4 | 267.354.289 | 1,00 | 52.141.500 | 25,00 | 19,50 | 9,00 | 1.004.746.754 | 45,00 | 45,84 | |
| | 6 | 2 | 00 | 03 | 02 | 23 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 12 | 606.352.968 | 4 | 151.588.242 | 4 | 143.610.000 | 1 | 3.278.000 | 25,00 | 2,28 | 5 | 154.866.242 | 41,67 | 25,54 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | | | Penerapan Teknologi Peternakan | 12 | 606.352.968 | 4 | 151.588.242 | 4 | 143.610.000 | 0,00 | 3.278.000 | - | 2,28 | 4 | 154.866.242 | 33,33 | 25,54 | |
| | 7 | 2 | 00 | 03 | 02 | 29 | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan | 40 | 4.361.096.144 | 10 | 2.105.548.072 | 10 | 1.213.480.000 | 0 | 13.931.310 | - | 1,15 | 10,00 | 2.119.479.382 | 25,00 | 48,60 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 29 | 01 | Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Peternakan | 12 | 888.986.440 | 5 | 444.493.220 | 2 | 155.755.000 | 0,00 | 5.638.750 | - | 3,62 | 5,00 | 450.131.970 | 41,67 | 50,63 | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 29 | 01 | Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan (DAK dan Penunjang) | 12 | 3.322.109.704 | 5 | 1.661.054.852 | 3 | 1.010.000.000 | 1,00 | 8.292.560 | 33,33 | 0,82 | 6,00 | 1.669.347.412 | 50,00 | 50,25 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|--|---|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 2 | 00 | 03 | 02 | 29 | 01 | Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan (DAK dari DAU) | Terlaksananya pembangunan sarana prasarana peternakan | 8 | 150.000.000 | - | - | 4 | 47.725.000 | 0,00 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,96 | 40,29 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | |
| IV | | | | | | | URUSAN PERDAGANGAN | | | 69.421.610.600 | | 30.750.638.805 | | 16.809.224.800 | 0 | 130.988.237 | | | | 30.881.627.042 | | | | |
| 1 | 06 | 1 | 02 | 11 | 15 | | Program Perlindungan Konsumen dan Pngamanan Perdagangan | Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antarwaktu | < 9 % | 4.912.360.000 | < 9 % | 644.049.905 | < 9 % | 818.952.400 | < 9 % | 59.484.325 | | | 7,26 | < 9 % | 703.534.230 | 100,00 | 14,32 | DKUPP |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 15 | 03 | Peningkatan pengawasan peredaran barang | Jumlah pengawasan (keg) | 42 | 540.000.000 | 27 | 120.731.570 | 15 | 73.437.000 | 4 | 11.477.600 | 26,67 | 15,63 | 31 | 132.209.170 | 73,81 | 24,48 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 15 | 04 | Operasionalisasi dan perlengkapan UPTD Kemetrologian | Terlaksana-nya persiapan pelayanan UPTD (bulan) | 48 | 2.378.725.000 | 12 | 162.251.665 | 12 | 520.350.000 | 3 | 37.545.275 | 25,00 | 7,22 | 15 | 199.796.840 | 31,25 | 8,40 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 15 | 22 | Pemantauan harga dan Operasi Pasar | Jumlah pemantauan (kegiatan) | 30 | 1.713.635.000 | 11 | 312.112.770 | 6 | 225.165.400 | 2 | 10.461.450 | 33,33 | 4,65 | 13 | 322.574.220 | 43,33 | 18,82 | | |
| | | | | | | | | Jumlah papan display informasi harga (unit) | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 40,00 | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 15 | 24 | Pembuatan Database Perdagangan | Database perdagangan (dok) | 5 | 280.000.000 | 1 | 48.954.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 48.954.000 | 20,00 | 17,48 | | |
| 2 | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat teknis SNI 8152:2015 | 9 | 64.509.250.600 | 2 | 30.106.588.900 | 2 | 15.990.272.400 | 0 | 71.503.912 | | | 0,45 | 2 | 30.178.092.812 | 22,22 | 46,78 | DKUPP |
| | | | | | | | | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 13,13 | | 12,53 | | 0,04 | | 0 | | | | 12,53 | | 95,43 | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 06 | Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah (paket) | 12 | 938.850.000 | 6 | 490.985.220 | 3 | 161.198.400 | 0 | 12.015.762 | - | 7,45 | 6 | 503.000.982 | 50,00 | 53,58 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 11 | Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan pengelolaan Pasar | Operasional penagihan PAD Pasar (bln) | 72 | 1.378.644.000 | 36 | 474.481.780 | 12 | 68.160.000 | 3 | 14.666.250 | 25,00 | 21,52 | 39 | 489.148.030 | 54,17 | 35,48 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 12 | Pengamanan dan Pengelolaan Pasar | Operasional pengelolaan pasar (bln) | 72 | 2.105.724.000 | 36 | 939.828.270 | 12 | 368.363.400 | 3 | 37.340.650 | 25,00 | 10,14 | 39 | 977.168.920 | 54,17 | 46,41 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 34 | Peningkatan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan | Pasar Nagari yang terbangun / direvitalisasi (unit) | 20 | 8.677.932.000 | 9 | 1.507.145.100 | 0 | - | 0 | - | - | - | 9 | 1.507.145.100 | 45,00 | 17,37 | | |
| | | | | | | 39 | Penyelenggaraan Pameran Ekspo | Terlaksananya pameran/ pameran expo | 4 | 1.188.220.000 | 0 | - | 1 | 297.055.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 43 | Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan | Jumlah bangunan Pasar yang direhab | 15 | 9.104.405.000 | 8 | 1.759.902.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | 8 | 1.759.902.400 | 53,33 | 19,33 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 50 | Revitalisasi pasar hilalang kecamatan pancung soal (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016) | Jumlah bangunan Pasar yang direhab | 1 | 213.855.000 | 1 | 213.855.120 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 213.855.120 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 51 | Revitalisasi pasar balai jumat lahan kecamatan LSB (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016) | Jumlah bangunan Pasar yang direhab | 1 | 199.436.000 | 1 | 199.435.570 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 199.435.570 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 56 | Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan | Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisa-si | 24 | 24.524.919.000 | 13 | 20.605.718.540 | 6 | 12.011.650.000 | 0 | 5.592.250 | - | 0,05 | 13 | 20.611.310.790 | 54,17 | 84,04 | | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 58 | Rehab Pasar Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Propinsi TA 2017) | Jumlah Pasar yang direvitalisasi | 1 | 147.576.000 | 1 | 147.576.000 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 147.576.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 60 | Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan | Operasional Percepatan Pembangunan Pasar Kabupaten | 48 | 800.000.000 | 12 | 270.357.000 | 12 | 87.790.000 | 3 | - | 25,00 | - | 15 | 270.357.000 | 31,25 | 33,79 | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 63 | Pembuatan buku Profil Pasar Kab. Pesisir Selatan | Data profil Pasar (dok) | 2 | 40.918.800 | 1 | 20.459.400 | 0 | - | 0 | - | | | 1 | 20.459.400 | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | Pembuatan Database Perdagangan | Database perdagangan (dok) | 3 | 188.770.800 | 0 | - | 1 | 62.923.600 | | - | - | - | | | | | |
| | 06 | 1 | 02 | 11 | 18 | 65 | Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK) | Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun | 15 | 15.000.000.000 | 3 | 3.476.844.500 | 2 | 2.933.132.000 | 0 | 1.889.000 | - | 0,06 | 3 | 3.478.733.500 | 20,00 | 23,19 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,55 | 30,55 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |
| V | | | | | | | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | 8.995.381.750 | | 3.820.323.228 | | 15.759.614.000 | | 31.165.200 | | | 3.849.188.428 | | | | |
| 1 | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pertumbuhan Industri (%) | 2,79 | 4.373.902.750 | 2,00 | 1.984.920.799 | 0,39 | 555.282.000 | - | 19.124.000 | - | 3,44 | 2 | 2.004.044.799 | 71,68 | 45,82 | DKUPP |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | | Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan menengah | Jumlah peraturan yang diterbitkan | 1 | 75.000.000 | - | - | 1 | 18.123.000 | - | 6.605.000 | - | 36,45 | - | 6.605.000 | 0,00 | 8,81 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 09 | Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta | jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (unit usaha) | 100 | 120.000.000 | 30 | 66.425.900 | 40 | 45.407.000 | - | - | - | - | 30 | 66.425.900 | 30,00 | 55,35 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 10 | Pemutakhiran Data IKM | Data IKM (dok) | 6 | 366.210.000 | 3 | 149.200.520 | 1 | 73.481.000 | - | 14.742.000 | - | 20,06 | 3 | 163.942.520 | 50,00 | 44,77 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 15 | Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM | Operasional Dekranasda (bin) | 72 | 2.143.803.000 | 36 | 1.452.669.829 | 12 | 365.600.000 | 3 | 4.382.000 | 25,00 | 1,20 | 39 | 1.457.051.829 | 54,17 | 67,97 | |
| | | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan IKM | Jumlah produk IKM yang terawasi | 400 | 420.000.000 | | | 100 | 52.671.000 | | 2.300.000 | - | 4,37 | - | 2.300.000 | 0,00 | 0,55 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 20 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK) | Ranperda REPIK (dok) | 1 | 148.889.750 | 1 | 148.889.750 | - | - | - | - | - | - | 1 | 148.889.750 | 100,00 | 100,00 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 22 | Fasilitasi IKM terhadap Pemanfaatan sumber daya | Jumlah IKM yang difasilitasi (unit) | 125 | 575.000.000 | 25 | 71.578.800 | - | - | - | - | - | - | 25 | 71.578.800 | 20,00 | 12,45 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 16 | 24 | Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah | Jumlah IKM yang dilatih | 250 | 600.000.000 | 40 | 96.156.000 | - | - | - | - | - | - | 40 | 96.156.000 | 16,00 | 16,03 | |
| 2 | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | Jumlah produk bersertifikat halal, HKI, uji laboratorium, izin edar | 60 | 570.000.000 | - | - | 30 | 127.345.000 | - | 10.392.000 | - | 8,16 | - | 10.392.000 | 0,00 | 1,82 | DKUPP |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | 5 | Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas | Jumlah IKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal, HKI, uji laboratorium, izin edar (unit) | 60 | 570.000.000 | - | - | 30 | 127.345.000 | - | 10.392.000 | - | 8,16 | - | 10.392.000 | 0,00 | 1,82 | |
| 3 | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri | Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (jenis produk) | 20 | 1.470.000.000 | 10 | - | 2 | 183.563.000 | - | - | - | - | 10 | - | 50,00 | - | DKUPP |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | 5 | Pembinaan Kemampuan teknologi industri kepada IKM | Jumlah IKM yang terbina dalam menggunakan teknologi tepat guna (unit) | 360 | 1.470.000.000 | - | - | 40 | 183.563.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------|----|-----|----|-----|----|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| 4 | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Jumlah Sentra IKM (unit) | 4 | 4.563.754.000 | - | 1.787.245.629 | 1 | 14.893.424.000 | - | 9.741.200 | - | 0,07 | - | 1.796.986.829 | 0,00 | 39,38 | DKUPP | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | 5 | Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan | Jumlah IKM sentra yang dibina dan dilatih (unit) | 240 | 1.146.383.000 | 65 | 171.429.600 | 40 | 125.424.000 | - | 2.000.000 | - | 1,59 | 65 | 173.429.600 | 27,08 | 15,13 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | 07 | Pembangunan Sentra IKM (DAK) 2018 | Jumlah sarana sentra IKM yang dibangun | 3 | 3.106.701.000 | 1 | 938.970.000 | 1 | 14.500.000.000 | - | 6.866.000 | - | 0,05 | 1 | 945.836.000 | 33,33 | 30,45 | |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 19 | 08 | Pembangunan Gedung Sentra IKM (Penunjang DAK) | Penunjang Operasional Pembangun-an Sentra IKM | 24 | 310.670.000 | 12 | 676.846.029 | 12 | 268.000.000 | 3 | 875.200 | 25,00 | 0,33 | 15 | 677.721.229 | 62,50 | 218,15 | |
| 5 | 07 | 1 | 02 | 11 | 20 | Program Peningkatan Iklim Usaha Industri | Jumlah IKM yang dibina | 50 | 57.725.000 | 50 | 48.156.800 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 48.156.800 | 100,00 | 83,42 | Program ini Sudah tidak digunakan lagi |
| | 07 | 1 | 02 | 11 | 20 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Indutri Kecil dan Menengah | Jumlah IKM yang dibina | 50 | 57.725.000 | 50 | 48.156.800 | 0 | - | 0 | - | - | - | 50 | 48.156.800 | 100,00 | 83,42 | Sudah tidak digunakan lagi |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,42 | 21,75 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| VI | | | | | | URUSAN TRANSMIGRASI | | 19.051.197.930 | | 2.333.565.270 | | 4.641.831.800 | | 4.400.000 | | 2.337.965.270 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Persentase sarana dan prasarana pendukung di wilayah KTM dalam kondisi baik (%) | 100 | 19.051.197.930 | 70 | 2.333.565.270 | 10 | 4.641.831.800 | 1 | 4.400.000 | 10 | 0 | 71 | 2.337.965.270 | 71,00 | 12,27 | Dinas Nakertran | |
| | | | | | | Fasilitasi Dukungan KTM Lunang Silaut | Dokumengan untuk KTM (paket) | 12 | 5.318.496.000 | 7 | 892.413.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 892.413.250 | 58,33 | 16,78 | | |
| | | | | | | Pendampingan dana pembantuan KTM Lunang Silaut. | Anggaran pendamping Dana TP (keg) | 6 | 1.440.871.940 | 3 | 623.489.540 | 1 | 113.516.400 | 1 | 2.400.000 | 100 | 2 | 4 | 625.889.540 | 66,67 | 43,44 | | |
| | | | | | | Pembinaan Usaha Transmigrasi | Jumlah kelompok tyang dibina | 6 | 2.168.672.790 | 4 | 431.723.040 | 1 | 113.100.000 | 1 | 1.000.000 | 100 | 1 | 5 | 432.723.040 | 83,33 | 19,95 | | |
| | | | | | | Perencanaan Fasilitas dukungan KTM | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dok) | 20 | 1.539.653.200 | 4 | 385.939.440 | 5 | 215.215.400 | 1 | 1.000.000 | 20 | 0 | 5 | 386.939.440 | 25,00 | 25,13 | | |
| | | | | | | Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/ jembatan dikawasan transmigrasi (DAK Fisik Afirmasi) | Infrastruktur, Sarana Prasarana yang dibangun (paket) | 10 | 13.902.000.000 | 0 | 0 | 2 | 4.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,00 | 12,27 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |
| | | | | | | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PENGAWASAN | | 36.629.070.000 | | 9.684.957.522 | | 3.345.873.716 | | 627.028.464 | | 10.311.985.986 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | Program Pelayanan Adm Perkantoran | Pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran (bln) | 72 | 5.817.500.000 | 36 | 1.701.164.798 | 12 | 492.641.857 | 6 | 93.280.905 | 50,00 | 18,93 | 42 | 1.794.445.703 | 58,33 | 30,85 | inspektorat | |
| | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air | 72 | 433.500.000 | 36 | 130.876.560 | 12 | 51.460.500 | 3 | 8.242.924 | 25,00 | 16,02 | 39 | 139.119.484 | 54,17 | 32,09 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan | 72 | 481.000.000 | 36 | 221.075.000 | 12 | 89.400.000 | 3 | 13.550.000 | 25,00 | 15,16 | 39 | 234.625.000 | 54,17 | 48,78 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah sarana Kebersihan | 72 | 433.000.000 | 36 | 167.350.400 | 12 | 61.205.000 | 3 | 13.549.236 | 25,00 | 22,14 | 39 | 180.899.636 | 54,17 | 41,78 | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja | 72 | 310.500.000 | 36 | 81.331.900 | 12 | 20.400.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 81.331.900 | 54,17 | 26,19 | | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK | 72 | 458.500.000 | 36 | 102.029.400 | 12 | 56.138.367 | 3 | 14.428.545 | 25,00 | 25,70 | 39 | 116.457.945 | 54,17 | 25,40 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetakan penggandaan | 72 | 343.500.000 | 36 | 125.083.400 | 12 | 28.219.990 | 3 | 4.747.200 | 25,00 | 16,82 | 39 | 129.830.600 | 54,17 | 37,80 | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan | 72 | 218.500.000 | 36 | 53.113.000 | 12 | 9.738.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 53.113.000 | 54,17 | 24,31 | |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah surat Kabar dean Buku Per-UU | 72 | 158.500.000 | 36 | 25.620.000 | 12 | 4.500.000 | 3 | 720.000 | 25,00 | 16,00 | 39 | 26.340.000 | 54,17 | 16,62 | |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah biaya jamuan makan dan minum | 72 | 320.500.000 | 36 | 120.000.000 | 12 | 42.205.000 | 3 | 20.533.000 | 25,00 | 48,65 | 39 | 140.533.000 | 54,17 | 43,85 | |
| | | | | | | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerah | 72 | 1.935.000.000 | 36 | 524.990.138 | 12 | 76.375.000 | 3 | 9.725.000 | 25,00 | 12,73 | 39 | 534.715.138 | 54,17 | 27,63 | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah | 72 | 725.000.000 | 36 | 149.695.000 | 12 | 53.000.000 | 3 | 7.785.000 | 25,00 | 14,69 | 39 | 157.480.000 | 54,17 | 21,72 | |
| 2 | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 3.077.000.000 | 36 | 810.915.387 | 12 | 457.049.500 | 3 | 124.804.544 | 25,00 | 27,31 | 39 | 935.719.931 | 54,17 | 30,41 | inspektorat |
| | | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (paket) | 6 | 335.000.000 | 3 | 159.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 15.800.000 | 100,00 | 79,00 | 4 | 174.800.000 | 66,67 | 52,18 | |
| | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (paket) | 6 | 395.000.000 | 3 | 93.230.000 | 1 | 114.200.000 | 1 | - | 100,00 | - | 4 | 93.230.000 | 66,67 | 23,60 | |
| | | | | | | Pengadaan Mobileur | Jumlah Pengadaan Mobileur (paket) | 3 | 487.000.000 | - | - | 1 | 61.500.000 | - | 57.185.000 | - | 92,98 | - | 57.185.000 | - | 11,74 | |
| | | | | | | Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya kantor (bln) | 72 | 690.000.000 | 36 | 109.965.000 | 12 | 20.000.000 | 3 | 8.000.000 | 25,00 | 40,00 | 39 | 117.965.000 | 54,17 | 17,10 | |
| | | | | | | Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpelihanya kendaraan dinas (bln) | 72 | 1.170.000.000 | 36 | 448.720.387 | 12 | 241.349.500 | 3 | 43.819.544 | 25,00 | 18,16 | 39 | 492.539.931 | 54,17 | 42,10 | |
| 3 | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | 420.070.000 | 100 | 24.570.000 | | - | - | - | | | 100 | 24.570.000 | 100,00 | 5,85 | inspektorat |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (paket) | 72 | 24.570.000 | 36 | 24.570.000 | - | - | - | - | | | 36 | 24.570.000 | 50,00 | 100,00 | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (paket) | 6 | 395.500.000 | | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | |
| 4 | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | persentase aparatur profesional (%) | 100 | 297.000.000 | 70 | 82.599.900 | | - | - | - | | | 70 | 82.599.900 | 70,00 | 27,81 | inspektorat |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 72 | 297.000.000 | 24 | 82.599.900 | - | - | - | - | | | 24 | 82.599.900 | 33,33 | 27,81 | |
| 5 | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 1.169 | 24.617.500.000 | 228 | 6.349.984.756 | 185 | 2.214.111.809 | 22 | 408.943.015 | 12,07 | 18,47 | 251 | 6.758.927.771 | 21,43 | 27,46 | inspektorat |
| | | | | | | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala | 1.424 | 9.750.000.000 | 256 | 3.040.061.950 | 200 | 1.323.828.827 | 60 | 131.071.250 | 30,00 | 9,90 | 316 | 3.171.133.200 | 22,19 | 32,52 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|--|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda | Jumlah kasus pengaduan lingkungan Pemerintahan Daerah | 280 | 650.000.000 | 63 | 1.694.116.730 | 45 | 345.287.842 | 10 | 196.178.400 | 22,22 | 56,82 | 73 | 1.890.295.130 | 26,07 | 290,81 | |
| | | | | | | Inventarisasi temuan Pengawasan | Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir | 9.600 | 321.500.000 | 2.279 | 87.886.946 | 1.500 | 17.139.325 | 55 | - | 3,67 | - | 2.334 | 87.886.946 | 24,31 | 27,34 | |
| | | | | | | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti | 9.600 | 9.100.000.000 | 1.602 | 1.131.581.250 | 1.500 | 398.652.333 | 300 | 61.167.142 | 20,00 | 15,34 | 1.902 | 1.192.748.392 | 19,81 | 13,11 | |
| | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas | Jumlah OPD yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas | 45 | 362.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Kegiatan/ sosialisasi Reformasi Birokrasi | 45 | 365.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Pelaksanaan Matuitas SPIP | Jumlah OPD yang mengimplementasikan SPIP | 45 | 666.000.000 | 42 | 59.563.500 | - | - | - | - | - | - | 42 | 59.563.500 | 93,33 | 8,94 | |
| | | | | | | Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) | Jumlah OPD yang melaksanakan Pengendalian Gratifikasi | 45 | 360.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah LKPD yang direview | 6 | 300.500.000 | 1 | 111.330.100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 111.330.100 | 16,67 | 37,05 | |
| | | | | | | Evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dievaluasi | 45 | 307.500.000 | 45 | 94.246.730 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 94.246.730 | 100,00 | 30,65 | |
| | | | | | | Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKA Perubahan OPD | Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA yang di evaluasi | 45 | 550.000.000 | 45 | 131.197.550 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 131.197.550 | 100,00 | 23,85 | |
| | | | | | | Reviu Rencana Strategis (Renstra) | Jumlah OPD yang telah membuat Renstra sesuai aturan | 45 | 300.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Evaluasi Penetapan Kinerja | Persentase Penetapan Kinerja yang terlaksana | 240 | 300.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sesuai aturan | 100 | 258.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Sosialisasi Tata Cara Penilaian Laporan Kinerja | Jumlah APIP yang melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan | 45 | 365.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Evaluasi RPJMD | Jumlah RPJMD yang dievaluasi | 2 | 330.000.000 | 2 | 37.431.700 | - | - | - | - | - | - | 2 | 37.431.700 | 100,00 | 11,34 | |
| | | | | | | Sosialisasi LHKPN | Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi LHKPN | 45 | 330.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah dokumen anggaran yang direviu (dok) | 276 | 240.546.228 | - | - | 92 | 80.182.076 | - | 20.526.223 | - | 25,60 | - | 20.526.223 | - | 8,53 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah PD yang di evaluasi | 276 | 147.064.218 | - | - | 92 | 49.021.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan | Peningkatan Level APIP (Aparat Pegawai Intern Pemerintahan) | Level 4 | 2.160.000.000 | Level 3 | 698.112.681 | Level 3 | 143.150.550 | - | - | Level 3 | 698.112.681 | 100,00 | 32,32 | inspektorat | | |
| | | | | | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah APIP yang mengikuti diklat | 72 | 1.725.000.000 | 24 | 624.569.681 | 12 | 113.215.000 | 4 | - | 33,33 | - | 28 | 624.569.681 | 38,89 | 36,21 | |
| | | | | | | Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri | Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri | 12 | 435.000.000 | 4 | 73.543.000 | 2 | 29.935.550 | - | - | - | - | 4 | 73.543.000 | 33,33 | 16,91 | |
| 7 | | | | | | Program Pengembangan data/informasi | Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) | 100 | 240.000.000 | 75 | 17.610.000 | 10 | 38.920.000 | - | - | - | - | 75 | 17.610.000 | 75,00 | 7,34 | |
| | | | | | | Penyebarnya Informasi Pembangunan | Jumlah publikasi yang dilakukan (kali) | 8 | 240.000.000 | 2 | 17.610.000 | 2 | 38.920.000 | - | - | - | - | 2 | 17.610.000 | 25,00 | 7,34 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,42 | 23,15 | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | |
| II | | | | | | PERENCANAAN | | 28.204.297.500 | | 9.464.744.037 | | 2.923.702.850 | | 379.712.538 | | | | | 9.844.456.575 | | | |
| 1 | | | | | | PROGRAM PELAYANAN ADM PERKATORAN | Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran untuk aparatur (bln) | 72 | 5.660.000.000 | 36 | 2.755.324.305 | 12 | 855.367.884 | 3 | 154.199.297 | 25,00 | 18,03 | 39 | 2.909.523.602 | 54,17 | 51,41 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlahbulan pelayanan pramu kantor (bln) | 72 | 395.000.000 | 36 | 156.000.000 | 12 | 65.000.000 | 3,00 | 10.000.000 | 25,00 | 15,38 | 39 | 166.000.000 | 54,17 | 42,03 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | ketersediaan listrik, air, telfon (bln) | 72 | 690.000.000 | 36 | 307.228.277 | 12 | 94.560.000 | 3,00 | 22.122.651 | 25,00 | 23,40 | 39 | 329.350.928 | 54,17 | 47,73 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln) | 72 | 375.000.000 | 36 | 270.771.416 | 12 | 74.034.400 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 270.771.416 | 54,17 | 72,21 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln) | 72 | 375.000.000 | 36 | 159.250.000 | 12 | 78.909.727 | 3 | 10.455.000 | 25,00 | 13,25 | 39 | 169.705.000 | 54,17 | 45,25 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | ketersediaan perawatan bagi peralatan kerja (bln) | 72 | 360.000.000 | 36 | 127.232.100 | 12 | 37.550.000 | 3 | 8.640.500 | 25,00 | 23,01 | 39 | 135.872.600 | 54,17 | 37,74 | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | ketersediaan ATK (bln) | 72 | 390.000.000 | 36 | 107.799.429 | 12 | 163.225.908 | 3 | 58.754.300 | 25,00 | 36,00 | 39 | 166.553.729 | 54,17 | 42,71 | |
| | | | | | | Peny. Barang Cetak dan Penggandaan | Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln) | 72 | 390.000.000 | 36 | 144.265.620 | 12 | 53.804.950 | 3 | 3.496.400 | 25,00 | 6,50 | 39 | 147.762.020 | 54,17 | 37,89 | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln) | 72 | 165.000.000 | 36 | 80.867.200 | 12 | 25.162.899 | 3 | 2.710.600 | 25,00 | 10,77 | 39 | 83.577.800 | 54,17 | 50,65 | |
| | | | | | | Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln) | 72 | 60.000.000 | 36 | 16.666.500 | 12 | 7.900.000 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 17,09 | 39 | 18.016.500 | 54,17 | 30,03 | |
| | | | | | | Peny. Makanan dan Minuman | Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln) | 72 | 255.000.000 | 30 | 171.017.125 | 12 | 22.800.000 | 3 | 3.956.150 | 25,00 | 17,35 | 33 | 174.973.275 | 45,83 | 68,62 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|--|--|--|--|--|---|------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bln) | 72 | 1.200.000.000 | 30 | 807.187.188 | 12 | 71.875.000 | 3 | 9.825.096 | 25,00 | 13,67 | 33 | 817.012.284 | 45,83 | 68,08 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya jasa pengamanan kantor (bln) | 72 | 330.000.000 | 36 | 151.668.000 | 12 | 91.600.000 | 3 | 14.490.000 | 25,00 | 15,82 | 39 | 166.158.000 | 54,17 | 50,35 | |
| | | | | | | Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah | Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln) | 72 | 375.000.000 | 36 | 149.923.000 | 12 | 31.150.000 | 3 | 5.660.000 | 25,00 | 18,17 | 39 | 155.583.000 | 54,17 | 41,49 | |
| | | | | | | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia | 72 | 300.000.000 | 33 | 105.448.450 | 12 | 37.795.000 | 3 | 2.738.600 | 25,00 | 7,25 | 36 | 108.187.050 | 50,00 | 36,06 | |
| 2 | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi aparatur (bln) | 72 | 3.762.309.000 | 36 | 1.507.272.703 | 12 | 405.558.500 | 3 | 50.401.938 | 25,00 | 12,43 | 39 | 1.557.674.641 | 54,17 | 41,40 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kperalatan kantor yang dibeli (paket) | 6 | 1.536.500.000 | 3 | 376.645.140 | 1 | 95.850.000 | 0 | - | - | - | 3 | 376.645.140 | 50,00 | 24,51 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (bln) | 72 | 831.277.000 | 36 | 396.299.200 | 12 | 74.636.000 | 3 | 1.878.573 | 25,00 | 2,52 | 39 | 398.177.773 | 54,17 | 47,90 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Tersediannya BBM, service, suku cadang, jasa KIR dan pembayaran STNK bagi kendaraan dinas operasional (bln) | 72 | 1.394.532.000 | 36 | 734.328.363 | 12 | 235.072.500 | 3,00 | 48.523.365 | 25,00 | 20,64 | 39 | 782.851.728 | 54,17 | 56,14 | |
| 3 | | | | | | PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN | jumlah MOU kewilayahan dengan Instansi Lainnya | 6 | 595.000.000 | 2 | 97.367.589.000 | 1 | 141.800.390 | 0,00 | 10.375.750 | - | 7,32 | 2 | 107.743.339 | 33,33 | 18,11 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan | jumlah dokumen kerjasama yang disusun (dok) | 6 | 595.000.000 | 2 | 97.367.589 | 1 | 141.800.390 | 0,00 | 10.375.750 | - | 7,32 | 2 | 107.743.339 | 33,33 | 18,11 | |
| 4 | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI | Persentase tingkat integrasi data pembangunan (%) | 100 | 1.750.000.000 | 90 | 383.446.062,000 | 5 | 123.313.500 | 1,00 | 2.668.250 | 20,00 | 2,16 | 91 | 386.114.312 | 91,00 | 22,06 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Forum Data kabupaten Pesisir Selatan | dokumen SIPD (dok) | 6 | 700.000.000 | 3,00 | 256.009.182 | 1 | 24.113.500 | 0,00 | 618.250 | - | 2,56 | 3,00 | 256.627.432 | 50,00 | 36,66 | |
| | | | | | | | dokumen SDP2D (dok) | 6 | | 3 | | 1 | | 0,00 | - | - | | 3,00 | - | 50,00 | | |
| | | | | | | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | tersebarinya informasi pelaksanaan pembangunan (%) | 95 | 350.000.000 | 86 | 127.436.880 | 30 | 99.200.000 | 0,20 | 2.050.000 | 0,67 | 2,07 | 86,2 | 129.486.880 | 91 | 37,00 | |
| 5 | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA | Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang selaras (%) | 100 | 2.229.000.000 | 95 | 412.695.831 | 5 | 305.159.000 | 2,00 | 23.838.869 | 40,00 | 7,81 | 97 | 436.534.700 | 97,00 | 19,58 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah | terlaksananya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln) | 72 | 1.254.000.000 | 25 | 351.708.431 | 12 | 48.725.000 | 3,00 | 4.557.900 | 25,00 | 9,35 | 28 | 356.266.331 | 38,89 | 28,41 | |
| | | | | | | Koordinasi program IPDMIP Kab, Pessel | Terkoordinasikannya kegiatan IPDMIP (bln) | 48 | 975.000.000 | 12 | 60.987.400 | 12 | 220.184.000 | 3,00 | 16.385.969 | 25,00 | 7,44 | 15 | 77.373.369 | 31,25 | 7,94 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|--|--|--|--|---|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|------|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan SDA dan LH | terlaksananya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln) | 36 | 108.750.000 | 0 | - | 12 | 36.250.000 | 3,00 | 2.895.000 | 25,00 | 7,99 | 3 | 2.895.000 | 8,33 | 2,66 | |
| 8 | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase perencanaan daerah yang selaras (%) | 100 | 8.790.000.000 | 95 | 2.600.852.639 | 5 | 754.868.198 | 1 | 111.128.988 | 20,00 | 14,72 | 96 | 2.711.981.627 | 96,00 | 30,85 | Bapedalitbang |
| | | | | | | | Dokumen RPJPD | Ada | | Ada | | Ada | | Ada | | | | Ada | | 100,00 | | |
| | | | | | | | Dokumen RPJMD | Ada | | Ada | | Ada | | Ada | | | | Ada | | 100,00 | | |
| | | | | | | | Dokumen RKPDP | Ada | | Ada | | Ada | | Ada | | | | Ada | | 70,00 | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP | terselenggaranya musrenbang kabupaten (kali) | 6 | 1.050.000.000 | 3 | 389.208.906 | 1 | 136.925.000 | 1 | 65.007.638 | 100,00 | 47,48 | 4 | 454.216.544 | 66,67 | 43,26 | |
| | | | | | | Penyusunan Rancangan RKPDP | Perbup tentang RKPDP (dok) | 6 | 700.000.000 | 3 | 254.922.718 | 1 | 58.141.598 | 0,7 | 18.372.550 | 70,00 | 31,60 | 3,7 | 273.295.268 | 61,67 | 39,04 | |
| | | | | | | Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kab. Pessel | Nota kesepakatan KUA dan PPA RAPBD (dok) | 12 | 1.190.000.000 | 6 | 334.361.315 | 2 | 34.505.000 | - | - | - | - | 6 | 334.361.315 | 50,00 | 28,10 | |
| | | | | | | Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan | Nota kesepakatan KUA dan PPA P-APBD (dok) | 12 | 1.190.000.000 | 6 | 303.454.960 | 2 | 34.330.000 | 0 | - | - | - | 6 | 303.454.960 | 50,00 | 25,50 | |
| | | | | | | Fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari | RPJMD Nagari yang telah sinkron dengan RPJMD (dok) | 182 | 500.000.000 | 38 | 191.268.250 | 36 | 38.147.600 | 0,00 | - | - | - | 38 | 191.268.250 | 20,88 | 38,25 | |
| | | | | | | Koodinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah | Terlaksananya rapat dan Pertemuan Penyusunan Perencanaan Anggaran (bln) | 48 | 400.000.000 | 12 | 134.685.277 | 12 | 54.570.000 | 3,00 | 3.426.000 | 25,00 | 6,28 | 15 | 138.111.277 | 31,25 | 34,53 | |
| | | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah | Terkelolanya sistem perencanaan pembangunan secara online (bln) | 72 | 1.250.000.000 | 36 | 481.891.249 | 12 | 118.464.000 | 3,00 | 17.045.200 | 25,00 | 14,39 | 39 | 498.936.449 | 54,17 | 39,91 | |
| | | | | | | Evaluasi RKPDP | Laporan triwulan evaluasi RKPDP (dok) | 24 | 450.000.000 | 12 | 139.650.480 | 4 | 29.200.000 | 1,00 | 5.339.600 | 25,00 | 18,29 | 13 | 144.990.080 | 54,17 | 32,22 | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan | Laporan triwulan hasil money pelaksanaan DAK dan TP (dok) | 24 | 960.000.000 | 12 | 258.356.214 | 24 | 48.685.000 | 1,00 | 1.554.000 | 4,17 | 3,19 | 13 | 259.910.214 | 54,17 | 27,07 | |
| | | | | | | Penyusunan Perjanjian Kinerja | Perjanjian Kinerja Eselon,II,III,IV dengan Renja dan Renstra (dok) | 10 | 525.000.000 | 4 | 113.053.270 | 2 | 201.900.000 | 1,00 | 384.000 | 50,00 | 0,19 | 5 | 113.437.270 | 50,00 | 21,61 | |
| 9 | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR | Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang selaras (%) | 100 | 1.787.000.000 | 70 | 506.007.030 | 10 | 100.428.978 | 2,00 | 6.500.250 | 20,00 | 6,47 | 72 | 512.507.280 | 72,00 | 28,68 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Koordinasi program pembangunan sanitasi dan permukiman (PPSP) | Terkoordinasikannya pelaksanaan program AMPL dan PPSP (bln) | 72 | 527.000.000 | 36 | 178.155.430 | 12 | 27.225.000 | 3,00 | 1.000.000 | 25,00 | 3,67 | 39 | 179.155.430 | 54,166667 | 34,00 | |
| | | | | | | Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) | Terkoordinasikannya pelaksanaan program Pamsimas (bln) | 72 | 1.260.000.000 | 36 | 327.851.600 | 12 | 73.203.978 | 3,00 | 5.500.250 | 25,00 | 7,51 | 39 | 333.351.850 | 54,17 | 26,46 | |
| 10 | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA | Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang selaras (%) | 100 | 1.398.918.000 | 92 | 339.981.336 | 8 | 64.462.400 | 3,00 | 7.056.168 | 37,50 | 10,95 | 95 | 347.037.504 | 95,00 | 24,81 | Bapedalitbang |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|--|---|----|----|----|----|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial budaya (bln) | 72 | 1.398.918.000 | 36 | 339.981.336 | 12 | 64.462.400 | 3,00 | 7.056.168 | 25,00 | 10,95 | 39 | 347.037.504 | 54,17 | 24,81 | |
| 11 | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras (%) | 100 | 2.232.070.500 | 90 | 861.796.542 | 10 | 172.744.000 | 2,00 | 13.543.028 | 20,00 | 7,84 | 92 | 875.339.570 | 92,00 | 39,22 | Bapedalitbang |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan lingkup bidan ekonomi (bln) | 72 | 600.000.000 | 36 | 250.329.427 | 12 | 56.625.000 | 3,00 | 5.996.428 | 25,00 | 10,59 | 39 | 256.325.855 | 54,17 | 42,72 | |
| | | | | | | Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah | Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (dok) | 6 | 932.612.000 | 3 | 410.505.564 | 1 | 73.569.000 | 0,00 | 3.164.000 | - | 4,30 | 3 | 413.669.564 | 50,00 | 44,36 | |
| | | | | | | koodinasi percepatan pemb. Kawasan pedesaan | Terwujudnya akselerasi pembangunan di Kawasan Pedesaan (kawasan) | 18 | 699.458.500 | 9 | 200.961.551 | 3 | 42.550.000 | 0,00 | 4.382.600 | - | 10,30 | 9 | 205.344.151 | 50,00 | 29,36 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,07 | 30,68 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | |
| III | | | | | | KEUANGAN | | 63.552.359.020 | | 26.835.437.033 | | 18.832.945.852 | | 3.268.642.200 | | | | 30.104.079.233 | | | | |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | 49.417.498.433 | | 20.234.323.265 | | 15.410.031.664 | | 2.660.354.891 | | | | | 22.894.678.156 | | | | |
| 1 | 3 | 00 | 03 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln) | 72 | 9.596.926.960 | 36 | 4.039.986.733 | 12 | 10.727.143.363 | 3 | 1.932.134.327 | 25,00 | 18,01 | 39,00 | 5.972.121.060 | 54,17 | 62,23 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya dana untuk jasa pelayanan rek air, listrik dan Telp (bulan) | 72 | 1.032.900.000 | 36 | 481.799.915 | 12 | 204.810.000 | 3 | 28.407.594 | 25,00 | 13,87 | 39,00 | 510.207.509 | 54,17 | 49,40 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya dana Administrasi Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun (bulan) | 72 | 4.152.757.712 | 36 | 1.420.456.259 | 12 | 327.070.000 | 3 | 50.767.500 | 25,00 | 15,52 | 39,00 | 1.471.223.759 | 54,17 | 35,43 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan) | 72 | 957.500.000 | 36 | 465.221.570 | 12 | 180.250.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39,00 | 465.221.570 | 54,17 | 48,59 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 10 | Penyediaan alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan) | 72 | 320.908.386 | 36 | 166.347.117 | 12 | 62.810.103 | 3 | 4.433.100 | 25,00 | 7,06 | 39,00 | 170.780.217 | 54,17 | 53,22 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bulan) | 72 | 243.141.229 | 36 | 120.374.201 | 12 | 40.342.760 | 3 | 3.319.877 | 25,00 | 8,23 | 39,00 | 123.694.078 | 54,17 | 50,87 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor (bulan) | 72 | 131.754.000 | 36 | 44.613.020 | 12 | 23.940.000 | 3 | 3.375.000 | 25,00 | 14,10 | 39,00 | 47.988.020 | 54,17 | 36,42 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan) | 72 | 123.740.000 | 36 | 28.540.000 | 12 | 13.900.000 | 3 | 930.000 | 25,00 | 6,69 | 39,00 | 29.470.000 | 54,17 | 23,82 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan minum rapat, tamu dan pegawai (piket kantor) (bulan) | 72 | 408.485.000 | 36 | 195.159.250 | 12 | 59.950.000 | 3 | 13.021.800 | 25,00 | 21,72 | 39,00 | 208.181.050 | 54,17 | 50,96 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|---|---|------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|---|---------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 18 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (bulan) | 72 | 1.329.898.900 | 36 | 761.776.455 | 12 | 9.751.958.500 | 3 | 1.807.785.706 | 25,00 | 18,54 | 39,00 | 2.569.562.161 | 54,17 | 193,21 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 20 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah (bulan) | 72 | 313.189.600 | 36 | 193.060.667 | 12 | 62.112.000 | 3 | 20.093.750 | 25,00 | 32,35 | 39,00 | 213.154.417 | 54,17 | 68,06 | |
| | 3 | 00 | 03 | 01 | 22 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Dokumen Anggaran dan Pelaporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban SKPD (dok) | 48 | 582.652.133 | 24 | 142.053.779 | 12 | - | - | - | - | - | 24,00 | 142.053.779 | 50,00 | 24,38 | |
| | | | | | | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Tersusunnya Renstra SKPD | 1 | 20.584.500 | 1 | 20.584.500 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | 20.584.500 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | 3 | 00 | 03 | 02 | | Program Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur | Ketersediaan sarana prasarana penunjang (bln) | 72 | 17.905.015.886 | 24 | 8.219.738.327 | 12 | 1.183.870.955 | 3 | 456.378.440 | 25,00 | 38,55 | 27,00 | 8.676.116.767 | 37,50 | 48,46 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional (unit) | 35 | 13.655.656.840 | 23 | 6.601.141.957 | 3 | 783.429.153 | 1 | 411.497.331 | 33,33 | 52,53 | 24,00 | 7.012.639.288 | 68,57 | 51,35 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor (unit) | 25 | 448.000.000 | 3 | 128.838.700 | 15 | 59.750.000 | 3 | 4.950.000 | 20,00 | 8,28 | 6,00 | 133.788.700 | 24,00 | 29,86 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (unit) | 33 | 225.043.296 | 13 | 238.031.800 | 10 | 106.250.000 | - | - | - | - | 13,00 | 238.031.800 | 39,39 | 105,77 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 10 | Pengadaan Meubiler | Jumlah mobiler (paket) | 10 | 159.000.000 | 8 | 22.930.000 | 0 | - | - | - | - | - | 8,00 | 22.930.000 | 80,00 | 14,42 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor (unit) | 6 | 1.244.800.000 | 3 | 711.178.155 | 1 | 17.498.380 | - | - | - | - | 3,00 | 711.178.155 | 50,00 | 57,13 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional (Kendaraan Roda4 dan Roda 2) (bulan) | 72 | 1.402.115.750 | 36 | 421.450.250 | 13 | 181.943.422 | 2 | 29.958.700 | 15,38 | 16,47 | 38,00 | 451.408.950 | 52,78 | 32,19 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (buan) | 72 | 770.400.000 | 36 | 96.167.465 | 12 | 35.000.000 | 3 | 9.972.409 | 25,00 | 28,49 | 39,00 | 106.139.874 | 54,17 | 13,78 | |
| 3 | 3 | 00 | 03 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu | 90 | 1.106.753.905,00 | 100 | 456.683.613,00 | 100 | 111.205.921,00 | 0 | - | 0,03 | - | 100,03 | 456.683.613 | 111,14 | 41,26 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 06 | 02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Tersedianya informasi keuangan semester (buku) | 1080 | 452.640.035 | 600 | 170.242.793 | 0 | - | - | - | - | - | 600,00 | 170.242.793 | 55,56 | 37,61 | |
| | 3 | 00 | 03 | 06 | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang transparansi (buku) | 540 | 654.113.870 | 270 | 286.440.820 | 100 | 111.205.921 | - | - | - | - | 270,00 | 286.440.820 | 50,00 | 43,79 | |
| 4 | 3 | 00 | 03 | 15 | | Program Pengembangan Data/Informasi | Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) | 100 | 116.000.000 | 80 | 30.343.653 | 10 | 25.000.000 | - | - | - | - | 80,00 | 30.343.653 | 80,00 | 26,16 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 15 | 10 | Penyebutan Informasi Pembangunan | Keikutsertaan pada Festival Langkisau (keg) | 6 | 116.000.000 | 3 | 30.343.653 | 1 | 25.000.000 | - | - | - | - | 3,00 | 30.343.653 | 50,00 | 26,16 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|--|--|-----|----------------|-----|---------------|----|---------------|---|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 5 | 3 | 00 | 03 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Tercapainya pencegahan kerugian negara | 100 | 838.611.213 | 95 | 346.873.038 | 3 | 79.998.487 | - | 1.095.000 | - | 1,37 | 95,00 | 347.968.038 | 95,00 | 41,49 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 20 | 33 | Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | kasus penyelesaian kerugian negara yang ditangani (kasus) | 6 | 838.611.213 | 3 | 346.873.038 | 1 | 79.998.487 | 0 | 1.095.000 | 25,00 | 1,37 | 3,25 | 347.968.038 | 54,17 | 41,49 | |
| 6 | 3 | 00 | 03 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | dokumen APBD dan p-APBD tepat waktu (dokumen) | 12 | 18.074.588.654 | 6 | 6.561.732.490 | 2 | 3.252.812.982 | - | 270.747.124 | - | 8,32 | 6,00 | 6.832.479.614 | 50,00 | 37,80 | BPKD |
| | | | | | | | Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (persen) | 75 | | 45 | | 15 | | 3 | | 20,00 | | 48,00 | | 64,00 | | |
| | | | | | | | Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP | 100 | | 80 | | 8 | | 2 | | 25,00 | | 82,00 | | 82,00 | | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 02 | Penyusunan Standar Satuan Harga | Tersusunnya Standar Harga (dok) | 6 | 486.666.048 | 3 | 160.014.900 | 1 | - | - | - | - | - | 3,00 | 160.014.900 | 50,00 | 32,88 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 06 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Rancangan Perda tentang APBD (dok) | 6 | 1.221.430.489 | 3 | 542.228.072 | 1 | 137.876.364 | - | 20.209.000 | - | 14,66 | 3,00 | 562.437.072 | 50,00 | 46,05 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 07 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD | Perbup Penjabaran APBD (dok) | 6 | 1.058.850.607 | 3 | 441.537.603 | 1 | 149.893.395 | - | 33.087.800 | - | 22,07 | 3,00 | 474.625.403 | 50,00 | 44,82 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 08 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Rancangan Perda tentang P-APBD (dok) | 6 | 1.711.872.584 | 3 | 414.909.517 | 1 | 149.047.995 | - | - | - | - | 3,00 | 414.909.517 | 50,00 | 24,24 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 09 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Perbup Penjabaran P-APBD (dok) | 6 | 1.071.506.464 | 3 | 408.104.120 | 1 | 149.808.879 | - | - | - | - | 3,00 | 408.104.120 | 50,00 | 38,09 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 10 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Ranperda Pertanggungjawaban APBD (dok) | 6 | 850.803.806 | 3 | 310.678.873 | 1 | 92.007.678 | - | - | - | - | 3,00 | 310.678.873 | 50,00 | 36,52 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD | Operasional pelaporan periodik (bln) | 72 | 313.157.986 | 36 | - | 12 | 313.157.986 | 3 | 25.239.900 | 25,00 | 8,06 | 39,00 | 25.239.900 | 54,17 | 8,06 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Penunjang Bendahara Umum Daerah | Operasional BUD (bln) | 72 | 872.066.984 | 36 | - | 12 | 872.066.984 | 3 | 117.434.737 | 25,00 | 13,47 | 39,00 | 117.434.737 | 54,17 | 13,47 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Pengelola Dana Transfer | Operasional Pengelolaan Dana | 72 | 35.692.026 | 36 | - | 12 | 35.692.026 | 3 | 5.918.569 | 25,00 | 16,58 | 39,00 | 5.918.569 | 54,17 | 16,58 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 11 | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Perbiup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBN (dok) | 6 | 841.680.012 | 3 | 305.151.935 | 1 | 128.558.392 | - | 2.178.726 | - | 1,69 | 3,00 | 307.330.661 | 50,00 | 36,51 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 20 | Penyusunan DPA SKPD | Tersedianya buku DPA SKPD (dok) | 282 | 818.642.648 | 141 | 319.073.734 | 47 | 74.967.966 | - | 5.345.500 | - | 7,13 | 141,00 | 324.419.234 | 50,00 | 39,63 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 22 | Penghapusan Barang - barang Inventaris | Operasional Penghapusan Barang-barang Inventaris (bulan) | 72 | 492.608.279 | 36 | 179.774.587 | 12 | 50.000.000 | 3 | 5.073.895 | 25,00 | 10,15 | 39,00 | 184.848.482 | 54,17 | 37,52 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 28 | Penyusunan DPA Perubahan SKPD | Tersedianya buku DPA Perubahan SKPD (dok) | 282 | 690.444.044 | 141 | 244.007.087 | 47 | 74.997.337 | - | - | - | - | 141,00 | 244.007.087 | 50,00 | 35,34 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|--|--|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 29 | Penunjang Sistik Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (bulan) | 72 | 2.509.900.114 | 36 | 1.531.994.074 | 12 | 223.741.464 | 3 | 23.410.000 | 25,00 | 10,46 | 39,00 | 1.555.404.074 | 54,17 | 61,97 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 41 | Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD | Operasional Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji ASN (bulan) | 72 | 561.795.159 | 36 | 246.457.106 | 0 | - | - | - | - | - | 36,00 | 246.457.106 | 50,00 | 43,87 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 42 | Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah | Operasional pengelolaan Kasda (bln) | 72 | 276.426.716 | 36 | 87.286.727 | 12 | 59.883.840 | 3 | 8.304.206 | 25,00 | 13,87 | 39,00 | 95.590.933 | 54,17 | 34,58 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 57 | Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang | Operasional verifikasi RKBMD (bulan) | 60 | 350.420.624 | 12 | 46.428.710 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 | 46.428.710 | 20,00 | 13,25 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 43 | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Dokumen manajemen aset (buku) | 3.930 | 1.090.793.320 | 1698 | 826.624.769 | 0 | - | - | - | - | - | 1.698,00 | 826.624.769 | 43,21 | 75,78 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 57 | Penyusunan rancangan kebutuhan barang dan pemeliharaan | Dokumen RKBMD (dok) | 8 | 219.592.389 | 2 | 7.938.913 | 2 | 81.946.446 | - | 1.075.000 | - | 1,31 | 2,00 | 9.013.913 | 25,00 | 4,10 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 75 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Dokumen BMD (buku) | 2.400 | 922.792.510 | 600 | 173.949.844 | 1058 | 166.883.444 | - | 15.170.518 | - | 9,09 | 600,00 | 189.120.362 | 25,00 | 20,49 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 79 | Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah ASN yang dilatih (org) | 400 | 663.466.849 | 100 | 141.403.285 | 0 | - | - | - | - | - | 100,00 | 141.403.285 | 25,00 | 21,31 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 80 | Pembinaan Laporan Keuangan OPD | Jumlah PD yang dibina (unit) | 180 | 319.077.313 | 45 | 98.949.526 | 0 | - | - | - | - | - | 45,00 | 98.949.526 | 25,00 | 31,01 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 82 | Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Dokumen SAP (dok) | 6 | 285.087.356 | 3 | 19.508.029 | 0 | - | - | - | - | - | 3,00 | 19.508.029 | 50,00 | 6,84 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 83 | Penyusunan Standar Biaya | Perbup Standar Biaya (dok) | 12 | 405.789.327 | 6 | 54.906.079 | 2 | - | - | - | - | - | 6,00 | 54.906.079 | 50,00 | 13,53 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | 84 | Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi (unit) | 270 | 4.025.000 | 45 | 805.000 | 0 | - | - | - | - | - | 45,00 | 805.000 | 16,67 | 20,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Inventarisasi Barang | Operasional inventarisasi aset (bln) | 36 | 1.034.735.022 | 0 | - | 12 | 344.911.674 | 3 | 3.406.063 | 25,00 | 0,99 | 3,00 | 3.406.063 | 8,33 | 0,33 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD | Regulasi yang disusun (dok) | 3 | 202.115.526 | 0 | - | 12 | 67.371.842 | 3 | 2.493.210 | 25,00 | 3,70 | 3,00 | 2.493.210 | 100,00 | 1,23 | |
| | 3 | 00 | 03 | 17 | | Pedoman penyusunan RKA | Pedoman penyusunan RKA (dok) | 3 | 239.997.810 | - | - | 1 | 79.999.270 | 0 | 2.400.000 | 25,00 | 3,00 | 0,25 | 2.400.000 | 8,33 | 1,00 | |
| 7 | 3 | 00 | 03 | 18 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Kota | Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan PD (%) | 90 | 3.136.830.678 | 80 | 791.378.439 | 10 | 29.999.956 | 2 | - | 20,00 | - | 82,00 | 791.378.439 | 91,11 | 25,23 | BPKD |
| | 3 | 00 | 03 | 18 | 06 | Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 | Tersedianya Buku Analisa APBD (buku) | 5 | 380.076.292 | 3 | 83.511.724 | 1 | 29.999.956 | - | - | - | - | 3,00 | 83.511.724 | 60,00 | 21,97 | |
| | 3 | 00 | 03 | 18 | | Asistensi Penataan Hibah dan Bantuan Sosial | Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan) | 24 | 316.212.864 | 24 | 157.746.322 | 0 | - | - | - | - | - | 24,00 | 157.746.322 | 100,00 | 49,89 | |
| | 3 | 00 | 03 | 18 | 09 | Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial | Operasional penyaluran dana hibah dan bansos (bulan) | 36 | 456.134.330 | 36 | 163.515.958 | 0 | - | - | - | - | - | 36,00 | 163.515.958 | 100,00 | 35,85 | |
| | 1 | 20 | 28 | 18 | 11 | Penyusunan dan Sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017 | pedoman penyusunan APBD (dok) | 6 | 962.188.806 | 3 | 165.748.260 | 0 | - | - | - | - | - | 3,00 | 165.748.260 | 50,00 | 17,23 | |
| | 3 | 00 | 03 | 18 | 12 | Analisa Standar belanja Kabupaten Pesisir Selatan | Analisa Standar Belanja (buku) | 4 | 697.017.584 | 1 | 174.254.396 | 0 | - | - | - | - | - | 1,00 | 174.254.396 | 25,00 | 25,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 18 | 13 | Rekonsiliasi dana Transfer ke Daerah | operasional rekon dana transfer (bln) | 36 | 325.200.802 | 12 | 46.601.779 | 0 | - | - | - | - | - | 12,00 | 46.601.779 | 33,33 | 14,33 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|---|--|---|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------|------------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| 8 | 3 | 00 | 03 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari | Terbina dan meningkatnya Pengetahuan Sumber daya aparatur | 90 | 1.779.601.815 | 70 | 578.965.411,00 | - | - | 0 | - | 70,02 | 578.965.411 | 77,80 | 32,53 | BPKD | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 19 | 09 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari | Jumlah nagari yang dibina (nagari) | 364 | 373.472.746 | 182 | 131.798.497 | 0 | - | - | - | 182,00 | 131.798.497 | 50,00 | 35,29 | | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 19 | 10 | Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari | Laporan triwulan hasil movev dana transfer ke nagari (dokumen) | 24 | 351.118.231 | 12 | 240.480.934 | 0 | - | - | - | 12,00 | 240.480.934 | 50,00 | 68,49 | | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 19 | 16 | Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah | laporan triwulan hasil movev penatausahaan kas daerah (dokumen) | 24 | 361.033.726 | 12 | 3.932.168 | 0 | - | - | - | 12,00 | 3.932.168 | 50,00 | 1,09 | | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 19 | 12 | TOT Aplikasi SIMDA DESA (Nagari) | Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskuedes (kegiatan) | 6 | 693.977.112 | 2 | 202.753.812 | 0 | - | - | - | 2,00 | 202.753.812 | 33,33 | 29,22 | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,16 | 39,40 | | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | | |
| DINAS PENDAPATAN | | | | | | | | 14.134.860.587 | | 6.601.113.768 | | 3.422.914.188 | | 608.287.309 | | | 7.209.401.077 | | | | | | |
| 1 | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terpenuhiya Pelayanan Administrasi perkantoran (bln) | 60 | 3.519.701.383 | 24 | 1.426.565.731 | 12 | 609.003.178 | 3 | 109.558.381 | 25,00 | 17,99 | 27 | 1.536.124.112 | 45,00 | 43,64 | Badan Pendapatan | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telepon dan Air Badan Pendapatan (bln) | 60 | 360.676.157 | 36 | 86.945.483 | 12 | 58.080.000 | 3 | 10.131.007 | 25,00 | 17,44 | 39 | 97.076.490 | 65,00 | 26,92 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD (bln) | 60 | 916.665.188 | 36 | 238.692.150 | 12 | 131.075.000 | 3 | 24.745.000 | 25,00 | 18,88 | 39 | 263.437.150 | 65,00 | 28,74 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya Kebersihan Kantor (bln) | 60 | 69.912.849 | 36 | 33.204.000 | 12 | 32.157.205 | 3 | 6.720.680 | 25,00 | 20,90 | 39 | 39.924.680 | 65,00 | 57,11 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (bln) | 60 | 191.141.155 | 36 | 60.438.000 | 12 | 118.200.000 | 3 | 28.346.960 | 25,00 | 23,98 | 39 | 88.784.960 | 65,00 | 46,45 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bln) | 60 | 139.854.012 | 36 | 44.592.100 | 12 | 39.742.320 | 3 | 15.945.500 | 25,00 | 40,12 | 39 | 60.537.600 | 65,00 | 43,29 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (bln) | 60 | 88.070.026 | 36 | 15.461.500 | 12 | 8.478.653 | 3 | 1.480.160 | 25,00 | 17,46 | 39 | 16.941.660 | 65,00 | 19,24 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bln) | 60 | 43.400.000 | 36 | 9.720.000 | 12 | 3.600.000 | 3 | 260.000 | 25,00 | 7,22 | 39 | 9.980.000 | 65,00 | 23,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman (bln) | 60 | 257.100.000 | 36 | 141.594.800 | 12 | 67.410.000 | 3 | 8.446.050 | 25,00 | 12,53 | 39 | 150.040.850 | 65,00 | 58,36 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (bln) | 60 | 812.554.925 | 36 | 433.702.598 | 12 | 27.900.000 | 3 | 1.389.700 | 25,00 | 4,98 | 39 | 435.092.298 | 65,00 | 53,55 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln) | 60 | 470.861.300 | 36 | 310.943.900 | 12 | 70.300.000 | 3,00 | 10.691.524 | 25,00 | 15,21 | 39 | 321.635.424 | 65,00 | 68,31 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 01 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN, LKPJ, NERACA, LPPD, RKPD dan lain-lain | 50 | 169.465.771 | 20 | 51.271.200 | 10 | 52.060.000 | 2,00 | 1.401.800 | 20,00 | 2,69 | 22 | 52.673.000 | 44,00 | 31,08 | |
| 2 | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang bagi Aparatur (bln) | 60 | 767.320.905 | 24 | 500.665.040 | 12 | 414.275.780 | 3 | 37.999.428 | 25,00 | 9,17 | 27 | 538.664.468 | 45,00 | 70,20 | Badan Pendapatan |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | sepeda motor (unit) | 3 | 58.586.605 | - | - | 3 | 58.586.605 | 0 | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | peralatan kantor yang dibeli (paket) | 6 | 505.403.300 | 3 | 431.219.040 | 3 | 75.679.175 | - | 000 | - | - | 3,00 | 431.219.040 | 50,00 | 85,32 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 10 | Pengadaan Meubleur | mobiler kantor (paket) | 1 | 12.000.000 | - | - | 1 | 12.000.000 | - | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpelihanya Gedung Kantor (bln) | 60 | 191.331.000 | 24 | 69.446.000 | 12 | 33.000.000 | 3,00 | 2.900.000 | 25,00 | 8,79 | 27,00 | 72.346.000 | 45,00 | 37,81 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpelihanya kendaraan dinas (bln) | 60 | 382.225.264 | 24 | 191.112.632 | 12 | 109.510.000 | 3,00 | 27.176.928 | 25,00 | 24,82 | 27,00 | 218.289.560 | 45,00 | 57,11 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpelihanya peralatan kantor (bln) | 36 | 150.000.000 | - | - | 12 | 50.500.000 | 3,00 | 7.922.500 | 25,00 | 15,69 | 3,00 | 7.922.500 | 8,33 | 5,28 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | gedung kantor yang direhab (unit) | 1 | 75.000.000 | - | - | 1 | 75.000.000 | - | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | 00 | 03 | 02 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang profesional (%) | 100 | 21.750.000 | - | - | 80 | 7.250.000 | - | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Badan Pendapatan |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 05 | 07 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (org) | 10 | 72.500.000 | - | - | 1 | 7.250.000 | - | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 3 | 00 | 03 | 02 | 15 | | Program Pengembangan Data/ Informasi | Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) | 100 | 256.245.000 | 75 | 87.516.780,00 | 15 | 18.910.000 | - | 000 | - | - | 75,00 | 87.516.780 | 75,00 | 34,15 | Badan Pendapatan |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 15 | 11 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | publikasi yang dilakukan (kali) | 10 | 256.245.000 | 4 | 87.516.780 | 2 | 18.910.000 | - | 000 | - | - | 4,00 | 87.516.780 | 40,00 | 34,15 | |
| 5 | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah | Realisasi PAD (Milyar Rp) | 895,748 | 9.569.843.299 | 384,276 | 4.586.366.217 | 154,523 | 2.373.475.230 | - | 460.729.500 | - | 19,41 | 384,28 | 5.047.095.717 | 42,90 | 52,74 | Badan Pendapatan |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 21 | Penyusunan laporan PAD | Laporan PAD (dok) | 5 | 431.617.955 | 2 | 126.146.300 | 1 | 16.982.000 | - | 000 | - | - | 2,00 | 126.146.300 | 40,00 | 29,23 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 31 | Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah | data potensi pajak daerah (dok) | 3 | 246.100.200 | 0 | - | 1 | 82.033.400 | - | 12.070.750 | - | 14,71 | - | 12.070.750 | 0,00 | 4,90 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 33 | Pengadaan Barang Kuasi | Barang Kuasi (paket) | 5 | 597.638.000 | 3 | 358.544.175 | 1 | 118.986.419 | - | 2.214.000 | - | 1,86 | 3,00 | 360.758.175 | 60,00 | 60,36 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 43 | Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | operasional verifikasi potensi pajak (bln) | 60 | 72.640.284 | 24 | 166.264.000 | 12 | 105.820.000 | 3,00 | 18.338.000 | 25,00 | 17,33 | 27,00 | 184.602.000 | 45,00 | 254,13 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 50 | Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I | operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah I (bln) | 60 | 1.283.069.606 | 24 | 704.123.161 | 12 | 133.595.000 | 3,00 | 25.409.100 | 25,00 | 19,02 | 27,00 | 729.532.261 | 45,00 | 56,86 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 51 | Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II | operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah II (bln) | 60 | 928.199.725 | 24 | 528.008.186 | 12 | 113.940.104 | 3,00 | 19.680.250 | 25,00 | 17,27 | 27,00 | 547.688.436 | 45,00 | 59,01 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|--|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|--------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 52 | Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III | operasional pemungutan pajak daerah pd wilayah III (bln) | 60 | 1.019.224.805 | 24 | 516.321.290 | 12 | 119.055.000 | 3,00 | 18.431.000 | 25,00 | 15,48 | 27,00 | 534.752.290 | 45,00 | 52,47 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 63 | Sosialisasi Pajak Daerah | jumlah peserta sosialisasi (org) | 600 | 710.949.800 | 250 | 321.809.000 | 100 | 128.875.177 | - | 27.757.750 | - | 21,54 | 250,00 | 349.566.750 | 41,67 | 49,17 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 68 | Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah | Dokumen Rekonsiliasi PAD (dokumen) | 5 | 340.178.663 | 2 | 223.976.300 | 1 | 76.702.500 | - | 985.100 | - | 1,28 | 2,00 | 224.961.400 | 40,00 | 66,13 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 75 | Monitoring dan evaluasi PAD | Laporan triwulan hasil monev PAD | 20 | 662.667.556 | 8 | 346.443.989 | 4 | 134.207.800 | 1,00 | 23.844.450 | 25,00 | 17,77 | 9,00 | 370.288.439 | 45,00 | 55,88 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 78 | Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah | Tersusunnya Buku Potensi PAD (dok) | 5 | 79.551.516 | 2 | 166.315.100 | 1 | 301.890.000 | - | 10.985.400 | - | 3,64 | 2,00 | 177.300.500 | 40,00 | 222,88 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 80 | Cetak Massal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2 | barang cetakan dokumen PBB-P2 (paket) | 5 | 1.780.479.099 | 2 | 1.128.414.716 | 1 | 271.671.200 | 1,00 | 239.365.250 | 100,00 | 88,11 | 3,00 | 1.367.779.966 | 60,00 | 76,82 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 94 | Zonasi Nilai Jual Objek Pajak | Buku Zonasi Nilai Tanah (dokumen) | 1 | 445.811.900 | - | - | 1 | 445.811.900 | - | 000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 03 | 02 | 17 | 96 | Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah | operasional sistem informasi pengelolaan pajak daerah (bln) | 36 | 971.714.190 | - | - | 12 | 323.904.730 | 3,00 | 61.648.450 | 25,00 | 19,03 | 3,00 | 61.648.450 | 8,33 | 6,34 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,58 | 40,15 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| IV | | | | | | | KEPEGAWAIAN | | 23.999.850.000 | | 9.887.835.528 | | 4.323.149.713 | | 328.972.784 | | | | 10.216.808.312 | | | | |
| 1 | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 3.640.718.000 | 36 | 1.942.214.698 | 12 | 633.464.850 | 3 | 81.326.336 | 25,00 | 12,84 | 39 | 2.023.541.034 | 54,17 | 55,58 | BKPSDM |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik | jasa telpon, sumber daya air dan listrik (bln) | 72 | 442.480.000 | 36 | 272.590.180 | 12 | 108.000.000 | 3 | 22.066.486 | 25,00 | 20,43 | 39 | 294.656.666 | 54,17 | 66,59 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | pembayaran/ honorarium tenaga administrasi keuangan (bln) | 72 | 631.032.000 | 36 | 313.482.000 | 12 | 89.250.000 | 3 | 10.600.000 | 25,00 | 11,88 | 39 | 324.082.000 | 54,17 | 51,36 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | honor petugas kebersihan kantor (bln) | 72 | 255.000.000 | 36 | 108.000.000 | 12 | 38.819.400 | 3 | 5.716.700 | 25,00 | 14,73 | 39 | 113.716.700 | 54,17 | 44,59 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional BKPSDM (bln) | 72 | 221.973.000 | 36 | 116.506.864 | 12 | 98.994.950 | 3 | 14.996.650 | 25,00 | 15,15 | 39 | 131.503.514 | 54,17 | 59,24 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada BKPSDM (bln) | 72 | 302.143.000 | 36 | 151.963.600 | 12 | 80.081.700 | 3 | 6.728.000 | 25,00 | 8,40 | 39 | 158.691.600 | 54,17 | 52,52 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM (bln) | 72 | 75.025.000 | 36 | 52.439.700 | 12 | 8.866.300 | 3 | 4.278.500 | 25,00 | 48,26 | 39 | 56.718.200 | 54,17 | 75,60 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan (bln) | 72 | 77.119.000 | 36 | 36.219.000 | 12 | 14.500.000 | 3 | 865.000 | 25,00 | 5,97 | 39 | 37.084.000 | 54,17 | 48,09 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman pada BKPSDM (bln) | 72 | 240.333.000 | 36 | 99.533.000 | 12 | 44.577.500 | 3 | 6.050.000 | 25,00 | 13,57 | 39 | 105.583.000 | 54,17 | 43,93 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|------|---------------|-----|---------------|-----|-------------|----|-------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait (bln) | 72 | 832.905.000 | 36 | 522.162.954 | 12 | 44.775.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 522.162.954 | 54,17 | 62,69 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 20 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait (bln) | 72 | 398.565.000 | 36 | 207.277.200 | 12 | 105.600.000 | 3 | 10.025.000 | 25,00 | 9,49 | 39 | 217.302.200 | 54,17 | 54,52 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 01 | 40 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | publikasi yang dilakukan (kali) | 9 | 164.143.000 | 9 | 62.040.200 | 0 | - | 0 | - | - | - | 9 | 62.040.200 | 100,00 | 37,80 | |
| 2 | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya layanan sarpras bagi aparatur (bln) | 72 | 2.899.457.000 | 36 | 1.557.325.857 | 12 | 463.217.000 | 9 | 30.570.248 | 75,00 | 6,60 | 45 | 1.587.896.105 | 62,50 | 54,77 | BKPSDM |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (jenis) | 112 | 783.962.000 | 84 | 535.367.000 | 5 | 136.750.000 | 1 | 5.000.000 | 20,00 | 3,66 | 85 | 540.367.000 | 75,89 | 68,93 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit) | 27 | 437.880.000 | 12 | 72.760.000 | 3 | 20.250.000 | 0 | - | - | - | 12 | 72.760.000 | 44,44 | 16,62 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor (bln) | 72 | 864.819.000 | 36 | 544.935.000 | 12 | 124.050.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 544.935.000 | 54,17 | 63,01 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 595.731.000 | 36 | 301.746.876 | 12 | 140.225.000 | 3 | 20.275.248 | 25,00 | 14,46 | 39 | 322.022.124 | 54,17 | 54,05 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 217.065.000 | 36 | 102.516.981 | 12 | 41.942.000 | 3 | 5.295.000 | 25,00 | 12,62 | 39 | 107.811.981 | 54,17 | 49,67 | |
| 3 | 3 | 00 | 04 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi | 100 | 249.872.000 | 35 | 99.872.000 | 15 | 195.325.000 | 0 | - | - | - | 35 | 99.872.000 | 35,00 | 39,97 | BKPSDM |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 05 | 04 | Belanja kursus-kursus singka/pelatihan | Jumlah ASN yang mengikuti kursus dan pelatihan sigkat (org) | 50 | 249.872.000 | 17 | 99.872.000 | 7 | 50.000.000 | 0 | - | - | - | 17 | 99.872.000 | 34,00 | 39,97 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 05 | 07 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah (orang) | 150 | 518.158.000 | 29 | 136.642.600 | 30 | 145.325.000 | 30 | 44.301.900 | 100,00 | 30,48 | 59 | 180.944.500 | 39,33 | 34,92 | |
| 4 | 3 | 00 | 04 | 01 | 05 | | Program Pengembangan Data/ Informasi | Persentase program pembangunan yang dipublikasikan (%) | 100 | 165.000.000 | 85 | - | 10 | 55.000.000 | 0 | - | - | - | 85 | - | 85,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 05 | | Penyerbaluan Informasi Pembangunan | publikasi yang dilakukan (kali) | 6 | 165.000.000 | 0 | - | 2 | 55.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Kepegawaian (Aspek Syarat dan Prosedur) | 80 | 8.667.074.000 | 45 | 2.327.500.499 | 15 | 827.973.150 | 0 | 133.707.600 | - | 16,15 | 45 | 2.461.208.099 | 56,25 | 28,40 | BKPSDM |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 02 | Seleksi Penerimaan Calon PNS | Jumlah Pelamar yang Mengikuti Seleksi dan Diterima Menjadi PNS (orang) | 1004 | 770.850.000 | 204 | 171.113.600 | 200 | 63.275.000 | 0 | - | - | - | 204 | 171.113.600 | 20,32 | 22,20 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 11 | Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas | Jumlah PNS yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas (orang) | 390 | 2.283.364.000 | 173 | 839.987.584 | 4 | 148.625.000 | 1 | 18.857.000 | 25,00 | 12,69 | 174 | 858.844.584 | 44,62 | 37,61 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|--|--|-------|---------------|------|-------------|------|------------|-----|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|-------|----|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 26 | Penyelenggaraan Tim Penilaian Kinerja ASN | Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja ASN (kali) | 137 | 313.969.000 | 56 | 111.369.144 | 12 | 68.750.000 | 7 | 30.120.000 | 58,33 | 43,81 | 63 | 141.489.144 | 45,99 | 45,06 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 49 | Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan | Jumlah diadakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan (kali) | 53 | 176.623.000 | 5 | 31.189.500 | 25 | 34.860.000 | 5 | 9.189.750 | 20,00 | 26,36 | 10 | 40.379.250 | 18,87 | 22,86 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 35 | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Jumlah Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (orang) | 235 | 1.131.798.000 | 73 | 258.321.000 | 100 | 96.862.500 | 15 | 36.869.900 | 15,00 | 38,06 | 88 | 295.190.900 | 37,45 | 26,08 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 25 | Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai | Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (kali) | 34 | 231.324.000 | 10 | 76.602.682 | 15 | 37.410.000 | 1 | 6.207.500 | 6,67 | 16,59 | 11 | 82.810.182 | 32,35 | 35,80 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 16 | Penyusunan Formasi PNS | Tercapainya Penyusunan Formasi PNS (orang) | 12216 | 518.711.000 | 4220 | 210.269.559 | 5886 | 36.450.000 | 215 | 2.327.500 | 3,65 | 6,39 | 4435 | 212.597.059 | 36,30 | 40,99 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 36 | Pengelolaan administrasi mutasi pegawai | operasional administrasi mutasi pegawai (bln) | 72 | 210.735.000 | 36 | 45.402.090 | 12 | 16.037.500 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 45.402.090 | 54,17 | 21,54 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 39 | Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian | Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diproses (orang) | 237 | 213.661.000 | 57 | 44.699.340 | 30 | 26.450.000 | 0 | 7.839.400 | - | 29,64 | 57 | 52.538.740 | 24,05 | 24,59 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | | Pembekalan Pasangan Pra Nikah | Jumlah pasangan PNS yang akan dibekali (pasangan) | 150 | 75.000.000 | 0 | - | 20 | 10.913.150 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | | Penilaian Evaluasi Kinerja | Jumlah PNS yang dinilai (orang) | 600 | 195.000.000 | 0 | - | 140 | 19.435.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 42 | Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah (orang) | 800 | 248.471.000 | 175 | 53.471.000 | 150 | 53.925.000 | 0 | 5.164.950 | - | 9,58 | 175 | 58.635.950 | 21,88 | 23,60 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 38 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK | operasional pengelolaan SIMPEG dan SAPK (bln) | 72 | 324.996.000 | 36 | 158.533.000 | 12 | 32.700.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 158.533.000 | 54 | 48,78 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | | Pengelolaan tata naskah dinas | operasional pengelolaan tata naskah dinas (bln) | 8100 | 216.000.000 | 0 | - | 2700 | 62.490.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 56 | Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar Pegawai | Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar (berkas) | 8340 | 1.057.125.000 | 1240 | 195.259.000 | 1600 | 49.275.000 | 0 | 12.623.400 | - | 25,62 | 1240 | 207.882.400 | 15 | 19,66 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 37 | Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai | Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan BUP, janda/duda, APS dan MPP (berkas) | 1257 | 473.851.000 | 208 | 83.148.000 | 433 | 20.975.000 | 119 | - | 27,48 | - | 327 | 83.148.000 | 26,01 | 17,55 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 22 | Pengelolaan administrasi karpeg, karis/ karsu dan taspen | Jumlah berkas PNS yang diproses usulan karpeg, karis/karsu dan taspen (berkas) | 2110 | 225.596.000 | 448 | 48.135.000 | 200 | 22.075.000 | 0 | 4.508.200 | - | 20,42 | 448 | 52.643.200 | 21,23 | 23,34 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 31 | 60 | Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018 | Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi (org) | 100 | 54.930.000 | 0 | - | 50 | 27.465.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---------------------------|---|-----|----|-----|----|----|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------|------------|----------------|---------------------|-------|-------|---------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| 6 | 3 | 00 | 04 | 01 | 29 | 06 | Program Pendidikan Kedinasan | Persentase Pejabat Struktural Eselon II dan III yang telah mengikuti Diklat Pim II dan III (%) | 100 | 8.542.729.000 | 60 | 3.960.922.474 | 20 | 2.203.169.713 | 17,43 | 83.368.600 | 87,15 | 3,78 | 77,43 | 4.044.291.074 | 77,43 | 47,34 | BKPSDM |
| | | | | | | | | Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim IV (%) | 100 | | 60 | | 20 | 0,00 | - | - | - | 60,00 | - | 60,00 | | | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 29 | 06 | Peningkatan keterampilan dan profesionalisme | Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Pim II dan Pim III (orang) | 96 | 3.490.679.000 | 32 | 1.743.898.346 | 32 | 144.678.667 | 2 | 47.250.000 | 6,25 | 32,66 | 34 | 1.791.148.346 | 35,42 | 51,31 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 29 | 08 | Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV (orang) | 270 | 3.346.888.000 | 90 | 1.692.323.426 | 90 | 385.421.500 | 0 | - | - | - | 90 | 1.692.323.426 | 33,33 | 50,56 | |
| | 3 | 00 | 04 | 01 | 29 | 07 | Diklat Prajabatan bagi Calon PNS | Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan (orang) | 646 | 1.705.162.000 | 206 | 524.700.702 | 206 | 1.673.069.546 | 80 | 36.118.600 | 38,83 | 2,16 | 286 | 560.819.302 | 44,27 | 32,89 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,48 | 37,68 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| V | | | | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 3.798.686.239 | | 120.785.720 | | 494.469.200 | | 21.780.500 | | | | 142.566.220 | | | | |
| 1 | | | | | | | Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah (%) | 100 | 892.976.000 | 25 | - | 25 | 159.072.500 | 0 | 5.338.000 | - | 3,36 | 25,00 | 5.338.000 | 25,00 | 0,60 | Bapedalitbang |
| | | | | | | | Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah | rumusan inovasi yang dihasilkan (buah) | 4 | 477.217.500 | 0 | - | 1 | 159.072.500 | 0 | 5.338.000 | - | 3,36 | 0,00 | 5.338.000 | 0,00 | 1,12 | |
| 2 | | | | | | | Program Penelitian Pengembangan Pemanfaatan SDM & IPTEK Daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%) | 100 | 2.621.632.139 | 30 | 58.290.620 | 45 | 240.704.000 | 0,00 | 11.920.500 | - | 4,95 | 30 | 70.211.120 | 30,00 | 2,68 | Bapedalitbang |
| | | | | | | | Koordinasi kelitbangan | operasional pelaksanaan koordinasi kelitbangan (bln) | 60 | 690.000.000 | 24 | 58.290.620 | 12 | 59.489.000 | 3,00 | 8.394.500 | 25,00 | 14,11 | 27 | 66.685.120 | 45 | 9,66 | |
| | | | | | | | Kajian Kebijakan Pusat dan Daerah di Kab. Pesisir Selatan | jumlah kebijakan yang dikaji (kebijakan) | 12 | 543.645.000 | - | - | 4 | 181.215.000 | 0,00 | 3.526.000 | - | 1,95 | 0 | 3.526.000 | 0 | 0,65 | |
| 3 | | | | | | | Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan | Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian (%) | 100 | 284.078.100 | 40,00 | 62.495.100 | 20 | 94.692.700 | 0,00 | 4.522.000 | - | 4,78 | 40 | 67.017.100 | 40,00 | 23,59 | Bapedalitbang |
| | | | | | | | Penguatan kerjasama kelitbangan | terkelolanya dewan riset daerah (bln) | 48 | 284.078.100 | 12 | 62.495.100 | 12 | 94.692.700 | 3,00 | 4.522.000 | 25,00 | 4,78 | 15 | 67.017.100 | 31,25 | 23,59 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,67 | 8,96 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| | | | | | | | URUSAN PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | 144.899.972.042 | | 53.917.345.305 | | 20.126.739.263 | 0 | 3.388.247.097 | | | | 57.305.592.402 | | | | |
| 1 | 4 | 00 | 01 | 01 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bln) | 72 | 54.500.785.932 | 36 | 20.293.701.711 | 12 | 5.976.083.476,00 | 3 | 1.514.205.347 | 25,00 | 25,34 | 39 | 21.807.907.058 | 54,17 | 40,01 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah tagihan pengiriman surat menyurat (bln) | 72 | 1.073.600.000 | 36 | 466.196.049 | 12 | 99.151.993,00 | 3 | 18.028.700 | 25,00 | 18,18 | 39 | 484.224.749 | 54,17 | 45,10 | Bagian Umum |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|--|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan rekening listrik dan air | 72 | 5.700.000.000 | 36 | 2.650.306.896 | 12 | 800.160.000,00 | 3 | 216.460.552 | 25,00 | 27,05 | 39 | 2.866.767.448 | 54,17 | 50,29 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (bln) | 72 | 2.152.000.000 | 36 | 546.462.600 | 12 | 217.300.000,00 | 3 | 26.960.000 | 25,00 | 12,41 | 39 | 573.422.600 | 54,17 | 26,65 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan (bln) | 72 | 2.325.000.000 | 36 | 758.806.341 | 12 | 259.319.234,00 | 3 | 45.418.950 | 25,00 | 17,51 | 39 | 804.225.291 | 54,17 | 34,59 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | honorarium tenaga kebersihan yang dibayarkan (bln) | 72 | 2.712.200.000 | 36 | 1.018.604.600 | 12 | 409.115.000,00 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 0,33 | 39 | 1.019.954.600 | 54,17 | 37,61 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (bln) | 72 | 723.500.000 | 36 | 243.345.200 | 12 | 63.475.000,00 | 3 | 7.274.850 | 25,00 | 11,46 | 39 | 250.620.050 | 54,17 | 34,64 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Ketersediaan Alat Tulis (bln) | 36 | 707.973.992 | - | - | 12 | 217.973.992,00 | 3 | 116.510.905 | 25,00 | 53,45 | 3 | 116.510.905 | 8,33 | 16,46 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Ketersediaan barang Cetak dan Pengandaan (bln) | 36 | 547.463.500 | - | - | 12 | 137.463.500,00 | 3 | 66.935.000 | 25,00 | 48,69 | 3 | 66.935.000 | 8,33 | 12,23 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bln) | 72 | 425.800.000 | 36 | 173.204.700 | 12 | 71.024.000,00 | 3 | 14.778.000 | 25,00 | 20,81 | 39 | 187.982.700 | 54,17 | 44,15 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (peket) | 18 | 355.700.000 | 9 | 160.028.450 | 3 | 45.319.318,00 | 0 | 6.055.000 | - | 13,36 | 9 | 166.083.450 | 50,00 | 46,69 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | ketersediaan makan dan minum rapat dan tamu (bln) | 72 | 10.172.548.440 | 36 | 5.207.077.310 | 12 | 1.753.900.000,00 | 3 | 551.565.540 | 25,00 | 31,45 | 39 | 5.758.642.850 | 54,17 | 56,61 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti (bln) | 72 | 3.850.000.000 | 36 | 1.400.039.375 | 12 | 403.025.000,00 | 3 | 38.921.750 | 25,00 | 9,66 | 39 | 1.438.961.125 | 54,17 | 37,38 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang diikuti (bln) | 72 | 550.000.000 | 36 | 236.765.750 | 12 | 74.600.000,00 | 3 | 27.175.000 | 25,00 | 36,43 | 39 | 263.940.750 | 54,17 | 47,99 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 24 | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | honor yang dibayarkan (bln) | 72 | 960.000.000 | 36 | 356.038.722 | 12 | 186.050.000,00 | 3 | 27.500.000 | 25,00 | 14,78 | 39 | 383.538.722 | 54,17 | 39,95 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 25 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Rumah Dinas | ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan rumah dinas (bln) | 72 | 600.000.000 | 36 | 248.812.600 | 12 | 78.936.000 | 3 | 16.687.000 | 25,00 | 21,14 | 39 | 265.499.600 | 54,17 | 44,25 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 28 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | biaya perjalanan dinas keluar daerah (bln) | 72 | 11.500.000.000 | 36 | 4.384.535.488 | 12 | 1.059.200.000 | 3 | 320.406.900 | 25,00 | 30,25 | 39 | 4.704.942.388 | 54,17 | 40,91 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah (bln) | 36 | 1.225.000.000 | 18 | 372.861.745 | 6 | 100.070.439,00 | 1 | 12.177.200 | 16,67 | 12,17 | 19 | 385.038.945 | 52,78 | 31,43 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 35 | Penyusunan dan Finalisasi Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (bln) | 35 | 1.120.000.000 | 21 | 306.210.131 | - | - | 0 | - | - | - | 21 | 306.210.131 | 60,00 | 27,34 | Bagian Keuangan |
| | 4 | 00 | 01 | 01 | 47 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi | Biaya perjalanan dinas ke Luar Provinsi (bln) | 18 | 7.800.000.000 | 18 | 1.764.405.754 | - | - | 0 | - | - | - | 18 | 1.764.405.754 | 100,00 | 22,62 | Bagian Keuangan |
| 2 | 4 | 00 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (bln) | 72 | 31.092.900.000 | 36 | 12.224.267.947 | 12 | 5.507.285.750,00 | 3 | 1.048.748.731 | 25,00 | 19,04 | 39 | 13.273.016.678 | 54,17 | 42,69 | Setda |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|--|--|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 2 (unit) | 13 | 340.000.000 | 4 | 68.090.000 | 0 | - | 0 | - | 4 | 68.090.000 | 30,77 | 20,03 | | Bagian Umum | | |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 06 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas | Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (paket) | 4 | 3.690.000.000 | 1 | 893.308.900,00 | 1 | 987.928.750,00 | 0 | 215.147.200 | - | 21,78 | 1 | 1.108.456.100 | 25,00 | 30,04 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 08 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas | Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (paket) | 6 | 492.500.000 | 3 | 141.161.000 | 1 | 94.280.000,00 | 0 | 17.450.000 | - | 18,51 | 3 | 158.611.000 | 50,00 | 32,21 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | peralatan gedung kantor (paket) | 6 | 3.400.000.000 | 3 | 1.386.687.521 | 1 | 278.650.000,00 | 0 | 15.500.000 | - | 5,56 | 3 | 1.402.187.521 | 50,00 | 41,24 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Meubelur | Meublier (paket) | 6 | 1.156.000.000 | 3 | 526.150.000 | 1 | 129.750.000,00 | 0 | - | - | - | 3 | 526.150.000 | 50,00 | 45,51 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan | Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan (bin) | 36 | 1.290.000.000 | 12 | 454.467.245 | 0 | - | 0 | - | - | - | 12 | 454.467.245 | 33,33 | 35,23 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya Rumah Jabatan (bin) | 72 | 3.350.000.000 | 36 | 1.003.340.000,00 | 12 | 647.500.000,00 | 3 | 131.765.875 | 25,00 | 20,35 | 39 | 1.135.105.875 | 54,17 | 33,88 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas | terpeliharanya rumah dinas (bin) | 72 | 3.592.000.000 | 36 | 1.431.693.340 | 12 | 487.400.000,00 | 3 | 77.000.000 | 25,00 | 15,80 | 39 | 1.508.693.340 | 54,17 | 42,00 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya gedung kantor (bin) | 72 | 5.323.000.000 | 36 | 2.401.867.148 | 12 | 691.800.000,00 | 3 | 73.032.500 | 25,00 | 10,56 | 39 | 2.474.899.648 | 54,17 | 46,49 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | terpeliharanya mobil jabatan (bin) | 48 | 1.837.500.000 | 24 | 612.500.000,00 | 12 | 625.575.000,00 | 3 | 225.630.988 | 25,00 | 36,07 | 27 | 838.130.988 | 56,25 | 45,61 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional (bin) | 72 | 5.479.900.000 | 36 | 2.853.045.043 | 12 | 1.157.977.000,00 | 3 | 221.946.168 | 25,00 | 19,17 | 39 | 3.074.991.211 | 54,17 | 56,11 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Terpeliharanya perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (bin) | 72 | 880.000.000 | 36 | 422.201.750 | 12 | 394.425.000,00 | 3 | 71.276.000 | 25,00 | 18,07 | 39 | 493.477.750 | 54,17 | 56,08 | | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 02 | 29 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelur | Terpeliharanya Meubelur (bin) | 600 | 262.000.000 | 300 | 29.756.000 | 100 | 12.000.000,00 | 30 | - | 30,00 | - | 330 | 29.756.000 | 55,00 | 11,36 | | Bagian Umum |
| 3 | 4 | 00 | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase aparatur berdisiplin (%) | 100 | 1.679.000.000 | 85 | 834.151.858 | 10 | 274.925.000 | 0 | 67.879.382 | - | 24,69 | 85 | 902.031.240 | 85,00 | 53,72 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 03 | 06 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan (paket) | 5 | 1.679.000.000 | 2 | 834.151.858 | 1 | 274.925.000 | 0 | 67.879.382 | - | 24,69 | 2 | 902.031.240 | 40,00 | 53,72 | | Bagian Umum |
| 4 | 4 | 00 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persentase aparatur profesional (%) | 100 | 641.200.000 | 75 | 184.334.196 | 15 | 113.615.000 | 0 | 9.380.950 | - | 8,26 | 75 | 193.715.146 | 75,00 | 30,21 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur mengikuti pelatihan (org) | 45 | 326.200.000 | 0 | - | 15 | 76.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | | |
| | 4 | 00 | 01 | 05 | 19 | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | operasional pengelolaan administrasi kepegawaian setda (bin) | 72 | 315.000.000 | 36 | 184.334.196 | 12 | 37.615.000 | 3 | 9.380.950 | 25,00 | 24,94 | 39 | 193.715.146 | 54,17 | 61,50 | | Bagian Organisasi |
| 5 | 4 | 00 | 01 | 21 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Nagari ODF (Open Defecation Free) (%) | 97,85 | 558.376.890 | 43,01 | 186.125.630 | 26,88 | 32.988.000 | 1 | 3.257.000 | 3,72 | 9,87 | 44,01 | 189.382.630 | 44,98 | 33,92 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 21 | 06 | Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) | Jumlah sekolah yang dibina | 20 | 558.376.890 | 8 | 186.125.630 | 4 | 32.988.000,00 | 1 | 3.257.000 | 25,00 | 9,87 | 9 | 189.382.630 | 45,00 | 33,92 | | Bagian Kesra |
| 6 | 4 | 00 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase penegakan perda (%) | 99 | 1.077.014.494,00 | 90 | 338.507.247,00 | 9 | 221.730.000,00 | 0 | 6.190.600 | - | 2,79 | 90 | 344.697.847 | 90,91 | 32,00 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 07 | Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pessel | Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi | 30 | 408.628.210 | 15 | 204.314.105 | 5 | 60.805.000,00 | 0 | 1.926.600 | - | 3,17 | 15 | 206.240.705 | 50,00 | 50,47 | | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 09 | Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | biaya operasional penanganan konflik (bin) | 72 | 268.386.284 | 36 | 134.193.142 | 12 | 60.925.000 | 3 | 4.015.600 | 25,00 | 6,59 | 39 | 138.208.742 | 54,17 | 51,50 | | Bagian Kesbangpol |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|----|---|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 20 | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) | Operasional koordinasi forkopimda (bln) | 48 | 400.000.000 | 0 | - | 12 | 100.000.000 | 3 | 248.400 | 25,00 | 0,25 | 3 | 248.400 | 6,25 | 0,06 | Bagian Kesbangpol |
| 7 | 4 | 00 | 01 | 16 | | Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase penurunan tingkat kriminalitas (%) | 3 | 721.284.354,00 | 3 | 429.970.824,00 | 3 | 110.244.654,00 | 3 | 28.680.250 | 100,00 | 26,02 | 3 | 458.651.074 | 100,00 | 63,59 | Setda |
| | | | | | | | Persentase penurunan pungli di Kabupaten Pesisir Selatan (%) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 100,00 | | 5 | | 100,00 | | |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 06 | Komunitas Inteligen Daerah | Jumlah Rekomendasi | 55 | 390.550.392 | 55 | 390.550.392 | | - | 0 | | | | 55 | 390.550.392 | 100,00 | 100,00 | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 14 | Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan | Operasional Tim Saber Pungli (bln) | 72 | 125.833.962 | 36 | 39.420.432,00 | 12 | 41.944.654,00 | 3 | 1.099.400 | 25,00 | 2,62 | 39 | 40.519.832 | 54,17 | 32,20 | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 25 | Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | operasional tim koordinasi pemeliharaan kanrantibmas (bln) | 36 | 204.900.000 | 0 | - | 12 | 68.300.000,00 | 1 | 27.580.850 | 8,33 | 40,38 | 1 | 27.580.850 | 2,78 | 13,46 | Bagian Kesbangpol |
| 8 | 4 | 00 | 01 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Kepatuhan Aparatur dalam upacara hari-hari besar nasional (%) | 100 | 2.948.513.258,00 | 95 | 1.173.923.184,00 | 5 | 296.347.500,00 | 0 | 12.109.400 | - | 4,09 | 95 | 1.186.032.584 | 95,00 | 40,22 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 06 | Peningkatan Kesadaran Bela Negara | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (keg) | 6 | 238.513.258 | 6 | 238.513.258 | 0 | - | 0 | | | | 6 | 238.513.258 | 100,00 | 100,00 | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 07 | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya | 132 | 1.480.000.000 | 66 | 497.795.958 | 22 | 159.270.000,00 | 1 | 6.488.200 | 4,55 | 4,07 | 67 | 504.284.158 | 50,76 | 34,07 | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 10 | Pelaporan RANHAM | Laporan triwulan RanHam yang disampaikan (dokumen) | 20 | 250.000.000 | 8 | 52.595.492 | 4 | 26.925.000,00 | 1 | 2.689.700 | 25,00 | 9,99 | 9 | 55.285.192 | 45,00 | 22,11 | Bagian Hukum |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 12 | Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan | Perhelatan yang dilakukan (kegiatan) | 6 | 980.000.000 | 3 | 385.018.476 | 1 | 110.152.500 | 0 | 2.931.500 | - | 2,66 | 3 | 387.949.976 | 50,00 | 39,59 | Bagian Pemerintahan dan Otda |
| 9 | 4 | 00 | 01 | 19 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan (rekomendasi) | 28 | 817.465.434 | 11 | 272.488.478 | 4 | 110.000.000,00 | 1 | 3.158.850 | 25,00 | 2,87 | 12 | 275.647.328 | 42,86 | 33,72 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 19 | 02 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Operasional FKDM (bln) | 48 | 817.465.434 | 24 | 272.488.478 | 12 | 110.000.000,00 | 1 | 3.158.850 | 8,33 | 2,87 | 25 | 275.647.328 | 52,08 | 33,72 | Bagian Kesbangpol |
| 10 | 4 | 00 | 01 | 20 | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar (%) | 25 | 4.358.000.000 | 10 | 1.063.465.667 | 5 | 299.299.334,00 | 0 | 3.442.300 | - | 1,15 | 10 | 1.066.907.967 | 40,00 | 24,48 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 10 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika | Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika | 120 | 4.358.000.000 | 30 | 1.063.465.667 | 30 | 299.299.334,00 | 0 | 3.442.300 | - | 1,15 | 30 | 1.066.907.967 | 25,00 | 24,48 | Bagian Kesbangpol |
| 11 | 4 | 00 | 01 | 21 | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase ormas/ LSM yang memenuhi syarat administrasi lengkap (%) | 95 | 877.109.494,00 | 80 | 238.554.747,00 | 5 | 352.054.584,00 | 0 | 7.820.000 | - | 2,22 | 80 | 246.374.747 | 84,21 | 28,09 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 21 | 12 | Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Laporan triwulan hasil pemantauan perkembangan politik daerah (dok) | 12 | 400.000.000 | | | 4 | 265.308.482,00 | 1 | 3.289.000 | 25,00 | 1,24 | 1 | 3.289.000 | 8,33 | 0,82 | Bagian Kesbangpol |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|----|--|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 4 | 00 | 01 | 21 | 15 | Monitoring Evaluasi Keberadaan Ormas/ LSM sesuai dengan Undang-Undang Keormasman | Laporan triwulan hasil monitoring (dokumen) | 24 | 230.320.984 | 12 | 115.160.492 | 4 | 55.450.000,00 | 1 | 3.254.200 | 25,00 | 5,87 | 13 | 118.414.692 | 54,17 | 51,41 | Bagian Kesbangpol |
| | 4 | 00 | 01 | 21 | 17 | Meneliti dan Memeriksa Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai | operasional verifikasi bantuan keuangan kepada partai (bln) | 72 | 246.788.510 | 36 | 123.394.255 | 12 | 31.296.102,00 | 11 | 1.276.800 | 91,67 | 4,08 | 47 | 124.671.055 | 65,28 | 50,52 | Bagian Kesbangpol |
| 12 | 4 | 00 | 01 | 18 | | Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Jumlah kerjasama dengan media massa (media) | 160 | 11.070.000.000 | 79 | 4.194.207.806,00 | 27 | 647.025.000,00 | 6 | 93.247.700 | 22,22 | 14,41 | 85 | 4.287.455.506 | 53,13 | 38,73 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 01 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Kerjasama dengan media (bln) | 72 | 4.100.000.000 | 36 | 1.819.795.315 | 12 | 254.850.000,00 | 3 | 6.824.100 | 25,00 | 2,68 | 39 | 1.826.619.415 | 54,17 | 44,55 | Bagian Humas dan Protokoler |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 04 | Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah | operasional pendokumentasian humas (bln) | 72 | 1.800.000.000 | 36 | 488.507.301 | 12 | 212.325.000,00 | 3 | 22.978.300 | 25,00 | 10,82 | 39 | 511.485.601 | 54,17 | 28,42 | Bagian Humas dan Protokoler |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 07 | Publikasi dan Promosi Daerah | Jumlah publikasi dan promosi daerah | 320 | 4.800.000.000 | 140 | 1.833.251.238 | 50 | 179.850.000,00 | 12 | 63.445.300 | 24,00 | 35,28 | 152 | 1.896.696.538 | 47,50 | 39,51 | Bagian Humas dan Protokoler |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 08 | Bintek Kapasitas Kewartawanan dan Pers /Studi Banding | Jumlah Peserta Bintek Kewartawanan dan Pers | 130 | 370.000.000 | 30 | 52.653.952,00 | | - | 0 | | | | 30 | 52.653.952 | 23,08 | 14,23 | Bagian Humas dan Protokoler |
| 13 | 4 | 00 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah investor yang menanamkan modal | 15 | 281.000.000 | 12 | 268.013.721 | 1 | 196.748.800 | 0 | 26.000.000 | - | 13,21 | 12 | 294.013.721 | 80,00 | 104,63 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 26 | Pameran Apkasi dan Sumber Expo | Jumlah Pameran yang diikuti (kali) | 1 | 281.000.000 | 2 | 268.013.721 | 1 | 196.748.800,00 | 0 | 26.000.000 | - | 13,21 | 2 | 294.013.721 | 200,00 | 104,63 | Bagian Perekonomian |
| 14 | 4 | 00 | 01 | 16 | | Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan | Peringkat pemuda pelopor | 3 Besar | 207.242.684 | 5 besar | 103.621.342 | 5 besar | 19.213.500,00 | 0 | 6.665.500 | 34,69 | 5 besar | 110.286.842 | 80,00 | 53,22 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 16 | Pembinaan Hasil karya Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda pelopor yang dibina (org) | 20 | 207.242.684 | 9 | 103.621.342 | 3 | 19.213.500,00 | 0 | 6.665.500 | - | 34,69 | 9 | 110.286.842 | 45,00 | 53,22 | Bagian Kesra |
| 15 | 4 | 00 | 01 | 20 | | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat (unit klub) | 7 | 295.000.000 | 4 | 83.815.701 | 1 | 22.100.000,00 | 0 | 4.672.700 | - | 21,14 | 4 | 88.488.401 | 57,14 | 30,00 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 18 | Pemasarakatan Olahraga Aparatur | Jumlah kegiatan olahraga aparaturnya yang dilaksanakan (kegiatan) | 144 | 295.000.000 | 72 | 83.815.701 | 24 | 22.100.000,00 | 6 | 4.672.700 | 25,00 | 21,14 | 78 | 88.488.401 | 54,17 | 30,00 | Bagian Kesra |
| 16 | 4 | 00 | 01 | 16 | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah dokumen/ arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan | 32 urusan | 1.385.000.000 | 32 urusan | 324.092.445 | 32 urusan | 50.499.974,00 | 3 | - | - | 32 urusan | 324.092.445 | 100,00 | 23,40 | Setda | |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 02 | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | operasional pengelolaan arsip lingkup selda (bln) | 72 | 1.385.000.000 | 36 | 324.092.445 | 12 | 50.499.974,00 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 324.092.445 | 54,17 | 23,40 | Bagian Umum |
| 17 | 4 | 00 | 01 | 17 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan | Koordinasi pengembangan energi baru terbarukan (bln) | 12 | 58.127.626 | 0 | - | 12 | 58.127.626,00 | 1 | 10.534.750 | 8,33 | 18,12 | 1 | 10.534.750 | 8,33 | 18,12 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 01 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi | Laporan triwulan hasil monev EBTB (dokumen) | 4 | 58.127.626 | 0 | - | 4 | 58.127.626,00 | 1 | 10.534.750 | 25,00 | 18,12 | 1 | 10.534.750 | 25,00 | 18,12 | Bag Perekonomian dan SDA |
| 18 | 4 | 00 | 01 | 15 | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu | <9% | 308.000.000 | <9% | 263.358.050,00 | <9% | 52.742.163,16 | 0 | 11.465.250 | 21,74 | <9% | 274.823.300 | 100,00 | 89,23 | Setda | |
| | | | | | | | Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar kecamatan | <12% | | <13,4% | | <13% | 0 | | | <13,4% | | 90,00 | | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|----|---|---|-------|------------------|-------|------------------|------|----------------|-----|------------|-----------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|--------------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 23 | Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peptisida | Jumlah kios pupuk bersubsidi dan peptisida yang diawasi (unit) | 400 | 258.000.000 | 190 | 209.754.800 | 95 | 52.742.163,16 | 23 | 11.465.250 | 24,21 | 21,74 | 213 | 221.220.050 | 53,25 | 85,74 | Bag Perekonomian dan SDA |
| | 4 | 00 | 01 | 15 | 26 | Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi LPG 3 Kg/Gas dan BBM | Laporan triwulan hasil monev (dokumen) | 4 | 50.000.000 | 4 | 53.603.250,00 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 53.603.250 | 100,00 | 107,21 | Bag Perekonomian dan SDA |
| 19 | 4 | 00 | 01 | 18 | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 13,13 | 298.152.600,00 | 12,53 | 212.398.005,00 | 0,04 | 42.441.977,00 | 0 | 3.262.000 | - | 7,69 | 12,53 | 215.660.005 | 95,43 | 72,33 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 38 | Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah | Operasional TPID (bln) | 72 | 210.000.000 | 36 | 168.321.705 | 12 | 42.441.977,00 | 3 | 3.262.000 | 25,00 | 7,69 | 39 | 171.583.705 | 54,17 | 81,71 | Bag Perekonomian dan SDA |
| | 4 | 00 | 01 | 18 | 62 | Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) | laporan triwulan hasil monev KUR (dokumen) | 4 | 88.152.600 | 4 | 44.076.300,00 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 44.076.300 | 100,00 | 50,00 | Bag Perekonomian dan SDA |
| 20 | 4 | 00 | 01 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase OPD yang memiliki laporan pelaksanaan kegiatan yang baik (%) | 100 | 6.107.815.962,00 | 80 | 2.386.061.911,00 | 10 | 705.969.410,00 | 0 | 78.202.970 | - | 11,08 | 80 | 2.464.264.881 | 80,00 | 40,35 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 26 | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan | Operasional koordinasi Asisten III (bln) | 72 | 900.000.000 | 36 | 309.471.385 | 12 | 102.700.000,00 | 3 | 9.293.700 | 25,00 | 9,05 | 39 | 318.765.085 | 54,17 | 35,42 | Asisten III |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 27 | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra | Operasional koordinasi Asisten II (bln) | 72 | 900.000.000 | 36 | 319.550.663 | 12 | 85.750.000,00 | 3 | 11.973.470 | 25,00 | 13,96 | 39 | 331.524.133 | 54,17 | 36,84 | Asisten II |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 28 | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum | Operasional koordinasi Asisten I (bln) | 72 | 900.000.000 | 36 | 332.927.017 | 12 | 89.500.000,00 | 3 | 12.930.000 | 25,00 | 14,45 | 39 | 345.857.017 | 54,17 | 38,43 | Asisten I |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 30 | Pengendalian Program Pembangunan Daerah | Laporan triwulan hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan (dokumen) | 24 | 384.031.736 | 12 | 192.015.868 | 4 | 59.278.200,00 | 1 | 6.363.500 | 25,00 | 10,73 | 13 | 198.379.368 | 54,17 | 51,66 | Bagian Pembangunan dan Infrastruktur |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 32 | Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati | Operasional koordinasi staf ahli (bln) | 72 | 2.060.000.000 | 36 | 581.981.545 | 12 | 105.850.000,00 | 3 | 23.262.450 | 25,00 | 21,98 | 39 | 605.243.995 | 54,17 | 29,38 | Staf Ahli |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 34 | Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | pelaksanaan rapat pengendalian pembangunan (bln) | 72 | 220.000.000 | 36 | 156.962.012 | 12 | 32.692.000,00 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 156.962.012 | 54,17 | 71,35 | Bagian Pembangunan |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 35 | Penyusunan Prosedur Kegiatan | Jsidur pelaksanaan kegiatan (dokumen) | 6 | 293.784.226 | 3 | 146.892.113 | 1 | 35.423.870 | 1 | 1.000.000 | 100,00 | 2,82 | 4 | 147.892.113 | 66,67 | 50,34 | Bagian Pembangunan |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 36 | Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan (dokumen) | 24 | 240.000.000 | 12 | 162.167.371 | 4 | 61.130.098 | 1 | 5.315.400 | 25,00 | 8,70 | 13 | 167.482.771 | 54,17 | 69,78 | Bagian Pembangunan |
| | 4 | 00 | 01 | 20 | 37 | Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan | Jumlah dokumen HSPK yang disusun | 6 | 210.000.000 | 3 | 184.093.937 | 1 | 133.645.242 | 1 | 8.064.450 | 100,00 | 6,03 | 4 | 192.158.387 | 66,67 | 91,50 | Bagian Pembangunan |
| 21 | 4 | 00 | 01 | 22 | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku | 95 | 4.990.593.573 | 90 | 1.308.475.353 | 5 | 511.319.468 | 0 | 35.085.800 | - | 6,86 | 90 | 1.343.561.153 | 94,74 | 26,92 | Setda |
| | | | | | | | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE | 45 | - | 30 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 30 | - | 66,67 | - | |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 04 | Pembiayaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi | Jumlah Pembiayaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi yang dilaksanakan | 144 | 439.750.000 | 48 | 60.589.950 | 24 | 12.624.800 | 0 | - | - | - | 48 | 60.589.950 | 33,33 | 13,78 | Bagian Pembangunan |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|----|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 05 | Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (org) | 90 | 805.000.000 | 30 | 238.691.479 | 15 | 122.333.918 | 3 | 10.713.100 | 20,00 | 8,76 | 33 | 249.404.579 | 36,67 | 30,98 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 07 | Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik | operasional sarana pengadaan secara elektronik (bln) | 72 | 745.843.573 | 36 | 587.432.023 | 12 | 151.184.200 | 45 | 9.645.400 | 375,00 | 6,38 | 81 | 597.077.423 | 112,50 | 80,05 | Bagian Pembangunan |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 08 | Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ | Jumlah Fasilitasi dan Klarifikasi Lelang | 725 | 1.025.000.000 | 150 | 121.550.432 | 150 | 135.499.538 | 37 | 10.500.000 | 24,67 | 7,75 | 187 | 132.050.432 | 25,79 | 12,88 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 11 | Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Daerah | Jumlah Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 470.000.000 | 1 | 43.797.241 | | - | 0 | | | | 1 | 43.797.241 | 25,00 | 9,32 | |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 13 | Pengembangan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Barang dan Jasa | 9 | 820.000.000 | 1 | 24.496.925 | | - | 0 | | | | 1 | 24.496.925 | 11,11 | 2,99 | |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 14 | Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan triwulan money pengadaan barang dan jasa (dokumen) | 24 | 685.000.000 | 12 | 231.917.303 | 4 | 89.677.012 | 1 | 4.227.300 | 25,00 | 4,71 | 13 | 236.144.603 | 54,17 | 34,47 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 22 | 4 | 00 | 01 | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras (%) | 100 | 75.000.000,00 | 95 | 108.868.000,00 | 5 | 148.135.400,00 | 3 | 10.761.440 | 60,00 | 7,26 | 98 | 119.629.440 | 98,00 | 159,51 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 22 | 10 | Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan | terseleenggaranya rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan (bln) | 48 | 75.000.000 | 12 | 108.868.000,00 | 12 | 148.135.400,00 | 3 | 10.761.440 | 25,00 | 7,26 | 15 | 119.629.440 | 31,25 | 159,51 | Bagian Perekonomian |
| 23 | 4 | 00 | 01 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase aset Setda yang dikelola dengan baik (%) | 90 | 1.505.000.000 | 80 | 708.988.077 | 5 | 186.078.920,00 | 0 | 27.641.500 | - | 14,85 | 80 | 736.629.577 | 88,89 | 48,95 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 16 | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | pengelolaan aset setda (bln) | 72 | 1.505.000.000 | 36 | 708.988.077 | 12 | 186.078.920,00 | 3 | 27.641.500 | 25,00 | 14,85 | 39 | 736.629.577 | 54,17 | 48,95 | Bagian Keuangan |
| 24 | 4 | 00 | 01 | 17 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pemeringkatan kompetensi camat | 6 besar Tk Prov | 340.000.000 | 6 besar Tk Prov | 279.795.123 | 6 besar Tk Prov | 144.778.280 | 6 besar Tk Prov | - | - | - | 6 besar Tk Prov | 279.795.123 | 100,00 | 82,29 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 17 | 58 | Penilaian Kompetensi ASN | Penyelenggaraan penilaian kompetensi camat (kegiatan) | 6 | 340.000.000 | 3 | 279.795.123 | 1 | 144.778.280,00 | 0 | | | | 3 | 279.795.123 | 50,00 | 82,29 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| 25 | 4 | 00 | 01 | 16 | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Persentase Falisitasi kegiatan kepala daerah oleh protokoler (%) | 100 | 2.826.000.000,00 | 100 | 1.585.397.991,00 | 100 | 412.217.264,00 | 100 | 94.790.980 | 100,00 | 23,00 | 100 | 1.680.188.971 | 100,00 | 59,45 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 02 | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Layanan terhadap tamu kepala daerah (bln) | 72 | 2.075.000.000 | 36 | 1.022.474.200 | 12 | 252.635.400,00 | 3 | 81.982.580 | 25,00 | 32,45 | 39 | 1.104.456.780 | 54,17 | 53,23 | Bagian Umum |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 07 | Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan | operasional protokoler (bln) | 72 | 721.000.000 | 36 | 562.923.791 | 12 | 129.581.864 | 3 | 12.808.400 | 25,00 | 9,88 | 39 | 575.732.191 | 54,17 | 79,85 | Bagian Humas dan Protokoler |
| | 4 | 00 | 01 | 16 | 08 | Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah Pelayanan Kesehatan | 1 | 30.000.000 | | | 1 | 30.000.000 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 26 | 4 | 00 | 01 | 26 | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | PPersentase produk hukum yang difasilitasi % | 100 | 2.458.616.400 | 100 | 1.551.225.030 | 100 | 345.015.065 | 100 | 37.442.850 | 100,00 | 10,85 | 100 | 1.588.667.880 | 100,00 | 64,62 | setda |
| | 4 | 00 | 01 | 26 | 03 | Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDJ Hukum | Jumlah Buku SJDJ yang Disusun | 1020 | 390.000.000 | 1020 | 251.325.381 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | 1020 | 251.325.381 | 100,00 | 64,44 | Bagian Hukum |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|----|----|----|----|---|--|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 00 | 01 | 26 | 05 | Publikasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Lembaran daerah yang dipublikasi | 1090 | 298.616.400 | 0 | - | 540 | 78.616.400 | 135 | 5.415.800 | 25,00 | 6,89 | 135 | 5.415.800 | 12,39 | 1,81 | Bagian Hukum |
| | 4 | 00 | 01 | 26 | 11 | Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari | Jumlah Produk Hukum Nagari yang Dievaluasi | 2200 | 180.000.000 | 1150 | 219.015.283 | 600 | 47.598.965 | 150 | 14.450.250 | 25,00 | 30,36 | 1300 | 233.465.533 | 59,09 | 129,70 | Bagian Hukum |
| | 4 | 00 | 01 | 26 | 16 | Penyusunan Peraturan Bupati | Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi | 500 | 780.000.000 | 200 | 658.460.760 | 150 | 121.995.700 | 37 | 5.545.600 | 24,67 | 4,55 | 237 | 664.006.360 | 47,40 | 85,13 | Bagian Hukum |
| | 4 | 00 | 01 | 26 | 17 | Pembentukan Peraturan Daerah | Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah | 50 | 810.000.000 | 26 | 422.423.606 | 8 | 96.804.000 | 2 | 12.031.200 | 25,00 | 12,43 | 28 | 434.454.806 | 56,00 | 53,64 | Bagian Hukum |
| 27 | 4 | 00 | 01 | 28 | | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | Persentase kelembagaan Pemdayang tertata (%) | 100 | 1.075.928.999 | 90 | - | 10 | 189.622.085 | 2 | 15.602.050 | 20,00 | 8,23 | 92 | 15.602.050 | 92,00 | 1,45 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 28 | 04 | Evaluasi Jabatan SKPD | Jumlah Perangkat daerah yang di evaluasi jabatan | 45 | 550.000.000 | 45 | 116.344.399,00 | | - | 0 | - | | | 45 | 116.344.399 | 100,00 | 21,15 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 28 | 06 | Penataan dan Penguatan Kelembagaan | Revisi 20 Perbup, 5 Laporan Kelembagaan | 20 | 104.231.804 | | | 20 | 104.231.804 | 5 | 13.867.000 | 25,00 | 13,30 | 5 | 13.867.000 | 25,00 | 13,30 | |
| | 4 | 00 | 01 | 28 | 09 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang OPD dan Peraturan Bupati tentang Jabatan Struktural | Jumlah Ranperda dan ranperbup tentang jabatan struktural | 80 | 336.306.914 | 80 | 168.153.457 | | - | 0 | - | | | 80 | 168.153.457 | 100,00 | 50,00 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 28 | 10 | Penataan Jabatan Perangkat Daerah | Hasil analisis (dokumen) | 45 | 85.390.281 | | | 45 | 85.390.281 | 11 | 1.735.050 | 24,44 | 2,03 | 11 | 1.735.050 | 24,44 | 2,03 | Bagian Organisasi |
| 28 | 4 | 00 | 01 | 46 | | Program Advokasi Pemerintah Daerah | Persentase Sengketa hukum yang difasilitasi | 100 | 2.350.000.000 | 85 | 585.588.940 | 5 | 274.685.000 | 2 | 26.680.100 | 40,00 | 9,71 | 87 | 612.269.040 | 87,00 | 26,05 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 46 | 01 | Penyelesaian Sengketa Hukum | Jumlah perkara hukum yang diselesaikan | 58 | 2.350.000.000 | 22 | 585.588.940 | 10 | 274.685.000 | 2 | 26.680.100 | 20,00 | 9,71 | 24 | 612.269.040 | 41,38 | 26,05 | Bagian Hukum |
| 29 | 4 | 00 | 01 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Nilai LPPD | 3.350 | 4.794.110.192,00 | 3.180 | 1.413.079.123,00 | 50 | 359.227.580,00 | 0 | 59.862.850 | - | 16,66 | 3180 | 1.472.941.973 | 94,93 | 30,72 | Setda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 02 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota | 24 | 1.200.000.000 | 12 | 449.895.736 | 4 | 101.486.200,00 | 1 | 12.004.500 | 25,00 | 11,83 | 13 | 461.900.236 | 54,17 | 38,49 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 03 | Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah | Jumlah Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah | 33 | 252.110.192 | 9 | 126.055.096 | 8 | 39.112.500,00 | 2 | 6.524.500 | 25,00 | 16,68 | 11 | 132.579.596 | 33,33 | 52,59 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 04 | Fasilitasi Kerjasama Rantau | Jumlah fasilitasi nagari binaan perantau tingkat Kabupaten | 12 | 550.000.000 | 3 | 38.073.934,00 | 3 | 41.662.500,00 | 1 | 2.823.300 | 33,33 | 6,78 | 4 | 40.897.234 | 33,33 | 7,44 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 05 | Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan | Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari | 150 | 520.000.000 | 45 | 129.443.279,00 | 45 | 44.635.000,00 | 11 | 5.055.300 | 24,44 | 11,33 | 56 | 134.498.579 | 37,33 | 25,87 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 08 | Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami | Laporan nama rupa bumi dan unsur buatan (dok) | 5 | 495.000.000 | 2 | 175.214.619 | 1 | 41.466.380,00 | 1 | - | 100,00 | - | 3 | 175.214.619 | 60,00 | 35,40 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terlaksananya koordinasi kewilayahan (bln) | 72 | 1.180.000.000 | 36 | 343.050.294 | 12 | 39.165.000,00 | 3 | 13.355.750 | 25,00 | 34,10 | 39 | 356.406.044 | 54,17 | 30,20 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 15 | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten | Rakor yang dilaksankn | 10 | 597.000.000 | 4 | 151.346.165 | 2 | 51.700.000,00 | 1 | 20.099.500 | 50,00 | 38,88 | 5 | 171.445.665 | 50,00 | 28,72 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| 30 | 4 | 00 | 01 | 57 | | Program Peningkatan IMTAQ | Peringkat MTQ Pesisir Selatan | 5 besar | 1.450.000.000 | 11 besar | 530.779.633,00 | 5 besar | 2.035.407.000,35 | 0 | 77.190.850 | | 3,79 | 11 besar | 607.970.483 | 50,00 | 41,93 | Setda |
| | | | | | | | Peringkat MTQ Pesisir selatan | 5 | | 11 | | | 5 | - | 100,00 | #DIV/0! | 16 | - | 320,00 | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|---|--|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 01 | Peningkatan lmtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam | Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan | 144 | 1.450.000.000 | 72 | 530.779.633 | 24 | 120.004.600,00 | 6 | 34.952.500 | 25,00 | 29,13 | 78 | 565.732.133 | 54,17 | 39,02 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 05 | Tim Silaturahmi Pemda | Jumlah Masjid yang dikunjungi | 200 | 801.800.000 | 115 | 781.907.851 | 60 | 395.290.100,00 | 0 | - | - | - | 115 | 781.907.851 | 57,50 | 97,52 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 09 | Peningkatan Kapasitas KAN | Jumlah KAN yang dibina | 37 | 132.023.445,00 | | | 37 | 27.023.445,00 | 9 | 457.000 | 24,32 | 1,69 | 9 | 457.000 | 24,32 | 0,35 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 10 | Pengelolaan Pemberian Hibah Bansos | Jumlah Proposal yang difasilitasi | 500 | 200.000.000 | 300 | 93.722.811 | 150 | 17.186.000,00 | 37 | 2.688.750 | 24,67 | 15,65 | 337 | 96.411.561 | 67,40 | 48,21 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 11 | Pembinaan Lembaga Didikan Subuh | Jumlah Masjid yang dikunjungi | 30 | 210.000.000 | 30 | 199.758.188 | 15 | 56.325.000,00 | 3 | 9.731.950 | 20,00 | 17,28 | 33 | 209.490.138 | 110,00 | 99,76 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 12 | Standarisasi MDTA, TPQ/TPSQ | Jumlah sosialisasi Standarisasi MDQ TPQ/TPSQ yang dilaksanakan | 10 | 195.000.000 | 6 | 166.757.062 | 3 | 6.643.000,00 | 0 | - | - | - | 6 | 166.757.062 | 60,00 | 85,52 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 13 | Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ | Jumlah event yang diikuti (keg) | 6 | 500.000.000 | 3 | 678.264.494 | 1 | 1.128.473.455,35 | 0 | 7.917.950 | - | 0,70 | 3 | 686.182.444 | 50,00 | 137,24 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 14 | Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan | Terselenggaranya koordinasi kesra dan keagamaan (bin) | 72 | 675.000.000 | 36 | 491.240.881 | 12 | 84.830.000,00 | 3 | 17.264.950 | 25,00 | 20,35 | 39 | 508.505.831 | 54,17 | 75,33 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 15 | Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran | Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina | 45 | 130.000.000 | 15 | 101.594.000,00 | 15 | 47.106.400,00 | 3 | 4.177.750 | 20,00 | 8,87 | 18 | 105.771.750 | 40,00 | 81,36 | Bagian Kesra |
| | 4 | 00 | 01 | 57 | 16 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji | Penyelenggaraan haji difasilitasi (kegiatan) | 6 | 453.000.000 | 3 | 439.080.694 | 1 | 152.525.000 | 0 | - | - | - | 3 | 439.080.694 | 50,00 | 96,93 | Bagian Kesra |
| 31 | 4 | 00 | 01 | 78 | | Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten | A | 1.962.734.150 | B | 555.621.792 | BB | 200.872.609 | 0 | 38.402.900 | | 19,12 | B | 594.024.692 | 70,00 | 30,27 | |
| | 4 | 00 | 01 | 78 | 01 | Penyusunan Lakip Kabupaten Pesisir Selatan | Laporan lakip yang disusun (dok) | 6 | 955.000.000 | 3 | 214.650.788 | 1 | 82.490.503,00 | 1 | 18.075.900 | 100,00 | 21,91 | 4 | 232.726.688 | 66,67 | 24,37 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 78 | 05 | Monev Kinerja SKPD | Jumlah triwulan Laporan monev Kinerja Perangkat daerah | 24 | 540.000.000 | 12 | 107.103.929 | 4 | 40.630.566 | 1 | 6.162.000 | 25,00 | 15,17 | 13 | 113.265.929 | 54,17 | 20,98 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 07 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen LPPD | 6 | 410.743.766 | 3 | 205.371.883 | 1 | 51.837.660,00 | 1 | 10.977.500 | 100,00 | 21,18 | 4 | 216.349.383 | 66,67 | 52,67 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| | 4 | 00 | 01 | 47 | 08 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Jumlah dokumen LKPJ | 5 | 56.990.384 | 2 | 28.495.192,00 | 1 | 25.913.880,00 | 0 | 3.187.500 | - | 12,30 | 2 | 31.682.692 | 40,00 | 55,59 | Bag Pemerintahan dan Otda |
| 32 | 4 | 00 | 01 | 80 | | Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Tingkat Kepuasan Masyarakat | A | 1.790.000.000,00 | BB | 214.465.773,00 | BB | 229.938.843,00 | | 25.862.097 | | 11,25 | BB | 240.327.870 | 90,00 | 13,43 | |
| | 4 | 00 | 01 | 80 | 01 | Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah inovasi pelayanan publik yang difasilitasi | 8 | 820.000.000 | 2 | 57.736.824,00 | 2 | 69.339.430,00 | 1 | 17.427.597 | 50,00 | 25,13 | 3 | 75.164.421 | 37,50 | 9,17 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 80 | 04 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah PD pelayanan publik yang disurvei | 124 | 530.000.000 | 19 | 98.359.802 | 17 | 76.933.947,00 | 0 | - | - | - | 19 | 98.359.802 | 15,32 | 18,56 | Bagian Organisasi |
| | 4 | 00 | 01 | 80 | 08 | Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik | Jumlah laporan pelayanan publik | 16 | 440.000.000 | 4 | 58.369.147 | 4 | 83.665.466 | 1 | 8.434.500 | 25,00 | 10,08 | 5 | 66.803.647 | 31,25 | 15,18 | Bagian Organisasi |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,36 | 46,78 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SR | | |
| II | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 179.394.260.314 | 74.556.853.000 | | 18.925.594.198 | 4.057.069.000 | | | | 78.473.922.000 | | | | | | |
| 1 | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | pelayanan administrasi perkantoran (bin) | 72 | 23.618.641.314 | 36 | 7.919.297.000 | 12 | 2.897.023.144 | 3 | 136.965.000 | 25,00 | 4,73 | 39 | 8.056.262.000 | 54,17 | 34,11 | Setwan |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Terseadinya jasa surat menyurat (bulan) | 72 | 6.154.909.314 | 36 | 39.685.000 | 12 | 10.120.000 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 13,34 | 39 | 41.035.000 | 54,17 | 0,67 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|--|--|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telpon dan faks(bulan) | 72 | 49.416.000 | 36 | 598.713.000 | 12 | 229.200.000 | 3 | 43.295.000 | 25,00 | 18,89 | 39 | 642.008.000 | 54 | 1299,19 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan (bulan) | 72 | 1.514.716.000 | 36 | 909.702.000 | 12 | 205.157.386 | 0 | - | - | - | 36 | 909.702.000 | 50 | 60,06 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor (bulan) | 72 | 4.577.604.000 | 36 | 593.582.000 | 12 | 199.150.000 | 0 | - | - | - | 36 | 593.582.000 | 50 | 12,97 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 1.272.150.000 | 36 | 212.353.000 | 12 | 73.650.719 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 212.353.000 | 54 | 16,69 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 72 | 357.768.000 | 36 | 210.856.000 | 12 | 17.460.000 | 3 | 5.258.000 | 25,00 | 30,11 | 39 | 216.114.000 | 54 | 60,41 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (bulan) | 72 | 349.598.000 | 36 | 211.220.000 | 12 | 44.200.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 211.220.000 | 54 | 60,42 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan) | 72 | 1.332.430.000 | 36 | 666.215.000 | 12 | 156.000.000 | 3 | 5.925.000 | 25,00 | 3,80 | 39 | 672.140.000 | 54 | 50,44 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman (bulan) | 72 | 1.321.000.000 | 36 | 1.456.591.000 | 12 | 378.800.000 | 3 | 4.000.000 | 25,00 | 1,06 | 39 | 1.460.591.000 | 54 | 110,57 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan) | 72 | 2.950.080.000 | 36 | 887.191.000 | 12 | 99.200.000 | 3 | 35.256.000 | 25,00 | 35,54 | 39 | 922.447.000 | 54 | 31,27 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor (bulan) | 72 | 1.713.296.000 | 36 | 431.400.000 | 12 | 203.000.000 | 0 | - | - | - | 36 | 431.400.000 | 50 | 25,18 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (bulan) | 72 | 585.150.000 | 36 | 193.846.000 | 12 | 72.480.000 | 3 | 14.781.000 | 25,00 | 20,39 | 39 | 208.627.000 | 54 | 35,65 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 22 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya dana Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | 72 | 1.241.120.000 | 36 | 52.610.000 | 12 | 22.059.342 | 0 | - | - | - | 36 | 52610000 | 50 | 0,00 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 01 | 24 | Penyediaan Jasa Publikasi | Tersedianya Dana untuk mempublikasikan kegiatan DPRD | 72 | 199.404.000 | 36 | 1.455.333.000 | 12 | 1.186.545.697 | 3 | 27.100.000 | 25,00 | 2,28 | 39 | 1482433000 | 54 | 0,00 | |
| 2 | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | kecukupan sarana dan prasarana aparatur (bulan) | 72 | 2.818.608.000 | 36 | 5.143.447.000 | 12 | 2.523.863.500 | 3 | 64.439.000 | 25,00 | 2,55 | 39 | 5.207.886.000 | 54 | 184,77 | Setwan |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya | 4 | 1.800.000.000 | 2 | 70.750.000 | 1 | 30.250.000 | 0 | - | - | - | 2 | 70750000 | 50 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas | Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (paket) | 12 | 1.442.780.000 | 8 | 668.000.000 | 2 | 70.000.000 | 0 | - | - | - | 8 | 668.000.000 | 67 | 46,30 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | | |
|---|---|----|----|----|----|----|---|--|-------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (paket) | 12 | 2.866.000.000 | 8 | 573.200.000 | | 419.600.000 | 3 | - | | | 11 | 573.200.000 | | 20,00 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 08 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas | Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (paket) | 12 | 326.407.000 | 8 | 112.560.000 | 2 | 7.200.000 | 0 | - | - | - | 8 | 112.560.000 | 67 | 34,48 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (paket) | 12 | 2.227.800.000 | 8 | 423.548.000 | 2 | 240.300.000 | 0 | - | - | - | 8 | 423.548.000 | 67 | 19,01 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya kondisi rumah jabatan (bulan) | 72 | 1.254.000.000 | 36 | 344.636.000 | 12 | 51.800.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 344.636.000 | 54 | 27,48 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya kondisi Gedung kantor (bulan) | 72 | 1.520.000.000 | 36 | 921.135.000 | 12 | 1.090.550.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 921.135.000 | 54 | 60,60 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terpeliharanya Kondisi Mobil Jabatan (bulan) | 72 | 2.019.022.000 | 36 | 1.050.934.000 | 12 | 379.883.500 | 3 | - | 47.519.000 | 25,00 | 12,51 | 39 | 1.098.453.000 | 54 | 54,41 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (bulan) | 72 | 1.527.880.000 | 36 | 589.192.000 | 12 | 158.280.000 | 3 | - | 13.538.000 | 25,00 | 8,55 | 39 | 602.730.000 | 54 | 39,45 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan) | 72 | 270.000.000 | 36 | 211.813.000 | 12 | 44.000.000 | 3 | - | 3.382.000 | 25,00 | 7,69 | 39 | 215.195.000 | 54 | 79,70 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Terpeliharanya kondisi peralatan rumah Jabatan/dinas (bulan) | 72 | 186.000.000 | 36 | 127.679.000 | 12 | 32.000.000 | 0 | - | - | - | 36 | 127.679.000 | 50 | 68,64 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | | 72 | - | 36 | 50.000.000 | 12 | - | 0 | - | - | - | 36 | | 50 | | | |
| 3 | 4 | 00 | 02 | 01 | 04 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Aparatur yang profesional (%) | 100 | 382.116.000 | 60 | 140.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 60 | 140.000.000 | 60 | 36,64 | Setwan | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 02 | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU an | Jumlah aparatur yang dilatih (org) | 20 | 382.116.000 | 10 | 140.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 10 | 140.000.000 | 50 | | | |
| 4 | 4 | 00 | 02 | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin Aparatur | 1530 | 2.868.678.000 | 810 | 1.402.528.000 | 255 | 721.800.000 | 0 | - | - | - | 810 | 1.402.528.000 | 53 | 48,89 | Setwan | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel) | 1530 | 2.868.678.000 | 810 | 1.402.528.000 | 255 | 721.800.000 | 0 | - | - | - | 810 | 1.402.528.000 | 53 | 48,89 | | |
| 5 | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Perda yang dihasilkan (dokumen) | 90 | 149.706.217.000 | 45 | 59.951.581.000 | 15 | 12.782.907.554 | 2 | 3.855.665.000 | 13,33 | 30,16 | 45 | 63.807.246.000 | 50 | 42,62 | Setwan | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 01 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan | 60 | 55.680.876.000 | 36 | 14.381.299.000 | 12 | 2.639.108.300 | 2 | - | 595.856.000 | 16,67 | 22,58 | 38 | 14.977.155.000 | 63 | 26,90 | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 02 | Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah Rapat-Rapat Hearing/dialog yang dilaksanakan | 48 | 505.068.000 | 34 | 141.765.000 | 8 | 48.066.062 | 0 | - | - | - | 34 | 141.765.000 | 71 | 28,07 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 03 | Rapat-rapat Alat Kelengkapan | Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan | 156 | 642.204.000 | 104 | 247.271.000 | 26 | 50.607.524 | 0 | - | - | - | 104 | 247.271.000 | 67 | 38,50 | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 04 | Rapat-rapat Paripurna | Jumlah Rapat-Rapat Paripurna | 180 | 1.181.982.000 | 116 | 730.240.000 | 29 | 146.469.400 | 0 | - | - | - | 116 | 730.240.000 | 64 | 61,78 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|----|---|---|-----|----------------|-----|----------------|----|---------------|----|-----------------|-------|------------|-----|---------------------|----|-------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 05 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya penyerapan aspirasi dari konstituen daerah pemilihan | 18 | 14.175.000.000 | 9 | 6.575.155.000 | 3 | 779.250.000 | 1 | 690.974.000 | 33,33 | 88,67 | 10 | 7.266.129.000 | 56 | 51,26 |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 07 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 48 | 20.616.508.000 | 32 | 10.450.723.000 | 8 | 3.268.641.925 | 2 | 938.828.000 | 25,00 | 28,72 | 34 | 11.389.551.000 | 71 | 55,24 |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 11 | Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD | Terselenggaranya konsultasi, koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD | 96 | 20.252.597.000 | 64 | 8.537.705.000 | 16 | 2.583.012.200 | 2 | 777.167.000 | 12,50 | 30,09 | 66 | 9.314.872.000 | 69 | 45,99 |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 12 | Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD | Terselenggaranya konsultasi, koordinasi dan Pembinaan Pimpinan dan anggota DPRD | 450 | 13.249.356.000 | 300 | 5.787.032.000 | 75 | 810.775.730 | 20 | 181.496.000 | 26,67 | 22,39 | 320 | 5968528000 | 71 | 45,05 |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 13 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah | Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD | 60 | 22.302.646.000 | 40 | 12.703.820.000 | 10 | 2.249.757.497 | 2 | 671.344.000 | 20,00 | 29,84 | 42 | 13375164000 | 70 | 59,97 |
| | 4 | 00 | 02 | 01 | 15 | 14 | General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD | Tersedianya kegiatan General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD | 6 | 1.099.980.000 | 2 | 396.571.000 | 1 | 207.218.916 | 0 | - | - | - | 2 | 396.571.000 | 33 | 36,05 |

Rata-Rata Capaian Kinerja

54,25

69,41

Peringkat Kinerja

R

S

URUSAN KEWILAYAHAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|-----|--|--|-----|---------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|--------|-------|----|-------------|-------|-------|---------------|
| URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN KOTO XI TARUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ketersediaan pelayanan Administrasi perkantoran (Bin) | 72 | 1.351.965.200 | 36 | 628.281.156 | 12 | 226.392.780 | 12 | 37.027.750 | 100,00 | 16,36 | 48 | 665.308.906 | 66,67 | 49,21 | Kec.Kl.Xi Trs |
| | | | | | | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat | 72 | 9.600.000 | 36 | 5.980.000 | 12 | 4.800.000 | 3 | 1.400.000 | 25,00 | 29,17 | 39 | 7.380.000 | 54,17 | 76,88 | |
| | | | | | | .02 | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air. | Terlaksananya permbryan jasa komunikasi sumber daya air | 72 | 59.050.000 | 36 | 27.461.556 | 12 | 7.800.000 | 3 | 905.000 | 25,00 | 11,60 | 39 | 28.366.556 | 54,17 | 48,04 | |
| | | | | | | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 184.900.000 | 36 | 90.900.000 | 12 | 39.900.000 | 3 | 6.500.000 | 25,00 | 16,29 | 39 | 97.400.000 | 54,17 | 52,68 | |
| | | | | | | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor | 72 | 79.360.100 | 30 | 36.183.500 | 12 | 12.200.600 | 3 | 2.850.000 | 25,00 | 23,36 | 33 | 39.033.500 | 45,83 | 49,19 | |
| | | | | | | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | tersedianya alat tulis kantor (jenis) | 250 | 64.539.880 | 30 | 31.796.300 | 12 | 18.441.980 | 3 | 5.833.000 | 25,00 | 31,63 | 33 | 37.629.300 | 13,20 | 58,30 | |
| | | | | | | 11 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen (bulan) | 72 | 104.658.600 | 36 | 39.700.000 | 12 | 18.655.200 | 3 | 2.000.000 | 25,00 | 10,72 | 39 | 41.700.000 | 54,17 | 39,84 | |
| | | | | | | 12 | Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen istalasi listrik / penerangan bangunan (jenis) | 70 | 16.000.000 | 30 | 7.500.000 | 12 | 1.940.000 | 3 | - | 25,00 | - | 33 | 7.500.000 | 47,14 | 46,88 | |
| | | | | | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis) | 72 | 50.269.120 | 30 | 21.660.000 | 12 | 7.980.000 | 3 | 1.180.000 | 25,00 | 14,79 | 33 | 22.840.000 | 45,83 | 45,44 | |
| | | | | | | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makan dan minum rapat (bulan) Tersedianya makan minum tamu (bulan) | 72 | 207.277.500 | 36 | 95.145.000 | 12 | 27.775.000 | 3 | 8.934.750 | 25,00 | 32,17 | 39 | 104.079.750 | 54,17 | 50,21 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|--|--|--|-------------|-------------|-------------|----|------------|------------|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|-------|---------------|---|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | | | | | 18 | Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (bulan) | 72 | 170.500.000 | 33 | 88.629.800 | 12 | 9.750.000 | 3 | 750.000 | 25,00 | 7,69 | 36 | 89.379.800 | 50,00 | 52,42 | | |
| | | | | | 19 | Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah (bulan) | 72 | 387.660.000 | 27 | 183.325.000 | 12 | 71.100.000 | 3 | 5.525.000 | 25,00 | 7,77 | 30 | 188.850.000 | 41,67 | 48,72 | | |
| | | | | | 30 | Penunjang operasional Pelaporan OPD | Jumlah Laporan dan dokumen perencanaan (dokumen) | 24 | 18.150.000 | 0 | - | 8 | 6.050.000 | 3 | 1.150.000 | 37,50 | 19,01 | 3 | 1.150.000 | 12,50 | 6,34 | | |
| B | 5 | 00 | 01 | 01 | 02 | Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 389.731.000 | 33 | 148.334.050 | 12 | 79.562.000 | 9 | 6.023.000 | 75,00 | 7,57 | 42 | 154.357.050 | 58,33 | 39,61 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | | | | | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja (bln) | 36 | 43.500.000 | 0 | - | 12 | 30.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | | |
| | | | | | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor) | 72 | 43.500.000 | 36 | 25.500.000 | 12 | 12.200.000 | 3 | 4.373.000 | 25,00 | 35,84 | 39 | 29.873.000 | 54,17 | 68,67 | | |
| | | | | | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional (unit) | 72 | 287.781.000 | 36 | 118.954.050 | 12 | 33.862.000 | 6 | 1.650.000 | 50,00 | 4,87 | 42 | 120.604.050 | 58,33 | 41,91 | | |
| | | | | | 28 | Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan kantor (bln) | 72 | 14.950.000 | 36 | 3.880.000 | 12 | 3.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 3.880.000 | 54,17 | 25,95 | | |
| C | 5 | 00 | 01 | 01 | 15 | Program Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase kasus pepegangan Perda yang diselesaikan (persen) | 80 | 37.920.000 | 60 | - | 8 | 12.640.000 | 0 | 1.650.000 | - | 13,05 | 60 | 1.650.000 | 75,00 | 4,35 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | | | | | 15 | Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Transibum | Jumlah kasus yang difasilitasi (kasus) | 18 | 37.920.000 | 0 | - | 6 | 12.640.000 | 2 | 1.650.000 | 33,33 | 13,05 | 2 | 1.650.000 | 11,11 | 4,35 | | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Persentase ASN ,sekolah, Abri dan ormas yg mengikuti PHBN | 60 | 108.698.000 | 40 | 16.000.000 | 20 | 15.000.000 | 0 | - | - | - | 40 | 16.000.000 | 66,67 | 14,72 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | | | | | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan | 6 | 108.698.000 | 3 | 16.000.000 | 1 | 15.000.000 | 0 | - | - | - | 3 | 16.000.000 | 50,00 | 14,72 | | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 157.890.000 | 75 | - | 15 | 52.630.000 | 4,00 | 12.625.000 | 26,67 | 23,99 | 79,00 | 12.625.000 | 79,00 | 8,00 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan | 36 | 148.875.000 | 0 | - | 12 | 49.625.000 | 3 | 12.625.000 | 25,00 | 25,44 | 3 | 12.625.000 | 8,33 | 8,48 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari | 36 | 9.015.000 | 0 | - | 12 | 3.005.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| F | 5 | 0 | 1 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 26.655.000 | 115 | - | 30 | 8.885.000 | 3 | 1.785.000 | 10,00 | 20,09 | 118 | 1.785.000 | 78,67 | 6,70 | Kec.Kt.XI Trs | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan Paten | terselenggaranya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 26.655.000 | 0 | - | 12 | 8.885.000 | 3 | 1.785.000 | 25,00 | 20,09 | 3 | 1.785.000 | 8,33 | 6,70 | | |
| G | 5 | 00 | 01 | 01 | 06 | Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP Kecamatan | A | 70.000.000 | C | 27.500.000 | B | - | 0 | - | - | - | 96 | 27.500.000 | 96,00 | 39,29 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan yang disusun (SAKIP, LKP), Neraca, CaLK, Evaluasi Renja) (dokumen) | 36 | 35.000.000 | 18 | 12.000.000 | 6 | - | 2 | - | 33,33 | - | 20 | 12.000.000 | 55,56 | 34,29 | | |
| | | | | | 10 | Penyusunan Perencanaan Anggaran | Dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan) (dokumen) | 24 | 35.000.000 | 12 | 15.500.000 | 4 | - | 1 | - | 25,00 | - | 13 | 15.500.000 | 54,17 | 44,29 | | |
| H | 5 | 00 | 01 | 01 | 16 | Program Pemeliharaan Kantarantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal | Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan | 100 | 59.485.000 | 78 | 27.310.000 | 8 | - | 0 | - | - | - | 78 | 27.310.000 | 78,00 | 45,91 | Kec.Kt.XI Trs | |
| | | | | | 32 | Fasilitas masalah trantip dan pertanahan | jumlah penyelesaian permasalahan trantip yang di fasilitasi | 72 | 59.485.000 | 36 | 27.310.000 | 12 | - | 4 | - | 33,33 | - | 40 | 27.310.000 | 55,56 | 45,91 | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---------------------------|----|-----|----|-----|----|---|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|----------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 190.875.000 | 41 | 150.860.000 | 10 | - | 2 | 825.000 | 20,00 | | 43 | 151.685.000 | 61,43 | 79,47 | Kec.Kt.XI Trs. |
| | | | | | 01 | Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten | Terlaksananya Kegiatan MTQ tk kecamatan | 3 | 83.725.000 | 1 | 146.415.000 | 1 | | 0 | - | - | | 1 | 146.415.000 | 33,33 | 174,88 | |
| | | | | | 23 | Pembinaan lembaga didikan subuh | Terlaksananya Pembinaan lembaga didikan subuh | 12 | 107.150.000 | 3 | 4445000 | 6 | | 3 | 825.000 | 50,00 | | 6 | 5.270.000 | 50,00 | 4,92 | |
| J | 2 | 00 | 02 | 15 | 15 | Program pengembangan pemasaran Pariwisata | Persentase promosi budaya daerah dan potensi daya lokal | 50 | 56.125.000 | 10 | 20.325.000 | 10 | 21.205.000 | 0 | - | - | - | 10 | 20.325.000 | 20,00 | 36,21 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 20 | Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau | Pameran pagelaran seni budaya dan festival langkisau (event) | 6 | 56.125.000 | 1 | 20.325.000 | 1 | 21.205.000 | 0 | - | - | - | 1 | 20.325.000 | 16,67 | 36,21 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari | Persentase tata kelola keuangan nagari yang baik | 100 | 436.102.000 | 69 | 112.940.000 | 20 | 59.542.000 | 3 | 10.844.500 | 15,00 | 18,21 | 72 | 123.784.500 | 72,00 | 28,38 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 01 | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintah Nagari | tersedianya operasional pembinaan pemerintah nagari (bln) | 72 | 326.670.000 | 36 | 96.125.000 | 12 | 34.398.000 | 3 | 3.447.000 | 25,00 | 10,02 | 39 | 99.572.000 | 54,17 | 30,48 | |
| | | | | | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari | Tersedianya operasional pembinaan keuangan nagari (bln) | 36 | 75.432.000 | 0 | - | 12 | 25.144.000 | 3 | 7.397.500 | 25,00 | 29,42 | 3 | 7.397.500 | 8,33 | 9,81 | |
| | | | | | 09 | Pembinaan pengelolaan keuangan Nagari | Tersedianya operasional pembinaan keuangan nagari (bln) | 36 | 34.000.000 | 36 | 16.815.000 | 0 | - | 0 | - | | | 36 | 16.815.000 | 100,00 | 49,46 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | Program Peningkatan IMTAQ | Peringkat MTQ | 5 besar | 30.000.000 | 5 besar | - | 5 besar | 6.305.000 | 0 | - | - | - | 5 besar | - | 100,00 | 100,00 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 17 | Lembaga Didikan Shubuh | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | 30.000.000 | 0 | - | 12 | 6.305.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0 | |
| M | 1 | 01 | 05 | 21 | | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan | 100 | 14.050.000 | 100 | 7.025.000 | 100 | - | 0 | - | - | - | 100 | 7.025.000 | 100,00 | 50,00 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 27 | Fasilitasi penyelenggaraan Pilwano | Jumlah Pelaksanaan Pilwano | 2 | 14.050.000 | 0 | 7.025.000 | 1 | | 0 | - | - | - | 0 | 7.025.000 | 0,00 | 50,00 | |
| 10 | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | Program pembangunan Wilayah Kecamatan | Persentase pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 834.184.000 | 75 | 313.696.500 | 15 | 28.045.000 | 3 | 11.120.000 | 20,00 | 39,65 | 78 | 324.816.500 | 78,00 | 38,94 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PPK Nagari yang di bina | 138 | 383.336.000 | 69 | 136.808.500 | 0 | - | 0 | - | | | 69 | 136.808.500 | 50,00 | 35,69 | |
| | | | | | 02 | Pembinaan bulan Bhakti gontong royong | jumlah bulan gontong royong yang dilaksanakan | 6 | 72.548.000 | 3 | 25.998.000 | 0 | - | 0 | - | | | 3 | 25.998.000 | 50,00 | 35,84 | |
| | | | | | 03 | Perencanaan pembangunan Kecamatan | Jumlah Musrembang RKPD yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan | 6 | 117.850.000 | 3 | 46.835.000 | 1 | 12.245.000 | 0 | 6.345.000 | - | 51,82 | 3 | 53.180.000 | 50,00 | 45,13 | |
| | | | | | 04 | Fasilitasi kegiatan kepemudaan keagamaan dan masyarakat | Meningkatnya capaian kehidupan beragama beradap dan mandiri | 72 | 168.380.000 | 36 | 63.255.000 | 12 | 15.800.000 | 3 | 4.775.000 | 25,00 | 30,22 | 39 | 68.030.000 | 54,17 | 40,40 | |
| | | | | | 05 | Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | terselenggaranya pelayanan PATEN (bln) | 72 | 92.070.000 | 36 | 40.800.000 | 0 | - | 0 | - | | | 36 | 40.800.000 | 50,00 | 44,31 | |
| N | 00 | 01 | 01 | 58 | | Program pemantapan otonomi Daerah | Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah | 100 | 102.306.600 | 36 | 49.576.600 | 12 | 14.378.000 | 0 | - | - | - | 36 | 49.576.600 | 36,00 | 48,46 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 0 | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | terlaksananya Koordinasi dan pembinaan wilayah (bln) | 72 | 102.306.600 | 36 | 49.576.600 | 12 | 14.378.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 49.576.600 | 54,17 | 48,46 | |
| O | 00 | 01 | 01 | 59 | | Program pemberdayaan potensi unggulan kecamatan | Persentase terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan program unggulan kecamatan | 100 | 50.000.000 | 12 | 5.665.000 | 12 | 14.468.000 | 12 | 2.400.000 | 100,00 | 16,59 | 24 | 8.065.000 | 24,00 | 16,13 | Kec.Kt.XI Trs |
| | | | | | 01 | Fasilitasi pemberdayaan program unggulan kecamatan | terlaksananya pemberdayaan (bln) | 60 | 50.000.000 | 12 | 5.665.000 | 12 | 14.468.000 | 3 | 2.400.000 | 25,00 | 16,59 | 15 | 8.065.000 | 25,00 | 16,13 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,11 | 37,84 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | | |
|----|------------------|----|----|----|----|---|---|---|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | S | SR | | |
| II | KECAMATAN BAYANG | | | | | | | 3.322.681.060 | | 959.224.660 | | 522.730.990,50 | 6 | 86.086.175 | | | 6 | 1.045.310.835 | | | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.337.998.210 | 36 | 421.306.810 | 12 | 260.443.491 | 3,00 | 47.438.275 | 25,00 | 18,21 | 39,00 | 468.745.085 | 54,17 | 35,03 | Kec. Bayang | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 38.050.000 | 36 | 13.850.000 | 12 | 19.920.000 | 3 | 234.175 | 25,00 | 1,18 | 39 | 14.084.175 | 54,17 | 37,01 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 310.698.550 | 36 | 105.087.150 | 12 | 71.724.991 | 3 | 5.850.000 | 25,00 | 8,16 | 39 | 110.937.150 | 54,17 | 35,71 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 52.995.200 | 36 | 16.995.200 | 12 | 16.297.700 | 3 | 3.330.000 | 25,00 | 20,43 | 39 | 20.325.200 | 54,17 | 38,35 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 116.922.720 | 36 | 38.922.720 | 12 | 17.463.800 | 3 | 6.258.850 | 25,00 | 35,84 | 39 | 45.181.570 | 54,17 | 38,64 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 73.730.240 | 36 | 22.530.240 | 12 | 18.592.000 | 3 | 7.151.000 | 25,00 | 38,46 | 39 | 29.681.240 | 54,17 | 40,26 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 24.504.000 | 36 | 7.304.000 | 12 | 16.019.000 | 3 | 3.584.250 | 25,00 | 22,37 | 39 | 10.888.250 | 54,17 | 44,43 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 37.440.000 | 36 | 12.960.000 | 12 | 6.120.000 | 3 | 980.000 | 25,00 | 16,01 | 39 | 13.940.000 | 54,17 | 37,23 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 229.822.500 | 36 | 69.822.500 | 12 | 31.900.000 | 3 | 8.992.500 | 25,00 | 28,19 | 39 | 78.815.000 | 54,17 | 34,29 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 238.140.000 | 36 | 78.140.000 | 12 | 3.750.000 | 3 | 275.000 | 25,00 | 7,33 | 39 | 78.415.000 | 54,17 | 32,93 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 175.695.000 | 36 | 55.695.000 | 12 | 52.580.000 | 3 | 9.660.000 | 25,00 | 18,37 | 39 | 65.355.000 | 54,17 | 37,20 | | |
| | | | | | | | Penunjang operasional Pelaporan OPD | Jumlah Laporan dan dokumen perencanaan (dokumen) | 48 | 40.000.000 | 16 | | 8 | 6.076.000 | 2 | 1.122.500 | 25,00 | 18,47 | 18 | 1.122.500 | 37,50 | 2,81 | | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 297.417.850 | 36 | 83.017.850 | 12 | 65.404.500 | 3 | 19.140.400 | 25,00 | 29,26 | 39 | 102.158.250 | 54,17 | 34,35 | Kec. Bayang | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya persediaan barang kantor (bln) | 72 | 175.490.000 | 36 | 35.490.000 | 12 | 14.196.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 35.490.000 | 54,17 | 20,22 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 21 | Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln) | 72 | 2.400.000 | 36 | 8.000.000 | 12 | 12.033.500 | 3 | 12.033.550 | 25,00 | 100,00 | 39 | 20.033.550 | 54,17 | 834,73 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor (bln) | 72 | 42.000.000 | 36 | 14.000.000 | 12 | 24.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 14.000.000 | 54,17 | 33,33 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 77.527.850 | 36 | 25.527.850 | 12 | 15.175.000 | 3 | 7.106.850 | 25,00 | 46,83 | 39 | 32.634.700 | 54,17 | 42,09 | | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Jumlah siswa yang berbudaya hidup sehat (org) | 400 | 174.225.000 | 100 | 41.225.000 | 1000 | 11.425.000 | 0 | - | - | - | 100,00 | 41.225.000 | 25,00 | 23,66 | Kec. Bayang | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 05 | Pembinaan UKS Kecamatan | jumlah pembinaan yang dilakukan | 6 | 174.225.000 | 2 | 41.225.000 | 1 | 11.425.000 | 0 | - | - | - | 2 | 41.225.000 | 33,33 | 23,66 | | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 210.225.000 | 32 | 41.225.000 | 50 | 51.693.000 | 0 | - | - | - | 32,00 | 41.225.000 | 32,00 | 19,61 | Kec. Bayang | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI | jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 41.225.000 | 1 | 37.880.500 | 0 | - | - | - | 3 | 41.225.000 | 50,00 | 23,66 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 12 | Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan | even yang dilaksanakan (kali) | 3 | 36.000.000 | 0 | - | 1 | 13.812.500 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program Keluarga Berencana | Rasio Apeptor KB (%) | 71,6 | 94.210.000 | 71,4 | 20.605.000 | 71,5 | 6.300.000 | 0 | - | - | - | 71,40 | 20.605.000 | 99,72 | 21,87 | Kec. Bayang | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 05 | Pembinaan Keluarga Berencana | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | 18.900.000 | 0 | - | 12 | 6.300.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 32 | 20.605.000 | 50 | - | 0 | - | - | - | 32 | 20.605.000 | 32,00 | 27,36 | Kec. Bayang | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kall) | 6 | 75.310.000 | 2 | 20.605.000 | 3 | 0 | - | - | 2 | 20.605.000 | 33,33 | 27,36 | | | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | | Program Peningkatan IMTAQ | Peringkat MTQ | 5 besar | 60.000.000 | 5 besar | - | 5 besar | 18.105.000 | 0 | - | - | 5 besar | - | 100,00 | 100,00 | Kec. Bayang | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 03 | Facilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) | Jumlah PHBI yang dilaksanakan | 3 | 30.000.000 | 0 | - | 1 | 8.090.000 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 17 | Lembaga Didikan Shubuh | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | 30.000.000 | 0 | - | 12 | 10.015.000 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0 | | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Permperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 264.000.000 | 32 | 88.000.000 | 48 | - | 0 | - | - | 32,00 | 88.000.000 | 45,71 | 33,33 | Kec. Bayang | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 01 | Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten | Terlaksananya Kegiatan MTQ tk kecamatan | 6 | 240.000.000 | 2 | 80.000.000 | 0 | - | - | - | 2 | 80.000.000 | 33,33 | 33,33 | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 23 | Pembinaan lembaga didikan subuh | Terlaksananya Pembinaan lembaga didikan subuh (bln) | 72 | 24.000.000 | 24 | 8.000.000 | 0 | - | - | - | 24 | 8.000.000 | 33,33 | 33,33 | | | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 108.000.000 | 60 | 45.000.000 | 20 | 23.710.000 | 0 | 3.602.500 | - | 15,19 | 60,00 | 48.602.500 | 60,00 | 45,00 | Kec. Bayang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 05 | Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah Nagari yang dibina (17 Nagari x 6 thn) | 102 | 108.000.000 | 34 | 45.000.000 | 51 | 23.710.000 | 17 | 3.602.500 | 33,33 | 15,19 | 51 | 48.602.500 | 50,00 | 45,00 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Persentase Nagari terib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 60.000.000 | 32 | 10.000.000 | 48 | 12.222.500 | 0 | - | - | 32,00 | 10.000.000 | 32,00 | 16,67 | Kec. Bayang | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 01 | Pembinaan kegiatan sosial kemasayakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau) | Terlaksananya pembinaan (bln) | 72 | 30.000.000 | 24 | 10.000.000 | 36 | - | 0 | - | - | 24 | 10.000.000 | 33,33 | 33,33 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terlaksananya pembinaan (bln) | 36 | 30.000.000 | 0 | - | 36 | 12.222.500 | 3 | - | 8,33 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peringkat ekonomi | 100 | 641.295.000 | 32 | 188.240.000 | 47,83722907 | 73.427.500 | 0,00 | 15.905.000 | - | 21,66 | 32,00 | 204.145.000 | 32,00 | 31,83 | Kec. Bayang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina | 60 | 263.100.000 | 20 | 87.700.000 | 25 | 35.550.000 | 1 | 6.980.000 | 4,00 | 19,63 | 21 | 94.680.000 | 35,00 | 35,99 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kall) | 6 | 83.250.000 | 2 | 27.750.000 | 3 | 10.250.000 | 0 | - | - | - | 2 | 27.750.000 | 33,33 | 33,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kall) | 3 | 76.575.000 | 3 | 25.525.000 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 25.525.000 | 100,00 | 33,33 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 21 | Musrenbang Kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kall) | 3 | 76.575.000 | 0 | - | 1 | 14.462.500 | 1 | 5.950.000 | 100,00 | 41,14 | 1 | 5.950.000 | 33,33 | 7,77 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 74.775.000 | 24 | 24.925.000 | 0 | - | 0 | 2.975.000 | - | - | 24 | 27.900.000 | 33,33 | 37,31 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Facilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 34.920.000 | 50 | 11.640.000 | 50 | 6.765.000 | 0 | - | - | - | 50 | 11.640.000 | 33,33 | 33,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Facilitasi masalah tranib dan pertahanan | Jumlah kasus yang difasilitasi | 6 | 32.100.000 | 2 | 10.700.000 | 3 | 6.400.000 | 0 | - | - | - | 2 | 10.700.000 | 33,33 | 33,33 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,52 | 35,34 | | | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | | | |
| III | | | | | | | KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA | | 3.094.604.492 | | 1.010.285.913 | | 497.193.000 | 0 | 105.636.831 | | | | 1.115.922.744 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.401.260.600 | 36 | 620.748.413 | 12 | 271.685.000 | 3,00 | 49.366.331 | 25,00 | 18,17 | 39,00 | 670.114.744 | 54,17 | 47,82 | Kec. Bayang Utara |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 74.170.000 | 36 | 27.025.060 | 12 | 11.400.000 | 3 | 3.469.831 | 25,00 | 30,44 | 39 | 30.494.891 | 54,17 | 41,11 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 114.700.000 | 12 | 71.600.000 | 3 | 23.200.000 | 25,00 | 32,40 | 39 | 137.900.000 | 54,17 | 69,21 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 43.696.344 | 12 | 13.243.000 | 3 | 4.660.000 | 25,00 | 35,19 | 39 | 48.356.344 | 54,17 | 51,72 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (bln) | 72 | 60.000.000 | 27 | - | 0 | - | 0 | - | | | 27 | - | 37,50 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 33 | 57.460.240 | 12 | 21.921.000 | 3 | 8.791.500 | 25,00 | 40,11 | 36 | 66.251.740 | 50,00 | 49,96 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 65.400.000 | 36 | 34.825.569 | 12 | 18.801.000 | 3 | 9.245.000 | 25,00 | 49,17 | 39 | 44.070.569 | 54,17 | 67,39 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan) | 72 | 15.000.000 | 30 | 9.326.000 | 12 | 3.100.000 | 3 | - | 25,00 | - | 33 | 9.326.000 | 45,83 | 62,17 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 20.130.000 | 29 | 9.235.000 | 12 | 4.800.000 | 3 | 960.000 | 25,00 | 20,00 | 32 | 10.195.000 | 44,44 | 50,65 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 196.500.000 | 33 | 73.375.000 | 12 | 40.425.000 | 3 | 28.150.000 | 25,00 | 69,64 | 36 | 101.525.000 | 50,00 | 51,67 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 33 | 79.745.200 | 12 | 6.200.000 | 3 | 2.400.000 | 25,00 | 38,71 | 36 | 82.145.200 | 50,00 | 42,13 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 294.700.000 | 33 | 148.385.000 | 12 | 75.500.000 | 3 | 30.655.000 | 25,00 | 40,60 | 36 | 179.040.000 | 50,00 | 60,75 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen) | 48 | 55.000.000 | 20 | 22.975.000 | 8 | 4.695.000 | 3 | 1.800.000 | 37,50 | 38,34 | 23 | 24.775.000 | 47,92 | 45,05 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 505.880.000 | 36 | 108.419.000 | 12 | 109.518.000 | 3 | 52.348.000 | 25,00 | 47,80 | 39 | 160.767.000 | 54,17 | 31,78 | Kec. Bayang Utara |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (bln) | 36 | 110.994.000 | 0 | - | 12 | 36.998.000 | 3 | 36.898.000 | 25,00 | 99,73 | 3 | 36.898.000 | 8,33 | 33,24 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumahdinas (bln) | 36 | 120.780.000 | 0 | - | 12 | 40.260.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 247.106.000 | 36 | 108.419.000 | 12 | 32.260.000 | 3 | 15.450.000 | 25,00 | 47,89 | 39 | 123.869.000 | 54,17 | 50,13 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor) | 6 | 27.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 56.575.000 | 18 | 28.625.000 | 0,00 | - | - | - | 50,00 | 56.575.000 | 50,00 | 32,47 | Kec. Bayang Utara |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 17 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 56.575.000 | 1 | 28.625.000 | 0 | - | - | - | 3 | 56.575.000 | 50,00 | 32,47 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pempemdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 165.000.000 | 41 | 51.291.500 | 10 | 3.922.500 | 2 | 3.922.500 | 20,00 | 100,00 | 43 | 55.214.000 | 61,43 | 33,46 | Kec. Bayang Utara |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 01 | Penunjang Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten | Jumlah MTQ yang diikuti (kali) | 4 | 165.000.000 | 2 | 51.291.500 | 1 | 3.922.500 | 0 | 3.922.500 | - | 100,00 | 2 | 55.214.000 | 50,00 | 33,46 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|--|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------------------|-------|------------|------------|---------------------|--------|-------------------|--|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 169.267.500 | 75 | - | 15 | 56.422.500 | 4,00 | - | 26,67 | - | 79,00 | - | 79,00 | 0,00 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan | 36 | 156.772.500 | 0 | - | 12 | 52.257.500 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari | 36 | 12.495.000 | 0 | - | 12 | 4.165.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian pembangunan sesuai target | 95 | 32.040.000 | 85 | - | 5 | 10.680.000 | 0 | - | - | - | 85 | - | 89,47 | 0,00 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPd | Musrenbang kecamatan yang diselenggarakan (kegiatan) | 3 | 32.040.000 | 3 | - | 1 | 10.680.000 | 0 | - | - | - | 3 | - | 100,00 | 0,00 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 35.785.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 50 | 35.785.000 | 50,00 | 47,52 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 35.785.000 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 35.785.000 | 50,00 | 47,52 | | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan | 100 | 25.000.000 | 75 | 3.610.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 75 | 3.610.000 | 75,00 | 14,44 | Kec. Bayang Utara | |
| | | | | | | 27 | Fasilitas penyelenggaraan pilwano | Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwano | 17 | 25.000.000 | 3 | 3.610.000 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 3.610.000 | 17,65 | 14,44 | | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 29.950.000 | 50 | 9.886.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 50,00 | 9.886.000 | 50,00 | 33,01 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 04 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Laporan pemerintahan nagari yang akuntabel (6 Nagari x 6 tahun) | 36 | 29.950.000 | 12 | 9.886.000 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | 9.886.000 | 33,33 | 33,01 | | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 356.671.392 | 52 | 93.750.000 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 52,00 | 93.750.000 | 52,00 | 26,28 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (6 nagari x 6 tahun) | 36 | 224.265.159 | 24 | 67.522.000 | 0 | - | 0 | - | - | 24 | 67.522.000 | 66,67 | 30,11 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 20.003.563 | 24 | 4.122.000 | 0 | - | 0 | - | - | 24 | 4.122.000 | 400,00 | 20,61 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPd yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 52.402.670 | 3 | 16.375.000 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 16.375.000 | 50,00 | 31,25 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Fasilitas Masalah Trantib dan Pertanahan | Terfasilitasinya Masalah Trantib dan Pertanahan di 4 Nagari | 6 | 10.000.000 | 3 | 1.225.000 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 1.225.000 | 50,00 | 12,25 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitas Penyelenggaraan PATEN | Terlaksananya Penyelenggaraan PATEN | 6 | 50.000.000 | 2 | 4.506.000 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 4.506.000 | 33,33 | 9,01 | | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | Program penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan KTP elektronik | 95 | 60.000.000 | 85 | 10.721.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 85,00 | 10.721.000 | 89,47 | 17,87 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 02 | Penataan Administrasi Kependudukan | terlaksananya penataan Administrasi Kependudukan (bin) | 72 | 60.000.000 | 36 | 10.721.000 | 0 | - | 0 | - | - | 36 | 10.721.000 | 50,00 | 17,87 | | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | Program pematapan otonomi Daerah | Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah | 100 | 100.000.000 | 70 | 19.500.000 | 20 | 16.340.000 | 0 | - | - | - | 70,00 | 19.500.000 | 70,00 | 19,50 | Kec. Bayang Utara | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 04 | Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | Koordinasi dengan Kapolsek dan danramil berjalan baik | 12 | 50.000.000 | 7 | 19.500.000 | 0 | - | 0 | - | - | 7 | 19.500.000 | 58,33 | 39,00 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 07 | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau) | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi | 12 | 50.000.000 | 0 | - | 4 | 16.340.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 64,56 | 25,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | R | SR | | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----|---|----|----|----|----|--|---|---|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|---|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| IV | | | | | | KECAMATAN IV JURAI | | 3.052.652.112 | | 1.397.721.100 | | 568.593.604 | | 562.300.200 | | 1.343.758.100 | | | | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.286.260.600 | 36 | 629.999.000 | 12 | 227.672.800 | 3 | 35.928.940 | 25,00 | 15,78 | 39 | 665.927.940 | 54,17 | 51,77 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 72 | 74.170.000 | 36 | 21.323.500 | 12 | 8.640.000 | 3 | 478.940 | 25,00 | 5,54 | 39 | 21.802.440 | 54,17 | 29,40 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 72 | 199.260.600 | 36 | 103.450.000 | 12 | 42.000.000 | 3 | 6.000.000 | 25,00 | 14,29 | 39 | 109.450.000 | 54,17 | 54,93 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 72 | 93.500.000 | 36 | 81.625.100 | 12 | 54.800.100 | 3 | 9.000.000 | 25,00 | 16,42 | 39 | 90.625.100 | 54,17 | 96,93 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 72 | 132.600.000 | 36 | 64.112.100 | 12 | 17.079.700 | 3 | 5.500.000 | 25,00 | 32,20 | 39 | 69.612.100 | 54,17 | 52,50 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 72 | 65.400.000 | 36 | 34.464.300 | 12 | 11.458.000 | 3 | 2.900.000 | 25,00 | 25,31 | 39 | 37.364.300 | 54,17 | 57,13 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 72 | 15.000.000 | 36 | 5.431.000 | 12 | 1.500.000 | 3 | 750.000 | 25,00 | 50,00 | 39 | 6.181.000 | 54,17 | 41,21 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 72 | 20.130.000 | 36 | 9.960.000 | 12 | 4.320.000 | 3 | 520.000 | 25,00 | 12,04 | 39 | 10.480.000 | 54,17 | 52,06 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 72 | 196.500.000 | 36 | 92.575.000 | 12 | 39.325.000 | 3 | 6.600.000 | 25,00 | 16,78 | 39 | 99.175.000 | 54,17 | 50,47 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 195.000.000 | 36 | 113.978.000 | 12 | 27.500.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 113.978.000 | 54,17 | 58,45 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 72 | 294.700.000 | 36 | 103.080.000 | 12 | 21.050.000 | 3 | 4.180.000 | 25,00 | 19,86 | 39 | 107.260.000 | 54,17 | 36,40 | | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 328.106.000 | 36 | 166.549.000 | 12 | 113.930.000 | 3 | 5.250.000 | 25,00 | 4,61 | 39 | 171.799.000 | 54,17 | 52,36 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 72 | 27.000.000 | 36 | 28.125.000 | 12 | 49.300.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 28.125.000 | 54,17 | 104,17 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 72 | 27.000.000 | 36 | 18.175.000 | 12 | 20.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 18.175.000 | 54,17 | 67,31 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 72 | 247.106.000 | 36 | 109.469.000 | 12 | 41.630.000 | 3 | 5.250.000 | 25,00 | 12,61 | 39 | 114.719.000 | 54,17 | 46,43 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 72 | 27.000.000 | 36 | 10.780.000 | 12 | 3.000.000 | 0 | - | - | - | 36 | 10.780.000 | 50,00 | 39,93 | | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan | 80 | 23.000.000 | 70 | 11.125.000 | 10 | 3.625.000 | 0 | 1.250.000 | - | 34,48 | 70 | 12.375.000 | 87,50 | 53,80 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 36 | 8.000.000 | 18 | 3.875.000 | 6 | 1.375.000 | 1 | - | 16,67 | - | 19 | 3.875.000 | 52,78 | 48,44 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 07 | Penyusunan Perencanaan Anggaran yang disusun (dok) | 30 | 15.000.000 | 10 | 7.250.000 | 5 | 2.250.000 | 1 | 1.250.000 | 20,00 | 55,56 | 11 | 8.500.000 | 36,67 | 56,67 | | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Jumlah siswa yang berbudaya hidup sehat (org) | 400 | 42.158.712 | 100,00 | - | 100 | 14.052.904 | 0,00 | - | - | - | 100,00 | - | 25,00 | 0,00 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 15 | Pembinaan UKS Kecamatan | jumlah embinan yang dilakukan (kai) | 6 | 42.158.712 | 0 | - | 2 | 14.052.904 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan (%) | 80 | 8.000.000 | 50 | - | 10 | 16.695.000 | 0 | 4.985.000 | - | 29,86 | 50 | 4.985.000 | 62,50 | 62,31 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 15 | Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Transtibum | operasional penyelesaian masalah transtibum (bln) | 36 | 8.000.000 | 0 | - | 12 | 16.695.000 | 3 | 4.985.000 | 25,00 | 29,86 | 3 | 4.985.000 | 8,33 | 62,31 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 120.000.000 | 100,03 | 59.600.000 | 18 | 18.375.000 | 0,00 | - | - | - | 100,03 | 59.600.000 | 100,03 | 49,67 | Kec. IV Jurai | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | jumlah pelaksanaan PHBN (kai) | 6 | 120.000.000 | 3 | 59.600.000 | 1 | 18.375.000 | 0 | - | - | - | 3 | 59.600.000 | 50,00 | 49,67 | |
| G | 5 | 0 | 1 | 18 | 18 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perzinan | Jumlah perzinan dan non perzinan yang diterbitkan | 150 | 60.534.000 | 115 | - | 30 | 20.178.000 | 3 | - | 10,00 | - | 118 | - | 78,67 | 0,00 | Kec. Ranah Pesisir | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|---|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|------------|-------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 18 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan PATEN | terselenggara pelayanan PATEN (bln) | 36 | 60.534.000 | 0 | | 12 | 20.178.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 33.730.000 | 18 | 13.125.000 | 0 | - | - | - | 50 | 33.730.000 | 50,00 | 44,79 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 18 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 33.730.000 | 1 | 13.125.000 | 0 | - | - | - | 3 | 33.730.000 | 50,00 | 44,79 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terbit administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 192.900.000 | 50 | 94.254.700 | 18 | 62.074.700 | 4,00 | 4.635.000 | 22,22 | 7,47 | 54,00 | 98.889.700 | 54,00 | 51,26 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 04 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari | APB nagari terverifikasi | 120 | 45.000.000 | 60 | 22.745.000 | 20 | 22.649.700 | 3 | 2.705.000 | 15,00 | 11,94 | 63 | 25.450.000 | 52,50 | 56,56 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 05 | Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah nagari yang dibina | 120 | 147.900.000 | 60 | 71.509.700 | 20 | 39.425.000 | 3 | 1.930.000 | 15,00 | 4,90 | 63 | 73.439.700 | 52,50 | 49,65 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | | Program pemantapan otonomi Daerah | Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah | 100 | 264.900.000 | 70 | 88.763.000 | 20 | 6.298.000 | 0 | - | - | - | 70,00 | 88.763.000 | 70,00 | 33,51 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 03 | Fasilitas penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan | jumlah kasus yang difasilitasi | 120 | 147.900.000 | 60 | 64.795.000 | - | - | 0 | - | - | - | 60 | 64.795.000 | 50,00 | 43,81 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 05 | Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau) | Terlaksananya pembinaan (bln) | 72 | 27.000.000 | 36 | 14.805.000 | - | - | 0 | - | - | - | 36 | 14.805.000 | 50,00 | 54,83 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 08 | Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan | terlaksananya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln) | 72 | 45.000.000 | 36 | 9.163.000 | - | - | 0 | - | - | - | 36 | 9.163.000 | 50,00 | 20,36 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | terlaksananya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln) | 36 | 45.000.000 | 0 | - | 12 | 6.298.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 584.023.000 | 52 | 251.050.400 | 20 | 61.820.200 | 0,00 | 16.781.000 | - | 27,14 | 52,00 | 267.831.400 | 52,00 | 45,86 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina | 60 | 188.580.500 | 25 | 103.077.900 | 10 | 36.060.000 | 1 | 2.805.000 | 10,00 | 7,78 | 26 | 105.882.900 | 43,33 | 56,15 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 137.849.500 | 2 | 40.018.000 | 1 | 3.870.000 | 0 | - | - | - | 2 | 40.018.000 | 33,33 | 29,03 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 04 | pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana | kepesertaan dalam jambore PKK tingkat Kabupaten (kegiatan) | 4 | 10.000.000 | 1 | 1.760.000 | 1 | 1.760.000 | 0 | - | - | - | 1 | 1.760.000 | 25,00 | 17,60 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 171.393.000 | 3 | 68.841.500 | 1 | 20.130.200 | 1 | 13.976.000 | 100,00 | 69,43 | 4 | 82.817.500 | 66,67 | 48,32 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 76.200.000 | 52 | 37.353.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 52 | 37.353.000 | 34,67 | 49,02 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | | Program Pemberdayaan Potensi unggulan Kecamatan | Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari) | 10 | 27.459.800 | 2 | 3.410.000 | 2 | 10.747.000 | 0,00 | 1.200.000 | - | 11,17 | 2,00 | 4.610.000 | 20,00 | 16,79 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | 01 | Fasilitas Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan | Jumlah nagari yang difasilitasi (nagari) | 10 | 27.459.800 | 2 | 3.410.000 | 2 | 10.747.000 | 0 | 1.200.000 | - | 11,17 | 2 | 4.610.000 | 20,00 | 16,79 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%) | 100 | 20.000.000 | 75 | 6.000.000 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 75,00 | 6.000.000 | 75,00 | 30,00 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 27 | Fasilitas Penyelenggaraan Pilwana | piwana yang difasilitasi (keg) | 5 | 20.000.000 | 1 | 6.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 6.000.000 | 20,00 | 30,00 | |
| N | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 20.000.000 | 35 | 53.240.000 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 35,00 | 53.240.000 | 50,00 | 266,20 | Kec. IV Jural |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 01 | Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan | MTQ yang diikuti (keg) | 3 | 20.000.000 | 1 | 53.240.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 53.240.000 | 33,33 | 266,20 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,50 | 54,17 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | |
| V | | | | | | | KECAMATAN BATANG KAPAS | | 2.905.347.440 | | 1.418.188.270 | | 528.689.500 | 0 | 87.441.179 | | | | | 1.516.340.770 | | | |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.341.260.600 | 36 | 641.358.920 | 12 | 260.274.500 | 3,00 | 47.838.179 | 25,00 | 18,38 | 39,00 | 689.197.099 | 54,17 | 51,38 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 74.170.000 | 36 | 31.609.720 | 12 | 12.000.000 | 3 | 1.430.179 | 25,00 | 11,92 | 39 | 33.039.899 | 54,17 | 44,55 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|----|-----|--|--|-----|-------------|-------------|-------------|----|-------------|---|------------|-----------------|---------|------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 132.550.000 | 12 | 114.000.000 | 3 | 17.495.000 | 25,00 | 15,35 | 39 | 150.045.000 | 54,17 | 75,30 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 39.220.500 | 12 | 11.326.000 | 3 | 2.043.500 | 25,00 | 18,04 | 39 | 41.264.000 | 54,17 | 44,13 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 59.913.500 | 12 | 20.144.500 | 3 | 6.332.000 | 25,00 | 31,43 | 39 | 66.245.500 | 54,17 | 49,96 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 65.400.000 | 36 | 30.147.900 | 12 | 7.779.000 | 3 | 1.710.000 | 25,00 | 21,98 | 39 | 31.857.900 | 54,17 | 48,71 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 15.000.000 | 36 | 6.043.500 | 12 | 1.685.000 | 3 | 450.000 | 25,00 | 26,71 | 39 | 6.493.500 | 54,17 | 43,29 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 20.130.000 | 36 | 8.520.000 | 12 | 4.200.000 | 3 | 300.000 | 25,00 | 7,14 | 39 | 8.820.000 | 54,17 | 43,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmakan minum rapat (bulan) | 72 | 196.500.000 | 36 | 80.940.000 | 12 | 21.625.000 | 3 | 4.017.500 | 25,00 | 18,58 | 39 | 84.957.500 | 54,17 | 43,24 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 36 | 93.005.800 | 12 | 12.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 93.005.800 | 54,17 | 47,70 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 294.700.000 | 36 | 138.560.000 | 12 | 47.740.000 | 3 | 13.010.000 | 25,00 | 27,25 | 39 | 151.570.000 | 54,17 | 51,43 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | Jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen) | 48 | 55.000.000 | 24 | 20.848.000 | 8 | 7.775.000 | 3 | 1.050.000 | 37,50 | 13,50 | 27 | 21.898.000 | 56,25 | 39,81 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 72.500.000 | 36 | 259.624.450 | 12 | 60.650.000 | 3 | 18.903.000 | 25,00 | 31,17 | 39 | 278.527.450 | 54,17 | 384,18 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan kantor (bln) | 72 | 15.000.000 | 25 | 112.983.400 | 12 | 9.500.000 | 0 | - | - | - | 25 | 112.983.400 | 34,72 | 753,22 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln) | 72 | 10.000.000 | 36 | 9.500.000 | 0 | - | 0 | 11.500.000 | | | 36 | 21.000.000 | 50,00 | 210,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpelihara Gedung Kantor (unit) | 6 | 15.000.000 | 71,51574213 | 93.700.000 | 1 | 11.500.000 | 0 | - | - | - | 71,52 | 93.700.000 | 1191,93 | 624,67 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | Terpeliharannya dan terawatnya kendaraan dinas (bln) | 72 | 30.000.000 | 25 | 39.311.050 | 12 | 36.650.000 | 3 | 6.433.000 | 25,00 | 17,55 | 28 | 45.744.050 | 38,89 | 152,48 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala /Peralatan gedung kantor | Terpeliharannya dan terawatnya perlengkapan kantor (bln) | 72 | 2.500.000 | 36 | 4.130.000 | 12 | 3.000.000 | 3 | 970.000 | 25,00 | 32,33 | 39 | 5.100.000 | 54,17 | 204,00 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 69.450.000 | 18 | 72.975.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | 69.450.000 | 50,00 | 39,86 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 69.450.000 | 1 | 72.975.000 | 0 | - | - | - | 3 | 69.450.000 | 50,00 | 39,86 | |
| 6 | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 33.455.000 | 18 | 16.697.500 | 0 | - | - | - | 50 | 33.455.000 | 50,00 | 44,42 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 33.455.000 | 1 | 16.697.500 | 0 | - | - | - | 3 | 33.455.000 | 50,00 | 44,42 | |
| 8 | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 129.353.840 | 50 | 54.662.500 | 18 | 12.960.000 | 4 | 6.455.000 | 22,22 | 49,81 | 54,00 | 61.117.500 | 54,00 | 47,25 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 09 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akurat/tabel | 60 | 129.353.840 | 30 | 54.662.500 | 10 | 12.960.000 | 2 | 6.455.000 | 20,00 | 49,81 | 32 | 61.117.500 | 53,33 | 47,25 | |
| 10 | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program pematapan otonomi Daerah | Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah | 100 | 54.150.000 | 70 | 12.550.000 | 20 | 4.150.000 | 0 | - | - | - | 70,00 | 12.550.000 | 70,00 | 23,18 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 02 | Pembinaan Kegiatan Sosial kemasyarakatan | Jumlah kelompok masyarakat Nagari yang terbina | 30 | 50.000.000 | 12 | 12.550.000 | | - | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | 12.550.000 | 40,00 | 25,10 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 12 | Penilaian Kompetensi Camat | proses penilaian yang dilaksanakan | 1 | 4.150.000 | 0 | - | 1 | 4.150.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Perwujudan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 15.525.000 | 50 | - | 18 | 5.175.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | - | 71,43 | 0,00 | Kec. Batang Kapas |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|-----|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 07 | Pelaksanaan Kelembagaan Didikan Subuh | Terlaksananya pembinaan didikan subuh (bln) | 36 | 15.525.000 | 0 | - | 12 | 5.175.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,00 | |
| 9 | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 610.023.000 | 52 | 274.844.900 | 20 | 75.852.500 | 5 | 11.950.000 | 25,00 | 15,75 | 57,00 | 286.794.900 | 57,00 | 47,01 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina | 60 | 188.580.500 | 30 | 129.727.900 | 10 | 50.062.500 | 1 | 6.055.000 | 10,00 | 12,09 | 31 | 135.782.900 | 51,67 | 72,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan /kali | 6 | 137.849.500 | 3 | 43.543.000 | 1 | 6.315.000 | 0 | - | - | - | 3 | 43.543.000 | 50,00 | 31,59 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 76.200.000 | 56 | 25.745.000 | 6 | 3.260.000 | 0 | - | - | - | 56 | 25.745.000 | 37,33 | 33,79 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPd yang diselenggarakan di tingkat kecamatan /kali | 6 | 171.393.000 | 3 | 57.069.000 | 1 | 8.295.000 | 1 | 5.895.000 | 100,00 | 71,07 | 4 | 62.964.000 | 66,67 | 36,74 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 36.000.000 | 36 | 18.760.000 | 12 | 7.920.000 | 0 | - | - | - | 36 | 18.760.000 | 50,00 | 52,11 | |
| 10 | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | | Program pematapan otonomi Daerah | Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah | 100 | 93.000.000 | 70 | 27.205.000 | 20 | 19.955.000 | 0 | 2.295.000 | - | 11,50 | 70,00 | 29.500.000 | 70,00 | 31,72 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Fasilitas masalah rantib dan pertanahan | Jumlah kasus yang difasilitasi | 6 | 56.925.000 | 3 | 27.205.000 | 1 | 7.930.000 | 0 | 2.295.000 | - | 28,94 | 3 | 29.500.000 | 50,00 | 51,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 07 | Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau) | Jumlah fasilitas yang dilakukan (kali) | 3 | 36.075.000 | 0 | - | | 12.025.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Indeks Kualitas Udara | B (tercemar ringan) | 240.000.000 | B (tercemar ringan) | 34.190.000 | - | 0 | - | - | - | - | B (tercemar ringan) | 34.190.000 | 100 | 14,25 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 05 | Penataan RTH | Jumlah RTH yang ditata | 5 | 240.000.000 | 1 | 34.190.000 | | 0 | | - | - | - | 1 | 34.190.000 | 20,00 | 14,25 | |
| 7 | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program pendidikan Politik masyarakat | Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%) | 100 | 100.000.000 | 75 | 10.847.500 | - | 0 | - | - | - | - | 75 | 10.847.500 | 75,00 | 10,85 | Kec. Batang Kapas |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 27 | Fasilitas Penyelenggaraan Piliwana | Jumlah Piliwana yang difasilitasi | 5 | 100.000.000 | 1 | 10.847.500 | | 0 | | - | - | - | 1 | 10.847.500 | 20,00 | 10,8475 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,16 | 63,10 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | |
| VI | | | | | | | KECAMATAN SUTERA | | | 3.215.778.440 | | 1.414.859.040 | | 530.257.540 | 0 | 193.827.340 | | | | 1.608.686.380 | | | |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.286.260.600 | 36 | 578.624.000 | 12 | 255.358.700 | 3,00 | 15.338.500 | 25,00 | 6,01 | 39,00 | 593.962.500 | 54,17 | 46,18 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 74.170.000 | 36 | 22.659.000 | 12 | 6.240.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 22.659.000 | 54,17 | 30,55 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 111.050.000 | 12 | 48.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 111.050.000 | 54,17 | 55,73 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 40.223.000 | 12 | 40.170.000 | 3 | 1.325.500 | 25,00 | 3,30 | 39 | 41.548.500 | 54,17 | 44,44 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 55.533.000 | 12 | 25.439.100 | 3 | 5.561.500 | 25,00 | 21,86 | 39 | 61.094.500 | 54,17 | 46,07 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 65.400.000 | 36 | 31.044.000 | 12 | 13.180.600 | 3 | 2.797.000 | 25,00 | 21,22 | 39 | 33.841.000 | 54,17 | 51,74 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 15.000.000 | 36 | 5.947.000 | 12 | 1.928.000 | 3 | 242.000 | 25,00 | 12,55 | 39 | 6.189.000 | 54,17 | 41,26 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|-----|----|----|---|--|-----|-------------|----|-------------|-----------|------------|---------|-----------------|--------|------------|-------|---------------------|-------|-------|-------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 20.130.000 | 36 | 8.520.000 | 12 | 2.880.000 | 3 | 480.000 | 25,00 | 16,67 | 39 | 9.000.000 | 54,17 | 44,71 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 196.500.000 | 36 | 81.575.000 | 12 | 47.300.000 | 3 | 2.612.500 | 25,00 | 5,52 | 39 | 84.187.500 | 54,17 | 42,84 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 36 | 91.143.000 | 12 | 19.400.000 | 3 | 1.350.000 | 25,00 | 6,96 | 39 | 92.493.000 | 54,17 | 47,43 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 294.700.000 | 36 | 130.930.000 | 12 | 43.100.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 130.930.000 | 54,17 | 44,43 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | 7.721.000 | | 970.000 | | 12,56 | | | | | | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 328.106.000 | 36 | 147.827.000 | 12 | 72.470.000 | 3 | 4.135.000 | 25,00 | 5,71 | 39 | 151.962.000 | 54,17 | 46,31 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (unit) | 6 | 27.000.000 | 3 | 13.125.000 | 0 | 3.500.000 | 1 | - | - | - | 4 | 13.125.000 | 66,67 | 48,61 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor) | 6 | 27.000.000 | 3 | 16.125.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 500.000 | 100,00 | 2,17 | 4 | 16.625.000 | 66,67 | 61,57 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (unit) | 24 | 247.106.000 | 9 | 111.997.000 | 4 | 41.070.000 | 1 | 3.335.000 | 25,00 | 8,12 | 10 | 115.332.000 | 41,67 | 46,67 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) | 96 | 27.000.000 | 24 | 6.580.000 | 13 | 4.900.000 | 3 | 300.000 | 23,08 | 6,12 | 27 | 6.880.000 | 28,13 | 25,48 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 69.300.000 | 18 | 28.075.000 | 0,00 | - | - | - | 50,00 | 69.300.000 | 50,00 | 39,78 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI | jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 69.300.000 | 1 | 28.075.000 | 0 | - | - | - | 3 | 69.300.000 | 50,00 | 39,78 | |
| 4 | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program pendidikan Politik masyarakat | Persentase terlaksananya pemilihan wali Nagari se Kecamatan (%) | 100 | 30.000.000 | 75 | 7.305.000 | 15 | - | 0 | - | - | - | 75 | 7.305.000 | 75,00 | 24,35 | Kec. Sutera |
| | | | | | | 21 | Fasilitasi dan monitoring Kegiatan Pilwano tahun 2018 | Jumlah Pilwana yang difasilitasi | 5 | 30.000.000 | 1 | 7.305.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 7.305.000 | 20,00 | 24,35 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Permpdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 240.000.000 | 48 | 122.000.000 | 18 | - | 0 | - | - | - | 48,00 | 122.000.000 | 68,57 | 50,83 | Kec. Bayang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 01 | Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten | Terlaksananya Kegiatan MTQ tk kecamatan | 6 | 240.000.000 | 3 | 122.000.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | 122.000.000 | 50,00 | 50,83 | |
| 6 | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 34.060.000 | 18 | - | 0 | - | - | - | 50 | 34.060.000 | 50,00 | 45,23 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisaau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 34.060.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | 34.060.000 | 50,00 | 45,23 | |
| 7 | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan | 80 | 200.000.000 | 75 | 9.440.000 | 15 | - | 0 | - | - | - | 75 | 9.440.000 | 93,75 | 4,72 | Kec. Sutera |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan yang disusun (SAKIP, LKP), Neraca, CaLK, Evaluasi Renja) (dokumen) | 36 | 100.000.000 | 16 | 4.670.000 | 6 | | 1 | | 16,67 | | 17 | 4.670.000 | 47,22 | 4,67 | |
| | | | | | | | Penyusunan Perencanaan Anggaran | Dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan) (dokumen) | 24 | 100.000.000 | 12 | 4.770.000 | 4 | | 0 | | - | | 12 | 4.770.000 | 50,00 | 4,77 | |
| 8 | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terbit administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 174.353.840 | 50 | 174.353.840 | 18 | 174.353.840 | 0 | 174.353.840 | - | 100,00 | 50,00 | 348.707.680 | 50,00 | 200,00 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel (10 Nagari x 6 tahun) | 60 | 129.353.840 | 30 | 59.830.000 | 10 | | 2 | | 20,00 | | 32 | 59.830.000 | 53,33 | 46,25 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 03 | Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari | APB nagari terverifikasi | 60 | 45.000.000 | 10 | 6.730.000 | 10 | | 2 | | 20,00 | | 12 | 6.730.000 | 20,00 | 14,96 | |
| 8 | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 707.523.000 | 52 | 271.949.200 | 20 | - | 0 | - | - | - | 52,00 | 271.949.200 | 52,00 | 38,44 | Kec. Sutera |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 188.580.500 | 30 | 93.954.700 | 10 | | 1 | | 10,00 | | 31 | 93.954.700 | 51,67 | 49,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 137.849.500 | 3 | 53.003.000 | 1 | | 0 | | - | | 3 | 53.003.000 | 50,00 | 38,45 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPd yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 171.393.000 | 3 | 72.816.500 | 1 | | 1 | | 100,00 | | 4 | 72.816.500 | 66,67 | 42,49 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 36.000.000 | 31 | 12.000.000 | 0 | | 3 | | - | | 34 | 12.000.000 | 47,22 | 33,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 76.200.000 | 52 | 21.200.000 | 0 | | 0 | | - | | 52 | 21.200.000 | 34,67 | 27,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Kabupaten | kepesertaan dalam jambore PKK tingkat Kabupaten (kegiatan) | 4 | 97.500.000 | 1 | 18975000 | 1 | | 0 | | - | | 1 | 18.975.000 | 25,00 | 19,46 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,92 | 34,80 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| VII | | | | | | | KECAMATAN LENGAYANG | | 3.375.636.060 | | 1.509.254.114 | | 559.439.500 | | 137.876.758 | | | | 1.647.130.872 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 01 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan pelayanan Administrasi perkantoran | 72 | 1.276.633.300 | 36 | 650.610.660 | 12 | 243.510.600 | 3 | 32.144.758 | 25,00 | 13,20 | 39 | 682755418 | 54,17 | 53,48 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 01 | 01 | 01 | | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah kebutuhan air dan listrik | 72 | 70.398.000 | 36 | 23.970.000 | 12 | 12.200.000 | 3 | 2.214.758 | 25,00 | 18,15 | 39 | 26.184.758 | 54,17 | 37,20 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 01 | | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan yang baik dan benar | 72 | 214.000.000 | 36 | 165.900.000 | 12 | 91.000.000 | 3 | 9.100.000 | 25,00 | 10,00 | 39 | 175.000.000 | 54,17 | 81,78 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 01 | | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya biaya kebersihan kantor | 72 | 91.461.500 | 36 | 51.009.824 | 12 | 15.895.200 | 3 | 2.000.000 | 25,00 | 12,58 | 39 | 53.009.824 | 54,17 | 57,96 | |
| 4 | 20 | 19 | 01 | 09 | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 72 | 3.200.000 | 36 | 6.070.000 | 12 | 3.000.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 6.070.000 | 54,17 | 189,69 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 01 | | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis untuk kebersihan kantor | 72 | 129.877.000 | 36 | 52.029.521 | 12 | 23.263.000 | 3 | 2.500.000 | 25,00 | 10,75 | 39 | 54.529.521 | 54,17 | 41,99 | |
| 6 | 5 | 00 | 01 | 01 | | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 72 | 112.116.800 | 36 | 39.243.475 | 12 | 14.891.400 | 3 | 1.600.000 | 25,00 | 10,74 | 39 | 40.843.475 | 54,17 | 36,43 | |
| 7 | 5 | 00 | 01 | 01 | | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik yang dibutuhkan | 72 | 24.298.000 | 36 | 9.951.240 | 12 | 4.951.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 9.951.240 | 54,17 | 40,95 | |
| 8 | 5 | 01 | 01 | | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya biaya berlangganan koran | 72 | 28.600.000 | 36 | 11.680.000 | 12 | 4.320.000 | 3 | 520.000 | 25,00 | 12,04 | 39 | 12.200.000 | 54,17 | 42,66 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|---|-----|----|-----|-------|---|---|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-----|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 9 | 5 | 01 | 01 | | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum | 72 | 156.682.000 | 36 | 81.432.000 | 12 | 44.000.000 | 3 | 7.535.000 | 25,00 | 17,13 | 39 | 88.967.000 | 54,17 | 56,78 | |
| 10 | 5 | 01 | 01 | | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedia koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 186.000.000 | 36 | 89.044.600 | 12 | 6.600.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 89.044.600 | 54,17 | 47,87 | |
| 11 | 5 | 01 | 01 | | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah | 72 | 260.000.000 | 36 | 120.280.000 | 12 | 23.390.000 | 3 | 6.675.000 | 25,00 | 28,54 | 39 | 126.955.000 | 54,17 | 48,83 | |
| B | 5 | 01 | 01 | | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang | A | 51.082.800 | C | 19.265.300 | B | - | 0 | 0 | | | B | 19.265.300 | 95,00 | 37,71 | Kec. Lengayang |
| | 5 | 01 | 01 | | 06 01 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan OPD | Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) | 16 | 51.082.800 | 8 | 19.265.300 | 0 | - | 0 | 0 | | | 8 | 19.265.300 | 50,00 | 37,71 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 02 | | Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase cakupan layanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur | 72 | 511.755.060 | 24 | 310.393.254 | 12 | 102.921.000 | 3 | 70.747.000 | 25,00 | 68,74 | 27 | 381.140.254 | 37,50 | 74,48 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 02 | 06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas | Tersedianya perlengkapan rumah dinas Camat Lengayang | 2 | 40.200.000 | 7 | 62.400.000 | 0 | - | 0 | 0 | | | 7 | 62.400.000 | 350,00 | 155,22 | |
| | | | | | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | tersedianya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 200.000.000 | 36 | 122.747.823 | 12 | 76.000.000 | 3 | 62.000.000 | 25,00 | 81,58 | 39 | 184.747.823 | 54,17 | 92,37 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas | Terawatnya Rumah Dinas | 72 | 78.867.500 | 36 | 45.016.571 | 12 | 6.547.000 | 3 | 6.547.000 | 25,00 | 100,00 | 39 | 51.563.571 | 54,17 | 65,38 | |
| 4 | 5 | 00 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya / Gedung Kantor | 6 | 34.600.000 | 2 | 9.600.000 | 0 | - | 0 | 0 | | | 2 | 9.600.000 | 33,33 | 27,75 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Kelancaran perjalanan dinas | 72 | 158.087.560 | 33 | 70.628.860 | 12 | 20.374.000 | 3 | 2.200.000 | 25,00 | 10,80 | 36 | 72.828.860 | 50,00 | 46,07 | |
| D | 5 | 0 | 1 | 21 | | Program Peningkatan IMTAQ | Peringkat MTQ | 5 besar | 100.000.000 | 5 besar | 29.625.000 | 5 besar | 5.500.000 | 0 | 0 | | | 5 besar | 29.625.000 | 100,00 | 29,63 | Kec. Lengayang |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 21 | 03 | Peningkatan kegiatan keagamaan (didikan subuh wirid remaja) | Terselenggaranyapembinaan didikan subuh (bln) | 72 | 100.000.000 | 36 | 29.625.000 | 12 | 5.500.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 29.625.000 | 54,17 | 29,63 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur (%) | 100 | 205.128.000 | 70 | 50.878.000 | 10 | 17.295.000 | 0 | 0 | - | - | 70 | 50.878.000 | 70,00 | 24,80 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 17 | 06 | Pelaksanaan Upacara HUT RI | Tersedianya biaya HUT - RI | 6 | 124.128.000 | 5 | 50.878.000 | 1 | 9.725.000 | 0 | 0 | - | - | 5 | 50.878.000 | 83,33 | 40,99 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 20 | Peningkatan kompetensi kelembagaan KAN | Peningkatan mutu kelembagaan KAN | 12 | 81.000.000 | 0 | - | 2 | 7.570.000 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Even promosi wisata yang didukung (kali) | 6 | 148.406.100 | 3 | 60.746.100 | 1 | 9.380.000 | 0 | 0 | - | - | 3 | 60.746.100 | 50,00 | 40,93 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 15 | 20 | Pelaksanaan Pameran / Bazar Festival langkisau | keikutsertaan dalam festival langkisau (kegiatan) | 6 | 148.406.100 | 3 | 60.746.100 | 1 | 9.380.000 | 0 | 0 | - | - | 3 | 60.746.100 | 50,00 | 40,93 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 19 | | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | 72 | 146.827.000 | 24 | 54.914.500 | 12 | 9.600.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 27 | 54.914.500 | 37,50 | 37,40 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 0 | 01 | 19 | 7 | Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah nagari | Tersedianya biaya Pembinaan Pengelolaan Keu nagari | 72 | 146.827.000 | 36 | 54.914.500 | 12 | 9.600.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 54.914.500 | 54,17 | 37,40 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 56 | | Program Pembagunan Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya Pembangunan Wilayah Kecamatan (bln) | 72 | 863.803.800 | 36 | 330.571.300 | 12 | 165.372.900 | 3 | 34.985.000 | 25,00 | 21,16 | 39 | 365.556.300 | 54,17 | 42,32 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan | 72 | 284.456.000 | 36 | 152.981.000 | 12 | 42.500.400 | 3 | 4.030.000 | 25,00 | 9,48 | 39 | 157.011.000 | 54,17 | 55,20 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 56 | 02 | Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royong ke nagari | 6 | 116.411.000 | 3 | 48.911.000 | 1 | 11.250.000 | 0 | 0 | - | - | 3 | 48.911.000 | 50,00 | 42,02 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 56 | 03 | Perencanaan Pembagunan Kecamatan | Jumlah musrenbang kecamatan yang | 3 | 74.841.400 | 3 | 35.291.400 | | | 0 | 0 | | | 3 | 35.291.400 | 100,00 | 47,15 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 56 | 22 | Lomba K3 dan Taman Se-Kecamatan | Terjaganya lingkungan yang sehat | 6 | 88.000.000 | 1 | 5.312.500 | 1 | 5.692.500 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5.312.500 | 16,67 | 6,04 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 56 | 27 | Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan | Tersedia biaya Operasional koordinasi Muspika | 72 | 33.720.000 | 36 | 19.920.000 | 12 | 10.800.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 19.920.000 | 54,17 | 59,07 | |
| 6 | 5 | 00 | 01 | 56 | 10 | Fasilitasi kegiatan Kepemudaan dan keagamaan dan kemasyarakatan | Terlaksananya acara kepemudaan dan keagamaan | 48 | 66.000.000 | 12 | 9.655.000 | 12 | 12.050.000 | 3 | 7.675.000 | 25,00 | 63,69 | 15 | 17.330.000 | 31,25 | 26,26 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 56 | 28 | Pembinaan pramuka kecamatan | Terlaksananya kegiatan pramuka | 24 | 8.250.000 | 9 | 16.500.000 | 3 | 8.250.000 | 0 | 0 | - | - | 9 | 16.500.000 | 37,50 | 200,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|-----|----|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------------|--------|--------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| 8 | 5 | 00 | 01 | 56 | 06 | Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 72 | 92.125.400 | 36 | 42.000.400 | 12 | 10.680.000 | 3 | 3.025.000 | 25,00 | 28,32 | 39 | 45.025.400 | 54,17 | 48,87 | |
| 9 | 5 | 00 | 01 | 56 | 07 | Pembinaan produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat | pembinaan yang dilakukan (bln) | 12 | 50.000.000 | - | - | 12 | 50.000.000 | 3 | 6.105.000 | 25,00 | 12,21 | 3 | 6.105.000 | 25,00 | 12,21 | |
| 10 | 5 | 00 | 01 | 56 | 21 | Musrenbang Kecamatan | Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan | 3 | 50.000.000 | - | - | 1 | 14.150.000 | 1 | 14.150.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 14.150.000 | 33,33 | 28,30 | |
| I | 5 | 0 | 1 | 56 | 29 | Program Peningkatan pembeantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | Persentase penurunan Narkoba Tingkat Pelajar | 72 | 72.000.000 | 40 | 2.250.000 | 15 | 5.860.000 | 0 | 0 | - | - | 40 | 2.250.000 | 55,56 | 3,13 | Kec. Lengayang |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 56 | 30 | Penyuluhan pencegah peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba | Penyuluhan narkoba yang dilaksanakan (kail) | 20 | 72.000.000 | 5 | 2.250.000 | 5 | 5.860.000 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2.250.000 | 25,00 | 3,13 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,54 | 38,21 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| VIII | KECAMATAN RANAH PESISIR | | | | | | | 4.328.462.083 | | 1.899.583.607 | | 546.036.007 | 0 | 90.966.727 | | | | | 1.990.570.334 | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 72 | 953.178.000 | 36 | 486.690.724 | 12 | 205.929.260 | 3 | 46.769.302 | 25,00 | 22,71 | 39 | 533.460.026 | 54,17 | 55,97 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 01 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah kebutuhan air dan listrik | 72 | 72.978.000 | 36 | 43.404.000 | 12 | 18.000.000 | 3 | 3.229.360 | 25,00 | 17,94 | 39 | 46.633.360 | 54,17 | 63,90 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan yang baik dan benar | 72 | 153.000.000 | 33 | 48.500.000 | 12 | 38.800.000 | 0 | 0 | - | - | 33 | 48.500.000 | 45,83 | 31,70 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya biaya kebersihan kantor | 72 | 69.000.000 | 36 | 67.698.524 | 12 | 14.716.245 | 3 | 2.600.492 | 25,00 | 17,67 | 39 | 70.299.016 | 54,17 | 101,88 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat alat tulis untuk kebersihan kantor | 72 | 105.000.000 | 36 | 28.921.383 | 12 | 26.392.505 | 3 | 7.689.384 | 25,00 | 29,13 | 39 | 36.610.767 | 54,17 | 34,87 | |
| 6 | 5 | 00 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 72 | 74.000.000 | 36 | 63.443.117 | 12 | 7.530.360 | 3 | 2.169.250 | 25,00 | 28,81 | 39 | 65.612.367 | 54,17 | 88,67 | |
| 7 | 5 | 00 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik yang dibutuhkan | 72 | 15.000.000 | 36 | 19.197.200 | 12 | 14.855.084 | 3 | 595.816 | 25,00 | 4,01 | 39 | 19.793.016 | 54,17 | 131,96 | |
| 8 | 5 | 01 | 01 | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya biaya berlangganan koran | 72 | 12.600.000 | 36 | 20.177.000 | 12 | 5.400.000 | 3 | 400.000 | 25,00 | 7,41 | 39 | 20.577.000 | 54,17 | 163,31 | |
| 9 | 5 | 01 | 01 | | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum | 72 | 100.000.000 | 36 | 28.709.500 | 12 | 25.685.066 | 3 | 17.545.000 | 25,00 | 68,31 | 39 | 46.254.500 | 54,17 | 46,25 | |
| 10 | 5 | 01 | 01 | | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersediaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 120.350.000 | 36 | 66.345.000 | 12 | 12.450.000 | 3 | 250.000 | 25,00 | 2,01 | 39 | 66.595.000 | 54,17 | 55,33 | |
| 11 | 5 | 01 | 01 | | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersediayan biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah | 72 | 231.250.000 | 36 | 100.295.000 | 12 | 42.100.000 | 3 | 12.290.000 | 25,00 | 29,19 | 39 | 112.585.000 | 54,17 | 48,69 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 72 | 705.520.000 | 36 | 495.974.349 | 12 | 87.211.326 | 3 | 13.097.500 | 25,00 | 15,02 | 39 | 509.071.849 | 54,17 | 72,16 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya / Gedung Kantor | 72 | 75.000.000 | 36 | 29.471.500 | 12 | 6.572.048 | 3 | 3.287.500 | 25,00 | 50,02 | 39 | 32.759.000 | 54,17 | 43,68 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Kelancaran perjalanan dinas | 72 | 130.520.000 | 36 | 96.502.849 | 12 | 75.039.278 | 3 | 9.010.000 | 25,00 | 12,01 | 39 | 105.512.849 | 54,17 | 80,84 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala/lempangan gedung kantor | Terpelihanya perlengkapan kantor (bln) | 72 | 500.000.000 | 36 | 370.000.000 | 12 | 5.600.000 | 3 | 800.000 | 25,00 | 14,29 | 39 | 370.800.000 | 54,17 | 74,16 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan (%) | 80 | 8.000.000 | 50 | - | 10 | 13.000.000 | 0 | 6.105.000 | - | 46,96 | 50 | 6.105.000 | 62,50 | 76,31 | Kec. Ranah Pesisir |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Trantibum | operasional penyelesaian masalah trantibum (bln) | 36 | 8.000.000 | 0 | - | 12 | 13.000.000 | 3 | 6.105.000 | 25,00 | 46,96 | 3 | 6.105.000 | 8,33 | 76,31 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|--|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|--------------|---------------------|--------|--------------------------|
| | 5 | 0 | 1 | 18 | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 39.000.000 | 115 | - | 30 | 13.000.000 | 3 | 2.000.000 | 10,00 | 15,38 | 118 | 2.000.000 | 78,67 | 5,13 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan Paten | terselenggaraya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 39.000.000 | 0 | - | 12 | 13.000.000 | 3 | 2.000.000 | 25,00 | 15,38 | 3 | 2.000.000 | 8,33 | 5,13 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparaturn (%) | 100 | 175.000.000 | 70 | 115.004.750 | 10 | 50.270.000 | 0 | 0 | - | - | 70 | 115.004.750 | 70,00 | 65,72 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 17 | 06 | Pelaksanaan Upacara HUT RI | Tersedianya biaya HUT - RI | 6 | 175.000.000 | 3 | 115.004.750 | 1 | 50.270.000 | 0 | 0 | - | - | 3 | 115.004.750 | 50,00 | 65,72 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 386.756.883 | 75 | - | 15 | 128.918.961 | 0,00 | 16.814.925 | - | 13,04 | 75,00 | 16.814.925 | 75,00 | 4,35 | Kec. Ranah Pesisir |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan | 36 | 270.329.271 | 0 | - | 12 | 90.109.757 | 0 | 8.264.925 | - | 9,17 | 0 | 8.264.925 | 0,00 | 3,06 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royong ke nagari | 36 | 5.286.306 | 0 | - | 12 | 1.762.102 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | 111.141.306 | 0 | - | 12 | 37.047.102 | 0 | 8.550.000 | - | 23,08 | 0 | 8.550.000 | 0,00 | 7,69 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Even promosi wisata yang didukung (kali) | 6 | 148.406.100 | 3 | 60.746.100 | 1 | 13.800.000 | 0 | 1.000.000 | - | 7,25 | 3 | 61.746.100 | 50,00 | 41,61 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Pergelaran Seni Budaya dan potensi daerah pada Festival langkisau | keikutsertaan dalam festival langkisau (kegiatan) | 6 | 148.406.100 | 3 | 60.746.100 | 1 | 13.800.000 | 0 | 1.000.000 | - | 7,25 | 3 | 61.746.100 | 50,00 | 41,61 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian pembangunan sesuai target | 95 | 148.406.100 | 85 | - | 5 | 4.026.460 | 0 | 3.200.000 | - | 79,47 | 85 | 3.200.000 | 89,47 | 2,16 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 21 | 9 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan (kali) | 3 | 148.406.100 | | | 1 | 4.026.460 | 0 | 3.200.000 | - | 79,47 | 0 | 3.200.000 | 0,00 | 2,16 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 19 | | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase nagari yang mengelola keuangan sesuai aturan (%) | 100 | 156.565.000 | 75 | 57.928.000 | 15 | 17.880.000 | 3 | 2.000.000 | 20,00 | 11,19 | 78 | 59.928.000 | 78,00 | 38,28 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 01 | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah nagari yang dibina | 60 | 72.925.000 | 30 | 14.207.500 | 10 | | 3 | 0 | 30,00 | | 33 | 14.207.500 | 55,00 | 19,48 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 07 | Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah nagari | Jumlah Nagari yang dibina | 30 | 53.640.000 | 0 | - | 10 | 17.880.000 | | | - | - | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | 09 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan nagari | Jumlah Nagari yang dibina | 60 | 30.000.000 | 30 | 43.720.500 | 10 | | 3 | 0 | 30,00 | | 33 | 43.720.500 | 55,00 | 145,74 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Nilai LPPD | 3350 | 939.315.000 | 3065 | 380.960.133 | 165 | 12.000.000 | 3 | 0 | 1,82 | - | 3068 | 380.960.133 | 91,58 | 40,56 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terlaksananya koordinasi musika (bln) | 36 | 36.000.000 | 0 | - | 10 | 12.000.000 | 3 | 0 | 30,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | | 72 | 668.315.000 | 36 | 302.279.551 | 12 | - | 0 | - | - | | 36 | 302.279.551 | 50,00 | 45,23 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Tersedianya biaya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan | 72 | 235.000.000 | 36 | 78.680.582 | 12 | | 0 | 0 | - | | 36 | 78.680.582 | 50,00 | 33,48 | |
| 2 | 5 | 00 | 01 | 56 | 02 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royong ke nagari | 72 | 50.000.000 | 11 | 33.774.400 | 1 | | 0 | 0 | - | | 11 | 33.774.400 | 15,28 | 67,55 | |
| 3 | 5 | 00 | 01 | 56 | 03 | Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Jumlah Nagari yang ikut gotong royong | 72 | 60.000.000 | 8 | 62.961.460 | 0 | | 0 | 0 | | | 8 | 62.961.460 | 11,11 | 104,94 | |
| 5 | 5 | 00 | 01 | 56 | 05 | Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan | Tersedia biaya Operasional koordinasi Musoika | 72 | 28.800.000 | 33 | 12.447.199 | 12 | | 0 | 0 | - | | 33 | 12.447.199 | 45,83 | 43,22 | |
| | | | | | | Fasilitas Masalah Trantib dan Pertanahan | Terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif | 72 | 83.740.000 | 12 | 41.805.000 | 12 | | 0 | 0 | - | | 12 | 41.805.000 | 16,67 | 49,92 | |
| 6 | | | | | | Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan keagamaan dan kemasyarakatan | Terlaksananya acara kepemudaan dan keagamaan | 48 | 110.775.000 | 12 | 36.925.000 | 12 | | 0 | 0 | - | | 12 | 36.925.000 | 25,00 | 33,33 | |
| 8 | 5 | 00 | 01 | 56 | 06 | Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | terselenggaraya pelayanan PATEN (bln) | 72 | 100.000.000 | 36 | 35.685.910 | 12 | | 0 | 0 | - | | 36 | 35.685.910 | 50,00 | 35,69 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,51 | 40,68 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |
| IX | | | | | | KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI | | 3.455.532.170 | | 1.704.050.154 | | 523.567.000 | 0 | 81.211.100 | | | | 1.693.894.154 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.401.806.500 | 36 | 674.289.793 | 12 | 260.793.338,25 | 3,00 | 49.507.900 | 25,00 | 18,98 | 39,00 | 723.797.693 | 54,17 | 51,63 | Kec. Linggo Sari Baganti |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|--|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 23.290.500 | 36 | 10.883.500 | 12 | 3.164.000 | 3 | 11.850.000 | 25,00 | 374,53 | 39 | 22.733.500 | 54,17 | 97,61 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 252.000.000 | 36 | 125.400.000 | 12 | 47.400.000 | 3 | 12.000.000 | 25,00 | 25,32 | 39 | 137.400.000 | 54,17 | 54,52 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 192.000.000 | 36 | 94.367.000 | 12 | 54.912.000 | 3 | 5.257.000 | 25,00 | 9,57 | 39 | 99.624.000 | 54,17 | 51,89 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 55.654.918 | 12 | 22.968.748,25 | 3 | 1.871.200 | 25,00 | 8,15 | 39 | 57.526.118 | 54,17 | 43,38 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 78.006.000 | 36 | 39.148.375 | 12 | 12.807.090 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 39.148.375 | 54,17 | 50,19 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 18.500.000 | 36 | 7.088.000 | 12 | 3.479.000 | 3 | 810.000 | 25,00 | 23,28 | 39 | 7.898.000 | 54,17 | 42,69 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 32.000.000 | 36 | 12.600.000 | 12 | 2.100.000 | 3 | 5.559.700 | 25,00 | 264,75 | 39 | 18.159.700 | 54,17 | 56,75 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 71.160.000 | 36 | 35.545.000 | 12 | 44.962.500 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 35.545.000 | 54,17 | 49,95 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 36 | 89.978.000 | 12 | 16.350.000 | 3 | 12.160.000 | 25,00 | 74,37 | 39 | 102.138.000 | 54,17 | 52,38 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 407.250.000 | 36 | 203.625.000 | 12 | 52.650.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 203.625.000 | 54,17 | 50,00 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 539.902.800 | 36 | 518.351.620 | 12 | 112.904.000 | 3 | 9.755.700 | 25,00 | 8,64 | 39 | 528.107.320 | 54,17 | 97,82 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan kantor (paket) | 12 | 204.656.500 | 6 | 377.680.000 | 1 | 59.500.000 | 0 | 0 | - | - | 6 | 377.680.000 | 50,00 | 184,54 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas | Terawatnya Rumah Dinas (bln) | 72 | 51.645.000 | 36 | 21.600.000 | 12 | 7.900.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 21.600.000 | 54,17 | 41,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya / Gedung Kantor | 72 | 43.920.000 | 36 | 26.440.000 | 12 | 12.300.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 26.440.000 | 54,17 | 60,20 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Kelancaran perjalanan dinas | 72 | 219.381.300 | 36 | 84.924.060 | 12 | 30.284.000 | 3 | 9.755.700 | 25,00 | 32,21 | 39 | 94.679.760 | 54,17 | 43,16 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor | terpeliharanya peralatan kantor (bln) | 72 | 20.300.000 | 36 | 7.707.560 | 12 | 2.920.000 | 3 | 0 | 25,00 | - | 39 | 7.707.560 | 54,17 | 37,97 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan | Jumlah kasus yang ditangani/fasilitas | 10 | 43.000.000 | 2 | 16.426.600 | 2 | 6.855.000 | 0 | 1.340.000 | - | 19,55 | 2 | 17.766.600 | 20,00 | 41,32 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 19 | Pengendalian ketertaman dan ketertiban umum | jumlah nagari yang dilayani | 96 | 43.000.000 | 48 | 16.426.600 | 16 | 6.855.000 | 8 | 1.340.000 | 50,00 | 19,55 | 56 | 17.766.600 | 58,33 | 41,32 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pemeliharaan ktrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen) | 100 | 34.225.000 | 85 | 14.182.141 | 15 | 4.497.412 | 4,00 | 350.000 | 26,67 | 7,78 | 89,00 | 14.532.141 | 89,00 | 42,46 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 32 | Fasilitas Masalah Trantib dan Pertanahan | Jumlah nagari yang difasilitasi | 96 | 34.225.000 | 48 | 14.182.141 | 16 | 4.497.412 | 0 | 350.000 | - | 7,78 | 48 | 14.532.141 | 50,00 | 42,46 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 50.050.000 | 18 | 12.750.000 | 0,00 | - | - | - | 50,00 | 50.050.000 | 50,00 | 28,73 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 50.050.000 | 1 | 12.750.000 | 0 | - | - | - | 3 | 50.050.000 | 50,00 | 28,73 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 175.217.250 | 75 | - | 15 | 58.405.750 | 0,00 | 3.590.000 | - | 6,15 | 75,00 | 3.590.000 | 75,00 | 2,05 | Kec. Ranah Pesisir |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan (bln) | 36 | 108.397.500 | 0 | - | 12 | 36.132.500 | 3 | 2.940.000 | 25,00 | 8,14 | 3 | 2.940.000 | 8,33 | 2,71 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari | 36 | 52.665.000 | 0 | - | 12 | 17.555.000 | 3 | - | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 17 | Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | 14.154.750 | 0 | - | 12 | 4.718.250 | 3 | 650.000 | 25,00 | 13,78 | 3 | 650.000 | 8,33 | 4,59 | |
| G | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 11.400.000 | 115 | - | 30 | 3.800.000 | 0 | - | - | - | 115 | - | 76,67 | 0,00 | Kec. Ranah Pesisir |
| | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan Paten | terselenggaraya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 11.400.000 | 0 | - | 12 | 3.800.000 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---------------------------|---|-----|----|----|----|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | K | Rp. | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 47.367.500 | 18 | 16.762.500 | 0 | - | - | - | 50 | 47.367.500 | 50,00 | 62,90 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 20 | Pergelaran seni budaya dan potensi daerah | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 47.367.500 | 1 | 16.762.500 | 0 | - | - | - | 3 | 47.367.500 | 50,00 | 62,90 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian pembangunan sesuai target | 95 | 148.406.100 | 85 | - | 5 | 15.634.500 | 5 | 10.127.000 | 100,00 | 64,77 | 90 | 10.127.000 | 94,74 | 6,82 | Kec. Lembang |
| 1 | 5 | 00 | 01 | 15 | 9 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan (kali) | 3 | 148.406.100 | | | 1 | 15.634.500 | 1 | 10.127.000 | 100,00 | 64,77 | 1 | 10.127.000 | 33,33 | 6,82 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah | Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan | 80 | 25.000.000 | 80 | 11.280.000 | 15 | 4.630.000 | 0 | - | - | - | 80 | 11.280.000 | 100,00 | 45,12 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 65 | Fasilitas penerimaan PBB-P2 | Jumlah nagari yang difasilitasi | 60 | 25.000.000 | 30 | 11.280.000 | 10 | 4.630.000 | 0 | - | - | - | 30 | 11.280.000 | 50,00 | 45,12 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terbit administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 58.000.000 | 47 | 23.110.000 | 15 | 9.623.000 | 3,00 | 6.540.500 | 20,00 | 67,97 | 50,00 | 29.650.500 | 50,00 | 51,12 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 11 | Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah nagari | Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akuntabel (16 Nagari x 6 tahun) | 96 | 58.000.000 | 48 | 23.110.000 | 16 | 9.623.000 | 2 | 6.540.500 | 12,50 | 67,97 | 50 | 29.650.500 | 52,08 | 51,12 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Nilai LPPD | 3350 | 109.442.180 | 3065 | 10.156.000 | 165 | 16.911.500 | 3 | 0 | 1,82 | - | 3068 | 10.156.000 | 91,58 | 9,28 | Kec. Ranah Pesisir |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terlaksananya koordinasi muska (bln) | 36 | 50.734.500 | 0 | - | 12 | 16.911.500 | 3 | 0 | 25,00 | - | 3 | - | 8,33 | 0,00 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen) | 60 | 29.353.840 | 50 | 5.078.000 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 50,00 | 5.078.000 | 83,33 | 17,30 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 27 | Fasilitas Penyelenggaraan Pilwano | Jumlah Nagari yang difasilitasi | 16 | 29.353.840 | 4 | 5.078.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 5.078.000 | 25,00 | 17,30 | |
| N | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif (persen) | 80 | 60.000.000 | 62 | 40.905.000 | 0 | - | 0,00 | - | - | - | 62,00 | 40.905.000 | 77,50 | 68,18 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Penunjang kegiatan MTQ kecamatan | Kegiatan MTQ yang diikuti (kegiatan) | 4 | 60.000.000 | 3 | 40.905.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3 | 40.905.000 | 75,00 | 68,18 | |
| O | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 570.243.500 | 52 | 292.853.500 | 0 | - | 0 | - | - | - | 52,00 | 292.853.500 | 52,00 | 51,36 | Kec. Linggo Sari Baganti |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (16 nagari x 6 tahun) | 48 | 243.000.000 | 48 | 118.252.500 | - | - | 0 | - | - | - | 48 | 118.252.500 | 100,00 | 48,66 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 108.444.000 | 3 | 42.745.500 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 42.745.500 | 50,00 | 39,42 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 107.149.500 | 3 | 53.915.500 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 53.915.500 | 50,00 | 50,32 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 36 | 9.650.000 | 36 | 43.167.500 | - | - | 0 | - | - | - | 36 | 43.167.500 | 100,00 | 447,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | Fasilitas kegiatan kepemudaan keagamaan dan kemasyarakatan | Jumlah pemuda yang dibina | 75 | 52.000.000 | 75 | 17.472.500 | - | - | 0 | - | - | - | 75 | 17.472.500 | 100,00 | 33,60 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | Terselenggaranya PATEN (bln) | 36 | 50.000.000 | 36 | 17.300.000 | - | - | 0 | - | - | - | 36 | 17.300.000 | 100,00 | 34,60 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,88 | 38,40 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | SR | | |
| X | | | | | | KECAMATAN PANCUNG SOAL | | 4.028.322.990 | | 1.661.601.741 | | 501.745.801 | | 83.048.525 | | | | | 1.697.987.941 | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 1.547.454.650 | 36 | 551.096.565 | 12 | 219.585.801 | 46.662.325 | - | 21,25 | 36,00 | 551.096.565 | 50,00 | 35,61 | Kec. Pancung Soal | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Tersedianya layanan jasa surat menyurat/ bulan) | 48 | 21.385.096 | 12 | 2.851.900 | 12 | - | - | - | - | 12 | 2.851.900 | 25,00 | 13,34 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 70.500.800 | 36 | 22.432.815 | 12 | 7.560.000 | 3 | 859.225 | 25,00 | 11,37 | 39 | 23.292.040 | 54,17 | 33,04 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 106.750.000 | 12 | 39.000.000 | 3 | 6.500.000 | 25,00 | 16,67 | 39 | 113.250.000 | 54,17 | 56,84 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 50.640.000 | 12 | 11.308.000 | 3 | 2.358.000 | 25,00 | 20,85 | 39 | 52.998.000 | 54,17 | 56,68 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 57.365.000 | 12 | 29.523.265 | 3 | 11.232.100 | 25,00 | 38,04 | 39 | 68.597.100 | 54,17 | 51,73 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 65.400.000 | 36 | 32.804.000 | 12 | 10.346.536 | 3 | 5.459.600 | 25,00 | 52,77 | 39 | 38.263.600 | 54,17 | 58,51 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 13.691.000 | 36 | 5.695.000 | 12 | 2.633.000 | 3 | 866.500 | 25,00 | 32,91 | 39 | 6.561.500 | 54,17 | 47,93 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 15.130.000 | 36 | 9.320.000 | 12 | 5.980.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 9.320.000 | 54,17 | 61,60 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 136.500.000 | 36 | 54.105.900 | 12 | 17.875.000 | 3 | 951.900 | 25,00 | 5,33 | 39 | 55.057.800 | 54,17 | 40,34 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 360.000.000 | 36 | 94.771.950 | 12 | 12.650.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 94.771.950 | 54,17 | 26,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 398.875.000 | 36 | 103.470.000 | 12 | 76.880.000 | 3 | 18.435.000 | 25,00 | 23,98 | 39 | 121.905.000 | 54,17 | 30,56 | |
| | 5 | 01 | 01 | 15 | 01 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan OPD | Laporan perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan | 48 | 40.612.154 | 33 | 10.890.000 | 8 | 5.830.000 | 2 | 0 | 25,00 | - | 35 | 10.890.000 | 73 | 26,81 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 751.776.800 | 36 | 586.948.626 | 12 | 140.015.000 | 3 | 24.464.500 | 25,00 | 17,47 | 39 | 611.413.126 | 54,17 | 81,33 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 09 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 45 | 35.000.000 | 28 | 44.330.000 | 12 | 28.855.000 | 0 | 4.000.000 | - | 13,86 | 28 | 48.330.000 | 62,22 | 138,09 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas | Terawatnya Rumah Dinas (unit) | 6 | 51.645.000 | 1 | 15.645.000 | 1 | 6.390.000 | 3 | 6.390.000 | 300,00 | 100,00 | 4 | 22.035.000 | 66,67 | 42,67 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Terawatnya / Gedung Kantor | 72 | 55.994.000 | 36 | 23.994.000 | 12 | 14.230.000 | 3 | 2.414.500 | 25,00 | 16,97 | 39 | 26.408.500 | 54,17 | 47,16 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor | terpeliharanya peralatan kantor (bln) | 72 | 45.100.000 | 36 | 33.587.560 | 12 | 4.750.000 | 3 | 2.414.500 | 25,00 | 50,83 | 39 | 36.002.060 | 54,17 | 79,83 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Kelancaran perjalanan dinas | 72 | 219.381.300 | 36 | 91.712.066 | 12 | 53.290.000 | 3 | 9.245.500 | 25,00 | 17,35 | 39 | 100.957.566 | 54,17 | 46,02 | |
| | 5 | 00 | 01 | 02 | 02 | 24 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | Terawatnya Gedung Kantor | 12 | 344.656.500 | 11 | 377.680.000 | 1 | 32.500.000 | 0 | 0 | - | - | 11 | 377.680.000 | 91,67 | 109,58 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 204.975.000 | 50 | 71.195.000 | 18 | 41.070.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | 71.195.000 | 50,00 | 34,73 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 71.195.000 | 1 | 30.820.000 | 0 | - | - | - | 3 | 71.195.000 | 50,00 | 40,86 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 08 | Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam | jumlah pelaksanaan PHBI (kali) | 3 | 30.750.000 | 0 | - | 1 | 10.250.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pendidikan Politik masyarakat | Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen) | 80 | 14.925.000 | 50 | - | 18 | 4.975.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | - | 62,50 | 0,00 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 07 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwana | jumlah Pilwana yang difasilitasi (kali) | 3 | 14.925.000 | - | - | 1 | 4.975.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen) | 80 | 16.575.000 | 50 | - | 18 | 5.525.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | - | 62,50 | 0,00 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 12 | Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin | jumlah nagari yang dimonitoring (unit) | 10 | 16.575.000 | - | - | 10 | 5.525.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 39.236.000 | 18 | 19.130.000 | 0 | - | - | - | 50 | 39.236.000 | 50,00 | 52,10 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 39.236.000 | 1 | 19.130.000 | 0 | - | - | - | 3 | 39.236.000 | 50,00 | 52,10 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pemeliharaan knrntimbmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen) | 100 | 34.225.000 | 85 | 11.630.200 | 15 | 2.925.000 | 4 | - | 26,67 | - | 89,00 | 11.630.200 | 89,00 | 33,98 | Kec. Pancung Soal |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|--|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|-------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 32 | Fasilitas Masalah Trantib dan Pertanahan | Jumlah nagari yang difasilitasi | 60 | 34.225.000 | 24 | 11.630.200 | 4 | 2.925.000 | 0 | - | - | - | 24 | 11.630.200 | 40,00 | 33,98 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah | persentase peningkatan PAD | 100 | 38.730.000 | 50 | 16.304.000 | 18 | 2.537.500 | 0 | - | - | - | 50,00 | 16.304.000 | 50,00 | 42,10 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 65 | Fasilitas penerimaan PBB-P2 | Jumlah nagari yang difasilitasi | 60 | 38.730.000 | 30 | 16.304.000 | 10 | 2.537.500 | 2 | - | 20,00 | - | 32 | 16.304.000 | 53,33 | 42,10 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 38.250.000 | 50 | - | 18 | 12.750.000 | 0 | 3.043.900 | - | 23,87 | 50,00 | 3.043.900 | 50,00 | 7,96 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 09 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah nagari yang difasilitasi | 30 | 38.250.000 | 0 | - | 10 | 12.750.000 | 1 | 3.043.900 | 10,00 | 23,87 | 1 | 3.043.900 | 3,33 | 7,96 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 72 | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 129.353.840 | 50 | 58.520.500 | 18 | - | 0 | - | - | - | 50,00 | 58.520.500 | 50,00 | 45,24 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 72 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Jumlah nagari yang dibina | 60 | 129.353.840 | 30 | 58.520.500 | 0 | - | 0 | - | - | - | 30 | 58.520.500 | 50,00 | 45,24 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 708.777.000 | 52 | 268.797.850 | 20 | 53.232.500 | 0 | 8.877.800 | - | 16,68 | 52,00 | 277.675.650 | 52,00 | 39,18 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 188.580.500 | 30 | 93.693.900 | 10 | 32.480.000 | 1 | 4.273.300 | 10,00 | 13,16 | 31 | 97.967.200 | 51,67 | 51,95 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 137.849.500 | 3 | 39.452.800 | 1 | 2.900.000 | 0 | - | - | - | 3 | 39.452.800 | 50,00 | 28,62 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 12 | Fasilitas masalah Trantib dan pertanahan | pembinaan yang dilakukan (bln) | 6 | 8.775.000 | 0 | - | 1 | 2.925.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 13 | Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 30.786.000 | 95 | 19.863.750 | 25 | 2.140.000 | 0 | - | - | - | 95 | 19.863.750 | 63,33 | 64,52 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 22 | Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPd yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 171.393.000 | 3 | 57.893.700 | 1 | 7.625.000 | 1 | 4.604.500 | 100,00 | 60,39 | 4 | 62.498.200 | 66,67 | 36,46 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 27 | Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan | Jumlah Musrenbang RKPd yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 171.393.000 | 3 | 57.893.700 | 1 | 5.162.500 | 0 | - | - | - | 3 | 57.893.700 | 50,00 | 33,78 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | | Program Pematapan Otonomi daerah | persentase penyelenggaraan otonomi daerah | 95 | 247.970.700 | 80 | 36.907.000 | 20 | - | 0 | - | - | - | 80,00 | 36.907.000 | 84,21 | 14,88 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 05 | Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan (UKS, Pramuka dan Fasilitas Lansia) | Jumlah UKS yang dibina | 60 | 28.133.700 | 30 | 12.460.400 | 10 | - | 0 | - | - | - | 30 | 12.460.400 | 50,00 | 44,29 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 58 | 08 | Fasilitas forum koordinasi pimpinan kecamatan | rapat-kyat koordinasi muspika (bln) | 72 | 48.444.000 | 36 | 21.066.600 | 12 | - | 0 | - | - | - | 36 | 21.066.600 | 50,00 | 43,49 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 09 | Fasilitas Pemilihan wali nagari | Jumlah nagari yang difasilitasi | 10 | 171.393.000 | 3 | 3.380.000 | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | 3.380.000 | 30,00 | 1,97 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | | Program Pemberdayaan Potensi unggulan Kecamatan | Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari) | 10 | 150.000.000 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | 03 | Fasilitas Pemberdayaan program unggulan kecamatan | Jumlah nagari yang difasilitasi (nagari) | 10 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Berkembangnya lembaga sosial (%) | 90 | 70.000.000 | 65 | 20.966.000 | 15 | - | 0 | - | - | - | 65,00 | 20.966.000 | 72,22 | 29,95 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 21 | persiapan dan penyelenggaraan MTQ | MTQ yang diikuti | 3 | 70.000.000 | 1 | 20.966.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 20.966.000 | 33,33 | 29,95 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,47 | 29,79 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| XI | | | | | | | KECAMATAN AIRPURA | | 4.126.459.594 | | 1.531.719.408 | | 521.420.000 | 0 | 173.850.954 | | | | 1.705.570.362 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.326.872.754 | 36 | 616.133.338 | 12 | 270.065.273 | 3 | 111.851.845 | 25,00 | 41,42 | 39,00 | 727.985.183 | 54,17 | 54,86 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 74.170.000 | 36 | 21.563.500 | 12 | 4.800.000 | 3 | 1.200.000 | 25,00 | 25,00 | 39 | 22.763.500 | 54,17 | 30,69 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 105.550.000 | 12 | 45.600.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 105.550.000 | 54,17 | 52,97 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------|---|----|----|----|----|-----|---|--|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 83.047.000 | 12 | 55.311.250 | 3 | 14.680.000 | 25,00 | 26,54 | 39 | 97.727.000 | 54,17 | 104,52 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 56.113.138 | 12 | 21.653.382 | 3 | 6.196.782 | 25,00 | 28,62 | 39 | 62.309.920 | 54,17 | 46,99 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bln) | 72 | 65.400.000 | 36 | 31.762.000 | 12 | 12.800.161 | 3 | 4.784.818 | 25,00 | 37,38 | 39 | 36.546.818 | 54,17 | 55,88 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 15.000.000 | 36 | 6.704.700 | 12 | 4.185.480 | 3 | 1.325.000 | 25,00 | 31,66 | 39 | 8.029.700 | 54,17 | 53,53 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 20.130.000 | 36 | 10.020.000 | 12 | 8.700.000 | 3 | 2.338.636 | 25,00 | 26,88 | 39 | 12.358.636 | 54,17 | 61,39 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 196.500.000 | 36 | 73.975.000 | 12 | 20.400.000 | 3 | 13.560.200 | 25,00 | 66,47 | 39 | 87.535.200 | 54,17 | 44,55 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 36 | 86.078.000 | 12 | 45.300.000 | 3 | 725.000 | 25,00 | 1,60 | 39 | 86.803.000 | 54,17 | 44,51 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 294.700.000 | 36 | 130.430.000 | 12 | 43.440.000 | 3 | 21.415.000 | 25,00 | 49,30 | 39 | 151.845.000 | 54,17 | 51,53 | |
| | 5 | 01 | 01 | 15 | 01 | 30 | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan OPD | Laporan perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan | 48 | 40.612.154 | 33 | 10.890.000 | 8 | 7.875.000 | 2 | 600.000 | 25,00 | 7,62 | 35 | 11.490.000 | 73 | 28,29 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 876.318.000 | 36 | 444.562.942 | 12 | 127.220.337 | 3 | 45.026.409 | 25,00 | 35,39 | 39 | 489.589.351 | 54,17 | 55,87 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bln) | 72 | 27.000.000 | 36 | 24.175.000 | 12 | 20.750.000 | 3 | 6.000.000 | 25,00 | 28,92 | 39 | 30.175.000 | 54,17 | 111,76 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 27.000.000 | 36 | 23.375.000 | 12 | 1.750.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 23.375.000 | 54,17 | 86,57 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 123 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | terelhiannya peralatan dan perlengkapan kantor (bln) | 36 | 27.000.000 | 36 | 16.825.000 | | | 0 | 3.528.409 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | 20.353.409 | 100,00 | 75,38 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas (bln) | 72 | 27.000.000 | 36 | 16.431.500 | 12 | 11.532.914 | 3 | 4.133.000 | 25,00 | 35,84 | 39 | 20.564.500 | 54,17 | 76,16 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | terpeliharanya gedung kantor (bln) | 72 | 27.000.000 | 36 | 18.408.100 | 12 | 15.321.995 | 3 | 16.065.000 | 25,00 | 104,85 | 39 | 34.473.100 | 54,17 | 127,68 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terpelihanya kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 247.106.000 | 25 | 115.116.114 | 12 | 54.515.428 | 3 | 15.000.000 | 25,00 | 27,52 | 28 | 130.116.114 | 38,89 | 52,66 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | terpelihanya perlengkapan gedung kantor (bln) | 72 | 247.106.000 | 25 | 115.116.114 | 12 | 18.500.000 | 3 | 300.000 | 25,00 | 1,62 | 28 | 115.416.114 | 38,89 | 46,71 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | terpelihanya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 247.106.000 | 25 | 115.116.114 | 12 | 4.850.000 | 3 | - | 25,00 | - | 28 | 115.116.114 | 38,89 | 46,59 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pemeliharaan ktrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen) | 100 | 34.225.000 | 75 | 16.500.000 | 5 | 2.750.000 | 0 | - | - | - | 75,00 | 16.500.000 | 75,00 | 48,21 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 32 | Facilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan | Jumlah nagari yang difasilitasi | 60 | 34.225.000 | 24 | 16.500.000 | 4 | 2.750.000 | 0 | - | - | - | 24 | 16.500.000 | 40,00 | 48,21 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 64.700.000 | 18 | 34.825.390 | 0 | 1.710.000 | - | 4,91 | 50,00 | 66.410.000 | 50,00 | 38,12 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 64.700.000 | 1 | 34.825.390 | 0 | 1.710.000 | - | 4,91 | 3 | 66.410.000 | 50,00 | 38,12 | |
| E | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 80 | 672.760.000 | 37 | 44.405.386 | 10 | 15.920.000 | 3 | 5.050.000 | 30,00 | 31,72 | 40 | 49.455.386 | 50,00 | 7,35 | Kec. Airpura |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 01 | Penunjang kegiatan MTQ kecamatan | Terlaksananya MTQ Kecamatan | 3 | 625.000.000 | 1 | 44.405.386 | 1 | - | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 1 | 44.405.386 | 33,33 | 7,10 | |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 12 | Pembinaan Lembaga Didikan Subuh | Terlaksananya pembinaan LDS (bln) | 36 | 12.360.000 | 0 | - | 1 | 4.120.000 | 0 | 1.000.000 | - | 24,27 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 8,09 | |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 13 | Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Generasi Muda | Terlaksananya Pembinaan bagi pemuda (bln) | 36 | 24.600.000 | 0 | - | 1 | 8.200.000 | 0 | 3.900.000 | - | 47,56 | 0 | 3.900.000 | 0,00 | 15,85 | |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 15 | Pembinaan BKMT | Terlaksananya pembinaanBKMT (bln) | 36 | 10.800.000 | 0 | - | 1 | 3.600.000 | 0 | 150.000 | - | 4,17 | 0 | 150.000 | 0,00 | 1,39 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 109.290.000 | 75 | - | 15 | 36.430.000 | 0,00 | 4.124.850 | - | 11,32 | 75,00 | 4.124.850 | 75,00 | 3,77 | Kec. Ranah Pesisir |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|-----|---|-----|----|-----|----|----|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|-------|------------|---------------|---------------------|--------|---------|--------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan(bln) | 36 | 93.690.000 | 0 | - | 12 | 31.230.000 | 0 | 2.567.000 | - | 8,22 | 0 | 2.567.000 | 0,00 | 2,74 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royaong ke nagari | 36 | 15.600.000 | 0 | - | 12 | 5.200.000 | 0 | 1.557.850 | - | 29,96 | 0 | 1.557.850 | 0,00 | 9,99 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 17 | Fasilitas Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga | pembinaan yang dilakukan (bln) | 36 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | #DIV/0! | |
| G | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 18 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 7.335.000 | 115 | - | 30 | 2.445.000 | 0 | 1.777.850 | - | 72,71 | 115 | 1.777.850 | 76,67 | 24,24 | Kec. Ranah Pesisir |
| I | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan Paten | terselenggaraya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 7.335.000 | 0 | - | 12 | 2.445.000 | 0 | 1.777.850 | - | 72,71 | 0 | 1.777.850 | 0,00 | 24,24 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 32.162.458 | 18 | 11.779.000 | 0 | - | - | - | 50 | 32.162.458 | 50,00 | 42,71 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 4 | 32.162.458 | 1 | 11.779.000 | 0 | - | - | - | 4 | 32.162.458 | 66,67 | 42,71 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah | Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan | 80 | 25.000.000 | 55 | 14.811.850 | 15 | 1.375.000 | 0 | - | - | - | 55 | 14.811.850 | 68,75 | 59,25 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 65 | Fasilitas penerimaan PBB-P2 | jumlah nagari yang difasilitasi | 60 | 25.000.000 | 30 | 14.811.850 | 10 | 1.375.000 | 1 | - | 10,00 | - | 31 | 14.811.850 | 51,67 | 59,2474 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 51.000.000 | 50 | 26.156.689 | 18 | 1.375.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | 26.156.689 | 50,00 | 51,29 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 05 | Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah nagari yang dibina (10 Nagari x 6 tahun) | 60 | 51.000.000 | 30 | 26.156.689 | 10 | 1.375.000 | 2 | - | 20,00 | - | 32 | 26.156.689 | 53,33 | 51,29 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program Pematapan Otonomi daerah | persentase penyelenggaraan otonomi daerah | 95 | 18.000.000 | 80 | - | 20 | 6.000.000 | 0 | - | - | - | 80,00 | - | 84,21 | 0,00 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | rapat-raat koordinasi muspika (bln) | 36 | 18.000.000 | 0 | - | 12 | 6.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | | Program Peningkatan IMTAQ | Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam | 100 | 40.547.000 | 36 | - | 20 | 7.500.000 | 0,00 | 575.000 | - | 7,67 | 36,00 | 575.000 | 36,00 | 1,42 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 01 | Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam | jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi | 3 | 40.547.000 | 0 | - | 1 | 7.500.000 | 0 | 575.000 | - | 7,67 | 0 | 575.000 | 0,00 | 1,42 | Kec. Silaut |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (persen) | 80 | 29.353.840 | 50 | 5.425.000 | 18 | - | 0 | - | - | - | 50,00 | 5.425.000 | 62,50 | 18,48 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 27 | Fasilitas Penyelenggaraan Pilwaha | Pilwaha yang difasilitasi (kegiatan) | 5 | 29.353.840 | 1 | 5.425.000 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | 5.425.000 | 20,00 | 18,48 | |
| N | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 686.223.000 | 52 | 266.861.745 | 20 | 3.735.000 | 0,00 | 3.735.000 | - | 100,00 | 52,00 | 270.596.745 | 52,00 | 39,43 | Kec. Airpura |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 25 | 188.580.500 | 25 | 87.832.900 | 0 | - | 0 | - | - | - | 25 | 87.832.900 | 100,00 | 46,58 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 2 | 137.849.500 | 2 | 43.583.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 43.583.000 | 100,00 | 31,62 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKP yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 3 | 171.393.000 | 3 | 59.383.045 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3 | 59.383.045 | 100,00 | 34,65 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 36 | 36.000.000 | 36 | 18.000.000 | 0 | - | 0 | - | - | - | 36 | 18.000.000 | 100,00 | 50,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 56 | 76.200.000 | 56 | 29.031.400 | 0 | - | 0 | - | - | - | 56 | 29.031.400 | 100,00 | 38,10 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 21 | Musrenbang Kecamatan | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 3 | 76.200.000 | 3 | 29.031.400 | 1 | 3.735.000 | 0 | 3.735.000 | - | 100,00 | 3 | 32.766.400 | 100,00 | 43,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 55,45 | 45,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | R | SR | | | | |
| XII | | | | | | | KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN | | 3.639.656.340 | | 1.033.640.282 | | 500.119.600 | | 84.262.048 | | | | 1.117.902.330 | | | | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|-----|----|----|----|--|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------|----------------|--|
| | K | Rp. | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (bln) | 72 | 1.371.873.900 | 36,00 | 471.921.971 | 12,00 | 260.720.522 | 3,00 | 48.539.448 | 25,00 | 18,62 | 39,00 | 520.461.419 | 54,17 | 37,94 | Kec. BAB Tapan | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72 | 75.000.000 | 36 | 13.290.000 | 12 | 45.600.000 | 3,00 | 9.600.000 | 25,00 | 21,05 | 3900% | 22.890.000 | 54,17 | 30,52 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 72 | 72.332.900 | 36 | 14.559.038 | 12 | 8.400.000 | 3,00 | 1.710.548 | 25,00 | 20,36 | 39 | 16.269.586 | 54,17 | 22,49 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 72 | 484.800.000 | 36 | 127.045.000 | 12 | 46.200.000 | 3 | 11.550.000 | 25,00 | 25,00 | 39 | 138.595.000 | 54,17 | 28,59 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 72 | 67.518.000 | 36 | 28.077.040 | 12 | 16.954.570 | 3 | 3.787.500 | 25,00 | 22,34 | 39 | 31.864.540 | 54,17 | 47,19 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 72 | 43.766.000 | 36 | 27.221.893 | 12 | 21.971.492 | 3 | 2.575.400 | 25,00 | 11,72 | 39 | 29.797.293 | 54,17 | 68,08 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 72 | 34.472.000 | 36 | 13.672.200 | 12 | 8.035.000 | 3 | 1.720.100 | 25,00 | 21,41 | 39 | 15.392.300 | 54,17 | 44,65 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 72 | 18.079.500 | 36 | 3.546.200 | 12 | 2.375.960 | 3 | 928.000 | 25,00 | 39,06 | 39 | 4.474.200 | 54,17 | 24,75 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 72 | 27.000.000 | 36 | 6.960.000 | 12 | 4.080.000 | 3 | 240.000 | 25,00 | 5,88 | 39 | 7.200.000 | 54,17 | 26,67 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 72 | 46.800.000 | 36 | 26.660.600 | 12 | 16.690.000 | 3 | 2.075.000 | 25,00 | 12,43 | 39 | 28.735.600 | 54,17 | 61,40 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 | 184.400.000 | 36 | 63.220.000 | 12 | 15.575.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 63.220.000 | 54,17 | 34,28 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 72 | 297.880.000 | 36 | 147.670.000 | 12 | 68.230.000 | 3 | 13.960.000 | 25,00 | 20,46 | 39 | 161.630.000 | 54,17 | 54,26 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 36 | 19.825.500 | 0 | - | 12 | 6.608.500 | 3 | 392.900 | 25,00 | 5,95 | 3 | 392.900 | 8,33 | 1,98 | | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang (bln) | 72 | 648.720.000 | 36 | 178.099.895 | 12 | 91.586.078 | 3,00 | 21.863.750 | 25,00 | 23,87 | 39 | 199.963.645 | 54,17 | 30,82 | Kec. BAB Tapan | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Gedung kantor yang dibangun (unit) | 1 | 20.000.000 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (unit) | 20 | 135.000.000 | 6 | 87.301.334 | 1 | 38.486.078 | 2,00 | 13.835.000 | 200,00 | 35,95 | 8,00 | 101.136.334 | 40,00 | 74,92 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas | 6 | 105.720.000 | 2 | 24.138.656 | 1 | 2.000.000 | 0,00 | - | - | - | 2,00 | 24.138.656 | 33,33 | 22,83 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor) | 6 | 55.000.000 | 2 | 2.997.900 | 1 | 4.000.000 | 0,00 | - | - | - | 2,00 | 2.997.900 | 33,33 | 5,45 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (unit) | 24 | 275.000.000 | 8 | 51.203.684 | 4 | 23.100.000 | 1,00 | 3.238.750 | 25,00 | 14,02 | 9,00 | 54.442.434 | 37,50 | 19,80 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) | 96 | 49.000.000 | 25 | 3.691.321 | 13 | 4.000.000 | 1,00 | 2.050.000 | 7,69 | 51,25 | 26 | 5.741.321 | 27,08 | 11,72 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan rumah dinas / jabatan | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (rakat) | 1 | 9.000.000 | 1 | 8.767.000 | 0 | - | 10,00 | 2.050.000 | - | - | 11,00 | 10.817.000 | 1100,00 | 120,19 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah Kasus yang ditangani/ fasilitasi | 6 | 56.000.000 | 0 | - | 2 | 18.675.000 | 0,00 | 690.000 | - | 3,69 | 0,00 | 690.000 | 0,00 | 1,23 | Kec. BAB Tapan | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 15 | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum | Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi | 6 | 56.000.000 | 0 | - | 2 | 18.675.000 | 1 | 690.000 | 50,00 | 3,69 | 1 | 690.000 | 16,67 | 1,23 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|---|-----|-------------|-----|-------------|----|------------|------|-----------------|--------|------------|-------|---------------------|--------|-------|-------------------|
| | D | 5 | 00 | 01 | 15 | | | 17 | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 155.604.840 | 50 | 51.027.920 | 18 | 29.007.500 | 0 | - | - | - | 50 | 51.027.920 | 50,00 | 32,79 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 155.604.840 | 2 | 51.027.920 | 1 | 29.007.500 | 0 | - | - | - | 2 | 51.027.920 | 33,33 | 32,79 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 124.764.000 | 75 | - | 15 | 41.588.000 | 0,00 | - | - | - | 75,00 | - | 75,00 | 0,00 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan (bln) | 36 | 106.216.500 | 0 | - | 12 | 35.405.500 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royong ke nagari | 36 | 18.547.500 | 0 | - | 12 | 6.182.500 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| F | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 6.600.000 | 115 | - | 30 | 2.200.000 | 0 | - | - | - | 115 | - | 76,67 | 0,00 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 25 | Fasilitas Penyelenggaraan Paten | terselenggaraya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 6.600.000 | 0 | - | 12 | 2.200.000 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Festifal Langkisau yang diikuti (kegiatan) | 6 | 87.568.750 | 3 | 22.305.700 | 1 | 13.300.000 | 0 | - | - | - | 3 | 22.305.700 | 50,00 | 25,47 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal Kecamatan BAR Tapan | 6 | 87.568.750 | 3 | 22.305.700 | 1 | 13.300.000 | 0 | - | - | - | 3 | 22.305.700 | 50,00 | 25,47 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD | 100 | 52.402.670 | 32 | - | 18 | 15.205.000 | 2 | 10.528.850 | 11,11 | 69,25 | 34 | 10.528.850 | 34,00 | 20,09 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 09 | Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 3 | 52.402.670 | | | 1 | 15.205.000 | 1 | 10.528.850 | 100,00 | 69,25 | 1 | 10.528.850 | 33,33 | 20,09 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terbit administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 97.000.000 | 40 | 49.951.700 | 18 | 15.662.500 | 4 | 2.640.000 | 22,22 | 16,86 | 44 | 52.591.700 | 44,00 | 54,22 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 11 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Laporan keuangan pemerintahan nagari yang akurat | 60 | 65.000.000 | 30 | 34.611.700 | 10 | 9.550.000 | 3 | 1.880.000 | 30,00 | 19,69 | 33 | 36.491.700 | 55,00 | 56,14 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 13 | Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari | APB Nagari yang akurat (dokumen) | 60 | 32.000.000 | 30 | 15.340.000 | 10 | 6.112.500 | 3 | 760.000 | 30,00 | 12,43 | 33 | 16.100.000 | 55,00 | 50,31 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi daerah | persentase penyelenggaraan otonomi daerah | 95 | 12.000.000 | 80 | - | 20 | 4.000.000 | 0 | - | - | - | 80,00 | - | 84,21 | 0,00 | Kec. Pancung Soal |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | rapat-raat koordinasi musoka (bln) | 36 | 12.000.000 | 0 | - | 12 | 4.000.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | | Program Peningkatan IMTAQ | - Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam | 100 | 40.547.000 | 36 | - | 20 | 5.125.000 | 0,00 | - | - | - | 36,00 | - | 36,00 | 0,00 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 01 | Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam | Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi | 3 | 40.547.000 | 0 | - | 1 | 5.125.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Silaut |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Permperdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial aktif (%) | 70 | 200.000.000 | 50 | 66.085.000 | - | 0 | - | - | - | - | 50,00 | 66.085.000 | 71,43 | 33,04 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 08 | persiapan dan Keikutsertaan MTQ kabupaten dan kecamatan | Terlaksananya Kegiatan MTQ tk kecamatan | 3 | 200.000.000 | 1 | 66.085.000 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 66.085.000 | 33 | 33,04 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai LAKIP | A | 40.000.000 | 100 | 19.392.000 | - | 0 | - | - | - | - | 100 | 19.392.000 | 100,00 | 48,48 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan yang dihasilkan (dokumen) | 36 | 40.000.000 | 1 | 19.392.000 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 19.392.000 | 3 | 48,48 | |
| N | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 701.375.180 | 52 | 172.286.096 | - | 0 | - | - | - | - | 52 | 172.286.096 | 52,00 | 24,56 | Kec. BAB Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 285.000.000 | 20 | 105.862.616 | - | 0 | - | - | - | - | 20 | 105.862.616 | 33,33 | 37,14 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 57.375.180 | 3 | 13.851.180 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 13.851.180 | 50,00 | 24,14 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 110.500.000 | 3 | 16.641.960 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 16.641.960 | 50,00 | 15,06 | |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 48.500.000 | 33 | 8.690.700 | | 0 | - | | | 33 | 8.690.700 | 45,83 | 17,92 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 200.000.000 | 75 | 27.239.640 | | 0 | - | | | 75 | 27.239.640 | 50,00 | 13,62 | | |
| O | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | | Program Pemberdayaan Potensi unggulan Kecamatan | Jumlah nagari yang memiliki potensi unggulan (nagari) | 10 | 42.500.000 | 4 | 1.220.000 | 2 | 3.050.000 | 0 | - | | 4,00 | 1.220.000 | 40,00 | 2,87 | Kec. BAB Tapan | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 20 | Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah produk unggulan yang dibina (nagari) | 10 | 42.500.000 | 4 | 1.220.000 | 2 | 3.050.000 | 0 | - | | 4 | 1.220.000 | 40,00 | 2,87 | | |
| P | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | | Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Jumlah kasus yang ditangani/fasilitasi | 10 | 2.700.000 | 2 | 1.350.000 | | 0 | - | | | 2 | 1.350.000 | 20,00 | 50,00 | Kec. BAB Tapan | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 59 | 03 | Fasilitasi Masalah Tranbib dan Pertanahan | Jumlah kasus yang difasilitasi | 10 | 2.700.000 | 2 | 1.350.000 | | 0 | - | | | 2 | 1.350.000 | 20,00 | 50,00 | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,60 | 22,60 | | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | | |
| XIII | | | | | | | KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN | | 3.654.098.440 | | 1.554.474.765 | | 514.749.464 | 0 | 106.440.040 | | | | 1.660.914.805 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bin | 72 | 1.390.430.600 | 36 | 619.350.737 | 12 | 242.164.442 | 3,00 | 61.417.040 | 25,00 | 25,36 | 39,00 | 680.767.777 | 54,17 | 48,96 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 01 | Kegiatan Penyediaan jasa asa surat menyurat | Tersedianya layanan surat menyurat kantor (bulan) | 72 | 104.170.000 | 36 | 34.003.100 | 12 | 1.800.000 | 3 | 135.000 | 25,00 | 7,50 | 39 | 34.138.100 | 54,17 | 32,77 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 74.170.000 | 36 | 26.163.500 | 12 | 7.800.000 | 3 | 1.585.540 | 25,00 | 20,33 | 39 | 27.749.040 | 54,17 | 37,41 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 107.350.000 | 12 | 49.200.000 | 3 | 8.200.000 | 25,00 | 16,67 | 39 | 115.550.000 | 54,17 | 57,99 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 93.500.000 | 36 | 34.775.150 | 12 | 25.539.859 | 3 | 4.881.000 | 25,00 | 19,11 | 39 | 39.656.150 | 54,17 | 42,41 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 132.600.000 | 36 | 57.271.653 | 12 | 22.611.715 | 3 | 8.649.000 | 25,00 | 38,25 | 39 | 65.920.653 | 54,17 | 49,71 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bin) | 72 | 65.400.000 | 36 | 28.948.834 | 12 | 6.175.231 | 3 | 1.588.500 | 25,00 | 25,72 | 39 | 30.537.334 | 54,17 | 46,69 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 15.000.000 | 36 | 6.943.000 | 12 | 2.882.637 | 3 | 1.593.000 | 25,00 | 55,26 | 39 | 8.536.000 | 54,17 | 56,91 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bin) | 72 | 20.130.000 | 36 | 8.400.000 | 12 | 7.880.000 | 3 | 300.000 | 25,00 | 3,81 | 39 | 8.700.000 | 54,17 | 43,22 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 196.500.000 | 36 | 81.327.500 | 12 | 19.975.000 | 3 | 7.945.000 | 25,00 | 39,77 | 39 | 89.272.500 | 54,17 | 45,43 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 195.000.000 | 36 | 94.478.000 | 12 | 26.200.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 94.478.000 | 54,17 | 48,45 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 294.700.000 | 36 | 139.690.000 | 12 | 72.100.000 | 3 | 26.540.000 | 25,00 | 36,81 | 39 | 166.230.000 | 54,17 | 56,41 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bin) | 72 | 658.106.000 | 36 | 395.964.743 | 12 | 113.733.112 | 3 | 20.407.500 | 25,00 | 17,94 | 39 | 416.372.243 | 54,17 | 63,27 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | tersedianya perlengkapan penunjang (bin) | 60 | 27.000.000 | 12 | 24.665.000 | 12 | 2.241.658 | 3 | 2.224.500 | 25,00 | 99,23 | 15 | 26.889.500 | 25,00 | 99,59 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | tersedianya peralatan penunjang (bin) | 60 | 27.000.000 | 12 | 39.016.399 | 12 | 50.490.351 | 3 | - | 25,00 | - | 15 | 39.016.399 | 25,00 | 144,51 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jabatan | Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 1 unit x 6 tahun (unit) | 6 | 27.000.000 | 3 | 36.000.000 | 1 | 15.282.125 | 0 | 3.250.000 | - | 21,27 | 3 | 39.250.000 | 50,00 | 145,37 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|--|-----|-------------|----|-------------|----|---------------|---|------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit x 3 tahun (unit) | 3 | 150.000.000 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | - | 100,00 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 3,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bln) | 72 | 247.106.000 | 36 | 116.283.344 | 12 | 36.068.978 | 3 | 9.283.000 | 25,00 | 25,74 | 39 | 125.566.344 | 54,17 | 50,81 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 15.000.000 | 36 | 15.000.000 | 12 | 4.650.000 | 3 | 650.000 | 25,00 | 13,98 | 39 | 15.650.000 | 54,17 | 104,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 42 | Rehab sedang / berat Gedung Kantor | terlaksananya rehab sedang/berat kantor (unit kantor) | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | | | 0 | - | | | 1 | 150.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 61 | Pembangunan tempat parkir | tempat parkir (unit) | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | | | 0 | - | | | 1 | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 174.225.000 | 50 | 76.680.000 | 18 | 29.142.500 | 0 | - | - | - | 50,00 | 76.680.000 | 50,00 | 44,01 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 174.225.000 | 3 | 76.680.000 | 1 | 29.142.500 | 0 | - | - | - | 3 | 76.680.000 | 50,00 | 44,01 | |
| D | 5 | 0 | 1 | 56 | 20 | | Program Peningkatan pembeantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | Persentase penurunan Narkoba Tingkat Pelajar | 72 | 72.000.000 | 40 | 2.250.000 | 15 | 5.800.000 | 4 | 0 | 26,67 | - | 44 | 2.250.000 | 61,11 | 3,13 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 0 | 1 | 56 | 20 | 12 | Penyuluhan pencegah peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan pekat | Penyuluhan narkoba yang dilaksanakan (kali) | 20 | 72.000.000 | 5 | 2.250.000 | 5 | 5.800.000 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2.250.000 | 25,00 | 3,13 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Jumlah kampung proklm yang aktif (unit) | 1 | 174.225.000 | 0 | - | 1 | 14.851.910 | 0 | 8.450.000 | - | 56,90 | 0,00 | 8.450.000 | 0,00 | 4,85 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 23 | Pembinaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau | RTH yang difasilitasi (unit) | 1 | 174.225.000 | 0 | - | 1 | 14.851.910 | 0 | 8.450.000 | - | 56,90 | 0 | 8.450.000 | 0,00 | 4,85 | |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 75.310.000 | 50 | 42.692.500 | 18 | 19.375.000 | 0 | - | - | - | 50 | 42.692.500 | 50,00 | 56,69 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 18 | Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal (kali) | 6 | 75.310.000 | 3 | 42.692.500 | 1 | 19.375.000 | 0 | - | - | - | 3 | 42.692.500 | 50,00 | 56,69 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan | 80 | 5.000.000 | 75 | 3.300.000 | | - | 0 | - | | | 75 | 3.300.000 | 93,75 | 66,00 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Laporan yang disusun (dokumen) | 36 | 5.000.000 | 18 | 3.300.000 | 0 | - | 0 | - | | | 18 | 3.300.000 | 50,00 | 66,00 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pemeliharaan knrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Pencapaian target pengurangan kasus pelanggaran Perda (persen) | 100 | 34.225.000 | 85 | 17.225.000 | | - | 0 | - | | | 85,00 | 17.225.000 | 85,00 | 50,33 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 07 | Koodinasi dan konsultasi pemeliharaan knrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | jumlah sekolah yang dibina untuk pencegahan narkoba | 42 | 34.225.000 | 21 | 17.225.000 | | - | 0 | - | | | 21 | 17.225.000 | 50,00 | 50,33 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase masyarakat yang tersentuh pembinaan (%) | 80 | 100.000.000 | 53 | 8.680.000 | | - | 0 | - | | | 53 | 8.680.000 | 66,25 | 8,68 | Kec. RAHUL Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 21 | Fasilitas dan Monitoring Kegiatan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 | Kegiatan piwana yang didamoini (kegiatan) | 5 | 100.000.000 | 1 | 8.680.000 | | - | 0 | - | | | 1 | 8.680.000 | 20,00 | 8,68 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari terb administarsi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 129.353.840 | 50 | 56.691.613 | | - | 0 | - | | | 50,00 | 56.691.613 | 50,00 | 43,83 | Kec. RAHUL Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 09 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari | Nagari yang dibina (unit) | 60 | 129.353.840 | 30 | 56.691.613 | 1 | - | 0 | - | | | 30 | 56.691.613 | 50,00 | 43,83 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 06 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial | Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dan peran lembaga adat | 80 | 150.000.000 | 75 | 68.747.500 | | - | 0 | - | | | 75 | 68.747.500 | 93,75 | 45,83 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |
| | 5 | 00 | 01 | 06 | 21 | 01 | Penyelenggaraan MTQ Kecamatan | event MTQ yang dilaksanakan / diikuti (kegiatan) | 5 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | - | 0 | - | | | 1 | 50.000.000 | 20,00 | 100,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 06 | 21 | 23 | Pembinaan Lembaga didikan subuh | umlah nagari yang dibina (unit) | 60 | 100.000.000 | 30 | 18.747.500 | | - | 0 | - | | | 30 | 18.747.500 | 50,00 | 18,7475 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 691.223.000 | 52 | 262.892.672 | 20 | 89.682.500,00 | 0 | 16.165.500 | - | 18,03 | 52,00 | 279.058.172 | 52,00 | 40,37 | Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|--|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 188.580.500 | 30 | 94.923.172 | 10 | 54.582.500.00 | 1 | 4.195.500 | 10,00 | 7,69 | 31 | 99.118.672 | 51,67 | 52,56 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 137.849.500 | 3 | 44.413.000 | 1 | 8.615.000 | 0 | - | - | - | 3 | 44.413.000 | 50,00 | 32,22 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD kecamatan yang diselenggarakan (kali) | 6 | 171.393.000 | 3 | 59.015.300 | 1 | 11.500.000 | 1 | 10.670.000 | 100,00 | 92,78 | 4 | 69.685.300 | 66,67 | 40,66 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 13 | Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) | Pelayanan yang diberikan (bln) | 72 | 76.200.000 | 36 | 36.200.000 | 12 | 10.935.000 | 3 | 1.000.000 | 25,00 | 9,14 | 39 | 37.200.000 | 54,17 | 48,82 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 36.000.000 | 36 | 15.000.000 | 12 | 4.050.000 | 3 | 300.000 | 25,00 | 7,41 | 39 | 15.300.000 | 54,17 | 42,50 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 22 | Lomba K3 dan Taman se Kecamatan | umkah sekolah yang dinilai (unit) | 150 | 56.200.000 | 20 | 9.643.200 | | | 0 | - | | | 20 | 9.643.200 | 13,33 | 17,16 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 33 | Rapat Koordinasi Kecamatan | umlah rakor yang diselenggarakan (kegiatan) | 15 | 25.000.000 | 6 | 3.698.000 | | | 0 | - | | | 6 | 3.698.000 | 40,00 | 14,79 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,18 | 39,66 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| XIV | | | | | | | KECAMATAN LUNANG | | 3.254.835.072 | | 1.736.432.857 | | 529.372.900 | 0 | 87.923.825 | | | | 1.824.356.682 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.289.019.002 | 36 | 779.217.038 | 12 | 279.521.049 | 3,00 | 60.127.825 | 25,00 | 21,51 | 39,00 | 839.344.863 | 54,17 | 65,12 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 50.769.000 | 36 | 21.388.500 | 12 | 7.200.000 | 3 | 1.473.625 | 25,00 | 20,47 | 39 | 22.862.125 | 54,17 | 45,03 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 105.250.000 | 12 | 50.100.000 | 3 | 7.400.000 | 25,00 | 14,77 | 39 | 112.650.000 | 54,17 | 56,53 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 202.547.836 | 36 | 88.356.377 | 12 | 21.418.325 | 3 | 3.444.400 | 25,00 | 16,08 | 39 | 91.800.777 | 54,17 | 45,32 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 66.547.812 | 36 | 40.523.961 | 12 | 28.547.044,0 | 3 | 5.396.300 | 25,00 | 18,90 | 39 | 45.920.261 | 54,17 | 69,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan) | 72 | 28.255.000 | 36 | 17.199.400 | 12 | 12.441.600 | 3 | 1.395.000 | 25,00 | 11,21 | 39 | 18.594.400 | 54,17 | 65,81 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 13.691.130 | 36 | 6.343.500 | 12 | 1.814.080 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 6.343.500 | 54,17 | 46,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (bln) | 72 | 4.641.520 | 36 | 3.220.000 | 3 | 1.200.000 | 3 | - | 100,00 | - | 39 | 3.220.000 | 54,17 | 69,37 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bmkam minum rapat (bulan) | 72 | 85.470.000 | 36 | 53.486.500 | 12 | 13.400.000 | 3 | 5.894.500 | 25,00 | 43,99 | 39 | 59.381.000 | 54,17 | 69,48 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 197.033.000 | 36 | 126.878.000 | 12 | 14.950.000 | 3 | 2.650.000 | 25,00 | 17,73 | 39 | 129.528.000 | 54,17 | 65,74 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 382.943.104 | 36 | 295.988.000 | 12 | 110.100.000 | 3 | 26.860.000 | 25,00 | 24,40 | 39 | 322.848.000 | 54,17 | 84,31 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Publikasi | jumlah ubikasi di media massa (kali) | 4 | 28.930.000 | 1 | 7.191.400 | 7 | 1.000.000 | 0 | - | - | - | 1 | 7.191.400 | 25,00 | 24,86 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 3 | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan SKPD | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) | 35 | 28.930.000 | 21 | 13.391.400 | 7 | 17.350.000 | 0 | 5.614.000 | - | 32,36 | 21 | 19.005.400 | 60,00 | 65,69 | Kec. Silaut |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 458.422.585 | 36 | 326.051.050 | 12 | 87.496.851 | 3 | 16.611.000 | 25,00 | 18,98 | 39 | 342.662.050 | 54,17 | 74,75 | Kec. Lunang |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|-----|----|-----|----|-----|---|--|-----|-------------|-----|-------------|----|------------|------|------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor (bln) | 72 | 25.209.890 | 36 | 71.430.000 | 12 | 5.150.000 | 3 | 1.530.000 | 25,00 | 29,71 | 39 | 72.960.000 | 54,17 | 289,41 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | tersedianya peralatan penunjang (bln) | 60 | 15.000.000 | 12 | 2.339.000 | 12 | 20.262.975 | 3 | - | 25,00 | - | 15 | 2.339.000 | 25,00 | 15,59 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas jabatan | Terpeliharanya umah dinas (bln) | 72 | 72.000.000 | 36 | 37.000.000 | 12 | 10.000.000 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 37.000.000 | 54,17 | 51,39 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (bln) | 72 | 53.854.000 | 36 | 80.418.000 | 12 | 43.983.876 | 3 | - | 25,00 | - | 39 | 80.418.000 | 54,17 | 149,33 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (bln) | 72 | 273.794.695 | 36 | 127.464.050 | 12 | 8.100.000 | 3 | 12.181.000 | 25,00 | 150,38 | 39 | 139.645.050 | 54,17 | 51,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor | terpeliharanya peralatan gedung kantor (bln) | 72 | 18.564.000 | 36 | 7.400.000 | 12 | - | 3 | 2.900.000 | 25,00 | - | 39 | 10.300.000 | 54,17 | 55,48 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 98.767.141 | 50 | 68.707.600 | 18 | 36.000.000 | 0 | - | - | - | 50,00 | 68.707.600 | 50,00 | 69,57 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Kegiatan pelaksanaan Upacara HUR RI | Jumlah pelaksanaan PHRN (kali) | 6 | 98.767.141 | 3 | 68.707.600 | 1 | 36.000.000 | 0 | - | - | - | 3 | 68.707.600 | 50,00 | 69,57 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 156.825.000 | 75 | - | 15 | 52.275.000 | 0,00 | 1.125.000 | - | 2,15 | 75,00 | 1.125.000 | 75,00 | 0,72 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan (bln) | 36 | 132.750.000 | 0 | - | 12 | 44.250.000 | 0 | 1.125.000 | - | 2,54 | 0 | 1.125.000 | 0,00 | 0,85 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong | Tersedianya biaya bulan bakti gotong royong ke nagari | 36 | 24.075.000 | 0 | - | 12 | 8.025.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Persentase data/informasi yang akurat | 100 | 70.929.850 | 32 | 43.745.950 | 18 | 13.955.000 | 0 | - | - | - | 32 | 43.745.950 | 32,00 | 61,67 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Publikasi dan Promosi daerah | Jumlah promosi daerah yang diikuti (kali) | 6 | 70.929.850 | 3 | 43.745.950 | 1 | 13.955.000 | 0 | - | - | - | 3 | 43.745.950 | 50,00 | 61,67 | |
| F | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 20.880.000 | 115 | - | 30 | 6.960.000 | 0 | - | - | - | 115 | - | 76,67 | 0,00 | Kec. Lunang |
| | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 25 | Fasilitasi Penyelenggaraan Paten | terselenggaranya pelayanan PATEN (bln) | 36 | 20.880.000 | 0 | - | 12 | 6.960.000 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD | 100 | 52.402.670 | 32 | 23.104.250 | 18 | 18.665.000 | 0 | 9.460.000 | - | 50,68 | 32 | 32.564.250 | 32,00 | 62,14 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 09 | Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 52.402.670 | 3 | 23.104.250 | 1 | 18.665.000 | 1 | 9.460.000 | 100,00 | 50,68 | 4 | 32.564.250 | 66,67 | 62,14 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Nagari tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (nagari) | 100 | 59.900.000 | 50 | 57.505.285 | 18 | 26.900.000 | 2 | 600.000 | 11,11 | 2,23 | 52,00 | 58.105.285 | 52,00 | 97,00 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 04 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari | umlah nagari yang dibina | 60 | 29.950.000 | 30 | 22.676.686 | 10 | 12.300.000 | 0 | - | - | - | 30 | 22.676.686 | 50,00 | 75,72 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 19 | 05 | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari | umlah nagari yang dibina | 60 | 29.950.000 | 30 | 34.828.599 | 10 | 14.600.000 | 2 | 600.000 | 20,00 | 4,11 | 32 | 35.428.599 | 53,33 | 118,29 | |
| L | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program Pemantapan Otonomi daerah | persentase penyelenggaraan otonomi daerah | 95 | 22.800.000 | 80 | - | 20 | 7.600.000 | 0 | - | - | - | 80,00 | - | 84,21 | 0,00 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 09 | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | rapat-raat koordinasi muspika (bln) | 36 | 22.800.000 | 0 | - | 12 | 7.600.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Nilai SAKIP kecamatan (skor) | 72 | 250.029.600 | 71 | 91.301.429 | - | 0,00 | - | - | - | 71,00 | 91.301.429 | 98,61 | 36,52 | Kec. Lunang | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | laporan kinerja (dokumen) | 6 | 50.769.000 | 3 | 16.685.872 | - | 0 | - | - | - | 3 | 16.685.872 | 50,00 | 32,87 | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 06 | 10 | Penyusunan perencanaan anggaran | Renja dan RKA (dokumen) | 24 | 199.260.600 | 16 | 74.615.557 | - | 0 | - | - | - | 16 | 74.615.557 | 66,67 | 37,45 | | |
| N | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program pengembangan pemasaran pariwisata | persentase Promosi budaya daerah dan potensi sumber daya lokal (persen) | 100 | 70.929.850 | 50 | 32.668.300 | - | 0 | - | - | - | 50 | 32.668.300 | 50,00 | 46,06 | Kec. Lunang | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Pelaksanaan festival langkisau | Pameran Budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal Kecamatan Silaut (kali) | 6 | 70.929.850 | 3 | 32.668.300 | - | 0 | - | - | - | 3 | 32.668.300 | 50,00 | 46,06 | | |
| O | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pendidikan Politik masyarakat | Persentase masyarakat yang terbina | 80 | 23.205.000 | 52 | 8.819.300 | - | 0 | - | - | - | 52 | 8.819.300 | 65,00 | 38,01 | Kec. Lunang | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------------------------------|----|-----|----|----|----|----|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | K | Rp. | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 00 | 01 | 15 | 15 | 21 | 27 | Facilitasi penyelenggaraan Pilwana | kegiatan Pilwana yang difasilitasi | 5 | 23.205.000 | 2 | 8.819.300 | | | 0 | - | | | 2 | 8.819.300 | 40,00 | 38,00603318 | |
| V | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 1.Peringkat MTQ Pesisir Selan. 2.Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif. | 100 | 170.530.000 | 56 | 96.435.000 | | | 0 | - | | | 56,00 | 96.435.000 | 56,00 | 56,55 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 01 | Penunjang kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | Jumlah MTQ yang diikuti (kali) | 6 | 170.530.000 | 3 | 96.435.000 | | | 0 | - | | | 3 | 96.435.000 | 50,00 | 56,55 | |
| Q | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | persentase pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi | 100 | 510.194.374 | 52 | 208.877.656 | | | 0 | - | | | 52,00 | 208.877.656 | 52,00 | 40,94 | Kec. Lunang |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 01 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 224.265.159 | 30 | 122.635.400 | | | 0 | - | | | 30 | 122.635.400 | 50,00 | 54,68 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 02 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 20.003.563 | 3 | 10.258.050 | | | 0 | - | | | 3 | 10.258.050 | 50,00 | 51,28 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 03 | Perencanaan pembangunan kecamatan | Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 52.402.670 | 3 | 25.485.550 | | | 0 | - | | | 3 | 25.485.550 | 50,00 | 48,63 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 05 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 38.314.412 | 36 | 20.753.100 | | | 0 | - | | | 36 | 20.753.100 | 50,00 | 54,17 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 06 | Facilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 175.208.570 | 56 | 29.745.556 | | | 0 | - | | | 56 | 29.745.556 | 37,33 | 16,98 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,42 | 46,36 | | |
| Peringkat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SR | | |
| XV | | | | | | | KECAMATAN SILAUT | | 3.192.156.602 | | 1.593.948.144 | | 626.050.700 | | 142.189.650 | | | | 1.736.137.794 | | | | |
| A | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran bln | 72 | 1.271.464.002 | 36 | 773.360.694 | 12 | 281.728.950 | 3,00 | 94.496.300 | 25,00 | 33,54 | 39,00 | 867.856.994 | 54,17 | 68,26 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 02 | Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/ bulan) | 72 | 50.769.000 | 36 | 17.908.500 | 12 | 3.720.000 | 3 | 1.010.000 | 25,00 | 27,15 | 39 | 18.918.500 | 54,17 | 37,26 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan (bulan) | 72 | 199.260.600 | 36 | 130.750.000 | 12 | 65.400.000 | 3 | 17.250.000 | 25,00 | 26,38 | 39 | 148.000.000 | 54,17 | 74,27 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor (bulan) | 72 | 202.547.836 | 36 | 107.153.300 | 12 | 48.440.000 | 3 | 11.132.000 | 25,00 | 22,98 | 39 | 118.285.300 | 54,17 | 58,40 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bulan) | 72 | 66.547.812 | 36 | 35.318.094 | 12 | 10.959.450 | 3 | 4.679.300 | 25,00 | 42,70 | 39 | 39.997.394 | 54,17 | 60,10 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan pencahayaan | -Tersedianya barang cetakan (buku) -Tersedianya penggantian dokumen (lembar) | 36 116.875 | 16.255.000 23.375.000 | 24 56.875 | 12.178.400 11.375.000 | 12 22.375 | 3.841.000 4.475.000 | 5 12,060 | 1.530.500 2.412.000 | 41,67 53,90 | 39,85 53,90 | 29 68,935 | 13.708.900 13.787.000 | 80,56 58,98 | 84,34 58,98 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan (bulan) | 72 | 13.691.130 | 36 | 6.743.500 | 12 | 1.223.500 | 3 | 549.000 | 25,00 | 44,87 | 39 | 7.292.500 | 54,17 | 53,26 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (jenis) | 6 | 4.641.520 | 3 | 3.820.000 | 1 | 1.800.000 | 0 | - | - | - | 3 | 3.820.000 | 50,00 | 82,30 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----------|---|----|----|----|----|----|---|--|-----|-------------|----|-------------|----|-------------|------|------------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | -Tersedianya makan minum rapat (bulan) | 72 | 40.095.000 | 36 | 34.237.500 | 12 | 8.085.000 | 3 | 2.469.500 | 25,00 | 30,54 | 39 | 36.707.000 | 54,17 | 91,55 | |
| | | | | | | | | -Tersedianya makan minum tamu (bulan) | 72 | 45.375.000 | 36 | 17.875.000 | 12 | 2.695.000 | 3 | 539.000 | 25,00 | 20,00 | 39 | 18.414.000 | 54,17 | 40,58 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (bulan) | 72 | 197.033.000 | 36 | 123.882.000 | 12 | 34.500.000 | 3 | 6.550.000 | 25,00 | 18,99 | 39 | 130.432.000 | 54,17 | 66,20 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah (bulan) | 72 | 382.943.104 | 36 | 258.728.000 | 12 | 92.940.000 | 3 | 43.275.000 | 25,00 | 46,56 | 39 | 302.003.000 | 54,17 | 78,86 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 01 | 22 | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan SKPD | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) | 35 | 28.930.000 | 21 | 13.391.400 | 7 | 3.650.000 | 3 | 3.100.000 | 42,86 | 84,93 | 24 | 16.491.400 | 68,57 | 57,00 | |
| B | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur (bln) | 72 | 423.067.585 | 36 | 299.106.100 | 12 | 133.724.000 | 3 | 24.459.350 | 25,00 | 18,29 | 39 | 323.565.450 | 54,17 | 76,48 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) | 45 | 25.209.890 | 36 | 61.853.000 | 12 | 4.050.000 | 0 | - | - | - | 36 | 61.853.000 | 80,00 | 245,35 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (unit) | 12 | 51.645.000 | 6 | 31.200.000 | 2 | 15.000.000 | 0 | - | - | - | 6 | 31.200.000 | 50,00 | 60,41 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit kantor) | 6 | 53.854.000 | 3 | 52.857.000 | 1 | 42.539.000 | 1 | 10.000.000 | 100,00 | 23,51 | 4 | 62.857.000 | 66,67 | 116,72 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (unit) | 24 | 273.794.695 | 12 | 146.596.100 | 4 | 68.535.000 | 1 | 13.959.350 | 25,00 | 20,37 | 13 | 160.555.450 | 54,17 | 58,64 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) | 96 | 18.564.000 | 32 | 6.600.000 | 13 | 3.600.000 | 2 | 500.000 | 15,38 | 13,89 | 34 | 7.100.000 | 35,42 | 38,25 | |
| C | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah Kasus yang ditangani/ fasilitas | 6 | 56.000.000 | 0 | - | 2 | 17.200.000 | 0,00 | 3.292.250 | - | 19,14 | 0,00 | 3.292.250 | 0,00 | 5,88 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 15 | Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Transtibum | Jumlah penyelesaian permasalahan transtibum yang difasilitasi | 6 | 56.000.000 | 0 | - | 2 | 17.200.000 | 1 | 3.292.250 | 50,00 | 19,14 | 1 | 3.292.250 | 16,67 | 5,88 | |
| D | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI | 100 | 98.767.141 | 33 | 60.553.600 | 18 | 21.935.000 | 0,00 | - | - | - | 33,00 | 60.553.600 | 33,00 | 61,31 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | 06 | Kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN (kali) | 6 | 98.767.141 | 3 | 60.553.600 | 1 | 21.935.000 | 0 | - | - | - | 3 | 60.553.600 | 50,00 | 61,31 | Kec. Silaut |
| E | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran | 100 | 30.265.900 | 32 | 13.757.400 | 18 | 4.987.500 | 0 | - | - | - | 32 | 13.757.400 | 32,00 | 45,46 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 16 | 13 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNP (Bantuan Pangan Non Tunai) | Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran (10 nagari*5 th) | 50 | 30.265.900 | 20 | 13.757.400 | 10 | 4.987.500 | 0 | - | - | - | 20 | 13.757.400 | 40,00 | 45,46 | Kec. Silaut |
| F | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari | Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif | 100 | 244.268.722 | 32 | 140.332.550 | 20 | 29.672.000 | 0 | 4.510.000 | - | 15,20 | 32,00 | 144.842.550 | 32,00 | 59,30 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 15 | Pembinaan PKK Kecamatan | Jumlah PKK Nagari yang dibina (10 nagari x 6 tahun) | 60 | 224.265.159 | 30 | 129.367.100 | 10 | 27.442.000 | 1 | 4.510.000 | 10,00 | 16,43 | 31 | 133.877.100 | 51,67 | 59,70 | |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|-----|-------------|----|-------------|----|------------|------|-----------|-----------------|-------|------------|-------------|---------------------|--------|-------------|
| | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 24 | 16 | Pembinaan bulan bhakti gotong royong | Jumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakan (kali) | 6 | 20.003.563 | 3 | 10.965.450 | 1 | 2.230.000 | 0 | - | - | - | 3 | 10.965.450 | 50,00 | 54,82 | |
| G | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Persentase data/informasi yang akurat | 100 | 70.929.850 | 32 | 43.745.950 | 18 | 19.275.000 | 0 | - | - | - | 32 | 43.745.950 | 32,00 | 61,67 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 15 | 10 | Kegiatan Publikasi dan Promosi daerah | Jumlah promosi daerah yang diikuti (kali) | 6 | 70.929.850 | 3 | 43.745.950 | 1 | 19.275.000 | 0 | - | - | - | 3 | 43.745.950 | 50,00 | 61,67 | |
| H | 5 | 00 | 01 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 150 | 175.208.570 | 75 | 31.285.000 | 30 | 3.850.000 | 0 | - | - | - | 75 | 31.285.000 | 50,00 | 17,86 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 18 | 25 | Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu | jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (rekomendasi) | 150 | 175.208.570 | 75 | 31.285.000 | 30 | 3.850.000 | 0 | - | - | - | 75 | 31.285.000 | 50,00 | 17,86 | |
| I | 5 | 00 | 01 | 15 | 18 | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Jumlah Kawasan strategis yang dibangun | 10 | 113.165.400 | 2 | 7.466.400 | 2 | 6.460.000 | 0 | - | - | - | 2 | 7.466.400 | 20,00 | 6,60 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 18 | 02 | Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial (nagari) | 10 | 30.786.000 | 2 | 4.056.400 | 2 | 3.230.000 | 0 | - | - | - | 2 | 4.056.400 | 20,00 | 13,18 | |
| | | | | | | | | Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan (nagari) | 10 | 82.379.400 | 2 | 3410000 | 2 | 3.230.000 | 0 | - | - | - | 2 | 3.410.000 | 20,00 | 4,14 | |
| J | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD | 100 | 52.402.670 | 32 | 23.104.250 | 18 | 14.252.500 | 0 | 7.562.000 | - | 53,06 | 32 | 30.666.250 | 32,00 | 58,52 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 09 | Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah Musrenbang RKPD yang di selenggarakan di tingkat kecamatan (kali) | 6 | 52.402.670 | 3 | 23.104.250 | 1 | 14.252.500 | 1 | 7.562.000 | 100,00 | 53,06 | 4 | 30.666.250 | 66,67 | 58,52 | |
| K | 5 | 00 | 01 | 15 | 17 | | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Persentase peningkatan PAD (persen) | 100 | 23.205.000 | 32 | 14.761.900 | 20 | 7.093.750 | 0 | 1.348.750 | - | 19,01 | 32 | 16.110.650 | 32,00 | 69,43 | Kec. Silaut |
| | 00 | 01 | 15 | 15 | 17 | 84 | Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 | Persentase penerimaan PBB terhadap target (persen) | 100 | 23.205.000 | 32 | 14.761.900 | 20 | 7.093.750 | 5 | 1.348.750 | 25,00 | 19,01 | 37 | 16.110.650 | 37,00 | | |
| L | 5 | 00 | 01 | 56 | 19 | 07 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik | 100 | 29.950.000 | 32 | 29.888.700 | 20 | 5.967.500 | 0 | 2.642.500 | - | 44,28 | 32 | 32.531.200 | 32,00 | 108,62 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 56 | 19 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | terlaksananya pembinaan pemerintahan nagari | 60 | 29.950.000 | 20 | 29.888.700 | 10 | 5.967.500 | 2 | 2.642.500 | 20,00 | 44,28 | 22 | 32.531.200 | 36,67 | 108,62 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | | Program Pematapan Otonomi Daerah | Persentase koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan | 100 | 38.314.412 | 32 | 18.985.400 | 18 | 4.895.000 | 0,00 | - | - | - | 32,00 | 18.985.400 | 32,00 | 49,55 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 47 | 09 | Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan | Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan (bulan) | 72 | 38.314.412 | 36 | 18.985.400 | 12 | 4.895.000 | 0 | - | - | - | 36 | 18.985.400 | 50,00 | 49,55 | |
| 14 | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | | Program Peningkatan IMTAQ | -Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam | 100 | 517.113.000 | 36 | 120.991.000 | 20 | 63.782.000 | 0,00 | 3.878.500 | - | 6,08 | 36,00 | 124.869.500 | 36,00 | 24,15 | Kec. Silaut |

| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8 / 7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10 / 5 X 100 % | | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|--|--|----|-------------|---|------------|----|------------|------|-----------|-----------------|-------|---------------------------|------------|---------------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 03 | Facilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) | Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi | 3 | 40.547.000 | 0 | - | 1 | 12.250.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 13 | Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ Kecamatan | Jumlah MTQ Tk.Kec yang diikuti (kali) | 6 | 170.530.000 | 3 | 84.382.500 | 1 | 30.452.000 | 0 | - | - | - | 3 | 84.382.500 | 50,00 | 49,48 | |
| | | | | | | | | Jumlah MTQ Tk.Kab yang diikuti (kali) | 4 | 165.000.000 | 2 | 36.608.500 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 36.608.500 | 50,00 | 22,19 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 20 | Lembaga Didikan Subuh | Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi | 33 | 45.693.000 | 0 | - | 11 | 13.805.000 | 3 | 3.878.500 | 27,27 | 28,09 | 3 | 3.878.500 | 9,09 | 8,49 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 57 | 20 | Safari Ramadhan Kecamatan | Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari | 3 | 45.693.000 | 0 | - | 1 | 7.275.000 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 21 | 06 | Pembinaan Pemuda Karang taruna | Jumlah organisasi pemuda yang dibina (kali) | 4 | 49.650.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| M | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | | Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman pangan | 10 | 48.034.350 | 4 | 16.609.200 | 2 | 11.227.500 | 0,00 | - | - | - | 4,00 | 16.609.200 | 40,00 | 34,58 | Kec. Silaut |
| | 5 | 00 | 01 | 15 | 56 | 20 | Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah produk unggulan yang dibina (nagan) | 10 | 48.034.350 | 4 | 16.609.200 | 2 | 11.227.500 | 0 | - | - | - | 4 | 16.609.200 | 40,00 | 34,58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 32,95 | 52,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peringkat Kinerja | | SR | R | |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2020, serta sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020.

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian nasional dan bahkan ekonomi global.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Secara Nasional

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut selama tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkandengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap kuat mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 tidak terlepas dari dampak positif kebijakan nasional dalam merespon ketidakpastian global. Satu sisi, respon kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian khususnya nilai tukar serta komitmen pemerintah untuk menjaga prospek kesinambungan fiskal mampu memberikan keyakinan pelaku ekonomi

untuk melakukan ekspansi usaha. Sisi lain, arah kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makro prudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong berlanjutnya kegiatan berusaha dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat di dukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum (Pemilu).

Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi.

Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan. Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah. Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua (Mapua) tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat

juga ditopang oleh membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan ekspor tambang di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara(Bali-Nusra) menurun, sehingga berdampak pada wilayah ini.

Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh melambatnya investasi. Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Perkembangan positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat kelompok bawah ditengah daya beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas yang menurun.

Pemulihan ekonomi nasional yang tetap berlanjut pada tahun 2018 di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat disebabkan oleh :

1. Permintaan domestik yang kuat banyak berperandalam memengaruhi ekspansi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018.

Permintaan domestik pada 2018 bertumbuh sebesar 5,62%, tertinggi sejak 2012, didorong pengeluaran konsumsi baik rumah tangga (RT), lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga (LNPR) maupun Pemerintah. Selain itu, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tinggi, ditopang investasi nonbangunan dan investasi bangunan, juga berkontribusi pada kenaikan permintaan domestik. Permintaan domestik yang kuat pada gilirannya dapat memitigasi kontribusi sektoreksternal yang pada 2018 secara neto tercatat negatif akibat kinerja ekspor yang melambat dan impor yang tinggi

2. Sektor Sekunder dan Tersier

Ekspansi perekonomian 2018 dari sisi Lapangan Usaha (LU) banyak ditopang sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan permintaan domestik, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran mencapai 4,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2017 sebesar 4,46%. Permintaan domestik yang meningkat mendorong peningkatan intermediasi kegiatan perdagangan besar dan kemudian berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di sektor perdagangan. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yakni Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF dan WB turut mendukung peningkatan kinerja perdagangan domestik. Sejalan dengan perkembangan ini, indeks penjualan eceran membaik yakni tumbuh sebesar 3,74%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2017 sebesar 2,89%. Selain itu, penjualan kendaraan bermotor juga meningkat sehingga mendorong perbaikan kinerja pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Perkembangan ekonomi digital turut berdampak positif kepada kinerja LU perdagangan besar dan eceran, LU informasi dan komunikasi, serta LU transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat kuat tercermin dalam penjualan *online* yang berada dalam tren meningkat dan mencatatkan pertumbuhan di atas 100%. Pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya mendorong aktivitas bisnis, tapi juga menyerap tenaga kerja informal. Bisnis *online* yang tumbuh pesat juga berpengaruh positif pada penggunaan data internet. Begitu pula pada LU transportasi dan pergudangan yang ikut mendapatkan pengaruh positif dari perkembangan bisnis *online* dari peningkatan belanja iklan, jasa transportasi pengiriman barang dan pengantaran penumpang, serta jasa logistik dan pergudangan.

3. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Perekonomian nasional yang tumbuh meningkat terutama ditopang kinerja perekonomian Jawa, Sumatera, dan Papua yang tumbuh

kuat. Perekonomian Jawa dan Sumatera pada 2018 kembali mencatatkan pertumbuhan yang meningkat, masing-masing mencapai 5,72% dan 4,54%. Permintaan domestik menjadi mesin utama pertumbuhan di kedua wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang meningkat juga ditopang oleh kinerja ekspor manufaktur yang membaik seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan. Sementara itu, perekonomian Mapua tumbuh tinggi mencapai 6,99% pada 2018 didorong oleh kinerja ekspor tambang yang meningkat. Pertumbuhan nasional tertahan oleh kinerja perekonomian yang menurun di Sulawesi, Bali-Nusra, dan Kalimantan. Pada 2018, perekonomian Sulawesi dan Bali-Nusra mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,65% dan 2,68%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Sulawesi disebabkan oleh kinerja investasi yang melambat seiring dengan telah selesainya pembangunan berbagai proyek infrastruktur berskala besar. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan Bali-Nusra terutama disebabkan oleh perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kontraksi hingga 4,56%. Kondisi tersebut disebabkan kinerja ekspor tambang yang menurun dan dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada paruh kedua 2018. Penurunan kinerja ekspor tambang juga menyebabkan perekonomian Kalimantan tumbuh melambat pada 2018 menjadi 3,91%.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, sesuai dengan Tema RKP 2020 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas' dengan 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Maka arahan nasional dan sekaligus menjadi target dibidang ekonomi adalah :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pada adalah 5,3 %– 5,5 % (lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yaitu 5,3 %)
2. Persentase kemiskinan nasional sebesar 8,5 – 9%
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,1 %
4. Gini Ratio sebesar 0,375 – 0,380
5. Inflasi diperkirakan pada angka 3 % dengan deviasi ± 1 %

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Ekonomi Sumatera Barat selama tahun 2018 tumbuh 5,14 %, melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,29 %. Perlambatan ekonomi terjadi karena terkontraksinya pertumbuhan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan dari negara mitra dagang terhadap pasokan bahan baku. Selain itu, meskipun melambat namun angka impor terus tumbuh didorong oleh impor BBM, pupuk, pakan ternak dan mesin untuk PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Konsumsi rumah tangga yang mempunyai pangsa terbesar dalam pembentukan PDRB sisi pengeluaran juga sedikit melambat pertumbuhannya secara tahunan. Di sisi lain, masuknya masa kampanye pileg dan pilpres menumbuhkan konsumsi LNPRT pada angka yang cukup tinggi sampai dengan akhir tahun. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga melonjak tinggi dibandingkan pertumbuhan negatif di tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi penawaran, hanya Lapangan Usaha perdagangan yang dapat tumbuh cukup signifikan. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya, yakni Lapangan Usaha transportasi pergudangan dan Lapangan Usaha industri pengolahan mencatatkan kontraksi pertumbuhan sampai dengan akhir tahun 2018.

Meskipun demikian, kesejahteraan daerah terpantau membaik ditunjukkan dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat sedikit membaik. Tergambar

dari menurunnya rasio gini Sumatera Barat yang pada tahun 2018 berada pada urutan terendah ke (tiga) di Sumatera dan juga ke 3 (tiga) secara nasional (sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018).

Berikut ini adalah indikator makro ekonomi Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 :

Tabel 3.1
Indikator Makro Ekonomi Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

| No. | Indikator Makro | Capaian Tahun 2018 % |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,14 % |
| 2 | Konsumsi Rumah Tangga | 4,70 |
| 3 | Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) | 6,54 |
| 4 | Konsumsi Pemerintah | 4,63 |
| 5 | Investasi | 3,29 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | -14,05 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 0,51 |
| 8 | Inflasi | 3,13 |

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018

Momentum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) diproyeksikan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sampai pada pertengahan tahun. Konsumsi rumah tangga tetap akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. dari sisi lapangan usaha, seluruh kinerja lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata diperkirakan akan meningkat antara lain : lapangan usaha/sector perdagangan, transportasi pergudangan dan penyediaan akomodasi makan/minum.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Arah Kebijakan Ekonomi 2019

Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya serta perkiraan tahun 2020, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

| No. | Indikator Makro | Capaian Tahun 2018 % |
|-----|------------------------------|----------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,53% |
| 2 | Inflasi | |
| 3 | PDRB (ADHB) | Rp. 15,76 T |
| 4 | Angka Kemiskinan | 6,52 % |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,50 |

Berdasarkan target indikator makro ekonomi di atas, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 diarahkan kepada :

1. Pengembangan sektor pariwisata dengan optimalisasi destinasi wisata utama Mandeh dan Carocok Painan sehingga diharapkan dapat mendorong sektor lain seperti perdagangan, akomodasi dan makan minum, industri dan lain-lain.
2. Pengembangan Kawasan berbasis komoditi yang saat ini sudah ditetapkan 4 (empat) kawasan perdesaan yaitu : Kecamatan Koto XI Tarusan (berbasis industri pariwisata), Batang Kapas (berbasis padi dan durian), Sutera (berbasis pertanian terpadu dan sapi potong) dan Silaut (berbasis perkebunan sawit dan sapi Bali)
3. Pengembangan pertanian organik
4. Terus melakukan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kecamatan
5. Penyediaan infrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah agar terjadinya peningkatan konektivitas antar daerah dalam kabupaten
6. Terus menurunkan angka kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2016-2021 tahun empat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, dan dana Hibah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2020 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;

2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi kebocoran pajak;
3. Mengembangkan konsep pelayanan teknologi informasi dan memberikan alternatif model pelayanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana perpajakan, terutama dalam menyimpan data wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 dihitung dengan asumsi bahwa proyeksi pendapatan mengalami penurunan sebesar 17,91% dari Tahun Anggaran 2018, dengan komponen terbesar pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 81,17%

Berdasarkan data berikut Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 - 2020 :

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2020

| URAIAN | REALISASI | | | PROYEKSI | | PERKIRAAN KENAIKAN (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | APBD TA 2016 (Rp) | APBD TA 2017 (Rp) | APBD TA 2018 (Rp) | APBD TA 2019 (Rp) | APBD TA 2020 (Rp) | |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 108,915,294,628 | 178,145,381,104 | 123,745,891,513 | 152,795,794,018 | 151,013,933,074 | (1,781,860,944) |
| Pajak daerah | 13,712,844,614 | 19,794,773,402 | 23,597,385,172 | 29,448,886,943 | 27,578,089,152 | (1,870,797,791) |
| Retribusi Daerah | 5,315,801,100 | 3,739,647,501 | 4,552,508,117 | 13,318,824,474 | 13,407,761,321 | 88,936,847 |
| Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,075,232,597 | 5,410,693,493 | 5,711,160,313 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | - |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan | 84,811,416,317 | 149,200,266,708 | 89,884,837,911 | 103,528,082,601 | 103,528,082,601 | - |
| Pendapatan Dana Perimbangan | 1,135,914,934,283 | 1,109,254,189,839 | 1,120,389,365,019 | 1,238,326,471,000 | 1,218,181,340,118 | (20,145,130,882) |
| Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak | 15,939,550,382 | 22,703,709,356 | 17,129,540,309 | 21,552,030,000 | 21,065,116,025 | (486,913,975) |
| Dana Alokasi Umum | 853,086,114,000 | 838,100,134,000 | 838,100,134,000 | 859,754,884,000 | 859,754,884,000 | - |
| Dana Alokasi Khusus | 266,889,269,901 | 248,450,346,483 | 265,159,690,710 | 357,019,557,000 | 337,361,340,093 | (19,658,216,907) |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 213,110,628,522 | 227,658,855,928 | 280,364,561,176 | 359,170,384,892 | 67,623,925,492 | (291,546,459,400) |
| Pendapatan Hibah | 19,000,000,000 | 10,223,786,137 | 68,383,721,833 | 99,293,759,400 | 4,000,000,000 | (95,293,759,400) |
| Dana Darurat | - | - | - | - | - | - |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 54,814,938,522 | 56,813,212,791 | 57,274,472,343 | 63,623,925,492 | 63,623,925,492 | - |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 117,965,690,000 | 154,021,857,000 | 154,706,367,000 | 196,252,700,000 | | (196,252,700,000) |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah | 21,330,000,000 | 6,600,000,000 | - | - | | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,457,940,857,433 | 1,515,058,426,871 | 1,524,499,817,708 | 1,750,292,649,910 | 1,436,819,198,684 | (313,473,451,226) |

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Sedangkan untuk target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2018

| TAHUN | ANGGARAN | PENDAPATAN ASLI DAERAH | DANA PERIMBANGAN | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | REALISASI | | | |
| 2016 | Target | 110,964,945,746 | 1,154,699,165,920 | 203,601,816,902 |
| | Realisasi | 108,915,294,628 | 1,135,914,934,283 | 213,110,628,522 |
| | % | 98.15 | 98.37 | 104.67 |
| 2017 | Target | 186,253,728,401 | 1,130,054,483,211 | 223,233,896,894 |
| | Realisasi | 178,145,381,104 | 1,109,254,189,839 | 227,658,855,928 |
| | % | 95.65 | 98.16 | 101.98 |

| TAHUN | ANGGARAN | PENDAPATAN ASLI DAERAH | DANA PERIMBANGAN | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | REALISASI | | | |
| 2018 | Target | 150,064,411,839 | 1,145,399,229,643 | 313,570,007,452 |
| | Realisasi | 123,745,891,513 | 1,120,389,365,019 | 280,364,561,176 |
| | % | 82.46 | 97.82 | 89.41 |

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang diadopsi ke dalam program dan kegiatan sesuai pagu indikatif APBD sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja bantuan keuangan kepada desa/nagari diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
6. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 prioritas pembangunan tahun 2019.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2016 - 2020

| URAIAN | REALISASI | | | PROYEKSI | | PERKIRAAN KENAIKAN (Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | APBD TA 2016 (Rp) | APBD TA 2017 (Rp) | APBD TA 2018 (Rp) | APBD TA 2019 (Rp) | APBD TA 2020 (Rp) | |
| BELANJA DAERAH | | | | | | - |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 920,421,272,724 | 917,660,523,348 | 928,226,678,152 | 999,164,449,985 | 680,307,946,974 | (318,856,503,010) |
| BELANJA LANGSUNG | 580,227,875,621 | 589,805,243,275 | 640,794,272,437 | 814,789,520,264 | 803,548,636,710 | (11,240,883,554) |
| | - | | | | | - |
| JUMLAH BELANJA | 1,500,649,148,345 | 1,507,465,766,623 | 1,569,020,950,589 | 1,813,953,970,249 | 1,483,856,583,684 | (330,097,386,565) |

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Sedangkan untuk target dan realisasi belanja daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2018

| TAHUN | ANGGARAN | BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | TOTAL BELANJA |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | REALISASI | | | |
| 2016 | Target | 1,127,730,237,386 | 671,694,172,433 | 1,799,424,409,819 |
| | Realisasi | 920,421,272,724 | 580,227,875,621 | 1,500,649,148,345 |
| | % | 81.62 | 86.38 | 83.40 |
| 2017 | Target | 957,717,534,015 | 725,860,668,904 | 1,683,578,202,920 |
| | Realisasi | 928,226,678,152 | 640,794,272,437 | 1,569,020,950,589 |
| | % | 96.92 | 88.28 | 93.20 |
| 2018 | Target | 960,102,208,847 | 777,340,251,949 | 1,737,442,460,796 |
| | Realisasi | 928,226,678,152 | 640,794,272,437 | 1,569,020,950,589 |
| | % | 96.68 | 82.43 | 90.31 |

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dengan belanja daerah. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2018. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2020

| URAIAN | REALISASI | | | PROYEKSI | | PERKIRAAN KENAIKAN (Rp) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | APBD TA 2016 (Rp) | APBD TA 2017 (Rp) | APBD TA 2018 (Rp) | APBD TA 2019 (Rp) | APBD TA 2020 (Rp) | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | - |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| SILPA | 156,389,808,222 | 114,386,709,414 | 95,483,699,184 | 23,523,935,339 | - | (23,523,935,339) |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 18,835,780,000 | 93,597,200 | | 63,037,385,000 | 63,037,385,000 | - |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1,964,297,500 | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Piutang Daerah | 690,114,604 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 177,880,000,326 | 114,480,306,614 | 95,483,699,184 | 86,561,320,339 | 63,037,385,000 | - |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 20,785,000,000 | 21,333,650,000 | 16,500,000,000 | 10,900,000,000 | 4,000,000,000 | (6,900,000,000) |
| Pembayaran Pokok Utang | - | 9,417,890,000 | 9,417,890,000 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | - |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 20,785,000,000 | 30,751,540,000 | 25,917,890,000 | 22,900,000,000 | 16,000,000,000 | (6,900,000,000) |
| PEMBIAYAAN NETTO | 157,095,000,326 | 83,728,766,614 | 69,565,809,184 | 63,661,320,339 | 47,037,385,000 | 6,900,000,000 |

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Sedangkan untuk target dan realisasi pembiayaan dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2018

| TAHUN | ANGGARAN | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
|-------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| | REALISASI | | |
| 2016 | Target | 243,167,828,222 | 20,785,000,000 |
| | Realisasi | 177,880,000,326 | 20,785,000,000 |
| | % | 73.15 | 100.00 |
| 2017 | Target | 144,036,094,414 | 33,388,000,000 |
| | Realisasi | 83,728,766,614 | 30,751,540,000 |
| | % | 58.13 | 92.10 |
| 2018 | Target | 154,358,811,862 | 25,950,000,000 |
| | Realisasi | 95,483,699,184 | 25,917,890,000 |
| | % | 61.86 | 99.88 |

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD, hasil evaluasi RKPD tahun berjalan (tahun 2019), isu-isu strategis daerah, serta hasil musrenbang RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD tahun 2020 dirumuskan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 yang dipadu-selaraskan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Pemerintah tahun 2020 serta berdasarkan penjarangan aspirasi masyarakat secara berjenjang melalui musrenbang tingkat Nagari, musrenbang tingkat Kecamatan dan musrenbang Kabupaten.

Dengan demikian, RKPD tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif yang telah disusun melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial semenjak proses musrenbang di tingkat nagari dilaksanakan. Holistik-Tematik artinya bahwa RKPD tahun 2019 disusun dengan pendekatan yang menyeluruh, melihat permasalahan secara utuh untuk mencapai tujuan utama yang ditetapkan secara fokus. Integratif artinya bahwa perencanaan pembangunan yang disusun memperhatikan penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan terpadu. Dengan pendekatan ini, maka program/kegiatan prioritas dari suatu perangkat daerah akan saling bersinergi dengan program/kegiatan prioritas di perangkat daerah lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Sedangkan pendekatan spasial maksudnya bahwa rencana pembangunan yang disusun dengan memperhatikan unsur kewilayahan, lokasi prioritas yang diketahui detailnya (koordinat) serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pemanfaatan ruangnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 telah menetapkan visi pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu, “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera**”. Visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Tujuan dari misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran. Tujuan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima dengan sasaran 1). Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2). Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah dengan sasaran 1). Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan; 2). Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial.
3. Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal dengan sasaran 1). Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal; 2) terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.
4. Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri dengan sasaran 1). Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan; 2). Terwujudnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
5. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum dengan sasaran 1). Terwujudnya peran struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat; 2). Meningkatnya keberdayaan organisasi dan kelembagaan masyarakat.

4.1.2. Keterkaitan Tujuan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Nasional harus dijabarkan kesemua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang terdapat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.1

Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

| Agenda Prioritas pembangunan nasional | Sasaran pembangunan nasional | Tujuan Pembangunan Sumatera Barat | Sasaran Pembangunan Sumatera Barat | Tujuan pembangunan Pesisir Selatan | Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara; | | | | | |
| 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; | | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya transparansi dan | <ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima | <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | 3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif | akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | |
| 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; | | | | | |
| 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; | | 1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman, dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan | 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama | Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum. | 1. Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat 2. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|
| | | 2. Penguatan kelembagaan agama dan adat | 3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) 1. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam masalah sosial 2. Meningkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat 3. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat | | masyarakat |
| 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia | | 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai | 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya integritas peserta didik 1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>agama dan adat</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna</p> <p>5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak</p> | <p>1. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja</p> <p>2. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca</p> <p>1. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata</p> <p>2. meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana</p> <p>3. meningkatnya kesadaran masyarakat</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | | <p>dalam berolahraga</p> <p>4. meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan</p> <p>5. meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak</p> | | |
| <p>6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional;</p> | | <p>1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan</p> <p>2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan</p> | <p>1. meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</p> <p>1. meningkatnya ketahan dan keragaman konsumsi pangan</p> <p>2. meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis</p> <p>3. meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan</p> <p>1. meningkatnya</p> | <p>1. Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing</p> | <p>1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan</p> <p>2. Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah</p> <p>3. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | | <p>dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan</p> <p>4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya</p> <p>5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal</p> | <p>pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman</p> <p>1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara</p> <p>1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka</p> <p>2. Menuntaskan Penanganan Daerah Tertinggal</p> <p>3. Menurunnya Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> | | |
| 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan | | 1. meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | 1. meningkatnya kualitas jalan provinsi 2. meningkatnya pelayanan perhubungan/transporta | 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur | 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| <p>sektor- sektor strategis ekonomi domestic;</p> | | <p>2. meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>3. Meningkatkan budaya dan</p> | <p>si</p> <p>3. meningkatnya keselamatan lalu lintas</p> <p>4. meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air</p> <p>5. meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan , lingkungan dan bangunan gedung</p> <p>6. meningkatnya pemanfaat energy baru dan terbarukan (EBT)</p> <p>1. meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang</p> <p>2. meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p> <p>3. terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan</p> <p>1. Berkurangnya resiko bencana</p> | <p>sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah</p> | <p>berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial</p> |
|---|--|---|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>perilaku masyarakat yang tanggap bencana</p> <p>meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</p> | <p>2. meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana</p> <p>1. terpeliharanya debit sungai</p> <p>2. meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut</p> | | |
| 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan | | | | 1. Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya | Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan peran lembaga adat |
| 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| restorasi social Indonesia | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat keterkaitan antara sasaran pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan di daerah. Namun terdapat beberapa sasaran yang tidak terkait dengan daerah karena memang telah menjadi kewenangan pusat. Dengan demikian, sesuai isu strategis diatas maka tema pembangunan Kab. Pesisir Selatan tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”**. Dengan tema tersebut diharapkan bahwa pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya kualitas SDM dan infrastruktur.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Nasional tahun 2020.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, telah ditetapkan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan rumusan isu strategis maka prioritas pembangunan nasional adalah 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat; 2) Penguatan konektivitas; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi; 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan 5) stabilitas keamanan nasional.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu, **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Berdasarkan tema tersebut, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan

kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selanjutnya, masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
4. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
5. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
6. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
7. Pengembangan pariwisata industry, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi
8. Pengembangan kemaritiman dan kelautan
9. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
10. Pelestarian lingkungan hidup dan peanggulangan bencana alam
11. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

4.2.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Tahun 2020

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 disamping tetap melanjutkan program/kegiatan prioritas pembangunan sebelumnya merupakan tahap pemantapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada prioritas pengembangan yang perlu

ditingkatkan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Terdapat 5 prioritas yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yakni:

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
2. pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas
3. Penyediaan infrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah
4. Peningkatan daya saing sektor unggulan
5. Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi

4.2.3.1. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 difokuskan pada lima program pembangunan terintegrasi tahun 2020 yaitu :

1. Program pengembangan pariwisata
2. Program revitalisasi pasar rakyat
3. Program pengembangan pertanian organik
4. Program pengembangan kawasan perdesaan berbasis kawasan
5. Program Gerakan Anti Kemiskinan (Progakin)

4.3. Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan dengan tujuan pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2020. Secara rinci, sinergitas prioritas nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2
Sinergitas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat | Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan |
|----|---|---|--|
| 1. | Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat | a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat d. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal | Peningkatan daya saing SDM |
| 2. | Penguatan Konektivitas | a. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur b. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam | Penyediaan infrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah |
| 3 | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi | a. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi b. Pengembangan kemaritiman dan kelautan | Pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas |
| 4 | Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air | a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam | Peningkatan daya saing sektor unggulan |
| 5 | Stabilitas Keamanan Nasional | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan | Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi |

Sumber : RPJMN, RPJMD Prov. Sumbar 2016-2021 dan RPJMD Kab. Pesisir Selatan 2016-2021

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun RKPD Tahun 2020 tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, mengacu dan memperhatikan sasaran, arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

RKPD Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sedang berjalan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan untuk perencanaan pembangunan tahun 2020, sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan isu prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana kerja pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2020 merupakan perencanaan integrasi program dan kegiatan dari semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah, dilakukan melalui beberapa tahap perencanaan yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat sebagai pemanfaat hasil dan penerima dampak dari pembangunan.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. Sumber biaya untuk merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah ini berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dibiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.

Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel. 5.1
Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020 | | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | Target | Rp. (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | | | 854.284.030,79 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | 762.797.275,48 | |
| PENDIDIKAN | | | | 116.883.410,21 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 4.423.650,07 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 3.859.801,07 | |
| Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 291.748,52 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | 4.099.480,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | APK PAUD (%) | 62% | 77% | | |
| | PAUD terakreditasi (lembaga) | 0 | 150 | | |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | 89.499.813,26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | APK SD / SDLB / Paket A (%) | 114,22% | 116,00% | | |
| | APM SD / SDLB (%) | 99,12% | 99,81% | | |
| | APK SMP / SMPLB / Paket B (%) | 101,61% | 104,49% | | |
| | APM SMP / SMPLB (%) | 89,90% | 90,26% | | |
| Program Pendidikan Menengah | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | APK SMA / SMK / SMLB / Paket C (%) | 92,52% | | | |
| | APM SMA/SMK/SMLB (%) | 77,82% | | | |
| | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 8,62% | | | |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | 10.169.415,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B (%) | 50% | 75% | | |
| | Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B (%) | 50% | 75% | | |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 3.258.015,69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Angka kelulusan SD/MI (%) | 100% | 100% | | |
| | Angka kelulusan SMP/MTS (%) | 99% | 100% | | |
| Program Pendidikan Luar Biasa | | | | | |
| | Jumlah lomba yang diikuti | 3 lomba | | | |
| Program Pendidikan Non Formal | | | | 1.281.486,49 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun (%) | 98,12% | 99,30% | | |
| KESEHATAN | | | | 404.052.198,95 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 2.666.600,50 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 102.304,61 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 53.844,53 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | 4.409.867,11 | Dinkes |
| | Terpenuhi kebutuhan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar | | 90% | | |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 4.267.727,99 | Dinkes |
| | Visite Rate | | 2,48 | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | 54.132,92 | Dinkes |
| | Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan | | 80% | | |
| Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Pustu/Rumah Sakit dan jaringannya | | | | 11.173.397,14 | Dinkes |
| | Cakupan Puskesmas | 2,35 | 2,50 | | |
| | Persentase Puskesmas/Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar | | 90% | | |
| Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan masyarakat | | | | 748.000,91 | Dinkes |
| | Persentase Nagari Siaga Aktif | | 60% | | |
| | Persentase Rumah Tangga ber PHBS | | 85% | | |
| Program Peningkatan Keselamatan ibu | | | | 884.039,00 | Dinkes |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------|--------|-----------------------|---|
| melahirkan dan anak | Menurunnya angka kematian Ibu Maternal (per 100.000 Kelahiran Hidup) | 55 | 92 | | |
| | Menurunnya angka kematian balita (Per 1000 Kelahiran hidup) | 35 | 31 | | |
| | Menurunnya angka kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) | 4,6 | 21 | | |
| Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | 36.300.214,51 | Dinkes |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase penduduk yang memiliki JKN | | 95% | | Dinkes |
| | Menurunnya prevalensi balita gizi kurang | 4,80 | 4,55 | 371.446,44 | |
| | Menurunnya persentase balita gizi buruk (%) | 8,9 | 6,6 | | |
| Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | 673.916,00 | Dinkes |
| Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Persentase puskesmas yang terakreditasi | | 100% | | Dinkes |
| | Succes Rate TB | 90% | 94% | 962.467,44 | |
| | Succes Rate DBD | 100% | 100% | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Succes Rate Malaria | 100% | 100% | | Dinkes |
| | Persentase Nagari ODF (Open Defecation Free) | | 75,27 | 874.093,00 | |
| | Persentase Nagari dengan Posbindu PTM | | 60% | 433.970,12 | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular | Persentase deteksi dini Kanker serviks | | 10% | | Dinkes |
| | Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa | | 95% | | |
| | | | | | |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru -paru Rumah Sakit | Persentase pemenuhan cakupan layanan rumah sakit | | 100% | 18.381.325,00 | RSUD M. Zein |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan operasional | | 100% | 64.466.334,87 | RSUD M. Zein |
| Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah sakit | | | | 7.228.516,86 | Dinkes |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rawat jalan dan Inap) | | 87.50% | | |
| Program Pengawasan obat dan Makanan | | | | 250.000.000,00 | Dinkes |
| | Persentase makanan dan obat-obatan beredar sesuai standar kesehatan | | 80 | | |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 119.632.402,47 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 2.610.786,69 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 30.530.698,42 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 172.787,10 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 42.160,27 | |
| Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (untuk tahun 2019 - 2021 nomenklatur Program disempurnakan menjadi |
| | Persentase Kondisi Jalan Baik | 23,00 | | | |
| | Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang) | | | | |
| | Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik | | | | |
| | Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km) | | | | |
| Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong | | | | 10.875.481,12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| | Persentase penurunan genangan air (%) | | 1,76 | | |
| | Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km) | | 30 | | |
| | persentase drainase jalan kondisi baik (%) | | 54 | | |
| Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Panjang jalan kabupaten yang Terpelihara (km) | 2333,18 | 333 | 4.087.210,91 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|-------|--------|---------------|---|
| | Persentase jembatan kabupaten Yang terpelihara (unit) | 5,62 | 78,65 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | 6.252.328,73 | Dinas PUPR dan BPBD |
| | Persentase kelengkapan sarana prasarana kebinamargaan | | 62,90 | | |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya | Persentase Irigasi kondisi baik (%) | 46,42 | 56,99 | 27.720.078,74 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pengelolaan |
| Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya | Volume air yang tertampung (m3) | | - | 222.206,26 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | 2.339.704,48 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| | Persentase penduduk berakses air minum / air bersih | 81,63 | 96,16 | | |
| | Persentase penduduk bersanitasi baik | 62,7 | 67,85 | | |
| Program Pengendalian Banjir | | | | 15.890.080,51 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | Persentase penurunan genangan air | | 1,76 | | |
| | Persentase bantaran sungai dan pantai yang aman | | 13,69 | | |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 53.844,53 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| | Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun | | 20% | | |
| | Persentase bangunan Strategis yang terbangun | | 12,50% | | |
| Program Pengaturan Jasa Konstruksi | | | | 27.495,28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase usaha jasa konstruksi yang memiliki izin (%) | 102 | 85 | | |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | 488.906,23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang | | 80% | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | 5.035.973,77 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan | | 60 | | |
| | Persentase RT yang terlayani pengelolaan lumpur tinja | | 50 | | |
| Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | | | | 4.124.091,09 | |
| | Pembangunan Jalan Desa (km) | | 25 | | perkimtan / PUPR |
| Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | 463.417,72 | |
| | persentase kegiatan yang tidak bermasalah dalam pelaksanaannya | | 100 | | |
| Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | 7.644.525,63 | |
| | Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah strategis | 25 | 46 | | |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peribadatan | | | | 1.050.625,00 | |
| | Persentase sarana peribadatan pemda kondisi baik (%) | | 75 | | |
| Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | 62.700.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Proposi Kondisi Jalan Baik | | 29,90% | | |
| | Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang) | | 39,58% | | |
| | Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik | | 84,72% | | |
| | Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km) | | 20 | | |
| Program Pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan | | | | 450.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase database jalan dan jembatan yang valid | | 95% | | |
| Program perencanaan tata ruang | | | | 1.800.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase kawasan strategis dan kawasan perkotaan yang memiliki Rencana detail tata ruang | | 50% | | |
| Program pemanfaatan ruang | | | | 110.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | | 80% | | |
| Program pembangunan sarana dan prasarana peribadatan | | | | 5.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase sarana peribadatan kewenangan daerah kondisi baik | | 85% | | |
| Program pembangunan turap/talud/bronjong | | | | 6.300.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Persentase kerusakan sungai yang tertangani | | 33% | | |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | | | | 728.301,66 | Dinas Pekerjaan Umum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------|--------|----------------------|--|
| Pertamanan | persentase taman kota kondisi baik (%) | | 90 | | dan Penataan Ruang |
| PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | 90.059.153,18 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.687.914,38 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 2.892.854,41 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 48.460.078,13 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 3.230.671,88 | |
| Program Pengembangan perumahan | | | | 3.384.494,34 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | Jumlah Dokumen Urusan Pengembangan Perumahan (bh) | | 2 | | |
| | Rasio rumah layak huni | | 0,2233 | | (APBD+APBN+DLL) |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | | 94,89 | | |
| Program Lingkungan Sehat perumahan | | | | 8.743.140 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | Rasio permukiman layak huni | | 97,09 | | |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) | | 0,0754 | | |
| | Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU | | 18,45 | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporann | persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu | | | | |
| Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | | 150.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | Persentase permukiman tertata (%) | | 97,08 | | |
| Program pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | | | | 21.510.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | Persentase kawasan permukiman tertata (%) | | 97,08 | | |
| KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN | | | | 28.418.433,65 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.901.016,31 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 797.571,94 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 219.276,04 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 119.361,70 | |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | 1.249.403 | Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ; Setda |
| | Persentase penegakan perda (%) | 96 | 99 | | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kesbang pol (setda) |
| Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | | | 1.241.571 | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| | Persentase penurunan tingkat kriminalitas | 3 | 3% | | |
| | Persentase penurunan pungli di Kabupaten Pesisir Selatan | | 90% | | |
| | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, keindahan) % | 95% | 99% | | |
| Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | | | | 336.799,37 | Setda (Bagian Kesbangpol) |
| | Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar | | 5% | | |
| Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | 2.367.944,22 | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran , Setda |
| | Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten | 0,39 | 0,52 | | |
| Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran | 60,94 | 73,58 | 451.104,74 | BPBD |
| | Persentase perangkat daerah yang memahami tupoksi dalam penanggulangan bencana (%) | 25% | 80% | | |
| Program Kesiapsiagaan | | | | 315.094,93 | BPPD |
| | Jumlah KSBS dibentuk (unit) | 5 | 15 | | |
| | Jumlah kelompok perempuan yang memahami resiko bencana | 10 | 50 | | |
| Program peningkatan kapasitas partisipasi | | | | 115.875,37 | BPBD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--------------|----------|----------------------|---|
| masyarakat dan pemangku lainnya dalam | Jumlah KSBN yang dibentuk | 5 | 35 | | |
| Program Penanganan tanggap darurat | | | | 377.144,70 | Satpol PP dan BPBD |
| | Persentase kejadian bencana diatasi | 75% | 80% | | |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana | | | | 11.328.889,38 | SAtpol PP & BPBD |
| | persentase sarpras penanggulangan bencana kondisi baik (%) | | 85 | | |
| Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | | | 7.523.108,37 | BPBD |
| | Panjang jalan dan jembatan pasca bencana yang direhabilitasi & direkonstruksi (m) | 54/8 | 2500/104 | | |
| Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana | | | | 74.272,72 | BPBD |
| | Persentase kejadian bencana yang terdata | 65% | 75% | | |
| SOSIAL | | | | 3.751.677,02 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 571.655,68 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 668.143,76 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 48.460,08 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | | | | 500.395,11 | Dinsos, PP & PA |
| | PMKS yang memperoleh bantuan (jiwa) | 12.271 | 23.720 | | |
| Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | | | | 451.961,76 | Dinsos, PP & PA, Kecamatan, bag perekon |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) | 83 | 80 | | |
| | Pengganan penyandang masalah kesejahteraan | 12.271 | 23.720 | | Kecamatan |
| Program pembinaan panti asuhan/panti jompo | | | | 598.424,00 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah anak panti yang mendapat pelayanan sosial (jiwa) | 235 | 235 | | |
| Program pembinaan lanjut usia terlantar | | | | 199.897,37 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial (jiwa) | - | 85 | | |
| Program pembinaan anak terlantar | | | | 107.299,53 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan dan bantuan (anak) | | 20 | | |
| Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | | | | 85.131,48 | Dinsos, PP & PA |
| | Cakupan penyandang cacat berat yang memperoleh jaminan sosial (jiwa) | 74 | 115 | | |
| Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK dan Penyakit Sosial lainnya). | | | | 125.267,72 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, pelatihan dan bimbingan (orang) | | 10 | | |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | 309.488,00 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah LKKS dan TKSK yang meningkat kinerjanya | 68 | 143 | | |
| Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan | | | | 85.552,55 | Dinsos, PP & PA |
| | Jumlah generasi muda yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (orang) | 100 | 100 | | |
| Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | | |
| | Jumlah organisasi perlindungan anak dan perempuan | 2 Organisasi | | | |
| Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari | | | | | Dinas Sosial |
| | Jumlah organisasi wanita yang dibina | 4 organisasi | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | 91.486.755,30 | |
| TENAGA KERJA | | | | 4.139.248,89 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 730.779,06 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 518.290,55 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 48.460,08 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--------|--------|----------------------|------------------|
| Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | | | | 254.670,63 | |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (%) | - | 8,5 | | Dinas Nakertrans |
| Program peningkatan kesempatan kerja | | | | 230.076,01 | |
| | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang) | 94 | 300 | | Dinas Nakertrans |
| | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) | 56,74 | 62,5 | | |
| Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan | | | | 66.395,69 | Dinas Nakertrans |
| | Angka sengketa pekerja dan pengusaha per tahun | - | 2 | | Dinas Nakertrans |
| Program Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja | | | | 2.290.576,87 | Dinas Nakertrans |
| | Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%) | - | 2 | | |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 1.210.508,88 | |
| Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | 158.143,66 | |
| | persentase nagari layak anak | | 6,59 | | Dinas Sosial |
| | persentase pembentukan dan pembinaan forum anak daerah di kecamatan | | 73,33 | | Dinas Sosial |
| Program penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | 232.000,00 | |
| | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | - | 74,20 | | |
| | persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | | 66,67 | | Dinas Sosial |
| Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | | | | 88.342,25 | |
| | Rasio KDRT (%) | - | 0,014 | | Dinas Sosial |
| Program penguatan dan pembangunan kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah | | | | 210.125,00 | |
| | Perentase kelembagaan daerah yang responsif gender (%) | | 70 | | |
| Program Perlindungan Anak | | | | 75.382,34 | |
| | Persentase penurunan kasus kekerasan anak (%) | | 6 | | |
| Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari | | | | 183.859,38 | |
| | Persentase peningkatan perempuan di nagari dan kecamatan (%) | | | | |
| Program Peningkatan Peran Serta Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan | | | | 262.656,25 | |
| | Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (%) | 8,77 | 9,5 | | |
| | Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%) | - | 5,35 | | Dinas Sosial |
| PANGAN | | | | 2.915.750,83 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 508.856,17 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 368.812,53 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 40.303,49 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | | | | 614.959 | Dinas Pangan |
| | - Ketersediaan Pangan Utama (kg/Jiwa/Thn) | 112,93 | 142 | | |
| | - Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3754 | 2480 | | |
| | - Ketersediaan protein (gram/kap/hari) | 83,73 | 71 | | |
| | - Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen | | | | |
| | 1. Harga Gabah | 4054 | ≥ HPP | | |
| | 2. Harga Beras | 7848 | ≥ HPP | | |
| | - Stabilitas Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen | 12,90 | CV ≤ 5 | | |
| | - Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat | 74,60 | 80 | | |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | 1.382.820 | Dinas Pangan |
| | - Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan : | | | | |
| | 1. Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) | 2320 | 2150 | | |
| | 2. Konsumsi protein (gram/kap/hari) | 59,2 | 57 | | |
| PERTANAHAN | | | | 15.667.152,01 | |
| Program Penyelesaian konflik-konflik | | | | 117.065 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| pertanahan | Penyelesaian kasus tanah negara (kasus) | - | 10 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & pemanfaatan Tanah | | | | 15.519.337 | Dinas Perkimtan dan BPKD |
| | Persentase luas tanah bersertifikasi (%) | - | 57 | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | | | | 30.750 | |
| | Jumlah sistem informasi yang ada | | ada | | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | 3.792.548,12 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 519.800,90 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 557.239,63 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumbur Daya Aparatur | | | | 37.691,17 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | 1.482.896,37 | Dinas LH |
| | Indeks Kualitas Air | C Dan D (Tercemar Sedang) | B (tercemar ringan) | | |
| | Indeks Kualitas Udara: | Diambang Kualitas Udara baik | Diambang Kualitas Udara baik | | |
| | Indeks Tutupan Lahan | 70,009 | 72,458 | | |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | 496.715,80 | Dinas LH |
| | Jumlah kampung pro-Iklm yang aktif (unit) | | 2 | | |
| | Calon penerima kalpataru (orang) | | 1 | | |
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan | | | | 633.591 | Dinas LH, Dinas PUTR |
| | Indeks Kualitas Air | C Dan D (Tercemar Sedang) | B (tercemar ringan) | | |
| | Indeks Kualitas Udara: | Diambang Kualitas Udara baik | Diambang Kualitas Udara baik | | |
| | Indeks Tutupan Lahan | 70,009 | 72,458 | | |
| Program peningkatan pengendalian polusi | | | | 64.613 | |
| | Pencapaian kualitas air | | dibawah baku mutu | | |
| Program pelestarian keanekaragaman hayati daerah kabupaten pesisir selatan | | | | | |
| | peningkatan luasan tutupan lahan (Ha) | | | | |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 6.788.649,81 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 722.292,40 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur | | | | 892.251,21 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 53.844,53 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | 5.120.262 | Dinas Adminduk Capil dan Kecamatan |
| | Rasio penduduk ber KTP bersatuan penduduk | 0,66 | 0,93 | | Dinas Adminduk Capil |
| | Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Keluarga | 1,66% | 97,99% | | Dinas Adminduk Capil |
| | Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | | 40,30% | | Dinas Adminduk Capil |
| | Kepemilikan akte kelahiran per 1000 pendduk | 224,46 | 684,79 | | Dinas Adminduk Capil |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 5.752.648,35 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.070.665,19 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur | | | | 32.306,72 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 42.155,81 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | | | BPM dan Kec |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| Pemerintah Desa/Nagari | Persentase nagari yang memiliki dokumen perencanaan yang baik | 10 | | | |
| | persentase nagari yang dibina dan di monev | | | | Bag Nagari Setda |
| Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | | | | | Bag Nagari Setda |
| | Persentase praktek kerja lapangan yang difalitasi | 100 | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pemerintahan Nagari | Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang nagari | | | | BAGian Nagari Setda |
| Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa | | | | 1.263.065 | |
| | Persentase nagari dengan tata kelola keuangan yang baik | 10 | 64,83 | | DPM&DPPKB dan Kecamatan |
| | Jumlah Desa Yang Maju dan mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | 4 | | DPM&DPPKB |
| Program Pengembangan lembaga sosial perdesaan | Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif membina kelompok (%) | 51,5 | 81,18 | 912.214,00 | |
| | Persentase PKK aktif (%) | 48 | 100 | | DPM&DPPKB dan Kecamatan |
| | persentase KAN yang aktif | 54,05 | 86,49 | | DPM&DPPKB |
| Program pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | | | | 953.250,00 | |
| | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif | 40% | 42% | | DPM&DPPKB |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari | | | | | DPM&DPPKB |
| | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan | 10 | | | |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa | | | | | DPM&DPPKB |
| | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari | 40 | | | |
| Program pemberdayaan lembaga pemerintahan desa/nagari | | | | 1.298.572,50 | |
| | persentase nagari memiliki lembaga pemerintahan aparatur | | 93,41 | | DPM&DPPKB |
| Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari | | | | | DPM&DPPKB |
| | Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif membina kelompok (%) | 51,5 | 81,18 | | |
| | Persentase PKK aktif (%) | 48 | 100 | | |
| | Jumlah Dasa Wisma Maju | - | 720 | | |
| | persentase KAN yang aktif | 54,05 | 86,49 | | |
| Program pengembangan kawasan pedesaan | | | | 180.419,24 | |
| | persentase kawasan pedesaan yang dikembangkan | 10 | 35,00 | | |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 7.262.621,11 | |
| Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Berencana | | | | 2.119.961,61 | |
| | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 100 | 100 | | |
| | Persentase klinik yang terpenuhi sarprasnya | 70 | 78 | | |
| Program Keluarga Berencana | | | | 2.550.000,00 | |
| | Rasio Apseptor KB (%) | 70,72 | 71,60 | | DPMDPP&KB, kecamatan |
| | Persentase KB Unmet Need | 18,50 | 18,80 | | |
| Program Pelayanan Keluarga Berencana | | | | 695.795,00 | |
| | Persentase KB Pria | 1,1 | 1,25 | | DPMDPP&KB, |
| | Persentase KB Wanita | 67,10 | 67,90 | | |
| | Persentase yang mengikuti KB MKJP | 20,00 | 20,70 | | |
| Program Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan KB/BKR yang Mandiri | | | | 86.250,00 | |
| | Jumlah BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, BKR dan BKL | 71 | 80 | | DPMDPP&KB, |
| | Jumlah kelompok UP2KS (usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga Sejahtera) | 73 | 73 | | |
| Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat | | | | 992.152 | |
| | Jumlah pelayanan informasi, promosi dan sosialisasi | | 24 | | DPMDPP&KB |
| Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | |
| | Jumlah Kelompok PIK remaja /Mahasiswa | 26 | | | DPMDPP&KB |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-------|---------|----------------------|-------------------|
| Program penguatan kelembagaan | | | | | |
| | persentase kelembagaan KB yang telah ada | | | | DPMDPP&KB |
| Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | | | | 461.250,00 | |
| | Persentase lembaga KB yang aktif | | 90 | | DPMDPP&KB |
| Program kemitraan Keluarga Berencana | | | | 357.212,50 | |
| | Persentase MKJP | 20,00 | 20,70 | | DPMDPP&KB |
| Program pembinaan institusi peduli KKBP (Kependudukan KB dan pembangunan keluarga) | | | | | |
| | persentase kampung KB yang dibina | | | | DPMDPP&KB |
| PERHUBUNGAN | | | | 18.249.952,31 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.104.162,87 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 966.241,73 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 45.767,85 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 111.871,49 | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 123.894,59 | |
| | Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana | 100 | 100 | | |
| Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | 948.125 | Dinas Perhubungan |
| | Jumlah halte (unit) | 25 | 33 | | |
| | Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit) | 1 | 4 | | |
| | Jumlah terminal (unit) | 2 | 5 | | |
| | Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%) | | 14 | | |
| Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | 800.000 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik (%) | - | 8,00 | | |
| | Persentase Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | - | 85 | | |
| Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | | | | 9.980.937,50 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas | | 3363 bh | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | | 808.951 | |
| | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) | 30 | 30 | | |
| | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi | - | 60 | | Dinas Perhubungan |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | | 2.300.000 | |
| | Jumlah halte (unit) | 25 | 33 | | |
| | Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit) | 1 | 4 | | |
| | Jumlah terminal (unit) | 2 | 5 | | |
| | Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%) | | 14 | | Dinas Perhubunga |
| Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | | | 470.000 | |
| | Jumlah Uji KIR angkutan umum (unit) | 954 | 8.500 | | |
| | Jumlah Kendaraan yang layak jalan | | 8.200 | | Dinas Perhubunga |
| Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpajakan | | | | 590.000 | 0 |
| | persentase kenaikan penerimaan dari retribusi parkir (%) | | 10 | | Dinas Perhubunga |
| KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | 8.044.421,33 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 834.024,65 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 672.561,27 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 36.668,13 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan | | | | |
| Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | | | | 256.250 | |
| | Persentase program daerah yang dipublikasikan (%) | | 70 | | Dinas Kominfo |
| Program Peningkatan Akses Informasi, | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-------|----------------|---------------------|--|
| Komunikasi dan Telekomunikasi | Cakupan layanan telekomunikasi (%) | - | 70 | | |
| | Persentase informasi publik yang mudah diakses | | 90 | | Dinas Kominfo |
| Program Penyelenggaraan E-Government | | | | 3.500.000 | |
| | Persentase cakupan perangkat daerah yang terintegrasi smartcity | | 100 | | |
| | Persentase cakupan kecaatan yang terintegrasi smartcity | | 100 | | |
| | Persentase cakupan puskesmas yang terintegrasi smartcity | | 100 | | |
| | Persentase cakupan nagari yang terintegrasi smartcity | | 87,91 | | |
| Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika | | | | 105.542 | |
| | Persentase OPD yang memiliki SDM TIK | | 85 | | Dinas Kominfo |
| Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | | | | 2.639.375,00 | |
| | Jumlah kerjasama dengan media massa | | 27 Media Massa | | Setda (Bagian Humas) |
| KOPERASI & UMKM | | | | 3.211.569,66 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 685.905,78 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 549.060,22 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 48.460,08 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase kesesuaian pelaksanaan nprogram dengan perencanaan | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | | 222.143,58 | |
| | Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT (%) | 36 | 49 | | Dinas KUPP |
| | Persentase koperasi aktif (%) | 55 | 67 | | |
| | Persentase koperasi dengan jumlah modal > 5 Milyar | - | 20 | | |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM | | | | 1.516.000,00 | |
| | Persentase UMKM (%) | 99,23 | 96,50 | | Dinas KUPP |
| Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | | | | 190.000,00 | |
| | Jumlah UMKM yang mengkases permodalan ke lembaga keuangan (unit) | | 300 | | Dinas KUPP |
| PENANAMAN MODAL | | | | 2.334.356,13 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 775.431,25 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 393.662,97 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 48.460,08 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | 420.289 | Dinas Penanaman Modal |
| | Nilai realiasi investasi PMA/PMDN (milyar Rp) | 62,5 | 76 | | |
| | Rasio daya seratenaga kerja | 33,5 | 36,5 | | |
| Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | 256.250 | Dinas Penanaman Modal |
| | Jumlah investor yang menanamkan modal | 9 | 14 | | |
| | Jumlah kerjasama investasi | 0 | 1 MoU | | Dinas Penanaman Modal |
| Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | | | | 440.263 | Dinas Penanaman Modal |
| | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 2500 | 3000 | | |
| KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 2.739.682 | |
| Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga | | | | 685.375,64 | |
| | peningkatan jumlah sarana olahraga (unit) | 3 | 15 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga |
| | Jumlah gedung olahraga (unit) | 12 | 19 | | |
| Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | | | | 965.001,28 | |
| | Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat | 2 | 6 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga |
| Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | | | | 1.089.305,38 | |
| | Peringkat pemuda pelopor | | 3 besar | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------|-------------------|---------------------|---|
| Program Pembinaan Olah Raga Berprestasi | Jumlah prestasi olah raga | 5 | 15 | | |
| | Jumlah atlet berprestasi (org) | 20 | 45 | - | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga, |
| STATISTIK | | | | 146.922,01 | |
| Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | | | | 146.922,01 | |
| | ketersediaan data statistik sektoral | 0 | 1 dok | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| PERSANDIAAN | | | | 230.024,21 | |
| Proram Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah | | | | 230.024,21 | |
| | Terlaksananya Pengamanan data Pemerintah Daerah | 0 | 15 PD | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| KEBUDAYAAN | | | | 6.076.660,00 | |
| Program Pengembangan Nilai Budaya | | | | 2.635.380,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Jumlah Grup kesenian/sanggar budaya yang berkembang (unit) | 66 | 70 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | 1.171.280,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan | 4 | 29 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan IMTAQ | | | | 2.270.000 | Bagian Kesra (Setda) |
| | Peringkat MTQ Pesisir Selatan | | 5 besar | | |
| KEPUSTAKAAN | | | | 1.213.861 | |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | 937.417,07 | |
| | Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Nagari, TBM dll (org/thn) | 5.000 | 40.000 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | 276.444,28 | |
| | Persentase Jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan | 55% | 70% | | |
| | Persentase jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan terakreditasi (%) | 10% | 50% | | |
| KEARSIPAN | | | | 1.710.178,00 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 775.155,46 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 448.031,73 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 63.429,83 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah | | | | 214.095,7 | |
| | Jumlah dokumen /arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan | - | 32 urusan pem- an | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | | | | 102.500 | |
| | persentase OPD, Nagari yang mengelolaa arsip secara baku (%) | - | 23,67 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana kearsipan | | | | 42.351,95 | |
| | persentase sarpras arsip kondisi baik | | 90% | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi | | | | 64.613,37 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Peningkatan angka kunjungan ke galeri Pesisir Selatan (org/thn) | | 750 org | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 65.383.715 | |
| PERIKANAN | | | | 8.253.396,20 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 847.458,00 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 397.562,44 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 53.790,69 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | persentase kesesuaian perencanaan Program/Kegiatan dengan pelaksanaan | | | | |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | 3.065.429,07 | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) | 37.909 | 44.440 | | Dinas Perikanan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|-----------|-----------|----------------------|---|
| | Jumlah Kelompok Usaha bersama (KUB) yang berkembang | 70 | 90 | | |
| | Jumlah Koperasi nelayan yang berkembang | 17 | 26 | | |
| Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | | | | 621.304 | |
| | Jumlah UPI Yang Menerapkan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik (Orang / UPI) | 3 | 15 | | Dinas Perikanan |
| | Jumlah kelompok pengolah dan pemasar (unit) | 34 | 62 | | |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | 3.267.852,50 | |
| | Jumlah Produksi Budidaya perikanan (ton) | 10327 | 16.763 | | Dinas Perikanan |
| | Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang) | 17 | 122 | | |
| | Jumlah UPB yang tersertifikasi CPIB (unit) | 2 | 8 | | |
| | Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN) | 60 | 85 | | |
| Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil | | | - | - | Kewenangan pindah ke Provinsi |
| Program Penagawasan sumberdaya kelautan dan perikanan | | | - | - | Kewenangan pindah ke Provinsi |
| | Jumlah pengawasan kelautan yang dilakukan | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | - | |
| | Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton) | 10.327 | | | Dinas Perikanan |
| | Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang) | 17 | 122 | | |
| | Jumlah UPB yang tersertifikasi CPIB (unit) | 2 | 8 | | |
| | Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN) | 60 | 85 | | |
| PARIWISATA | | | | 11.152.305,50 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | - | 718.740,74 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 398.460,30 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 43.075,63 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | 5.691.133,08 | |
| | jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan) | 4 | 9 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga |
| Program Pengembangan Pemasaran Wisata | | | | 3.360.593,41 | |
| | Angka kunjungan wisata (org) | 2.001.600 | 2.901.900 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga |
| Program Pengembangan Kemitraan | | | | 188.477,27 | |
| | Jumlah kelompok sadar wisata yang berkembang | 25 | 35 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga |
| Program pengembangan ekonomi kreatif | | | | 751.825,08 | |
| | Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang | 2 | 10 | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga, |
| Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Pariwisata | | | | | |
| | Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina | 25 | | | Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga, |
| PERTANIAN | | | | 28.164.989,94 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.797.798,39 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 770.089,82 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 101.766,16 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | | | | 6.324.907 | |
| | Jumlah Produksi Padi (Ton) | 317.373 | 306.530 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi jagung (ton) | 108.894 | 129.431 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi Cabe | 2.584 | 3.298 | | Distanhortbun |
| | Jumlah produksi bawang merah, | 242,7 | 255 | | Distanhortbun |
| | Jumlah produksi Buah-buahan | 28.840 | 30.313 | | Distanhortbun |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| | Jumlah Produksi Kelapa Sawit | 126.222 | 201.756 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi Karet | 10.641 | 11.184 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi gambir | 5.423 | 6.895 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi Pala | 171 | 335 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi kakao | 1.419 | 1.427 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi Kopi | 816 | 1.365 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Produksi Cengkeh | 317 | 335 | | Distanhortbun |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan | | | | 6.245.800 | |
| | persentase peningkatan Luas sawah beririgasi (%) | | 7,23 | | Distanhortbun |
| | persentase peningkatan pembangunan prasarana pertanian (%) | | 9,60 | | |
| Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan | | | | 2.026.910 | |
| | Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani | 0,089 | 0,103 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Penyuluh pertanian berprestasi | 2 | 2 | | Distanhortbun |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan | | | | | Distanhortbun |
| | Jumlah Kelompok petani perkebunan yang memperoleh fasilitas (Kelompok) | 2 | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | | | | | Distanhortbun |
| | Tercapainya swasembada dan Swasembada Pangan Berkelanjutan | 100 | | | |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan | | | | 2.718.680,00 | Distanhortbun |
| | Jumlah Kelompk Tani Pemamfaat Alsintan | 3 | 27 | | |
| | Nilai PDRB sektor pertanian (trilyun Rp) | 3,12 | 3,79 | | |
| | Jumlah Kelompok Tani yang menggunakan Teknologi Tepat Guna | 120 | 123 | | Distanhortbun |
| Program Peningkatan Kelembagaan Petani | | | | 2.413.798,00 | |
| | Jumlah Gapoktan berprestasi | - | 1 | | Distanhortbun |
| | Jumlah Kelompok Tani berprestasi | 2 | 1 | | |
| | Jumlah petani berprestasi | 0 | 1 | | |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan | | | | - | Distanhortbun |
| | Jumlah asosiasi produk perkebunan yang aktif | 1 | | | |
| Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian /Perkebunan | | | | 2.465.041,00 | |
| | Nilai PDRB sektor pertanian (trilyun Rp) | 3,12 | 3,79 | | Distanhortbun |
| Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | | | | 1.782.172,89 | |
| | Jumlah Populasi ternak (ekor) | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | - Sapi Potong | 80.146 | 83.005 | | |
| | - Kerbau | 8.271 | 8.532 | | |
| | - Kambing | 41.669 | 41.836 | | |
| | - Ayam Buras | 779.819 | 802.203 | | |
| | - Ayam Ras Petelur | 85.300 | 103.683 | | |
| | - Ayam Ras Pedaging | 552.500 | 1.348.877 | | |
| | - Itik | 147.921 | 153.927 | | |
| | | | | | |
| | Jumlah Produksi Ternak (kg) | | | | |
| | - Daging Sapi Potong | 1.173.571 | 1.317.058 | | |
| | - Daging Kerbau | 46.204 | 51.950 | | |
| | - Daging Kambing | 40.072 | 46.879 | | |
| | - Daging Ayam Buras | 836.356 | 860.363 | | |
| | - Daging Ayam Ras Petelur | 35.186 | 42.769 | | |
| | - Daging Ayam Ras Pedaging | 442.138 | 1.079.439 | | |
| | - Daging Itik | 61.017 | 63.495 | | |
| | - Telur Ayam Ras | 542.508 | 659.422 | | |
| | - Telur Ayam Buras | 327.524 | 336.925 | | |
| | - Telur Itik | 674.520 | 701.908 | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | | 731.286,41 | |
| | Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%) | n/a | 5 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan | | | | 386.405,05 | |
| | Jumlah Pasar ternak kondisi baik (unit) | 1 | 1 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Jumlah Event Promosi yang diikuti (event) | 3 | 3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Program Peningkatan Agribisnis peternakan | | | | 92.694,20 | |
| | Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak (kelp) | 4 | 4 | | Dinas Peternakan dan Keswan |
| Program peningkatan sarana prasarana peternakan | | | | 104.496,73 | |
| | Persentase peningkatan Sarana prasarana Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4) | 25,00 | 10 | | Dinas Peternakan dan Keswan |
| Program Peningkatan penerapan teknologi Peternakan | | | | 203.144,2763 | |
| | Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan pada kelompok (bh) | 5 | 5 | | Dinas Peternakan dan Keswan |
| Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menulat | | | | | |
| | persentase pengurangan anjing liar pembawa rabies | | | | Dinas Peternakan dan Keswan |
| KEHUTANAN | | | | - | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) | - | | | Keweangan pindah Pindah ke Provinsi |
| Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan | Berkembangnya hutan nagari dan hutan kemasyarakatan (Ha) | 0 Ha | | | Keweangan pindah Pindah ke Provinsi |
| Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | Terwujudnya tertib kelola industri hasil hutan | 0,5 | | | Keweangan pindah ke Provinsi |
| Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | Terwujudnya perlindungan kawasan hutan | 0,5 | | | Keweangan pindah Pindah ke Provinsi |
| ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| Program Pengembangan dan Penertiban Bidang Energi Baru dan Terbarukan | persentase pemanfaatan energi baru dan terbarukan | | | | Keweangan pindah ke Provinsi |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrik | Persentase masyarakat yang terlayani Listrik | | | | Keweangan pindah ke Provinsi |
| Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | Terciptanya penambangan yang berwawasan lingkungan (unit lokasi) | 54 | | | Keweangan pindah ke Provinsi |
| PERDAGANGAN | | | | 14.326.350,40 | |
| Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri | | | | 12.671.350,40 | |
| | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 12,20 | 12,95 | | |
| | Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI nomor 8152:2015 | 0 | 7 | | Dinas KUPP |
| Program: Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan | | | | 230.000,00 | |
| | cakupan bina kelompok pedagang (persen) | - | 20 | | Dinas KUPP |
| Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | | | | 1.425.000,00 | |
| | Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu | | <9% | | Dinas KUPP |
| | Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar kecamatan | <14,2% | <12,5% | | |
| PERINDUSTRIAN | | | | 2.508.616,66 | |
| Program pengembangan industri kecil dan menengah | | | | 688.718,99 | |
| | Pertumbuhan Industri (%) | 1,90 | 2,59 | | Dinas KUPP |
| | Persentase peningkatan pemodal IKM (%) | - | 5% | | Dinas KUPP |
| Program Peningkata Kemampuan Teknologi Industri | | | | 673.193,67 | |
| | Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (jenis produk) | | 15 | | Dinas KUPP |
| Program pengembangan sentra sentra industri potensial | | | | 1.146.704,00 | |
| | Jumlah Sentra IKM (unit) | 1 | 1 | | Dinas KUPP |
| TRANSMIGRASI | | | | 978.056,00 | |
| Program Pengembangan wilayah transmigrasi | | | | 978.056,00 | |
| | Persentase sarana dan prasarana pendukung di wilayah KTM dalam kondisi baik (%) | | 90% | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase lembaga Masyarakat KTM yang telah mandiri (%) | 40% | 90% | - | |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 41.250.914 | |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | 5.812.021,03 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 1.140.869,97 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 818.908,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 143.623,29 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pengembangan Data/Informasi | | | | 150.000,00 | |
| | Persentase tingkat integrasi data pembangunan | 80% | 95% | | Bapedalitbang |
| Program Kerjasama Pembangunan | | | | | |
| | jumlah dokumen kerjasama yang disusun | 1 dok | | | Bapedalitbang |
| Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah | | | | 255.000,00 | |
| | Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang selaras | 40% | 90% | | Bapedalitbang |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 150.000,00 | |
| | Jumlah SDM perencana yang berkompetensi | 50 | 50 | | Bapedalitbang |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 2.298.648 | |
| | Dokumen RPJPD | ada | ada | | |
| | Dokumen RPJMD | ada | ada | | |
| | Dokumen RKPD | ada | ada | | |
| | Persentase perencanaan daerah yang selaras (%) | 25 | 100 | | Bapedalitbang |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | | 368.704,09 | |
| | Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras (%) | 25 | 100 | | Bapedalitbang |
| Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | | | 292.820,00 | |
| | Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang selaras | 25 | 100 | | Bapedalitbang |
| Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA | | | | 193.446,81 | |
| | Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang selaras | 25 | 100 | | Bapedalitbang |
| Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | DInas PU TR |
| | Jumlah kawasan strategis yang dibangun | | | | |
| KEUANGAN | | | | 25.036.681,10 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 6.770.841,19 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 6.770.841,19 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 171.764,05 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 406.317,95 | BPKD, BAPEN, seluruh PD, |
| | Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu | | 90% | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 1.578.249,74 | |
| | Dokumen APBD dan P.APBD tepat waktu | ada | ada | | BPKD |
| | KUA dan PPAS APBD/P.APBD tepat waktu | ada | ada | | |
| | Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) | | 75% | | |
| | Persentase aset Setda yang terkelola dengan baik (%) | | 90% | | Setda (Bagian Keuangan) |
| | Realisasi PAD (Rp) | | ##### | | Badan Pendapatan, Kecamatan |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota | | | | 592.649,78 | BPKD |
| | Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (%) | | 90% | | |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | | | | 249.850,00 | BPKD dan kecamatan |
| | Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari | | 90% | | |
| Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | | | | | |
| | persentase nagari yang dibina dalam pengelolaan keuangan | 50 | | | Kecamatan |
| KEPEGAWAIAN | | | | 4.248.083,60 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 749.420,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 564.660,60 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 346.125,56 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pembinaan Pengembangan Aparatur | | | | 2.587.877,13 | BKPSDM |
| | Persentase tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Aspek Syarat dan Prosedur) | 10% | 15% | | |
| | Pemeringkatan Kompetensi Camat | 6 besar tk. Prop | 6 besar tk. Prop | | Setda (Bagian Pemerintahan) |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 2.878.181,00 | |
| Program Pendidikan Kedinasan | | | | 1.185.000,00 | BKPSDM |
| | Persentase Pejabat Struktural Eselon II dan III yang telah mengikuti Diklat Pim II dan III | 40% | 20% | | |
| | Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim IV | 40% | 20% | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 1.693.181,00 | BKPSDM |
| | Persentase Pegawai ASN yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Teknis/Fungsional | 100% | 100% | | |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 1.005.510,00 | |
| Program Pengembangan sistem inovasi daerah | | | | 249.260,00 | Bapedalitbang |
| | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah | | 75% | | |
| Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah | | | | 453.750,00 | Bapedalitbang |
| | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | | 60% | | |
| Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan | | | | 302.500,00 | Bapedalitbang |
| | Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (%) | | 80% | | |
| PENGAWASAN | | | | 2.270.436,84 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 674.934,97 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 283.119,93 | |
| Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 53.844,53 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | - | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | 269.241,74 | |
| | Persentase OPD yang memiliki laporan keuangan pemerintah yang baik (%) | 90 | 90 | | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Persentase obrik bebas temuan material dan aset oleh BPK dan Inspektorat (%) | 90 | 90 | | |
| | Persentase OPD yang mendapat nilai kategori SAKIP minimal bernilai B (%) | 15 | 100 | | |
| | Persentase Peluang mengikuti pendidikan formal, diklat kepemimpinan dan dikalt teknis lainnya | 60 | 90% | | |
| | Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP | 70 | 95 | | |
| | Persentase kasus ganti kerugian negara/daerah yang ditangani | | 90% | | BPKD |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | | | 353.746,72 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Level kapabilitas APIP | level 2 dengan catatan | Level 3 | | |
| Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | | | | 635.548,95 | |
| | Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku | | 95% | | Setda (Bagian PBJ) |
| | Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE | | 40% | | Setda (Bagian Pembangunan) |
| URUSAN PENDUKUNG | | | | 53.718.621,80 | |
| URUSAN PENDUKUNG | | | | 53.718.621,80 | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | 19.524.005,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-----|-------|----------------------|----------------------------------|
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 6.906.279,04 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 3.385.539,95 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH) | | | | 4.376.443,75 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | | 311.255,20 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | 153.750,00 | |
| | persentase aset setda yang dikelola dengan baik | | 90 | | |
| Program Pemantapan Otonomi Daerah | | | | 652.787,71 | Setda (Bagian Tata Pemerintahan, |
| | Nilai LPPD | n/a | 3.300 | | Setda (Bagian Hukum) |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | 100 | 750.334,81 | |
| | Persentase produk hukum yang difasilitasi (%) | | | | |
| Program Advokasi Pemerintah Daerah | | | | 235.119,27 | |
| | Persentase sengketa hukum yang difasilitasi | | 90% | | |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan | | | | 95.000,00 | Setda (Bagian Perekonomian) |
| | Persentase agen dan pangkalan BBM dan Gas sesuai HET (%) | | 85% | | |
| | Persentase peningkatan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan (%) | | 80% | | |
| Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | | | | 655.000,00 | |
| | Peningkatan Nilai AKIP | | BB | | |
| Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | | | | 750.000,00 | |
| | Persentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik (%) | | 90 | | |
| | Tingkat kepuasan masyarakat | | BB | | |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | | 666.313 | Bag Kesbang & Kecamatan, hukum |
| | Persentase peserta yang memahami pengathuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara (%) | 70 | 90 | | Bag Kesbang & Kecamatan |
| Program Pendidikan politik masyarakat | | | | 207.290,68 | Kesbang (Setda) |
| | Persentase ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi lengkap | 80 | 90 | | |
| Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | | | | 378.892,42 | |
| | Persentase pengadaan barang/jasa secara elektronik (%) | 100 | 100 | | |
| KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | | | | 3.343.348,50 | |
| Program pelayanan administrasi perkantoran (KDH) | | | | 2.434.546,94 | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | 385.493,89 | |
| | Persentase Falisitasi kegiatan kepala daerah oleh protokoler (%) | 100 | 100 | | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | 523.307,68 | Bag. AP. Setda |
| | Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu (%) | 75 | 75,00 | | |
| | persentase kegiatan yang selesai tepat waktu (%) | 90 | 94 | | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | 34.194.616,12 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 3.464.116,67 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 2.330.090,32 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 64.613,44 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 519.976,64 | |
| Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | 27.815.819,05 | |
| | Jumlah Perda yang dihasilkan | 200 | 15 | | Sekretariat DPRD |
| KEWILAYAHAN | | | | 7.816.459,33 | |
| KEWILAYAHAN | | | | 7.816.459,33 | |
| KECAMATAN | | | | 7.816.459,33 | |
| Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | 3.673.711,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-----|-----|---------------------------|---------------------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 2.276.066,25 | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 149.666,26 | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| Program Pembangunan Wilayah Kecamatan | | | | 1.717.015,52 | |
| | Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (Kali) | 1 | 1 | | |
| | Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan muspika (kali) | 4 | 4 | | |
| | Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kali) | 1 | 1 | | |
| KESATUAN POLITIK DAN BANGSA | | | | 1.775.000,00 | |
| KESATUAN POLITIK DAN BANGSA | | | | 1.775.000,00 | |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur (%) | n/a | 85 | 890.000,00 | Setda (Bagian Kesbangpol) |
| Program Pendidikan politik masyarakat | Persentase jumlah ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap (%) | | 90% | 885.000,00 | Setda (Bagian Kesbangpol) |
| Total | | | | 594.268.952.789,00 | |

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut tabel target capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2020 dan 2021:

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020- 2021

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | |
|----|---|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | IPM | 70,58 | 71,10 |
| 2 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,53 | 5,59 |
| 3 | Tingkat Pengangguran (%) | 5,60 | 5,50 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,52 | 5,19 |
| 5 | Umur Harapan Hidup (tahun) | 70,50 | 70,60 |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8,49 | 8,52 |
| 7 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,53 | 14,53 |
| 8 | Penilaian Laporan Keuangan Daerah | WTP | WTP |
| 9 | Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB | A |
| 10 | Skor Nilai LPPD | 3300 | 3350 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | |
|----|--|----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 11 | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 29,9 | 30,9 |
| 12 | Persentase Jembatan kabupaten kondisi baik (%) | 47,22 | 49,44 |
| 13 | Persentase Irigasi Kondisi Baik | 56.99 | 59.72 |
| 14 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%) | 74 | 75 |
| 15 | Persentase luasan kawasan Permukiman kumuh yang tertata (%) | 30 | 40 |
| 16 | Persentase akses Sanitasi layak (%) | 75,16 | 75,29 |
| 17 | Persentase Penduduk berakses air minum/bersih (%) | 96,16 | 97,71 |
| 18 | Nilai PDRB Sektor Pertanian (trilyun Rp) | 3,79 | 3,96 |
| 19 | Skor Pola Pangan harapan | 82 | 83 |
| 20 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHK (%) | 9,23 | 9,33 |
| 21 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%) | 12,95 | 13,13 |
| 22 | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (org) | 2.900000 | 3.000.000 |
| 23 | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org) | 1.900 | 2.000 |
| 24 | Persentase penanganan kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur (%) | 100 | 100 |

6.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja Daerah yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Kunci lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang ditunjukkan dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek-aspek tersebut meliputi : (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga, (2) aspek pelayanan umum, dengan fokus

layanan urusan pemerintah wajib, dan fokus layanan urusan pemerintahan pilihan, serta (3) aspek daya saing daerah dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia sebagaimana format lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penetapan target kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kunci, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, juga memasukkan semangat nilai-nilai gotong-royong dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong-royong dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang.

Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2021

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|--|---|------------------|--------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB (%) | 5,73 | 5,50 | 5,59 |
| 2 | Laju Inflasi (%) | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
| 3 | PDRB Perkapita Berlaku (Triliyun Rp) | 9,94 | 15,36 | 16,71 |
| 4 | Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%) | 7,70 | 93,48 | 93,81 |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 11,69 | 5,60 | 5,50 |
| 6 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) | 68,07 | 70,58 | 71,10 |
| 7 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,11 | 8,49 | 8,52 |
| 8 | Angka Melek Huruf (%) | 98,12 | 99,30 | 100,00 |
| 9 | Angka usia harapan hidup (%) | 69,96 | 70,50 | 70,60 |
| 10 | Angka Harapan lama sekolah (%) | - | 13,58 | 13,64 |
| 11 | Persentase balita gizi buruk (%) | 8,90 | 6,60 | 6,60 |
| 12 | Prevelensi balita gizi buruk | 4,8 | 4,55 | 4,5 |
| 13 | Cakupan desa siaga aktif | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 56,74 | 62,50 | 62,50 |
| 15 | Indeks kepuasan masyarakat | - | B | B |
| 16 | Opini BPK | | WTP | WTP |
| 17 | Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%) | 77,20 | 82 | 83 |
| 18 | Penguatan cadangan pangan (Ton) | 39,5 | 85,75 | 105,75 |
| 19 | Penanganan daerah rawan pangan (kampung) | - | 10 | 10 |
| 20 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | 33,43 | 32,26 | 31,92 |
| 21 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | 0,0664 | 0,0977 | 0,1078 |
| 22 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 12,20 | 12,95 | 13,13 |
| 23 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) | 8,80 | 9,23 | 9,33 |
| 24 | Pertumbuhan Industri (%) | 1,90 | 2,59 | 2,79 |
| | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| B. ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | |
| 1 | Angka kriminalitas yang tertangani (%) | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 2 | Level Maturitas SPIP | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Indeks Kepuasan masyarakat | n/a | B | B |
| 4 | Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI(%) | 0 | 36,36 | 45,45 |
| 5 | Persentase Cakupan Layanan Komunikasi (%) | 0 | 50 | 60 |
| 6 | Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | n/a | 180 | 160 |
| 7 | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%) | n/a | 74 | 75 |
| 8 | Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%) | n/a | 71,51 | 73,48 |
| 9 | Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%) | 65 | 90 | 95 |
| 10 | Persentase siswa yang melaksanakan sholat lima waktu (%) | n/a | 95 | 100 |
| 11 | Persentase kasus Perda yang diselesaikan (%) | 70 | 95,00 | 95,00 |
| 12 | Persentase Lembaga . Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok (%) | 51,5 | 81,18 | 86,56 |
| 13 | Jumlah Dasa Wisma Maju | n/a | 720 | 870 |
| C. ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| I. | PELAYANAN URUSAN WAJIB | | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | |
| 1 | Urusan Pendidikan | | | |
| a | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 45,20 | 45,65 | 45,75 |
| b | Angka Melek huruf | 98,12 | 99,30 | 100,00 |
| c | Angka Partisipasi Kasar | | | |
| | - APK SD/MI/Paket A | 124,22 | 116,00 | 115,00 |
| | - APK SMP/MTs/Paket B | 101,61 | 104,49 | 105,77 |
| | - APK SMA/SMK/MA/Paket C | 92,52 | 93,26 | 93,21 |
| d | Angka Pendidikan yang di Tamatkan | | | |
| | - APT SD/MI/Paket A | - | 10,573 | 10,678 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----|---|------------------|--------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| | - APT SMP/MTs/Paket B | - | 10,025 | 10,125 |
| | - APT SMA/SMK/MA/Paket C | - | 7,091 | 7,162 |
| e | Angka Partisipasi Murni | | | |
| | - APM SD/MI/Paket A | 99,12 | 99,81 | 99,90 |
| | - APM SMP/MTs/Paket B | 89,90 | 90,26 | 90,72 |
| | - APM SMA/SMK/MA/Paket C | 77,82 | 78,76 | 78,99 |
| f | Angka Partisipasi Sekolah | | | |
| | - APS 7-12 Tahun | 99,10* | 100,00 | 100,00 |
| | - APS 13-15 Tahun | 87,27* | 88,59 | 88,77 |
| g | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP) | 73,95* | 74,72 | 74,87 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid | 452,76* | 456,85 | 457,76 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| h | Pendidikan Menengah | | | |
| | - APS 16-18 Tahun | 73,38* | 74,20 | 74,35 |
| | - Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah | 22,75* | 23,80 | 23,84 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid | 454,45* | 458,55 | 459,47 |
| | - Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata | 0,72 | 0,99 | 0,99 |
| | - Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) | 98,08 | 99,06 | 100,00 |
| i | Fasilitasi Pendidikan | | | |
| | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik | 94,52 | 95,47 | 95,66 |
| | Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik | 87,50 | 88,38 | 88,56 |
| j | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 45,20 | 45,65 | 45,75 |
| k | Angka Putus Sekolah | | | |
| | - Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | - Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| | - Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| l | Angka Kelulusan | | | |
| | - Angka Kelulusan SD/MI | 99,99 | 100,00 | 100,00 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| | - Angka Kelulusan SMP/MTs | 99.05 | 100.00 | 100.00 |
| | - Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | - Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs | 96.45* | 97.69 | 97.89 |
| | - Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 91.82* | 93.07 | 93.25 |
| | - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 90.25 | 91.15 | 91.34 |
| | | | | |
| 2 | Urusan Kesehatan | | | |
| a | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 4.6/ 1000 KH | 21/ 1000 KH | 20/ 1000 KH |
| b | Angka kelangsungan hidup bayi | 0 | | |
| c | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | 35 | 31 | 30 |
| d | Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | 25 | 21 | 20 |
| e | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 55/ 100.000 KH | 92/ 100.000 KH | 90/ 100.000 KH |
| f | Rasio posyandu per satuan balita | 1 : 68 | 1 : 50 | 1 : 50 |
| g | Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| h | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| i | Rasio Dokter per satuan penduduk | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| j | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| k | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 74,39 | 90 | 100 |
| l | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 93,19 | 95 | 98 |
| m | Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) | 86,01 | 94 | 95 |
| n | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 |
| o | Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum(standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari) | 0 | | |
| p | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | 80 | 100 | 100 |
| q | Non polio AFP rate per 100.000 penduduk | 2 | 2 | 2 |
| r | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | 1 | 100% | 100% |
| s | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 833 | 1058 | 1058 |
| t | Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) | 0,149 | 0,18 | 0,2 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| u | Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) | 16 | 18 | 18 |
| v | Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS | 833 | 1058 | 1058 |
| w | Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | 0,94 | 96% | 96% |
| x | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 1 | 100% | 100% |
| y | Penderita diare yang ditangani | 1 | 100% | 100% |
| z | Angka kejadian malaria | < 1/1000 Penduduk | < 1/1000 Penduduk | < 1/1000 Penduduk |
| aa | Tingkat Kematian akibat malaria | 0 | 0 | 0 |
| ab | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida | 0 | 0 | 0 |
| ac | Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | 0 | 0 | 0 |
| ad | Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi | 0 | 0 | 0 |
| ae | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | 0 | 0 | 0 |
| af | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 100 | 100 | 100 |
| ag | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 65 | 30 | 20 |
| ah | Cakupan kunjungan bayi | 84 | 88 | 89 |
| ai | Cakupan Puskesmas | 2,34 | 2,5 | 2,5 |
| aj | Cakupan Pembantu Puskesmas | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ak | Cakupan kunjungan ibu hamil k4 | 76 | 87 | 90 |
| al | Cakupan pelayanan nifas | 78 | 88 | 91 |
| am | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 75 | 95 | 100 |
| an | Cakupan pelayanan anak balita | 78 | 83 | 84 |
| ao | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 20 | 24 | 25 |
| ap | cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | 60 | 100 | 100 |
| aq | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 100 | 100 | 100 |
| ar | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | 78,7 | 87,5 | 90 |
| as | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 90 | 95 | 100 |
| | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|------------|--|------------------|--------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 3.1 | Pekerjaan Umum | | | |
| a | Proposi jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) | 23,00 | 29,90 | 30,90 |
| b | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (%) | - | 20,00 | 21,00 |
| c | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) | 62,70 | 75,16 | 75,29 |
| d | Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) | 81,63 | 96,16 | 97,71 |
| e | Persentase Akses Sanitasi Layak (%) | - | 75,16 | 75,29 |
| f | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%) | - | 1,26 | 1,30 |
| g | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | 46,42 | 56,99 | 59,72 |
| h | Rasio Jaringan Irigasi | - | 0,022 | 0,022 |
| i | Persentase Bantaran Sungai dan Pantai yang Aman (%) | - | 13,59 | 15,12 |
| j | Persentase Penurunan Genangan Air (%) | - | 1,76 | 1,94 |
| | | | | |
| 3.2 | Penataan Ruang | | | |
| a | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Persatuan Luas Wilayah ber HPL/HBG | - | 0,3 | 0,3 |
| b | Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kaawasan perkotaan (Ha) | - | 2671,87 | 2971,87 |
| c | Rasio Bangunan ber IMB Persatuan Bangunan | - | 1,76 | 1,9 |
| | | | | |
| 4 | Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman | | | |
| a | Rasio rumah layak huni (SPM) | - | 0,2233 | 0,2255 |
| b | Rasio Permukiman Layak Huni | - | 97,09 | 97,25 |
| c | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | - | 94,89 | 95,30 |
| d | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) | - | 50 | 100 |
| e | Persentase Permukiman Tertata (%) | - | 97,08 | 97,22 |
| f | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | - | 0,0754 | 0,0720 |
| g | Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawan Perkotaan (%) | - | 4,52 | 4,74 |
| h | Proposi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%) | - | 13,99 | 12,09 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| i | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | - | 18,45 | 19,59 |
| j | Persentase Areal Kawasan Kumuh (%) | - | 0,0754 | 0,0720 |
| | | | | |
| 5 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | |
| a | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%) | 2,24 | 6,47 | 7,54 |
| b | Cakupan Patroli petugas Satpol PP | 1 kali sehari | 2 kali sehari | 2 kali sehari |
| c | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | 95 | 99 | 99 |
| d | Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten (%) | - | 0,35 | 0,35 |
| f | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%) | 0,39 | 0,52 | 0,52 |
| g | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 60,94 | 73,58 | 79,63 |
| i | Persentase Penegakan PERDA | 96 | 99 | 99 |
| | | | | |
| 6 | Urusan Sosial | | | |
| a | PMKS yang memperoleh bantuan (Jiwa/KK) | 12,271 | 23.720 | 25.850 |
| b | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan /penanganan PMKS (Jiwa/KK) | 12,271 | 23.720 | 25.850 |
| c | Sarana sosial seperti Panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi | 9 panti | 10 panti | 11 panti |
| e | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) | 98 | 85 | 100 |
| f | Persentase korban bencana yang terima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) (%) | 83 | 80 | 90 |
| | | | | |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | |
| 1 | Urusan Tenaga Kerja | | | |
| a | Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus) | - | 2 | 2 |
| b | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) | 56,74 | 62.50 | 63 |
| c | Pencari kerja yang ditempatkan (orang) | 94 | 300 | 300 |
| d | Keselamatan dan perlindungan (Perusahaan) | | 30 | 35 |
| e | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) | - | 0 | 0 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|--|------------------|--------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| f | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) | - | 0,090 | 0,1 |
| g | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) | - | 8,64 | 13,50 |
| h | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) | - | 11,52 | 13,53 |
| i | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) | - | 2,00 | 3,00 |
| j | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) | - | 8,5 | 9 |
| k | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) | - | 10,5 | 11,5 |
| l | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) | - | 2 | 3 |
| | | | | |
| 2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| a | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 8.77 | 9.50 | 10.00 |
| b | Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) | 71.68 | 5.35 | 5.50 |
| c | Rasio KDRT (%) | 0.0092 | 0.014 | 0.010 |
| d | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%) | 0,26 | 0,21 | 0,19 |
| e | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 91.23 | 74.20 | 75.10 |
| f | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus) | 100 | 90 | 91 |
| g | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%) | - | 100 | 100 |
| | | | | |
| 3 | Urusan Pangan | | | |
| a | Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun) | 112,93 | 142 | 144 |
| b | Ketersediaan energi(kkal/kap/hari) | 3.754 | 2.480 | 2.500 |
| c | Ketersediaan protein 9gram/kap/hari) | 83,73 | 71 | 73 |
| d | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) | 74,600 | 80 | 81 |
| | | | | |
| 4 | Pertanahan | | | |
| a | Persentase luas lahan bersertifikasi (%) | - | 57 | 62 |
| b | Penyelesaian kasus tanah Negara | - | 10 | 10 |
| c | Penyelesaian izin lokasi (%) | - | 100 | 100 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 5 | Urusan Lingkungan Hidup | | | |
| a | Cakupan pengawasan terhadap izin lingkungan (%) | 100 | 100 | 100 |
| b | Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan yang terfasilitasi (kasus) | 5 | 5 | 5 |
| c | Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup (kasus) | 8 | 7 | 7 |
| d | Indeks Kualitas lingkungan Hidup: | | | |
| | - Indeks kualitas air | C Dan D (Tercemar Sedang) | B (tercemar ringan) | B (tercemar ringan) |
| | - Indeks kualitas Udara | Diambang Kualitas Udara baik | Diambang Kualitas Udara baik | Diambang Kualitas Udara baik |
| | -SO2 | 17,38 μ /NM ³ | 60 μ /NM ³ | 60 μ /NM ³ |
| | -NO2 | 16,6 μ /NM | 100 μ /NM ³ | 100 μ /NM ³ |
| e | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 70,009 | 72,458 | 72,702 |
| f | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| g | Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota | - | Ada | ada |
| h | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | | Ada | Ada |
| i | Penegakan hukum lingkungan yang terfasilitasi | 5 | 5 | 5 |
| j | Jumlah limbah B3 yang dikelola | - | 2 | 2 |
| k | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota | | 33,30 % | 44,40 % |
| l | Peningkatan Kapasitas Saarana dan Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/kota | - | ada | ada |
| m | Terfasilitasinya pendampingan kegiatan Proklam | 2 kampung | 2 kampung | 2 kampung |
| n | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat | | | |
| o | Terlaksananya Pemberian penghargaan lingkungan hidup | ada | Ada | Ada |
| p | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota | 10 Pengaduan | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 6 | Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil | | | |
| a | Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk | 0.66 | 0.93 | 0.95 |
| b | Rasio Bayi berakte kelahiran | 0,267 | 0,940 | 0,950 |
| c | Kepemilikan KTP (%) | 66 | 93 | 95 |
| d | Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk | 224.46 | 684,79 | 820,81 |
| e | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | | |
| | - NIK pemutakhiran data penduduk | 514.264 | 543.636 | 549.072 |
| | - Penerbitan | 257.739 | 324.057 | 340.260 |
| | - Penerapan e-KTP | 289,340 | seumur hidup | seumur hidup |
| f | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%) | 66 | 92 | 95 |
| | | | | |
| 7 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
| a | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 0.56 | 0.86 | 0.86 |
| b | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 0.51 | 1.00 | 1.00 |
| c | Persentase PKK Aktif (%) | 0.48 | 100 | 100 |
| d | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 49.45 | 76.92 | 76.92 |
| e | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%) | 58,2 | 94,5 | 100 |
| | | | | |
| 8 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| a | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 1.94 | 1.68 | 1.68 |
| b | Rasio Akseptor KB | 70.72 | 71.60 | 71.60 |
| c | Persentase Perangkat daerah yang dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (%) | 33 | 33 | 33 |
| d | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 26 | 26 | 26 |
| e | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun (%) | 58.97 | 60.21 | 60.21 |
| f | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%) | 69.00 | 69.03 | 69.03 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------|--------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| g | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) | 18.50 | 18.80 | 18.80 |
| h | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%) | 20 | 20.70 | 20.70 |
| i | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) | 13.19 | 13.14 | 13.14 |
| j | Cakupan anggota Bina Keluarga Balitas (BKB) ber-KB (%) | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| k | Cakupan anggota Bina Keluarga remaja (BKR) ber-KB (%) | 29.4 | 29.40 | 29.40 |
| l | Cakupan anggota Bina Keluarga lansia (BKL) ber-KB (%) | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
| m | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 2.33 | 4.00 | 4.00 |
| n | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk | 0.58 | 0.88 | 0.88 |
| o | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 100 | 100 | 100 |
| p | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%) | 100 | 100 | 100 |
| q | Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%) | 69.00 | 69.35 | 69.35 |
| | | | | |
| 9 | Urusan Perhubungan | | | |
| a | Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) | 1,285,300 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| b | Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit) | 954 | 8.500 | 9.000 |
| c | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit) | 3 | 6 | 7 |
| d | Persentase layanan angkutan darat (%) | | 0 | 0 |
| e | Kepemilikan KIR angkutan umum | 0 | 5 | 2,5 |
| f | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit) | 30 | 30 | 30 |
| g | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) | 53,000 | 53.000 | 53.000 |
| h | Pemasangan rambu-rambu per tahun (unit) | 765 | 100 | 100 |
| i | Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan | 0,060 | 0,054 | 0,053 |
| j | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang) | - | 1.100.000 | 1.150.000 |
| k | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (orang) | 124,148 | 96.000 | 98.000 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| l | Jumlah halte (unit) | 25 | 33 | 35 |
| m | Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit) | 1 | 4 | 5 |
| n | Jumlah terminal (unit) | 2 | 5 | 6 |
| | | | | |
| 10 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | |
| a | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (Kim) | | 15 | 15 |
| b | Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) | | 70 | 80 |
| c | Persentase Penduduk yang menggunakan hp/Telepon (%) | | 70 | 80 |
| d | Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet (%) | | 60 | 70 |
| e | Proporsi Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%) | | 50 | 55 |
| | | | | |
| 11 | Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| a | Jumlah Koperasi (unit) | 299 | 409 | 419 |
| b | Persentase koperasi aktif (%) | 55. | 67 | 70 |
| c | persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%) | 36 | 49 | 51 |
| d | Persentase Usaha mikro dan kecil (%) | 99.23 | 96.5 | 96.00 |
| | | | | |
| 12 | Urusan Penanaman Modal | | | |
| a | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (per tahun) | 9 | 14 | 15 |
| b | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp) | 62,500,000,000 | 76,000,000,000 | 78,000,000,000 |
| c | Rasio daya serap tenaga kerja | 33,5 | 36,5 | 37,0 |
| d | kerjasama Investasi | - | 1 MoU | - |
| e | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN | 92 | 97 | 98 |
| | | | | |
| 13 | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| a | Pesentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 10 | 45 | 50 |
| b | Persentase wirausaha muda (%) | 20 | 45 | 55 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|-----------|---|------------------|--------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| c | Jumlah atlet berprestasi (org) | 20 | 45 | 50 |
| d | Jumlah Prestasi Olah Raga | 5 | 15 | 20 |
| e | Jumlah organisasi Olah Raga | 40 | 65 | 70 |
| f | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 30 | 45 | 52 |
| g | Gelandang/Balai Remaa(Selain milik swasta) | 1 | 6 | 7 |
| h | Jumlah Gedung Olah Raga | 12 | 19 | 20 |
| | | | | |
| 14 | Urusan Statistik | | | |
| a | Data Statistik Pembangunan Daerah | Ada | ada | ada |
| b | Buku “Kabupaten Dalam Angka” | Ada | ada | ada |
| | | | | |
| 15 | Urusan Kebudayaan | | | |
| a | Jumlah Grup Kesenian | 66 | 70 | 71 |
| b | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 3 | 3 |
| c | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah) | 1 | 3 | 3 |
| d | Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang diletarikan (%) | - | 29 | 33 |
| e | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | - | 3 | 3 |
| f | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | - | 3 | 4 |
| | | | | |
| 16 | Urusan Perpustakaan | | | |
| a | Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun | 5.000 | 40.000 | 50.000 |
| b | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah | 51,44 | 44,83 | 6,91 |
| c | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | 1,61 | 1,10 | 1,01 |
| d | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/tahu | - | 10,000 | 10,000 |
| e | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 7,705 | 8,121 | 8,191 |
| | | | | |
| 17 | Urusan Kearsipan | | | |
| a | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | - | 23,67 | 28,89 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| b | Peningkatan SDM pengelola kerajinan | 2 | 10 | 15 |
| | | | | |
| II. | LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | |
| 1 | Urusan Pariwisata | | | |
| a | Kunjungan wisata | | | |
| | - wisatawan mancanegara (orang) | 1.600 | 1.900 | 2.000 |
| | - wisatawan nusantara (orang) | 2.000.000 | 2.900.000 | 3.000.000 |
| b | -Lama Tinggal Wisatawan (Hari) | | | |
| | - wisatawan mancanegara (Hari) | 3 | 4,5 | 5 |
| | - wisatawan nusantara (Hari) | 2 | 3,5 | 4 |
| c | PAD Sektor Pariwisata (Rp/tahun) | 1.793.500.000 | 2.750.000.000 | 3.000.000.000 |
| | | | | |
| 2 | Urusan Pertanian | | | |
| a | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) | 33,43 | 32,26 | 31,92 |
| b | Produktifitas padi per hektar (kw/ha) | 50,92 | 51,65 | 51,76 |
| c | Cakupan Bina Kelompok Pertanian(%) | 30,33 | 60 | 65 |
| d | Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%) | n/a | 5 | 5 |
| e | Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%) | 13,33 | 33,33 | 33,33 |
| | | | | |
| 3 | Urusan Kehutanan | | | |
| a | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 805,00 | Kewenangan Provinsi | |
| b | Kerusakan Kawasan Hutan | 0,03 | Kewenangan Provinsi | |
| c | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | - | Kewenangan Provinsi | |
| | | | | |
| 4 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| a | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 1,54 | Kewenangan Provinsi | |
| | | | | |
| | | | | |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|-------------|--|------------------|--------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 5 | Perdagangan | | | |
| a | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 12.20 | 12.95 | 13.13 |
| b | Pasar Rakyat yang menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit) | 0 | 7 | 9 |
| c | Cakupan bina kelompok pedagang (%) | 0.00 | 20 | 30 |
| | | | | |
| 6 | Perindustrian | | | |
| a | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) | 8,80 | 9,23 | 9,33 |
| b | Pertumbuhan Industri (%) | 1.90 | 2.59 | 2.79 |
| c | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) | 0.26 | 0,02 | 0,02 |
| d | Persentase tenaga kerja sektor industri (%) | 7.53 | 8.82 | 9.22 |
| e | Jumlah sentra IKM (unit) | 1 | 1 | 1 |
| f | Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (jenis produk) | | 15 | 20 |
| | | | | |
| 7 | Ketransmigrasian | | | |
| a | Persentase Transmigran swakarsa | 21 | - | - |
| | | | | |
| 8 | Urusan Perikanan | | | |
| b | Produksi perikanan | 46,713 | 61,203 | 64,876 |
| | - Budidaya (ton) | 10.327 | 16.763 | 17.936 |
| | - Tangkap (ton) | 37.909 | 44.440 | 46.940 |
| c | Konsumsi Ikan (kg/org/kapita) | 33.85 | 39 | 40 |
| d | Cakupan bina kelompok nelayan (unit) | 185 | 237 | 253 |
| e | Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) | 23.356 | 28.00 | 28.886 |
| | | | | |
| III. | PENUNJANG URUSAN | | | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan | | | |
| a | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada |
| b | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | ada | ada | ada |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| c | Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | ada | ada |
| d | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | ada | ada |
| e | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD (%) | 95 | 100 | 100 |
| f | Penjabaran Konsistensi Program RPKD ke dalam APBD (%) | 95 | 100 | 100 |
| g | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Keuangan | | | |
| a | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP |
| b | Peningkatan PAD | - | 169.975.474.360 | 186.973.021796 |
| c | Persentase SILPA terhadap APBD (%) | 11.36 | - | - |
| d | Persentase belanja pendidikan (20%) (%) | 4.80 | - | - |
| e | Persentase belanja kesehatan (10%) (%) | 7.22 | - | - |
| f | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja langsung | 1.52.31 2.64.42 | - | - |
| g | Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa (%) | 0,15 | - | - |
| h | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| a | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | 20 | 32 | 32 |
| b | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 28 | 35 | 158 |
| c | Jumlah jabatan administratif pada instansi pemerintah | 132 | 158 | 158 |
| d | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang) | 4790 | 4920 | 4920 |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | | | |
| a | Persentase implementasi rencana kelitbangan | | | |
| b | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (5) | 0 | 4.44 | 4.44 |
| c | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) | 0 | 100 | 100 |
| d | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | 0 | 2 | 2 |

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Baseline 2015 | Target Tahun | |
|----------|---|------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 5 | Pengawasan | | | |
| a | Persentase tindak lanjut temuan (%) | - | 91 | 93 |
| b | Jumlah temuan BPK | - | 15 | 14 |
| c | Persentase pelanggaran pegawai (%) | - | 0,4 | 0,3 |
| | | | | |
| 6 | Sekretariat Daerah | | | |
| a | Persentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik | | 90/ Sangat baik | 95/ Baik |
| b | Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%) | | 100 | 100 |
| c | Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%) | | 90 | 100 |
| d | Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | 100 | 100 |
| e | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | | BB | BB |
| f | Nilai LPPD | | 3300 | 3350 |
| g | Peringkat MTQ tingkat provinsi | | 5 besar | 5 besar |
| h | Persentase TPQ Aktif (%) | | 95 | 95 |
| i | Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika (kelompok) | | 41 | 46 |
| j | Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan (%) | | 95 | 100 |
| | | | | |
| 7 | Sekretariat DPRD | | | |
| a | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | Tidak | Ada | Ada |
| b | Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada |
| c | Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada |

Sumber data : Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

6.3. Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan 2020

Inovasi daerah sangat diperlukan untuk peningkatan daya saing daerah karena Inovasi menjadi kunci dalam memerangi persaingan yang sangat ketat. Untuk peningkatan ekonomi dan nilai tambah diperlukan kemampuan dalam menggunakan teknologi dan mengolah sumber daya yang inovatif untuk dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa inovasi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Tabel 6.3
Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Aplikasi E- SAKIP | Pemanfaatan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih perlu dioptimalkan sehingga dapat mendukung seluruh aktivitas organisasi pada level strategis hingga ke level implementasi. Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi berupa aplikasi E-SAKIP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 2. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja 3. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/ terlambatnya capaian kinerja 4. Untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran (periodik) 5. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ realokasi anggaran 6. Sumber informasi pelaporan kinerja bagi stake holder (Bupati, Wakil dan Pimpinan instansi) |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|---|---|--|
| | | | 7. Sebagai data/informasi dalam penyusunan rencana kinerja/kegiatan periode berikutnya 8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel |
| 2. | L-Freon(Layanan Formulir Rekomendasi dan Konsultasi Online) | Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan sejauh lebih kurang 263 km, menyebabkan besarnya sumber daya yang diperlukan (baik itu biaya maupun waktu) oleh PNS/masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi maupun Surat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. | Memudahkan PNS/masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi dan Rekomendasi Inspektorat |
| 3. | Pojok Harapan | Banyaknya harapan-harapan/aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan pada musrenbang baik musrenbang kampung, nagari, kecamatan maupun kabupaten | agar harapan-harapan/ aspirasi masyarakat dapat tersampaikan |
| 4. | INDIPESS (Informasi Digital | kurang terbukanya akses informasi tentang Pesisir | menyebarkan informasi-informasi |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|--|--|--|
| | Pesisir Selatan) | Selatan | terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. | Perencanaan Berbasis Titik Koordinat | perencanaan selama ini belum berbasis kepada data yang valid | Agar perencanaan yang dihasilkan adalah perencanaan yang berbasiskan data sehingga perencanaan lebih tepat sasaran serta tepat guna |
| 6. | SIJANTAN (Sistem Informasi Jaringan Jalan dan Jembatan) | Untuk mengetahui kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten | Membantu Informasi tentang jalan dan jembatan kabupaten |
| 7. | Asuransi Kesehatan Pekerja Harian Lepas Bidang Kebersihan dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja berpenghasilan rendah - Rata-rata masyarakat miskin - tingkat kesehatan rendah | Untuk meningkatkan tingkat kesehatan pekerja |
| 8. | IPAL sebagai wahana rekreasi | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat selalu beranggapan IPAL mengandung kotoran dan bau - Lokasi IPAL sering berada di daerah yang tidak mempunyai nilai jual atau daerah kumuh | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak lagi beranggapan kalau IPAL mengandung kotoran dan bau - Masyarakat dapat menerima keberadaan IPAL ditengah lingkungan masyarakat dan bersedia |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|---|
| | | | menempatkan IPAL di tempat yang lebih strategis |
| 9. | Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Mikro | Banyaknya permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Mikro baik dari segi kelembagaan maupun usaha. | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk meminimalisir permasalahan Koperasi dan UMKM. • Agar koperasi tumbuh menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas. • Agar Pelaku Usaha mampu berdaya saing dalam menghadapi MEA. |
| 10. | TabungHama (Tanaman Bunga Pengusir Hama) | <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya serangan hama terhadap tanaman padi di Kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2018 tercatat serangan hama wereng coklat seluas 187 ha, penggerek batang sebanyak 108 ha, serangan kepinding tanah seluas 125 ha dan hama tikus sebanyak 207 ha - Jumlah pemakaian pestisida tergolong tinggi karena dalam pengendalian hama petani masih mengandalkan pestisida | <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi serangan hama pada tanaman padi - Mengurangi pemakaian pestisida/insektisida dalam pengendalian hama - Menurunkan biaya produksi - Menambah estetika atau menambah keindahan areal persawahan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|-----------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya biaya yang dikeluarkan petani untuk pengendalian hama - Menanam bunga berwarna warni jenis refugia disekitar areal (pematang) tanaman padi yang berbungsi sebagai shelter bagi hama dan tempat berkembangnya musuh alami | |
| 11. | E-Raport Online | <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar dimulai dengan merencanakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan; 2. Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan; 3. Membantu pendidik dalam mengolah nilai keterampilan; 4. Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi keterampilan; 5. Membantu wali kelas dalam mengolah deskripsi sikap spiritual maupun sosial; 6. Membantu Satuan pendidikan dalam |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| | | <p>penilaian, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah dan memanfaatkan, serta melaporkan hasil penilaian. Proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan, akan lebih sistematis, komprehensif, lebih akurat, dan cepat dilakukan apabila didukung dengan perangkat aplikasi komputer.</p> | <p>menyusun laporan hasil penilaian sesuai dengan panduan penilaian dari Direktorat Pembinaan SMP</p> |
| 12. | ProGAKiN (Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan) | <p>Pola sikap, pola tindak, dan pola pikir merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan. untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Perikanan telah melakukan program terobosan perubahan mindset yang dinamakan Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan.</p> <p>Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan yang</p> | <p>Program ProGAKiN bertujuan untuk pemberdayaan nelayan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan motivasi yang lebih kuat kepada nelayan dan kelembagaan nelayan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dijalankan. 2. Meningkatkan rasa kepercayaan baik antar nelayan maupun lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--------------------------|---|--|
| | | selanjutnya disingkat ProGAKiN adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan potensi yang dimiliki baik dalam institusi pemerintahan maupun yang berada diluar pemerintahan seperti ulama, tokoh masyarakat, dan nelayan itu sendiri. | <p>nelayan</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran nelayan dalam menjaga keberlanjutan usaha yang ditunjukkan dengan pembukaan buku tabungan dari masing-masing nelayan.</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran nelayan dalam menjaga kesehatan kerja terutama dalam menghadapi resiko melaut</p> <p>5. Meningkatkan kepedulian nelayan, akan pentingnya arti pendidikan bagi keluarga.</p> <p>6. Meningkatkan rasa kepedulian sosial nelayan baik antar sesama nelayan dalam komunitas</p> |
| 13. | GeSerKom (Gerakan Seribu | Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat | Program GeSerKom bertujuan untuk |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---------------------------------|--|--|
| | Kolam) | Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu PR (Pekerjaan Rumah) yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Potensi dari kualitas lingkungan yang baik merupakan strategi pengelolaan Sumber Daya yang berkelanjutan. Salah satu program terobosan pengelolaan kualitas lingkungan yang baik dari Dinas Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat Gerakan Seribu Kolam. Gerakan Seribu Kolam yang kemudian disingkat GeSerKom adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Masyarakat secara bersama-sama dalam terwujudnya seribu kolam budidaya skala rumah tangga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. | pemberdayaan masyarakat yaitu : 1. Mewujudkan seribu kolam budidaya sebagai wadah budidaya skala rumah tangga 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan budidaya skala rumah tangga 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
| 14. | Sistem Informasi Penanggulangan | Sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun | 1. Menyediakan sistem dan aplikasi |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|------------------------------|---|---|
| | Kemiskinan | <p>2014 bahwa yang memiliki kewenangan terhadap data verifikasi dan validasi data kemiskinan ada pada Dinas Sosial yang merupakan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah, maka setiap data yang digunakan sebagai penerima manfaat dari program pemerintah bersumber dari satu data, yaitu Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial dan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial.</p> <p>Dinas Sosial memerlukan sebuah sistem informasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten yang mengakomodir segala bentuk bantuan yang telah diterima dan oleh penerima manfaat sekaligus melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat yang layak dapat bantuan setiap program penanggulangan kemiskinan pemerintah.</p> | <p>penaggulangan kemiskinan tingkat kabupaten yang digunakan lintas OPD.</p> <p>2. Mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan</p> |
| 15. | Gelar Sajadah (Gerak Langkah | 1. Pengurangan sampah plastik/Anorganik | Untuk meningkatkan kesadaran |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| | Warga Sedekah Sampah Jadi Berkah) | 2. Sampah plastik/anorganik dianggap sebagai barang yang tidak bernilai. | masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di lingkungan sekitar |
| 16. | Model Percontohan Keamanan Pangan | Ditemukan banyaknya zat-zat berbahaya yang terdapat pada makanan, pangan segar maupun jajanan anak sekolah yang beredar di masyarakat | Mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya dalam makanan, pangan segar dan jajanan anak sekolah |
| 17. | Promosi Ekspansi Pangan Lokal | Tersedianya produk berupa beras yang di produksi kelompok tani masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan | Mempromosikan bahan berupa produk beras ke Luar Daerah Luar Propinsi |
| 18. | Peningkatan Mutu Gizi Keluarga | Kurangnya anggaran KRPL dari APBN untuk mengembangkan Kawasan Pangan Lestari sampai tingkat Rumah Tangga (RT) | Kawasan Rumah Pangan Lestari yang telah di tumbuhkan/dikembangkan dapan dilanjutkan sampai ke tingkat Rumah Tangga (RT) dengan Dana Nagari |
| 19. | Tim Terpadu Pembinaan Puskesmas | Banyak permasalahan dalam pencapaian SPM di Puskesmas yang ditangani hanya oleh masing-masing Bidang, padahal masalah tersebut lebih baik ditangani secara bersamaan | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan 2. Tercapainya target SPM Kesehatan |
| 20. | Pengawasan Pertambangan | Kabupaten Pesisir Selatan memiliki banyak | 1. Adanya komitmen kerjasama antara |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|---|
| | Mineral Non Logam di Kabupaten Pesisir Selatan | sungai besar dan kecil yang berpotensi untuk pertambangan Mineral Non Logam (Galian C) sehingga banyak menarik investor untuk melakukan eksplorasi, tetapi belum adanya pengawasan secara berkesinambungan mengakibatkan rusaknya Daerah Aliran Sungai, lingkungan dan kebocoran retribusi. | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang pengawasan pertambangan Mineral Non Logam (MoU) 2. Terlaksananya Pengawasan Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Pesisir Selatan |
| 21. | SINAR (Sistem Informasi Nagari) | Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam menuju <i>smartcity</i> telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Puskesmas dan Nagari. Diperlukan inovasi untuk perkembangan Nagari-nagari sebagai Pemerintahan terendah maka dibangunlah Sistem Informasi Nagari | Mewujudkan <i>Smart Nagari</i> dan <i>Smart City</i> Kabupaten Pesisir Selatan menjadi <i>Smart Government, Smart People, Smart Economic, Smart Environment, Smart Living dan Smart Mobility</i> |
| 22. | Website OPD (Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir | Pemerintah Daerah Pesisir Selatan telah menuju <i>smartcity</i> telah membangun infrastruktur jaringan | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--------------------|--|---|
| | Selatan) | komunikasi data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Puskesmas dan Nagari. Diperlukan inovasi dari Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik, bersih, transparan dan akuntabel | secara transparan dan akuntabel |
| 23. | CELOK (Cek Lokasi) | Celok adalah sebuah aplikasi Cek Lokasi berbasis <i>mobileandroid</i> yang diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lainnya. Celok sendiri dibuat untuk memudahkan masyarakat khususnya Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencari berbagai lokasi yang dibutuhkan ketika pengguna berada di Kabupaten Pesisir Selatan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna dapat dengan mudah menemukan berbagai lokasi yang diinginkan dengan menggunakan Celok, pengguna akan diperlihatkan peta lokasi yang diinginkan dalam bentuk <i>map</i> atau satelit - Pengguna juga dapat menggunakan GPS sehingga dapat dengan mudah membantu pengguna untuk menuju lokasi yang bersangkutan |
| 24. | Aplikasi SIMAYA | Aplikasi siMAYA Pessel merupakan aplikasi administrasi perkantoran, korespondensi surat | 1. Memberikan kemudahan dalam proses bisnis khusus surat keluar dan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--------------|--|---|
| | | <p>menyurat dinas bagi setiap pegawai secara elektronik. Fungsi utama solusi aplikasi siMAYA adalah penghematan biaya terutama pada biaya proses delivery nota dinas dan iaya kertas yang bias dihemat. Dalam hal ini instansi menyadari dan mengerti betapa pentingnya sebuah teknologi informatika dan system informasi dalam sebuah perusahaan yang berupa <i>e-office</i>. Selain itu, kebutuhan akan surat menyurat ada pula kebutuhan tentang bagaimana mengimplementasikan aplikasi siMAYA ini agar dapat berhasil dan berjalan dengan baik</p> | <p>surat masuk</p> <p>2. Memahami keselarasan antara keputusan strategi bisnis, sistem informasi dan desain organisasi</p> |
| 25. | PPID | <p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 yang menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan</p> | <p>1. Meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan</p> |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|---|
| | | akuntabel. UU KIP yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara | 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dan mendorong partisipatif aktif semua pihak |
| 26. | Radio Streaming | Radio Langkisau FM adalah Radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Siaran radio dapat dinikmati tidak hanya melalui radio konvensional tetapi juga dinikmati melalui radio streaming (www.pesisirselatankab.go.id)serta online radio box sedunia (playstore) | Menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat dijangkau lebih luas lagi |
| 27. | Posyandunakkeswan (Pos Pelayanan Terpadu Peternakan | a. Banyaknya permintaan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan yang tidak | Memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat dibidang peternakan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| | dan Kesehatan Hewan | berimbang dengan jumlah petugas yang akan melayani di lapangan. b. Jauhnya jangkauan pelayanan petugas kecamatan | dan kesehatan hewan mulai dari pembinaan usaha, pelayanan inseminasi buatan, pengobatan dan pencegahan penyakit hewan |
| 28. | CALLING OPAT (Operasi Cepat) | Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas yang memanjang sehingga kurang terjangkau oleh personil atau anggota | Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang nyaman, aman dan sejahtera |
| 29. | Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang sehingga jarak tempuh dari kecamatan ke ibu kota atau pusat pemerintahan cukup jauh. 2. Akibat jarak tersebut, masyarakat membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus dokumen kependudukan. 3. Rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya data kependudukan yang valid, aktual dan faktual. 2. Terwujudnya pelayanan yang dekat, mudah dan murah untuk masyarakat |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| 30. | Layanan BERPUTAR (Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berdirinya UKL Kecamatan. 2. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan adminduk kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih maksimalnya pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. 2. Memicu kesadaran masyarakat tentang arti penting data dan dokumen kependudukan |
| 31. | Layanan “Salam Sapa Ke Pintu Rumah” (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Sampai ke Pintu Rumah) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki data dan dokumen kependudukan dikarenakan adanya keterbatasan fisik, usia dan faktor ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan adminduk bagi penduduk rentan (disabilitas, ODGJ, rentan ekonomi, dll). 2. Terwujudnya pelayanan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat |
| 32. | Layanan “Pass Nikah” (Layanan Perubahan Status Saat Pernikahan) | Tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Pelayanan dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan melalui Kantor Urusan Agama di Kecamatan untuk memberikan | Memberikan kemudahan bagi pasangan baru untuk memperoleh data dan dokumen kependudukan dengan perubahan status perkawinan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| | | kemudahan bagi calon pengantin dalam perubahan status perkawinan | |
| 33. | Layanan “TURUD BERDUKA” (Turun ke Rumah Duka Berikan Dokumen Kematian) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kematian oleh ahli waris sehingga menimbulkan permasalahan ketika pengurusan keperluan yang berkaitan dengan data kependudukan 2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kematian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data penduduk yang akurat dan factual 2. Terciptanya kemudahan pelayanan bagi masyarakat |
| 34. | LADO KUTU Dukcapil (Layanan Dokumen Kependudukan Terpadu) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya permasalahan data kependudukan yang muncul ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan dari RSUD. M. Zein Painan. 2. Permasalahan data kependudukan pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kantor Cabang Painan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan data kependudukan untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya. 2. Verifikasi dan validasi data peserta JKN pada BPJS |
| 35. | Rumah panjang BUMNAG | Perlu meningkatkan pendampingan dari | 1. Menjadikan BUMNAG bersama |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| | bersama MTJ dalam pengelolaan usaha berbasis komunitas | BUMNAG bersama untuk pengelola unit usaha masih belum optimal dan perlu dorongan dari pemerintah daerah | mandiri 2. Terbentuknya unit usaha yang berkualitas |
| 36. | KampungKB menjadi modal atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda pembangunan nasional (Nawacita) ke 3, 5 dan 8 2. UU No 52 th 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 3. Stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi program KKBPK di lini lapangan | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. |
| 37. | JAVEDA (Jaga arsip vital milik Pemerintah Daerah) | Arsip vital milik Pemerintah Daerah merupakan asset yang sangat penting dalam perjalanan sejarah suatu daerah. Sebagai suatu aset, maka arsip/dokumen tersebut bermakna mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang, mampu menunjang peran dan fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik terhadap arsip vital pemerintah daerah. 2. Terwujudnya penyelamatan dan perlindungan arsip vital milik pemerintah daerah |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|--------------|---|--------|
| | | <p>pemerintahan sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat sehingga mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance).</p> <p>Banyaknya kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu negara/daerah dalam mempertahankan aset kekayaan miliknya karena tidak bagusnya pengelolaan kearsipan yang dimiliki.</p> <p>Oleh karenanya, pengelolaan kearsipan terhadap arsip vital pemerintah daerah yang terdapat pada suatu instansi perlu menjadi perhatian khusus sebagai bukti terciptanya akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> | |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|-----------------|--|--|
| 38. | KANTIN LITERASI | <p>Minat baca masyarakat Indonesia yang rendah merupakan masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Hal yang sama pun terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada banyak teori penyebab rendahnya minat baca masyarakat tersebut, antara lain sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat anak-anak/siswa/mahasiswa harus membaca buku (lebih banyak lebih baik), banyaknya jenis hiburan, permainan (game) dan tayangan TV yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku, budaya baca memang belum pernah diwariskan nenek moyang kita, serta format perpustakaan yang monoton dan kurang inovatif, sehingga kurang menarik hati masyarakat untuk mengunjunginya. Mereka beranggapan bahwa mengunjungi adalah</p> | <p>Menjadikan kantin literasi sebagai “jembatan” agar masyarakat terutama generasi muda mencintai aktivitas membaca melalui konsep tatanan perpustakaan yang jauh dari kesan membosankan</p> |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|--|
| | | <p>pekerjaan yang membosankan.</p> <p>Upaya meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan, perlu memerlukan langkah nyata agar memunculkan motivasi dalam diri setiap masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merubah konsep tampilan perpustakaan yang awalnya terkesan membosankan menjadi tampilan yang santai, nyaman dan bersahabat.</p> | |
| 39. | Penggunaan aplikasi e-ticket untuk pembelian tiket objek wisata pantai carocok dan mandeh | Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi wisata bahari memerlukan pengembangan yang serius untuk menjadikan daerah destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Barat, untuk dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan yang datang diperlukan inovasi agar para wisatawan tidak berdesakan dalam memasuki objek wisata bahari carocok dan mandeh | <ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah kerja OPD terkait - Memberikan kemudahan akses untuk memasuki objek wisata - Mengurangi dampak dari premanisme |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| 40. | ROLAMSUKA (Rompi Terlambat Masuk Kantor) | Jumlah PNS di lingkungan BKPSDM sebanyak 48 orang. Kecenderungan PNS di BKPSDM sering terlambat mempengaruhi rendahnya disiplin | Menumbuhkan budaya malu terlambat |
| 41. | SP2D Online | Ditemukan Nilai SP2D yang mengurangi Kas Daerah tidak sesuai dengan Nilai SP2D, karena harus di entry ulang di Aplikasi Bank dan SP2D yang telah dikeluarkan, SP2D tidak langsung masuk ke Validasi atau BKU Kas Daerah | Untuk menghindari kesalahan dalam pemindahbukuan SP2D dan untuk meefisienkan waktu dalam mem-BKU kan Rekening Kas Daerah |
| 42. | SIANAK KAMEK (Farmasi Antar Obat ke Alamat Minimal Efek Kesalahan) | Problematika panjangnya antrian pasien yang menebus resep obat di Apotek Central dan waktu tunggu pelayanan resep yang belum sesuai standar, kondisi ini juga diperburuk dengan kondisi ruang tunggu apotek yang kurang memadai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi antrian panjang di Apotek Central Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. Mengurangi waktu tunggu Pelayanan Resep Obat |
| 43. | SIKUTU (Sistem Kumpul Kartu) | Problematika panjangnya antrian pasien yang mengurus administrasi di tempat pendaftaran sebelum menuju poli tempat berobat memakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi antrian panjang di tempat pendaftaran 2. Mengurangi waktu tunggu pelayanan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| | | waktu lama sehingga tidak sesuai SPO waktu tunggu pasien mulai dari mendaftar sampai mendapatkan pelayanan | di tempat pendaftaran |
| 44. | BUNG KRISAN TILANG 24 JAM (Tabung Kritik & Saran Ditindaklanjuti Kurang dari 24 Jam) | Belum adanya sistem yang secara adekuat mengatur dan mengelola kritik dan saran di Rumah Sakit secara berkala dan bila pun ada kritik dan saran kepada Rumah Sakit atau pelayanan, tindaklanjuti terhadap kritik dan saran tersebut selalu lama sehingga berlarut dari waktu ke waktu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola kritik dan saran di Rumah Sakit lebih sistematis 2. Menindaklanjuti kritik dan saran di Rumah Sakit dengan lebih cepat dan responsif |
| 45. | NADA PEDAS (Nagari Sadar Pelayanan Dasar) | Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan bagian integral dari Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki 23 nagari dan berkewajiban memenuhi akses pelayanan dasar wajib | Terpenuhinya akses pelayanan dasar wajib di wilayah 23 nagari se-kecamatan Koto XI Tarusan; |
| 46. | SICABAY (Aksi Camat Bayang) | Kecamatan Bayang terdiri dari 17 Nagari/Desa yang sumber mata pencaharian masyarakat dengan bertani, berladang, dan sebagai nelayan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya Nagari yang bersih dan akuntabel. 2. Terwujudnya Tupoksi Wali Nagari |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|---|
| | | Dalam menjalankan sistem pemerintahan Nagari perlu dilakukannya sebuah control pekerjaan secara langsung yang turun ke lapangan dengan membentuk satu tim. | sesuai dengan pokok yang ada. |
| 47. | Klinik Konsultasi Administrasi Keuangan Nagari Kecamatan IV Nagari Bayang Utara | Banyak Perangkat Nagari yang belum memahami tentang administrasi pengelolaan keuangan desa, dasar hukum dan lain-lain sebab terbatasnya sumber daya manusia di nagari tersebut | Untuk memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa dan memberi informasi tentang aturan hukum pengelolaan keuangan nagari |
| 48. | Destinasi Wisata | Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sangat kaya dan objek wisata alam dan mempunyai nagari yang indah dan mempesona seperti: sumber daya alam yang alami, bukit yang indah, udara yang masih segar yang bebas dari polusi udara dan masyarakat yang ramah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengenalkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 2. Mempromosikan objek wisata Kecamatan IV Nagari Bayang Utara |
| 49. | Pembudidayaan Ikan Air Tawar | Tipologi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara banyak sungai dan air bersih, dimana air banyak dan melimpah. Bagus digunakan untuk | Untuk memanfaatkan sumber daya air yang masih alami menjadi sumber usaha masyarakat setempat |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|---|
| | | pembudidayaan ikan air tawar | |
| 50. | Ekowisata Berbasis Masyarakat (Yayasan Bahana Pesona Natural) | Potensi Wisata Bahari Kawasan Labuang Baruak dan Batu Nago beserta kondisi sosial budaya masyarakatnya berpotensi menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikembangkan. Namun selama ini belum mampu digali dan dikembangkan masih belum terkelola dengan baik, selain akibat jarak namun juga diakibatkan oleh kondisi jalan serta motivasi dan inovasi masyarakat sekitar. | Pengelolaan potensi destinasi wisata Labuang Baruak dan Batu Nago untuk menggerakkan sektor-sektor usaha pariwisata lainnya (<i>multiplier effect</i>) |
| 51. | For-Ikon BK (Forum Informasi dan Konsultasi Batang Kapas) | For-IKon BK dilatarbelakangi oleh meningkatnya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan di wilayah kecamatan Batang Kapas, seperti balapan liar, ngelem dan narkoba, pernikahan liar yg tidak sesuai dengan ketentuan UU, tingginya angka kehamilan di luar nikah, meningkatnya angka perceraian, serta tidak | Menghimpun para pegiat, baik pegiat agama, pegiat adat, kesehatan, lingkungan, pariwisata, pemuda, olahraga dan lain sebagainya agar mereka bisa menyalurkan bakat dan minat, menggali potensi wilayah serta mengatasi krisis moral dikalangan remaja dan masyarakat. |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| | | adanya wadah yg menampung generasi muda untuk berkarya dan berinovasi. | |
| 52. | Pariwisata Edukasi | Potensi hutan adat yang berada di Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi tempat pariwisata. | Pemamfaatan hutan Adat menjadi tempat pariwisata Edukasi. |
| 53. | JEJAKMAS (Jemput Antar Pajak Masyarakat) | Kabupaten Pesisir Selatan dengan kondisi geografis Pesisir pantai dan sungai serta pegunungan, yang masih mayoritas penduduknya asli pribumi dengan kepemilikan tanah banyak tanah Nagari, tanah adat yang diwariskan oleh keluarga terdahulu, khususnya Kecamatan Airpura pada umumnya kepemilikan tanah banyak tanah wilayah adat Kenagarian Inderapura. | Terwujudnya Kecamatan taat pajak |
| 54. | Kuliner Lokan (Randang Lokan) | Kabupaten Pesisir Selatan dengan kondisi geografis Pesisir pantai dan sungai serta | Terwujudnya perekonomian masyarakat mandiri |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--------------------------------|---|---|
| | | <p>pegunungan dengan mayoritas perekonomian penduduknya tepi pantai Nelayan khususnya Kecamatan Airpura yang memiliki bantaran sungai Inderapura dengan banyak ikan sungai salah satunya LOKAN di Kenagarian Inderapura.</p> | |
| 55. | Wisata Batu Akik (Batu Cincin) | <p>Pada umumnya Kabupaten Pesisir Selatan kondisi geografisnya memiliki pantai yang memanjang ke arah selatan dengan berbatasan Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu, khususnya Kecamatan Airpura yang memiliki di Pemerintahan Nagari Pulau Rajo Inderapura memiliki Pantai nan historisnya Pantai tersebut bukan berupa pasir malahan Batu kerikil yang bisa dijadikan perhiasan, dengan lazim disebut dengan BATU AKIK, yang terletak di Nagari Pulau Rajo Inderapura, Pasir Ganting.</p> | <p>Terwujudnya Pantai Pasir Ganting sebagai objek Wisata Kecamatan yang bersih.</p> |
| 56. | Kerajinan Lidi Sawit | Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai income | Terwujudnya perekonomian masyarakat |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|--|
| | | yang banyak bersumber dari perkebunan kelapa sawit, khususnya Kecamatan Airpura yang memiliki perkebunan sawit yang luas yang terdiri dari perkebunan masyarakat (PLASMA) sampai perkebunan yang dikelola oleh perusahaan seperti INCASI Raya. | yang mandiri. |
| 57. | YANLING PBB-P2 Terintegrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pencapaian realisasi PBB-P2 di Kec.Pancung Soal 2. Masih banyak permasalahan wajib pajak dengan data ganda,tidak ditemukan dan pindah domisili 3. Masih banyak rumah masyarakat yang tidak memiliki IMB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencapaian target PBB-P2 di Kec. Pancung Soal 2. Tervalidasinya data wajib pajak 3. Setiap wajib pajak yang memiliki rumah akan memiliki IMB. |
| 58. | THT SASUKE (Tertib Hewan Ternak Sapi Susah Kekandang) | Masih banyak hewan ternak masyarakat seperti Sapi yang lepas tidak dikandangkan oleh pemiliknya, sehingga ini menjadi persoalan yang telah berlangsung dalam waktu yang sudah lama. | Mewujudkan lingkungan Kecamatan dan nagari se kecamatan ranah ampek hulu tapan yang hijau dengan termanfaatnya ruang kosong dan terbuka hijau serta |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|---|--|
| | | Sehingga berpengaruh pada ekonomim masyarakat yang seharusnya banyak lahan kosong bisa ditanami dengan tanaman bernilai ekonomis oleh masyarakat menjadi terlantar akibat ternak yang berkeliaran mengancam keselamatan tanaman masyarakat. Pengaruh lainnya juga terhadap kenyamanan, dan kebersihan wilayah yang terganggu oleh banyaknya kotoran hewan yang berserakan disepanjang jalan, bahkan pekarangan rumahpun bisa dijumpai kotoran ternak bila pekarangan rumah yang tidak terpagar dengan baik. | indah,bersih, nyaman dan asri bebas dari ternak sapi dan kotoran sapi. |
| 59. | Damping Kenari (Pendampingan Pembangunan Pemerintahan Nagari) | Belum terkontrolnya dan terkoordinirnya kegiatan pembangunan nagari | Mempermudah kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembangunan nagari |
| 60. | Lentera Nagari | Kondisi Sosial Masyarakat Tapan terutama anak-anak dan remaja yang lebih senang bermain vidio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang baca 2. Menyediakan wadah pengembangan |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| | | game/gadget dari pada membaca | kreatifitas bagi generasi muda 3. Mensosialisasikan pentingnya manfaat membaca bagi generasi muda 4. Melakukan inovasi untuk menarik minat baca generasi muda tapan 5. Menciptakan ruang diskusi terbuka untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan akses informasi |
| 61. | Pelayanan BPJS On-Line di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | 1. Jarak Pusat Pelayanan BPJS Kesehatan yang berada di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan jauh dari Kecamatan 2. Ramainya antrian pelayanan di Pusat Pelayanan 3. Lamanya proses pelayanan 4. Jarak yang jauh dari pusat pelayanan BPJS Kesehatan. 5. Tidak mengeluarkan biaya. | Memudahkan masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan mendapatkan pelayanan BPJS tanpa jauh –jauh dan menghabiskan waktu dan biaya ke Ibu Kota Kabupaten. |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|---|
| 62. | KAKAK TUA (Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga Tuntas Secepatnya) | Sering ditemui warga Lunang terutama Keluarga Miskin setelah mendapat rekomendasi dari Camat menangis di Kantor Camat karena tidak memiliki cukup uang untuk biaya transportasi ke pusat Kabupaten untuk pengurusan dokumen kependudukan tersebut | Terwujudnya pelayanan yang murah dan mampu mamangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. |
| 63. | YANDUNAK KESWAN (Pelayanan Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan) | Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi pengembangan ternak sapi terintegrasi dengan perkebunan sawit, masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan pakan alternatif dan perawatan kesehatan hewan sapi bali, serta belum adanya sarana dan prasarana penunjang peternakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya cita-cita one village one product khususnya kecamatan silaut berupa ternak sapi bali. 2. Terwujudnya pola perencanaan pembangunan pengembangan kawasan pedesaan berbasis ternak sapi di kecamatan silaut secara berkelanjutan 3. Terwujudnya sapi sehat dan kuat. 4. Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang peternakan (kandang). |
| 64. | PERAN KIS ONLINE | Kabupaten Pesisir Selatan dengan kondisi | Terwujudnya masyarakat Silaut sehat. |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| | (Pelayanan Pendaftaran Kartu Indonesia Sehat Online) | geografis pegunungan, berbukit-bukit dan daerah memanjang dimana Kecamatan Silaut daerah paling selatan terletak di perbatasan dengan jarak \pm 170 km dari pusat kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). | |
| 65. | SATUSE (Sahari Untuak Sehat) | Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang jaraknya jauh dari Puskesmas dengan tingkat Pendidikan serta ekonomi masyarakat yang rendah, sementara permasalahan kesehatan banyak ditemui berdasarkan hasil laporan bulanan, dan pendataan kesehatan yang dilakukan bidan desa Ada 4 lokasi/ kampung yang tidak mempunyai tenaga Kesehatan /Bidan desa sehingga Pelayanan Kesehatan masyarakat oleh Nakes belum terlaksana sesuai yang diharapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan 2. Terdeteksinya secara cepat gangguan kesehatan di masyarakat 3. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 4. Meningkatkan Visite Rate Puskesmas BBB |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| 66. | SIKU KAWAN (Siap Kunjungi Keluarga dan Kelompok Rawan) | <ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kk resti 34 kk (94,44%) keluarga yang tidak pernah berobat ke pelayanan kesehatan merupakan beban sosial ekonomi serta berdampak buruk terhadap masyarakat | Untuk mengatasi masalah kesehatan/keperawatannya sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal |
| 67. | SEBASCA (Sekolah Bebas Cacing) | Masih banyak anak sekolah yang menderita kecacangan | agar anak sekolah terbebas dari kecacangan |
| 68. | Gerilyawan TB | Rendahnya Cakupan Suspek TB Paru | Dengan banyaknya suspek TB Paru kemungkinan penjarangan penderita TB Paru semakin tinggi |
| 69. | PONDOK BUSA (Buah Dan Sayur) | <ul style="list-style-type: none"> Inpres NO 1 Tahun 2017 Tentang Germas Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 800/2195/BPT-PS/X/2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) SK Camat IV Nagari Bayang Utara Nomor: 014/VII/Cmt-Bayu/2018 Tentang Gerakan | <ul style="list-style-type: none"> Mengstimulasi masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas asam kumbang agar dapat membiasakan diri mengonsumsi buah dan sayur di lingkungan keluarga masing-masing Masyarakat dapat mencegah faktor |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| | | Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara | risiko terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) |
| 70. | YANKES DARCIL (Pelayanan kesehatan daerah terpencil) | <ul style="list-style-type: none"> • Struktur geografis wilayah kerja puskesmas asam kumbang • Masalah sosio-ekonomi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Asam Kumbang | Agar masyarakat di daerah terpencilmendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas asam kumbang sehingga masyarakat dapat memelihara dan menjaga kesehatannyauntuk meningkatkan derajat kesehatan |
| 71. | Kelas Balita BGM | <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes no 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi • Adanya kasus balita BGM | Ibu balita mendapatkan informasi tentang status gizi anak sehingga dapat memperhatikan lagi tumbuh kembang anak balita serta dapat membantu mengurangi faktor risiko gizi buruk |
| 72. | Si EMAK LIN (Tabungan Emak Bersalin) | <ul style="list-style-type: none"> • Belum tercovernya ibu hamil dengan dana jkn • Struktur geografis wilayah kerja puskesmas asam kumbang • Masalah sosio-ekonomi masyarakat di wilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya biaya persiapan persalinan bagi ibu hamil • Membantu dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|---|--|--|
| | | kerja puskesmas asam kumbang | Kematian Bayi (AKB) |
| 73. | Pro ODGJ (Pro Dengan Orang Gangguan Jiwa) | Angka gangguan jiwa di wilayah kerja UPT Puskesmas Lumpo cukup tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan gangguan jiwa mendapat pelayanan yang baik dari Puskesmas dan masyarakat tidak menelantarkan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 2. Stigma negatif masyarakat terhadap gangguan jiwa diminimalisir |
| 74. | Pojok TB | Dengan tingginya angka penularan penyakit TB dengan kontak serumah serta kontak dengan orang lain maka perlu dipisahkan penderita TB yang berkunjung berobat ke Puskesmas Surantih | Memisahkan pasien yang dicurigai TB di ruang tunggu pasien Puskesmas |
| 75. | Duta TB/HIV dan Kadernya | Adanya kolaborasi penyakit TB Paru dengan HIV dibentuk Tim untuk mengatasi penularan penyakit tersebut di atas | Membantu petugas TB Paru dengan petugas HIV dalam pelacakan kasus tersebut di atas karena dengan any TB Paru maka pasien tersebut dicurigai |
| 76. | CEKATAN PADI (Cek | 1. Kesehatan orang disabilitas sering kali | 1. Terpantaunya status kesehatan pasien |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|-------------------------------|---|---|
| | Kesehatan Pasien Disabilitas) | <p>terganggu, sementara orang disabilitas sulit mengakses tempat pelayanan kesehatan.</p> <p>2. Kondisi orang disabilitas juga menyulitkan keluarga untuk membawa ke tempat pelayanan kesehatan</p> | <p>disabilitas</p> <p>2. Cek kesehatan terhadap pasien disabilitas, bukanla satu-satunya tujuan dari program CEKATAN PADI, tapi tujuan akhirnya daalah bagaimana orang dengan kecacatan bisa diterima lingkungan sosial, mempunyai keterampilan, mampu mandiri, setidaknya mandiri menjaga kebersihan dirinya sendiri, serta tentu saja terjaga kesehatannya,</p> |
| 77. | Kelas Pranikah | Kec.Linggo Sari baganti usia pernikahan pada umumnya diusia muda (laki -laki dibawah usia 25 tahun dan wanita dibawah 20) walaupun mereka menikah diusia yang matang pemahaman dan pengetahuan mereka tentang kesehatan masih minim ditandai dengan adanya kejadian | <p>1.Terwujudnya Rumah tangga yang sehat mandiri menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahhmah</p> <p>2.Terwujudnya layanan puskesmas khususnya cakupan layanan Standar pelayanan Minimal Puskesmas dan</p> |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|---|
| | | perdarahan malam pertama, pemilihan layanan kesehatan pada saat hamil, melahirkan imunisasi dan penyakit menular seksual lainnya ditandai dengan masih rendahnya cakupan program KIA, imunisasi, maraknya perceraian di usia muda | meningkatkan kinerja Puskesmas |
| 78. | MASAJI (Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa) | Pada saat ini program puskesmas dititik beratkan pada pelaksanaan PIS-PK dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Salah satu dari kegiatan SPM dan PIS-PK itu adalah program kesehatan jiwa yang mana program kesehatan jiwa yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat bagi penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan secara teratur dan tidak ditelantarkan, dalam hal ini penderita gangguan jiwa diharapkan dapat mandiri merawat diri sendiri bahkan dapat mengembangkan diri agar lebih berperan di tengah-tengah masyarakat dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua penderita gangguan jiwa berobat teratur dan tidak ditelantarkan 2. Terwujudnya pelayanan Puskesmas khusus cakupan layanan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dan meningkatkan kinerja Puskesmas khususnya tentang kesehatan jiwa |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|--------------|--|--------|
| | | <p>juga menghndari perilaku yang bertentangan dengan hak azazi manusia seperti pemasangan, dll. Di wilayah Puskesmas Air Haji ada sekitar 87 orang penderita dengan gangguan yang diharapkan seluruh penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan secara teratur agar penyakit yang dideritanya tidak semakin parah. Namun sampai saat ini hanya sekitar 44 orang penderita yang berobat teratur kurang lebih 50% saja. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan terhadap penderita dengan gangguan jiwa. Untuk itu Puskesmas melakukan salah satu inovasi untuk lebih mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan pengobatan penderita dengan gangguan jiwa yang dinamakan MASAJI (Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa)</p> | |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|-----|--|--|--|
| 79. | SICATIN (Siaga Calon Pengantin) | Masih tingginya angka pernikahan dini yang menyebabkan tingginya angka kejadian abortus, kematian ibu dan bayi | Terpantaunya kesehatan ibu mulai dari calon pengantin sampai dengan melahirkan |
| 80. | PERANGAI TB (Penyuluhan Penjaringan Pengobatan Inspeksi Sanitasi Gizi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan penderita TB Paru belum mencapai target 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dengan memeriksa batuk lebih 15 hari 3. Penjaringan suspek TB Paru di Puskesmas kurang 4. Belum berjalannya kolaborasi dengan lintas sektor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menemukan pasien baru TB Paru dengan BTA Positif dan pengobatan 2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian TB Paru dengan memutus rantai penularan |
| 81. | TALI TARIK REALITAS; (Sebuah usaha membuat data(TA) yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau valid (LI) dalam sebuah Peta(TA) yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penguatan aplikasi terkait e-database/data statistik pembangunan daerah. 2. Segera disusun peraturan terkait pengelolaan informasi geospasial di kabupaten pesisir selatan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah pencarian data base mudah dan konsisten setiap waktu. 2. Memastikan pemegang kepentingan mengetahui kegiatan disusun dengan Koordinat geografis yang |

| No | Nama Inovasi | Latar Belakang | Tujuan |
|----|--|---|---|
| | menarik(RIK) sehingga menghasilkan Perencanaan(RE) yang berkualitas(ALITAS).="TALI TARIK REALITAS" | <ol style="list-style-type: none"> 3. Terkait simpul jaringan, segera tentukan siapa yang berperan sebagai unit pengelolaan , unit penyebarluasan, dan unit produksi. 4. Bentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial 5. Identifikasi data dan informasi geospasial di tiap Perangkat Daerah, | <p>menunjukkan lokasi lebih pasti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sejalan dengan pengembangan simpul jaringan (BIG), Kabupaten Pesisir Selatan, memaksimalkan aplikasi e-planning informasi lokasi, dengan setingan derajat desimal, 4. Setiap Perangkat Daerah memiliki Operator eplanning yang memahami dalam mengambil dan mengisi koordinat geografis dalam dalam setiap usulan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan lokasi tertentu di suatu wilayah. |

Selain inovasi di atas, Kabupaten Pesisir Selatan juga mengembangkan penggunaan getah gambir menjadi bahan pewarna batik yang selama ini pewarna batik menggunakan bahan pewarna sintetis. Hal ini juga ditunjang dengan adanya beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang menghasilkan produk gambir seperti Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan sebagainya.

Getah gambir yang tidak berfungsi ini akan dijadikan sebagai pewarna batik sehingga akan tercipta corak batik yang khas dari Pesisir Selatan. Daerah pembuatan batik ini akan diberinama "*Beautiful batik of Loempo*" atau "*village batik of Loempo*" dengan lokasi berada di Daerah Lumpo Kecamatan IV Jurai.

Kampung batik Loempo yang akan dikembangkan adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial salah satunya gambir dan keindahan alam yang terdiri dari 11 nagari yang akan dikembangkan sebagai pusat batik loempo. Selain sebagai pusat batik, Lumpo juga dijadikan sebagai desa wisata yang merupakan penunjang pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Uniknya lumpo ini adalah di sana terdapat pusat produksi batik, dan store penjualan batik dan ditunjang juga dengan wisata alam seperti air terjun, pemandian sungai, wisata pertanian dan sebagainya. Di Kampung batik ini wisatawan dapat tinggal pada rumah-rumah penduduk yang telah di cat dengan corak batik dan dapat bergabung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam membuat batik seperti menulis batik tulis, mencetak batik, mewarnai batik sampai menjadi produk siap untuk di jual.

Untuk tahap pertama ini, pemasaran batik lumpo telah dilakukan melalui penggunaan baju seragam anak sekolah dan ASN di Sumatera Barat dan dengan adanya pengembangan batik lumpo nantinya diharapkan akan dapat memenuhi pemasaran batik ke seluruh Indonesia selain batik jawa.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan tahun ke empat dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. RKPD ini memuat berbagai prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui RKPD Tahun 2020 ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|--------|------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terdistribusinya Surat Menyurat Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Anggaran untuk tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.200.000.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan dari Pihak Ketiga dalam bentuk sewa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3000 | Rp 250.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya dana untuk Pengelola Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 300.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya dana untuk pembayaran Tenaga Kebersihan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 615.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 51 | Rp 90.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 90.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya anggaran untuk jamuan Makan dan Minum Tamu | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.850.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|----|------------------|--|--|------|
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Tersedianya dana untuk koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.500.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya dana untuk Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 75.000.000 | | | SKPD |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Tersedianya anggaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Sekretariat daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 190.000.000 | | | SKPD |
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH) | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH) | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 85.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH) | Tersedianya dana Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk KDH/WKDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.400.000.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Penunjang Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 60.000.000 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 1.150.000.000 | | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 650.000.000 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya Meubiler kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|----|------------------|--|--|------|
| 24 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretaris daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 510.000.000 | | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung/Bangunan Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 26 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala daerah / Wakil Kepala daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 725.000.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 51 | Rp 1.250.000.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 510.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | |
| 30 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler | | | | | | | | |
| 31 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam melaksanakan Tugas Kedinasan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengeolaan Administrasi Kepegawaian | Tertatanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Penyusunan Buku Kode Etik Pegawai | Terbitnya buku Kode Etik Pegawai | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 60 | Rp 90.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) | Terbinanya Unit Kesehatan Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 65.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan | Terawasinya Aliran Kepercayaan di Kabupaten Pesisir selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------|----|----------------|--|--|------|
| 36 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Tersedianya Laporan Penanganan Konflik Sosial di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 21 | Rp 250.000.000 | | | SKPD |
| 37 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) | Tersedianya laporan Koordinasi dan Pertemuan Pimpinan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 350.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Terpeliharanya Kantrantibmas dan tercegahnya Tindak Kriminal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Terbitnya rekomendasi untuk Penelitian | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 85 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 39 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Tersedianya Rekomendasi Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah dan Jumlah rapat kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 250.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Pemantauan Kegiatan Orang Asing | Terpantaunya aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 41 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika | Tersosialisasinya Penyalahgunaan Narkotika dan Tertanganinya Siswa dan Aparatur Sipil Negara yang terindikasi Narkoba | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 890.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan | Terbitnya Perda tentang penyalahgunaan obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 95.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Terpublikasinya informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Media Massa di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 27 | Rp 900.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|------|----|-------------|--|--|------|
| 44 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2560 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 45 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Publikasi dan Promosi Daerah | Terpublikasinya Kegiatan-Kegiatan pemerintah Daerah, Terpublikasinya peliputan kegiatan Pemda dan Terpublikasinya Promosi Media luar ruangan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 350 | Rp | 900.000.000 | | | SKPD |
| 46 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Bimtek Kehumasan dan Jurnalistik | Meningkatnya SDM Tenaga Kehumasan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Meningkatnya SDM Tenaga Jurnalistik dalam mempublikasikan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 47 | program pembinaan dan masyarakatan olahraga | Pemasyarakatan Olahraga Aparatur | Meningkatnya Derajat Kesehatan Aparatur Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 24 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 48 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah | Tertatanya arsip Lingkup Setda | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2500 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 49 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Terawasinya Kios Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 162 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 50 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah | Terkendalnya Harga dan Inflasi Daerah di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 51 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Monitoring dan Evaluasi BUMD | Tersedianya data Lembaga Keuangan dan BUMD di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 52 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah | Terkendalnya Program Pembangunan Daerah dan Terciptanya Koordinasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 53 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan | Tersedianya Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 147.000.000 | | | SKPD |
| 54 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 180 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 55 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penyusunan Prosedur Kegiatan | Tersedianya Dokumen Prosedur Kegiatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 42.000.000 | | | SKPD |
| 56 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati | Terbitnya Dokumen analisis tentang kebijakan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 24 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |
| 57 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 110.000.000 | | | SKPD |
| 58 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 110.000.000 | | | SKPD |
| 59 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang administrasi Umum | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 110.000.000 | | | SKPD |
| 60 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ | Tersedianya paket Fasilitas dan Klarifikasi Lelang | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 175 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 61 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 62 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik untuk OPD | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 182.900.000 | | | SKPD |
| 63 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Penyelesaian Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa | Tertanganinya Kasus Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 64 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tersedianya Buku sistem dan Prosedur Pengadaan barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 75 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |
| 65 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Pembinaan PBJ Bagi PA/KPA/Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengaduan Sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP | Terbinanya OPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 66 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Pembinaan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemda Kab. Pesisir Selatan | Bertambahnya kemampuan Pegawai Negeri dalam Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 67 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Okupasi | Meningkatnya kompetensi Okupaksi bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 68 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan | Tersedianya data untuk Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 69 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Tersedianya Dokumen Aset / Barang Daerah Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 70 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya | Terpilihnya 3 besar Camat terbaik, Tersusunnya Nilai Peringkat Camat Tingkat Provinsi dan Meningkatnya kemampuan bagi Camat dan Staf Camat di Lingkungan Pemda Pessel | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 175.000.000 | | | SKPD |
| 71 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Terfasilitasinya Kunjungan kerja Pejabat Negara | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 80 | Rp | 250.500.000 | | | SKPD |
| 72 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 73 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan | Meningkatnya Etos Kerja Keprotokolan di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 74 | Advokasi Pemerintah Daerah | Penyelesaian Sengketa Hukum | Tertanganinya Kasus Perkara Hukum di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 274.000.000 | | | SKPD |
| 75 | Advokasi Pemerintah Daerah | Sosialisasi Produk Hukum Daerah | Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 60.000.000 | | | SKPD |
| 76 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Publikasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya Buku Lembaran Daerah dan Tersedianya Buku Berita Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 540 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 77 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah dan tersedianya Dokumen Peraturan Bupati | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp | 275.000.000 | | | SKPD |
| 78 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari | Tersedianya Dokumen Keputusan Bupati dan Tersedianya Dokumen Peraturan Nagari | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 560 | Rp | 70.000.000 | | | SKPD |
| 79 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan Ranham | Tersedianya Laporan Ranham | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 80 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota, Terfasilitasinya serah terima Jabatan camat dan Terselenggaranya Kasus/permasalahan Pemerintahan di Kecamatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp | 130.000.000 | | | SKPD |
| 81 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah | Tersedianya Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah dan Tersedianya asistensi Mou kerjasama dengan pihak ketiga | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 82 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan | Terfasilitasinya penetapan dan penegasan batas nagari | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 83 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Kerjasama Rantau | Terfasilitasinya Nagari binaan perantau tingkat Kabupaten | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 60.000.000 | | | SKPD |
| 84 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terselenggaranya Rakor Kecamatan dan Tersedianya Laporan Evaluasi pelaksanaan Tupoksi Camat | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |
| 85 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Rakor Camat dengan Perangkat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 70.000.000 | | | SKPD |
| 86 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami | Tersedianya Dokumen nama rupa bumi unsur buatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 54.000.000 | | | SKPD |
| 87 | Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH) | Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya (KDH) | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya untuk KDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 65 | Rp | 295.000.000 | | | SKPD |
| 88 | Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | Penataan dan Penguatan Lembaga | Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp | 105.000.000 | | | SKPD |
| 89 | Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | Penataan Jabatan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 90.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 90 | Peningkatan IMTAQ | Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam | Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir selatan, Peringatan besar islam dan Tersedianya Dana untuk Jasa Pihak Ketiga pada Mesjid yang dikelola Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 38 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 91 | Peningkatan IMTAQ | Pembinaan Guru TPQ/TPSQ | Terbinanya Guru TPQ/TPSQ | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 92 | Peningkatan IMTAQ | Safari Keagamaan Pemerintah Daerah | Terbinanya Mesjid dan Mushalla yang dikunjungi oleh Pemerintah Daerah dan Terbinanya Pondok Al Quran oleh Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 104 | Rp | 580.000.000 | | | SKPD |
| 93 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ | Terfasilitasinya Cabang-Cabang MTQ yang diperlombakan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 750.000.000 | | | SKPD |
| 94 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan | Tersedianya Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD) dan Terfasilitasinya Jemaah Haji Pessel | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 116 | Rp | 175.000.000 | | | SKPD |
| 95 | Peningkatan IMTAQ | Pembinaan Didikan Shubuh Tergiat | Terbinanya Lembaga Didikan Subuh | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | Rp | 70.000.000 | | | SKPD |
| 96 | Peningkatan IMTAQ | Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan | Tersedianya data untuk Kesejahteraan Rakyat dan urusan Keagamaan di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 97 | Peningkatan IMTAQ | Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial | Terverifikasinya proposal Hibah dan Bansos untuk Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 150 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 98 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan | Tersusunya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 99 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Monev Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Monev Kinerja Perangkat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 100 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Tersedianya Dokumen LPPD | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 101 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Tersedianya Dokumen LKPJ | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |
| 102 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Tersedianya Laporan pelayanan publik perangkat daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 125.000.000 | | | SKPD |
| 103 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik | Tersedianya Data Inovasi Pelayanan Publik | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |
| 104 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik | Tersedianya Laporan Pelayanan Publik | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 175.000.000 | | | SKPD |
| 105 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam | Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pertambangan dan Galian C | Tersedianya data perkembangan dan Potensi Pertambangan dan Galian C di Kab.Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 71 | Rp | 130.000.000 | | | SKPD |
| 106 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam | Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan Perkebunan | Tersedianya data perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 107 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Tersedianya anggaran untuk Upacara hari Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya dan temu ramah antara veteran dengan Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 23 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 108 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Peningkatan Kesadaran Bela Negara | Terlatihnya Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara di kabupaten Pesisir selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 109 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) | Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Konsultasi serta komunikasi antar warga masyarakat dengan pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 110 | Program pendidikan politik masyarakat | Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas/LSM | Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 111 | Program pendidikan politik masyarakat | Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | Tersosialisasinya UU dan Peraturan Bidang Politik di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 112 | Program pendidikan politik masyarakat | Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai | Terverifikasinya Parpol yang mengajukan Bantuan Keuangan dan Meningkatnya Pengetahuan Pengurus dalam mengelola Keuangan partai | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 175.000.000 | | | SKPD |
| 113 | Program pendidikan politik masyarakat | Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Terpantaunya perkembangan politik di daerah dan terpantaunya Pemilihan Kepala Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp 625.000.000 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 30.125.400.000 | Rp - | Rp - | |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 223.598.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | kebutuhan administrasi keuangan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 115.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | kebutuhan jasa kebersihan kantor dan pramu kantor | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp 130.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 13.860.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | kebutuhan alat tulis kantor dinas kesehatan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 33.115.459 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 28.823.219 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 7.492.675 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | persentase peralatan dan perlengkapan kantor dinkes | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 315.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah langganan koran dan majalah serta pariwisata | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 13.900.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | kebutuhan makan dan minum rapat dinkes, makan dan minuman tamu dinkes dan puskesmas | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 130.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | persentase perjalanan dinas rapat atau koordinasi ke luar daerah dinkes | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 80.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----|----|-------------|----|------|------|
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | persentase perjalanan dinas rapat atau koordinasi ke dalam daerah dinkes | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 70.000.000 | | SKPD | |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | jumlah petugas keamanan dinas kesehatan , gudang farmasi yang dibayar | dinas kesehatan dan gudang farmasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 39.000.000 | | SKPD | |
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | | | | |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 525.000.000 | | SKPD | |
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | terikutinya kursus ,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis SDM kesehatan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 80 | Rp | 50.000.000 | | SKPD | |
| 18 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 380.000.000 | | SKPD | |
| 19 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) | jumlah paket obat, bmhp dan saran penunjang farmasi yang diadakan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | | | Rp | - | SKPD |
| 20 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK) | persentase kelancaran pengadaan obat , bmhp dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjang farmasi | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 30.000.000 | | SKPD | |
| 21 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di RT kelompok resiko tinggi (resti), kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp | 145.000.000 | | SKPD | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|-----|----|---------------|----|------|------|
| 22 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | jumlah posko - posko kesehatan dalam rangka hari raya dan event - event daerah terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan menurunnya kasus rujukan yang bisa ditangani di puskesmas dan rumah sakit terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisonal bagi masyarakat | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp | 2.200.000.000 | | SKPD | |
| 23 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan. BOK, DAK Non Fisik) | terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat secara preventif dan promotif | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | - | SKPD |
| 24 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | terbinanya media promosi kesehatan dan peningkatan perilaku PHBS masyarakat | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 500.000.000 | | SKPD | |
| 25 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM) | terbinanya nagari siaga aktif terbina dan meningkatnya stratifikasi posyandu terbina usaha kesehatan bersumber daya masyarakat | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 1.150.000.000 | | SKPD | |
| 26 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Peningkatan Gizi Masyarakat | terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) terpantaunya status gizi dan validasi data, pemantauan garam beryodium dan pelacakan gizi buruk terlatih dan termonitornya program perbaikan gizi | 15 kecamatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 1.400.000.000 | | SKPD | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 27 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | jumlah petugas kesling puskesmas yang dibina untuk pengawasan TTU dan TPM jumlah wirausaha sanitasi dan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan yang dibina jumlah dokumen lingkungan | 15 kecamatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 525.000.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | terlaksananya pemantauan dan pembinaan lokasi pasca PAMSIMAS jumlah pelatihan yang dilaksanakan bagi petugas kesling puskesmas terlaksananya pemantauan dan pembinaan terhadap sampah dan SPAL rumah tangga serta limbah medis puskesmas jumlah petugas kesling puskesmas yang dibina terlaksananya pertemuan limbah medis | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 68.250.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat | jumlah depot diperiksa jumlah pengelola DAM yang dibina | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 122.518.066 | | | SKPD |
| 30 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat | jumlah kecamatan , nagari sehat pertemuan forum kecamatan pertemuan forum kabupaten | 15 kecamatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 315.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Peningkatan Imunisasi | terlaksananya pelayanan imunisasi terlaksananya pelaksanaan kegiatan imunisasi | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 180.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------------------|-----|----|---------------|----|---|------|
| 32 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik) | terlaksananya pendampingan pra dan pasca akreditasi puskesmas terlaksananya workshop penunjang akreditasi puskesmas terlaksananya survei re-akreditasi di puskesmas | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 85 | | | Rp | - | SKPD |
| 33 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (Pendamping) | terlaksananya pembinaan dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di 20 puskesmas jumlah rekomendasi izin operasional puskesmas, rumah sakit dan klinik kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan | dinas kesehatan dan 20 puskesmas dan rumah sakit | Kabupaten Pesisir Selatan | 85 | Rp | 400.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai | jumlah pegawai dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit yang dibina | dinas kesehatan dan 20 puskesmas dan rumah sakit | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Upaya Peningkatan Kinerja dan Institusi Kesehatan | jumlah tenaga kesehatan teladan | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pengadaan puskesmas keliling | tersedianya sarana dan prasarana yang representatif mobil puskel 3 unit dan mobil promosi kesehatan 1 unit | puskesmas tanjung beringin, puskesmas balai selasa, puskesmas airpura, dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 1.500.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------|---------------------------|----|-------------------|----|---|------|
| 37 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas | terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan alat kesehatan Rehab puskesmas inderapura pembangunan pagar puskesmas kambang pembangunan gedung PONED puskesmas koto baru pembangunan pagar dan pengaman tebing puskesmas rahul (lanjutan) rehab gedung obat dan pembangunan parkir ambulance puskesmas tanjung makmur pembangunan pagar puskesmas tanjung beringin pembuatan master plan dan DED RSUD lengayang pembuatan master plan dan DED puskesmas lakitan | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 43 | Rp 57.350.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping) | jumlah paket pekerjaan pembangunan gedung pelayanan puskesmas dan rumah dinas pembangunan gedung rawat jalan dan rawat inap puskesmas lumpo pembangunan rawat jalan dan gedung IGD puskesmas barung barung belantai pembangunan gedung rawat inap puskesmas airpura pembangunan rumah dinas puskesmas pasar kuok pembangunan baru puskesmas kayu gadang pembangunan baru puskesmas lakitan pembangunan baru rumah sakit umum lengayang pembangunan gedung rawat inap puskesmas asam kumbang pembangunan gedung | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 9 | | Rp | - | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------------|---------------------------|-----|------------------|------|--|------|
| 39 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya | lanjutan pembangunan puskesmas pasar baru pembangunan puskesmas asam kumbang | dinas kesehatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 3.750.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) | jumlah puskesmas yang menerima tambahan alat | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | Rp - | | SKPD |
| 41 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DBH Pajak Rokok) | tersedianya alat kesehatan untuk penanggulangan penyakit akibat rokok | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 3.500.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Puskesmas | perbaikan dan kalibrasi alat kesehatan puskesmas | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK) | jumlah unit IPAL untuk puskesmas | puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | | Rp - | | SKPD |
| 44 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Akreditasi Rumah Sakit | tersedianya rumah sakit yang terakreditasi | rsud tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 1.500.000.000 | | | SKPD |
| 45 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) | tersedianya alat -alat kesehatan yang memadai | rsud tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | Rp - | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|-----|--|--|----|----------------|------|
| 46 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) | tersedianya sarana dan prasarana yang representatif | rsud tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | - | SKPD |
| 47 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 95 | | | Rp | 7.000.000.000 | SKPD |
| 48 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya | terlaksananya pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | | | Rp | 1.291.000.000 | SKPD |
| 49 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Pelayanan Kesehatan (Kapasitas) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan | 20 puskesmas dan rsud tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | | | Rp | 17.595.944.000 | SKPD |
| 50 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Pelayanan Kesehatan (Non-Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatab | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | | | Rp | 2.000.000.000 | SKPD |
| 51 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | menurunnya angka kesakitan pada lansia | 15 kecamatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | 200.000.000 | SKPD |
| 52 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Usaha Kesehatan Ibu dan Anak | persentase K1 dan K4 | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | 500.000.000 | SKPD |
| 53 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Pelayanan Kesehatan Anak Pra-Sekolah dan Usia Sekolah (Prasek dan Usek) | Persentase prasek dan usek yang diberikan pelayanan kesehatan | sekolah dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | 45.000.000 | SKPD |
| 54 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik | persentase K1 dan K4 | puskesmas, RSUD dan RSUP | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | - | SKPD |
| 55 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) | Jumlah penyakit tidak menular dan penyakit akibat rokok yang dikendalikan | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | 175.000.000 | SKPD |
| 56 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | Pelayanan Kesehatan Orang d(ODGJ) Dengan Gangguan Jiwa | jumlah kasus ODGJ dan pasung di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilayani | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | | | Rp | 72.859.478 | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 57 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | Pemantauan dan Penggulungan Masalah Kesehatan Matra | jumlah orang yang terkena masalah kesehatan matra | 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp 95.000.000 | | | SKPD | |
| 58 | Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan | terlaksananya pelayanan kesehatan di RSUD Tapan dengan baik | rsud tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 7.500.000.000 | | | SKPD | |
| 59 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | terlaksananya pembinaan dan pengelolaan barang dan aset dinas kesehatan dan puskesmas | dinas kesehatan dan 20 puskesmas | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 80.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp 113.895.360.897 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|--|----------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 258.225.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 524.381.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 225.225.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 33.080.790 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 21.784.923 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 5.493.400 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 112.486.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 109.230.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 123.392.500 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 157.030.500 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 62.240.119 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Hi Lux Double Cabin Suzuki Pick Up Kendaraan roda dua kawasaki new KLX 150 | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 950.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 110.324.500 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|---------------------------|---|----|---------------|--|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 195.030.000 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 39.160.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 94.784.286 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Sinkronisasi Program DAK dan APBN | Sinkronisasi Program DAK dan APBN | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 194.214.340 | | | SKPD |
| 20 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | |
| 21 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | |
| 22 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Koto XI Tarusan | Pembukaan Jalan KEK Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 5.000.000.000 | | | SKPD |
| 23 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Koto XI Tarusan | Simp. Mandeh - Carocok | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 3.000.000.000 | | | SKPD |
| 24 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Bayang | Pembangunan Jalan Dilan Lanjutan | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 25 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara | | | | | | | | | |
| 26 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. IV Jurai | Jalan Komplek Pu - Ujung Tanjung | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 800.000.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. IV Jurai | Pengaspalan Halaman Kantor Dinas Perhubungan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------------------------|---------------------------|---|----------------|--|--|------|
| 28 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. IV Jurai | Jalan IPLT - Gunung Ransam | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. IV Jurai | Jalan Gunung Bungkok - Laban | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Batang Kapas | | | | | | | | |
| 31 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Sutera | Jalan Evakuasi Pasia Nan Panjang - Sianok | Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Sutera | Jalan Lingkar SMK N 1 Sutera | Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 33 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Lengayang | | | | | | | | |
| 34 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Ranah Pesisir | Jalan Padang Laban KM 11 Kec. Ranah Pesisir | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 35 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Linggo Sari Baganti | | | | | | | | |
| 36 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Air Pura | | | | | | | | |
| 37 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Pancung Soal | | | | | | | | |
| 38 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. BAB Tapan | Lanjutan Pembangunan Jalan TPA Tahap III | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 39 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. BAB Tapan | Pembangunan Jalan SMA 2 BAB Tapan lanjutan | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 400.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. RAH Tapan | Jalan Puskesmas Rahul | Ranah Ampek Hulu Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 41 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Lunang | Jalan RMP Lunang | Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 42 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Startegis/Desa Kec. Silaut | | | | | | | | |
| 43 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Kabupaten | | | | | | | | |
| 44 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Penunjang DAK Peningkatan Jalan | Penunjang DAK Peningkatan Jalan | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------------|---------------------------|-----|----|---------------|--|------|
| 45 | Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | | | | | | | | |
| 46 | Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pemeliharaan Rutin Drainase dan Trotoar | | | | | | | | |
| 47 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | | | | | | | | |
| 48 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan Lubuk Sarik - Kp. Akad | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.050.000.000 | | SKPD |
| 49 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan Gantung Pasar Barung-barung Balantai - Sei. Sangkir | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 65 | Rp | 855.000.000 | | SKPD |
| 50 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan Gantung Pasar Baru - Sekuntum Bunga | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 180 | Rp | 2.970.000.000 | | SKPD |
| 51 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan Gantung Ma. Pasar Baru | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 950.000.000 | | SKPD |
| 52 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan Gantung Sei Sarik - Koto Ranggo | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 950.000.000 | | SKPD |
| 53 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan gantung limau sundai | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 62 | Rp | 1.023.000.000 | | SKPD |
| 54 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan gantung Lubuak Cubadak | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 950.000.000 | | SKPD |
| 55 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan gantung Muaro sakai pasir ganting | Pancung Soal | Kabupaten Pesisir Selatan | 86 | Rp | 1.419.000.000 | | SKPD |
| 56 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan gantung Tanjung gobah Koto Tengah | Ranah Ampek Hulu Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 70 | Rp | 1.200.000.000 | | SKPD |
| 57 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Rehab Jembatan silaut VI | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------|------------------------------|----|----|---------------|--|--|------|
| 58 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Gantung Rantau Simalenang - Koto Langang | Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 80 | Rp | 1.270.000.000 | | | SKPD |
| 59 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Rangka Sei Sarik Silaut | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 60 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Simpang 3 - Tabing | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.200.000.000 | | | SKPD |
| 61 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Koto Pulai Kambang Timur | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.050.000.000 | | | SKPD |
| 62 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Silaut IV - Silaut V | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 63 | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat | Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 64 | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat | Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.000.000.000 | | | SKPD |
| 65 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | | | | | | | | | |
| 66 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | Penyusunan sistem informasi/data base jembatan | | | | | | | | | |
| 67 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | Penyusunan Sistem Informasi/Database Drainase | Penyusunan Sistem Informasi/Database Drainase | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 68 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan | Pengadaan alat-alat berat | Motor Greder | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.500.000.000 | | | SKPD |
| 69 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan | Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan | Pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 60.800.000 | | | SKPD |
| 70 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat -Alat Berat | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------|---------------------------|---|------------------|--|--|------|
| 71 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 15.488.000 | | | SKPD |
| 72 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Operasional Laboratorium | Operasional Laboratorium | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 141.337.034 | | | SKPD |
| 73 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 109.993.400 | | | SKPD |
| 74 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasaran air limbah | | | | | | | | |
| 75 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM IKK Tapan (DDUB) | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 76 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan SPAM JP termasuk Penyediaan SPAM JP Berbasis Masyarakat IKK Koto Pulai | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 77 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal Pasar Baru | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 600.000.000 | | | SKPD |
| 78 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM terbangun IKK Nyiur Melambai Ranah Pesisir | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 79 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Perluasan SPAM Perpipaian melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Sei. Lundang | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 3.000.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------|---------------------------|---|----|---------------|--|--|------|
| 80 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Perluasan SPAM Perpipaan melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Sei. Sirah Hilir Air Haji | Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 81 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan SPAM Perdesaan Nagari Air Hitam | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 900.000.000 | | | SKPD |
| 82 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Perluasan SPAM Perpipaan Batang Kapas | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.700.000.000 | | | SKPD |
| 83 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Optimalisasi SPAM IKK Langgai Sianok | Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 84 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Optimalisasi Tekanan Pipa Distribusi Jln. Imam Bonjol Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 85 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Perencanaan SPAM KEK Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 86 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan SPAM Nagari Sungai Pinang Kawasan Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 4.000.000.000 | | | SKPD |
| 87 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Pembangunan SPAM Perdesaan Nagari Koto Nan III IV Koto Hilie | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 4.000.000.000 | | | SKPD |
| 88 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 89 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---------------------------|---|----|---------------|--|------|
| 90 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) | Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 91 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 92 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi) | Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 93 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG) | Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 94 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Penunjang Air Minum (DAK) | Penunjang Air Minum (DAK) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 51.423.860 | | SKPD |
| 95 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Penunjang Sanitasi (DAK) | Penunjang Sanitasi (DAK) | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 104.787.966 | | SKPD |
| 96 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Penyusunan Database Air Minum dan Air Limbah | Penyusunan Database Air Minum dan air limbah | Tersebar | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 97 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Basa IV Balai | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.400.000.000 | | SKPD |
| 98 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Basa IV Balai | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 600.000.000 | | SKPD |
| 99 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Lengayang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---|----|---------------|--|--|------|
| 100 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Lengayang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 101 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Lengayang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 102 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Lengayang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.400.000.000 | | | SKPD |
| 103 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 104 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 105 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pengolahan Air Limbah Terpusat Kec. Basa IV Balai | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 106 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Kec. Bayang | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.500.000.000 | | | SKPD |
| 107 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 108 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 109 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.000.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------|---------------------------|---|----------------|--|--|------|
| 110 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 500.000.000 | | | SKPD |
| 111 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 500.000.000 | | | SKPD |
| 112 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 500.000.000 | | | SKPD |
| 113 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Pasar Sago | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 114 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Pasar Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 115 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan IPAL Pasar Batang Kapas | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 116 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 117 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 118 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 119 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------|---------------------------|---|------------------|--|--|------|
| 120 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 121 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 122 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pembangunan Septi Tank Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK | Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 150.000.000 | | | SKPD |
| 123 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Perencanaan Pengembangan infrastruktur | | | | | | | | |
| 124 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Alun - Alun Kota Painan (lanjutan) | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 5.500.000.000 | | | SKPD |
| 125 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Alun-alun Kota Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 1.100.000.000 | | | SKPD |
| 126 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Pasar Koto Berapak | Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 127 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Bundaran Diknas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 128 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Carocok Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 129 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Gor Zaini Zein | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 130 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Pasar Batang Kapas | Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |
| 131 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Pasar Balai Selasa | Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 750.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|---|----|---------------|--|--|------|
| 132 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Pasar Tapan | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 750.000.000 | | | SKPD |
| 133 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan High mast Rest Area Batas Kabupaten | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 750.000.000 | | | SKPD |
| 134 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembuatan Patung Tugu Rabab Pesisir | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 135 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gedung IT Akademi Komunitas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 3.580.000.000 | | | SKPD |
| 136 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pelataran Parkir dan Landscape Akademi Komunitas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 2.443.000.000 | | | SKPD |
| 137 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Lapangan Volly Gor Zaini Zain | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 138 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Linggo Sari Baganti | Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 139 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Pancung Soal | Pancung Soal | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 140 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Air Pura | Air Pura | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 141 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Basa IV Balai Tapan | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 142 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Lunang | Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 143 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gerbang Batas Kecamatan Silaut | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 144 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Tugu Adipura Tapan | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|----|---------------|--|--|------|
| 145 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata Kawasan Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 2.670.000.000 | | | SKPD |
| 146 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata Kawasan Timbulun | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 5.430.000.000 | | | SKPD |
| 147 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata Rumah Gadang Pessel | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 5.880.000.000 | | | SKPD |
| 148 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Toko dan Skywalk Kawasan Carocok Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 8.500.000.000 | | | SKPD |
| 149 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Kios Pedagang Makanan Kawasan Carocok Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.940.000.000 | | | SKPD |
| 150 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Pedestarian dan Landscape Kawasan Carocok Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.265.000.000 | | | SKPD |
| 151 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Air Mancur di Kawasan Carocok Painan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 2.670.000.000 | | | SKPD |
| 152 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Gedung Promosi Kuliner dan Pariwisata Sago | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.800.000.000 | | | SKPD |
| 153 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Area Take Off Paralayang | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 535.000.000 | | | SKPD |
| 154 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Penataan Tempat Pedagang Batas Kota Padang - Painan | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.500.000.000 | | | SKPD |
| 155 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Menara Pandang Kawasan Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 954.000.000 | | | SKPD |
| 156 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Tugu Wisata Kawasan Bahari Mandeh | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 875.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-----------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------|
| 157 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pemotongan Lahan Rest Area Puncak Paku - Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 485.000.000 | | | SKPD |
| 158 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan POS Retribusi Kawasan Mandeh Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 1.260.000.000 | | | SKPD |
| 159 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembuatan dan Pengadaan lampu Gerbang Batas Pesisir Selatan - Padang | Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 1.080.000.000 | | | SKPD |
| 160 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Rest Area Pasir Putih Kambang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 1.575.000.000 | | | SKPD |
| 161 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Stadion Olah Raga Kambang Kecamatan Lengayang | Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 7.250.000.000 | | | SKPD |
| 162 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Lapangan Bola Kaki di Sago | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 300.000.000 | | | SKPD |
| 163 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Sport Center Gor Zaini Zein | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 3.000.000.000 | | | SKPD |
| 164 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Pembangunan Air Mancur Bundaran Kodim | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 600.000.000 | | | SKPD |
| 165 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | Penataan Simp. Pasar Tapan | BAB Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 2.500.000.000 | | | SKPD |
| 166 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 167 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rehab Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 1.342.000.000 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 137.830.912.617 | Rp - | Rp - | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|------|---------------|--|-------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | | | | | | | | |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 24 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 25 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Lunang | Kampung Pondok Parian Nagari Pondok Parian Lunang, Kec. Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | | 1 Rp | 1.000.000.000 | | MSYKT |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------------|---|----|---------------|--|--|-------|
| 26 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Kumbang Gadang | Kampung Rantau Kataka Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Lunang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 700.000.000 | | | MSYKT |
| 27 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik | Kampung Koto Pandan Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | MSYKT |
| 28 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Saluran Alang Rambah | Kampung Alang Rambah Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa IV Balai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | MSYKT |
| 29 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Saluran Tanjung Durian Nagari Bukik Buai | Kampung Malepang Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa IV Balai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 30 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Amping Parak | Kampung Taratak Panas Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 600.000.000 | | | MSYKT |
| 31 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Tuik | Kampung Tuik Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 600.000.000 | | | MSYKT |
| 32 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Bayang | Kampung Koto Ranah Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Lubuk Agung | Kampung Laban Nagari Salido Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Sarasah | Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 1.000.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---------------------------|---|----|-------------|--|--|------|
| 35 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Lubuak Kualii | Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Patambuhan | Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 37 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Kuala Indah | Kampung Teluk Betung Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Jalamu | Kampung Jalamu Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 39 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Pampan | Kampung Sungai Pampan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Taluak | Kampung Koto Panjang Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | SKPD |
| 41 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Surau Papan | Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Lakitan | Kampung Koto Lamo Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai | Normalisasi Sungai Batang Lengayang | Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---------------------------|---|----|-------------|--|--|-------|
| 44 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Koto Nan IV | Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 45 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Talang Ketaping | Nagari Talang Koto Pulaui Kecamatan Ranah IV Hulu | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 46 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Lubuk Kubu | Nagari Limau Puruik Kecamatan Ranah IV Hulu | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 47 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Talang Balarik | Nagari Talang Balirik Kecamatan Ranah IV Hulu | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 48 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Titian Patai | Nagari Pasar Bukit Kecamatan Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | MSYKT |
| 49 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Banda Gadang Pancung Taba | Nagari Pancuang Taba Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 50 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Banda Koto Pancung Taba | Nagari Pancuang Taba Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 51 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Banda Tengah Ngalau Gadang | Nagari Limau Gadang Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |
| 52 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Rehabilitasi dan peningkatan Sawah Tengah Puluik-puluik | Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 53 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Sungai Baliang | Nagari Puluik-puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT | |
| 54 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Limau Manih | Kecamatan Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT | |
| 55 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | Daerah Irigasi Bayang Bungo | Nagari Kapujan Kecamatan Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | MSYKT | |
| 56 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) | | | | | | | | | | |
| 57 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | |
| 58 | Program Pengendalian Banjir | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Serik | Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD | |
| 59 | Program Pengendalian Banjir | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | Pengamanan dan Perkuatan Tebing Batang Surantih | Aur Duri Kecamatan Surantih | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD | |
| 60 | Program Pengendalian Banjir | Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 12.300.000.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pembayaran Rekening telp, Air dan Listrik | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 79.900.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pembayaran Honor dan Operasional Pengelola Keuangan | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 294.100.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor dan terdisediannya Peralatan dan Bahan Kebersihan | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 62.944.908 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya Pembayaran Jasa Keamanan Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 5.500.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 43.751.971 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 38.079.860 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 6.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makan Minum Rapat, Tamu dan Harian | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 13.610.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 0 | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 68.425.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Terlaksananya Pembayaran Jasa Keamanan Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 132.300.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan yang dihasilkan | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|---|----|---------------|--|------|
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 80.000.000 | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 83.200.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya Meubiler | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 66.441.800 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 68.920.000 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 22.375.000 | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pengadaan Pakaian Sulaman Bayangan dan Baju Olahraga, Baju set Satpam | IV JURAI | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 52.541.704 | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan | Tersedianya Pengadaan Jalan Lingkungan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 2.500.000.000 | | SKPD |
| 23 | Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman | | | | | | | | |
| 24 | Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Pemeliharaan Drainase Kawasan | Terpeliharanya Drainase Kawasan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | SKPD |
| 25 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Tersedianya Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Aparatur | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 600.000.000 | | SKPD |
| 26 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Pembangunan Rumah Dinas | Tersedianya Rumah Dinas Aparatur | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 1.300.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 27 | Program Pengembangan Perumahan | Bantuan Jamban Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | | | | | | | | | |
| 28 | Program Pengembangan Perumahan | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 5.783.090.243 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|--|----------------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja Rekening Listrik, Air dan Telepon | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 87.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Belanja Honorarium PA, KPA, bendahara dan PPK | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 88.500.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Belanja Kebersihan kantor dan Honor Non PNS Jasa Kebersihan Kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 80.757.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Belanja Alat Tulis Kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 55.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belanja Alat-alat Listrik/Penerangan kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 17.600.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 36.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Belanja rekening Korang dan Publikasi | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 16.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Belanja Makan dan Minum Rapat dan Tamu | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 55.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Belanja Perjalanan Dinas ke luar Daerah | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 180.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 170.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Belanja Penunjang Perencanaan dan Pelaporan | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (2 unit), 1 unit mobil Pimpinan, 1 unit Mobil Patroli dan 3 unit mobil damkar | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp 12.370.000.000 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Belanja Pengadaan Peralatan Piket dan Belanja Pengadaan Peralatan Damkar | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 335.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Belanja Pengadaan Meja rapat, meja dan Kursi eselon II dan IV | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 50.000.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 277.000.000 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 230.000.000 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Belanja Pakaian Dinas Satpolpp dan Damkar | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 370.000.000 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 22 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | |
| 23 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas Nagari dan Kecamatan | | | | | | | | |
| 24 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Pengendalian Keamanan Objek Wisata | | | | | | | | |
| 25 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara | | | | | | | | |
| 26 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Konsolidasi Peran Satpol PP se-Sumatera Barat dan Indonesia | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 27 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu | | | | | | | | | | |
| 28 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Forum Penegakan Perda | | | | | | | | | | |
| 29 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Sosialisasi Perda dan Perbup | | | | | | | | | | |
| 30 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Pembentukan Pol PP Pelajar | | | | | | | | | | |
| 31 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran | | | | | | | | | | |
| 32 | Penanganan Tanggap Darurat | Operasional Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 14.527.857.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|--|--------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 29.700.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 99.118.250 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 93.471.430 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 49.500.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 34.100.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 4.950.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Paian | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 27.500.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 40.150.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.750.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 70.400.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Monitoring Evaluasi Kegiatan | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 69.500.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 49.500.000 | | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 28.161.100 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 77.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp | 276.474.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Sekretariat Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 13 | Rp | 15.400.000 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | | |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 20 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Penunjang Operasional PKH | Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 85.775.036 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 21 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Verifikasi penerima Bantuan Iuran APB | Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 22 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pelayanan Orang Terlantar | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 144.142.981 | | | SKPD |
| 23 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana | Bidang Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |
| 24 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 600.000.000 | | | SKPD |
| 25 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Verifikasi dan Validasi data PMKS | Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 26 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT | Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 141 | Rp | 67.309.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin | Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 118 | Rp | 93.991.480 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--------|---------------------------|----|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 29 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 68 | Rp | 95.282.500 | | | SKPD | |
| 30 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 145.893.221 | | | SKPD | |
| 31 | Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan | Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan HSKN | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 36.650.096 | | | SKPD | |
| 32 | Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan | Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 95.509.130 | | | SKPD | |
| 33 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 125.738.652 | | | SKPD | |
| 34 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 114.807.880 | | | SKPD | |
| 35 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.396.200 | | | SKPD | |
| 36 | Perlindungan Anak | Pembinaan Nagari Layak Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 173.829.044 | | | SKPD | |
| 37 | Perlindungan Anak | Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD | |
| 38 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 20.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 4.000.000.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Terhadap Telpon, Air dan Listrik | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 45.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 149.650.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terciptanya Suasana Yang Bersih dan Nyaman | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 120.175.700 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Operasional Administrasi Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 35.443.705 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan dan Percetakan Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 27.192.200 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 17.311.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya Kebutuhan Terhadap Informasi dan Pengetahuan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 12.200.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makan, Minum PNS dan Tamu Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 71.500.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya Tugas-Tugas Rutin Dalam Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 58.600.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Tugas-Tugas Rutin Dalam Provinsi Dalam Daerah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 99.975.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Monitoring Evaluasi Kegiatan | Tersedianya Data Perkembangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 41.400.195 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kendaraan Dinas/Operasional | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 76.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------|-----|----|---------------|--|------|
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Alat Rumah Tangga | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 75.000.000 | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 113.185.380 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Komputer (PC dan Laptop) | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 115.450.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 150.000.000 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 139.766.000 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 25.740.000 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | Meningkatnya SDM / Keterampilan Pencari Kerja | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 2.170.657.500 | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pemeliharaan Peralatan Workshop | Tersedianya Peralatan Sarana dan Prasarana BLK | BLK Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp | 70.545.000 | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kelelatihan/Instruktur dan Akreditasi Jurusan | Meningkatnya SDM Instruktur dan Akreditasi 8 Jurusan Bagi Pencari Kerja | BLK Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp | 120.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 26 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pembinaan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS) | Terlaksananya Pembinaan Terhadap LPKS | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Tersebaranya Informasi Bursa Tenaga Kerja | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | |
| 29 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 90.000.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Jumlah Pengawas dan Perlindungan Tenaga Kerja | Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 80 | Rp | 88.513.500 | | | SKPD |
| 31 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Peningkatan Fungsi LKS Tripartit | Terlaksananya Peningkatan Fungsi LKS Tripartit | - | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pembangunan Rumah Panjang | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 706.200.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Penambahan Los Pasar Grosir | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 332.600.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Penghijauan Halaman Parkir Pasar | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 501.200.000 | | | SKPD |
| 35 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pemeliharaan Gapura KTM Lusi | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Penimbunan Halaman Rumah Pintar | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 37 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pembangunan Tempat Penjemuran Halaman IPOG | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kawasan Transmigrasi | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 39 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pendampingan dan Pembantuan Kawasan Transmigrasi | Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan KTM Lunang Silaut | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 275.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan Jalan Talang Binjai Perbatasan ST 8 Muko-Muko | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 41 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan Jalan Sei. Pulau Silaut III Air Hitam Silaut IV | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan Jembatan Gantung Silaut V - Silaut VI Bentang 80 m1 | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah TPA KTM | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 44 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan Tempat Jemuran dan Halaman IPOG | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 45 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Perencanaan Dukungan Kawasan Transmigrasi | Perencanaan DAK Afirmasi | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 46 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Usaha Transmigrasi | Kelembagaan RMP | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 289.675.000 | | | SKPD |
| 47 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Usaha Transmigrasi | Kelembagaan IPOG | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 289.675.000 | | | SKPD |
| 48 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan RMP | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 36.000.000 | | | SKPD |
| 49 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan IPOG | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD |
| 50 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Pasar Grosir | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD |
| 51 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Pusat Bisnis | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD |
| 52 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Industri Pengelolaan Jagung | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------|----------|---------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 53 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Rumah Batik | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD | |
| 54 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Islamic Center | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD | |
| 55 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Alat Alsintan | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD | |
| 56 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi | Kelembagaan Rumah Pintar | KTM Lusi | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 33.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 8.087.655.180 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 70.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 87.500.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 110.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 40.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 50.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 20.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 4.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 16.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 198.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 160.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 14.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan komputer, laptop dan printer | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Pengadaan rak asrip gantung | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 30.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------------|---------------------------|----|----|-------------|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 125.000.000 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp | 100.000.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 27 | Rp | 11.000.000 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 19 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penanganan daerah rawan pangan | Penanganan daerah rawan pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 150.000.000 | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Pengembangan desa mandiri pangan | Pengembangan desa mandiri pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp | 67.000.000 | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping) | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN | Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 80.000.000 | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat | Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 23 | Rp | 70.000.000 | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten) | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten) | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 650.000.000 | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) | Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---------------------------|----|----|-------------|--|--|-------|
| 26 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan | Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Peyusunan Database Ketahanan Pangan | Penyusunan Database Ketahanan Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / TTI (Toko Tani Indonesia) | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / TTI (Toko Tani Indonesia) | Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir, Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang, Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) | Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 55.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | Penunjang DAK Ketahanan Pangan | Penunjang DAK Ketahanan Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan | Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan | Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan | Kecamatan Sutera, Ranah Pesisir, Airpura, Pancung Soal, IV Jurai, Koto XI Tarusan dan Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 150.000.000 | | | MSYKT |
| 34 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen | Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyusunan Pola Pangan Harapan | Penyusunan Pola Pangan Harapan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|----|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 36 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan | Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD | |
| 37 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | MSYKT | |
| 38 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Model Percontohan Keamanan Pangan | Model Percontohan Keamanan Pangan | Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 170.000.000 | | | SKPD | |
| 39 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) | Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD | |
| 40 | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 260.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 4.432.500.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|---|--|--|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Listrik dan Air yang tersedia. | Kec.IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 59.500.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 68.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 5.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ketersediaan ATK | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 25.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 25.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Ketersediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 7.500.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 10.500.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah yang dihadiri | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 125.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 45.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | | | | |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------------|---------------------------|---|----|-------------|--|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan (AC 2 Unit, Komputer PC 2 Unit) | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Jenis Meubiler yang Diadakan (Meja 6 Unit, Kursi 6 Unit Lemari 6 Unit) | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Mobil 2 unit, Sepeda Motor 6 unit, becak motor 1 unit) | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan PPLHD 2 orang, Dasar-dasar AMDAL 3 orang, AMDAL A 2 orang, AMDAL B 1 orang, Analisis Labor 5 orang | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi OPD yang disusun | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 21 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | | | | | | | | | |
| 22 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 23 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Terlaksananya pemantauan penurunan timbunan Sampah dan pembinaan pengelolaan sampah dengan konsep 3 R | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---------------------|---------------------------|---|----|-------------|--|--|------|
| 24 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Titik Pantau Adipura, Kecamatan dan Nagari bersih dan Kampanye Lingkungan Hidup (25 Titik Pantau Adipura, 15 Kecamatan GSB, Peringatan HPNS dan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 400.000.000 | | | SKPD |
| 25 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Terlaksananya Pemantauan kualitas air, tanah dan udara | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |
| 26 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah objek usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta jumlah pengaduan yang di fasilitasi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 27 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | | | | | | | | | |
| 28 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | Jumlah Perorang/kelompok masyarakat sebagai pemerhati lingkungan dan jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata | Kab.Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 387.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Pengadaan sarana dan prasarana uji Kualitas Air Laboratorium | Jumlah Saranan dan Prasaranan uji kualitas air | Kecamatan IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 | Jumlah kegiatan penghasil Limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan direkomendasikan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Penyusunan Perencanaan Dokumen LH | Jumlah Dokumen Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------|---------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 32 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Operasional Laboratorium | Terlaksananya Operasional laboratorium | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD | |
| 33 | Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Hidup | Jumlah sosialisasi regulasi lingkungan | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD | |
| 34 | Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Tersedianya dokumen informasi lingkungan Hidup | Kab.pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD | |
| 35 | Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL | Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian dokumen lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL | Kab.Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD | |
| 36 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Pengujian emisi kendaraan bermotor | | | | | | | | | | |
| 37 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten | | | | | | | | | | |
| 38 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Evaluasi Kualitas Udara | | | | | | | | | | |
| 39 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Pemantauan Kualitas Udara Emisi | | | | | | | | | | |
| 40 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 3.597.500.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|---|--|--|--------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 82.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Honor Pengelola Keuangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 140.000.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Service dan suku cadang peralatan kerja | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 10.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan cetak dan penggandaan kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 21.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan komponen instalasi listrik kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 8.500.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan kerja yang baru (Genset, AC, Printer, dan Camera CCTV) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp | 600.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 14.900.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan minum tamu/rapat kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 19.800.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 178.582.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 61.040.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Persentase tersedianya meubiler kantor yang memadai | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 20.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------|---------------------------|--------|----|-------------|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan gedung dan halaman kantor (sekat ruangan, pintu, dan halaman kantor) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 30.000.000 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor (2 unit minibus, 1 unit mobyanduk dan 19 unit motor) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 45.000.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 18 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu | Jumlah struktur jaringan data yang baik dan dapat digunakan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 300.000.000 | | SKPD |
| 19 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu | Jumlah data kependudukan yang dikonsolidasikan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 150000 | Rp | - | | SKPD |
| 20 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | Jumlah data anomali yang diperbaiki | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 103200 | Rp | 125.000.000 | | SKPD |
| 21 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | Jumlah data ganda yang dihapus | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 59363 | Rp | - | | SKPD |
| 22 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | Jumlah paket informasi kependudukan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 132.000.000 | | SKPD |
| 23 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil | | | | | | | | |
| 24 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | | | | | | |
| 25 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik) | | | | | | | | |
| 26 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Penerbitan Kartu Keluarga | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|--|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 27 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja | | | | | | | | | | |
| 28 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai | | | | | | | | | | |
| 29 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | | | | | | | | | | |
| 30 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | | | | | | | | | | |
| 31 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Penataan Arsip Kependudukan Berbasis Digital | | | | | | | | | | |
| 32 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) | | | | | | | | | | |
| 33 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) | | | | | | | | | | |
| 34 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse | | | | | | | | | | |
| 35 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pendataan Penduduk Rentan Penduduk Asing | | | | | | | | | | |
| 36 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 1.907.822.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 14.500.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 13.000.000 | | | SKPD |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 26.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------------|---------------------------|----|----|---------------|--|------|
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Kegiatan Rutin | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 180.000.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung Kantor | Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 1.875.000.000 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp | 4.200.000.000 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Pemenuhan kebutuhan pegawai akan mebeuler kerja | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan gedung kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 150.000.000 | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas dan operasional yang laik jalan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 450.000.000 | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kegiatan ini merupakan suatu upaya dalam penyeragaman dalam berpakaian | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 350.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perhubungan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 45.000.000 | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Diklat Teknis Perhubungan | Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perhubungan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp | 100.000.000 | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Termonitornya seluruh kegiatan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 150.000.000 | | SKPD |
| 25 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan | Berfungsinya terminal sebagai simpul transportasi | Terminal Pasar Baru Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |
| 26 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas | Terpeliharanya alat keselamatan lalu lintas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 250.000.000 | | SKPD |
| 27 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR) | Terpeliharanya pos retribusi yang layak sebagai tempat pemungutan PAD | Siguntur, Limau Purut Tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 150.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------------------|-----|----|---------------|--|--|------|
| 28 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan | Adanya pemahaman masyarakat akan lalu lintas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 180.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan | | | | | | | | | |
| 30 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan | Tercapainya kabupaten pesisir selatan sebagai kabupaten tertib lalu lintas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 44 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pengawasan dan Pengendalian LLAJ | Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar dan selamat | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan laut | Terciptanya arus lalu lintas yang aman, lancar dan selamat | Carocok painan, carcok tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut | Adanya pemahaman pemilik kapal akan keselamatan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan | Terlayannya pelajar akan transportasi yang layak | Koto XI Tarusan, rahul tapan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Pelayanan Terminal dan Perpikiran | Terlayannya pemilik kendaraan akan area parkir yang aman dan nyaman | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 376.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Penyusunan Database Perhubungan Berbasis Spasial | Tersedianya data dan peta perhubungan yang berbasis spasial | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 37 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Penyusunan Jalur Jaringan Treyek Transportasi | tersedianya trayek transportasi yang jelas | Carocok tarusan, carocok painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pembangunan Gedung Terminal | Tersedianya terminal sebagai simpul transportasi | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 39 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal | Tersedianya halte bagi pengguna angkutan umum | Pasar Baru Bayang, Balai Selasa Ranah Pesisir, Lalang Panjang Inderapura, Kambang | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal | Tersedianya tambatan perahu bagi pemilik perahu | Batu Kereta | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---------------------------|----|----|---------------|--|--|------|
| 41 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pengembangan Pembangunan Pelabuhan | Terlaksananya Pengembangan pembangunan pelabuhan di kabupaten pesisir selatan | Kapo-kapo, cacorok tarusan, mandeh, pelabuhan panasahan painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 3.100.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pembangunan Fasilitas Transportasi Perdesaan (DAK) | Terbangunnya sarana prasarana transportasi | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | - | | | SKPD |
| 43 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pembangunan Pos Retribusi | Tersedianya pos retribusi yang layak di silaut | Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 2.500.000.000 | | | SKPD |
| 44 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | | | | | | | | | |
| 45 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum | Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan | Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 5.000.000.000 | | | SKPD |
| 46 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas | Tersedianya alat keselamatan lalu lintas sebagai upaya penurunan angka kecelakaan | Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo sari baganti, Pancung soal, Air pura, Basa ampek balai tapan, Ranah ampek hulu tapan, Lunang, Silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 2.879.400.000 | | | SKPD |
| 47 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) | Tersedianya RPPJ sebagai petunjuk pengguna jalan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 48 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan | Tersedianya papan nama jalan bagi masyarakat | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 49 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum | Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 6.500.000.000 | | | SKPD |
| 50 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | Pengujian kendaraan dalam peningkatan laik jalan kendaraan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 470.000.000 | | | SKPD |
| 51 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Pembangunan Fasilitas Pelayanan Perhubungan | Terciptanya rasa nyaman bagi pemilik kendaraan yang melakukan uji kendaraan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|----|----------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 52 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Tersebar nya Informasi pembangunan bidang perhubungan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000 | | | SKPD | | |
| 53 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya pemungutan Pendapatan Asli Daerah | siguntur, limau purut tapan dan terminal silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 500.000.000 | | | SKPD | | |
| 54 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Pelaksanaan hari jadi perhubungan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 50.000.000 | | | SKPD | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 36.703.900.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|---|--|---|-------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran telp, listrik, air | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 185.000.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 125.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | | | | |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 85.500.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.500.000 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 9.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 14.000.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat ke luar daerah (bln) | Sumbang | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat dalam daerah (bln) | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya operasional untuk perencanaan dan pelaporan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor Unit) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp | 73.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Trsedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (bln) | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 20.000.000 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 19 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra, jumlah UMKM potensial yang duploadke aplikasi SIPR, Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi permodalanKa | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 280 | Rp | 300.000.000 | | SKPD |
| 20 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Pendataan/Validasi data UMKM | Database UMKM, Database Perdagangan, Database IKM | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 225.000.000 | | SKPD |
| 21 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah (pembinaan dan bimtek),Jumlah pengembangan kewirausahaan, Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Proposal Pengembangan Usaha,Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp | 600.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi perubahan anggaran dasar | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 60.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|------|
| 23 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | | | | | | | | |
| 24 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perkoperasian | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan akuntansi koperasi, Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek kelembagaan koperasi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 120 | Rp | 220.000.000 | | SKPD |
| 25 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | | | | | | | | |
| 26 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah | Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis pelayanan administrasi kantor UPTD , Jumlah lokasi pelayanan tera/tera ulang, jumlah pengawasan kemetrolgian | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 850.000.000 | | SKPD |
| 27 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Pemantauan Harga dan Operasi Pasar | Laporan monitoring pengawasan barang dan jasa :pupuk bersubsidi, gas elpiji subsidi, label produk (10 produk, 50 merk) | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 120.000.000 | | SKPD |
| 28 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Pemantauan Harga dan Operasi Pasar | Laporan harga sembilan bahan pokok, Operasi pasar, , | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.000.000 | | SKPD |
| 29 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Data distribusi produk / Komoditi penting, '- Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok lainnya, '- data kumpulan komoditi unggulan dan komoditi ekspor, Jumlah pameran / promosi produk unggulan yang diikuti | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---------------------------|----|----|----------------|--|--|------|
| 30 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Penyelenggaraan Painan Expo | Terlaksananya painan ekspo | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan | Jumlah pasar yang dibangun/revitalisasi, Tersedianya display visual informasi harga | Pasar Surantih, Pasar Lakitan, Pasar Airpura, Pasar Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 18.640.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan | Jumlah pasar nagari yang direhab/revitalisasi | Psr Silaut (pasir binjai), 'Psr. Barung belantai, '-psr sore simp lagan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 600.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan | Jumlah pasar yang drehab/dipelihara | Psr Baru , psr batang kapas, Pasar Tarusan, , Pasar balai selasa | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 800.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK) | Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi | Pasar Airhaji, Pasar baru bayang, Psr barung barung belantai | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 10.500.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan | Tersedianya Penunjang operasional kegiatan percepatan pembangunan pasar | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Pengamanan dan Pengelolaan Pasar | target PAD dari retribusi pasar , Jumlah pasar yang dikelola, Jumlah pasar yang dibina | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 655.900.000 | | | SKPD |
| 37 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya | '- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengolahan Pangan, '- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Industri Kerajinan | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri | - Jumlah pameran / event yang diikuti , '- Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan dan pelatihan serta jumlah bantuan yang disalurkan, | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 39 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Fasilitasi Kerjasama Mitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta/BUMN/BUMD | Jumlah IKM yang bermitra dengan Swasta/BUMN/BUMD | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------|---------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 40 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pembinaan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dibangun diawasi, Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi Perda RPIK | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp | 125.000.000 | | | SKPD | |
| 41 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Penumbuhan dan Penataan Kelompok Industri Unggulan | Jumlah Kelompok IKM Terlembaga (yang berpotensi sentra), Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelatihan | kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD | |
| 42 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Pembangunan Sentra IKM (DAK) | ruang produksi bersama, ruang display, pembangunan infrastruktur fisik dalam sentra, pembangunan sarana penunjang, pengadaan mesin dan peralatan sentra Ikmm Perikanan, biaya non fisik(penunjang) | terusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 18.200.000.000 | | | SKPD | |
| 43 | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Pembangunan Sentra IKM (Fasilitasi DAK) | Tersedianya Fasilitas DAK | terusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 55.062.900.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|---|-------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 44.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 79.200.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 108.759.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 15.200.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 32.324.500 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 24.870.700 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 27.270.300 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 37.650.000 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 16.900.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 32.400.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor | Luar Daerah | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 118.550.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 64.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|---------------------------|---|----|-------------|--|------|
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya Operasional perencanaan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 41.000.000 | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2 | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 60.000.000 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya kebutuhan meubleur | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 35.000.000 | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan kantor | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 97.250.000 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya 2 unit mobil dinas dan 4 unit kendaraan roda 2 | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 90.000.000 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 23.500.000 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA | Terciptanya kerjasama investasi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 47.000.000 | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Tercapainya kerjasama dengan investor | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 35.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Promosi Investasi di dalam negeri dan luar negeri | Terlaksananya Promosi Investasi | Luar Daerah | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 240.000.000 | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Publikasi Perizinan Penanaman Modal | Vidio Promosi/film | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 95.000.000 | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Pemutakhiran Data dan Informasi Perizinan | Tersedianya informasi data perizinan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 248.562.500 | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal di Daerah | Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 80.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-------------|---------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 26 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Pelayanan Penanaman Modal | Terlaksananya fasilitas layanan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 187.959.800 | | | SKPD | |
| 27 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Melalui Jaringan Aplikasi Penanaman Modal | Tersedianya sistem informasi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD | |
| 28 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal | Terlaksananya Pengawasan investasi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD | |
| 29 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi | Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 180.000.000 | | | SKPD | |
| 30 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional | Tersedianya SOP Perizinan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD | |
| 31 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Survey Indek Kepuasan Masyarakat | Diketuainya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan | IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 34.000.000 | | | SKPD | |
| 32 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan | Terlaksananya monitoring kegiatan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 115.283.000 | | | SKPD | |
| 33 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan | Terlaksananya sosialisasi | kecamatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 135.000.000 | | | SKPD | |
| 34 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Optimalisasi Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile | tersedianya Sistem informasi Pelayanan Mobile | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 700.000.000 | | | SKPD | |
| 35 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Operasional Penyelenggara Perizinan | Operasional Penyelenggara Perizinan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 135.800.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 3.491.479.800 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya jasa surat menyurat | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 8.000.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersediannya Komunikasi ,sumber daya air dan listrik | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 60.000.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya administrasi keuangan | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya kebersihan kantor | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 80.000.000 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | tersedianya perbaikan peralatan kerja | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 7.650.000 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan alat tulis kantor | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 30.865.600 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | tersedianya barang cetak dan pengadaan | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 45.000.000 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 10.799.024 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | meja kerja pejabat eselon II : 1 unit meja kerja pejabat eselon III : 4 unit meja kerja pejabat eselon IV : 6 unit Meja Staf : 10 unit Kursi Putar Pejabat eselon II : 1 unit Kursi Putar Pejabat eselon III : 3 unit Kursi Putar Pejabat eselon IV : 10 unit Kursi fultura : 25 unit lemari arsip kaca : 4 unit Lemari arsip kaca (rendah) : 5 unit filling Cabinet : 5 unit rak arsip : 5 unit Meja rapat : 1 unit Kursi rapat : 8 unit Laptop : 2 unit personal camputer : 3 unit printer A3 : 4 unit Printer A4 : 3 unit scanner (fast Scan) : 1 unit Ac : 2 unit | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 192.550.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 13.900.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | tersedianya makan dan minum | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 139.250.000 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalm daerah | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 85.500.000 | | | SKPD |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | | | | |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung Kantor | penambahan ruang kantor Dinas Pariwiata pemuda dan olahraga | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 180.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----|------------------|--|--|------|
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - pengadaan Kendaraan Roda 4 Double cabin - Pengadaan Kendaraan roda 2 | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.070.000.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | terpeliharanya rutin/berkal gedung kantor | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 75.000.000 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 200.000.000 | | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 24 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler | | | | | | | | |
| 25 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | -rehabilitasi sedang kantor dinas pariwisata pemuda dan olahraga | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 75.000.000 | | | SKPD |
| 26 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 27 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | Dinas pariwisata Pemuda dan olahraga | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 50.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 28 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Peningkatan dan Pembinaan Pemuda Berprestasi | - pemberdayaan Duta wisata Kabuapten pesisir selatan - jambore pemuda indonesia (JPI) kab pessel - penilaian pemuda pelopor - lomba kreatifitas pramuka berprestasi - lomba dan pengiriman tim PBB ke TK.prov | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 395.500.000 | | | SKPD |
| 29 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembentukan Paskibraka | terbentuknya paskibraka kab.pessel tahun 2020 | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 76 | Rp | 800.000.000 | | | SKPD |
| 30 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - pelatihan peningkatan Mutu Organisasi pemuda | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 35.000.000 | | | SKPD |
| 31 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 20.000.000 | | | SKPD |
| 32 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - Pelatihan kepemimpinan dasar pemuda tingkat dasar | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 17.500.000 | | | SKPD |
| 33 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - pelatihan tenaga kepemudaaan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 34 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - bimbingan dan pelatihan kewirausahaan enterpreniurship | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 35 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - pendidikan bela negara | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 36 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - sosialisasi Berinternet Cerdas | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 22.500.000 | | | SKPD |
| 37 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - Sosialisasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS bagi pemuda | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 22.500.000 | | | SKPD |
| 38 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - pemberdayaan organisasi kepemudaaan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 121.500.000 | | | SKPD |
| 39 | program peningkatan peran serta kepemudaaan | Pembinaan Kepemudaaan | - Peringatan Hari Sumpah Pemuda | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 25.000.000 | | | SKPD |
| 40 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Pelatihan pelatih dan wasit sepak bola | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----|----|---------------|--|--|------|
| 41 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Pelatihan Pengurus Cabor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 34 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 42 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Peningkatan SDM Tenaga Olahraga | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 43 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Fasilitas Cabang Olahraga | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 44 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Aktivasi dan Bantuan Peralatan Olahraga | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 120.000.000 | | | SKPD |
| 45 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | - Penyusunan Perda Keolahragaan Kab.Pessel | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 46 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi | - pemasyarakatan olahraga massal - fasilitas FORMI kab.pessel | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 227.500.000 | | | SKPD |
| 47 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | - open tournament voli pantai TK.Nasional | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 450.000.000 | | | SKPD |
| 48 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | -open Paralayang Internasional | kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 425.000.000 | | | SKPD |
| 49 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | -kejuaraan antar SSB se-Kab Pesisir Selatan | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD |
| 50 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | -Kejuaraan Sepak Bola Bupati Cup Pessel | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 51 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | - Popda (Pekan Olahraga Pelajar) | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 52 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | - Aktivasi Iven-iven Olahraga | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 53 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | -tournament Futsal se-Sumbar | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 54 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Partisipasi Kompetensi Olahraga | - Pekan Paralympic kabupaten (pekan olahraga penyandang cacat) - mengikuti pekan olahrag bela diri daerah (PORBIDA) - Fasilitas persiapan Porprov 2020 - Bonus Porprov 2020 | prov.sumbar | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 3.196.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------|---------------------------|----|----|----------------|--|--|------|
| 55 | Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga | - pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga - monitoring sarana dan prasarana serta kegiatan keolahragaan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 170.000.000 | | | SKPD |
| 56 | Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (DAK) | - Pembangunan Gedung Olahraga (DAK) | kec. lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 16.000.000.000 | | | SKPD |
| 57 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - Festival Pesona Bahari Mandeh | mandeh | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 725.000.000 | | | SKPD |
| 58 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - Festival Langkisau | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 59 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - Festival Pasisia | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 60 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - event berbasis Komunitas | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 275.000.000 | | | SKPD |
| 61 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - Uda dan Uni Duta Wisata Kab.Pessel | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |
| 62 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Kepariwisataaan | - Pemberdayaan Duta wisata Kabupaten Pesisir Selatan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 121.500.000 | | | SKPD |
| 63 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Aktifasi Ivent Kepariwisataaan | terlaksananya keikutsertaan event kepariwisataaan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 450.000.000 | | | SKPD |
| 64 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Tour De Singkarak | terlaksananya promosi/event pariwisata | kec.IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 450.000.000 | | | SKPD |
| 65 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pembuatan Database Pariwisata Pesisir Selatan | tersusunya profil pariwisata | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 80.000.000 | | | SKPD |
| 66 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Kawasan Objek Wisata | - operasional objek wisata pantai carocok painan | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 450.000.000 | | | SKPD |
| 67 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Kawasan Objek Wisata | - Operasional Objek wisata Mandeh | kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 350.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------|---------------------------|----|----|---------------|--|--|------|
| 68 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Kawasan Objek Wisata | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek wisata | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 324.000.000 | | | SKPD |
| 69 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Kawasan Objek Wisata | - Monitoring Destinasi Wisata | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 162.000.000 | | | SKPD |
| 70 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - pembuatan SID perencanaan objek wisata | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 71 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK) | - peningkatan sarana dan prasarana pulau semangki | kec.IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 5.000.000.000 | | | SKPD |
| 72 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK) | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Jembatan Akar | kec.bayang Utara | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 2.000.000.000 | | | SKPD |
| 73 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK) | - Peningkatan sarana dan Prasarana sungai nyalo | kec.Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 3.851.850.000 | | | SKPD |
| 74 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK) | - Peningkatan sarana dan Prasarana TIC (lanjutan) | kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 3.000.000.000 | | | SKPD |
| 75 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata (DAK) | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Sungai Gemuruh (lanjutan) | kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 750.000.000 | | | SKPD |
| 76 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - pengembangan kawasan wisata pantai sanbungo | kec.silaut | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 77 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - pengembangan kawasan wisata pasir putih kambang | kec.lenggayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 500.000.000 | | | SKPD |
| 78 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - Pembangunan Pos Terpadu Kepariwisataaan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 79 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - Pembangunan Musholla Pulau Setan | Kec. IV jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 243.000.000 | | | SKPD |
| 80 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | - Pembangunan sarana dan Prasarana objek wisata Nagari | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 250.000.000 | | | SKPD |
| 81 | Program Pengembangan Kemitraan | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | terfasilitasinya Tamu pemda untuk mempromosikan objek wisata di kabupaten | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 194.400.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|----|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 82 | Program Pengembangan Kemitraan | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | - bimbingan teknis pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif - sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif - pemberdayaan nagari (BUMNAG) dalam mengelola objek wisata - Focus group (FGD) pelaku kepariwisataan | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp | 399.000.000 | | | SKPD | |
| 83 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pembinaan dan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif | - Pelatihan pelaku dan kelompok ekonomi kreatif - aktivasi usaha pelaku dan kelompok ekonomi kreatif - pembinaan pelaku dan kelompok ekonomi kreatif | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 439.500.000 | | | SKPD | |
| 84 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Partisipasi Ekonomi Kreatif | - partisipasi ekonomi kreatif dalam promosi dan pemasaran | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp | 405.000.000 | | | SKPD | |
| 85 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif | pengadaan bantuan peralatan kelompok ekonomi kreatif | kabupaten pesisir selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 121.500.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 49.223.264.624 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|--|---|---------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | | | |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | | | |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | | | |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | | | | | | | | |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | | | | | | | | |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | | | |
| 13 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan | Beroperasinya pabrik pengolahan pakan ikan (bulan) | Carocok, Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 82.115.000 | | SKPD |
| 14 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pengelolaan Balai Benih Ikan | Jumlah produksi benih (ekor) | Pincuran boga, Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 300000 | Rp | 200.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------------------|----|----|-------------|--|------|
| 15 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK) | | | | | | | | |
| 16 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya | Tertunjangnya kegiatan DAK bidang perikanan budidaya (bulan) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 16.550.000 | | SKPD |
| 17 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya | Tertibnya administrasi kegiatan pusat dan provinsi (bulan) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | - | | SKPD |
| 18 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | 1. Jumlah pembudidaya yang dilatih CPIB dan CBIB (orang) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 19 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | 2. Jumlah SDM Aparatur BBI yang terlatih (paket) | Balai Budidaya Air Tawar | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 60.000.000 | | SKPD |
| 20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penanganan Hama Penyakit Ikan | Tertanganinya pengendalian hama dan penyakit (kasus) | Kab Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 72.790.000 | | SKPD |
| 21 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Pembinaan UPR dan Pokdakkan | Terbinanya UPR dan Pokdakan (15 UPR dan 20 Pokdakan) | Kab Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 35 | Rp | 160.000.000 | | SKPD |
| 22 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 1. Paket percontohan budidaya gurame (15000 benih gurame dan 2500 kg pakan) | Talang Sarumpun, Nagari Pasar Baru, Kec Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 82.500.000 | | SKPD |
| 23 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 2. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Dusun Baru, Nagari Palangai, Kec Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 24 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 3. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Barat Alui, Nagari Air Haji, Kec Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 25 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 4. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Muaro Sakato, Nagari Tandikek Aia Jambu, Kec Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 26 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 5. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Balik Parit, Nagari IV Koto Mudiak, Kec Batang Kapas | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |
| 27 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 6. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Bakau Sarumpun, Nagari Carocok Anau, Kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---------------------------|----|----|-------------|--|--|------|
| 28 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya | 7. Paket percontohan budidaya nila di kolam / tambak (50000 bibit nila dan 2000 kg pakan) | Rangkiang Balirik, Nagari Lumpo, Kec Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |
| 29 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin 15 PK (unit) | Laut Berkah, Nagari Koto Baru Rawang Sungai Tunu Barat, Kec Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 185.000.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 2. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin 15 PK (unit) | Kasian Ombak, Nagari Pasar Gompong, Kec Lengayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 111.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin 8 PK (unit) | Nelayan Menyongsong, Nagari Amping Parak, Kec Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 142.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 4. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin 8 PK (unit) | Nelayan Berbakti, Nagari Amping Parak, Kec Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 142.000.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 5. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin Long Tile 6,5 PK (unit) | Beta Bahari Mandiri, Nagari Lansano Taratak, Kec Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 34 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 6. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa mesin Long Tile 6,5 PK (unit) | Tanjung Samudera, Nagari Kudo-kudo, Kec Pancung Soal | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 7. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa Jaring Monofilament (unit) | Mutiara Laut, Nagari Pasar Surantih, Kec Sutera | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 8. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa Jaring Monofilament (unit) | Tuo Sakato, Nagari Koto nan tigo IV Koto Hilir | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 37 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 9. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan berupa Jaring Monofilament (unit) | Biduk Jaring, Nagari Ampang Pulai, Kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK) | | | | | | | | | |
| 39 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil | Terlaksananya pendampingan kegiatan provinsi dan pusat bidang pemberdayaan nelayan kecil (bulan) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 85.000.000 | | | SKPD |
| 40 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Balai Sekaya Maritim | Terkelolanya Balai Sekaya Maritim (bulan) | Kec Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 30.000.000 | | | SKPD |
| 41 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | | | | | | | | | |
| 42 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan | Tersalurkannya KUR Perikanan (orang) | Ilindrapura Selatan, Kec Pancung Soal | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro Gakin) | Terlaksanakannya kegiatan pro gerakan anti kemiskinan (kampung) | Sungai Tunu, Kec Ranah Pesisir | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |
| 44 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil | Terlaksananya kegiatan DAK Bidang (bulan) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 25.749.000 | | | SKPD |
| 45 | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat | | | | | | | | | |
| 46 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Penyediaan Sarana dan Pasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Poklahsar penerima paket pengolahan dan pemasaran yang memadahi (Poklahsar) | Camau Laut, Nagari Pasar Baru, Kec Bayang | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD |
| 47 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | Dikenalkan produk kelautan dan perikanan Kab Pessel (kali) Painan - Padang - Jakarta | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 48 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi gemar makan ikan (orang) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp | 115.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|---------------------------|----|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 49 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan | 1. Jumlah pengawasan mutu yang dilaksanakan (kali) 2. Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan bina mutu | Kab Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 110.000.000 | | | SKPD | |
| 50 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | 1. Jumlah masyarakat yang mengikuti bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan (85 orang) 2. Jumlah poklhasr yang mengikuti pelatihan pengolahan (5 poklhasr) 3. Jumlah produk perikanan yang bersertifikasi (4 produk) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 85 | Rp | 200.000.000 | | | SKPD | |
| 51 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan | Terlaksananya kegiatan provinsi dan pusat bidang bina usaha dan pengolahan hasil perikanan (bulan) | Nagari Painan, Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 40.000.000 | | | SKPD | |
| 52 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan | Terbangunnya bangsal pengolahan hasil perikanan (unit) | Karang Tengah Permai, Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Kec Koto XI Tarusan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 1.000.000.000 | | | SKPD | |
| 53 | Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) | Api-Api Bayang - Muarogadang Linggo Sari Baganti | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 100.000.000 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 4.134.704.000 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|--|-------------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersediaannya Listrik Air, Telpn dan Internet untuk menunjang operasional kantor serta pemasangan jaringan listrik | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 208.310.000 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Honor 7 Orang Pengelola Keuangan, Honor 2 orang Tenaga Administrasi Perkantoran, Honor 1 orang Petugas Absensi Elektronik , Honor 2 Orang Tenaga Keamanan dan Honor 2 Orang Pramukantor, 1 orang sopir | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 207.856.000 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa cleaning service | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 143.000.000 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpeliharanya peralatan kerja dinas | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 35.224.200 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pembelian ATK (1 Kantor Kabupaten dan 15 BPK) | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 120.999.780 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Cetak dan Penggandaan Untuk Kabupaten dan Kecamatan (1 Kantor Kabupaten dan 15 BPK) | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 51.801.750 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik untuk Kabupaten dan BBH Bayang, BBU Padang Laban, Gudang Alsintan Padang Laban | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 10.417.825 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan Buku-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 13.640.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--------------------|---------------------------|-----|----|-------------|--|--|------|
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 51.909.000 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas di luar daerah | Provinsi dan Pusat | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 240.130.000 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas di dalam daerah | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 144.595.000 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | | | | | | | | | |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua Bagi Penyuluh Pertanian Lapangan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya personal komputer/PC serta Tersedianya printer | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp | 52.000.000 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya Meja Rapat, Meja 1/2 Biro, dan Kursi serta Tersedianya Lemari Aset dan Arsip Besi | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 9 | Rp | 145.000.000 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas dan 15 BPK (Balai Penyuluh Kecamatan) | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 154.605.000 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 25 unit kendaraan dinas roda dua | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 178.643.000 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapan aparatur | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 220 | Rp | 75.000.000 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bertambahnya pengetahuan dan wawasan ASN Dipertahorbun | kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 50.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------|---------------------------|------|----------------|--|--|------|
| 20 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | | | | | | | | |
| 21 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) | Jumlah LKMA yang dibina , Jumlah LKMA yang direvitalisasi, Jumlah LKMA yang mampu membuat laporan keuangan dengan baik, Luas lahan petani yang difasilitasi | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 2175 | Rp 170.000.000 | | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan | Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Jumlah Alsintan yang disalurkan, | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 59 | Rp 940.216.000 | | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan | Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Terpelihara alsintan Brigade Tanam, Tersedianya biaya operasional escavator | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 75 | Rp 173.173.500 | | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan | Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna | Terlatihnya operator alsintan (penggunaan alat tanam) | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 60 | Rp 72.598.000 | | | SKPD |
| 26 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan | Pengembangan Teknologi Budidaya Padi | Terlaksananya sosialisasi budidaya padi SRI, Terlaksananya percontohan budidaya padi SRI, Jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi organik, Terlaksananya percontohan budidaya padi organik dan Terlaksananya sertifikasi lahan pertanian organik | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 54 | Rp 400.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|-------------|---------------------------|--------|----|----------------|--|--|------|
| 27 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan | Jumlah bibit gambir yang disalurkan, Jumlah bibit pala yang disalurkan, Jumlah bibit cengek yang disalurkan, Jumlah bibit kakao yang disalurkan, Replanting sawit yang dilaksanakan dan Jumlah bibit kelapa sawit yang disalurkan | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 591680 | Rp | 18.281.300.000 | | | SKPD |
| 28 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian | Tersalurkannya bibit unggul padi , Tersalurkannya bibit unggul jagung, Demplot bibit unggul jagung di lahan tidur dan pekarangan, Jumlah sarana angkut pertanian (kendaraan angkut roda tiga), Jumlah benih dasar padi varietas bawaan yang dihasilkan untuk penangkar dan Jumlah benih dasar padi varietas sarai sarumpun yang dihasilkan untuk penangkar | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 428 | Rp | 448.500.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|---------------------------|-------|----|---------------|--|--|------|
| 29 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pengembangan Tanaman Hortikultura | Terlaksananya pelatihan penangkaran tanaman hortikultura, Jumlah bibit jeruk yang disalurkan kepada kelompok tani, Jumlah bibit kelengkeng yang disalurkan kepada kelompok tani, Jumlah bibit pisang yang disalurkan kepada kelompok tani, Jumlah bibit jahe yang disalurkan kepada kelompok tani, Jumlah bibit manggis yang disalurkan kepada kelompok tani, Jumlah bibit jahe yang disalurkan kepada kelompok tani dan Jumlah bibit Cabe yang disalurkan kepada kelompok tani | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 54525 | Rp | 1.290.500.000 | | | SKPD |
| 30 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura | Laporan hasil pengamatan dan pengendalian OPT Tanaman Pangan dan hortikultura, Terlaksananya pengadaan pestisida ramah lingkungan, Bimtek pengendalian OPT dan Tersedianya sprayer | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 108 | Rp | 249.000.000 | | | SKPD |
| 31 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pengendalian Hama Perkebunan | Jumlah gerakan pengendalian hama perkebunan serta Tersedianya Pestisida Hayati | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 150.000.000 | | | SKPD |
| 32 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pembenahan dan Pengolah Data Statistik Pertanian | Tersedianya buku statistik pertanian | Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 169.589.000 | | | SKPD |
| 33 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | Terfasilitasinya kegiatan yang bersumber dana dari Propinsi dan Pusat | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 98.797.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|---------------------------|-----|----------------|--|--|------|
| 34 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat | Terlaksananya pengadaan Bibit Sawit | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 110.000.000 | | | SKPD |
| 35 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida | Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang diuji serta Kios pupuk subsidi yang dipantau | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp 60.000.000 | | | SKPD |
| 36 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Sekolah Lapang Budidaya Komoditi Hortikultura | Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang good agriculture practise (SL-GAP) Cabe Merah | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp 50.000.000 | | | SKPD |
| 37 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit padi, Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit jagung, Jumlah petani yang mengikuti lapang pengendalian hama dan penyakit cabe, Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit bawang | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 160 | Rp 274.285.000 | | | SKPD |
| 38 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT Tanaman Perkebunan | Jumlah petani yang mengikuti SL Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 82.500.000 | | | SKPD |
| 39 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | Peningkatan kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan | Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan ,Pertemuan Teknis Penyuluh yang dilaksanakan, Penilaian BPK, PPL, Kelompok Tani Berprestasi yang dilaksanakan, Demplot budidaya pertanian, Tersedianya BPP Model, Jumlah Program penyuluhan dan pertanian yang dihasilkan | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 175 | Rp 715.000.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|---------------------------|-----|------------------|--|--|------|
| 40 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | Operasional Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan | Jumlah PPL yang difasilitasi operasional | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 152 | Rp 300.000.000 | | | SKPD |
| 41 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian | Panjang JUT yang dibangun/rehabilitasi, Jalan Produksi yang dibangun, Lanjutan Pembangunan BPP dan Terehabilitasinya jaringan irigasi | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp 5.135.000.000 | | | SKPD |
| 42 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian | Kegiatan Satker 08 yang difasilitasi | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 110.000.000 | | | SKPD |
| 43 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | DAK Bidang Pertanian | 'Lancarnya pelaksanaan DAK Bidang Pertanian | kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 160.000.000 | | | SKPD |
| 44 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | Penunjang DAK Bidang Pertanian | | | | | | | | |
| 45 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Brigade Pertanian | Jumlah sarana mobilisasi alsintan dari Brigade Tanam ke lahan petani | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 320.000.000 | | | SKPD |
| 46 | Peningkatan Kelembagaan Petani | Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum | Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 100 | Rp 195.500.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|---------------------------|-----|----|---------------|--|--|------|
| 47 | Peningkatan Kelembagaan Petani | LOAN IPDMIP | Jumlah petani yang mengikuti SL Budidaya Padi, Jumlah penyuluh swadaya yang mengikuti pelatihan, Jumlah penyuluh yang difasilitasi operasionalnya, Jumlah kunjungan lapangan antar nagari, Penilaian PPL dan Kelompok Tani teladan, Jumlah demonstrasi alsintan, Jumlah kunjungan petani lintas kabupaten, Jumlah pelatihan simpan pinjam pada kelompok tani | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 210 | Rp | 1.200.000.000 | | | SKPD |
| 48 | Peningkatan Kelembagaan Petani | Penunjang LOAN IPDMIP | Kegiatan Loan IPDMIP yang difasilitasi | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 84.000.000 | | | SKPD |
| 49 | Peningkatan Kelembagaan Petani | Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani | Jumlah pertemuan kontak tani yang dilaksanakan | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 65.000.000 | | | SKPD |
| 50 | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jumlah lantai jemur yang direhab, Jumlah RMU yang dibangun, Jumlah RMU yang revitalisasi, Jumlah UP3HP yang dilatih mengolah ubi kayu dan jagung, Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman hortikultura (peralatan masak) dan Jumlah UP3HP yang dilatih pengolahan pisang | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 1.188.002.000 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|------------|---------------------------|----|----|-------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 51 | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan | Jumlah alat pengolahan kopi yang disalurkan,Jumlah mesin kampo gambir yang disalurkan,Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil tanaman perkebunan ,Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman perkebunan yang disalurkan | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp | 300.000.000 | | | SKPD | | |
| 52 | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Agriwisata | Jumlah kelompok pengelola agrowisata yang dibina | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 18 | Rp | 210.000.000 | | | SKPD | | |
| 53 | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan | Rapat-rapat Koordinasi dan asosiasi bidang perkebunan yang dilaksanakan Serta Jumlah asosiasi perkebunan yang terbentuk (sawit) | Kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp | 60.000.000 | | | SKPD | | |
| 54 | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah | Partisipasi Dinas dalam event Festival Langkisau dan Mandeh, pawai alegoris 17 agustus dan APKASI,Keikutsertaan dalam pameran agribisnis dan expo komoditi perkebunan,Keikutsertaan dalam Penas Tani tahun 2020,Jumlah lomba tanaman pangan dan hortikultura sesuai GAP dan SOP yang dilaksanakan | kab Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp | 225.000.000 | | | SKPD | | |
| TOTAL | | | | | | | | Rp | 35.471.092.055 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|--|---|---------------------------|--------|-----------|----------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 90.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya pembayaran honor 9 org pengelola keuangan dan pembayaran honor 9 org tenaga kerja non PNS | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 139.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor kab dan kec. dan pembayaan honor 3 org tenaga non PNS | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 45.000.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 6 unit komputer, 13 unit laptop, 15 printer, 10 unit ac, 1 unit genset | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 22.700.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kabupaten dan Kecamatan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 84.853.821,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 41.249.400,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianyaa komponen instalasi listrik/penerangan kantor kabupaten, RPH dan 5 Puskesmas Kecamatan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 11.510.420,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undaangaan, 3 koran dan 1 paket buku | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 5.500.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan dan minum | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 29.122.500,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Tersedianya biaya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 88.200.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya biaya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 185.250.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya biaya penunjang operasional dan perencanaan dan pelaporan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 35.000.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer PC 6 unit, 6 unit printer, 1 unit vacum cleaner dan 1 set infokus | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 180.415.870,00 | | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya pengadaan mebeuler kantor 5 set | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 103.000.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, halaman serta pagar dan pembayaran honor 2 orang tenaga non PNS | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 193.000.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 2 unit kendaraan roda 4 , 46 unit kendaraan roda 2 dan pembayaran tenaga 3 orang honor non PNS | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 237.460.000,00 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik | Tersusunnya laporan tahunan dan statistik 2 dokumen | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 34.922.360,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---------------------------|------|-------------------|--|--|------|
| 19 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | Apresiasi 27 org petugas medis dan paramedis, operasional petugas medis dan paramedis 11000 dosis, pengambilan 10 sampel HPR tersangka rabies dan penanggulangan gangguan reproduksi 100 ternak | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 219.337.500,00 | | | SKPD |
| 20 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah | Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah 15 kecamatan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 94.611.610,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies | Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies 3500 ekor HPR | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3500 | Rp 128.005.000,00 | | | SKPD |
| 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan | 1 paket obat obatan, 1 paket peralatan medis dan veteriner, 5500 dosis vaksin rabies dan 5500 dosis vaksin SE | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 289.133.000,00 | | | SKPD |
| 23 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan | Peredaran obat hewan yang diawasi 15 Kecamatan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 20.975.000,00 | | | SKPD |
| 24 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Penyusunan Ranperda Rabies | Tersusunya ranperda rabies 1 perda | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 69.331.121,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Pembibitan dan Perawatan Ternak | Terlaksananya penyediaan sarana dan pemeliharaan ternak 82 ekor ternak sapi di P4 Lengayang | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 320.000.000,00 | | | SKPD |
| 26 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat | Terdistribusinya bibit ternak kepada masyarakat miskin | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 27 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB | Pelayanan aseptor ib 6000 ekor dan perlengkapan petugas IB 3 unit | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6000 | Rp 469.954.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|---------------------------|----|----------------------------|-------------|-------------|------|
| 28 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan | Terlaksananya pelatihan manajemen agribisnis 80 orang dan 3 unit pengembangan SPR | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 29 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Pengembangan Ternak Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan | Tersedianya bibit sapi unggul 8 kelompok, penangkaran itik bayang 1200 ekor dan tersedianya bibit ayam lokal 2 kelompok | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 650.000.000,00 | | | SKPD |
| 30 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Penunjang Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok penerima kegiatan bantuan 2 kelompok | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 175.597.000,00 | | | SKPD |
| 31 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Peternakan | Terfasilitasinya pengembangan modal usaha peternakan 40 peternak dan 500 polis AUTS/K | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 148.707.120,00 | | | SKPD |
| 32 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 350.000.000,00 | | | SKPD |
| 33 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Penerapan Teknologi Peternakan | Terlaksananya penerapan teknologi peternakan | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 278.650.000,00 | | | SKPD |
| 34 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan | Tersedianya sarana dan prasarana mendukung usaha peternakan mesin chopper 3 unit dan pencacah sagu 3 unit | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 35 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan | Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan (DAK) | Terlaksananya pembangunan RPH dan Pasar ternak | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 1.000.000.000,00 | | | SKPD |
| 36 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan | Penunjang Kegiatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK) | Terlaksananya penyusunan dokumen RPH dan pasar ternak | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 6.390.485.722,00 | Rp - | Rp - | |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|--|--------|---------------------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 51.460.500,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 92.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 20.400.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 30.000.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 10.000.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 6.000.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 45.000.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 175.000.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 55.000.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 350.000.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------|---------------------------|-----|----|------------------|--|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 44.000.000,00 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Pengadaan Mebeuler | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp | 63.000.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 82.500.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 650.000.000,00 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pembangunan Toilet | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 57 | Rp | 28.500.000,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 22 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 30.000.000,00 | | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 160 | Rp | 1.500.000.000,00 | | | SKPD |
| 24 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 450.000.000,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Zona Integritas | Pelaksanaan Zona Integritas | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 25.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--------|---------------------------|-----|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 26 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 25.000.000,00 | | | SKPD | |
| 27 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan Maturisasi SPIP | Pelaksanaan Maturitas SPIP | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 450 | Rp | 30.000.000,00 | | | SKPD | |
| 28 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Sosialisasi LHKPN | Sosialisasi LHKPN | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 30.000.000,00 | | | SKPD | |
| 29 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Review Dokumen Perencanaan dan Laporan | Review Dokumen Perencanaan dan Laporan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 100.000.000,00 | | | SKPD | |
| 30 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 120.000.000,00 | | | SKPD | |
| 31 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 600 | Rp | 465.000.000,00 | | | SKPD | |
| 32 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriks dan Aparatur Pengawasan | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 300.000.000,00 | | | SKPD | |
| 33 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri | Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri | Painan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp | 75.000.000,00 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 5.282.860.500,00 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Badan Pendapatan

Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|--|------------------|---------------------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran air dan Listrik kantor Badan Pendapatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 63.888.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran gaji pelaksana kegiatan baik PNS maupun Non PNS | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 144.800.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan seluruh bahan dan alat kebersihan kantor serta honor petugas kebersihan kantor | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 33.505.820,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan alat tulis kantor badan pendapatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 56.000.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedia barang cetakan dan penggandaan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 38.712.520,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan seluruh komponen listrik dan penerangan gedung kantor Badan Pendapatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 9.291.006,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar maupun majalah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 3.600.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan penjaga kantor serta honor bagi pramu kantor Badan Pendapatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 74.135.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Penyediaan biaya akomodasi untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 141.175.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Penyediaan biaya akomodasi untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 76.350.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Penyusunan buku dan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 68.196.680,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pengadaan kendaraan dinas dan operasional untuk pegawai | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan peralatan pendukung gedung kantor | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Pengadaan meubiler pendukung untuk pegawai | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp - | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan gedung kantor dan pembayaran honor penjaga kantor | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 33.000.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan pembayaran honor sopir kantor | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 120.461.000,00 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan seluruh peralatan gedung kantor | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 45.550.000,00 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Perbaikan ruang pelayanan kantor badan pendapatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 440.000.000,00 | | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Perbaikan 2 unit kendaraan dinas | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 10.000.000,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Pengadaan baju seragam kerja lapangan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 60 | Rp 58.000.000,00 | | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|---------------------------|---|-------------------|--|--|------|
| 24 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 25 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | | | | | | | | |
| 26 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengadaan Barang Kuasi | Pencetakan barang kuasi dan retribusi daerah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 119.938.745,00 | | | SKPD |
| 27 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengadaan dan Pemeliharaan Media Reklame | Pembuatan media reklame baru dan pemeliharaan media reklame yang sudah ada | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 315.000.000,00 | | | SKPD |
| 28 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I | Pemungutan pajak PBB-P2, Hotel, Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral bukan Logam, Reklame dan BPHTB di wilayah I | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 125.819.126,00 | | | SKPD |
| 29 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II | Pemungutan pajak PBB-P2, Hotel, Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral bukan Logam, Reklame dan BPHTB di wilayah II | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 106.739.623,00 | | | SKPD |
| 30 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III | Pemungutan pajak PBB-P2, Hotel, Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral bukan Logam, Reklame dan BPHTB di wilayah III | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 130.960.500,00 | | | SKPD |
| 31 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Laporan PAD | Penyusunan laporan PAD dalam satu tahun anggaran | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 28.889.780,00 | | | SKPD |
| 32 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pendataan dan Validasi Pajak Daerah | Pendataan dan validasi seluruh pajak daerah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 57.984.613,00 | | | SKPD |
| 33 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | Memverifikasi berkas BPHTB dan SKP Reklame | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 128.129.278,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------|
| 34 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pembinaan Pelaksana Pemungut PBB-P2 | Seminar tata cara pemungutan pajak daerah | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 103.479.911,00 | | | SKPD |
| 35 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah | Penyesuaian data laporan PAD | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 28.889.780,00 | | | SKPD |
| 36 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Monitoring dan Evaluasi PAD | Pengawasan terhadap penerimaan PAD | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 186.474.500,00 | | | SKPD |
| 37 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Zonasi Nilai Tanah | Zonasi nilai tanah untuk setiap kecamatan | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 1.200.000.000,00 | | | SKPD |
| 38 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik | Penerimaan PAD berbasis elektronik | Badan Pendapatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 245.499.938,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 4.194.470.820,00 | Rp - | Rp - | |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|--|---------------|---------------------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 108.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 10.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 95.250.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terbayarnya jasa petugas kebersihan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 38.819.400,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 34.297.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 47.332.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPSDM selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 8.866.300,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 14.500.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 44.577.500,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 110.300.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 64.700.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersusunnya dokumen laporan OPD selama 12 bulan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 21 | Rp 25.400.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC 3 unit, Laptop 2 unit, hardisk eksternal 2 unit) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp 81.400.000,00 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (1 unit genset 30 kVA) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 180.000.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor (ruang arsip, pembuatan selokan belakang kantor, ruang konsultasi, kanopi) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 198.000.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (3 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp 181.962.500,00 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC dan 16 unit printer) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 71 | Rp 41.942.000,00 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 21 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------------------|-----|-------------------|--|--|------|
| 22 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | | | | | | | | |
| 23 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 30.000.000,00 | | | SKPD |
| 24 | Program Pendidikan Kedinasan | Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme | Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparaturnya (diklat PIM II : 4 orang, diklat PIM III : 8 orang) | Kec. IV Jurai, Padang dan Jakarta | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 663.960.000,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Pendidikan Kedinasan | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS | Jumlah peserta yang mengikuti diklat prajabatan | Kab. Pessel dan Padang | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp 401.276.834,00 | | | SKPD |
| 26 | Program Pendidikan Kedinasan | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | Jumlah peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. IV | Kab. Pessel dan Padang | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp 389.700.000,00 | | | SKPD |
| 27 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Seleksi Penerimaan Calon PNS | Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi ASN | Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Kec. Dalam Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp 169.680.000,00 | | | SKPD |
| 28 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar | Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan surat ijin belajar yang terbit (bantuan 20 orang, ijin/tugas belajar 200 orang) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 220 | Rp 178.654.000,00 | | | SKPD |
| 29 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pemberian Reward pada PNS Teladan (Berkinerja) dan Satya Lencana Karya Satya | Jumlah PNS yang diberikan reward berdasarkan golongan dan berkas satya lencana yang diusulkan (PNS teladan 9 orang, satya lencana 150 orang) | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 159 | Rp 160.000.000,00 | | | SKPD |
| 30 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) | Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP | Kec. dlm Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp 48.600.000,00 | | | SKPD |
| 31 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN | Jumlah sidang yang dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kinerja ASN dan evaluasi kinerja ASN | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 7 | Rp 110.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---------------------------|------|----|----------------|--|------|
| 32 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu | Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu | pekanbaru padang & kec. dalam kab. pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 500 | Rp | 43.226.700,00 | | SKPD |
| 33 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai | jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional | Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Kec. Dalam Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp | 57.233.400,00 | | SKPD |
| 34 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai | Jumlah PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda dan APS | Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Kec. Dalam Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 300 | Rp | 75.754.000,00 | | SKPD |
| 35 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS | Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1600 | Rp | 162.300.000,00 | | SKPD |
| 36 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | Tersusunnya tata naskah dinas kepegawaian | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 2700 | Rp | 72.000.000,00 | | SKPD |
| 37 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan | Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp | 40.819.000,00 | | SKPD |
| 38 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil | Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah pegawai negeri sipil | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 300 | Rp | 34.240.700,00 | | SKPD |
| 39 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembekalan Calon PNS | Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan calon PNS | Kec. IV Jurai dan Padang | Kabupaten Pesisir Selatan | 300 | Rp | 65.000.000,00 | | SKPD |
| 40 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembekalan Pasangan Pra Nikah ASN | Terpenuhiya pembekalan pasangan pra nikah ASN | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | Rp | 25.000.000,00 | | SKPD |
| 41 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penyusunan Formasi PNS | Tercapainya penyusunan formasi PNS | Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Kec. Dalam Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | 1236 | Rp | 56.438.000,00 | | SKPD |
| 42 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK | Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 130.000.000,00 | | SKPD |
| 43 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi dan monitoring disiplin ASN (30 kasus dan 30 orang) | Kec. IV Jurai dan Padang | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp | 75.000.000,00 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|-------------|-------------|------|
| 44 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas | Jumlah peserta yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas | Kec. IV Jurai dan Padang | Kabupaten Pesisir Selatan | 125 | Rp 65.348.000,00 | | | SKPD |
| 45 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Jumlah peserta yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 198.760.000,00 | | | SKPD |
| 46 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pemetaan Potensi ASN | Tercapainya pemetaan potensi ASN | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 225 | Rp 154.300.000,00 | | | SKPD |
| 47 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN | Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan mengenai peraturan ASN | Kec. IV Jurai | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 165.000.000,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 4.907.637.334,00 | Rp - | Rp - | |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terdistribusinya Surat Menyurat Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Anggaran untuk tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.200.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan dari Pihak Ketiga dalam bentuk sewa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3000 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya dana untuk Pengelola Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 300.000.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya dana untuk pembayaran Tenaga Kebersihan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 615.000.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 51 | Rp 90.000.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kelancaran Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 90.000.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya anggaran untuk jamuan Makan dan Minum Tamu | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.850.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|----|---------------------|--|--|------|
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Tersedianya dana untuk koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.500.000.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya dana untuk Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 75.000.000,00 | | | SKPD |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Tersedianya anggaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Sekretariat daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 190.000.000,00 | | | SKPD |
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH) | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH) | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 85.000.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH) | Tersedianya dana Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk KDH/WKDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 1.400.000.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 6 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Penunjang Operasional Kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 60.000.000,00 | | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 1.150.000.000,00 | | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 650.000.000,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeuler | Tersedianya Meubiler kantor | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terpeliharanya Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 750.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------|---------------------------|----|---------------------|--|--|------|
| 24 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretaris daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 510.000.000,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung/Bangunan Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 750.000.000,00 | | | SKPD |
| 26 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala daerah / Wakil Kepala daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 725.000.000,00 | | | SKPD |
| 27 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 51 | Rp 1.250.000.000,00 | | | SKPD |
| 28 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 510.000.000,00 | | | SKPD |
| 29 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | |
| 30 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler | | | | | | | | |
| 31 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam melaksanakan Tugas Kedinasan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 32 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pengeolaan Administrasi Kepegawaian | Tertatanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 33 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Penyusunan Buku Kode Etik Pegawai | Terbitnya buku Kode Etik Pegawai | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 60 | Rp 90.000.000,00 | | | SKPD |
| 34 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) | Terbinanya Unit Kesehatan Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |
| 35 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan | Terawasinya Aliran Kepercayaan di Kabupaten Pesisir selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 36 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Tersedianya Laporan Penanganan Konflik Sosial di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 21 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 37 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) | Tersedianya laporan Koordinasi dan Pertemuan Pimpinan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 350.000.000,00 | | | SKPD |
| 38 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Terpeliharanya Kantrantibmas dan tercegahnya Tindak Kriminal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Terbitnya rekomendasi untuk Penelitian | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 85 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 39 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Tersedianya Rekomendasi Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah dan Jumlah rapat kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 40 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Pemantauan Kegiatan Orang Asing | Terpantaunya aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 41 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika | Tersosialisasinya Penyalahgunaan Narkotika dan Tertanganinya Siswa dan Aparatur Sipil Negara yang terindikasi Narkoba | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 890.000.000,00 | | | SKPD |
| 42 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan | Terbitnya Perda tentang penyalahgunaan obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 95.000.000,00 | | | SKPD |
| 43 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Terpublikasinya informasi pembangunan Daerah yang dikelola oleh Media Massa di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 27 | Rp 900.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|------|-------------------|--|--|------|
| 44 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2560 | Rp 300.000.000,00 | | | SKPD |
| 45 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Publikasi dan Promosi Daerah | Terpublikasinya Kegiatan-Kegiatan pemerintah Daerah, Terpublikasinya peliputan kegiatan Pemda dan Terpublikasinya Promosi Media luar ruangan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 350 | Rp 900.000.000,00 | | | SKPD |
| 46 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Bimtek Kehumasan dan Jurnalistik | Meningkatnya SDM Tenaga Kehumasan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Meningkatnya SDM Tenaga Jurnalistik dalam mempublikasikan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp 350.000.000,00 | | | SKPD |
| 47 | program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Pemasyarakatan Olahraga Aparatur | Meningkatnya Derajat Kesehatan Aparatur Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 24 | Rp 35.000.000,00 | | | SKPD |
| 48 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah | Tertatanya arsip Lingkup Setda | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2500 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 49 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Terawasinya Kios Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 162 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 50 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah | Terkendalnya Harga dan Inflasi Daerah di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 51 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Monitoring dan Evaluasi BUMD | Tersedianya data Lembaga Keuangan dan BUMD di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 200 | Rp 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 52 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah | Terkendalnya Program Pembangunan Daerah dan terciptanya Koordinasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp 120.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|-----|-------------------|--|--|------|
| 53 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan | Tersedianya Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Tersedianya Dokumen Standar Harga Barang | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 147.000.000,00 | | | SKPD |
| 54 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 180 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 55 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Penyusunan Prosedur Kegiatan | Tersedianya Dokumen Prosedur Kegiatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 42.000.000,00 | | | SKPD |
| 56 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati | Terbitnya Dokumen analisis tentang kebijakan Pembangunan Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 24 | Rp 120.000.000,00 | | | SKPD |
| 57 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 110.000.000,00 | | | SKPD |
| 58 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 110.000.000,00 | | | SKPD |
| 59 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan | Tersedianya Dana untuk Koordinasi Bidang administrasi Umum | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 110.000.000,00 | | | SKPD |
| 60 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ | Tersedianya paket Fasilitas dan Klarifikasi Lelang | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 175 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 61 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 80.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------------|----|----|----------------|--|--|------|
| 62 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik untuk OPD | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp | 182.900.000,00 | | | SKPD |
| 63 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Penyelesaian Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa | Tertanganinya Kasus Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 64 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tersedianya Buku sistem dan Prosedur Pengadaan barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 75 | Rp | 75.000.000,00 | | | SKPD |
| 65 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Pembinaan PBJ Bagi PA/KPA/Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengaduan Sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP | Terbinanya OPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 20 | Rp | 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 66 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Pembinaan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemda Kab. Pesisir Selatan | Bertambahnya kemampuan Pegawai Negeri dalam Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp | 80.000.000,00 | | | SKPD |
| 67 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Okupasi | Meningkatnya kompetensi Okupaksi bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp | 80.000.000,00 | | | SKPD |
| 68 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan | Tersedianya data untuk Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp | 150.000.000,00 | | | SKPD |
| 69 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Tersedianya Dokumen Aset / Barang Daerah Lingkup Sekretariat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp | 250.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------------|-----|-------------------|--|--|------|
| 70 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya | Terpilihnya 3 besar Camat terbaik, Tersusunnya Nilai Peringkat Camat Tingkat Provinsi dan Meningkatnya kemampuan bagi Camat dan Staf Camat di Lingkungan Pemda Pessel | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp 175.000.000,00 | | | SKPD |
| 71 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Terfasilitasinya Kunjungan kerja Pejabat Negara | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 80 | Rp 250.500.000,00 | | | SKPD |
| 72 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 | Rp 30.000.000,00 | | | SKPD |
| 73 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan | Meningkatnya Etos Kerja Keprotokolan di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 0 | Rp 300.000.000,00 | | | SKPD |
| 74 | Advokasi Pemerintah Daerah | Penyelesaian Sengketa Hukum | Tertanganinya Kasus Perkara Hukum di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp 274.000.000,00 | | | SKPD |
| 75 | Advokasi Pemerintah Daerah | Sosialisasi Produk Hukum Daerah | Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 60.000.000,00 | | | SKPD |
| 76 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Publikasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya Buku Lembaran Daerah dan Tersedianya Buku Berita Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 540 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 77 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah dan tersedianya Dokumen Peraturan Bupati | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 90 | Rp 275.000.000,00 | | | SKPD |
| 78 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari | Tersedianya Dokumen Keputusan Bupati dan Tersedianya Dokumen Peraturan Nagari | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 560 | Rp 70.000.000,00 | | | SKPD |
| 79 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan Ranham | Tersedianya Laporan Ranham | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 80 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Terfasilitasinya Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota, Terfasilitasinya serah terima Jabatan camat dan Tersesainya Kasus/permasalahan Pemerintahan di Kecamatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp 130.000.000,00 | | | SKPD |
| 81 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah | Tersedianya Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah dan Tersedianya asistensi Mou kerjasama dengan pihak ketiga | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 8 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 82 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan | Terfasilitasinya penetapan dan penegasan batas nagari | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 85.000.000,00 | | | SKPD |
| 83 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Kerjasama Rantau | Terfasilitasinya Nagari binaan perantau tingkat Kabupaten | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 3 | Rp 60.000.000,00 | | | SKPD |
| 84 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan | Terselenggaranya Rakor Kecamatan dan Tersedianya Laporan Evaluasi pelaksanaan Tupoksi Camat | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |
| 85 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Rakor Camat dengan Perangkat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 70.000.000,00 | | | SKPD |
| 86 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami | Tersedianya Dokumen nama rupa bumi unsur buatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 54.000.000,00 | | | SKPD |
| 87 | Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH) | Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya (KDH) | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya untuk KDH | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 65 | Rp 295.000.000,00 | | | SKPD |
| 88 | Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | Penataan dan Penguatan Lembaga | Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 25 | Rp 105.000.000,00 | | | SKPD |
| 89 | Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda | Penataan Jabatan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp 90.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------|---------------------------|-----|-------------------|--|--|------|
| 90 | Peningkatan IMTAQ | Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam | Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir selatan, Peringatan besar islam dan Tersedianya Dana untuk Jasa Pihak Ketiga pada Mesjid yang dikelola Pemerintah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 38 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 91 | Peningkatan IMTAQ | Pembinaan Guru TPQ/TPSQ | Terbinanya Guru TPQ/TPSQ | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 92 | Peningkatan IMTAQ | Safari Keagamaan Pemerintah Daerah | Terbinanya Mesjid dan Mushalla yang dikunjungi oleh Pemerintah Daerah dan Terbinanya Pondok Al Quran oleh Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 104 | Rp 580.000.000,00 | | | SKPD |
| 93 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ | Terfasilitasinya Cabang-Cabang MTQ yang diperlombakan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 10 | Rp 750.000.000,00 | | | SKPD |
| 94 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan | Tersedianya Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD) dan Terfasilitasinya Jemaah Haji Pessel | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 116 | Rp 175.000.000,00 | | | SKPD |
| 95 | Peningkatan IMTAQ | Pembinaan Didikan Shubuh Tergiat | Terbinanya Lembaga Didikan Subuh | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | Rp 70.000.000,00 | | | SKPD |
| 96 | Peningkatan IMTAQ | Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan | Tersedianya data untuk Kesejahteraan Rakyat dan urusan Keagamaan di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 97 | Peningkatan IMTAQ | Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial | Terverifikasinya proposal Hibah dan Bansos untuk Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 150 | Rp 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 98 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan | Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 99 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Monev Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Monev Kinerja Perangkat Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 100 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Tersedianya Dokumen LPPD | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----------------|---------------------------|----|-------------------|--|--|------|
| 101 | Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Tersedianya Dokumen LKPJ | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Rp 65.000.000,00 | | | SKPD |
| 102 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Tersedianya Laporan pelayanan publik perangkat daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 125.000.000,00 | | | SKPD |
| 103 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik | Tersedianya Data Inovasi Pelayanan Publik | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Rp 120.000.000,00 | | | SKPD |
| 104 | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik | Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik | Tersedianya Laporan Pelayanan Publik | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | Rp 175.000.000,00 | | | SKPD |
| 105 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam | Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pertambangan dan Galian C | Tersedianya data perkembangan dan Potensi Pertambangan dan Galian C di Kab.Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 71 | Rp 130.000.000,00 | | | SKPD |
| 106 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam | Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan Perkebunan | Tersedianya data perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 14 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 107 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Tersedianya anggaran untuk Upacara hari Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya dan temu ramah antara veteran dengan Pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 23 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 108 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Peningkatan Kesadaran Bela Negara | Terlatihnya Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara di kabupaten Pesisir selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 5 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |
| 109 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) | Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Konsultasi serta komunikasi antar warga masyarakat dengan pemerintah Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 250.000.000,00 | | | SKPD |
| 110 | Program pendidikan politik masyarakat | Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ormas/LSM | Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 40 | Rp 100.000.000,00 | | | SKPD |
| 111 | Program pendidikan politik masyarakat | Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | Tersosialisasinya UU dan Peraturan Bidang Politik di Pesisir Selatan | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 200.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 112 | Program pendidikan politik masyarakat | Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai | Terverifikasinya Parpol yang mengajukan Bantuan Keuangan dan Meningkatnya Pengetahuan Pengurus dalam mengelola Keuangan partai | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | Rp 175.000.000,00 | | | SKPD | |
| 113 | Program pendidikan politik masyarakat | Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Terpantaunya perkembangan politik di daerah dan terpantaunya Pemilihan Kepala Daerah | Pesisir Selatan | Kabupaten Pesisir Selatan | 30 | Rp 625.000.000,00 | | | SKPD | |
| TOTAL | | | | | | | Rp 30.125.400.000,00 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kec. Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|---|--|---|------------------------------|------------------|--------|-----------|---------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya jasa surat menyurat | Kantor Camat Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 4.800.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | kelancaran pelaksanaan tugas | Kantor Camat Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 7.800.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | tertipe pengelolaan adm keuangan | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 47.100.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya alat tulis kantor | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 12.200.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 19.500.150,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kenyamanan dan kebersihan kantor | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 18.655.800,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | kelancaran pelaksanaan tugas | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 2.280.230,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya surat kabar dan buku per UU | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 7.980.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan dan minuman | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 27.775.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | jumlah koord.konsultasi yang diikuti ke luar daerah | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 9.750.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | jumlah koord.konsultasi yang diikuti dalam daerah | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 81.060.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 6.050.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp | 24.500.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | | | | | | | | | | |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | tersedianya peralatan kantor yang baik | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp 3.000.000,00 | | | SKPD | | |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | tersedianya peralatan kantor yang baik | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp 12.200.000,00 | | | SKPD | | |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | tersedianya kend.dinas dan operasional yg layak | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp 30.862.000,00 | | | SKPD | | |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | | | |
| 19 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | | | | | | | | | | |
| 20 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat | | | | | | | | | | |
| 21 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | | | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | | | | | | | | | | |
| 23 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | tersingronisasinya usulan musrembang kecamatan dengan forum perangkat daerah | Kantor Camat Koto XI Tarusan | Koto XI Tarusan | 0 | Rp 12.245.000,00 | | | SKPD | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 327.758.180,00 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Kec. Bayang

Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|---|------------|------------------|--------|------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Air dan Listrik | Kec Bayang | Bayang | 2 | Rp 20.920.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan | Kec Bayang | Bayang | 5 | Rp 71.724.991,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Dibayarkan | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 17.297.700,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Pembelian ATK | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 19.463.800,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penggandaan | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 19.592.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 17.019.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Surat Kabar | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 6.120.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Biaya Jamuan Makan Dan Minum | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 39.000.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Yang Diikuti Luar Daerah | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 28.441.402,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Koordinasi Yang Diikuti Dalam daerah | Kec Bayang | Bayang | 12 | Rp 60.000.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah Laporan Dan Perencanaan Yang Dibuat | Kec Bayang | Bayang | 15 | Rp 10.217.500,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Kec Bayang | Bayang | 1 | Rp 25.196.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas | Kec Bayang | Bayang | 1 | Rp 15.033.500,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|------------|--------|-----|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor | Kec Bayang | Bayang | 1 | Rp 24.000.000,00 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Unit Mobil 1 Sepeda Motor | Kec Bayang | Bayang | 2 | Rp 17.175.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat | Jumlah Sekolah Yang Dibina | Kec Bayang | Bayang | 1 | Rp 20.500.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum | Jumlah Penyelesaian Permasalahan Trantibum Yang Difasilitasi | Kec Bayang | Bayang | 17 | Rp 10.700.000,00 | | | SKPD |
| 18 | Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat | Jumlah nagari yang Dibina Dalam pengelolaan Keunagan nagari | Kec Bayang | Bayang | 17 | Rp 25.710.000,00 | | | SKPD |
| 19 | Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat | Jumlah PKK Nagari yang Dibina | Kec Bayang | Bayang | 17 | Rp 43.550.000,00 | | | SKPD |
| 20 | Program Keluarga Berencana | Pembinaan Keluarga Berencana | Jumlah PUS yang Menggunakan KB | Kec Bayang | Bayang | 35 | Rp 16.462.500,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah Peringatan Hari yang Difasilitasi | Kec Bayang | Bayang | 1 | Rp 19.812.500,00 | | | SKPD |
| 22 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan | Kec Bayang | Bayang | 350 | Rp 10.700.000,00 | | | SKPD |
| 23 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah Musrebang RKPD yang Diselenggarakan Kecamatan bayang | Kec Bayang | Bayang | 17 | Rp 15.462.500,00 | | | SKPD |
| 24 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi | Kec Bayang | Bayang | 3 | Rp 62.105.000,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Upacara hari Besar Nasional | Kec Bayang | Bayang | 7 | Rp 30.000.000,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 646.203.393,00 | Rp - | Rp - | |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Kec. Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|---|------------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik yang dibayar | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 12.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Honorarium pengelola keuangan yang dibayar | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 114.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan dan pembelian peralatan kebersihan | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 13.326.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 22.644.500,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang penggandaan dan jenis barang yang di cetak | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 7.779.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah sarana dan prasarana instalasi listrik dan penerangan bangunan | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 1.685.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah surat kabar | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 4.200.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan minum rapat dan tamu | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 23.625.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 15.000.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, serta jumlah koordinasi muspika | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 58.160.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah Laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan yang di buat | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 10.275.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah peralatan rumah dinas | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 1.500.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------------|--------------|----|----|---------------|--|------|
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah kelengkapan gedung kantor | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | - | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 10.000.000,00 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah pemeliharaan rumah dinas | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | - | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 11.500.000,00 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 36.650.000,00 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 3.000.000,00 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | |
| 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat | Jumlah nagari yang mengikuti BBGRM dan jumlah kegiatan/lomba UKS dan kecamatan sehat yang diikuti. | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 20.340.000,00 | | SKPD |
| 22 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum | Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 9.930.000,00 | | SKPD |
| 23 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau | Jumlah pohon/tanaman yang ditanam | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | - | | SKPD |
| 24 | Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat | Jumlah PKK yang di bina | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 9 | Rp | 52.062.500,00 | | SKPD |
| 25 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah promosi daerah yang diikuti | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp | 20.197.500,00 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|------------------------|--------------|----|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 26 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Jumlah rekomendasi/surat yang dikeluarkan | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 8 | Rp 7.260.000,00 | | | SKPD |
| 27 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaran Musrenbang RKPD | Jumlah musrenbang RKPD yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 1 | Rp 8.295.000,00 | | | SKPD |
| 28 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari | Jumlah pengelola keuangan dan pemerintahan nagari yang baik dan jumlah pelaksanaan pemilihan wali nagari yang difasilitasi | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 9 | Rp 19.960.000,00 | | | SKPD |
| 29 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan | Jumlah MTQ yang diikuti dan pelaksanaan lembaga didikan subuh | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 12 | Rp 48.825.000,00 | | | SKPD |
| 30 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Jumlah pelaksanaan PHBN | Kecamatan Batang Kapas | Batang Kapas | 1 | Rp 72.975.000,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 605.189.500,00 | Rp - | Rp - | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------------|-----------|-----|------------------|--|--|------|
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 12 | Rp 76.000.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 12 | Rp 6.547.000,00 | | | SKPD |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 12 | Rp 20.374.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 12 | Rp 3.000.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | | | | | | | | |
| 18 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat | | | | | | | | |
| 19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat | | | | | | | | |
| 20 | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba | JUmlah sekolah yang di lakukan penyuluhan | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 9.750.000,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | | | | | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | | | | | | | | |
| 23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Terselenggaranya penyelenggaraan Pelayanan terpadu Kecamatan | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 10.255.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---------------------|-----------|-----|------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 24 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata | | | | | | | | | | |
| 25 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Rencana kerja pembangunan (RKP Kecamatan Tahun 2020) | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 14.150.000,00 | | | SKPD | | |
| 26 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari | Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan nagari | Terselenggaranya pembinaan keuangan Nagari | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 9.600.000,00 | | | SKPD | | |
| 27 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru | | | | | | | | | | |
| 28 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan | Jumlah kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja) | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 5.500.000,00 | | | SKPD | | |
| 29 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | 1. Jumlah upacara yang diselenggarakan | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 20.000.000,00 | | | SKPD | | |
| 30 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | 2. Jumlah peringatan Harri Jadi Kabupaten Pesisir Selatan/Festval Langkisau | Kecamatan Lengayang | Lengayang | 100 | Rp 12.000.000,00 | | | SKPD | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 408.200.000,00 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kec. Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan | |
|----|--|--|---|----------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pembayaran pramu kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 50.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 10.000.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran honorarium pengelola keuangan | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 55.000.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pembayaran tenaga kebersihan dan penjaga kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 14.300.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pembelian peralatan kebersihan | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 3.700.000,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pembelian alat tulis kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 21.900.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pembelian materai | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 2.100.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pembayaran sarana dan prasarana instalasi listrik dan penerangan bangunan | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 4.000.000,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pembayaran surat kabar | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 5.000.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pembayaran makan minum rapat dan tamu | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 25.000.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 40.000.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 84.000.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Pembayaran pembuatan laporan perencanaan dan pelaporan yangn dibuat | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 7.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------------|------------------------|-----|----|---------------|--|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pembelian kelengkapan gedung kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 40.000.000,00 | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Pembayaran pemeliharaan rumah dinas | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 3.000.000,00 | | SKPD |
| 17 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pembayaran pemeliharaan gedung kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 15.000.000,00 | | SKPD |
| 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 30.000.000,00 | | SKPD |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | | | | | | | | |
| 20 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Pembayaran pemeliharaan peralatan/perlengkapan rumah dinas | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 2.000.000,00 | | SKPD |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pembayaran pemeliharaan peralatan gedung kantor | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 4.000.000,00 | | SKPD |
| 22 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat | Pembayaran kegiatan UKS Kecamatan pada sekolah yang dibina dan bulan gotong royong | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 16.500.000,00 | | SKPD |
| 23 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum | Pembayaran penyelesaian permasalahan trantibum | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 19.000.000,00 | | SKPD |
| 24 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Monev Rastra | Pembayaran nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 8.800.000,00 | | SKPD |
| 25 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Pembayaran rekomendasi yang dikeluarkan untuk fasilitasi penyelenggaraan PATEN | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp | 15.000.000,00 | | SKPD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------------------------|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 26 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat | Pembayaran pembinaan produk unggulan | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp 4.000.000,00 | | | SKPD | | |
| 27 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Pembayaran musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp 15.500.000,00 | | | SKPD | | |
| 28 | Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2 | Pembayaran penerimaan PBB terhadap target | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp 3.000.000,00 | | | SKPD | | |
| 29 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Pembayaran pelaksanaan PHBN | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | 100 | Rp 30.000.000,00 | | | SKPD | | |
| TOTAL | | | | | | | Rp | 527.800.000,00 | Rp | - | Rp | - |

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Kec. Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program | Kegiatan | Uraian Usulan Pekerjaan | Lokasi | Daerah (Kec/Kel) | Volume | Pagu | | | Asal Usulan |
|----|---|--|---|------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | APBD Kota | APBD Prov | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening listrik | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 4.000.000,00 | | | SKPD |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan | Kecamatan Silaut | Silaut | 10 | Rp 65.400.000,00 | | | SKPD |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 52 | Rp 49.000.000,00 | | | SKPD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 12 | Rp 12.155.000,00 | | | SKPD |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Kecamatan Silaut | Silaut | 12 | Rp 9.147.600,00 | | | SKPD |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Kecamatan Silaut | Silaut | 12 | Rp 2.000.000,00 | | | SKPD |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Silaut | Silaut | 3 | Rp 1.800.000,00 | | | SKPD |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan minum rapat dan tamu | Kecamatan Silaut | Silaut | 12 | Rp 15.424.300,00 | | | SKPD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | Kecamatan Silaut | Silaut | 36 | Rp 34.500.000,00 | | | SKPD |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | Kecamatan Silaut | Silaut | 480 | Rp 102.234.000,00 | | | SKPD |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan | Kecamatan Silaut | Silaut | 7 | Rp 5.000.000,00 | | | SKPD |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 11 | Rp 4.455.000,00 | | | SKPD |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 2 | Rp 6.000.000,00 | | | SKPD |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------------|--------|-----|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 28.792.900,00 | | | SKPD |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Silaut | Silaut | 4 | Rp 70.388.000,00 | | | SKPD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | Kecamatan Silaut | Silaut | 10 | Rp 4.700.000,00 | | | SKPD |
| 17 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat | Terlaksananya bulan bhakti gotong royong | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 3.154.700,00 | | | SKPD |
| 18 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum | Fasilitasi penyelesaian permasalahan trantibum | Kecamatan Silaut | Silaut | 3 | Rp 6.723.400,00 | | | SKPD |
| 19 | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Terlaksananya pameran budaya dan pemasaran UMKM sumber daya lokal Kecamatan Silaut | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 20.000.000,00 | | | SKPD |
| 20 | Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan | Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN | Terlaksananya fasilitasi pennyelenggaraan PATEN | Kecamatan Silaut | Silaut | 150 | Rp 5.800.000,00 | | | SKPD |
| 21 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | Terlaksananya fasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan dan pembangunan kawasan perhutanan sosial | Kecamatan Silaut | Silaut | 14 | Rp 6.776.000,00 | | | SKPD |
| 22 | Program perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Terlaksananya Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 14.252.500,00 | | | SKPD |
| 23 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2 Daerah | Tercapaiannya target penerimaan PBB di Kecamatan Silaut | Kecamatan Silaut | Silaut | 75 | Rp 7.803.000,00 | | | SKPD |
| 24 | Peningkatan IMTAQ | Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan | Terlaksananya fasilitasi kegiatan MTQ, PHBI, Safari Ramadhan dan Didikan Subuh | Kecamatan Silaut | Silaut | 80 | Rp 67.660.000,00 | | | SKPD |
| 25 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | Terlaksananya peringatan HUT-RI | Kecamatan Silaut | Silaut | 1 | Rp 22.748.100,00 | | | SKPD |
| TOTAL | | | | | | | Rp 569.914.500,00 | Rp - | Rp - | |